



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam perjalanan tahun anggaran 2020 terdapat perubahan-perubahan Kebijakan Nasional dan terjadinya bencana non alam penyebaran pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang berdampak terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

Mengingat ... 2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang ... 3

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan ... 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan ... 5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83).
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775).
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 nomor 11);
33. Peraturan ... 8

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II ... 9

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal, 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA  
BARAT (4/106/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah karena perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan perencanaan

pembangunan oleh pemerintah daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah dan beberapa peraturan menteri terkait dengan pedoman teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka beserta turunan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD dan Kecamatan di Kabupaten Majalengka;

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia, Jawa Barat maupun Kabupaten Majalengka menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah beserta pelaksanaan pembangunan Tahun 2020.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Majalengka akan menajamkan lagi perencanaan dengan Perubahan RPJMD, meningkatkan efisiensi dan efektifitas prosedur, menata regulasi, peningkatan SDM, meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan, pola pikir dan budaya kerja ASN.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasa I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 20218-2023

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENAH DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 20218-2023



## Daftar Isi

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| Daftar Isi.....  | i           |
| Daftar Tabel.....  | v           |
| Daftar Gambar.....   | xiv         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>I-1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | I-1         |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....   | I-9         |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....   | I-14        |
| 1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten<br>Majalengka dengan Rencana Pembangunan<br>Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan<br>Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat ..... | I-14        |
| 1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten<br>Majalengka dengan RPJPD, RKPD, Renstra-<br>PD dan Renja-PD.....  | I-15        |
| 1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten<br>Majalengka dengan RTRW Kabupaten<br>Majalengka .....   | I-15        |
| 1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten<br>Majalengka dengan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD<br>Kabupaten Majalengka.....                 | I-16        |
| 1.4 Maksud dan Tujuan.....   | I-17        |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....   | I-17        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>   | <b>II-1</b> |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....  | II-1        |
| 2.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah.....  | II-10       |
| 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana.....   | II-20       |
| 2.1.3 Aspek Demografi .....  | II-24       |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....   | II-27       |
| 2.2.1 Fokus Kesejahteraan.....   | II-27       |
| 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....  | II-35       |
| 2.2.3 Fokus Seni dan Budaya.....   | II-40       |



|                | Halaman  |
|----------------|--|
| 2.3            | Aspek Pelayanan Umum..... II-40  |
| 2.3.1          | Fokus Layanan Urusan Wajib..... II-40  |
| 2.3.2          | Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II-59   |
| 2.3.3          | Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II-74  |
| 2.3.4          | Fokus Layanan Penunjang Urusan..... II-86  |
| 2.4            | Aspek Daya Saing Daerah..... II-89   |
| 2.4.1          | Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... II-90   |
| 2.4.2          | Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-93   |
| 2.4.3          | Fokus Sumber Daya Manusia..... II-95   |
| 2.5            | Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018..... 111  |
| 2.6            | Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19 ..... 124   |
| 2.7            | Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) /<br>Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (TPB) ..... 125 |
| 2.8            | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 126   |
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... III-1</b>   |
| 3.1            | Kinerja Keuangan Masa Lalu..... III-1  |
| 3.1.1          | Kinerja Pelaksanaan APBD..... III-2  |
| 3.1.2          | Neraca Daerah..... III-9   |
| 3.2            | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... III-11   |
| 3.2.1          | Proporsi Penggunaan Anggaran..... III-15   |
| 3.2.2          | Analisis Pembiayaan..... III-16  |
| 3.3            | Kerangka Pendanaan..... III-19   |
| 3.3.1          | Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III-22  |
| 3.3.2          | Proyeksi Pembiayaan Daerah..... III-32   |
| 3.3.3          | Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III-35   |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH..... IV-1</b>   |
| 4.1            | Permasalahan Pembangunan..... IV-1   |
| 4.1.1          | Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... IV-1  |
| 4.1.2          | Aspek Pelayanan Umum..... IV-4   |
| 4.1.3          | Urusan Pilihan..... IV-12  |
| 4.1.4          | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah..... IV-15  |
| 4.1.5          | Aspek Daya Saing..... IV-17  |
| 4.2            | Isu Strategis..... IV-18   |
| 4.2.1          | Isu Strategis Internasional..... IV-18   |



|   | Halaman    |
|---|------------|
| 4.2.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) .....                  | IV-18      |
| 4.2.1.2 Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA .....      | IV-20      |
| 4.2.2 Isu Strategis Nasional.....   | IV-21      |
| 4.2.2.1 Pandemi Covid-19.....   | IV-21      |
| 4.2.2.2 Isu Strategis berdasarkan RPJMN 2020-2024.....  | IV-23      |
| 4.2.2.3 Isu Strategis Nasional Berkaitan Dengan Pengarusutamaan Gender.....                           | IV-31      |
| 4.2.2.4 Isu Strategis Nasional Berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)..... | IV-31      |
| 4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat .....   | IV-33      |
| 4.2.4 Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar .....  | IV-34      |
| 4.2.4.1 Kabupaten Tasikmalaya .....   | IV-34      |
| 4.2.4.2 Kabupaten Ciamis .....  | IV-35      |
| 4.2.4.3 Kabupaten Sumedang .....  | IV-36      |
| 4.2.4.4 Kabupaten Cirebon .....   | IV-37      |
| 4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Majalengka.....   | IV-38      |
| 4.2.5.1 Penelaahan RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 .....  | IV-38      |
| 4.2.5.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025.....                        | IV-41      |
| 4.2.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD.....                          | IV-44      |
| 4.2.7 Penetapan Isu-isu Strategis Kabupaten Majalengka.....   | IV-54      |
| <b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>  | <b>V-1</b> |
| 5.1 Visi.....   | V-1        |
| 5.2 Misi.....   | V-2        |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran.....   | V-4        |



|   | Halaman |
|---|---------|
| 5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 .....  | V-29    |
| BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....                                  | VI-1    |
| 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik Tematik dan Integratif ..... | VI-1    |
| 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial.....                          | VI-10   |
| 6.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang.....                           | VI-12   |
| 6.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang.....                               | VI-13   |
| 6.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis.....                        | VI-14   |
| 6.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.....                                   | VI-26   |
| BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....                | VII-1   |
| 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan .....  | VII-1   |
| 7.2 Program Perangkat Daerah .....  | VII-4   |
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ....                                 | VIII-1  |
| BAB IX PENUTUP .....  | IX-1    |

**DAFTAR TABEL**

|            |  | Halaman |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.1  | Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka.....  | II-2    |
| Tabel 2.2  | Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka.....  | II-4    |
| Tabel 2.3  | Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka  | II-7    |
| Tabel 2.4  | Potensi Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Majalengka.....   | II-7    |
| Tabel 2.5  | Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-9    |
| Tabel 2.6  | Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka .....   | II-18   |
| Tabel 2.7  | Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka .....   | II-21   |
| Tabel 2.8  | Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten Majalengka.....  | II-23   |
| Tabel 2.9  | Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-25   |
| Tabel 2.10 | Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka tahun 2020 .....   | II-25   |
| Tabel 2.11 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016-2020 .....   | II-26   |
| Tabel 2.12 | PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020....  | II-27   |
| Tabel 2.13 | Nilai sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah) ..... | II-27   |
| Tabel 2.14 | Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka .....                   | II-29   |
| Tabel 2.15 | PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-32   |
| Tabel 2.16 | Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional .....   | II-34   |
| Tabel 2.17 | Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-34   |



|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.18 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional dalam Persen ..... | II-35 |
| Tabel 2.19 | Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....           |       |
| Tabel 2.20 | Perbandingan Angka Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....              | II-37 |
| Tabel 2.21 | Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....  | II-38 |
| Tabel 2.22 | Persentase Balita Gizi Buruk kabupaten Majalengka.....  | II-38 |
| Tabel 2.23 | Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....  | II-40 |
| Tabel 2.24 | Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-40 |
| Tabel 2.25 | Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-41 |
| Tabel 2.26 | Perkembangan APKSD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....  | II-41 |
| Tabel 2.27 | Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-42 |
| Tabel 2.28 | Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-42 |
| Tabel 2.29 | Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....          | II-43 |
| Tabel 2.30 | Perkembangan Kondisi Bangunan Ruang Kelas Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                           | II-43 |
| Tabel 2.31 | Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....             | II-44 |
| Tabel 2.32 | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                              | II-44 |
| Tabel 2.33 | Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                                  | II-45 |
| Tabel 2.34 | Perkembangan Rasio Posyandu di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-46 |
| Tabel 2.35 | Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik Kabupaten Majalengka Tahun 2020.....                             | II-47 |
| Tabel 2.36 | Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2016-2020 .....   | II-48 |



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.37 | Jumlah Tenaga Medis Dokter di Kabupaten Majalengka Tahun 2020.....   | II-48 |
| Tabel 2.38 | Rasio Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....  | II-50 |
| Tabel 2.39 | Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020..... | II-51 |
| Tabel 2.40 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-54 |
| Tabel 2.41 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-55 |
| Tabel 2.42 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2020 .....   | II-56 |
| Tabel 2.43 | Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-57 |
| Tabel 2.44 | Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-57 |
| Tabel 2.45 | Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-57 |
| Tabel 2.46 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perumahan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-58 |
| Tabel 2.47 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Permukiman di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-58 |
| Tabel 2.48 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....  | II-59 |
| Tabel 2.49 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-59 |
| Tabel 2.50 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....  | II-62 |
| Tabel 2.51 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2019.....   | II-63 |
| Tabel 2.52 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-64 |



|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.53 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                          | II-65 |
| Tabel 2.54 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....            | II-66 |
| Tabel 2.55 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020.....                               | II-67 |
| Tabel 2.56 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020..... | II-68 |
| Tabel 2.57 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                               | II-69 |
| Tabel 2.58 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                | II-70 |
| Tabel 2.59 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....         | II-70 |
| Tabel 2.60 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 (dalam Miliar rupiah).....             | II-71 |
| Tabel 2.61 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020.....   | II-71 |
| Tabel 2.62 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                   | II-72 |
| Tabel 2.63 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                                 | II-72 |
| Tabel 2.64 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                                | II-73 |
| Tabel 2.65 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perpustakaan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                              | II-74 |
| Tabel 2.66 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kearsipan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                                 | II-74 |
| Tabel 2.67 | Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                          | II-75 |
| Tabel 2.68 | Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                    | II-75 |



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.69 | Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                       | II-76 |
| Tabel 2.70 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Pertanian Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020                                 | II-77 |
| Tabel 2.71 | Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-77 |
| Tabel 2.72 | Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-77 |
| Tabel 2.73 | Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-78 |
| Tabel 2.74 | Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-78 |
| Tabel 2.75 | Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....   | II-78 |
| Tabel 2.76 | Indikator Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                                  | II-79 |
| Tabel 2.77 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                         | II-83 |
| Tabel 2.78 | Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2016-2020.....  | II-84 |
| Tabel 2.79 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perdagangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                         | II-85 |
| Tabel 2.80 | Jenis Industri di Kabupaten Majalengka Tahun 2020 .....  | II-85 |
| Tabel 2.81 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                       | II-86 |
| Tabel 2.82 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Majalengka..... | II-87 |
| Tabel 2.83 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                   | II-87 |
| Tabel 2.84 | Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....                 | II-88 |
| Tabel 2.85 | Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Sekretariat Dewan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                        | II-89 |
| Tabel 2.86 | Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020.....   | II-91 |
| Tabel 2.87 | Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka.....  | II-92 |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.88 | Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                           | II-92  |
| Tabel 2.89 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                      | II-94  |
| Tabel 2.90 | Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2016-2020 .....  | II-94  |
| Tabel 2.91 | Jumlah Demonstrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 .....                                    | II-95  |
| Tabel 2.92 | Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Majalengka .....         | II-98  |
| Tabel 2.93 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.....                | II-113 |
| Tabel 2.94 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2020 .....               | II-124 |
| Tabel 2.95 | Pencapaian Sustainable Development Goals(SDGs)/Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (TPB) .....     | II-127 |
| Tabel 2.96 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....   | II-128 |
| Tabel 3.1  | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....       | III-3  |
| Tabel 3.2  | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....         | III-6  |
| Tabel 3.3  | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....      | III-8  |
| Tabel 3.4  | Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....                    | III-9  |
| Tabel 3.5  | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019..... | III-16 |
| Tabel 3.6  | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....                                  | III-17 |
| Tabel 3.7  | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....                | III-17 |
| Tabel 3.8  | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....              | III-18 |
| Tabel 3.9  | Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2020.....                                | III-29 |
| Tabel 3.10 | Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2023.....                                 | III-30 |
| Tabel 3.11 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020.....                             | III-34 |



|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Tabel 3.12 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023.....  | III-35 |
| Tabel 3.13 | Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023.....                            | III-36 |
| Tabel 3.14 | Rincian Komponen Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023..... | III-36 |
| Tabel 3.15 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020.....  | III-38 |
| Tabel 3.16 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023.....  | III-38 |
| Tabel 3.17 | Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020.....                      | III-41 |
| Tabel 3.18 | Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023.....                      | III-42 |
| Tabel 4.1  | Daftar Proyek Prioritas Strategis ( <i>Major Project</i> ) di Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.....             | IV-26  |
| Tabel 4.2  | Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.....                     | IV-27  |
| Tabel 4.3  | Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 Tentang Tanpa Kemiskinan.....                                     | IV-45  |
| Tabel 4.4  | Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 Tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak.....                        | IV-46  |
| Tabel 4.5  | Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 2 tentang Tanpa Kelaparan.....                                      | IV-48  |
| Tabel 4.6  | Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....              | IV-49  |
| Tabel 4.7  | Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....                        | IV-51  |
| Tabel 4.8  | Isu Strategis Pembangunan.....  | IV-70  |
| Tabel 5.1  | Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kab. Majalengka.....  | V-1    |
| Tabel 5.2  | Misi Pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kab. Majalengka.....   | V-3    |
| Tabel 5.3  | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Majalengka.....   | V-5    |



|            |   | Halaman |
|------------|---|---------|
| Tabel 5.4  | Komparasi Tujuan dan Sasaran antar Dokumen Perencanaan yang Terkait.....  | V-6     |
| Tabel 5.5  | Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023.....  | V-13    |
| Tabel 5.6  | Perbandingan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Prediksi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Prediksi Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023..... | V-14    |
| Tabel 5.7  | Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.....   | V-16    |
| Tabel 5.8  | Penanggungjawab Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 .....  | V-19    |
| Tabel 5.9  | Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka .....  | V-25    |
| Tabel 5.10 | Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Program .....   | V-28    |
| Tabel 5.11 | Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Majalengka .....   | V-29    |
| Tabel 6.1  | Kerangka Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.....  | VI-3    |
| Tabel 6.2  | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.....  | VI-5    |
| Tabel 6.3  | Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan di Kabupaten Majalengka.....  | VI-17   |
| Tabel 6.4  | Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Kabupaten Majalengka.....  | VI-17   |
| Tabel 6.5  | Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka.....   | VI-20   |
| Tabel 6.6  | Keselarasan Program Daerah dalam Perubahan RPJMD dengan Program Prioritas dalam RPJMN.....  | VI-22   |
| Tabel 6.7  | Indikasi Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2022-2023.....  | VI-31   |
| Tabel 7.1  | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020 (Struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).....   | VII-2   |



|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Tabel 7.2 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).....                          | VII-3   |
| Tabel 7.3 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019.....   | VII-5   |
| Tabel 7.4 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Tahun 2020.....   | VII-14  |
| Tabel 7.5 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023.....  | VII-59  |
| Tabel 8.1 | Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.....  | VIII-2  |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 .....  | VIII-3  |
| Tabel 8.3 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023..... | VIII-4  |
| Tabel 8.4 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2019.....      | VIII-9  |
| Tabel 8.5 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2021..... | VIII-27 |
| Tabel 8.6 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023..... | VIII-47 |



## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023..... | I-8     |
| Gambar 2.1 Batas wilayah administratif Kabupaten.....  | II-2    |
| Gambar 2.2 Peta wilayah administratif Kabupaten Majalengka.....  | II-3    |
| Gambar 2.3 Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Struktur Ruang Jawa Barat 2025.....  | II-4    |
| Gambar 2.4 Data Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....   | II-8    |
| Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya .....  | II-10   |
| Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2015-2015 .....                                 | II-32   |
| Gambar 2.7 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 .....  | II-33   |
| Gambar 2.8 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....   | II-35   |
| Gambar 2.9 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 .....  | II-36   |
| Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 .....  | II-39   |
| Gambar 2.11 Aksi Konvergensi / Integrasi Penurunan Stunting .....  | II-52   |
| Gambar 2.12 Peta Lokus Desa Intervensi Stunting Kabupaten Majalengka .....   | II-52   |
| Gambar 2.13 Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 .....   | II-96   |
| Gambar 2.14 Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019.....  | II-97   |
| Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota .....  | II-126  |
| Gambar 4.1 Misi dan Arah Presiden.....   | IV-25   |
| Gambar 6.1 Posisi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD.....                            | VI-2    |

# **BAB I**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan sebagai sebuah proses sangat erat kaitannya dengan perluasan kebebasan melalui perwujudan hak-hak dasar manusia dan peningkatan kapabilitas manusia. Pembangunan harus membebaskan manusia dari kelaparan, kurang gizi, wabah penyakit, kematian prematur, bebas buta huruf, bisa berpartisipasi dalam keputusan publik dan proses politik, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk bekerja, mempunyai kebebasan berusaha, dan kesempatan dalam menentukan keputusan ekonomi dalam berbagai kondisi (Sen, 1999).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara.

Lebih lanjut, Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Pasangan Dr. H. Karna Sobahi M.M.Pd dan Tarsono D. Mardiana yang dilantik pada tanggal 19 Desember 2018, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2023 dan telah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019. Dokumen RPJMD ini memuat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih sehingga menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Majalengka ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD karena telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;



2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah karena perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah dan beberapa peraturan menteri terkait dengan pedoman teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM);



6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka beserta turunan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD dan Kecamatan di Kabupaten Majalengka;
8. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu diakomodir dalam Perubahan RPJMD ini.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia, Jawa Barat maupun Kabupaten Majalengka menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah beserta pelaksanaan pembangunan Tahun 2020.

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2021, percepatan pemulihan dampak COVID-19 merupakan tambahan tema dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi dan kabupaten akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap



aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU), serta indikator IKK tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2020 ini.

Substansi RPJMD Kabupaten Majalengka yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah, yaitu (1) berorientasi proses dan (2) berorientasi substantif. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah berorientasi proses, terdiri atas:

**Politik**, pendekatan ini menitikberatkan pada program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

**Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

**Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan



untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;

**Atas-bawah (*top-down*)** dan **bawah-atas (*bottom-up*)**, kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Sedangkan pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah berorientasi substantif terdiri atas:

**Holistik-Tematik**, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

**Integratif**, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;

**Spasial**, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat;

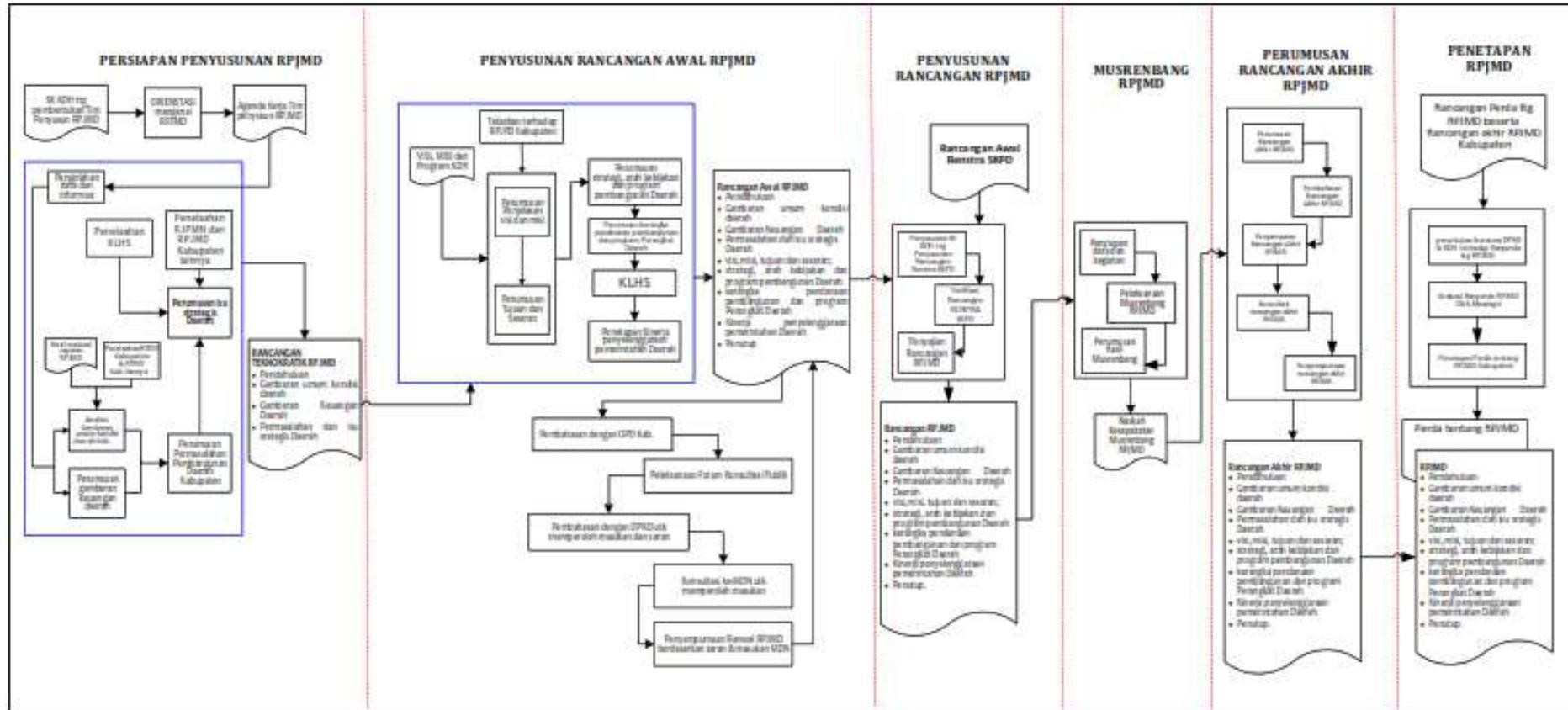


3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
4. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka;
5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; dan
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis dan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.



Gambar 1.1  
Tahapan dan Tatacara Penyusunan  
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023



Sumber: Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang



Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka



Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236); dan
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252).



36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat.**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan



nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program pembangunan daerah provinsi.

### **1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD**

Dokumen RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan IV RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.



### **1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka dengan RTRW Kabupaten Majalengka**

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Majalengka dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

### **1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka**

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan



memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka;



4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

**BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

**BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

**BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan isu strategis daerah memperhatikan isu internasional, nasional, dan regional Kabupaten Majalengka.



**BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

**BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

**BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Majalengka, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

**BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target dan capaian mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 dan target Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

**BAB IX : PENUTUP**

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

# **BAB II**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Dinamika pembangunan Kabupaten Majalengka menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks tantangan pun semakin berkembang bagi pemerintah daerah untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan capaian hasil pembangunan. Gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Majalengka terkini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang telah diterapkan maupun sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Gambaran ini meliputi *aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah*. Diharapkan melalui uraian analisis berbasis data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan efektif.

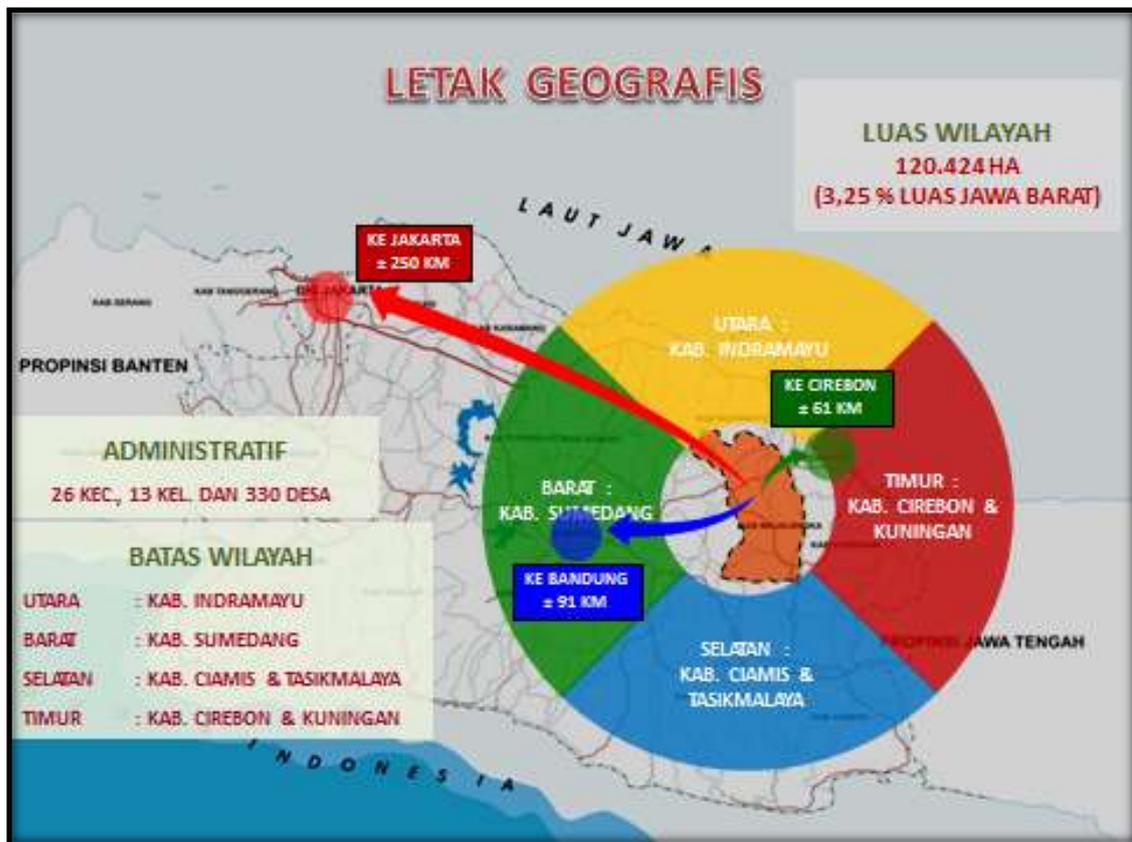
#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Analisis pada *aspek geografi* dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan *aspek demografi* menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat dengan luas 1.204,24 km<sup>2</sup> atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 km<sup>2</sup>). Secara geografis, Kabupaten Majalengka berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan titik koordinat 6<sup>o</sup>32'16,39" Lintang Selatan sampai dengan 7<sup>o</sup>4'24,75" Lintang Selatan dan 108<sup>o</sup>2' 30,87" Bujur Timur sampai dengan 108<sup>o</sup>24' 32,84" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 26 kecamatan, 330 desa dan 13 kelurahan, dengan batas wilayah, sebelah utara: Kabupaten Indramayu; sebelah timur: Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebelah selatan: Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; dan sebelah barat: Kabupaten Sumedang.



Gambar 2.1

Batas Wilayah Administratif Kabupaten Majalengka



Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

**Secara administratif**, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa, secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.  
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka

| No.           | Nama Kecamatan | Jumlah Desa      | Jumlah Kelurahan | No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan |
|---------------|----------------|------------------|------------------|-----|----------------|-------------|------------------|
| 1.            | Majalengka     | 4                | 10               | 14. | Sindangwangi   | 10          | -                |
| 2.            | Panyingkiran   | 9                | -                | 15. | Sukahaji       | 13          | -                |
| 3.            | Kadipaten      | 7                | -                | 16. | Sindang        | 7           | -                |
| 4.            | Dawuan         | 11               | -                | 17. | Cigasong       | 7           | 3                |
| 5.            | Kasokandel     | 10               | -                | 18. | Maja           | 18          | -                |
| 6.            | Kertajati      | 14               | -                | 19. | Argapura       | 14          | -                |
| 7.            | Jatitujuh      | 15               | -                | 20. | Banjaran       | 13          | -                |
| 8.            | Jatiwangi      | 16               | -                | 21. | Talaga         | 17          | -                |
| 9.            | Palasah        | 13               | -                | 22. | Cikijing       | 15          | -                |
| 10.           | Ligung         | 19               | -                | 23. | Cingambul      | 13          | -                |
| 11.           | Sumberjaya     | 15               | -                | 24. | Bantarujeg     | 13          | -                |
| 12.           | Leuwimunding   | 14               | -                | 25. | Lemahsugih     | 19          | -                |
| 13.           | Rajagaluh      | 13               | -                | 26. | Malausma       | 11          | -                |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>Kecamatan</b> |                  |     |                | <b>26</b>   |                  |
|               |                | <b>Desa</b>      |                  |     |                | <b>330</b>  |                  |
|               |                | <b>Kelurahan</b> |                  |     |                | <b>13</b>   |                  |

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.



Gambar 2.2.  
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Majalengka



Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Adapun untuk mengetahui luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Majalengka dijelaskan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2.  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Majalengka

| No.                         | Nama Kecamatan | Luas (Km <sup>2</sup> )                           | Persentase | No. | Nama Kecamatan | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Persentase |
|-----------------------------|----------------|---|------------|-----|----------------|-------------------------|------------|
| 1.                          | Majalengka     | 57,00   | 4,73       | 14. | Sindangwangi   | 31,76                   | 2,64       |
| 2.                          | Panyingkiran   | 22,98   | 1,91       | 15. | Sukahaji       | 32,52                   | 2,7        |
| 3.                          | Kadipaten      | 21,86   | 1,82       | 16. | Sindang        | 23,97                   | 1,99       |
| 4.                          | Dawuan         | 23,80   | 1,98       | 17. | Cigasong       | 24,17                   | 2,01       |
| 5.                          | Kasokandel     | 31,61   | 2,62       | 18. | Maja           | 65,21                   | 5,42       |
| 6.                          | Kertajati      | 138,36  | 11,49      | 19. | Argapura       | 60,56                   | 5,03       |
| 7.                          | Jatitujuh      | 73,66   | 6,12       | 20. | Banjaran       | 41,98                   | 3,49       |
| 8.                          | Jatiwangi      | 40,03   | 3,32       | 21. | Talaga         | 43,50                   | 3,61       |
| 9.                          | Palasah        | 38,69   | 3,21       | 22. | Cikijing       | 43,54                   | 3,62       |
| 10.                         | Ligung         | 62,25   | 5,17       | 23. | Cingambul      | 37,03                   | 3,07       |
| 11.                         | Sumberjaya     | 32,73   | 2,72       | 24. | Bantarujeg     | 66,52                   | 5,52       |
| 12.                         | Leuwimunding   | 32,46   | 2,7        | 25. | Lemahsugih     | 78,64                   | 6,53       |
| 13.                         | Rajagaluh      | 34,37   | 2,85       | 26. | Malausma       | 45,04                   | 3,74       |
| <b>Kabupaten Majalengka</b> |                | <b>Luas Kabupaten Majalengka (Km<sup>2</sup>)</b> |            |     |                | <b>1.204,24</b>         |            |
|                             |                | <b>Persentase</b>                                 |            |     |                | <b>100,00</b>           |            |

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.3.  
Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Struktur Ruang Jawa Barat 2025



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat, Tahun 2009-2029.



**Secara geostrategis**, Kabupaten Majalengka diapit oleh 2 PKN, yakni PKN Cirebon Raya dan Bandung Raya, serta berada di perlintasan antara Jawa Barat (Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbang Kertosusila. Kondisi wilayah Kabupaten Majalengka yang strategis, didukung dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui agenda pembangunan Nawacita serta sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati Aerocity, Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), kawasan industri dan jalur kereta api diharapkan mampu mengakselerasi perwujudan koridor sekaligus mengurangi beban aktivitas ekonomi di Jawa Barat Bagian Timur (melalui PKW Kadipaten). Sinergitas setiap kebijakan dan program pemerintah di tingkat daerah hingga nasional dibutuhkan guna mendukung realisasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan pengembangan Jawa Barat Bagian Timur.

**Karakteristik topografi** wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat ketinggian dan kemiringan. Secara umum wilayah Kabupaten Majalengka terbagi menjadi 3 klasifikasi ketinggian dan kemiringan, yaitu dataran rendah (0-100 mdpl, kemiringan 5-8%), dataran sedang (100-500 mdpl, kemiringan 15-25%) dan dataran tinggi (>500 mdpl, kemiringan 25-40%). Wilayah yang terkategori dataran rendah seluas 28,7%; dataran sedang/menengah 31,27% dan dataran tinggi yang luasnya mencapai 40,03% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Kondisi bentang alamnya sebagian besar melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan aliran sungai dan mata air mengalir ke arah utara, sehingga areal persawahan tumbuh subur di wilayah bagian utara Kabupaten Majalengka. Sedangkan perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di sekitar lereng Gunung Ciremai dan Gunung Cakrabuana. Kondisi ini selain sangat berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang dan pengembangan potensi wilayah, juga menyebabkan adanya daerah rawan longsor. Adapun distribusi ketiga topografi yang ada di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. **Dataran rendah**, mempunyai kemiringan lahan antara 0-15% meliputi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai kemiringan 0-15% seluruh



wilayahnya terdiri atas Kecamatan Cigasong, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung dan Palasah.

2. **Berbukit gelombang**, kemiringan lahannya berkisar antara 15%-40%, meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Kasokandel, Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, dan Talaga.
3. **Perbukitan terjal**, kemiringan lahannya >40%, meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, Sumberjaya, dan Talaga.

**Kondisi geologis** Kabupaten Majalengka, berdasarkan sebaran dan struktur batuanannya meliputi: *Aluvium* seluas 17.162 Ha (14,25%), *Pleistocene Sedimentary Facies* seluas 13.716 Ha (13,39%), *Miocene Sedimentary Facies* seluas 23,48 Ha (19,50%), *Undiferentionet Vulcanic Product* seluas 51.650 Ha (42,89%), *Pliocene Sedimentary Facies*, seluas 3.870 Ha (3,22%), *Liparite Dacite* seluas 179 Ha (0,15%), *Eosene*, seluas 78 Ha (0,006%), *Old Quaternary Volkanik Product* seluas 10.283 Ha (8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berada di sekitar Gunung Ciremai dan berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur.

**Kondisi hidrologi** Kabupaten Majalengka meliputi sumber daya air dan potensi ketersediaan air. Sumber daya air dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan yang menjadi sumber utama kebutuhan air, khususnya untuk pengairan sawah diperoleh dari dua sungai besar, yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung, serta beberapa anak sungai lainnya. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang dan Talagaherang. Sementara potensi air permukaan lainnya berada di sejumlah tempat yang memiliki debit air tinggi yang berasal dari sumber mata air. Pada umumnya sumber mata air tersebut berada di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Secara umum kondisi ketersediaan sumber mata air bawah tanah (ABT) cukup baik,



meskipun beberapa kecamatan masih kurang baik seperti Kertajati, Dawuan dan Ligung. Potensi Air Permukaan seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Potensi Air Permukaan Di Kabupaten Majalengka

| No.    | Nama Sungai  | Bendungan             | Areal Layanan (Ha) | Debit (liter/detik) |               |
|--------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|        |              |                       |                    | Maksimal            | Minimal       |
| 1      | Cilutung     | Kamun                 | 9.289              | 50,73               | 0,41          |
| 2      | Cideres      | Tirtanegara, Cigasong | 2.741              | 3,94                | 0,65          |
| 3      | Cikeruh      | Cikeruh, Cibusul      | 3.354              | 10,68               | 0,99          |
| 4      | Ciherang     | Ciherang              | 1.009              | 1,76                | 0,3           |
| 5      | Cikadongdong | Cikemangi, Cikondang  | 2.411              | 1,47                | 0,4           |
| 6      | Ciwaringin   | Ciwaringin            | 3.387              | 6,36                | 0,44          |
| 7      | Cilongkrang  | Ciminggiri            | Suplai ke Bd Ciawi | 0,79                | 0,29          |
| 8      | Ciawi        | Ciawi                 | 151                | 1,02                | 0,28          |
| 9      | Cimanuk      | Rentang               | 571                | 900                 | 500           |
| 10     | Cihikeu      | Citeureup             | 348                | 1.252               | 0,26          |
| 11     | Cihieum      | Cihieum               | 556                | 4.512               | 0,25          |
| 12     | Cisampora    | Cimingking            | 383                | 1.439               | 0,18          |
| JUMLAH |              |                       | <b>24.230</b>      | <b>8.179,75</b>     | <b>504,45</b> |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, yang dikelola dalam SIPD.

Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.  
Potensi Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Majalengka

| No. | Kisaran Indeks Rata-rata | Kecamatan   | Kelas | Keterangan        |
|-----|--------------------------|---|-------|-------------------|
| 1   | 1,64 - 2,01              | Kertajati - Ligung - Dawuan dan Kasokandel - Jatiwangi  | D     | Kurang Berpotensi |
| 2   | 2,01 - 2,31              | Palasah - Leuwimunding - Panyingkiran - Majalengka - Cigasong - Sukahaji dan Sindang - Bantarujeg dan Malausma - Talaga - Cingambul | C     | Potensi Sedang    |
| 3   | 2,31 - 2,61              | Sumberjaya - Rajagaluh - Maja - Lemahsugih - Banjaran   | B     | Berpotensi        |
| 4   | 2,61 - 3,14              | Kadipaten - Sindangwangi - Argapura - Jatitujuh - Cikijing  | A     | Sangat Berpotensi |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, yang dikelola dalam SIPD.

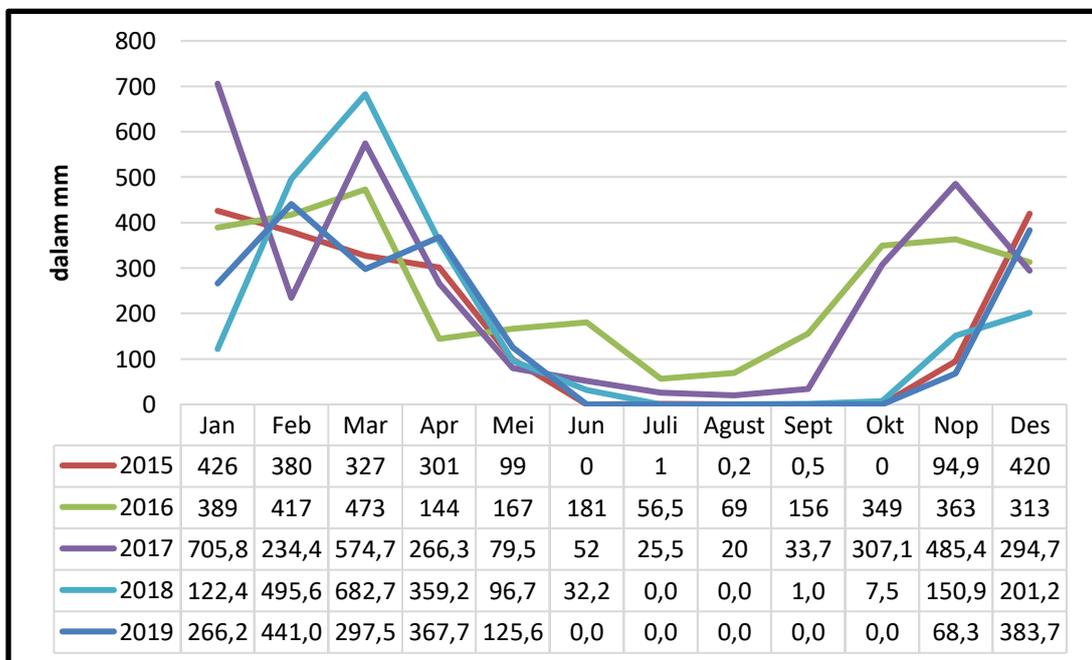
**Kondisi klimatologis** Kabupaten Majalengka pada tahun 2019, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 441 mm dan terendah pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober yaitu sebesar 0 mm. Kecepatan angin rata-rata berkisar 4 knot dan



kecepatan tertinggi 31 knot dan kecepatan angin terendah 0 knot dengan arah angin berhembus dari barat hingga utara. Kabupaten Majalengka terkenal dengan sebutan Kota Angin karena memang pada bulan-bulan tertentu di musim kemarau angin berhembus dengan kecepatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Suhu terendah di Kabupaten Majalengka selama tahun 2019 mencapai 19°C dan suhu tertinggi mencapai 39,2°C. Sementara kelembapan udara terendah mencapai 26% dan kelembapan udara tertinggi mencapai 98%. Data perkembangan curah hujan sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.4.  
Data Perkembangan Curah Hujan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019



Sumber: Diolah dari BMKG Stasiun Meteorologi Jatiwangi, Tahun 2020.

Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai bahan kajian adalah *pola penggunaan lahan*. Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun



untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Kabupaten Majalengka merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang dipergunakan untuk area persawahan. Luas lahan sawah pada tahun 2020 sebesar 50.281 Ha, dengan luas area yang menggunakan irigasi mencapai 36,870%. Sedangkan untuk luas tadah hujan mencapai 13.506 Ha.

Berdasarkan Data Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2020 mulai didominasi lahan non sawah, yaitu sebesar 70.143 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.694 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 14.641 Ha. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2019 seluas 50.405 Ha merupakan penggunaan lahan terbesar kedua, dengan rincian luas sawah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan irigasi non PU sebesar 36.816 Ha dan tadah hujan seluas 13.506 Ha. Wilayah kecamatan yang memiliki luas areal sawah tertinggi adalah Kertajati dan Ligung. Secara lebih jelas, dinamika pola penggunaan lahan di Kabupaten Majalengka dari tahun 2016-2020 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.  
Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016-2020

| No                       | Penggunaan Lahan            | Tahun (Ha)    |               |               |               |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Lahan Sawah</b>       |                             |               |               |               |               |               |
| 1                        | Irigasi Teknis              | 36.924        | 36.870        | 36.870        | 36.816        | 36.802        |
| 2                        | Irigasi ½ Teknis            |               |               |               |               |               |
| 3                        | Irigasi Sederhana Milik PU  |               |               |               |               |               |
| 4                        | Irigasi Non PU              |               |               |               |               |               |
| 5                        | Tadah Hujan                 | 13.535        | 13.535        | 13.535        | 13.506        | 13.479        |
| 6                        | Polder dan sawah lainnya    | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Luas Lahan Sawah</b>  |                             | <b>50.334</b> | <b>50.035</b> | <b>50.459</b> | <b>50.405</b> | <b>50.281</b> |
| <b>Lahan Bukan Sawah</b> |                             |               |               |               |               |               |
| 1                        | Pekarangan/bangunan         | 13.512        | 13.566        | 13.566        | 13.649        | 13.690        |
| 2                        | Tegal/Kebun                 | 23.694        | 23.694        | 23.694        | 23.694        | 23.694        |
| 3                        | Ladang/Huma                 | 1.928         | 1.928         | 1.928         | 1.928         | 1.928         |
| 4                        | Pengembalaan/Padang Rumput  | 495           | 495           | 495           | 495           | 495           |
| 5                        | Sementara tdk diusahakan    | -             | -             | -             | -             | -             |
| 6                        | Ditanami pohon/Hutan Rakyat | 5.602         | 5.622         | 5.622         | 5.622         | 5.622         |
| 7                        | Hutan Negara                | 14.641        | 14.641        | 14.641        | 14.641        | 14.641        |



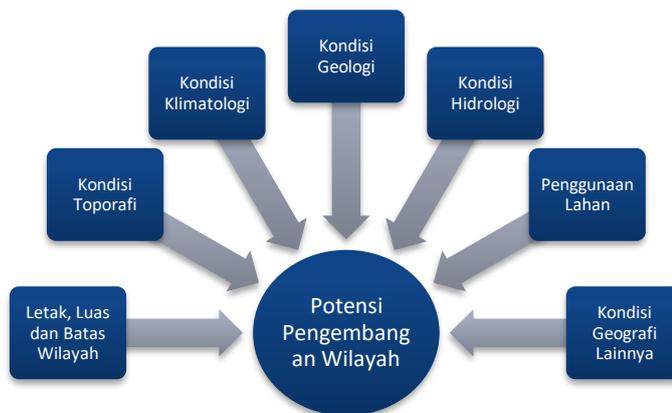
| No                            | Penggunaan Lahan | Tahun (Ha)     |                |                |                |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |                  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| 8                             | Perkebunan       | 739            | 739            | 739            | 739            | 739            |
| 9                             | Lahan lainnya    | 7.734          | 7.714          | 7.714          | 7.813          | 7.813          |
| 10                            | Rawa-rawa        | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| 11                            | Tambak           | -              | -              | -              | -              | -              |
| 12                            | Kolam/empang     | 1.521          | 1.521          | 1.521          | 1.422          | 1.422          |
| <b>Luas Lahan Bukan Sawah</b> |                  | <b>70.090</b>  | <b>70.389</b>  | <b>69.965</b>  | <b>70.019</b>  | <b>70.143</b>  |
| <b>Luas Lahan Keseluruhan</b> |                  | <b>120.424</b> | <b>120.424</b> | <b>120.424</b> | <b>120.424</b> | <b>120.424</b> |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.5.  
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda dimaksud kawasan budidaya Kabupaten Majalengka terdiri atas:

**a) Kawasan peruntukkan hutan produksi.**

Kawasan peruntukkan hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 12.934



hektar. Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 10.779 Ha, meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Rajagaluh; dan Kecamatan Bantarujeg. Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.135 Ha hektar, meliputi: Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Talaga; Kecamatan Cingambul; dan Kecamatan Lemahsugih.

**b) Kawasan peruntukkan pertanian.**

Kawasan peruntukkan pertanian seluas 43.946 Ha terdiri atas:

- a) Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan;
- b) Kawasan Peruntukkan Hortikultura;
- c) Kawasan Peruntukkan Perkebunan; dan
- d) Kawasan Peruntukkan Peternakan.

Adapun uraian dari kawasan peruntukan pertanian adalah sebagai berikut:

1. *Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan*; terdiri atas; kawasan peruntukkan pertanian lahan basah dan kawasan peruntukkan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.190 Ha berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:

- a) *Sawah Irigasi Teknis* meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg; dan Kecamatan Lemahsugih.
- b) *Sawah Irigasi Setengah Teknis* meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran;



- Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Malausma; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg.
- c) *Sawah Tadah Hujan* meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Malausma; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cingambul.
2. *Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering*; seluas kurang lebih 626 Ha berada di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukkan hortikultura seluas kurang lebih 1.465 Ha berada di seluruh kecamatan dan tidak terdapat di Kecamatan Kadipaten;
3. *Kawasan peruntukkan perkebunan* seluas 1.881 hektar, meliputi: kawasan peruntukkan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.357 hektar berada di seluruh kecamatan; dan kawasan peruntukkan perkebunan dengan fungsi lindung seluas kurang lebih 524 hektar berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut meliputi: Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Malausma; Kecamatan Argapura; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Sindang
4. *Kawasan peruntukkan peternakan* seluas kurang lebih 784 hektar meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Lemahsugih; dan Kecamatan Panyingkiran.

**c) Kawasan peruntukkan perikanan.**

Kawasan peruntukkan perikanan seluas 1.717 hektar, terdiri atas:



1. *Peruntukkan kawasan perikanan tangkap*, berupa sungai sepanjang 536 km meliputi Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Kadipaten dan situ dan rawa seluas 266 Ha dengan prioritas pengembangan meliputi Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh;
2. *Peruntukkan kawasan perikanan budidaya*, meliputi : 1) kolam air tenang seluas 696 hektar dan kolam air deras seluas 35 hektar dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; dan Kecamatan Jatitujuh; 2) sungai sepanjang kurang lebih 536 kilometer dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; dan Kecamatan Kadipaten; 3) situ dan rawa dengan luas kurang lebih 266 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Rajagaluh dan 4) Sawah atau mina padi seluas kurang lebih 219 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Sindangwangi.

**d) Kawasan peruntukkan pertambangan.**

Kawasan peruntukkan pertambangan seluas kurang lebih 1.724 hektar meliputi:

1. *Kawasan peruntukkan mineral dan batuan* terdiri atas: 1) Logam berupa emas meliputi: Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Argapura; 2) Non Logam, terdiri atas: a) Batu gamping, meliputi: Kecamatan Dawuan; dan Kecamatan Cigasong; b) Lempung, meliputi: Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Sindang; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Leuwimunding; 3) Batuan, terdiri atas: a) Batuan beku, meliputi: Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Majalengka; b) Batu pasir, meliputi: Kecamatan Panyingkiran;



- Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; c) Pasir endapan sungai purba, meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Panyingkiran; d) Pasir endapan alluvial meliputi: Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Ligung; e) Sirtu, meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kasokandel;
2. *Kawasan peruntukkan minyak dan gas bumi*, meliputi: Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Maja; dan Desa Kodasari di Kecamatan Ligung; dan
  3. *Kawasan peruntukkan panas bumi* berada di Kecamatan Cikijing.

**e) Kawasan peruntukkan industri.**

Kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 1.324 hektar terdiri atas:

1. *Kawasan peruntukkan industri besar*, meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah;
2. *Kawasan peruntukkan industri menengah*, meliputi : 1) sebaran lokasi kawasan peruntukkan industri menengah berada di: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah; 2) pengembangan klaster Industri Kecil Menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi; dan 3) pengembangan agroindustri;
3. *Kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro*, berada di seluruh kecamatan pengembangan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi: wisata industri; dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan.
4. *Rencana Pembangunan Kawasan Industri Terpadu* berada di Kecamatan Kertajati.



**f) Kawasan peruntukkan pariwisata.**

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas:

1. *Pariwisata budaya*, meliputi: Jatiwangi Festival Budaya Kreatif Tradisional (*Jatiwangi Art Factory*) berada di Kecamatan Jatiwangi; Kuliner Nusantara Kecap Majalengka berada di Kecamatan Majalengka; Petilasan Prabu Siliwangi berada di Kecamatan Rajagaluh; Situ Sangiang eko-religi berada di Kecamatan Banjaran;
2. *Pariwisata alam*, meliputi: Bendung Rentang Water Festival berada di Kecamatan Jatitujuh; Curug Muara Jaya berada di Kecamatan Argapura; Agrowisata Gedong Gincu Panyingkiran berada di Kecamatan Panyingkiran; Agrowisata Sadarehe berada di Kecamatan Rajagaluh; Eko Wisata Batu Luhur berada di Kecamatan Sindangwangi; Sindangwangi Mina Wisata berada di Kecamatan Sindangwangi; dan Situ Cipanten di Kecamatan Sindang.
3. *Pariwisata buatan*, meliputi: Majalengka Spektakuler berada di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka; Jabar Edu Park berada di Kecamatan Sindangwangi; Jurassic Park Lemah Putih berada di Kecamatan Lemahsugih; Gagaraji Internasional Sircuit berada di Kecamatan Jatitujuh; Galery Bola Majalengka berada di Kecamatan Kadipaten; dan Sang Raja Child Competition berada di Kecamatan Cigasong.

**g) Kawasan peruntukkan permukiman.**

Kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 13.455 hektar terdiri atas:

1. *Permukiman perkotaan* seluas kurang lebih 9.480 hektar meliputi: permukiman perkotaan PKW; permukiman perkotaan PKL; dan permukiman perkotaan PPK termasuk pembangunan kawasan permukiman di *Kertajati Aerocity*;
2. *Permukiman perdesaan* seluas kurang lebih 3.975 hektar meliputi: permukiman perdesaan PPL; dan permukiman desa.

**h) Kawasan peruntukkan lainnya.**

Kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas:



1. *Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa*, meliputi: pengembangan perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan PKW dan PKL; peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional apabila dikaitkan dengan pembangunan BIJB, Jalan Tol, dan Jalur Kereta Api; peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien; peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor;
2. *Kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity*, meliputi: pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 hektar; dan pengembangan kawasan Kertajati Aerocity seluas kurang lebih 3.200 hektar; dan
3. *Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan*, meliputi: Batalyon Infanteri 321 di Kecamatan Cigasong; Komando Distrik Militer (Kodim) 0617 di Kecamatan Majalengka; Pangkalan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung; dan Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh wilayah kabupaten.

Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaaan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

**a. Pusat Kegiatan Perkotaan:**

1. *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)*, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di Perkotaan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya. Ruang wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan.



2. *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)*, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga.

3. *Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)* adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran.

**b. Pusat Kegiatan Perdesaan:**

Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan beserta fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.  
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka

| No.       | Pusat Kegiatan / Kecamatan  | Fungsi Pelayanan  |
|-----------|---|---|
| <b>A.</b> | <b>Pusat Kegiatan Perkotaan</b>                                   |   |
| <b>1.</b> | <b>Pusat Kegiatan Wilayah</b>                                     |   |
|           | a. PKW Kadipaten (Kec. Kadipaten dan Dawuan)                      | Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, serta pendukung kegiatan industri.   |
| <b>2.</b> | <b>Pusat Kegiatan Lokal</b>                                       |   |
|           | a. Perkotaan Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, Panyingkiran) | Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. |



| No.       | Pusat Kegiatan / Kecamatan  | Fungsi Pelayanan  |
|-----------|---|---|
|           | b. Perkotaan Kertajati<br>(Kec. Kertajati, Jatitujuh, Ligung)                             | Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan “aerocity”, dan pertanian.   |
|           | c. Perkotaan Jatiwangi<br>(Kec. Jatiwangi, Kasokandel, Sumberjaya, Palasah, Leuwimunding) | Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan dan pertanian.   |
|           | d. Perkotaan Rajagaluh<br>(Kec. Rajagaluh, Sukahaji, Sindang, Sindangwangi)               | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.            |
|           | e. Perkotaan Cikijing<br>(Kec. Cikijing, Cingambul, Banjaran, Argapura)                   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional dan industri kecil. |
|           | f. Perkotaan Talaga<br>(Kec. Talaga, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma)              | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional.                      |
| <b>3.</b> | <b>Pusat Pelayanan Kawasan</b>  |   |
|           | a. Perkotaan Kasokandel<br>(Kec. Kasokandel)  | Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan dan pertanian.  |
|           | b. Perkotaan Leuwimunding<br>(Kec. Lewimunding)   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, industri dan pendukung kawasan perumahan.  |
|           | c. Perkotaan Palasah<br>(Kec. Palasah)  | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri, pendukung kawasan perumahan dan pertanian.   |
|           | c. Perkotaan Jatitujuh<br>(Kec. Jatitujuh)  | Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri, pendukung komersial dan pertanian.  |
|           | e. Perkotaan Ligung<br>(Kec. Ligung)  | Sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial dan pertanian.   |
|           | f. Perkotaan Sumberjaya<br>(Kec. Sumberjaya)  | Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan, pelayanan sosial dan pertanian.   |
|           | g. Perkotaan Sindangwangi<br>(Kec. Sindangwangi)  | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.   |



| No.       | Pusat Kegiatan / Kecamatan                   | Fungsi Pelayanan  |
|-----------|--|---|
|           | h. Perkotaan Sukahaji<br>(Kec. Sukahaji)     | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan.           |
|           | i. Perkotaan Lemahsugih<br>(Kec. Lemahsugih) | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), serta pengembangan pariwisata.  |
|           | j. Perkotaan Bantarujeg<br>(Kec. Bantarujeg) | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata.  |
|           | k. Perkotaan Maja<br>(Kec. Maja)             | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata dan terminal regional.                   |
|           | l. Perkotaan Argapura<br>(Kec. Argapura)     | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata.    |
|           | m. Perkotaan Banjaran<br>(Kec. Banjaran)     | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata.    |
| <b>B.</b> | <b>Pusat Kegiatan Perdesaan</b>              |   |
| <b>1.</b> | <b>Pusat Pelayanan Lingkungan</b>            |   |
|           | a. PPL Sindang<br>(Kec. Sindang)             | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan. |
|           | b. PPL Malausma<br>(Kec. Malausma)           | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan.  |
|           | c. PPL Cingambul<br>(Kec. Cingambul)         | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil.   |

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Utara dan bagian Selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian 400 - 500 m di atas permukaan laut dan berhawa relatif panas.

Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka hampir seluruh Kabupaten Majalengka mempunyai potensi bencana yang mungkin



dapat terjadi setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana lokasi bencana tersebut akan terjadi. Kabupaten Majalengka termasuk daerah rawan terjadinya bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya dapat memicu terjadinya sejumlah bencana, selain itu banyak terdapat perbukitan dan aliran sungai yang cukup besar.

*Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka* yang kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan sangat berpotensi terjadinya longsor bencana pergeseran tanah di daerah ini, sesuai hasil pemetaan Pusat Pemetaan Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi Kementerian ESDM Republik Indonesia.

Sedangkan *wilayah utara Kabupaten Majalengka* yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekuensi adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai-sungai kecil yang bermuara di sungai-sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir.

Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bencana puting beliung yang melanda Kabupaten Majalengka dan menimbulkan kerugian harta benda bagi masyarakat.

Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Mengamati fenomena-fenomena di atas, Kabupaten Majalengka yang relative tidak aman dari bencana, namun demikian harus tetap waspada agar dampak negatifnya berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,



geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.  
Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka

| NO. | KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN  | BENCANA  |
|-----|--|--|
| 1   | Kec. Argapura  |  |
|     | Cikaracak; Sukamanah   | Longsor bahan rombakan,<br>Vulkanik : Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRBI  |
|     | Cibunut  | Longsor bahan rombakan   |
|     | Argamukti; Argalingga; Mekarwangi; Gunungwangi   | Longsor bahan rombakan;<br>Vulkanik : Potensi aliran awal panas, lava, lahar (KRB II) dan potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I |
|     | Cibunut; Haurseah; Tejamulya; Sukasari Kidul; Sukadana; Sadasari   | Longsor bahan rombakan   |
| 2   | Kec. Bantarujeg<br>Sukamenak; Gunung larang; Babakan Sari; Cikidang; Haurgelis; Bantarujeg; Wado wetan; Salawangi; Cimanggu hilir; Sindang hurip; Cipeuteuy; Siliwangi   | Longsor bahan rombakan   |
| 3   | Kec. Banjaran<br>Sangiang; Cimeong; Girimulya; Kareo; Genteng; Sindangpala; Panyindangan   | Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I   |
| 4   | Kec. Cingambul   |  |
|     | Sedaraja   | Longsor bahan rombakan   |
|     | Cikondang; Nagara Kembang; Wangkelang; Cintaasih; Rawa; Cingambul; Kondang mekar; Maniis   | Longsor bahan rombakan   |
| 5   | Kec. Cikijing  |  |
|     | Cipulus; Kasturi; Cilancang; Sindangpanj; Jagasari   | Longsor bahan rombakan   |
| 6   | Kec. Lemahsugih<br>Kalapadua; Sukajadi; Lemahputih; Sadawangi; Margajaya; Dayehwangi; Padarek ; Kepuh; Mekarwangi; Sinargalih; Cigaleuh; Bangbayang; Borogojol; Sindangwangi; Margajaya; Mekarmulya; Cibulan; Cipasung; Mangajaya; Cisolak | Longsor bahan rombakan   |
| 7   | Kec. Maja  |  |
|     | Cengal   | Longsor bahan rombakan;<br>Tektonil : Retakan  |
|     | Anggrawati; Gunungmanik; Banjaran; Wanahayu; Cicalung; Cihaur ; Nunuk; Nunuk Baru;   | Longsor bahan rombakan   |



| NO. | KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN   | BENCANA   |
|-----|---|---|
| 8   | Kec. Majalengka   |   |
|     | Cibodas; Sidamukti  | Longsor bahan rombakan;<br>Tektonik : Retakan                       |
|     | Munjul; Babakanjawa; Cicurug; Kulur   | Longsor bahan rombakan  |
| 9   | Kec. Malausma   |   |
|     | Ciranca; Lebakwangi   | Nendatan dan retakan  |
|     | Cimuncang   | Longsor bahan rombakan;   |
|     | Buninagara; Werasari; Malausma;<br>Jagamulya  | Longsor bahan rombakan  |
| 10  | Kec. Panyingkiran<br>Panyingkiran   | Tektonik : Retakan  |
| 11  | Kec. Rajagaluh<br>Sindangpano; Rajagaluhlor; Cipinang;<br>Cisetu; Rajagaluh; Rajagaluh kidul;<br>Kumbang; Singawada; Babakan Kareo;<br>Sadomas; Payung; Pajajar.    | Longsor bahan rombakan,<br>retakan                                  |
| 12  | Kec. Sindangwangi<br>Ujungberung; Bantaragung; Lengkong<br>Kulon; Balagedog; Leuwilaja; Buah Kapas;<br>Jeruk leueut; Sindang wangi.                                 | Longsor bahan rombakan  |
| 13  | Kec. Sindang  |   |
|     | Pasirayu  | Vulkanik : Potensi terlanda<br>hujan abu dan lontaran batu<br>KRB 1 |
|     | Heubeulisuk; Mekarwangi   | Longsor bahan rombakan  |
| 14  | Kec. Talaga   |   |
|     | Gunung manik  | Vulkanik : Potensi terlanda<br>hujan abu dan lontaran batu<br>KRB 1 |
|     | Cibeureum; Talaga kulon; Ganeas;<br>Lampuyang; Talaga; Margamukti;<br>Kertarahayu.  | Longsor bahan rombakan  |
| 15  | Kec. Ligung<br>Wana salam; Ligung; Ampel; Deber;<br>Leuwiliang; Sukamana; Majasari.   | Longsor bahan rombakan  |
| 16  | Kec. Leuwimunding<br>Ciparay; Parung jaya; Leuwimunding;<br>Karang asem; Heuleut; Mirat; Tanjungsari;<br>Leuwikujang; Nanggerang; Mindi;<br>Rajawangi; Lame; Mindi. | Longsor bahan rombakan  |
| 17  | Kec. Jatitujuh<br>Biyawak; Pasindangan; Panongan.   | Longsor bahan rombakan  |
| 18  | Kec. Kadipaten<br>Cipaku; Karangsambung   | Longsor bahan rombakan  |
| 19  | Kec. Cigasong<br>Cigasong; Batujaya; Karayunan; Babakan<br>manjeti; Kutamanggu; Cicenang;<br>Simpeureum; Tenjolayar; Tajur.   | Longsor bahan rombakan  |
| 20  | Kec. Dawuan<br>Karanganyar; Salawana; Pasirmalati;<br>Balida; Genteng; Sinarjati; Baturuyuk.  | Longsor bahan rombakan  |
| 21  | Kec. Kertajati<br>Sukawana  | Longsor bahan rombakan  |



| NO. | KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN  | BENCANA                |
|-----|--|------------------------|
| 22  | Kec. Palasah<br>Tarikolot  | Longsor bahan rombakan |
| 23  | Kec. Sumberjaya<br>Rancaputat; Banjaran; Parapatan;<br>Paningkiran; Sepat; Garawangi; Cidenok; | Longsor bahan rombakan |
| 24  | Kec. Kasokandel<br>Jatimulya   | Longsor bahan rombakan |
| 25  | Kec. Jatiwangi<br>Sukaraja kulon; Jatiwangi ; Sukaraja<br>Wetan.                               | Longsor bahan rombakan |
| 26  | Kec. Sukahaji<br>Cikalong  | Longsor bahan rombakan |

Sumber: BPBD Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Potensi bencana lainnya di wilayah Kabupaten Majalengka disebabkan oleh adanya abrasi, adapun wilayah yang termasuk kedalam bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.  
Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten  
Majalengka

| NO | KECAMATAN / DESA/<br>KELURAHAN   | ABRASI           | KETERANGAN                         |
|----|--|------------------|------------------------------------|
| 1  | KEC. CIGASONG  |                  |                                    |
|    | Cigasong   | Pengikisan tanah | Sungai cideres                     |
|    | Cicurug  | Pengikisan tanah | Sungai Cideres dan Sungai Cijurey  |
| 2  | KEC. MAJALENGKA  |                  |                                    |
|    | Tonjong; Tonjong; Tarikolot;<br>Cijati; Babakan jawa; Munjul;<br>Cibodas; Kulur; Sindangkasih.   | Pengikisan tanah | Sungai Cideres                     |
| 3  | KEC. PANYINGKIRAN  |                  |                                    |
|    | Pasirmuncang; Jatipamor;<br>Panyingkiran; Bantarasana;<br>Leuwiseeng.  | Pengikisan tanah | Sungai Cijurey                     |
|    | Bonang   | Pengikisan tanah | Sungai Cijurey dan Sungai Cilitung |
| 4  | KEC. KERTAJATI   |                  |                                    |
|    | Pakubereum; Sukawana;<br>Kertajati; Bantarjati; Palasah;<br>Kertawinangun; Babakan;<br>Pasiripis; Mekarjaya;<br>Syahbandar; Sukamulya. | Pengikisan tanah | Sungai Cimanuk                     |
| 5  | KEC. LIGUNG  |                  |                                    |
|    | Ligung Lor; Ligung; Bantarwaru;<br>Leweunghapi; Sukawera;<br>Wanasalam.  | Pengikisan tanah | Sungai Cikeruh                     |
| 6  | KEC. JATITUJUH   |                  |                                    |
|    | Jatitujuh; Randegan Wetan;<br>Randegan Kulon; Panongan;<br>Panyindangan.   | Pengikisan tanah | Sungai Cimanuk                     |
| 7  | KEC. SUMBERJAYA  |                  |                                    |
|    | Loji Kobong; Bongaswetan   | Pengikisan tanah | Sungai Cikamangi                   |
|    | Pancasuji  | Pengikisan tanah | Sungai Cikamangi, Cibugang         |



| NO | KECAMATAN / DESA/<br>KELURAHAN  | ABRASI              | KETERANGAN                             |
|----|---|---------------------|--|
|    | Panjalin Kidul; Banjaran;<br>Gelokmulya; Rancaputat.<br>Sumberjaya; Garawangi | Pengikisan<br>tanah | Sungai Cikadongdong<br>Sungai Cibugang |
| 8  | KEC. LEUWIMUNDING<br>Mirat; Patuanan;<br>Leuwimunding.                        | Pengikisan<br>tanah | -                                      |

Sumber: BPBD Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Untuk data banjir berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, daerah yang rawan terkena bencana banjir, sebarannya adalah di sepanjang tanggul di Desa Pakubeureum (Sungai Cimanuk) sampai Bendung Rentang, diantaranya melalui wilayah Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh dikarenakan jebolnya tanggung di Sungai tersebut.

### 2.1.3 Aspek Demografi

Sumber daya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk.

**Jumlah penduduk** Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 mencapai 1.315.272 jiwa, terdiri dari 662.772 jiwa laki-laki dan 652.500 jiwa perempuan, dengan Sex Ratio sebesar 101,71 % dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,56%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, Kepadatan dan Sex Ratio penduduk dapat dilihat pada tabel 2.9 dan 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Uraian                                     | Tahun     |           |           |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1.  | Jumlah Penduduk (Jiwa)                     | 1.260.469 | 1.269.210 | 1.278.753 | 1.307.995 | 1.315.272 |
|     | Laki-laki (Jiwa)                           | 638.120   | 644.595   | 645.435   | 659.543   | 662.772   |
|     | Perempuan (Jiwa)                           | 622.349   | 624.615   | 633.318   | 648.452   | 652.500   |
| 2.  | LPP (%)                                    | 0,82      | 0,69      | 0,75      | 2,29      | 0,56      |
| 3.  | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) | 1.074     | 1.054     | 1.062     | 1.086     | 1.092     |

Sumber: Diolah dari Disdukcapil Kab. Majalengka Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.10.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2020

| No.    | Kecamatan    | Jumlah Penduduk |           |           | Sex Ratio |
|--------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|        |              | Laki-Laki       | Perempuan | Total     |           |
| 1      | Lemahsugih   | 33.006          | 31.605    | 64.611    | 104,43    |
| 2      | Bantarujeg   | 23.868          | 23.713    | 47.581    | 100,65    |
| 3      | Cikijing     | 34.885          | 33.872    | 68.757    | 102,99    |
| 4      | Talaga       | 24.794          | 23.918    | 48.712    | 103,66    |
| 5      | Argapura     | 18.625          | 18.129    | 36.754    | 102,74    |
| 6      | Maja         | 26.722          | 26.240    | 52.962    | 101,84    |
| 7      | Majalengka   | 36.341          | 36.344    | 72.685    | 99,99     |
| 8      | Sukahaji     | 23.786          | 23.557    | 47.343    | 100,97    |
| 9      | Rajagaluh    | 23.829          | 23.282    | 47.111    | 102,35    |
| 10     | Leuwimunding | 32.621          | 31.802    | 64.423    | 102,58    |
| 11     | Jatiwangi    | 45.757          | 45.087    | 90.844    | 101,49    |
| 12     | Dawuan       | 23.846          | 23.770    | 47.616    | 100,32    |
| 13     | Kadipaten    | 23.612          | 23.162    | 46.774    | 101,94    |
| 14     | Kertajati    | 23.973          | 24.149    | 48.122    | 99,27     |
| 15     | Jatitujuh    | 27.675          | 27.930    | 55.605    | 99,09     |
| 16     | Ligung       | 32.823          | 33.079    | 65.902    | 99,23     |
| 17     | Sumberjaya   | 32.354          | 31.777    | 64.131    | 101,82    |
| 18     | Panyingkiran | 16.335          | 16.297    | 32.632    | 100,23    |
| 19     | Palasah      | 26.595          | 26.475    | 53.070    | 100,45    |
| 20     | Cigasong     | 18.892          | 18.491    | 37.383    | 102,17    |
| 21     | Sindangwangi | 17.395          | 16.931    | 34.326    | 102,74    |
| 22     | Banjaran     | 12.684          | 12.735    | 25.419    | 99,60     |
| 23     | Cingambul    | 22.099          | 21.481    | 43.580    | 102,88    |
| 24     | Kasokandel   | 26.344          | 26.119    | 52.463    | 100,86    |
| 25     | Sindang      | 8.551           | 8.603     | 17.154    | 99,40     |
| 26     | Malausma     | 25.360          | 23.952    | 49.312    | 105,88    |
| Jumlah |              | 662.772         | 652.500   | 1.315.272 | 101,57    |

Sumber: Database Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Karakteristik Penduduk berdasarkan Pendidikan,** Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung



oleh sarana pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.11.  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016-2020

| No. | Jenjang Pendidikan          | Tahun (%) |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |                             | 2016      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | Tidak/Belum Punya Ijazah SD | 25,10     | 25,19 | 12,61 | 26,19 | 26,92 |
| 2   | SD                          | 45,64     | 44,78 | 50,66 | 41,97 | 41,14 |
| 3   | SLTP                        | 15,35     | 15,50 | 18,80 | 15,91 | 16,36 |
| 4   | SLTA                        | 10,90     | 11,36 | 14,09 | 12,41 | 12,18 |
| 5   | D I/ D3                     | 1,00      | 0,98  | 1,16  | 0,97  | 0,93  |
| 6   | S1                          | 1,91      | 2,08  | 2,54  | 2,41  | 2,35  |
| 7   | S2                          | 0,10      | 0,11  | 0,13  | 0,12  | 0,12  |
| 8   | S3                          | 0,01      | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |

Sumber: Diolah dari Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12.  
PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Uraian   | Tahun     |           |           |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1.  | PDRB atas dasar harga konstan 2010 (miliar rupiah) | 17.591,79 | 18.789,49 | 19.935,54 | 21.358,92 | 21.740,00 |
| 2.  | PDRB atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)      | 23.207,74 | 25.405,61 | 28.051,62 | 30.912,10 | 32.060,00 |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.13.  
 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020  
 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 dan Atas Dasar Harga  
 Berlaku (Hb) Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah)

| No. | Sektor   | 2016        |             | 2017        |             | 2018        |             | 2019        |             | 2020        |             |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | Hk          | Hb          |
| 1   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>  | 4.043.305,2 | 6.058.514,8 | 4.090.793,2 | 6.237.928,6 | 4.080.044,6 | 6.629.837,7 | 4.119.332,4 | 7.044.841,4 | 4.116.819,1 | 7.205.171,9 |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>   | 407.681,4   | 435.124,5   | 399.053,3   | 423.961,4   | 398.156,7   | 432.557,6   | 382.994,6   | 434.037,9   | 380.757,07  | 434094,2    |
| 3   | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>  | 2.557.507,6 | 3.390.591,0 | 2.900.098,9 | 3.926.130,2 | 3.550.305,1 | 4.922.245,7 | 4.443.685,5 | 6.329.820,7 | 4.851.513,3 | 7.052.656,3 |
| 4   | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>  | 14.483,0    | 17.734,8    | 15.572,6    | 21.749,5    | 16.437,4    | 23.633,3    | 17.385,5    | 24.992,8    | 19.757,5    | 28.222,7    |
| 5   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>       | 9.924,8     | 12.577,8    | 10.491,8    | 14.534,8    | 11.081,8    | 16.650,6    | 11.798,0    | 17.734,9    | 13.917,8    | 21.030,7    |
| 6   | Konstruksi/ <i>Construction</i>  | 2.325.957,3 | 2.939.973,6 | 2.653.120,0 | 3.447.258,9 | 2.739.963,6 | 3.687.514,2 | 2.850.002,2 | 3.952.981,5 | 2.699.491,4 | 3.764.137,6 |
| 7   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 3.151.902,8 | 3.817.779,7 | 3.304.247,0 | 4.120.542,0 | 3.459.193,8 | 4.467.860,4 | 3.621.896,8 | 4.776.642,3 | 3.403.003,3 | 4.601.445,9 |
| 8   | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>  | 674.048,4   | 933.017,7   | 714.213,3   | 1.022.030,9 | 760.899,2   | 1.102.792,1 | 822.488,2   | 1.204.613,8 | 771.718,6   | 1.161.084,9 |
| 9   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>   | 592.627,5   | 722.081,0   | 626.593,6   | 792.976,3   | 664.636,6   | 871.002,9   | 704.748,5   | 949.373,2   | 653.263,3   | 925.088,1   |



| No. | Sektor   | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              | 2019         |              | 2020                    |                         |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|     |  | Hk           | Hb           | Hk           | Hb           | Hk           | Hb           | Hk           | Hb           | Hk                      | Hb                      |
| 10  | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>   | 691.866,9    | 684.922,1    | 763.163,5    | 764.226,3    | 829.901,2    | 818.257,4    | 897.047,9    | 876.895,1    | 1.183.794, <sup>3</sup> | 1.164.249, <sup>8</sup> |
| 11  | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>  | 512.290,4    | 628.121,2    | 543.547,5    | 702.543,3    | 576.695,7    | 780.933,5    | 603.051,3    | 844.738,7    | 611.875,3               | 862.382,9               |
| 12  | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>  | 232.563,0    | 268.476,0    | 247.016,2    | 288.506,4    | 268.035,7    | 319.644,5    | 291.965,3    | 351.190,4    | 294.050,6               | 354.982,4               |
| 13  | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>  | 62.579,7     | 74.416,6     | 67.083,8     | 81.380,1     | 71.421,9     | 88.432,1     | 76.313,0     | 105.358,0    | 68.549,4                | 98.104,0                |
| 14  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i> | 609.448,0    | 881.903,3    | 613.931,9    | 916.726,4    | 631.114,6    | 1.008.538,8  | 648.241,3    | 1.066.499,1  | 622.869,9               | 1.041.440,4             |
| 15  | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>  | 1.012.953,2  | 1.519.404,7  | 1.093.527,2  | 1.722.526,0  | 1.146.933,6  | 1.907.856,8  | 1.204.867,6  | 2.084.961,2  | 1.220.914,2             | 2.172.685,6             |
| 16  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>   | 188.920,6    | 236.051,8    | 202.496,0    | 261.881,0    | 215.907,5    | 287.781,3    | 229.384,6    | 312.269,9    | 235.109,3               | 327.764,7               |
| 17  | Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>   | 503.732,9    | 587.049,5    | 544.537,9    | 660.712,5    | 586.149,9    | 732.817,4    | 625.046,7    | 825.247,1    | 589.200,4               | 840.665,5               |
|     | <b>PDRB</b>  | 17.591.792,6 | 23.207.739,9 | 18.789.487,8 | 25.405.614,6 | 19.935.540,9 | 28.098.356,4 | 21.358.916,5 | 31.202.197,9 | 21.736.604,9            | 32.055.207,9            |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021.



Tabel 2.14.  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020  
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)  
Kabupaten Majalengka (persen)

| No. | Sektor   | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       | 2019  |       | 2020  |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | Hk    | Hb    |
| 1   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>  | 22,98 | 26,11 | 21,77 | 24,55 | 20,39 | 23,60 | 19,12 | 22,58 | 18,94 | 22,48 |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>   | 2,32  | 1,87  | 2,12  | 1,67  | 1,99  | 1,54  | 1,78  | 1,39  | 1,75  | 1,35  |
| 3   | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>  | 14,54 | 14,61 | 15,43 | 15,45 | 17,75 | 17,52 | 20,62 | 20,29 | 22,32 | 22,00 |
| 4   | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,09  |
| 5   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>       | 0,06  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,07  |
| 6   | Konstruksi/ <i>Construction</i>  | 13,22 | 12,67 | 14,12 | 13,57 | 13,70 | 13,12 | 13,22 | 12,67 | 12,42 | 11,74 |
| 7   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 17,92 | 16,45 | 17,59 | 16,22 | 17,29 | 15,90 | 16,81 | 15,31 | 15,66 | 14,35 |
| 8   | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>  | 3,83  | 4,02  | 3,80  | 4,02  | 3,80  | 3,92  | 3,82  | 3,86  | 3,55  | 3,62  |
| 9   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>   | 3,37  | 3,11  | 3,33  | 3,12  | 3,32  | 3,10  | 3,27  | 3,04  | 3,01  | 2,89  |
| 10  | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>   | 3,93  | 2,95  | 4,06  | 3,01  | 4,15  | 2,91  | 4,16  | 2,81  | 5,45  | 3,63  |



| No.         | Sektor   | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |               | 2019          |               | 2020          |               |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |  | Hk            | Hb            |
| 11          | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>  | 2,91          | 2,71          | 2,89          | 2,77          | 2,88          | 2,78          | 2,80          | 2,71          | 2,81          | 2,69          |
| 12          | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>  | 1,32          | 1,16          | 1,31          | 1,14          | 1,34          | 1,14          | 1,35          | 1,13          | 1,35          | 1,11          |
| 13          | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>  | 0,36          | 0,32          | 0,36          | 0,32          | 0,36          | 0,31          | 0,35          | 0,34          | 0,32          | 0,31          |
| 14          | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i> | 3,46          | 3,80          | 3,27          | 3,61          | 3,15          | 3,59          | 3,01          | 3,42          | 2,87          | 3,25          |
| 15          | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>  | 5,76          | 6,55          | 5,82          | 6,78          | 5,73          | 6,79          | 5,59          | 6,68          | 5,62          | 6,78          |
| 16          | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>   | 1,07          | 1,02          | 1,08          | 1,03          | 1,08          | 1,02          | 1,06          | 1,00          | 1,08          | 1,02          |
| 17          | Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>   | 2,86          | 2,53          | 2,90          | 2,60          | 2,93          | 2,61          | 2,90          | 2,64          | 2,71          | 2,62          |
| <b>PDRB</b> |  | <b>100,00</b> |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan nilai sektor dan perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB pada periode tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor utama yang dominan dalam membentuk struktur PDRB Kabupaten Majalengka. Namun apabila dicermati lebih lanjut, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi dan Sektor Real Estate mengalami geliat peningkatan kontribusi sektor terhadap PDRB pada periode 2016-2020, bahkan untuk tahun 2020 berdasarkan data publikasi BPS, PDRB Kabupaten Majalengka mencapai Rp. 32.060.095,00 (satuan milyar). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat geliat pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dibuktikan adanya

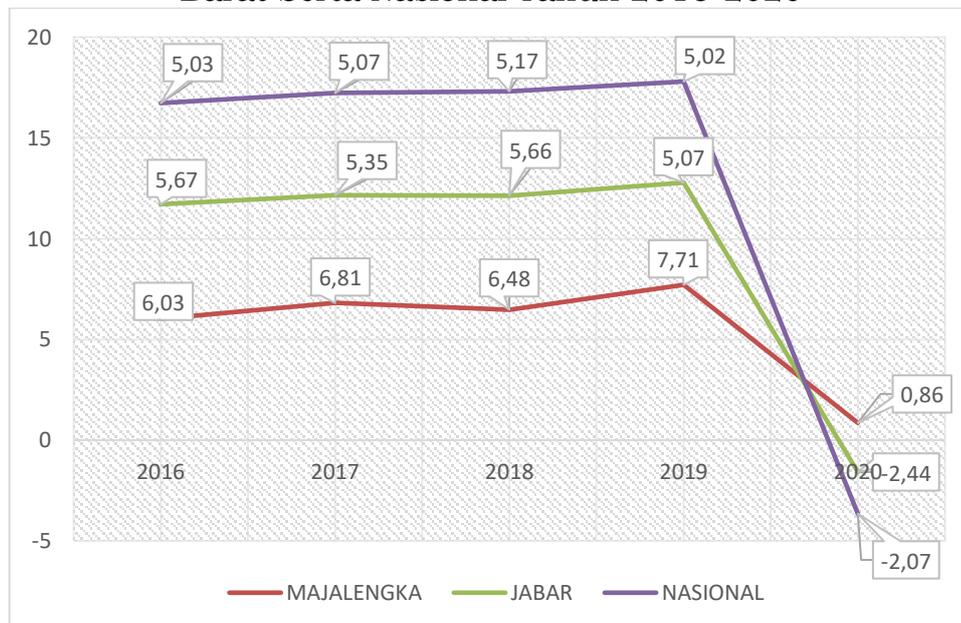


sektor riil berkontribusi terhadap Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Majalengka.

### b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka terus mengalami pertumbuhan yang positif bahkan nilainya lebih tinggi daripada LPE Jawa Barat serta LPE Nasional kecuali untuk tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan menyumbang peningkatan terbesar pada Laju pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebesar 21,95 persen. Secara keseluruhan semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian, yakni mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 3,81 persen. Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021 (diolah).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2020 terjadi pelambatan menjadi sebesar 0,86 persen. Kondisi ini masih tergolong baik karena di Propinsi Jawa Barat pada tahun yang sama hanya 3 (tiga) kabupaten yang pertumbuhannya masih positif yaitu Kota Banjar sebesar 1,04 persen dan Kabupaten Kuningan sebesar 0,09 persen sedangkan kabupaten/kota lainnya termasuk Propinsi Jawa Barat pertumbuhan ekonominya negatif.



### c. PDRB Per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita merupakan PDRB suatu wilayah dibagi jumlah penduduk tengah tahun. Data PDRB per Kapita di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15.  
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | PDRB Per Kapita<br>Atas Dasar Harga Konstan(Rp) |
|-----|-------|---|
| 1.  | 2016  | 14.789.320                                      |
| 2.  | 2017  | 15.740.215                                      |
| 3.  | 2018  | 16.682.130                                      |
| 4.  | 2019  | 17.883.519                                      |
| 5.  | 2020  | 16.650.329                                      |

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Dari tabel di atas, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 pendapatan per kapita sebesar Rp.14.789.320 naik menjadi Rp.17.724.742 pada tahun 2019 kemudian turun menjadi Rp. 16.650.329 pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Majalengka secara riil selalu meningkat setiap tahunnya.

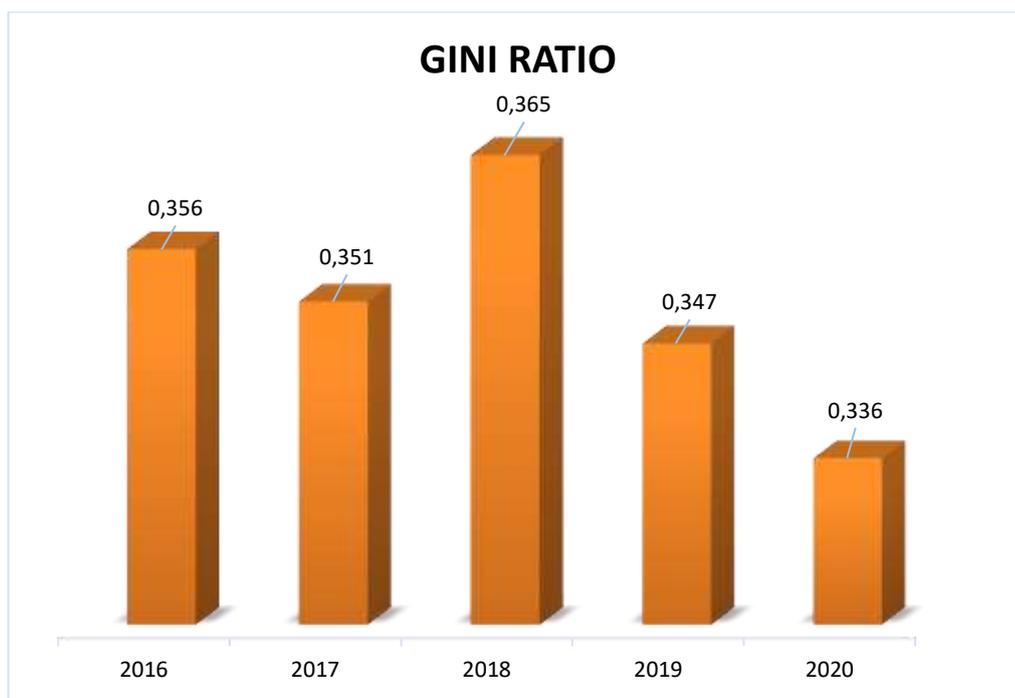
### d. Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.7.

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,3$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.
- $0,3 \leq GR \leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang.
- $GR > 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Gambar 2.7.  
Perkembangan Gini Ratio  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021.

Tabel 2.16  
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Majalengka, Provinsi  
Jawa Barat Serta Nasional

| WILAYAH    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MAJALENGKA | 0,356 | 0,351 | 0,365 | 0,347 | 0,336 |
| JABAR      | 0,402 | 0,393 | 0,407 | 0,402 | 0,403 |
| NASIONAL   | 0,394 | 0,391 | 0,384 | 0,380 | 0,381 |

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2019 sebesar 0,347 dan tahun 2020 menjadi 0,336. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan di Kabupaten Majalengka semakin kecil dan bahkan lebih bagus jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

#### e. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2016-2020, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 yaitu dari semula 152.500 jiwa atau 12,85 % pada tahun 2016 menjadi 121.060 jiwa atau 10,06 % pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan



dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan menjadi sebesar 138.200 jiwa atau 11,43%. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19. Angka ini masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,88% tetapi untuk wilayah Ciayumajakuning, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka masih lebih rendah dari pada Kabupaten Indramayu (12,70%) dan Kabupaten Kuningan (12,82%) pada tahun 2020.

Tabel 2.17.  
Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016-2020

| Uraian   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)                      | 152.500 | 150.260 | 129.290 | 121.060 | 138.200 |
| Persentase Penduduk Miskin (%)                     | 12,85   | 12,60   | 10,79   | 10,06   | 11,43   |
| Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat (%)          | 8,95    | 8,71    | 7,45    | 6,91    | 7,88    |
| Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon (%)        | 9,73    | 9,66    | 8,88    | 8,41    | 9,52    |
| Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon (%)   | 13,49   | 12,97   | 10,70   | 9,94    | 11,24   |
| Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu (%) | 13,95   | 13,67   | 11,89   | 11,11   | 12,70   |
| Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan (%)  | 13,59   | 13,27   | 12,22   | 11,41   | 12,82   |

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD

#### f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka Pada tahun 2016 sebesar 4,50% sampai tahun 2019 terus mengalami



penurunan yaitu sebesar 4,37%. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 TPT Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan sebesar 1,47% menjadi 5,84%, Angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat yang nilainya sebesar 7,69% dan TPT Nasional sebesar 7,07% pada tahun 2020.

Tabel 2.18  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional dalam Persen

| WILAYAH    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|
| MAJALENGKA | 4,50 | 5,02 | 4,95 | 4,37 | 5,84 |
| JABAR      | 8,57 | 8,49 | 8,17 | 7,99 | 7,69 |
| NASIONAL   | 5,50 | 5,33 | 5,34 | 5,28 | 7,07 |

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

#### a. Pendidikan

**Angka Harapan Lama Sekolah** didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021 (diolah)

Tabel 2.19.  
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

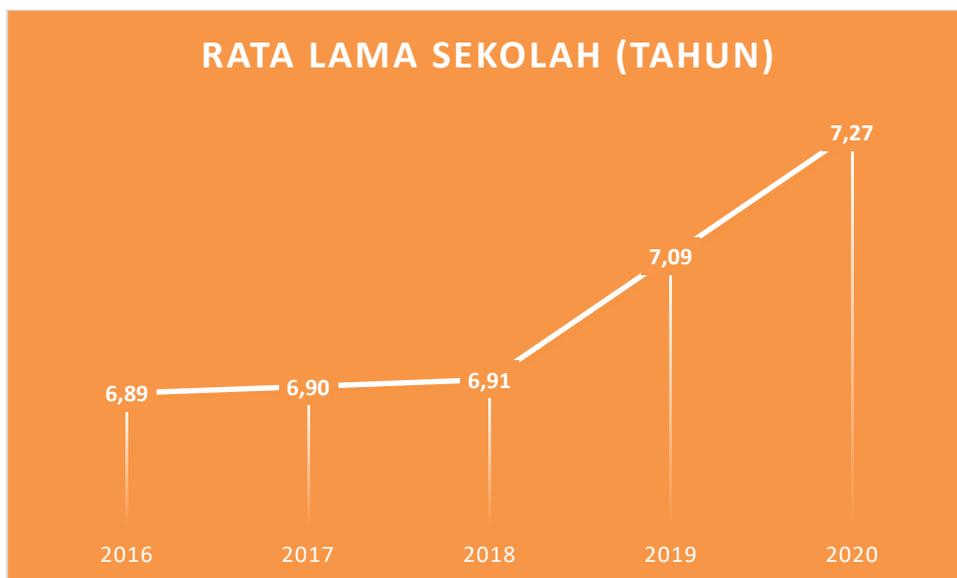
| HLS (TAHUN) | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MAJALENGKA  | 11,89 | 12,18 | 12,19 | 12,21 | 12,22 |
| JABAR       | 12,3  | 12,42 | 12,45 | 12,48 | 12,50 |
| NASIONAL    | 12,72 | 12,85 | 12,91 | 12,95 | 12,98 |

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Selama kurun waktu 2016-2020, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu 11,89 tahun pada tahun 2016, meningkat menjadi 12,21 tahun pada tahun 2019 dan untuk tahun 2020 berdasarkan publikasi BPS sebesar 12,22. Angka ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Majalengka memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,22 tahun, atau setara SMA kelas 3. Angka HLS Kabupaten Majalengka Kondisi tahun 2019 tidak terpaut jauh dengan angka HLS Jawa Barat (12,48 Tahun) serta terpaut sebesar 0,74 tahun dengan angka HLS Nasional (12,95 Tahun).

**Angka Rata Lama Sekolah** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan MYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9.  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021.

Tabel 2.20.  
Perbandingan Angka Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten  
Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

| WILAYAH    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|
| MAJALENGKA | 6,89 | 6,90 | 6,91 | 7,09 | 7,27 |
| JABAR      | 7,95 | 8,14 | 8,15 | 8,37 | 8,55 |
| NASIONAL   | 7,95 | 8,10 | 8,17 | 8,34 | 8,48 |

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Perkembangan Rata Lama Sekolah selama Kabupaten Majalengka pada kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan grafik yang menanjak yaitu dari 6,89 tahun pada tahun 2016 menjadi 7,09 tahun pada 2019 sedangkan *untuk tahun 2020 berdasarkan publikasi BPS sebesar 7,27*. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Majalengka secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,27 tahun atau setara dengan SMP kelas 1. Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir angka Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka masih berada terpaut jauh dibawah RLS Jawa Barat (8,37 tahun) dan Nasional (8,34 Tahun).

## b. Kesehatan

**Angka Harapan Hidup**, Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat



kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21.  
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|-----|-------|-----------------------------|
| 1.  | 2016  | 69,22                       |
| 2.  | 2017  | 69,39                       |
| 3.  | 2018  | 69,68                       |
| 4.  | 2019  | 69,97                       |
| 5.  | 2020  | 70,27                       |

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Berkaitan dengan status gizi khususnya balita, Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun data tahun 2019 sebesar 0,25%, artinya mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,15 %. Perkembangan persentase gizi buruk dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22.  
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten  
Majalengka

| No. | Tahun | Persentase Balita Gizi Buruk (%) |
|-----|-------|----------------------------------|
| 1.  | 2016  | 0,02                             |
| 2.  | 2017  | 0,01                             |
| 3.  | 2018  | 0,04                             |
| 4.  | 2019  | 0,25                             |
| 5.  | 2020  | 0,15                             |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

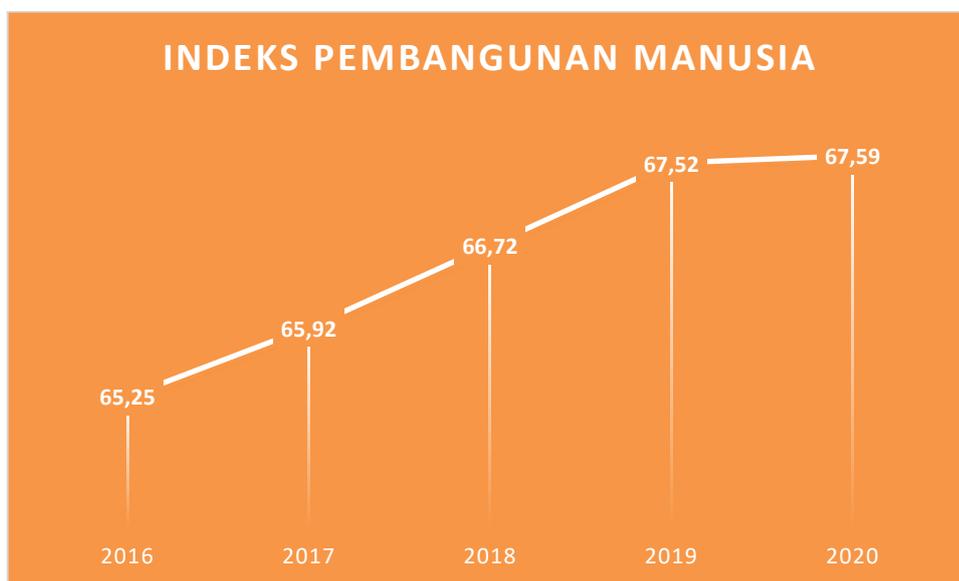
### c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan capaian pembangunan manusia yang diukur oleh sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan,



digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Gambar 2.10  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2021 (diolah).

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka tahun 2020 sebesar 67,59 poin, masih terus meningkat setiap tahunnya. Nilai capaian IPM tersebut masih dalam kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan program-program untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Majalengka.

#### **d. Ketenagakerjaan**

Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Majalengka pada kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 2.23.



Tabel 2.23.  
Rasio Penduduk yang Bekerja  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Rasio Penduduk Yang Bekerja (%) |
|-----|-------|---------------------------------|
| 1.  | 2016  | 94,70                           |
| 2.  | 2017  | 94,98                           |
| 3.  | 2018  | 95,05                           |
| 4.  | 2019  | 95,63                           |
| 5.  | 2020  | 94,16                           |

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.2.3. Fokus Seni dan Budaya

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Perkembangan seni, budaya dan olah raga selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24.  
Perkembangan Seni dan Budaya  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 – 2020

| No. | Indikator                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Jumlah grup kesenian         | 404  | 470  | 494  | 610  | 405  |
| 2.  | Jumlah Bangunan Cagar Budaya | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   |

Sumber: Disparbud Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta



agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- a. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- b. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel 2.25. sebagai berikut:

Tabel 2.25.  
Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016- 2020

| No. | Indikator                  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah Siswa               | 34.205 | 39.552 | 22.732 | 35.996 | 40.843 |
| 2.  | Jumlah anak usia 4-6 tahun | 54.533 | 55.000 | 60.099 | 59.425 | 62.153 |
| 3.  | Rasio/APK                  | 62,72  | 71,91  | 37,82  | 60,76  | 65,71  |

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Angka Partisipasi Kasar (APK)** didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Angka APK SD/MI Kabupaten Majalengka tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Sedangkan APK SMP/MTs tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26.  
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | APK SD/MI   | 104,41 | 105,40 | 104,70 | 101,47 | 104,00 |
| 2.  | APK SMP/MTs | 99,11  | 100,40 | 102,30 | 99,90  | 99,89  |

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



**Angka Partisipasi Murni (APM)** didefinisikan sebagai jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Perkembangan APM SD/MI pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019, sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.  
Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
|-----|-------------|-------|------|------|-------|-------|
| 1.  | APM SD/MI   | 95,7  | 88   | 93,5 | 94    | 95    |
| 2.  | APM SMP/MTs | 81,15 | 79,6 | 80,3 | 99,24 | 97,58 |

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)** merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah dan peningkatan akses masuk sekolah. Adapun APS di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28.  
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | APS SD/MI   | 103,54 | 102,54 | 103,50 | 103,60 | 104,00 |
| 2.  | APS SMP/MTs | 97,26  | 97,11  | 98,50  | 98,70  | 98,80  |

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah,** Salah satu indikator mutu penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian Angka Kelulusan para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi indikator ini adalah 100%



siswa lulus. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Majalengka, angka kelulusan selama periode 2016-2020 setiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan ini tentunya juga dipengaruhi oleh kualitas para pengajar, yang terus meningkat, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV. Selanjutnya sesuai dengan program yang sudah dijalankan yaitu wajar dikdas 9 tahun, diharapkan seluruh siswa yang telah lulus SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. Data Perkembangan Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.29.  
Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | AL SD/MI                              | 100   | 100   | 99,80 | 100   | 100   |
| 2.  | AL SMP/MTS                            | 100   | 100   | 96,80 | 100   | 100   |
| 3.  | AM SD/MI KE SMP/MTS                   | 98,13 | 95,54 | 99,40 | 100   | 99,10 |
| 4.  | AM SMP/MTS KE SMA/MA/SMK              | 81,38 | 80,00 | 90,50 | 90,80 | 91,01 |
| 5.  | GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV | 91,12 | 88,32 | 90,00 | 91,49 | 99,32 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Fasilitas Pendidikan,** salah satu tugas pemerintahan di bidang pendidikan adalah menyediakan Gedung Sekolah yang representatif sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Kondisi Bangunan Sekolah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.30. sebagai berikut:

Tabel 2.30.  
Perkembangan Kondisi Bangunan Ruang Kelas Sekolah Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                               | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Persentase Ruang Kelas SD kondisi Baik  | 59,9 | 39,07 | 35,05 | 30,96 | 25,74 |
| 2.  | Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik | 79,6 | 52,80 | 52,80 | 37,73 | 39,78 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Ketersediaan Sekolah,** Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan



kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada tabel 2.31. sebagai berikut:

Tabel 2.31.  
Ketersediaan Sekolah dan  
Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun  | 1:157 | 1:162 | 1:179 | 1:181 | 1:192 |
| 2.  | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 13-15 tahun | 1:338 | 1:374 | 1:576 | 1:539 | 1:566 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Rasio Guru Terhadap Murid** adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.32.  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 – 2020

| No. | Indikator                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Rasio guru/murid SD/MI            | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:18 | 1:19 |
| 2.  | Rasio guru terhadap murid SMP/MTs | 1:16 | 1:19 | 1:17 | 1:17 | 1:17 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 2. Kesehatan

**Angka Kematian Bayi** adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB)



menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Perkembangan AKI dan AKB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.  
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| NO. | Indikator                                      | TAHUN  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1   | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup   | 6,51   | 4,29   | 4,01   | 3,76   | 3,62   |
| 2   | Angka Kelangsungan Hidup Bayi                  | 993,49 | 995,71 | 995,99 | 996,24 | 996,38 |
| 3   | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup | 4,25   | 4,39   | 4,20   | 4,01   | 3,81   |
| 4   | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | 86,27  | 83,81  | 77,32  | 73,39  | 66,77  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Posyandu**, yaitu suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan posyandu antara lain:

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- Membudayakan NKKBS.
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.



d. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.

Karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Data rasio posyandu dapat dilihat pada tabel 2.34. sebagai berikut:

Tabel 2.34.  
Perkembangan Rasio Posyandu  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2016 - 2020

| No. | Tahun | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita (Jiwa) | Rasio Posyandu Per 1000 Balita |
|-----|-------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| 1.  | 2016  | 1.464           | 97.570               | 1,50                           |
| 2.  | 2017  | 1.466           | 96.026               | 1,53                           |
| 3.  | 2018  | 1.461           | 94.484               | 1,55                           |
| 4.  | 2019  | 1.485           | 92.969               | 1,60                           |
| 5.  | 2020  | 1.489           | 91.473               | 1,63                           |

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



**Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**, di Kabupaten Majalengka terdapat 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah berjalan yaitu RSUD Majalengka dan RSUD Cideres, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam tahap pembangunan yaitu RSUD Talaga, 1 Rumah Sakit Umum Swasta (RS Mitra Prapatan Sumberjaya) di Sumberjaya, 1 Rumah Sakit Khusus Bedah Budi Kasih di Panyingkiran serta 32 Puskesmas dan 73 Pustu yang tersebar di 26 kecamatan.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator kinerja aspek pelayanan umum diantaranya berupa rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu persatuan penduduk. Data tersebut pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.35.

Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik  
Kabupaten Majalengka Tahun 2020

| No. | Kecamatan    | Jumlah      |           |       |            |
|-----|--------------|-------------|-----------|-------|------------|
|     |              | Rumah Sakit | Puskesmas | Pustu | Poliklinik |
| 1.  | Lemahsugih   | -           | 2         | 3     | -          |
| 2.  | Bantarujeg   | -           | 1         | 3     | 1          |
| 3.  | Malausma     | -           | 1         | 3     | -          |
| 4.  | Cikijing     | -           | 1         | 2     | 3          |
| 5.  | Cingambul    | -           | 1         | 5     | -          |
| 6.  | Talaga       | -           | 1         | 3     | 2          |
| 7.  | Banjaran     | -           | 1         | 3     | 1          |
| 8.  | Argapura     | -           | 1         | 3     | -          |
| 9.  | Maja         | -           | 1         | 5     | -          |
| 10. | Majalengka   | 1           | 2         | 2     | 13         |
| 11. | Cigasong     | -           | 1         | 2     | 3          |
| 12. | Sukahaji     | -           | 2         | 1     | -          |
| 13. | Rajagaluh    | -           | 1         | 4     | 1          |
| 14. | Sindangwangi | -           | 1         | 3     | -          |
| 15. | Sindang      | -           | 1         | -     | -          |
| 16. | Leuwimunding | -           | 1         | 2     | 1          |
| 17. | Palasah      | -           | 1         | 2     | 1          |
| 18. | Jatiwangi    | -           | 2         | 2     | 4          |
| 19. | Dawuan       | 2           | 1         | 1     | -          |
| 20. | Kasokandel   | -           | 1         | 1     | 3          |
| 21. | Panyingkiran | 1           | 1         | 1     | 1          |
| 22. | Kadipaten    | -           | 1         | 2     | 4          |
| 23. | Kertajati    | -           | 2         | 8     | 4          |
| 24. | Jatitujuh    | -           | 2         | 2     | 2          |
| 25. | Ligung       | -           | 1         | 5     | 3          |



| No.           | Kecamatan  | Jumlah      |           |           |            |
|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|               |            | Rumah Sakit | Puskesmas | Pustu     | Poliklinik |
| 26.           | Sumberjaya | 1           | 1         | 3         | 4          |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>5</b>    | <b>32</b> | <b>73</b> | <b>51</b>  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.36.  
Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2016-2020

| No. | Indikator  | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,12   | 0,12   |
| 2.  | Cakupan puskesmas (%)                                  | 123,08 | 123,08 | 123,08 | 123,08 | 123,08 |
| 3.  | Cakupan puskesmas pembantu (%)                         | 20,70  | 19,53  | 18,66  | 21,28  | 21,28  |
| 4.  | Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk                 | 0,32   | 0,32   | 0,31   | 0,38   | 0,38   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Pemenuhan tenaga medis dokter** di pelayanan primer sangat berpengaruh pula terhadap pemenuhan SDM kesehatan yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang diterima oleh setiap puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis di beberapa spesifikasi.

Tabel 2.37.  
Jumlah Tenaga Medis Dokter di Kabupaten Majalengka Tahun 2020

| NO | Kecamatan  | Unit Kerja/<br>Puskesmas | Dokter Umum | Dokter Gigi | Dokter Spesialis |
|----|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1  | Lemahsugih | Lemahsugih               | 3           | 1           | -                |
|    |            | Margajaya                | 3           | -           | -                |
| 2  | Bantarujeg | Bantarujeg               | 2           | 1           | -                |
| 3  | Malausma   | Malausma                 | 2           | -           | -                |
| 4  | Cikijing   | Cikijing                 | 3           | 1           | -                |
| 5  | Cingambul  | Cingambul                | 2           | -           | -                |
| 6  | Talaga     | Talaga                   | 3           | 1           | -                |
| 7  | Banjaran   | Banjaran                 | 2           | -           | -                |
| 8  | Argapura   | Argapura                 | 2           | 1           | -                |
| 9  | Maja       | Maja                     | 3           | 1           | -                |
| 10 | Majalengka | Majalengka               | 3           | 1           | -                |



| NO | Kecamatan                  | Unit Kerja/<br>Puskesmas | Dokter<br>Umum | Dokter<br>Gigi | Dokter<br>Spesialis |
|----|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|    |                            | Munjul                   | 2              | 1              | -                   |
| 11 | Cigasong                   | Cigasong                 | 2              | 1              | -                   |
| 12 | Sukahaji                   | Sukahaji                 | 2              | 1              | -                   |
|    |                            | Salagedang               | 3              | -              | -                   |
| 13 | Sindang                    | Sindang                  | 1              | -              | -                   |
| 14 | Rajagaluh                  | Rajagaluh                | 3              | 1              | -                   |
| 15 | Sindangwangi               | Sindangwangi             | 1              | -              | -                   |
| 16 | Leuwimunding               | Leuwimunding             | 2              | 1              | -                   |
| 17 | Palasah                    | Waringin                 | 2              | 1              | -                   |
| 18 | Jatiwangi                  | Jatiwangi                | 3              | 1              | -                   |
|    |                            | Loji                     | 2              | -              | -                   |
| 19 | Dawuan                     | Balida                   | 2              | 1              | -                   |
| 20 | Kasokandel                 | Kasokandel               | 2              | -              | -                   |
| 21 | Panyingkiran               | Panyingkiran             | 2              | -              | -                   |
| 22 | Kadipaten                  | Kadipaten                | 2              | -              | -                   |
| 23 | Kertajati                  | Kertajati                | 2              | 1              | -                   |
|    |                            | Sukamulya                | 2              | -              | -                   |
| 24 | Jatitujuh                  | Jatitujuh                | 5              | 1              | -                   |
|    |                            | Panongan                 | 2              | -              | -                   |
| 25 | Ligung                     | Ligung                   | 2              | 1              | -                   |
| 26 | Sumberjaya                 | Sumberjaya               | 3              | 1              | -                   |
| 27 | RSUD Majalengka            |                          | 34             | 3              | 15                  |
| 28 | RSUD Cideres               |                          | 32             | 3              | 28                  |
| 29 | RS Khusus Bedah Budi Kasih |                          | 4              | -              | -                   |
| 30 | RS Ibu Anak Mitra Plumbon  |                          | 7              | -              | -                   |
| 31 | RS Ibu Anak Livasya        |                          | 3              | -              | -                   |
| 32 | Dinas Kesehatan            |                          | 1              | -              | -                   |
| 33 | Labkesda                   |                          | 1              | -              | -                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.38.  
Rasio Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                            | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                      | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Rasio dokter per 1000 penduduk       | 1,90  | 1,91 | 1,59 | 1,57 | 1,60 |
| 2.  | Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk | 1,40  | 1,42 | 1,32 | 1,39 | 1,39 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



**Komplikasi Kebidanan yang ditangani,** Perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan.

**Pertolongan Persalinan,** Guna meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat dengan indeks kesehatan diantaranya perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

**Cakupan Universal Child Immunization (UCI),** Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkesinambungan terus menggalakan pelaksanaan imunisasi. Kegiatan imunisasi tersebut bukanlah hal baru dalam dunia kesehatan di Indonesia, namun perlu disadari masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum memahami secara utuh tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Kemungkinan penyebabnya dikarenakan masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap adanya efek kurang baik jika diimunisasi atau mitos lainnya. Manfaat dari imunisasi bagi bayi untuk mencegah bayi terjangkit penyakit baru yang menular dan mematikan serta penyakit infeksi masih menjadi masalah di Indonesia.

**Balita Gizi Buruk,** Golden age rentang usianya 0-5 tahun sangat membutuhkan asupan gizi yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, deteksi dini bagi kasus gizi buruk harus dilakukan secara kontinyu. Balita yang mengalami gizi buruk itu pertumbuhannya tidak seimbang dengan usia balita yang wajar. Pertumbuhan mereka lambat, bahkan berat badannya jauh dari berat ideal, selain itu ciri-ciri dan indikasi lainnya adalah kepala membesar dan perut buncit, badan terlihat kurus, kering, dan tulangnya



kelihatan (*stunting*) yang disebabkan tubuh tidak menerima asupan gizi seimbang. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah. Namun pada tahun 2020 target 100 % tidak tercapai tetapi hanya mencapai 97,50. Cakupan Pertolongan Persalinan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Cakupan Balita Gizi Buruk dapat dilihat pada tabel 2.38. sebagai berikut:

Tabel 2.39.

Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| NO. | Indikator   | TAHUN |       |        |        |        |
|-----|---|-------|-------|--------|--------|--------|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1   | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 98,38 | 97,16 | 101,19 | 103,14 | 105,22 |
| 2   | Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)                        | 94,17 | 96,21 | 98,83  | 99,04  | 90,10  |
| 3   | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan  | 100   | 100   | 100    | 100    | 97,50  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan intervensi untuk mengurangi dampak *kekurangan gizi kronis* yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau **stunting**. Hal ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi. Program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Majalengka ke depan sebagai investasi di sumber daya manusia



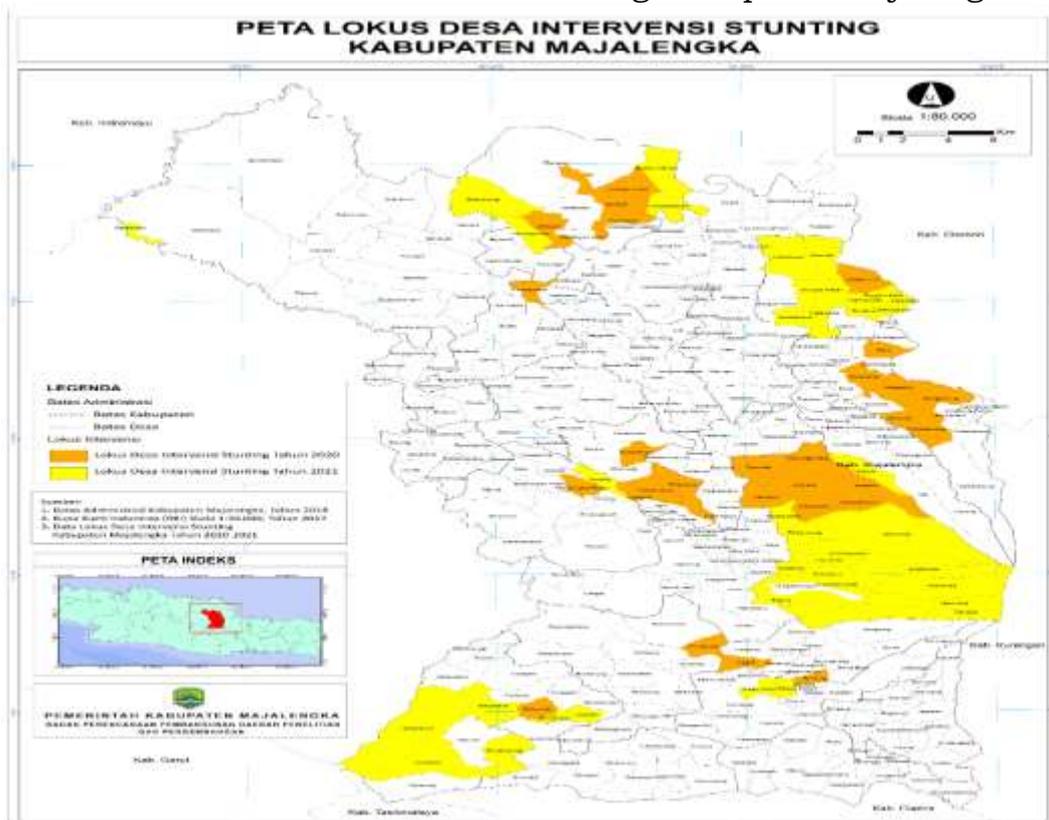
Gambar 2.11

Aksi Konvergensi / Integrasi Penurunan Stunting



Gambar 2.12

Peta Lokus Desa Intervensi Stunting Kabupaten Majalengka



Kabupaten Majalengka terus berusaha dalam percepatan dan penurunan stunting dengan melakukan kampanye perubahan perilaku melalui media online serta media massa lainnya yang didukung oleh OPD terkait stunting untuk mewujudkan Majalengka D'Best (Desa Bebas Stunting) dengan target RPJMD 4,5% Tahun 2021.



Penurunan ini disertai dengan perbaikan dukungan sarana prasarana di Posyandu seperti pengadaan alat ukur tinggi dan berat badan, adanya peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam melakukan pengukuran, pencatatan dan pelaporan serta adanya validasi data pengukuran dan pelaporan. Selain itu, adanya dukungan dari lintas program dan lintas sektor dalam intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi sampai tingkat Desa. Dalam hal ini, komitmen untuk percepatan perbaikan gizi diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan ibu, anak dan pengendalian penyakit melalui pendekatan lintas sektor. Implementasi perbaikan gizi juga dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019. Namun peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara efektif sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit**

**TBC BTA**, Penyakit TBC adalah merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mikrobakterium tuberkulosa dimana Penyakit TBC dapat menyerang pada siapa saja tak terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja. Indonesia menduduki negara terbesar ketiga di dunia dalam masalah penyakit TBC ini.

**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit**

**DBD**, Penyebab kematian penduduk dapat diakibatkan karena penyakit demam berdarah (DBD). Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah virus dengue, yang merupakan virus dari famili Flaviviridae. Terdapat 4 jenis virus dengue yang diketahui dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan mengendalikan vektor nyamuk, antara lain dengan menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu



sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah, dan perbaikan desain rumah. Tingkat pencegahan agar tidak timbulnya penyakit DBD telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Majalengka tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.40.  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1   | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                         | 60,50  | 63,39  | 73,42  | 71,99  | 80,00  |
| 2   | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)  | 43,2   | 46,6   | 40,92  | 73,50  | 58,60  |
| 3   | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)          | 133,16 | 144,33 | 128,66 | 179,17 | 178,00 |
| 4   | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (%) | 1,25   | 0,67   | 1,25   | 1,20   | 1,20   |
| 5   | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 6   | Penderita diare yang ditangani                                  | 56,99  | 58,15  | 60,48  | 88     | 59,42  |
| 7   | angka kejadian malaria per 100.000 penduduk                     | 0      | 0,08   | 0      | 0      | 0      |
| 8   | angka kematian akibat malaria per 1000 penduduk                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin,** Selain melayani pasien umum, pelayanan kesehatan rujukan juga menangani pasien dari keluarga miskin. Pada Tahun 2020 persentase keluarga miskin yang ditangani mencapai 5,36 persen.

**Cakupan Kunjungan Bayi,** Kunjungan bayi di Kabupaten Majalengka pada Puskesmas-puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka angkanya cenderung naik turun. Persentase Pasien Miskin yang Ditangani dan Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.41.  
Cakupan Pelayanan Kesehatan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| NO. | Indikator  | TAHUN  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1   | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 36,06  | 79,88  | 39,60  | 10,04  | 5,36   |
| 2   | Cakupan Kunjungan Bayi (%)                                   | 113,02 | 113,41 | 113,43 | 112,30 | 112,94 |
| 3   | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                               | 95,02  | 96,38  | 99,22  | 99,60  | 103,31 |
| 4   | Cakupan pelayanan nifas                                      | 98,18  | 97,37  | 101,50 | 102,10 | 107,17 |
| 5   | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani            | 81,76  | 86,28  | 103,65 | 107,2  | 102    |
| 6   | Cakupan pelayanan anak balita                                | 100,3  | 103,57 | 105,20 | 105,80 | 106,63 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.42.  
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2020

| NO. | Indikator  | TAHUN  |         |         |
|-----|--|--------|---------|---------|
|     |  | 2018   | 2019    | 2020    |
| 1   | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                               | 99,21% | 99,56%  | 103,31% |
| 2   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                     | 98,50% | 103,14% | 105,22% |
| 3   | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                   | 98,93% | 107,65% | 112,17% |
| 4   | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar  | 100%   | 107,06% | 106,63% |
| 5   | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar    | 97,57% | 94,90%  | 88,74%  |
| 6   | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar              | 5,50%  | 34,25%  | 70%     |
| 7   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 71,49% | 62,20%  | 58,22%  |
| 8   | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          | 19,61% | 18,91%  | 30,22%  |
| 9   | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 25,63% | 80,60%  | 88,36%  |
| 10  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar               | 100%   | 76,58%  | 85,22%  |
| 11  | Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai                                | 78,60% | 74,60%  | 86,35%  |
| 12  | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan                                    | 66,15% | 66,20%  | 116,49% |



| NO. | Indikator                                 | TAHUN |      |      |
|-----|---|-------|------|------|
|     |   | 2018  | 2019 | 2020 |
|     | pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar |       |      |      |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Sejak awal tahun 2020 telah terjadi pandemi covid 19 di dunia dan melanda juga ke Indonesia termasuk Kabupaten Majalengka. Langkah penanganan pencegahan meluasnya penyebaran virus Covid 19 dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai instansi lintas sector. Penanganan bersifat promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan.

**Kondisi Jalan**, kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.43.  
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016-2020

| No. | Indikator  | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1   | Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (Km)   | 715,60 | 715,60 | 918,73 | 918,73 | 918,73 |
| 2   | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik  | 90,87  | 86,83  | 78,28  | 68,10  | 63,17  |
| 3   | Rasio panjang jalan Kabupaten dengan jumlah penduduk (Km/Jiwa)                                       | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 4   | Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan Permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km) | 337,88 | 337,88 | 337,88 | 337,88 | 337,88 |

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Kondisi Jaringan Irigasi**, Kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung, Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Luas irigasi Kabupaten Majalengka kondisi baik dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.44.

## Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                                     | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Persentase jaringan irigasi Kab. kondisi baik | 72,40 | 76,00 | 76,30 | 76,30 | 76,77 |

Sumber: Diolah dari Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Penataan Ruang**, Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.

## Kondisi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Ketaatan terhadap RTRW (%)  | 83,67 | 83,67 | 99,29 | 90,07 | 91,07 |
| 2.  | Rasio bangunan ber- IMB (%) | 5,48  | 6,02  | 6,21  | 6,90  | 6,90  |

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Kondisi Perumahan**, Kondisi rumah tinggal dan rumah tangga di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46.

## Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perumahan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak (%) | 63,29 | 63,43 | 65,14 | 68,47 | 68,49 |
| 2.  | Persentase Penduduk berakses air minum (%)                | 71,10 | 72,02 | 74,17 | 80,27 | 80,45 |
| 3.  | Persentase Rumah Layak Huni (%)                           | 98,92 | 98,36 | 94,98 | 94,63 | 94,93 |
| 4.  | Cakupan ketersediaan rumah layak huni *)                  | 98,6  | 98,9  | 100   | 94,63 | 94,96 |
| 5.  | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau *)       | 69,01 | 77,08 | 78,17 | 81,27 | 81,45 |

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

\*) Indikator SPM Perumahan Rakyat

**Permukiman**, pada Tahun 2020 Rasio permukiman layak huni mencapai angka 99,05%. Lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.47.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Permukiman di  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | Rasio permukiman layak huni (%)                         | 99,63 | 99,37 | 99,39 | 99,60 | 99,05 |
| 2   | Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)               | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,050 | 0,050 |
| 3   | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 3,14  | 3,14  | 3,14  | 3,14  | 3,14  |

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.  
Indikator Capaian Pembangunan  
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan  
Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Rasio Petugas Linmas per 10.000 Penduduk  | 27,44 | 27,21 | 26,82 | 26,22 | 26,22 |
| 2.  | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3.  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)   | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| 4.  | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 9,00  | 12,73 | 54,62 | 31,78 | 51,19 |
| 5.  | Persentase Penegakan PERDA  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6.  | Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk   | 2,1   | 2,3   | 2,2   | 2,1   | 2,2   |
| 7.  | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan  | 6     | 6,1   | 6,1   | 6,1   | 3,9   |
| 8.  | Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)   | 26,9  | 26,9  | 26,9  | 26,9  | 26,9  |
| 9.  | Jumlah kejadian yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (kejadian)   | 24    | 75    | 131   | 120   | 100   |

Sumber: Diolah dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



## 6. Sosial

Pada Tahun 2020, Kabupaten Majalengka memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 111 unit. Secara lengkap data penanganan masalah sosial di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.49.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016 | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  |
|-----|---|------|-------|--------|-------|-------|
| 1.  | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) | 36   | 135   | 135    | 111   | 111   |
| 2.  | Persentase PPKS yg memperoleh bantuan sosial (%)                              | 38,7 | 75,80 | 135,11 | 91,67 | 83,70 |

Sumber: Diolah dari Dinas Sosial, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### a. Tenaga Kerja

**Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun,** Penyelesaian sengketa pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Undang-undang ditentukan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (atau gabungan pengusaha) dengan pekerja (atau serikat pekerja) yang penyebabnya biasanya dikarenakan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Pada tahun 2020 ada 10 kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,** Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. Pada Tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 69,66%.

**Pencari Kerja yang Ditempatkan,** Belum seimbang antara jumlah pencari kerja, penempatan dan jumlah kebutuhan perusahaan disebabkan sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakcocokan antara minat dengan kebutuhan. Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh



pencari kerja sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimana para pencari kerja tidak memiliki kompetensi dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu minimnya keterampilan yang dimiliki pencari kerja menjadi masalah, sebagai penyebab tingkat pengangguran masih tinggi. Lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan keterampilan maupun kompetensi pencari kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Majalengka tahun 2020 adalah sebesar 49,71%.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**, Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.



Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,84%. Besar kecilnya angka TPT salah satunya bisa dipengaruhi oleh banyaknya kesempatan usaha seiring dengan masuknya investasi yang cukup besar di Kabupaten Majalengka.

Data situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka secara lengkap bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketenagakerjaan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Jumlah sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)                       | 11    | 6     | 9     | 2     | 10    |
| 2   | Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 83    | 83    | 67    | 50    | 80    |
| 3   | Pencari kerja yang ditempatkan (%)  | 32,32 | 24,90 | 39,06 | 70,91 | 49,41 |
| 4   | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat    | 100   | 80    | 70    | 100   | 100   |
| 5   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja* (%)                                   | 67,98 | 66,11 | 65,76 | 67,97 | 69,66 |
| 6   | Tingkat Pengangguran Terbuka* (%)   | N/A   | 5,02  | 4,95  | 4,37  | 5,84  |

Sumber: Diolah dari Dinas Ketenagakerjaan KUKM, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

\*) Sumber BPS Kabupaten Majalengka

## b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah,** Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2020 sebesar 52,63 %. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai



dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat.

**Rasio KDRT** Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jumlah laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana sebanyak 4 (empat) kasus pada tahun 2020.

Selain KDRT, hal lain yang diperhatikan adalah penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis, penyadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM, Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Majalengka tahun 2020 sebanyak 20 kasus yang telah diselesaikan. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan SPM mencapai 100% pada tahun 2020.

Tabel 2.51.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka (%) | 49,64 | 49,64 | 50,37 | 51,53 | 52,63 |



| No. | Indikator  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 2   | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)                                    | 16   | 16   | 16   | 12   | 12   |
| 3   | Jumlah kekerasan rumah tangga (KDRT)   | 6    | 6    | 1    | 1    | 4    |
| 4   | Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 5   | Jumlah korban KtP/A yang mengalami kekerasan   | 37   | 22   | 20   | 17   | 20   |
| 6   | Jumlah layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan           | 37   | 22   | 20   | 17   | 20   |
| 7   | Persentase Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: DP3AKB Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### c. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Capaian ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Skor PPH Ketersediaan (Nilai) | 83,5 | 87   | 87   | 86,9 | 93,8 |



| No. | Indikator                               | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2   | Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)  | 2.446,38 | 2.641,21 | 2.651,43 | 2.627,22 | 2.540,04 |
| 3   | Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) | 80,91    | 86,45    | 90,06    | 83,83    | 74,85    |

Sumber: Diolah dari Dinas KP3 Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan.

Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan yang mendapat sanksi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Capaian pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No. | Indikator  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Indeks kualitas Air (Poin)                       | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| 2.  | Indeks kualitas Udara (Poin)                     | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 84,49 | 87,65 |
| 3.  | Indeks kualitas Tutupan Lahan (Poin)             | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 50,97 | 50,97 |
| 4.  | Persentase penanganan sampah yang tertangani (%) | 30,00 | 31,50 | 32,89 | 33,46 | 35,15 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dalam kependudukan dan pencacatan sipil sering dengan waktu mengalami kemajuan baik dalam hal manajemen dan pelaksanaan secara teknis. Dalam urusan kependudukan dan catatan sipil sudah sangat memasyarakat dengan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor tersebut sifatnya unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang. Kemudian dokumen kependudukan lainnya berupa Akte Lahir dan Kartu Keluarga yang kedudukannya sama pentingnya dengan KTP, jadi seluruh warga



masyarakat sudah seharusnya mengindahkan dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 2.54.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)      | 67,75 | 70,61 | 71,50 | 73,40 | 98,00 |
| 2   | Rasio pasangan berakate nikah (Non Muslim) (%)      | 18    | 19,00 | 20,00 | 29,00 | 30,05 |
| 3   | Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   |
| 4   | Penerapan KTP Berbasis NIK                          | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| 5   | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)         | 75    | 82,39 | 90    | 98,70 | 98,00 |
| 6   | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)       | 44,60 | 55    | 62,90 | 78,64 | 95,80 |
| 7   | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%)               | 97,03 | 98,31 | 100   | 100   | 100   |
| 8   | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)        | 1,20  | 1,60  | 3     | 74,74 | 100   |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator capaian pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

| No. | Indikator  | Tahun |       |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik        | 98,00 | 98,78 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2   | Persentase jumlah kelompok binaan PKK                                      | 7,58  | 7,58  | 7,58  | 7,58  | 7,58  |
| 3   | Persentase LPM aktif   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4   | Persentase PKK aktif   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5   | Persentase Posyandu aktif  | 99,19 | 99,32 | 100   | 100   | 100   |
| 6   | Persentase partisipasi masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 11,25 | 12,17 | 14,76 | 15,25 | 15,25 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan mempromosikan pendayagunaan kaum muda. Akses yang lebih baik untuk metode kontrasepsi yang aman dan terjangkau akan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Oleh karena itu sejak 2005 masalah kesehatan reproduksi dimasukkan menjadi salah satu indikator pencapaian MDGs. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau tiga orang, berarti program KB sudah berhasil.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Majalengka sebesar 2,32 pada tahun 2020, angka itu sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak kelahiran bayi.

Tabel 2.56.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Rata-rata jumlah anak per keluarga  | 1,12  | 1,12  | 1,14  | 1,13  | 2,32  |
| 2.  | Rasio akseptor KB (%)   | 77,24 | 77,69 | 78,37 | 79,94 | 79,77 |
| 3.  | Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu pada masa usia subur /Total Fertility Rate | 2,30  | 2,16  | 2,32  | 2,27  | 2,32  |
| 4.  | Persentase Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (%)                | 77,24 | 77,69 | 78,37 | 79,94 | 80,25 |
| 5.  | Pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)                              | 1,84  | 1,97  | 2,03  | 1,93  | 1,93  |
| 6.  | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)                            | 8,88  | 9,34  | 8,84  | 7,67  | 8,32  |
| 7.  | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)                               | 18,93 | 15,27 | 19,98 | 19,65 | 19,87 |
| 8.  | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)                              | 29,47 | 28,71 | 27,61 | 25,09 | 21,31 |
| 9.  | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)                                     | 81,66 | 80,18 | 80,15 | 80,12 | 81,18 |
| 10. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB(%)                                      | 83,1  | 83,8  | 72,25 | 72,25 | 70,96 |
| 11. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)                                     | 76,12 | 73,62 | 73,60 | 72,25 | 70,39 |

Sumber: Diolah dari Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**h. Perhubungan**

Saat ini Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja, Talaga dan Bantarujeg. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati akan memerlukan pembangunan terminal terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di sekitarnya ke Bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR.

Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di kabupaten majalengka akan dibahas pada tabel dibawah ini sebagai capaian pembangunan urusan perhubungan.

Tabel 2.57.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perhubungan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No | Indikator  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      |
|----|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1. | Rasio ijin trayek  | 1 : 19     | 1 : 19     | 1 : 19     | 1 : 19    | 1:7       |
| 2. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum   | 92         | 93         | 93         | 93        | 93        |
| 3  | Persentase Pemasangan Rambu-rambu  | 28,09      | 30,75      | 38,34      | 40,57     | 41,48     |
| 4  | Persentase layanan angkutan darat  | 66,30      | 73,67      | 77,55      | 88,79     | 77,99     |
| 5  | Jumlah arus penumpang angkutan umum  | 12.521.406 | 11.269.266 | 10.017.126 | 8.492.920 | 4.756.024 |
| 6  | Jumlah kendaraan bermotor angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor | 14.461     | 13.563     | 14.615     | 14.772    | 13.141    |
| 7  | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan   | 1 : 6,63   | 1 : 6,63   | 1 : 6,63   | 1 : 6,63  | 1 : 6,65  |
| 8  | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                                      | 12.276.235 | 11.048.612 | 10.496.181 | 9.167.040 | 2.619.360 |
| 9  | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun                       | 2.475.132  | 2.227.619  | 2.599.446  | 2.291.760 | 654.840   |

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Berdasarkan data dua tahun terakhir pada tahun 2016-2020 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami kenaikan yaitu dari sebesar 1:6,63 menjadi 1:6,65 sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2019 sebanyak 9.167.040 orang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.619.360 orang. Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun pada tahun 2019 sebanyak 2.291.760 orang sedangkan tahun 2020 sebanyak 654.840 orang.

#### i. Komunikasi dan Informatika

Indikator capaian pembangunan bidang urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator  | Tahun |       |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%) | 17    | 17    | 20    | 23    | 59    |
| 2.  | Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)   | 57,56 | 57,81 | 59,30 | 65,28 | 74,75 |
| 3.  | Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)  | 39,00 | 39,18 | 37,77 | 37,89 | 37,95 |
| 4.  | Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)  | 55    | 62    | 65    | 66    | 66    |
| 5.  | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)                                     | 39    | 46    | 50    | 50    | 51    |

Sumber: Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator capaian pembangunan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Persentase koperasi aktif        | 47,27% | 47,27% | 34,24% | 24,28% | 37,37% |
| 2.  | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |



| No. | Indikator                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.  | Persentase BPR/LKM aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### k. Penanaman Modal

Selama periode 2016-2020, realisasi investasi di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp.629,36 miliar pada tahun 2017, menjadi Rp. 7,269 Triliun pada tahun 2019 namun turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 2,396 Triliun. Sama halnya dengan jumlah pelaku usaha yang melakukan investasi, jumlahnya meningkat dari 751 unit pada Tahun 2018 menjadi 1.512 unit pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 614 unit.

Tabel 2.60.  
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020 (dalam Miliar rupiah)

| No.           | Indikator                | Tahun         |               |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                          | 2016          | 2017          | 2018            | 2019            | 2020            |
| 1.            | Perusahaan Mikro & Kecil | 119,80        | 77,46         | 142,77          | 54,13           | 82,99           |
| 2.            | Perusahaan Menengah      | 64,32         | 67,30         | 89,84           | 12,87           | 58,63           |
| 3.            | Perusahaan Besar         | 271,49        | 484,60        | 1.056,02        | 2.026,48        | 2.254,56        |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>455,61</b> | <b>629,36</b> | <b>1.288,62</b> | <b>2.093,48</b> | <b>2.396,18</b> |

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.61.  
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020

| No.           | Indikator                  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019         | 2020       |
|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1.            | Perusahaan Mikro dan Kecil | 627        | 427        | 696        | 253          | 544        |
| 2.            | Perusahaan Menengah        | 34         | 26         | 46         | 8            | 42         |
| 3.            | Perusahaan Besar           | 3          | 5          | 9          | 40           | 28         |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>664</b> | <b>458</b> | <b>751</b> | <b>1.512</b> | <b>614</b> |

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### 1. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.



Demikian halnya dengan olah raga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Tabel 2.62.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No | Indikator   | Satuan     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah organisasi pemuda yang aktif               | organisasi | 54   | 54   | 54   | 60   | 60   |
| 2  | Jumlah Wirausaha muda                             | buah       | 75   | 75   | 75   | 80   | 80   |
| 3  | Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar | cabor      | 20   | 20   | 24   | 26   | 33   |
| 4  | Jumlah pelatih bersertifikat                      | Orang      | 75   | 75   | 75   | 87   | 128  |
| 5  | Cakupan pembinaan atlet muda                      | Orang      | 94   | 94   | 95   | 97   | 125  |
| 6  | Jumlah prestasi olahraga                          | Medali     | 12   | 48   | 32   | 42   | 2    |

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### m. Statistik

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik adalah tersedianya buku “Kabupaten dalam angka” dan “PDRB kabupaten” yang selama ini telah berhasil terpenuhi.

Tabel 2.63.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No. | Indikator   | 2016                      | 2017                      | 2018                      | 2019                      | 2020                      |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Buku “kabupaten dalam angka”                        | ada                       | ada                       | ada                       | ada                       | ada                       |
| 2.  | Buku “PDRB kabupaten”                               | ada                       | ada                       | ada                       | ada                       | ada                       |
| 3.  | Tersedianya sistem data statistik yang terintegrasi | ada (belum ter-integrasi) |

Sumber: Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**n. Kebudayaan**

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selama 2016-2020, setiap tahunnya dilaksanakan Festival Seni dan Budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya sebagaimana pada tabel 2.64. berikut ini:

Tabel 2.64.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kebudayaan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1.  | Penyelenggaraan festival seni dan budaya   | 2    | 2    | 7    | 3    | 2    |
| 2.  | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan  | 108  | 108  | 125  | 125  | 125  |
| 3.  | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar dengan status milik pemda                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 4.  | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.  | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu   | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 6.  | Jumlah sumberdaya bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/ atau sertifikasi | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    |
| 7.  | Jumlah sarana prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    |

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**o. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun



menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat. Sesuai dengan Indeks Membaca Masyarakat, terdapat beberapa variabel yang mendukung Indeks Membaca Masyarakat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.65.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perpustakaan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No. | Indikator   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                              | 19.800 | 23.790 | 9.705  | 10.571 | 2.540  |
| 2.  | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                     | 30.000 | 14.183 | 40.331 | 40.331 | 39.861 |
| 3.  | Jumlah perpustakaan   | 863    | 1.070  | 1.497  | 1.497  | 1.171  |
| 4.  | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat | 1      | 1      | 1      | 3      | 5      |
| 5.  | Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai                  | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### p. Kearsipan

Kinerja pengelolaan arsip daerah dapat diukur dari capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.66. sebagaimana berikut.

Tabel 2.66.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kearsipan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016–2020

| No. | Uraian  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 32,14 | 24,07 |
| 2.  | Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |



| No. | Uraian   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.  | Persentase Pembinaan Tata Kearsipan ke OPD dan Kecamatan | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 32,14 | 16,25 |

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Pertanian

**Komoditas Unggulan Tanaman Pangan**, selama tahun 2016-2020 terdiri atas Padi, Jagung dan Kedelai. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Produksi Komoditas Unggulan Tanaman Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67.

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Uraian          | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Padi :          |         |         |         |         |         |
|     | Luas Tanam (Ha) | 129.456 | 126.802 | 120.528 | 97.977  | 123.724 |
|     | Luas Panen (Ha) | 115.715 | 132.470 | 117.858 | 111.724 | 110.199 |
|     | Produksi (Ton)  | 767.436 | 872.294 | 781.285 | 722.411 | 724.834 |
| 2.  | Jagung :        |         |         |         |         |         |
|     | Luas Tanam (Ha) | 18.768  | 21.054  | 15.967  | 18.120  | 19.477  |
|     | Luas Panen (Ha) | 17.877  | 19.074  | 17.819  | 18.911  | 19.533  |
|     | Produksi (Ton)  | 141.559 | 151.646 | 138.074 | 146.130 | 150.647 |
| 3.  | Kedelai :       |         |         |         |         |         |
|     | Luas Tanam (Ha) | 1.696   | 1.606   | 1.771   | 3.036   | 1.492   |
|     | Luas Panen (Ha) | 1.474   | 538     | 2.552   | 1.284   | 2.923   |
|     | Produksi (Ton)  | 2.530   | 916     | 4.440   | 2.152   | 4.977   |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura**, Komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran terdiri atas Bawang Merah, Cabai Besar dan Kentang. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Produksi Komoditas Unggulan Tanaman hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



| No. | Uraian          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Bawang Merah :  |        |        |        |        |        |
|     | Luas Tanam (Ha) | 3.285  | 3.230  | 2.747  | 2.953  | 2.540  |
|     | Luas Panen (Ha) | 3.344  | 3.148  | 2.676  | 2.943  | 2.742  |
|     | Produksi (Ton)  | 32.329 | 37.705 | 31.981 | 37.973 | 35.167 |
| 2.  | Cabai Besar :   |        |        |        |        |        |
|     | Luas Tanam (Ha) | 676    | 966    | 739    | 579    | 587    |
|     | Luas Panen (Ha) | 1.150  | 780    | 724    | 780    | 669    |
|     | Produksi (Ton)  | 11.937 | 12.452 | 13.053 | 12.467 | 7.283  |
| 3.  | Kentang :       |        |        |        |        |        |
|     | Luas Tanam (Ha) | 242    | 149    | 258    | 261    | 380    |
|     | Luas Panen (Ha) | 275    | 150    | 230    | 237    | 393    |
|     | Produksi (Ton)  | 4.600  | 2.607  | 3.601  | 4.193  | 7.256  |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**Komoditas Unggulan Buah-buahan,** Komoditas unggulan tanaman Buah-buahan terdiri atas Mangga, Durian dan Jambu Biji. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Unggulan Buah-buahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Uraian          | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Mangga :        |           |           |           |           |           |
|     | Luas Tanam (Ha) | 10.925,61 | 11.046,89 | 11.131,60 | 11.081,20 | 11.092,09 |
|     | Luas Panen (Ha) | 4.056,42  | 4.171,12  | 4.166,97  | 4.307,31  | 4.673,11  |
|     | Produksi (Ton)  | 37.529,30 | 60.007,50 | 44754,69  | 54.887,24 | 52.210,60 |
| 2.  | Durian :        |           |           |           |           |           |
|     | Luas Tanam (Ha) | 2.190,50  | 2.203,10  | 2.203,84  | 2.267,55  | 2.294,74  |
|     | Luas Panen (Ha) | 810,3     | 596,51    | 952,83    | 623,97    | 551,43    |
|     | Produksi (Ton)  | 6.265,10  | 5.150,60  | 11263,47  | 7.369,29  | 8.889,90  |
| 3.  | Jambu Biji :    |           |           |           |           |           |
|     | Luas Tanam (Ha) | 633,27    | 643,06    | 655,53    | 651,65    | 651,47    |
|     | Luas Panen (Ha) | 319,65    | 329,67    | 245,37    | 287,18    | 240,73    |
|     | Produksi (Ton)  | 5.260,70  | 5.369,30  | 3618,46   | 2.943,63  | 2.803,60  |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu daya saing produk agribisnis. Dari kedua komponen tersebut sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian



besar didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia khususnya pembinaan kelompok tani. Indikator Capaian Bidang Urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Pertanian  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No | Indikator   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)                | 26,11   | 24,55   | 23,63   | 22,65   | 22,50   |
| 2. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya ton/per hektar | 6,49    | 6,58    | 6,63    | 6,47    | 6,58    |
| 3. | Produksi Tanaman Padi/bahan Pangan Utama Lokal lainnya (ton)            | 767.212 | 872.294 | 781.285 | 722.411 | 724.834 |
| 4. | Luas Areal Lahan Basah Pertanian (Ha)                                   | 50.459, | 50.405  | 50.405  | 50.322  | 50.322  |
| 5. | Luas Areal Lahan Kering Pertanian (Ha)                                  | 25.622  | 25.622  | 25.622  | 25.622  | 25.622  |
| 6. | Cakupan Bina Kelompok Petani (kelompok)                                 | 2.316   | 2.291   | 2.297   | 2.286   | 2.286   |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 2. Peternakan

Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Jumlah Populasi dan Produksi Peternakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71.  
Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Jenis             | Tahun (Ekor) |            |            |            |            |
|-----|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                   | 2016         | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1.  | Ayam Ras Pedaging | 17.436.120   | 17.394.600 | 17.398.920 | 17.406.000 | 17.842.680 |
| 2.  | Domba             | 898.169      | 950.130    | 1.138.261  | 1.291.098  | 1.425.428  |
| 3.  | Sapi Potong       | 13.851       | 13.966     | 14.519     | 14.834     | 15.073     |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.72.  
Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Jenis             | Tahun (Ton) |           |           |           |           |
|-----|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                   | 2016        | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1.  | Ayam Ras Pedaging | 26.154,18   | 24.352,44 | 24.358,49 | 22.819,27 | 23.391,75 |
| 2.  | Domba             | 1.219,63    | 1.534,94  | 1.535,08  | 1.584,29  | 1.745,09  |
| 3.  | Sapi Potong       | 2.157,08    | 2.158,90  | 2.161,40  | 2.227,69  | 2.272,63  |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 3. Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah Teh, Tembakau, Kopi, Cengkeh, dan tebu, sebagai berikut:

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.73.  
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Komoditas | Tahun (Ha) |          |          |          |          |
|-----|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
|     |           | 2016       | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| 1   | Teh       | 672,31     | 672,31   | 672,31   | 672,31   | 661,20   |
| 2   | Tembakau  | 1.420,70   | 1.045,25 | 847,15   | 847,20   | 1.461,30 |
| 3   | Kopi      | 1.017,13   | 1.029,88 | 1.031,94 | 1.071,79 | 1.080,06 |
| 4   | Cengkeh   | 2.086,96   | 2.086,96 | 2.086,97 | 2.086,97 | 2.087,00 |
| 5   | Tebu      | 556,74     | 482,64   | 391,80   | 391,80   | 3.012,09 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.74.  
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Komoditas        | Tahun (Ton) |          |          |          |           |
|-----|------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
|     |                  | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     | 2020      |
| 1   | Teh              | 1.404,40    | 1.306,30 | 1.306,30 | 420      | 458,20    |
| 2   | Tembakau         |             |          |          |          |           |
|     | - Daun           | 1.106,86    | 5.226,25 | 4.195,95 | 4.512,19 | 8.535,90  |
|     | - Rajangan       | 737,90      | 940,73   | 839,19   | 902,40   | 813,70    |
| 3   | Kopi             | 1.015,84    | 830,87   | 932,98   | 1.151,63 | 1.317,90  |
| 4   | Cengkeh          |             |          |          |          |           |
|     | - Bunga basah    | 2.056,98    | 2.402,40 | 2.349,30 | 2.996,94 | 3.048,20  |
|     | - Minyak cengkeh | 53,40       | -        | -        | -        | -         |
| 5   | Tebu             | 2.566,76    | 1.516,77 | 2.088,46 | 2.892,30 | 25.115,80 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



#### 4. Kelautan dan Perikanan

Komoditas unggulan perikanan tahun 2020, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.  
Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Jenis           | Tahun (Ton) |          |          |          |          |
|-----|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                 | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| 1.  | Ikan Mas        | 1.776,03    | 1.429,32 | 1.242,79 | 1.314,83 | 1.338,39 |
| 2.  | Ikan Nila       | 5.090,26    | 3.911,86 | 3.868,15 | 3.898,98 | 3.939,94 |
| 3.  | Ikan Nilem      | 251,23      | 213,67   | 203,20   | 217,91   | 238,47   |
| 4.  | Ikan Tambak     | 91,69       | 85,03    | 81,49    | 91,49    | 106,94   |
| 5.  | Ikan Mujaer     | 7,97        | 17,53    | 17,58    | 17,58    | 17,58    |
| 6.  | Ikan Lele       | 1.956,59    | 1.580,58 | 1.427,38 | 1.458,38 | 1.486,00 |
| 7.  | Ikan Sepat Siem | 144,45      | 119,28   | 114,32   | 94,32    | 108,55   |
| 8.  | Ikan Bawal      | 41,73       | 32,86    | 31,49    | 33,49    | 47,53    |
| 9.  | Ikan Tawes      | 149,88      | 133,11   | 129,25   | 125,25   | 143,59   |
| 10. | Udang Galah     | 19,99       | 45,15    | 45,28    | 47,13    | 47,13    |
| 11. | Belut           | 28,40       | 22,60    | 21,67    | 31,67    | 56,39    |
| 12. | Ikan Gurame     | 1.024,64    | 853,44   | 853,44   | 873,44   | 893,65   |
| 13. | Ikan Gabus      | 15,96       | 34,66    | 34,76    | 34,76    | 38,48    |
| 14. | Ikan Beunteur   | 28,39       | 57,46    | 57,61    | 57,61    | 58,70    |
| 15. | Ikan Lalawak    | 26,52       | 48,52    | 48,65    | 48,65    | 49,04    |
| 16. | Ikan Paray      | 21,16       | 46,97    | 47,11    | 47,35    | 48,56    |
| 17. | Ikan Seren      | 10,33       | 22,92    | 22,99    | 22,99    | 23,54    |
| 18. | Ikan Tagih      | 26,77       | 59,42    | 59,59    | 59,59    | 60,79    |
| 19. | Ikan Deleg      | 4,75        | 25,45    | 25,52    | 25,52    | 26,09    |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Indikator Capaian Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)   | 23,41    | 27,74    | 25,10    | 25,46    | 25,46    |
| 2   | Produksi perikanan (ton)   | 9.337,50 | 9.086,04 | 8.332,27 | 8.500,94 | 8.682,23 |
| 3   | Produksi perikanan kelompok nelayan (%)  | 9,60     | 9,52     | 8,48     | 8,59     | 8,50     |
| 4   | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)       | 18,45    | 8,08     | 6,36     | 6,28     | 6,20     |
| 5   | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (rasio) | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     |
| 6   | Nilai tukar nelayan  | 100,70   | 100,81   | 100,33   | 100,33   | 100,36   |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Ikan merupakan sumber protein hewani dan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi diantaranya mengandung mineral, vitamin dan lemak tak jenuh. Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi. Dalam kurun waktu 2016-2020, rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun di Majalengka mencapai 25,46 kg/kapita pada tahun 2020.

## 5. Pariwisata

Kabupaten Majalengka memiliki potensi wisata berupa wisata alam, wisata budaya/wisata sejarah, wisata minat khusus dan agrowisata. Di masa mendatang, sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka akan mengalami kemajuan seiring dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Pengembangan sektor wisata pun dipengaruhi beberapa faktor antara lain terjadinya kejenuhan objek-objek wisata alam akibat hambatan-hambatan aksesibilitas dan kerusakan daya tarik alamiah. Untuk itu, dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariasi.

Pembangunan destinasi wisata mampu memberikan *multiplier effect* pada pertumbuhan UMKM, selain itu juga akan menumbuhkan usaha perhotelan dan restoran/kuliner yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga perekonomian di Kabupaten Majalengka dapat meningkat. Adapun sebaran dan potensi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Majalengka antara lain:

### a. Wisata Alam:

Kebun Teh Cipasung (Lemahsugih), Situ Cikencong (Lemahsugih), Curug Tapak Kuda Simpung (Lemahsugih), Bantar Merak High Land (Lemahsugih), Gunung Cakra Buana (Lemahsugih), Batu Uncal (Lemahsugih), Batu Lawang (Lemahsugih), Pesona Gunung Bitung (Bantarujeg), Wana Wisata Pasir Ole ole (Bantarujeg), Kebun Teh (Malausma), Situ Batu (Malausma), Bukit Pohon Jomblo, Perkebunan Buah Kesemek (Cikijing), Puncak Ciinjuk (Cikijing),



Bukit Kandaga (Cikijing), Air Terjun Cibali (Cingambul), Situ Nyi Mas Cincin/Jahim (Cingambul), Mbung Jahim (Cingambul), Air Terjun Cilutung (Talaga), Curug Emas (Talaga), Buper Gunung Putri (Talaga), Situ Sahiang (Banjaran), Curug Remis (Banjaran), Curug Cingeunclang (Banjaran), Panorama Alam Sawiah (Banjaran), Curug Miami (Banjaran), Pohon Cinta (Banjaran), Curug Muara Jaya (Argapura), Panorama Alam Terasering Panyaweyan (Argapura), Pendakian Gunung Ciremai (Argapura), Gua Lalai (Argapura), Grand Canyon (Argapura), Curug Ibum (Argapura), Bukper Panten (Argapura), Curug Sawer (Argapura), Bukit Pendakian Ciremai (Argapura), Bukit Merkuri/Saang Kaak (Argapura), Agro (Argapura), Situ Ciberut (Argapura), Gunung Sela (Argapura), Curug Cicangkrung (Argapura), Panorama sawah (Argapura), Panorama Gunung Dan Terasering (Argapura), Lembah cibunut (Argapura), Curug Goong (Maja), Curug Mahpar (Maja), Curug Puntang, Hutan Pinus (Maja), Bukit Untuk Kemah,Pinus (Maja), Panorama Cikebo (Maja), Curug Sempong (Majalengka), Curug Cilutung (Majalengka), Curug Situ Hilang (Majalengka), Gunung Karang (Stone Garden) (Majalengka), Curug Monyet (Majalengka), Mbung (Sukahaji), Curug Ciborete (Sukahaji), Bukit Alam Hejo (Sindang), Situ Cipanten (Sindang), Hutan Prabu Siliwangi/Talaga Emas (Rajagaluh), Situ Janawi (Rajagaluh), Curug Cinini (Rajagaluh), Terasering Sawah Nangkrak (Rajagaluh), Batu Nyongclok (Rajagaluh), Pendakian Sadarehe (Rajagaluh), Kebun Teh Sadarehe (Rajagaluh), Cidewata (Rajagaluh), Gunung Ciwaru (Rajagaluh), Curug Tonjong (Rajagaluh), Talaga Herang (Sindangwangi), Wisata Tirta Indah (Sindangwangi), Wisata Argo Batu Luhur (Sindangwangi), Talaga Leutik (Sindangwangi), Talaga Cileuweung (Sindangwangi), Talaga Loa (Sindangwangi), Situ Resmi (Sindangwangi), Situ Cikuda (Sindangwangi), Talaga Biru (Sindangwangi), Talaga Beunteur (Sindangwangi), Air Terjun Leles (Sindangwangi), Air Terjun Baligo (Sindangwangi), Gua Kejayaan (Sindangwangi), Sumber Air Hangat (Sindangwangi), Kebun Durian (Sindangwangi), Track Hiking (Sindangwangi), Batu Luhur (Sindangwangi), Terasering (Sindangwangi), Situ cibulakan (Sindangwangi), Situs Batu



Asahan (Sindangwangi), Buper Awi Lega (Sindangwangi), Curug Leles (Sindangwangi), Terasering Ciboer (Sindangwangi), Tangga Seribu (Sindangwangi), Pasir Cariu (Sindangwangi), Curug Linggi (Sindangwangi), Balong Kamulyaan (Sindangwangi), Puncak Palasan (Sindangwangi), Agro Sinapeul (Sindangwangi), Sawah Cukang Baok (Sindangwangi), Curug Cipeuteuy (Sindangwangi), Batu Nyongclo (Sindangwangi), Talaga Herang (Sindangwangi), Cadas Gantung (Leuwimunding), Bukit Petapaan (Leuwimunding), Buper Cibaringkeng (Leuwimunding), Gunung Tilu (Kasokandel), Situ Cijaura (Kertajati), Bendung Rentang (Jatitujuh), Situ Anggrahan (Jatitujuh), Situ Ranca Beureum (Jatitujuh).

**b. Wisata Budaya/Wisata Sejarah:**

Museum Talaga Manggung (Talaga), Makam Eyang Nata Kusuma (Talaga), Makam Eyang Sacanata (Talaga), Benda Sejarah Peninggalan Kerajaan Talaga (Talaga), Nyiram Pusaka Memandikan Keramat (Talaga), Pesta Panen "Pareresan" Sangiang (Banjaran), Kesenian Pencak Silat (Banjaran), Makam Keramat Sunan Parung (Banjaran), Makam Keramat Arya Saring Singan (Banjaran), Makam Keramat Sunan Wanaperih (Banjaran), Makam Cipager Pakih Ibrahim (Banjaran), Makam Buyut Israh (Argapura), Makam Leluruh Kabupaten Maja/Bupati Pertama (Argapura), Makam Nyiratu Pamerat Sari (Argapura), Kain Tenun Nunuk (Maja), Batik Miranthi (Majalengka), Makam Pangeran Muhammad (Majalengka), Buyut Buntu (Sukahaji), Makam Buyut Pokek (Rajagaluh), Makam Syeh Maulana Mansyur (Rajagaluh), Situs Balong Gede (Sindangwangi), Desa Budaya (Leuwimunding), Genjring Dangdut (Kertajati), Seni Akar Limbah (Kertajati), Makam Buyut Jaka Kusumah (Jatitujuh), Sumur Dalam (Jatitujuh), Konser Kampung (Jatitujuh), Genjring Akrobat Kuda Jaya (Jatitujuh), Pabrik Gula (Jatitujuh), Munjung (Pesta Wayang Kulit) (Jatitujuh), Kampung Bambu (Jatitujuh), Makam Buyut Kyai Arsitem (Jatitujuh), Muludan (Jatitujuh), Sumur Sidu (Jatitujuh), Sintren (Jatitujuh), Batik Jatiwangi (Jatiwangi), Jatiwangi Art Fatory (Jatiwangi), Batik Hertielit (Panyingkiran), Rumah Adat Panjalin (Sumberjaya).



**c. Wisata Buatan:**

Panorama Lemahputih (Lemahsugih), Wisata Belanja Jeans (Cikijing), Sentra Keripik (Talas, Singkong, Kacang) (Cingambul), Kuliner Tahu Talaga (Talaga), Kalua Jeruk, Emping Jagung (Banjaran), Kuliner Papais Baliung (Banjaran), Kuliner Kulang Kaling (Banjaran), Kuliner Susu Murni (Banjaran), Kuliner "kue Bangban" (Banjaran), Batu Asahan, Handy craft (Maja), Paralayang Gunung Panten (Majalengka), Sirkuit/Roadrace (Majalengka), Waterboom (Majalengka), Taman Kota Alun-Alun Majalengka (Majalengka), Taman Dirgantara, Taman Munjul Indah, & Bunderan munjul (Majalengka), Sentra Bibit Buah Dan Sayuran (Rajagaluh), Kerajinan Rotan (Sindangwangi), Kerajinan Bambu (Sindangwangi), Track Motorcross (Sindangwangi), Talaga Herang (Sindangwangi), Potensi Wisata Perikanan (Sindangwangi), Kerajinan Rotan (Sindangwangi), Pembibitan Buah-Buahan (Sindangwangi), Kerajinan Batu Alam (Sindangwangi), Potensi Wisata Perikanan (Sindangwangi), Desa Budaya (Luwimunding), Sumur Dalam (Jatitujuh), Wisata Gagaraji (Jatitujuh), Pabrik Gula (Jatitujuh), Sintren (Jatitujuh), Sangraja (Cigasong), Jatiwangi Art Fatory (Jatiwangi), Perkebunan Panyingkiran (Panyingkiran), Mangga Gedong Gincu (Panyingkiran), Pembuatan Brem (Panyingkiran), Batik Hertielit (Panyingkiran), Kolam Renang Surya (Kadipaten).

Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2016-2020, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu dengan meningkatnya kunjungan wisata. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata di Majalengka bertambah sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2018. Namun karena mulai diterapkan PPKM untuk mengatasi penyebaran Virus Covid-19, pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata turun menjadi 375.000 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.77.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Kepariwisata  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                       | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Jumlah Kunjungan wisata         | 162.517 | 192.941 | 589.843 | 701.335 | 375.000 |
| 2.  | Rata-rata lama kunjungan wisata | 1       | 1,01    | 1       | 1,01    | 1       |
| 3.  | PAD Sektor Wisata (Juta Rupiah) | 120,00  | 215,00  | 150,00  | 152,72  | 64.2    |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 6. Perdagangan

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat selama tahun 2016-2020, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri. Fasilitas perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda sebanyak 4 unit yang kondisi fisiknya semakin membaik, dan pasar desa tercatat 39 unit pada tahun 2020.

Tabel 2.78.  
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2016-2020

| No. | Jenis sarana perdagangan    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | Pasar PEMDA                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 2   | Pasar Sindangkasih Cigasong |        |        |        |        |        |
|     | -Kios                       | 428    | 430    | 430    | 430    | 430    |
|     | -Ruko/Toko                  | 33     | 35     | 35     | 35     | 35     |
|     | -Los/Auning                 | 31/152 | 31/130 | 31/130 | 31/130 | 31/130 |
|     | -Emprakan                   | 99     | 140    | 140    | 140    | 140    |
| 3   | Pasar Prapatan              |        |        |        |        |        |
|     | -Kios                       | 106    | 158    | 158    | 158    | 158    |
|     | -Ruko/Toko                  | -      | -      | -      | -      | -      |
|     | -Los/Auning                 | 171    | 310    | 310    | 310    | 310    |
|     | -Emprakan                   | 201    | 292    | 292    | 292    | 292    |
| 4   | Pasar Talaga                |        |        |        |        |        |
|     | -Kios                       | 218    | 209    | 210    | 210    | 210    |
|     | -Ruko/Toko                  | 28     | 28     | 28     | 28     | 28     |
|     | -Los/Auning                 | 248    | 199    | 200    | 200    | 200    |
|     | -Emprakan                   | 165    | 174    | 174    | 175    | 175    |
| 5   | Pasar Kadipaten             |        |        |        |        |        |
|     | -Kios                       | 206    | 171    | 171    | 171    | 171    |
|     | -Ruko/Toko                  | 53     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|     | -Los/Auning                 | 1.080  | 701    | 701    | 701    | 701    |
|     | -Emprakan                   | 170    | 164    | 164    | 164    | 164    |
| 6   | Pasar Desa                  | 38     | 39     | 39     | 39     | 39     |
| 7   | Jumlah Pasar Modern         | 80     | 100    | 100    | 110    | 110    |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Indikator Capaian Bidang Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perdagangan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | 2016  | 2017     | 2018   | 2019     | 2020  |
|-----|---|-------|----------|--------|----------|-------|
| 1.  | Nilai Ekspor (Dalam Miliar Rupiah)  | 86,62 | 1.743,83 | 140,81 | 2.733,46 | 3.617 |
| 2.  | Jumlah kelompok pedagang / usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda | 2.240 | 2.245    | 2.247  | 2.243    | 2.494 |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

## 7. Perindustrian

Jenis-jenis industri yang ada di Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.80.  
Jenis Industri di Kabupaten Majalengka Tahun 2020

| No.           | Jenis Industri   | Jumlah Industri (Unit) |
|---------------|--|------------------------|
| 1             | Industri Sandang   | 193                    |
| 2             | Industri Kulit   | 8                      |
| 3             | Industri Logam   | 60                     |
| 4             | Industri Kerajinan                                       | 154                    |
| 5             | Industri Makanan   | 724                    |
| 6             | Industri Minuman   | 5                      |
| 7             | Industri Batu  | 521                    |
| 8             | Industri Bahan Baku                                      | 20                     |
| 10            | Industri Kimia   | 16                     |
| 11            | Industri Komoditi Kayu                                   | 135                    |
| 12            | Industri Pengolahan Tembakau                             | 16                     |
| 13            | Industri Tekstil   | 40                     |
| 14            | Industri Kertas dan Barang                               | 2                      |
| 15            | Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional | 1                      |
| 16            | Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik           | 4                      |
| 17            | Industri Furnitur  | 71                     |
| 18            | Industri Lainnya   | 17                     |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>1.803</b>           |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Indikator Capaian Bidang Urusan Perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.81.  
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                                | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Pertumbuhan IKM per tahun (%)            | 2,10   | 2,35   | 2,64   | 3,21   | 2,50   |
| 3   | IKM yang memiliki legalitas usaha (%)    | 18,00  | 18,63  | 19,00  | 19,30  | 21,81  |
| 4   | jumlah IKM (buah)                        | 1.650  | 1.702  | 1.747  | 1.803  | 1.848  |
| 5   | Jumlah Tenaga Kerja (Orang)              | 15.731 | 15.994 | 16.042 | 16.653 | 16.819 |
| 6   | Nilai Produksi IKM (Milyar)              | 32,15  | 33,27  | 35,05  | 37,65  | 378,88 |
| 7   | jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha | 305    | 317    | 332    | 368    | 403    |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

#### a. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2008.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka ditetapkan dengan Perda Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 dan selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Renstra PD, Renja PD, RKA PD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan RAPBD.

#### b. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Capaian Bidang Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.82.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Penunjang  
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan  
dan Pelatihan Kabupaten Majalengka

| No. | Indikator   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Jam Pelajaran)         | 0,84  | 0,94  | 2,84  | 0,5   | 3,70  |
| 2   | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)                   | 1,36  | 4,29  | 1,14  | 1,27  | 0,79  |
| 3   | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | 76,65 | 71,22 | 76,65 | 69,00 | 70,77 |
| 4   | Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Jabatan)          | 31    | 33    | 29    | 33    | 32    |
| 5   | Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Jabatan)             | 160   | 193   | 187   | 193   | 183   |
| 6   | jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (orang)                                 | 9.578 | 8.204 | 7.512 | 7.561 | 7.273 |

Sumber: BKPSDM Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### c. Keuangan

Capaian pembangunan urusan penunjang Keuangan dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.83

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Penunjang  
Keuangan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Tahun       |                   |             |             |             |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2016        | 2017              | 2018        | 2019        | 2020        |
| 1   | Opini BPK terhadap laporan keuangan                             | WTP         | WTP               | WTP         | WTP         | WTP         |
| 2   | Persentase SILPA terhadap APBD (%)                              | 4,1         | 5,66              | 5,32        | 3,16        | 2,99        |
| 3   | Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (%)                 | 36,05       | 34,11             | 32,64       | 26,37       | 29,56       |
| 4   | Persentase belanja kesehatan terhadap APBD (%)                  | 16,3        | 17,4              | 15,15       | 13,72       | 18,93       |
| 5   | Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD                | 43,93       | 45,67             | 45,15       | 44,66       | 45,44       |
| 6   | Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)      | 56,07       | 54,33             | 54,85       | 55,34       | 54,56       |
| 7   | Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa terhadap APBD (%) | 0,56        | 0,54              | 0,52        | 0,52        | 0,55        |
| 8   | Penetapan Perda APBD dan APBDP                                  | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**d. Pengawasan**

Capaian pembangunan urusan penunjang Pengawasan dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.84.

Indikator Capaian Pembangunan Bidang Urusan Penunjang  
Pengawasan Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator                              | Tahun |       |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | Persentase tindak lanjut temuan (%)    | 94,79 | 70,00 | 78,00 | 60,00 | 60,33 |
| 2   | Persentase pelanggaran pegawai (%)     | 4     | 8     | 6     | 2     | 4     |
| 3   | Jumlah temuan BPK                      | 16    | 19    | 19    | 11    | 11    |
| 4   | Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP | 1,87  | 1,87  | 1,87  | 1,87  | 2,00  |
| 5   | Laporan Hasil Penilaian Kapasitas APIP | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

**e. Sekretariat Dewan**

Capaian pembangunan urusan penunjang Sekretariat Dewan dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel berikut:

Tabel 2.85

Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Sekretariat Dewan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

|   | Indikator  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



#### **f. Sekretariat Daerah**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2020 Kabupaten Majalengka meraih Predikat SAKIP B yang sebelumnya di Tahun 2017 hanya memperoleh nilai CC. Dengan hasil ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan predikat SAKIP sebagai salah satu indikator pemerintahan yang transparan, baik dan efisien serta akuntabel.

Indikator capaian pembangunan urusan penunjang pada Sekretariat Daerah dapat dilihat juga pada jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha yang terbagi dalam kategori yaitu peraturan daerah terkait perizinan, peraturan daerah terkait lalu lintas barang dan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Untuk mempercepat proses perizinan dalam rangka mendukung iklim usaha yang baik, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah mengeluarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka.

#### **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



#### **2.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.

##### **a. Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (39,5 km), Jalan Provinsi (125,83 km), dan Jalan Kabupaten (918,72 km) dengan kondisi jalan kabupaten dibagi menjadi empat kategori yaitu jalan kondisi baik (580,35 km), kondisi sedang (190,46 km), kondisi rusak ringan (87,68 km) dan jalan dengan kondisi rusak berat (60,23 km).

##### **b. Perhubungan**

Saat ini di Kabupaten Majalengka telah dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara untuk mengakses wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya menuju wilayah seluruh nasional dan internasional. Dalam menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan rencananya akan terhubung dengan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Kertajati (Cisumjati) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012.



Tabel 2.86.  
Indikator Perhubungan  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Tahun     |           |           |           |          |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|     |   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020     |
| 1.  | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                                | 1 : 6,63  | 1 : 6,63  | 1 : 6,63  | 1 : 6,63  | 1 : 6,65 |
| 2.  | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Ribu jiwa)           | 12.276    | 11.048    | 10.496    | 9.167     | 2.619    |
| 3.  | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun (jiwa) | 2.475.132 | 2.227.619 | 2.599.446 | 2.291.760 | 654.840  |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### c. Irigasi

Irigasi merupakan infrastruktur lain yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, karena akan menunjang ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 mencapai 76,77%.

### d. Penataan Ruang Daerah

Indikator penataan ruang di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87.  
Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka

| No. | Indikator                   | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                             |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Ketaatan terhadap RTRW      | %      | 83,67 | 83,67 | 99,29 | 90,07 | 90,00 |
| 2.  | Luas wilayah produktif      | %      | 59    | 59    | 60    | 60,5  | 60    |
| 3.  | Luas wilayah industri       | %      | 1,20  | 1,25  | 1,4   | 1,45  | 1,37  |
| 4.  | Penyediaan kawasan industri | Ha     | 65    | 100   | 70    | 108   | 108   |
| 5.  | Luas wilayah kebanjiran     | Ha     | 300   | 305   | 300   | 300   | 600   |
| 6.  | Luas wilayah kekeringan     | Ha     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 7.  | Luas wilayah perkotaan      | %      | 39    | 40    | 41    | 42    | 41    |

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



### e. Fasilitas Keuangan

Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu Bank Jabar Banten, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BTPN, Bank OCBC NISP dan BPR. Perkembangan jumlah lembaga perbankan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88.  
Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka  
Tahun 2016-2020

| No.    | Nama Bank    | Tahun     |           |            |            |            |
|--------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|        |              | 2016      | 2017      | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1.     | BJB          | 10        | 10        | 11         | 11         | 11         |
| 2.     | BRI          | 36        | 36        | 36         | 37         | 39         |
| 3.     | BNI          | 3         | 3         | 3          | 3          | 3          |
| 4.     | MANDIRI      | 6         | 6         | 6          | 6          | 6          |
| 5.     | PANIN        | 4         | 4         | 4          | 4          | 4          |
| 6.     | DANAMON      | 5         | 5         | 5          | 5          | 5          |
| 7.     | BCA          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 8.     | OCBC NISP    | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          |
| 9.     | BTPN         | 5         | 5         | 5          | 5          | 5          |
| 10.    | SAUDARA      | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 11.    | BPR          | 16        | 16        | 17         | 17         | 18         |
| 12.    | BTN          | 8         | 8         | 8          | 8          | 8          |
| 13.    | BRI Syariah  | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |
| 14.    | BTPN Syariah | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |
| Jumlah |              | <b>95</b> | <b>99</b> | <b>101</b> | <b>102</b> | <b>105</b> |

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Majalengka Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

### f. Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusaha usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Majalengka pada Tahun 2020 tercatat 156 restoran yang tersebar di berbagai kecamatan dengan lokasi terbanyak berada di Kecamatan Majalengka sebanyak 55 restoran dan Kadipaten sebanyak



20 restoran. Banyak bermunculannya jenis usaha makanan/minuman baru di wilayah Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa semakin hidupnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Majalengka.

#### **g. Ketersediaan penginapan**

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 18 hotel/penginapan dengan total kamar sebanyak 512 kamar.

#### **h. Air bersih**

Penggunaan air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2020 sebesar 368.626 rumah tangga. Data selengkapnya mengenai jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.89.  
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| <b>No.</b> | <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih</b> |
|------------|--------------|--|
| 1.         | 2016         | 337.684  |
| 2.         | 2017         | 338.481  |
| 3.         | 2018         | 339.851  |
| 4.         | 2019         | 367.774  |
| 5.         | 2020         | 368.626  |

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



## 2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas, kemudahan perijinan, perkembangan desa.

### a. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demo

Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.90.  
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani  
Tahun 2016-2020

| NO       | Indikator                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>1</b> | <b>Jumlah Kasus</b>            |      |      |      |      |      |
|          | - Kasus Narkoba                | 28   | 28   | 33   | 41   | 38   |
|          | - Kasus Pembunuhan             | 0    | 2    | 1    | 1    | 0    |
|          | - Kasus Seksual                | 29   | 16   | 16   | 1    | 16   |
|          | - Kasus Penganiayaan           | 34   | 11   | 10   | 26   | 10   |
|          | - Kasus Pencurian              | 159  | 168  | 111  | 120  | 81   |
|          | - Kasus Penipuan               | 81   | 32   | 50   | 45   | 34   |
|          | - Kasus Pemalsuan Uang         | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    |
| <b>2</b> | <b>Jumlah Kasus tertangani</b> |      |      |      |      |      |
|          | - Kasus Narkoba                | 28   | 28   | 33   | 41   | 38   |
|          | - Kasus Pembunuhan             | 0    | 2    | 1    | 1    | 0    |
|          | - Kasus Seksual                | 25   | 16   | 16   | 1    | 16   |
|          | - Kasus Penganiayaan           | 22   | 11   | 10   | 26   | 10   |
|          | - Kasus Pencurian              | 58   | 168  | 111  | 120  | 81   |
|          | - Kasus Penipuan               | 43   | 32   | 50   | 45   | 34   |
|          | - Kasus Pemalsuan Uang         | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    |

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.91.  
Jumlah Demonstrasi  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah Demonstrasi |
|-----|-------|--------------------|
| 1.  | 2016  | 19                 |
| 2.  | 2017  | 12                 |
| 3.  | 2018  | 5                  |
| 4.  | 2019  | 8                  |
| 5.  | 2020  | 1                  |

Sumber: Diolah dari Satpol PP dan damkar Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

#### **b. Lama Proses Perizinan**

Dalam rangka meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, murah dan terjangkau. Rata-rata proses perijinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 hanya membutuhkan waktu 7 hari. Bahkan sejak tahun 2019, Penerbitan SIUP dan TDP bagi Usaha Mikro Kecil hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja.

#### **2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

##### **a. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Selama periode 2016-2020, hanya sebagian kecil yang berpendidikan Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka terus meningkat. Tercatat pada tahun 2020 persentase lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Majalengka sebesar 2,47% dari total jumlah penduduk.

Gambar 2.13.  
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2021.

#### b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin



rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Data perkembangan Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan dapat dilihat pada Gambar 2.14 sebagai berikut:

Gambar 2.14  
Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Majalengka sebesar 39,45%, ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk yang produktif menanggung beban 40 orang penduduk non-produktif.

Tabel 2.92.  
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kabupaten Majalengka

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |  | 2016            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| <b>1.</b> | <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>                          |                 |            |            |            |            |
| 1.1       | Pertumbuhan PDRB   | 5,33            | 6,03       | 6,81       | 6,48       | 7,71       |
| 1.2       | PDRB per kapita ADHB   | 17.977.016      | 19.469.434 | 21.282.636 | 23.428.964 | 25.893.210 |
| 1.3       | PDRB per kapita ADHK   | 14.035.025      | 14.789.320 | 15.740.215 | 16.682.130 | 17.883.520 |
| 1.4       | Indeks Gini  | 0,353           | 0,356      | 0,351      | 0,365      | 0,347      |
| 1.5       | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan                    | 14,19           | 12,85      | 12,6       | 10,79      | 10,06      |
| 1.6       | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                               | 64,75           | 65,25      | 65,92      | 66,72      | 67,52      |
| 1.7       | Angka melek huruf  | 11,74           | 11,89      | 12,18      | 12,19      | 12,21      |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Capaian Kinerja |            |            |           |           |
|-----------|---|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
|           |   | 2016            | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      |
| 1.8       | Angka rata-rata lama sekolah  | 6,80            | 6,89       | 6,9        | 6,91      | 7,09      |
| 1.9       | Angka Harapan Hidup   | 69,06           | 69,22      | 69,39      | 69,68     | 69,97     |
| 1.10      | Persentase balita gizi buruk  | 0,038           | 0,02       | 0,01       | 0,01      | 0,25      |
| 1.11      | Tingkat partisipasi angkatan kerja                                      | 67,98%          | 66,11%     | 65,76%     | 67,97%    | 69,66%    |
| 1.12      | Tingkat pengangguran terbuka  | 4,01            | 5,02       | 4,95       | 4,37      | 5,84      |
| 1.13      | Rasio penduduk yang bekerja   | 95,99%          | 94,98%     | 94,98%     | 95,05%    | 95,63%    |
| 1.14      | Indeks Kepuasan Masyarakat  | B               | B          | B          | B         | B         |
| 1.15      | Opini BPK   | WTP             | WTP        | WTP        | WTP       | WTP       |
| <b>2.</b> | <b>Aspek Daya Saing Daerah</b>  |                 |            |            |           |           |
| 2.1       | Angka kriminalitas yang tertangani                                      | 176             | 257        | 223        | 234       | 248       |
| 2.2       | Rasio ketergantungan  | 41,72           | 41,62      | 43,19      | 45,66     | 39,45     |
| 2.3       | Jumlah Demonstrasi  | 19              | 12         | 5          | 8         | 8         |
| 2.4       | Lama proses perijinan   | 7               | 7          | 7          | 7         | 7         |
| 2.5       | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah                             | 10              | 11         | 9          | 9         | 9         |
| 2.6       | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah                             | 17              | 26         | 23         | 20        | 21        |
| 2.7       | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha                                 | 3               | 5          | 5          | 5         | 5         |
| 2.8       | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;                               | 1 : 6,63        | 1 : 6,63   | 1 : 6,63   | 1 : 6,35  | 1 : 6,35  |
| 2.9       | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                       | 12.276.235      | 11.048.612 | 10.496.181 | 9.167.040 | 8.167.040 |
| 2.10      | Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun       | 2.475.132       | 2.227.619  | 2.599.446  | 2.291.760 | 2.300.760 |
| 2.11      | Ketaatan terhadap RTRW (%)  | 83,67           | 83,67      | 99,29      | 90,07     | 95        |
| 2.12      | Luas wilayah produktif (%)  | 59              | 59,5       | 60         | 60,5      | 70        |
| 2.13      | Luas wilayah industri (%)   | 1,2             | 1,35       | 1,4        | 1,45      | 1,6       |
| 2.14      | Luas wilayah kebanjiran (%)   | 300             | 300        | 300        | 300       | 300       |
| 2.15      | Luas wilayah kekeringan (%)   | -               | -          | -          | -         | -         |
| 2.16      | Luas wilayah perkotaan (%)  | 39              | 40         | 41         | 42        | 42        |
| 2.18      | Jumlah Bank   | 99              | 99         | 101        | 102       | 102       |
| 2.19      | Jumlah Perusahaan Asuransi  | 1               | 1          | 2          | 2         | 2         |
| 2.20      | Jumlah restoran   | 125             | 130        | 135        | 135       | 135       |



| No.                               | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Capaian Kinerja |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                                   |   | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 2.21                              | Jumlah penginapan/hotel   | 15              | 15      | 15      | 15      | 15      |
| 2.22                              | Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih                | 337.684         | 338.481 | 339.851 | 367.774 | 367.774 |
| 2.23                              | Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)                          | 2,01            | 2,19    | 2,68    | 2,54    | 2,55    |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>       |   |                 |         |         |         |         |
| <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b> |   |                 |         |         |         |         |
| <b>1. Pendidikan</b>              |   |                 |         |         |         |         |
| 1.1                               | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | 62,72           | 60,09   | 64,05   | 86,60   | 90      |
| 1.2                               | Angka partisipasi kasar   | 104,41          | 105,40  | 100,63  | 104,3   | 104,00  |
| 1.3                               | Angka pendidikan yang ditamatkan  | 99,11           | 100     | 103,3   | 99,87   | 99,89   |
| 1.4                               | Angka Partisipasi Murni   |                 |         |         |         |         |
| 1.4.1                             | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                             | 95,7            | 88      | 93,5    | 94      | 95      |
| 1.4.2                             | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                           | 81,15           | 92,22   | 87,45   | 98,02   | 98,4    |
| 1.4.3                             | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C                        | 56,6            | 60,6    | 64,02   | 64,02   | 64,03   |
| 1.5                               | Angka Partisipasi Sekolah   |                 |         |         |         |         |
| 1.5.1                             | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A                           | 95,7            | 97,08   | 97,1    | 97,2    | 104,00  |
| 1.5.2                             | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B                         | 81,15           | 92,22   | 87,45   | 98,02   | 98,80   |
| 1.5.3                             | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C                      | 56,6            | 60,6    | 64,02   | 64,02   | 64,02   |
| 1.6                               | Angka Putus Sekolah   |                 |         |         |         |         |
| 1.6.1                             | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI   | 0,03            | 0,01    | 0,15    | 0,10    | 0,30    |
| 1.6.2                             | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                                       | 0,13            | 0,14    | 0,7     | 0,47    | 0,99    |
| 1.6.3                             | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA                                    | 0,99            | 1,01    | 0,97    | 0,25    | 0,30    |
| 1.7                               | Angka Kelulusan   |                 |         |         |         |         |
| 1.7.1                             | Angka Kelulusan (AL) SD/MI  | 100             | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 1.7.2                             | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs  | 100             | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 1.7.3                             | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA   | 100             | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 1.8                               | Angka Melanjutkan (AM)  |                 |         |         |         |         |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah       | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.8.1     | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                  | 98,13           | 100    | 105    | 100    | 99,1   |
| 1.8.2     | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                             | 81,38           | 80     | 91     | 93     | 91,01  |
| 1.9       | Fasilitas Pendidikan  |                 |        |        |        |        |
| 1.9.1     | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                                | 59,9            | 64     | 51,9   | 20,6   | 25,74  |
| 1.9.2     | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik               | 89,6            | 137,5  | 86,6   | 91,7   | 39,77  |
| 1.10      | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar             | 56,80           | 61,62  | 55,81  | 55,81  | 55,81  |
| 1.11      | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | 26,5            | 27,0   | 28,8   | 29,2   | 29,2   |
| 1.12      | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar                                     | 1:19            | 1:19   | 1:19   | 1:18   | 01:19  |
| 1.13      | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah                                 | 1:25            | 01:23  | 01:22  | 01:26  | 01:17  |
| 1.14      | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki          | 98,38           | 99,4   | 99,6   | 86     | 90     |
| 1.15      | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  | 91,12           | 100    | 100    | 91,49  | 99,32  |
| <b>2.</b> | <b>Kesehatan</b>  |                 |        |        |        |        |
| 2.1       | Angka Kematian Bayi (AKB) per1000 kelahiran hidup                             | 6,51            | 4,29   | 4,01   | 3,76   | 3,62   |
| 2.2       | Angka kelangsungan hidup bayi   | 993             | 995,71 | 995,99 | 996,24 | 996,38 |
| 2.3       | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup                                | 4,25            | 4,39   | 4,20   | 4,01   | 3,81   |
| 2.4       | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup                                | 86,27           | 83,81  | 77,32  | 73,20  | 66,77  |
| 2.5       | Rasio posyandu per satuan balita  | 1,50            | 1,53   | 1,55   | 1,60   | 1,63   |
| 2.6       | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk                        | 0,11            | 0,11   | 0,11   | 0,12   | 0,12   |
| 2.7       | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk   | 0,32            | 0,32   | 0,31   | 0,38   | 0,38   |
| 2.8       | Rasio dokter per satuan penduduk  | 0,13            | 0,13   | 0,27   | 0,29   | 0,3    |
| 2.9       | Rasio tenaga medis per satuan penduduk  | 1,40            | 1,42   | 1,32   | 1,39   | 1,39   |



| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                 | Capaian Kinerja |         |         |         |        |
|------|---|-----------------|---------|---------|---------|--------|
|      |   | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   |
| 2.10 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani   | 100,56          | 117,04  | 118,32  | 120,24  | 181,72 |
| 2.11 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 98,38           | 97,16   | 101,19  | 103,14  | 105,22 |
| 2.12 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                               | 95,34           | 96,21   | 98,83   | 99,4    | 90,10  |
| 2.13 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan  | 100             | 100     | 100     | 100     | 97,50  |
| 2.14 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk   | 8               | 8       | 2       | 6       | 5      |
| 2.15 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani   | 60,50           | 63,39   | 73,42   | 71,99   | 80,00  |
| 2.16 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                              | 43,2            | 46,6    | 40,92   | 73,5    | 58,6   |
| 2.17 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                  | 133,16          | 144,33  | 128,66  | 179,17  | 182,20 |
| 2.18 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                             | 1,26            | 0,67    | 1,25    | 1,20    | 1,20   |
| 2.19 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                   | 100,15          | 32,19   | 26,26   | 32,47   | 33,1   |
| 2.20 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                  | 97,8            | 97,9    | 99      | 99,3    | 99,5   |
| 2.21 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                  | 100             | 100     | 100     | 100     | 100    |
| 2.22 | Penderita diare yang ditangani  | N/A             | 58,15   | 60,48   | 88      | 90     |
| 2.23 | Angka kejadian Malaria  | 0,00            | 2,26    | 0,17    | 0,08    | 0,00   |
| 2.24 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                            | 36,06           | 42,12   | 65,96   | 79,88   | 81,2   |
| 2.25 | Cakupan kunjungan bayi  | 113,02          | 113,41  | 113,43  | 112,3   | 112,94 |
| 2.26 | Cakupan puskesmas   | 123,08%         | 123,08% | 123,08% | 123,08% | 0,00%  |
| 2.27 | Cakupan pembantu puskesmas  | 21,52%          | 19,53%  | 19,53   | 21,28%  | 0,00%  |
| 2.28 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4  | 95,02           | 96,38   | 99,21   | 99,56   | 99,60  |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                 | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|           |   | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 2.29      | Cakupan pelayanan nifas   | 98,18           | 97,37  | 101,49 | 102,26 | 103    |
| 2.30      | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                       | 81,76           | 86,28  | 103,65 | 107,2  | 108    |
| 2.31      | Cakupan pelayanan anak balita   | 100,3           | 103,57 | 105,2  | 105,77 | 105,80 |
| 2.32      | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin    | 100             | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2.33      | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                                   | 72,96           | 86,36  | 98     | 98     | 98     |
| 2.34      | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)      | 100             | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2.35      | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 16              | 10     | 4      | 5      | 2      |
|           |   |                 |        |        |        |        |
| <b>3.</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  |                 |        |        |        |        |
| 3.1       | Pekerjaan Umum  |                 |        |        |        |        |
| 3.1.1     | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                      | 90,87           | 90,48  | 78,28  | 63,17  | 71     |
| 3.1.2     | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk  | 0,0006          | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 3.1.3     | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)                            | 90,87           | 86,83  | 78,28  | 68,10  | 63,17  |
| 3.1.4     | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik   | 72,40           | 76,00  | 76,30  | 76,30  | 76,77  |
| 3.1.5     | Rasio Jaringan Irigasi  | 2,99            | 2,99   | 2,99   | 2,99   | 2,99   |
| 3.1.6     | Persentase penduduk berakses air minum  | N/A             | 80,02  | 74,17  | 80,27  | 80,45  |
| 3.1.7     | Persentase areal kawasan kumuh  | 0,0070          | 0,0066 | 0,0051 | 0,0043 | 0,0020 |
| 3.2       | Penataan Ruang  |                 |        |        |        |        |
| 3.2.1     | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB                           | 71,10           | 71,80  | 71,95  | 72,20  | 72,92  |
| 3.2.2     | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan                  | 1,85            | 1,92   | 1,95   | 2,00   | 2,02   |
| 3.2.3     | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan  | 5,48            | 5,99   | 6,21   | 6,90   | 6,70   |



| No.   | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah  | Capaian Kinerja |       |        |       |       |
|---|--|-----------------|-------|--------|-------|-------|
|   |  | 2016            | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  |
| 3.2.4   | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | 3,45            | 3,60  | 3,75   | 3,80  | 3,96  |
| 3.2.5   | Ketaatan terhadap RTRW   | 83,67           | 83,67 | 99,29  | 90,07 | 90,00 |
| <b>4) Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                          |  |                 |       |        |       |       |
| 4.1   | Rasio rumah layak huni   | 98,92           | 98,36 | 94,98  | 94,63 | 94,93 |
| 4.2   | Rasio permukiman layak huni  | 99,20           | 99,37 | 99,39  | 99,60 | 99,05 |
| 4.3   | Cakupan ketersediaan rumah layak huni  | 98,6            | 98,9  | 100    | 94,63 | 94,96 |
| 4.4   | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau   | 69,01           | 77,08 | 133    | 21,1  | 42,06 |
| 4.5   | Persentase lingkungan pemukiman kumuh  | 0,070           | 0,070 | 0,068  | 0,045 | 0,050 |
| 4.6   | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan  | 3,14            | 3,14  | 3,14   | 3,14  | 3,14  |
| <b>5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b> |  |                 |       |        |       |       |
| 5.1   | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)   | 27,21           | 27,02 | 26,82  | 26,22 | 26,22 |
| 5.2   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)   | 100%            | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |
| 5.3   | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota   | 14,67           | 14,67 | 14,67  | 14,67 | 14,67 |
| 5.4   | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)                                  | 9,00            | 12,73 | 54,62  | 31,78 | 51,19 |
| 5.5   | Persentase Penegakan PERDA   | 100%            | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |
| <b>6. Sosial</b>  |  |                 |       |        |       |       |
| 6.1   | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial   | 38,7            | 75,86 | 135,11 | 91,67 | 83,7  |
| 6.2   | Persentase PPKS yang tertangani  | 38,7            | 75,86 | 135,11 | 91,67 | 8.370 |
| 6.3   | Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk   | 89,76           | 92    | 97,85  | 91,67 | 92    |



| No.                                   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                       |  | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|                                       | memenuhi kebutuhan dasar   |                 |       |       |       |       |
| 6.4                                   | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 60              | 65    | 75    | 80    | 100   |
| 6.5                                   | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial   | 36              | 135   | 135   | 111   | 36    |
| 6.6                                   | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                  | 97              | 97    | 97    | 97    | 97    |
| 6.7                                   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat   | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6.8                                   | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                   | 5,68            | 5,68  | 5,68  | 5,68  | 5,68  |
| <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b> |  |                 |       |       |       |       |
| <b>1.</b>                             | <b>Tenaga Kerja</b>  |                 |       |       |       |       |
| 1.1                                   | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun   | 17,68           | 9,65  | 14,47 | 3,42  | 3,60  |
| 1.2                                   | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)   | 83              | 80    | 67    | 50    | 80    |
| 1.3                                   | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | 32,32           | 29,65 | 39,06 | 70,9  | 49,41 |
| 1.4                                   | Keselamatan dan perlindungan   | 3,45            | 3,87  | 5,57  | 5,75  | 5,82  |
| 1.5                                   | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek   | 74,46           | 75,00 | 78,73 | 95,96 | 99,49 |
| 1.6                                   | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah  | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 1.7                                   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan  | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Capaian Kinerja |          |          |          |          |
|-----------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|           |   | 2016            | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|           | pelatihan berbasis kompetensi   |                 |          |          |          |          |
| 1.8       | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat   | 100             | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 1.9       | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan   | 100             | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 1.10      | Rasio lulusan S1/S2/S3  | 2,01            | 2,19     | 2,68     | 2,54     | 2,47     |
| <b>2.</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>   |                 |          |          |          |          |
| 2.1       | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  | 47,10%          | 48,82%   | 47,02%   | 56,43%   | 52,63    |
| 2.3       | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR   | 16%             | 16%      | 16%      | 10%      | 10%      |
| 2.4       | Rasio KDRT  | 6               | 6        | 1        | 1        | 4        |
| 2.5       | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | 100%            | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| 2.6       | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 37              | 22       | 20       | 17       | 20       |
| 2.7       | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 100%            | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| 2.8       | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 37              | 22       | 20       | 17       | 25       |
| <b>3.</b> | <b>Pangan</b>   |                 |          |          |          |          |
| 3.1       | Ketersediaan pangan utama   | 83,5            | 87       | 87       | 86,9     | 93,8     |
| 3.2       | Ketersediaan energi dan protein perkapita   | 2.446,38        | 2.641,21 | 2.651,43 | 2.627,22 | 2.540,04 |
| <b>4.</b> | <b>Pertanahan</b>   |                 |          |          |          |          |
| 4.1       | Persentase luas lahan bersertifikat   | 0,08            | 0,09     | 0,13     | 0,14     | 0,15     |
| 4.2       | Penyelesaian kasus tanah Negara   | Nihil           | Nihil    | Nihil    | Nihil    | Nihil    |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah   | Capaian Kinerja |           |           |           |        |
|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|           |   | 2016            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020   |
| <b>5.</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>   |                 |           |           |           |        |
| 5.1       | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota  | tidak ada       | tidak ada | tidak ada | tidak ada | Ada    |
| 5.2       | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota  | tidak ada       | tidak ada | tidak ada | tidak ada | Ada    |
| 5.3       | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi   | N/A             | N/A       | N/A       | 1         | 2      |
| 5.4       | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air  | 50              | 50        | 50        | 50        | 50     |
| 5.5       | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara  | 71,94           | 71,94     | 71,94     | 84,49     | 87,65  |
| 5.6       | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan  | 50,96           | 50,96     | 50,96     | 50,97     | 50,97  |
| 5.7       | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | N/A             | N/A       | 100       | 95,65     | 27,5   |
| 5.8       | Persentase jumlah sampah yang tertangani  | 48,77%          | 49,09%    | 49,03%    | 51,46%    | 35,15% |
| 5.9       | persentase sampah yang dikelola   | 47,75           | 48,50     | 49,03     | 51,46     | 57,07  |
| 5.10      | persentase penanganan sampah  | 30,00           | 31,50     | 32,89     | 33,26     | 35,15  |
| 5.11      | persentase pengurangan sampah   | 14,75           | 15,50     | 16,14     | 18,2      | 21,92  |
| <b>6.</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>   |                 |           |           |           |        |
| 6.1       | Rasio penduduk berKTP Per satuan penduduk   | 67,00           | 71,00     | 72,00     | 73,00     | 98,00  |
| 6.2       | Rasio bayi berakte kelahiran  | 0,45            | 0,55      | 0,63      | 0,79      | 0,81   |
| 6.3       | Rasio pasangan berakte nikah  | 18              | 19        | 20,00     | 29        | 30,05  |
| 6.4       | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi   | Ada             | Ada       | Ada       | Ada       | ada    |
| 6.5       | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK   | Sudah           | Sudah     | Sudah     | Sudah     | sudah  |
| 6.6       | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)   | 0,75            | 0,82      | 0,90      | 0,99      | 0,98   |
| 6.7       | Cakupan penerbitan akta kelahiran   | 0,45            | 0,55      | 0,63      | 0,79      | 0,96   |
| <b>7.</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>   |                 |           |           |           |        |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah   | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|           |   | 2016            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 7.1       | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik  | 98,00           | 98,78 | 99,00 | 99,00 | 99    |
| 7.2       | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  | 7,58            | 7,58  | 7,58  | 7,58  | 7,58  |
| 7.3       | Persentase LSM aktif  | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7.4       | Persentase LPM Berprestasi  | 7,58            | 7,58  | 7,58  | 7,58  | 7,58  |
| 7.5       | Persentase PKK aktif  | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7.6       | Persentase Posyandu aktif   | 99,19           | 99,32 | 100   | 100   | 100   |
| 7.7       | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat   | 11,94           | 12,17 | 14,76 | 15,25 | 15,25 |
| <b>8.</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>   |                 |       |       |       |       |
| 8.1       | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)   | 0,82            | 0,69  | 0,75  | 0,48  | 0,51  |
| 8.2       | Total Fertility Rate (TFR)  | 2,20            | 2,16  | 2,32  | 2,27  | 2,14  |
| 8.3       | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB   | 23,08           | 34,62 | 38,46 | 38,46 | 38,74 |
| 8.4       | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                                      | 7,69            | 7,69  | 7,69  | 7,69  | 7,69  |
| 8.5       | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 8.6       | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 3               | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 8.7       | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan   | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |



| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah  | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|      |  | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|      | pendidikan<br>kependudukan   |                 |        |        |        |        |
| 8.8  | Rata-rata jumlah<br>anak per keluarga  | 1,12            | 1,12   | 1,14   | 1,13   | 1,12   |
| 8.9  | Ratio Akseptor KB  | 77,24           | 77,69  | 78,37  | 79,94  | 79,77  |
| 8.10 | Angka pemakaian<br>kontrasepsi/CPR bagi<br>perempuan menikah<br>usia 15 – 49   | 77,24           | 77,69  | 78,37  | 79,94  | 239,44 |
| 8.11 | Angka kelahiran<br>remaja (perempuan<br>usia 15–19) per 1.000<br>perempuan usia 15–<br>19 tahun (ASFR 15–<br>19)   | N/A             | N/A    | 35,7   | 26,2   | 22,28  |
| 8.12 | Cakupan Pasangan<br>Usia Subur (PUS) yang<br>istriyanya dibawah 20<br>tahun  | 1,84            | 1,97   | 2,03   | 1,93   | 22,28  |
| 8.13 | Cakupan PUS<br>yang ingin ber-KB<br>tidak terpenuhi<br>(unmet need)  | 8,88            | 9,34   | 8,84   | 7,67   | 8,32   |
| 8.14 | Persentase<br>Penggunaan<br>Kontrasepsi Jangka<br>Panjang (MKJP)   | 18,93           | 15,27  | 19,98  | 19,65  | 19,87  |
| 8.15 | Persentase tingkat<br>keberlangsungan<br>pemakaian<br>kontrasepsi  | 29,47           | 28,71  | 27,61  | 25,09  | 121,01 |
| 8.16 | Cakupan anggota<br>Bina Keluarga Balita<br>(BKB) ber-KB  | 81,66           | 80,18  | 64,87  | 51,06  | 80,59  |
| 8.17 | Cakupan anggota<br>Bina Keluarga Remaja<br>(BKR) ber-KB  | 83,1            | 83,8   | 62,75  | 52,96  | 71,12  |
| 8.18 | Cakupan anggota<br>Bina Keluarga Lansia<br>(BKL) ber-KB  | 76,12           | 73,62  | 47,58  | 40,27  | 70,99  |
| 8.19 | Pusat Pelayanan<br>Keluarga Sejahtera<br>(PPKS) di setiap<br>Kecamatan   | 3,85            | 3,85   | 3,85   | 50     | 26,00  |
| 8.20 | Cakupan Remaja<br>dalam Pusat<br>Informasi Dan<br>Konseling<br>Remaja/Mahasiswa  | 326,92          | 376,92 | 569,23 | 569,23 | 1,74   |
| 8.21 | Cakupan PKB/PLKB<br>yang didayagunakan<br>Perangkat Daerah KB<br>untuk perencanaan<br>dan pelaksanaan<br>pembangunan daerah<br>di bidang<br>pengendalian<br>penduduk | 100             | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 8.22 | Cakupan PUS peserta<br>KB anggota Usaha  | 84,41           | 84,21  | 85,43  | 84,12  | 21,60  |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah   | Capaian Kinerja |            |            |           |           |
|-----------|---|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
|           |   | 2016            | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      |
|           | Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri   |                 |            |            |           |           |
| 8.23      | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan  | 100             | 100        | 100        | 100       | 100       |
| 8.24      | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  | 212,08          | 219,03     | 135,66     | 143,37    | 144,45    |
| 8.25      | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 100             | 100        | 100        | 100       | 100       |
| 8.26      | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa   | 100             | 100        | 100        | 100       | 100       |
| 8.27      | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga   | 44,43           | 47,93      | 42,37      | 54,94     | 55,28     |
| 8.28      | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                                     | 36,85           | 37,25      | 37,98      | 46,26     | 54,21     |
| <b>9.</b> | <b>Perhubungan</b>  |                 |            |            |           |           |
| 9.1       | Jumlah arus penumpang angkutan umum   | 12,521,406      | 11,269,266 | 10,017,126 | 8,492,920 | 4,756,024 |
| 9.2       | Rasio ijin trayek   | 0.00119786      | 0.0011862  | 0.00118069 | 0.001083  | 0.046528  |
| 9.3       | Jumlah uji kir angkutan umum  | 14,461          | 13,563     | 14,615     | 14,772    | 14,722    |
| 9.4       | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  | 7               | 7          | 7          | 7         | 7         |
| 9.5       | Persentase layanan angkutan darat   | 66.309%         | 73.676%    | 77.554%    | 88.798%   | 77.99%    |
| 9.6       | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum  | 92%             | 93%        | 93%        | 93%       | 93%       |



| No.        | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                  | Capaian Kinerja |             |               |               |               |
|------------|--|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2016            | 2017        | 2018          | 2019          | 2020          |
| 9.7        | Pemasangan Rambu-rambu   | 28.09           | 30.75       | 38.34         | 40.81         | 41.48         |
| 9.8        | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan   | 1 : 6,63        | 1 : 6,63    | 1 : 6,63      | 1 : 6,35      | 1:6,65        |
| 9.9        | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum   | 12,276,235      | 11,048,612  | 10,496,181    | 9,167,040     | 2,619,360     |
| 9.10       | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun                           | 2,475,132       | 2,227,619   | 2,599,446     | 2,291,760     | 654,840       |
| <b>10.</b> | <b>Komunikasi dan Informatika</b>  |                 |             |               |               |               |
| 10.1       | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 0.17            | 0.17        | 0.2           | 0.23          | 0.59          |
| 10.2       | Cakupan Layanan Telekomunikasi   | 57.56           | 57.81       | 59.3          | 65.28         | 74.75         |
| 10.3       | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon  | 39,00           | 39.18       | 37.77         | 37.89         | 37.95         |
| 10.4       | Proporsi rumah tangga dengan akses internet  | 55              | 62          | 65            | 66            | 66            |
| 10.5       | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                     | 39              | 46          | 50            | 50            | 51            |
| <b>11.</b> | <b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>   |                 |             |               |               |               |
| 11.1       | Jumlah koperasi aktif  | 677             | 677         | 479           | 486           | 495           |
| 11.2       | Persentase UKM non BPR/LKM aktif   | 27,528          | 28,113      | 29,518        | 31,370        | 31,370        |
| 11.3       | Persentase BPR/LKM aktif   | 27,528          | 28,113      | 29,518        | 31,370        | 31,370        |
| 11.4       | Persentase Usaha Mikro dan Kecil   | 26,879          | 27,456      | 28,822        | 30,674        | 21,542        |
| <b>12.</b> | <b>Penanaman Modal</b>   |                 |             |               |               |               |
| 12.1       | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)   | 664             | 458         | 751           | 279           | 615           |
| 12.2       | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA (Rp dalam Ribu)                       | 455.607.805     | 629.364.000 | 1.288.623.389 | 2.093.478.144 | 2.396.180.048 |
| <b>13.</b> | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>   |                 |             |               |               |               |
| 13.1       | Persentase organisasi pemuda yang aktif  | 54              | 54          | 60            | 60            | 60            |
| 13.2       | Persentase wirausaha muda  | 80              | 80          | 84            | 87            | 80            |
| 13.3       | Cakupan pembinaan olahraga   | 80              | 80          | 90            | 100           | 33            |
| 13.4       | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi  | 25,10           | 25,10       | 27,40         | 33,20         | 128           |
| 13.5       | Cakupan pembinaan atlet muda   | 94.4            | 94.4        | 95.38         | 97,40         | 125           |
| 13.6       | Jumlah atlet berprestasi   | 12              | 48          | 32            | 42            | 2             |



| No.        | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                    | Capaian Kinerja          |                          |                          |                          |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |  | 2016                     | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020                     |
| 13.7       | Jumlah prestasi olahraga   | 12                       | 48                       | 32                       | 42                       | 2                        |
| <b>14.</b> | <b>Statistik</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 14.1       | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                    | ada (Belum Terintegrasi) |
| 14.2       | Buku "kabupaten dalam angka"   | ada                      | Ada                      | ada                      | ada                      | Ada                      |
| 14.3       | Buku "PDRB"  | ada                      | Ada                      | ada                      | ada                      | Ada                      |
| <b>15.</b> | <b>Persandian</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 15.1       | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 2,85                     | 3,05                     | 3,15                     | 3,20                     | 3,30                     |
| <b>16.</b> | <b>Kebudayaan</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 16.1       | Penyelenggaraan festival seni dan budaya   | 2                        | 2                        | 7                        | 3                        | 2                        |
| 16.2       | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                    | 108                      | 108                      | 125                      | 125                      | 125                      |
| 16.3       | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.4       | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu   | 2                        | 4                        | 4                        | 4                        | 4                        |
| <b>17.</b> | <b>Perpustakaan</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 17.1       | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun   | 19,800                   | 23,790                   | 9,705                    | 10,571                   | 2,540                    |
| 17.2       | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah  | 30,000                   | 14,183                   | 40,331                   | 40,331                   | 39,861                   |
| 17.3       | Rasio perpustakaan persatuan penduduk  | 863                      | 1,070                    | 1,497                    | 1,497                    | 1,171                    |
| 17.4       | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun   | 19,800                   | 23,790                   | 9,705                    | 10,571                   | 11,232                   |
| 17.5       | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan   | 30,000                   | 14,183                   | 40,331                   | 40,331                   | 40,331                   |
| 17.6       | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat                     | 1                        | 1                        | 1                        | 3                        | 5                        |
| <b>18.</b> | <b>Kearsipan</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 18.1       | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                               | 20,75                    | 20,75                    | 20,75                    | 32,14                    | 24,07                    |
| 18.2       | Peningkatan SDM pengelola kearsipan  | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 0                        |
|            | <b>Layanan Urusan Pilihan</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>1.</b>  | <b>Pariwisata</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1.1        | Kunjungan Wisata   | 162,517                  | 192,941                  | 589,843                  | 701,335                  | 375,000                  |
| 1.2        | Lama Kunjungan Wisata  | 1                        | 1,01                     | 1                        | 1,01                     | 1                        |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah            | Capaian Kinerja |                   |                 |                   |                   |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2016            | 2017              | 2018            | 2019              | 2020              |
| 1.3       | PAD Sektor Pariwisata (Rp dalam Ribu)  | N/A             | 215.000           | 150.000         | 152.717           | 64.200            |
| <b>2.</b> | <b>Pertanian</b>   |                 |                   |                 |                   |                   |
| 2.1       | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB                               | 26,11           | 24,55             | 23,63           | 22,65             | 23,10             |
| 2.2       | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar                | 226,11          | 231,65            | 211,98          | 217,10            | 727,74            |
| 2.3       | Cakupan bina kelompok petani   | 2.316           | 2.291             | 2.297           | 2.286             | 2.200             |
| <b>3.</b> | <b>Perdagangan</b>   |                 |                   |                 |                   |                   |
| 3.1       | Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)   | 86.619.907.945  | 1.743.829.364.620 | 140.809.410.069 | 2.733.464.191.090 | 2.987.242.000.100 |
| 3.2       | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                                      | 2.240           | 2.245             | 2.247           | 2.243             | 2.494             |
| <b>4.</b> | <b>Perindustrian</b>   |                 |                   |                 |                   |                   |
| 4.1       | Persentase Pertumbuhan IKM   | 2,10            | 2,35              | 2,64            | 3,21              | 2,50              |
| 4.2       | Persentase IKM yang memiliki legalitas usaha                                       | 18,00           | 18,63             | 19,00           | 19,30             | 19,50             |
| <b>5.</b> | <b>Kelautan dan Perikanan</b>  |                 |                   |                 |                   |                   |
| 5.1       | Produksi perikanan   | 9.337,50        | 9.086,04          | 8.332,27        | 8.500,94          | 8.682,23          |
| 5.2       | Konsumsi ikan  | 23,41           | 27,74             | 25,10           | 25,46             | 25,46             |
| 5.3       | Produksi perikanan kelompok nelayan  | 9,60            | 9,52              | 8,48            | 8,59              | 7,84              |
| 5.4       | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman               | 18,45           | 8,08              | 6,36            | 6,28              | 6,12              |
| 5.5       | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial             | 0,15            | 0,15              | 0,15            | 0,15              | 0,15              |
| 5.6       | Nilai tukar nelayan  | 100,70          | 100,81            | 100,33          | 100,33            | 112,36            |
|           | <b>Penunjang Urusan</b>  |                 |                   |                 |                   |                   |
| <b>1.</b> | <b>Perencanaan Pembangunan</b>   |                 |                   |                 |                   |                   |
| 1.1       | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada             | Ada               | Ada             | Ada               | Ada               |
| 1.2       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada             | Ada               | Ada             | Ada               | Ada               |
| 1.3       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA       | Ada             | Ada               | Ada             | Ada               | Ada               |
| 1.4       | Tersedianya dokumen RTRW yang telah  | Ada             | Ada               | Ada             | Ada               | Ada               |



| No.       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah  | Capaian Kinerja |                         |                |                |                |
|-----------|--|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2016            | 2017                    | 2018           | 2019           | 2020           |
|           | ditetapkan dengan<br>PERDA   |                 |                         |                |                |                |
| <b>2.</b> | <b>Keuangan</b>  |                 |                         |                |                |                |
| 2.1       | Opini BPK terhadap<br>laporan keuangan   | WTP             | WTP                     | WTP            | WTP            | WTP            |
| 2.2       | Persentase SILPA   | 4.1             | 5.66                    | 5.32           | 3.16           | 2.99           |
| 2.3       | Persentase SILPA<br>terhadap APBD  | 4.1             | 5.66                    | 5.32           | 3.16           | 2.99           |
| 2.4       | Persentase belanja<br>pendidikan (20%)   | 36.05           | 34.11                   | 32.64          | 26.37          | 29.56          |
| 2.5       | Persentase belanja<br>kesehatan (10%)  | 16.3            | 17.4                    | 15.15          | 13.72          | 18.93          |
| 2.6       | Perbandingan antara<br>belanja langsung<br>dengan belanja tidak<br>langsung  | 43.93           | 45.67                   | 45.15          | 44.66          | 45.44          |
| 2.7       | Bagi hasil kabupa-<br>ten/ kota dan desa   | 0.56            | 0.54                    | 0.52           | 0.52           | 0.55           |
| 2.8       | Penetapan APBD   | Tepat<br>Waktu  | Tidak<br>Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu |
| <b>3.</b> | <b>Pengawasan</b>  |                 |                         |                |                |                |
| 3.1       | Persentase tindak<br>lanjut temuan   | 60              | 62                      | 70             | 78             | 60.33          |
| 3.2       | Jumlah temuan BPK  | 19              | 19                      | 11             | 14             | N/A            |
| 3.3       | Tingkat Maturitas<br>Implementasi Sistem<br>Pengendalian Intern<br>Pemerintah (SPIP)   | 1.87            | 1.87                    | 1.87           | 1.87           | 2,00           |
| <b>4.</b> | <b>Sekretariat Dewan</b>   |                 |                         |                |                |                |
| 4.1       | Tersedianya Rencana<br>Kerja Tahunan pada<br>setiap Alat-alat<br>Kelengkapan DPRD<br>Provinsi/Kab/Kota   | Ada             | Ada                     | Ada            | Ada            | Ada            |
| 4.2       | Tersusun dan<br>terintegrasinya<br>Program-Program<br>Kerja DPRD untuk<br>melaksanakan Fungsi<br>Pengawasan, Fungsi<br>Pembentukan Perda,<br>dan Fungsi Anggaran<br>dalam Dokumen<br>Rencana Lima<br>Tahunan (RPJM)<br>maupun Dokumen<br>Rencana Tahunan<br>(RKPD) | Ada             | Ada                     | Ada            | Ada            | Ada            |
| 4.3       | Terintegrasi program-<br>program DPRD<br>untuk melaksanakan<br>fungsi pengawasan,<br>pembentukan Perda<br>dan Anggaran ke<br>dalam Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Dokumen Anggaran<br>Setwan DPRD   | Ada             | Ada                     | Ada            | Ada            | Ada            |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023.



## **2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018**

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.



Tabel 2.93

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

| No  | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja   | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |       |       |       |       | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |       |       |       |       |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
|   |  | 2014                                       | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| <b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan</b> |  |  |       |       |       |       |   |       |       |       |       |
| <b>Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun</b>    |  |  |       |       |       |       |   |       |       |       |       |
| 1   | Indek Pembangunan Manusia (IPM)  | 72,79                                      | 73,71 | 74,70 | 75,72 | 76,81 | 64,07                                       | 64,75 | 65,25 | 65,92 | 66,72 |
| 2   | Rata-rata Lama Sekolah   | 7,77                                       | 8,14  | 8,55  | 8,96  | 9,47  | 6,75  | 6,85  | 6,89  | 6,90  | 6,91  |
| 3   | Angka Melek Huruf (AMH)  | 98,14                                      | 98,72 | 99,30 | 99,55 | 99,80 | 96,68                                       | 11,76 | 11,88 | 99,40 | 99,40 |
| 4   | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pada Pendidikan Dasar    | 0,02                                       | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,06  | 0,18  |
| 5   | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pada Pendidikan Menengah | 0,30                                       | 0,46  | 0,61  | 0,77  | 0,93  | 0,42  | 0,61  | 0,66  | N/A   | N/A   |
| 6   | Prosentase Bangunan Sekolah Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik                    | 78,00                                      | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 82,58                                       | 83,00 | 84,46 | 85,90 | 77,00 |



| No  | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja                                      | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |          |        |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|----------|--------|
|   |   | 2014                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017     | 2018   |
| 7   | Prosentase Bangunan Sekolah Pendidikan Menengah \Dalam Kondisi Baik | 76,00                                      | 78,00  | 80,00  | 82,00  | 84,00  | 79,59                                       | 85,00  | 60,61  | 60,65    | 86,43  |
| <b>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan</b>                              |   |  |        |        |        |        |   |        |        |          |        |
| 1   | Prosentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4                 | 85,00                                      | 96,61  | 100    | 100,00 | 100,00 | 76,60                                       | 99,18  | 98,30  | 100,00   | 92,86  |
| 2   | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih                | 900,00                                     | 100    | 100    | 50,00  | 50,00  | 1.540,00                                    | 400    | 100,00 | 1.124,00 | 50,00  |
| 3   | Rasio guru terhadap murid   | 1 : 21                                     | 1 : 22 | 1 : 23 | 1 : 24 | 1 : 25 | 1 : 21                                      | 1 : 21 | 1 : 21 | 1 : 20   | 1 : 23 |
| <b>Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka</b> |   |  |        |        |        |        |   |        |        |          |        |
| 1   | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, persatuan 1,000 penduduk        | 0,0893                                     | 0,0893 | 0,0901 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0893                                      | 0,0893 | 0,11   | 0,11     | 0,11   |
| 2   | Jumlah Puskesmas PONED  | 26,00                                      | 27,00  | 28,00  | 28,00  | 28,00  | 25,00                                       | 25,00  | 28,00  | 29,00    | 30,00  |
| 3   | Rasio Rumah Sakit per 1,000 penduduk                                | 0,0026                                     | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026                                      | 0,0026 | 0,0026 | 0,0034   | 0,0031 |
| <b>Sasaran 4 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan</b>  |   |  |        |        |        |        |   |        |        |          |        |
| 1   | Jumlah Puskesmas terakreditasi                                      | 6,00                                       | 6,00   | 6,00   | 6,0    | 7,00   | 6,00  | 6,00   | 4,00   | 13,00    | 10,00  |
| 2   | Tersedianya SOP sistem rujukan                                      | 3,00                                       | 3,00   | 3,00   | 3,0    | 3,00   | 3,00  | 3,00   | 3,00   | 3,00     | 3,00   |
| 3   | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin                 | 83,49                                      | 100,00 | 100,00 | 100,0  | 100,00 | 83,49                                       | 100,00 | 100,00 | 42,1200  | 77,66  |



| No   | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja  | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |       |       |        |        |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|--------|--------|
|  |   | 2014                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   |
| <b>Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB</b>  |   |  |        |        |        |        |   |       |       |        |        |
| 1  | Angka harapan hidup (AHH)   | 67,52                                      | 67,91  | 68,29  | 68,67  | 69,04  | 68,66                                       | 69,06 | 69,22 | 69,39  | 69,68  |
| 2  | Cakupan desa siaga aktif  | 75,00                                      | 74,00  | 76,00  | 78,00  | 80,00  | 75,00                                       | 99,42 | 97,96 | 100,00 | 100,00 |
| 3  | Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS                                     | 56,00                                      | 57,00  | 58,00  | 59,00  | 70,00  | 56,00                                       | 53,46 | 87,06 | 75,00  | 75,00  |
| 4  | AKI per 100.000 KH  | 136,24                                     | 134,51 | 132,78 | 131,05 | 129,32 | 98,20                                       | 93,34 | 86,27 | 84,05  | 77,52  |
| 5  | AKB per 1.000 KH  | 10,76                                      | 10,16  | 9,56   | 8,96   | 8,36   | 8,36  | 7,65  | 6,51  | 4,30   | 4,48   |
| 6  | Balita Gizi Buruk   | 0,06                                       | 0,05   | 0,04   | 0,03   | 0,02   | 0,04  | 0,03  | 0,02  | 0,01   | 0,25   |
| 7  | Cakupan Desa/Kelurahan Univera Child Immunization                         | 96,21                                      | 97,10  | 97,96  | 98,83  | 100,00 | 96,21                                       | 94,75 | 94,17 | 96,21  | 98,83  |
| <b>Sasarn 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan</b>  |   |  |        |        |        |        |   |       |       |        |        |
| 1  | Pendidikan formal bagi tenaga medis                                       | 3,00                                       | 3,00   | 7,00   | 9,00   | 9,00   | 3,00  | 3,00  | 8,00  | 8,00   | 7,00   |
| 2  | Pendidikan formal bagi tenaga paramedis (perawat, bidan nutrisionos, dll) | 5,00                                       | 5,00   | 31,00  | 40,00  | 45,00  | 5,00  | 3,00  | 34,00 | 45,00  | 86,00  |
| 3  | Rasio dokter per 100.000 penduduk   | 0,11                                       | 0,11   | 0,11   | 0,11   | 0,11   | 0,11  | 0,14  | 0,13  | 0,13   | 0,27   |
| 4  | Rasio tenaga para medis per satuan penduduk                               | 1,33                                       | 1,33   | 1,33   | 1,33   | 1,33   | 1,33  | NA    | NA    | NA     | 0,39   |
| <b>Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat</b> |   |  |        |        |        |        |   |       |       |        |        |
| 1  | Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik               | 87,13                                      | 88,73  | 90,62  | 92,36  | 94,61  | 76,08                                       | 88,80 | 92,15 | 86,83  | 94,71  |



| No  | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja                  | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
|   |   | 2014                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
| 2   | Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan     | 0  | 0      | 0,14   | 0,28   | 0,28   | 0   | 0,08   | 0      | 0,29   | 2,78   |
| 3   | Jaringan irigasi dalam kondisi baik             | 68,33                                      | 70,00  | 72,33  | 73,67  | 75,00  | 68,80                                       | 66,96  | 72,40  | 76,00  | 76,30  |
| 4   | Rumah tidak layak huni                          | 13,50                                      | 10,33  | 7,15   | 3,97   | 3,25   | 1,81  | 1,52   | 1,08   | 1,64   | 5,02   |
| 5   | Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik        | 86,50                                      | 90,00  | 93,50  | 97,00  | 100,00 | 47,48                                       | 62,17  | 63,29  | 63,43  | 65,14  |
| 6   | Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik | 91,07                                      | 91,64  | 92,20  | 92,77  | 93,33  | 91,84                                       | 94,52  | 94,52  | 94,75  | 94,75  |
| 7   | Jumlah Desa yang dapat diakses angkutan umum    | 70,00                                      | 75,00  | 80,00  | 85,00  | 90,00  | 86,25                                       | 70,00  | 72,00  | 174,00 | 180,00 |
| <b>Sasaran 8 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana</b> |   |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| 1   | Prosentase pemenuhan RTH                        | 18,65                                      | 39,00  | 59,30  | 79,60  | 100,00 | 18,65                                       | 11,31  | 62,39  | 63,48  | 63,48  |
| 2   | Luas Lahan Kritis (Ha) Yang ditangani           | 1.000,0                                    | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 678,00                                      | 527,28 | 227,82 | 220,34 | 215,45 |
| 3   | Penanganan Dan Pengelolaan Persampahan          | 26,00                                      | 32,00  | 38,00  | 44,00  | 50,00  | 27,92                                       | 29,19  | 48,77  | 49,09  | 53,00  |
| 4   | Upaya Pelestarian Lingkungan                    | 19,27                                      | 39,45  | 59,63  | 79,81  | 100,00 | 19,27                                       | 18,50  | 53,93  | 66,57  | 58,30  |
| 5   | Penanganan Kebencanaan Pra Bencana              | 20,00                                      | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00                                       | 100,00 | 20,00  | 20,00  | 20,00  |
| 6   | Penanganan Kebencanaan Saat Bencana             | 50,00                                      | 50,00  | 60,00  | 60,00  | 65,00  | 50,00                                       | 50,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |



| No  | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja  | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
|   |   | 2014                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
| 7   | Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana  | 100,00                                     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8   | Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL   | 58,33                                      | 83,33  | 88,89  | 94,44  | 100,00 | 58,33                                       | 66,67  | 69,23  | 96,15  | 96,15  |
| <b>Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representative</b>  |   |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| 1   | Jumlah Pasar yang direvitalisasi  | 1,00                                       | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 2,00  | 3,00   | 1,00   | 2,00   | 2,00   |
| <b>Sasaran 10 : Berkembangnya sektor - sektor ekonomi padat karya</b>   |   |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| 1   | Jumlah outlet yang dibangun   | 5,00                                       | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 5,00   | 1,00  | 1,00   | 1,00   | 2,00   | 3,00   |
| <b>Misi 2 : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur</b> |   |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| <b>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah</b>   |   |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| 1   | OPD dan OPP dengan nilai IKM Kiriteria minimal "B"                            | 100,00                                     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                                      | 100    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2   | Capaian nilai SAKIP Pemda   | C  | C      | CC     | CC     | B      | C   | CC     | CC     | CC     | B      |
| 3   | Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya          | 62,00                                      | 67,00  | 72,00  | 73,00  | 74,00  | 83,80                                       | 94,4   | 84,00  | 71,22  | 76,70  |
| 4   | Tingkat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100,00                                     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                                      | 100    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| No  | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja  | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |          |          |          |          |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|---|----------|----------|----------|----------|
|   |   | 2014                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
| 5   | Pemenuhan Kebutuhan/Data Informasi  | 100,00                                     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                                      | 100      | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 6   | Pendapata Asli Daerah (PAD)   | 154,00                                     | 219,00 | 385,00 | 611,00 | 924,00 | 207,04                                      | 276,79   | 331,00   | 368,53   | 449,00   |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah</b>   |   |  |        |        |        |        |   |          |          |          |          |
| 1   | Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat                                  | 239,00                                     | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 325    | 458,00                                      | 640,00   | 1.047,00 | 498,00   | 3.613    |
| <b>Sasaran 3 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum</b>   |   |  |        |        |        |        |   |          |          |          |          |
| 1   | Jumlah demo   | 4,00                                       | 6,00   | 8,00   | 10,00  | 12,00  | 43,00                                       | 19,00    | 12,00    | 5,00     | 8,00     |
| 2   | Angka kriminalitas  | 207,00                                     | 187,00 | 200,00 | 205,00 | 218,00 | 314,00                                      | 325,00   | 275,00   | 344,00   | 228,00   |
| 3   | Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada   | 76,12                                      | -      | -      | -      | 80,00  | 72,00                                       | -        | -        | -        | 87,50    |
| <b>Misi 3 : Membangun Iklim Investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat</b> |   |  |        |        |        |        |   |          |          |          |          |
| <b>Sasaran 1 : Meningkatkan investasi PMA/PMDN dan Investasi Lokal terkait pengembangan UMKM</b>  |   |  |        |        |        |        |   |          |          |          |          |
| 1   | Laju pertumbuhan ekonomi  | 5,30                                       | 5,50   | 5,80   | 6,30   | 6,50   | 4,11  | 5,33     | 6,03     | 6,81     | 6,10     |
| 2   | Daya Beli   | 648,04                                     | 652,64 | 657,47 | 662,62 | 667,65 | 8.233,00                                    | 8.477,00 | 8.594,00 | 8.833,00 | 9.416,00 |
| 3   | Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas 500,000,000,00 | 27,00                                      | 30,00  | 33,00  | 36,00  | 39,00  | 33,00                                       | 39,00    | 37,00    | 33,00    | 49,00    |
| 4   | Jumlah Nilai Investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan                           | 139,05                                     | 146,00 | 153,30 | 160,97 | 169,02 | 582,302                                     | 289,72   | 335,80   | 551,90   | 1.145,00 |



| No   | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja            | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |           |           |           |         | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |           |           |           |         |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
|  |   | 2014                                       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018    | 2014  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018    |
|  | investasi diatas<br>500,000,000,00        |  |           |           |           |         |   |           |           |           |         |
| 5  | Jumlah Investor UMKM                      | 600,00                                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00  | 1.305,00                                    | 835,00    | 627,00    | 427,00    | 696,00  |
| 6  | Nilai Investasi UMKM                      | 339,47                                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00  | 334,2                                       | 162,79    | 119,80    | 77,46     | 142,76  |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM</b>   |   |  |           |           |           |         |   |           |           |           |         |
| 1  | Jumlah UMKM                               | 26.963,0                                   | 28.581,00 | 30.296,00 | 32.114,00 | 34.040  | 26.329,0                                    | 27.437,00 | 28.260,00 | 28.113,00 | 29.518  |
| 2  | Persentase Usaha Kecil dan Usaha Menengah | 6,00                                       | 7,00      | 8,00      | 9,00      | 10,00   | 3,50  | 5,60      | 6,00      | 8,46      | 8,48    |
| 3  | Jumlah Tenaga Kerja di sektor UMKM        | 613,0                                      | 715,00    | 817,00    | 919,00    | 1.021   | 892,0                                       | 1.459,00  | 2.171,00  | 84.160,00 | 1.261   |
| <b>Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan</b> |   |  |           |           |           |         |   |           |           |           |         |
| <b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat untuk Mengakses Pangan</b>  |   |  |           |           |           |         |   |           |           |           |         |
| 1  | Cadangan pangan pemerintah                | 20,00                                      | 20,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00   | 20,00                                       | 20,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00   |
| 2  | Ketersediaan pangan (LPM)                 | 20,00                                      | 20,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00   | 120   | 120       | 128       | 128       | 130     |
| 3  | SLPTT                                     | 10,00                                      | 10,00     | 10,00     | 10,00     | 10,00   | 10,00                                       | 38,00     | 24,00     | 20,00     | 10,00   |
| <b>Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan</b>   |   |  |           |           |           |         |   |           |           |           |         |
| 1  | Jumlah destinasi wisata yang dibangun     | 1,00                                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00    | 1,00  | 1,00      | 1,00      | 3,00      | 3,00    |
| 2  | Jumlah kunjungan wisata                   | 134.000                                    | 162.000   | 162.000   | 200.000   | 200.000 | 131.164                                     | 141.833   | 162.517   | 650.880   | 529.574 |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan sektor-sektor Ekonomi Unggulan daerah yang <i>pro job, pro poor</i> dan <i>pro environment</i></b>   |   |  |           |           |           |         |   |           |           |           |         |



| No  | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja   | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |       |       |       |       | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |       |       |       |        |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|
|   |  | 2014                                       | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   |
| 1   | Jumlah kawasan industri potensi daerah yang dibangun                               | 1,00                                       | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00   |
| <b>Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan</b>  |  |  |       |       |       |       |   |       |       |       |        |
| 1   | Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  | 1  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 46,42                                       | 0,14  | 1,04  | 2,80  | 50,36  |
| 2   | Partisipasi perempuan di lembaga swasta  | 2,50                                       | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 52,83                                       | 4,10  | 4,18  | 6,12  | 55,84  |
| <b>Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera</b>               |  |  |       |       |       |       |   |       |       |       |        |
| 1   | Kemiskinan   | 12,00                                      | 11,00 | 9,00  | 7,00  | 5,00  | 13,42                                       | 14,19 | 12,85 | 12,6  | 10,79  |
| 2   | Rata rata jumlah anak per keluarga   | 1,20                                       | 1,18  | 1,16  | 1,14  | 1,12  | 1,21  | 1,50  | 1,12  | 1,12  | 1,14   |
| 3   | Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I                                    | 31,28                                      | 29,48 | 27,68 | 25,88 | 24,08 | 33,66                                       | 42,24 | 5,75  | 31,58 | 31,89  |
| <b>Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>                                 |  |  |       |       |       |       |   |       |       |       |        |
| 1   | PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 3,00                                       | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 35,36                                       | 4,22  | 38,37 | 75,87 | 135,11 |
| <b>Sasaran 7 : Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja yang terlatih</b> |  |  |       |       |       |       |   |       |       |       |        |
| 1   | Tingkat pengangguran terbuka (TPT)   | 6,74                                       | 4,74  | 4,24  | 3,99  | 2,25  | 4,47  | 4,01  | 4,50  | 5,02  | 4,95   |
| 2   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi                | 5,00                                       | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00                                       | 39,54 | 33,33 | 14,66 | 54,41  |



| No   | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja                              | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |            |            |         | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |         |            |            |         |
|--|---|--|--------|------------|------------|---------|---|---------|------------|------------|---------|
|  |   | 2014                                       | 2015   | 2016       | 2017       | 2018    | 2014  | 2015    | 2016       | 2017       | 2018    |
| 3  | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan         | 2,00                                       | 2,00   | 2,00       | 35,00      | 2,00    | 15,20                                       | 14,45   | 32,32      | 29,65      | 23,65   |
| <b>Sasaran 8 : Memberikan fasilitas hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak - hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan</b> |   |  |        |            |            |         |   |         |            |            |         |
| 1  | Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun                | 31,86                                      | 28,32  | 24,78      | 21,24      | 17,70   | 31,86                                       | 13,27   | 17,69      | 6,06       | 11,14   |
| <b>Sasaran 9 : Meningkatkan peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga</b>   |   |  |        |            |            |         |   |         |            |            |         |
| 1  | Jumlah Kompetensi olah raga                                 | 7,00                                       | 7,00   | 8,00       | 8,00       | 8,00    | 12,00                                       | 13,00   | 10,00      | 9,00       | 10,00   |
| 2  | Jumlah pemuda Pelopor                                       | 4,00                                       | 4,00   | 4,00       | 4,00       | 4,00    | 4,00  | 4,00    | 4,00       | 4,00       | 4,00    |
| <b>Sasaran 10 : Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya</b>  |   |  |        |            |            |         |   |         |            |            |         |
| 1  | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                    | 2,00                                       | 2,00   | 2,00       | 2,00       | 2,00    | 2,00  | 1,00    | 2,00       | 2,00       | 7,00    |
| <b>Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri</b>  |   |  |        |            |            |         |   |         |            |            |         |
| <b>Sasaran : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</b>  |   |  |        |            |            |         |   |         |            |            |         |
| 1  | Jumlah Desa Mandiri   | 4,00                                       | 4,00   | 4,00       | 5,00       | 6,00    | 30,00                                       | 30,00   | 31,00      | 31,00      | 31,00   |
| 2  | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | 681.204                                    | 701045 | 720.886,00 | 740.727,00 | 760.568 | 1.395.352                                   | 1136136 | 395.690,00 | 290.360,00 | 812.360 |
| 3  | Ketersediaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa      | 330,00                                     | 330,00 | 330,00     | 330,00     | 340,00  | 330,00                                      | 330,00  | 300,00     | 330,00     | 330,00  |
| 4  | Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Desa           | 50,00                                      | 60,00  | 65,00      | 70,00      | 75,00   | 50,00                                       | 60,00   | 75,00      | 100,00     | 100,00  |



| No   | Misi/Sasaran/Indikator Kinerja                     | Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018 |        |        |        |        |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
|  |  | 2014                                       | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
| 5  | Jumlah Peraturan Desa                              | 4,00                                       | 5,00   | 6,00   | 7,00   | 8,00   | 4,00  | 5,00   | 8,00   | 9,00   | 10,00  |
| 6  | Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa | 330,00                                     | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 340,00 | 330,00                                      | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 7  | Peningkatan Kapasitas Desa                         | 50,00                                      | 60,00  | 65,00  | 70,00  | 75,00  | 50,00                                       | 60,00  | 60,00  | 70,00  | 80,00  |
| 8  | Profil Desa  | 10,00                                      | 25,00  | 50,00  | 75,00  | 100,00 | 40,00                                       | 57,88  | 90,00  | 100,00 | 100,00 |
| <b>Misi 6 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai</b> |  |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| <b>Sasaran : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama</b>                                    |  |  |        |        |        |        |   |        |        |        |        |
| 1  | Konflik antar umat beragama                        | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2  | Jumlah Zakat yang terkumpul                        | 5,00                                       | 8,00   | 11,00  | 14,00  | 16,00  | 5,00  | 8,00   | 7,20   | 9,00   | 8,00   |
| 3  | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk            | 0,008                                      | 0,009  | 0,010  | 0,011  | 0,012  | 0,01  | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023.



Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018-2020 memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2020.

Tabel 2.94.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2020

| NO.   | INDIKATOR  | SATUAN    | KONDISI AWAL |         | TARGET  |         | REALISASI |         |
|---|--|-----------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|   |  |           | 2017         | 2018    | 2019    | 2020    | 2019      | 2020    |
| <b>MISI 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>  |  |           |              |         |         |         |           |         |
| 1   | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | persen    | N/A          | N/A     | 5       | 5       | 5         | 1       |
| <b>MISI 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>  |  |           |              |         |         |         |           |         |
| 2   | Indeks Gini  | poin      | 0,351        | 0,337   | 0,335   | 0,333   | 0,331     | 0,336   |
| 3   | Angka Kemiskinan   | %         | 12,6         | 10,79   | 10,48   | 10,08   | 10,06     | 11,43   |
| 4   | Angka Stunting   | persen    | -            | -       | -       | 4,5     | 5,5       | 5,29    |
| 5   | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat                      | persen    | N/A          | 20      | 10      | 10      | 20        | 10      |
| <b>MISI 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>   |  |           |              |         |         |         |           |         |
| 6   | Nlai SAKIP   | nilai     | CC           | B       | B       | BB      | B         | B       |
| 7   | Opini BPK RI   | opini     | WTP          | WTP     | WTP     | WTP     | WTP       | WTP     |
| 8   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                     | poin      | B            | B       | B       | B       | B         | B       |
| 9   | Indeks Profesionalitas ASN   | poin      | 88           | 88      | 88,50   | 89      | 56        | 58,8    |
| 10  | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB  | persen    | 0            | 0       | 30      | 40      | 30        | 30      |
| <b>MISI 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b> |  |           |              |         |         |         |           |         |
| 11  | Indeks Pengetahuan   | poin      | 56,83        | 56,89   | 58,03   | 58,84   | 57,55     | 58,84   |
| 12  | Indeks Kesehatan   | poin      | 75,98        | 76,43   | 76,53   | 76,75   | 76,88     | 77,34   |
| 13  | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik                 | persen    | 80,22        | 80,37   | 80,52   | 80,67   | 68,47     | 69,02   |
| 14  | Nilai Tukar Petani   | persen    | n/a          | 99,67   | 100,49  | 101,31  | 100,80    | N/A     |
| 15  | Jumlah kunjungan wisatawan   | kunjungan | 200.000      | 589.843 | 619.335 | 681.269 | 701.335   | 375.000 |
| 16  | Jumlah Industri Baru   | unit      | -            | -       | 40      | 40      | 56        | 45      |
| 17  | Jumlah desa tematik  | desa      | -            | -       | 26      | 26      | 33        | 26      |
| <b>MISI 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>   |  |           |              |         |         |         |           |         |
| 18  | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya                    | desa      | N/A          | 109     | 36      | 51      | 52        | 51      |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023



## **2.6 Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19**

Kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19* dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan mobilitas dan aktivitas, *Work From Home (WFH)*, sekolah dari rumah, dan sebagainya, telah berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya

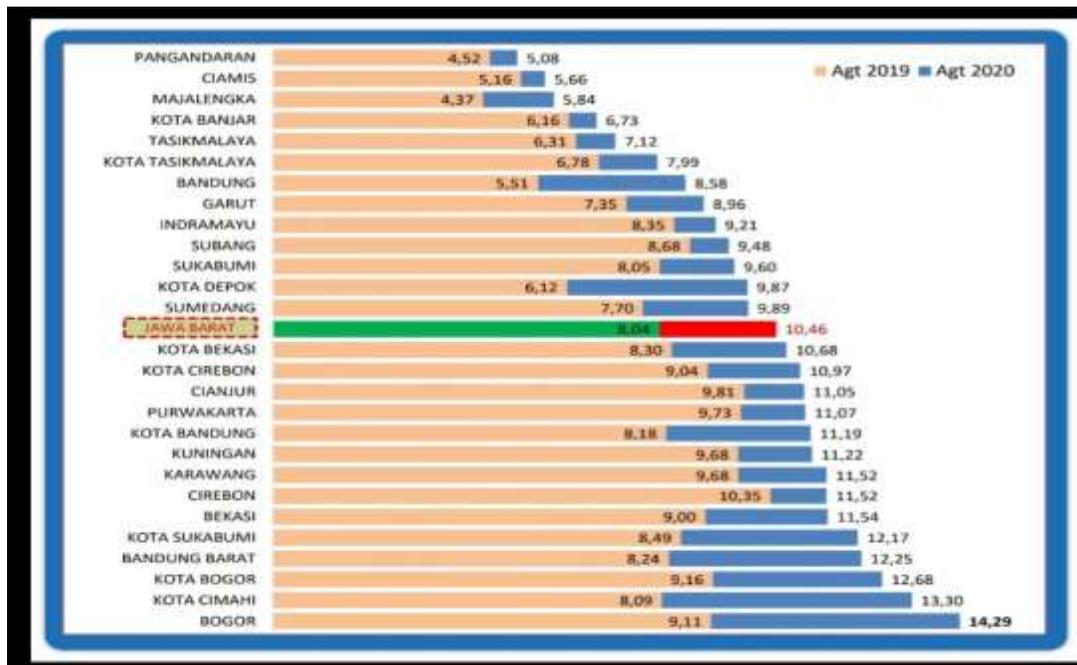
Kabupaten Majalengka termasuk wilayah yang terdampak akibat pandemi *Covid-19* ini. Berdasarkan data sampai dengan akhir April 2020 terdapat sejumlah 1.674 perusahaan yang terkena dampak yang menyebabkan pekerja dirumahkan sebanyak 69.260 pekerja.

Kebijakan lain selain merumahkan pekerja/buruh sebagai akibat dari pandemi *COVID-19* adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. Dari total sebanyak 1.968 perusahaan terdampak, sebanyak 454 perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja/buruh dengan total 18.966 pekerja/buruh mengalami PHK.

Perkembangan data ketenagakerjaan berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa barat di Kabupaten Majalengka terdapat 15 Perusahaan yang dilaporkan terdampak *Covid 19*. Sebanyak 2.579 orang pekerja dilaporkan dirumahkan oleh sebanyak 13 perusahaan sedangkan 496 orang pekerja dilaporkan oleh 2 perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ada awal Tahun 2020 terjadi pandemi *COVID-19* yang berdampak pada sektor kesehatan dan sangat membatasi aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya capaian PDRB Jawa Barat di triwulan I Tahun 2020 dan berpotensi masih terjadi di sisa Tahun 2020.



**Gambar 2.13.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten /Kota**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2020

Berdasarkan Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa akibat dampak *Covid-19* terjadi kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Majalengka dimana pada Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka pada posisi terbaik dengan nilai 4,37 persen namun pada bulan Agustus tahun 2020 nilai TPT Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan sebesar 1,47 persen menjadi 5,84 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya kondisi Majalengka masih lebih baik karena masih dibawah rata-rata capaian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

## 2.7 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (cross cutting), terdapat 206 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Majalengka. Indikator TPB tersebut dibagi dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Capaian ini dinilai terhadap target RPJMN Tahun 2019. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada Tabel di berikut ini:



Tabel 2.95

## Pencapaian Sustainable Development Goals(SDGs)/Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (TPB)

| No.          | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan               | Telah Mencapai Target | Belum Mencapai Target | Perlu Peningkatan | Perlu Penurunan | Tidak Ada Data | Jumlah Indikator |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1.           | Tanpa Kemiskinan                               | 7                     | 2                     | 1                 | 0               | 2              | 12               |
| 2.           | Tanpa Kelaparan                                | 9                     | 2                     | 1                 | 0               | 2              | 14               |
| 3.           | Kehidupan Sehat dan Sejahtera                  | 11                    | 1                     | 4                 | 1               | 9              | 26               |
| 4.           | Pendidikan Berkualitas                         | 4                     | 3                     | 2                 | 1               | 1              | 11               |
| 5.           | Kesetaraan Gender                              | 0                     | 2                     | 3                 | 1               | 8              | 14               |
| 6.           | Air Bersih dan Sanitasi Layak                  | 5                     | 2                     | 1                 | 0               | 3              | 11               |
| 7.           | Energi Bersih dan Terjangkau                   | 2                     | 0                     | 1                 | 0               | 3              | 6                |
| 8.           | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi        | 4                     | 3                     | 2                 | 0               | 8              | 17               |
| 9.           | Industri, Inovasi dan Infrastruktur            | 0                     | 2                     | 4                 | 0               | 6              | 12               |
| 10.          | Mengurangi Kesenjangan                         | 0                     | 0                     | 5                 | 0               | 6              | 11               |
| 11.          | Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas          | 0                     | 1                     | 6                 | 0               | 8              | 15               |
| 12.          | Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab   | 0                     | 3                     | 0                 | 1               | 9              | 13               |
| 13.          | Tindakan terhadap Iklim                        | 0                     | 0                     | 2                 | 0               | 5              | 7                |
| 14.          | Pelestarian dan Pemanfaatan Lanjutan Ekosistem | 0                     | 0                     | 3                 | 1               | 10             | 14               |
| 15.          | Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat   | 2                     | 3                     | 0                 | 2               | 16             | 23               |
| <b>Total</b> |  | <b>44</b>             | <b>24</b>             | <b>35</b>         | <b>7</b>        | <b>96</b>      | <b>206</b>       |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Majalengka 2018-2023.

## 2.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis



pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.96  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

| NO             | JENIS PELAYANAN DASAR               | PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                 | Target 2019 | Realisasi 2019 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|-------------------------------------|--|---|-------------|----------------|-----------------------------------|
| SPM PENDIDIKAN |                                     |  |   |             |                |                                   |
| 1              | Pendidikan Anak Usia Dini           | Program Pendidikan PAUD  | APK/APM PAUD  | 65,02       | 86,6           | Dinas Pendidikan                  |
| 2              | Pendidikan Non Formal               | Program Pendidikan Non Formal                                      | Persentase Warga Belajar Paket A/B/C                      | 37,98       | 40             | Dinas Pendidikan                  |
|                |                                     |  | Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi         | 5           | 5              | Dinas Pendidikan                  |
| 3              | Pendidikan Dasar                    | Program Pendidikan Dasar   | APK SD/MI   | 104,6       | 104,3          | Dinas Pendidikan                  |
| 4              | Pendidikan SMP                      | Program Pendidikan SMP   | APK SMP/MTs   | 99,92       | 99,87          | Dinas Pendidikan                  |
| SPM KESEHATAN  |                                     |  |   |             |                |                                   |
| 1              | Pelayanan kesehatan ibu hamil       | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Peningkatan Kapasitas petugas dalam pelayanan KIA         | 100         | 99.56 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 2              | Pelayanan kesehatan ibu bersalin    | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin             | 100         | 100 %          | Dinas Kesehatan                   |
| 3              | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya pelayanan imunisasi dasar pada bayi          | 100         | 100 %          | Dinas Kesehatan                   |
| 4              | Pelayanan kesehatan balita          | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | terpenuhinya penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk | 98,05       | 100 %          | Dinas Kesehatan                   |



| NO                 | JENIS PELAYANAN DASAR  | PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA PROGRAM   | Target 2019 | Realisasi 2019 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|--|--|---|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 5                  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar   | , Program Penguatan Dasar dan Rujukan                              | Meningkatnya riveu pelayanan UKS dan Kespro pada Remaja             | 98,08       | 97.77 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 6                  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif  | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja                              | 100         | 31.15 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 7                  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut   | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya cakupan desa/kelurahan terbentuk posbindu              | 100         | 88.76 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 8                  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi   | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi       | 100         | 18.91 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 9                  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus   | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetesmiletus  | 99,56       | 80.60 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 10                 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat   | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya penemuan kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 93,62       | 76.59 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 11                 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis   | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya Cakupan penemuan TB paru                               | 99,94       | 78.60 %        | Dinas Kesehatan                   |
| 12                 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Program Penguatan Dasar dan Rujukan                                | Meningkatnya cakupan penyakit HIV Aids                              | 98,08       | 66.15 %        | Dinas Kesehatan                   |
| SPM PEKERJAAN UMUM |  |  |   |             |                |                                   |



| NO   | JENIS PELAYANAN DASAR   | PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM   | Target 2019 | Realisasi 2019 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|---|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 1  | memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/air minum dan air limbah | Jumlah KK yang dapat mengakses sarana dan prasarana air bersih                          | 250 SR      | 250 SR         | Dinas PKPP                        |
| 2  | penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik   | Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/air minum dan air limbah | Jumlah KK yang dapat mengakses air limbah dan drainase                                  | 250 SR      | 250 SR         | Dinas PKPP                        |
| <b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>  |   |   |   |             |                |                                   |
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten                                       | Program Manajemen Kebencanaan                                       | Tersalurkannya bantuan perbaikan rumah hunian sementara pasca bencana                   | 250 SR      | 250 SR         | Dinas PKPP                        |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Program Manajemen Kebencanaan                                       | terselenggaranya fasilitasi pemulihan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat | 2 lokasi    | 2 Lokasi       | Dinas PKPP                        |
| <b>SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |   |   |             |                |                                   |
| 1  | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum  | Program Manajemen Kebencanaan                                       | Jumlah Penanggulangan Bencana   | 100%        | 100%           | Satpol PP                         |
| 2  | Pelayanan informasi rawan bencana   |   |   |             |                | BPBD                              |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   |   |   |             |                | BPBD                              |



| NO                | JENIS PELAYANAN DASAR   | PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | Target 2019   | Realisasi 2019 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |              |
|-------------------|---|--|---------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 4                 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  |  |                           |   |                | BPBD                              |              |
| 5                 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  |  |                           |   |                | Satpol PP                         |              |
| <b>SPM SOSIAL</b> |   |  |                           |   |                |                                   |              |
| 1                 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti  | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat                       | 1                         | Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan 2400 Kalori Perorang Perhari  | 100%           | 105%                              | Dinas Sosial |
| 2                 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti  | Program Jaminan Sosial   |                           | Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan,Kesehatan,Pangan | 100%           | 100%                              | Dinas Sosial |
| 3                 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti   | Program Jaminan Sosial   | 1                         | Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan,Kesehatan,Pangan | 100%           | 84,87%                            | Dinas Sosial |
| 4                 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti                                  | Program Jaminan Sosial   |                           | Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan,Kesehatan,Pangan | 100%           | 100%                              | Dinas Sosial |
| 5                 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Program Manajemen Kebencanaan                                      |                           | Meminimalisir Dampak Resiko Bencana                                       | 100%           | 100%                              | Dinas Sosial |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023.

# **BAB III**



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Pada bab mengenai gambaran keuangan daerah ini, akan diuraikan secara rinci kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa lima tahun mendatang.

#### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh:

- a) Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM),
- b) Laju pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah,



- c) Terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di negara Eropa dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor dan,
- d) Melemahnya nilai tukar rupiah.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2015 hingga tahun 2019 disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.1.  
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019

| No        | Pendapatan Daerah   | Tahun 2015 (Rp)             | Tahun 2016 (Rp)             | Tahun 2017 (Rp)             | Tahun 2018 (Rp)             | Tahun 2019 (Rp)             | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>2.493.439.229.256,00</b> | <b>2.576.052.108.544,00</b> | <b>2.685.374.288.724,55</b> | <b>2.817.703.167.346,60</b> | <b>2.964.507.116.248,51</b> | <b>5,29</b>           |
| <b>1.</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     | <b>283.735.793.231,00</b>   | <b>331.527.582.021,00</b>   | <b>513.783.824.021,55</b>   | <b>449.706.526.145,60</b>   | <b>439.881.929.209,51</b>   | <b>16,56</b>          |
| a.        | Pajak Daerah  | 55.351.055.514,00           | 81.781.134.547,00           | 116.930.840.901,00          | 144.100.938.195,00          | 123.650.332.813,00          | 29,29                 |
| b.        | Retribusi Daerah  | 17.319.627.349,00           | 16.338.783.187,00           | 16.859.496.972,00           | 18.506.497.178,00           | 18.875.051.518,00           | 1,32                  |
| c.        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                 | 5.331.024.389,00            | 6.958.395.004,00            | 7.134.073.543,00            | 7.229.014.024,00            | 7.825.254.542,00            | 10,66                 |
| d.        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                         | 205.734.085.979,00          | 226.449.269.283,00          | 372.859.412.605,55          | 279.870.076.748,60          | 289.531.290.336,51          | 14,79                 |
| <b>2.</b> | <b>Dana Perimbangan</b>   | <b>1.367.195.047.862,00</b> | <b>1.723.845.574.035,00</b> | <b>1.689.901.152.919,00</b> | <b>1.668.010.124.763,00</b> | <b>1.672.148.853.717,00</b> | <b>6,47</b>           |
| a.        | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                           | 86.458.145.862,00           | 98.614.229.706,00           | 91.248.880.539,00           | 77.319.204.617,00           | 71.550.094.633,00           | 1,00                  |
| b.        | Dana Alokasi Umum   | 1.115.055.702.000,00        | 1.225.932.872.000,00        | 1.204.397.174.000,00        | 1.170.272.587.360,00        | 1.167.367.009.900,00        | 1,28                  |
| c.        | Dana Alokasi Khusus   | 165.681.200.000,00          | 399.298.472.329,00          | 394.255.098.380,00          | 420.418.332.786,00          | 433.231.749.184,00          | 39,24                 |
| <b>3.</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                       | <b>842.608.388.163,00</b>   | <b>520.678.952.488,00</b>   | <b>481.689.311.784,00</b>   | <b>699.986.516.438,00</b>   | <b>852.476.333.322,00</b>   | <b>5,72</b>           |
| a.        | Pendapatan Hibah dari Pemerintah                                  | 0,00                        | 2.353.618.973,00            | 0,00                        | 124.027.280.000,00          | 133.071.933.860,00          | -                     |
| b.        | Dana Darurat Penanggulangan Kerusakan Akibat Bencana Alam         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0                           | 0                           | -                     |
| c.        | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 118.829.286.887,00          | 122.521.101.915,00          | 129.817.736.644,00          | 143.368.557.287,00          | 151.238.495.571,00          | 5,43                  |
| d.        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 462.606.688.000,00          | 250.451.327.000,00          | 320.040.534.900,00          | 312.485.897.000,00          | 414.881.243.000,00          | 3,08                  |
| e.        | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 261.172.413.276,00          | 145.352.904.600,00          | 31.831.040.240,00           | 120.104.782.151,00          | 153.284.600.891,00          | 47,42                 |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.



Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten selama tahun 2019 tercatat mencapai **Rp. 2.964.507.116.248,51**, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2018 mencapai **Rp. 2.817.703.167.346,60,-**. Hal ini terjadi peningkatan PAD pada tahun 2019. *Komponen pendapatan daerah* tersebut terdiri dari:

- a) *Pendapatan Asli Daerah*, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b) *Dana Perimbangan*, yaitu dari dana alokasi khusus.
- c) *Lain-lain Pendapatan Daerah*, terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, bantuan keuangan dari provinsi.

Bila dilihat dari penerimaan daerah, maka Bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2015-2019 mengalami peningkatan secara terus menerus. Sedangkan bagian terbesar pendapatan masih berada pada bagian pendapatan dari bagian dana perimbangan pada tahun 2019 yang mencapai **Rp. 1.672.148.853.717,00,-**. Sumber terbesar komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari pos dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **2. Belanja Daerah**

Tolok ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran/belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Jenis pengeluaran terbesar berasal dari Belanja Tak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Rencana anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.2.  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2015–2019

| No       | Belanja Daerah  | Tahun 2015 (Rp)             | Tahun 2016 (Rp)             | Tahun 2017 (Rp)             | Tahun 2018 (Rp)             | Tahun 2019 (Rp)             | Rata-rata Pertumbuhan |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>B</b> | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>2.388.970.814.976,00</b> | <b>2.633.576.715.220,00</b> | <b>2.638.825.946.023,00</b> | <b>2.703.125.430.623,00</b> | <b>3.013.073.288.336,95</b> | <b>6,08</b>           |
| <b>1</b> | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   | <b>1.258.592.602.117,00</b> | <b>1.538.412.579.612,00</b> | <b>1.508.939.050.181,00</b> | <b>1.551.047.379.880,00</b> | <b>1.727.557.029.748,00</b> | <b>8,62</b>           |
| a.       | Belanja Pegawai   | 1.120.213.633.217,00        | 1.185.802.320.216,00        | 1.069.838.932.312,00        | 1.090.166.962.884,00        | 1.179.555.087.493,00        | 1,54                  |
| b.       | Belanja Bunga   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0,00                        | -                     |
| c.       | Belanja Subsidi   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0,00                        | -                     |
| d.       | Belanja Hibah   | 1.550.000.000,00            | 11.825.800.000,00           | 38.999.007.000,00           | 17.912.483.000,00           | 28.854.900.000,00           | 224,93                |
| e.       | Belanja Bantuan Sosial  | 241.000.000,00              | 0                           | 0                           | 0                           | 3.115.000.000,00            | -                     |
| f.       | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa        | 264.258.600,00              | 0                           | 0                           | 0                           | 13.371.277.500,00           | -                     |
| g.       | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 136.323.710.300,00          | 340.784.459.396,00          | 399.313.206.032,00          | 442.967.933.996,00          | 502.660.764.755,00          | 47,4                  |
| h.       | Belanja Tidak Terduga   | 0                           | 0                           | 787.904.837,00              | 0                           | 0,00                        | -                     |
| <b>2</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | <b>1.130.378.212.859,00</b> | <b>1.095.164.135.608,00</b> | <b>1.129.886.895.842,00</b> | <b>1.152.078.050.743,00</b> | <b>1.285.516.258.588,95</b> | <b>3,40</b>           |
| a.       | Belanja Pegawai   | 134.303.614.491,00          | 152.643.271.731,00          | 177.148.921.434,00          | 174.867.790.786,00          | 74.699.840.565,00           | -7,21                 |
| b.       | Belanja Barang dan Jasa   | 323.941.989.064,00          | 310.762.840.089,00          | 346.965.774.417,00          | 317.689.010.277,00          | 567.152.720.168,95          | 19,41                 |
| c.       | Belanja Modal   | 672.132.609.304,00          | 631.758.023.788,00          | 605.772.199.991,00          | 659.521.249.680,00          | 643.663.697.855,00          | -0,9                  |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.



### **3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuangan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran. Dalam aspek pengeluaran pembiayaan, sebagian besar didominasi oleh pembentukan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Gambaran detail mengenai pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka disajikan pada Tabel berikut ini:



Tabel 3.3.

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015–2019

| No        | Pembiayaan                                      | Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2015 (Rp) | Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2016 (Rp) | Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2017 (Rp) | Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2018 (Rp) | Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2019 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----------|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>C.</b> | <b>PEMBIAYAAN DAERAH (NETTO)</b>                | <b>135.142.245.333,00</b>                            | <b>176.862.540.638,00</b>                            | <b>117.414.092.988,00</b>                            | <b>132.968.083.872,55</b>                            | <b>149.963.904.526,15</b>                            | <b>5,8</b>            |
| <b>1.</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>             | <b>165.142.245.333,00</b>                            | <b>239.716.159.611,00</b>                            | <b>137.414.092.988,00</b>                            | <b>163.968.083.872,55</b>                            | <b>178.420.655.426,15</b>                            | <b>7,65</b>           |
| a.        | SILPA Daerah Tahun Sebelumnya                   | 164.971.245.333,00                                   | 239.710.659.611,00                                   | 119.337.933.962,00                                   | 163.962.435.689,55                                   | 159.116.192,15                                       | -16,02                |
| b.        | Pencairan Dana Cadangan                         | 0,00   | 0,00   | 18.000.000.000,00                                    | 0,00   | 0,00   | -                     |
| c.        | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -                     |
| d.        | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12.299.465.800,00                                    | -                     |
| e.        | Penerimaan Piutang Daerah                       | 171.000.000,00                                       | 5.500.000,00   | 76.159.026,00  | 5.648.183,00   | 0,00   | 248,63                |
|           |   |  |  |  |  | 4.997.500,00   |                       |
| <b>2.</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>            | <b>30.000.000.000,00</b>                             | <b>62.853.618.973,00</b>                             | <b>20.000.000.000,00</b>                             | <b>31.000.000.000,00</b>                             | <b>28.456.750.900,00</b>                             | <b>22,03</b>          |
| a.        | Pembentukan Dana Cadangan                       | 30.000.000.000,00                                    | 58.000.000.000,00                                    | 20.000.000.000,00                                    | 30.000.000.000,00                                    | 0,00   | -16,6                 |
| b.        | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  | 0,00   | 4.853.618.973,00                                     | 0,00   | 1.000.000.000,00                                     | 9.157.285.100,00                                     | -                     |
| c.        | Pembayaran Pokok Utang                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 19.299.465.800,00                                    | -                     |
| d.        | Pemberian Pinjaman Daerah                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -                     |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.



### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci. Hal-hal yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 3.4.  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Majalengka  
Tahun 2015-2019

| No       | Uraian                                 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|----------|--|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>ASET</b>                            |                       |
| <b>1</b> | <b>ASET LANCAR</b>                     | <b>26,26</b>          |
|          | Kas                                    | 10,76                 |
|          | Investasi Jangka Pendek                | -                     |
|          | Piutang                                | 80,13                 |
|          | Penyisihan Piutang                     | 46,08                 |
|          | Bagian Lancar Pinjaman                 |                       |
|          | Persediaan                             | 132,41                |
|          | Biaya Dibayar di Muka                  | -                     |
| <b>2</b> | <b>ASET TETAP</b>                      | <b>1,25</b>           |
|          | Tanah                                  | 1,02                  |
|          | Peralatan dan mesin                    | 8,40                  |
|          | Gedung dan bangunan                    | 3,75                  |
|          | Jalan, irigasi, dan jaringan           | 16,29                 |
|          | Aset tetap lainnya                     | 22,80                 |
|          | Konstruksi dalam pengerjaan            | -                     |
|          | Akumulasi Penyusutan                   | -                     |
| <b>3</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                    | <b>18,66</b>          |
|          | Tagihan penjualan angsuran             | -                     |
|          | Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | -                     |
|          | Tagihan Jangka Panjang                 | -                     |
|          | Kemitraan dengan pihak ketiga          | -                     |
|          | Aset tak berwujud                      | -7,17                 |
|          | Tuntutan Perbendaharaan                | -                     |
|          | Aset Lain-Lain                         | 44,88                 |
|          | Akumulasi Penyusunan Aset Rusak Berat  | -                     |
| <b>4</b> | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>        | <b>7,04</b>           |
|          | Dana Bergulir                          | -0,86                 |



| No       | Uraian   | Rata-Rata Pertumbuhan |
|----------|--|-----------------------|
|          | Investasi Non Permanen Lainnya                                   | -                     |
|          | Dana Bergulir Diragukan Tertagih                                 | -0,86                 |
|          | Penyertaan Modal Pada Pusat Koperasi Syariah dan KUKM            | -                     |
|          | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                               | 7,24                  |
| <b>5</b> | <b>DANA CADANGAN</b>   | <b>66,12</b>          |
|          | Dana Cadangan  | 66,12                 |
|          | <b>JUMLAH ASET DAERAH</b>  | <b>2,50</b>           |
|          |  |                       |
| <b>B</b> | <b>KEWAJIBAN</b>   | <b>20,61</b>          |
| <b>1</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                   | <b>20,61</b>          |
|          | Utang kepada pihak ketiga  | 20,35                 |
|          | Utang perhitungan pihak ketiga                                   | -                     |
|          | Utang Jangka Pendek Lainnya                                      | -                     |
|          | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank         | -                     |
|          | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                               | -                     |
|          | Pendapatan Diterima Dimuka                                       | -                     |
|          | Utang Jangka Pendek Lainnya                                      | -                     |
|          | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                                  | <b>-</b>              |
|          | Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                       | -                     |
|          | Utang Jangka Panjang Lainnya                                     | -                     |
| <b>C</b> | <b>EKUITAS DANA</b>  | <b>2,04</b>           |
| <b>1</b> | <b>EKUITAS DANA LANCAR</b>                                       | <b>-</b>              |
|          | SILPA  | -                     |
|          | Pendapatan yang Ditangguhkan                                     | -                     |
|          | Cadangan piutang   | -                     |
|          | Cadangan persediaan  | -                     |
|          | Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek  | -                     |
| <b>2</b> | <b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>                                    | <b>-</b>              |
|          | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang                    | -                     |
|          | Diinvestasikan dalam aset tetap                                  | -                     |
|          | Diinvestasikan dalam aset lainnya                                | -                     |
|          | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | -                     |
| <b>3</b> | <b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>                                     | <b>-</b>              |
|          | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan                               | -                     |
|          | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>                         | <b>2,50</b>           |

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka, Tahun 2020.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Selama periode tahun anggaran 2015-2019, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- 1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- 2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- 3) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.



- 5) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 7) Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 8) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 9) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- 10) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

## **2. Kebijakan Belanja Daerah**

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2015-2019, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan SDGs. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan SDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majalengka yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.
- 2) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume APBD setiap tahunnya.
- 3) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10% dari volume APBD setiap tahunnya.
- 4) Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 5) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
- 6) Untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- 7) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Majalengka, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.



- 8) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pelayanan dasar OPD.
- 9) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  - f. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

- g. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada.

#### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun ke depan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2015, persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan sebesar 52 persen, tahun 2016 menurun menjadi ..persen. Hingga tahun 2019, proporsi

belanja terus mengalami penurunan menjadi 46 persen. Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan serta mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan publik. Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja yang dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/aparatur, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan dalam penerimaan pegawai.

Tabel 3.5.  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019

| Tahun | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) | Presentase |
|-------|--|--|------------|
| 2015  | 1.254.517.247.708                                | 2.418.970.814.976                                  | 52         |
| 2016  | 1.338.445.591.947                                | 2.696.430.334.193                                  | 50         |
| 2017  | 1.246.987.853.746                                | 2.658.825.946.023                                  | 47         |
| 2018  | 1.265.034.753.670                                | 2.734.125.430.623                                  | 46         |
| 2019  | 1.254.254.928.058                                | 3.041.530.039.236,95                               | 41.23      |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6.  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019

| NO. | URAIAN                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Realisasi Pendapatan   | 2.493.439.229.256,00 | 2.576.052.108.544,00 | 2.685.223.334.956,00 | 2.817.180.217.292,60 | 2.964.507.116.248,51 |
|     | Dikurangi              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2   | Realisasi Belanja      | 2.388.970.814.976,00 | 2.633.576.715.220,00 | 2.638.825.946.023,00 | 2.791.917.486.735,00 | 3.013.073.288.336,95 |
| 3   | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000.000,00    | 62.853.618.973,00    | 20.000.000.000,00    | 31.000.000.000,00    | 28.456.750.900,00    |
|     | Defisit Real           | 74.468.414.280,00    | -120.378.225.649,00  | 26.397.338.933,00    | -5.737.269.442,40    | -77.022.922.988,44   |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.

Tabel 3.7.  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019

| NO. | URAIAN  | Proporsi dari total defisit riil |                    |                    |                    |                   |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|     |   | 2015                             | 2016               | 2017               | 2018               | 2019              |
| 1   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 164.971.245.333,00               | 239.710.659.613,00 | 119.337.933.962,00 | 164.057.259.588,55 | 159.116.192,15    |
| 2   | Pencairan Dana Cadangan                                 | 0,00                             | 0,00               | 18.000.000.000,00  | 0,00               | 0,00              |
| 3   | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan         | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 4   | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah          | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.299.465.800,00 |
| 5   | Penerimaan Piutang Daerah                               | 171.000.000,00                   | 5.500.000,00       | 76.159.026,00      | 5.648.183,00       | 4.997.500,00      |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.



Tabel 3.8.  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019

| NO. | URAIAN  | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Jumlah Silpa  | 239.710.659.611,00 | 163.962.435.689,55 | 163.811.481.921,00 | 158.325.638.329,15 | 101.397.732.437,71 |
| 2   | Pelampauan penerimaan PAD   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3   | Pelampauan penerimaan dana perimbangan                                      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4   | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 5   | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya                                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 6   | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 7   | Kegiatan lanjutan   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |

Sumber: LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2015-2019.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2023 ini sangatlah penting untuk dikaji. Hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2014-2019 akan menjadi dasar dalam pendanaan program dan kegiatan pada periode pemerintahan saat ini yaitu periode 2018-2023.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dana dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak



ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir Tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk perencanaan Tahun 2021 di dalam penyusunan APBD nya harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus berjangkitnya pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan



memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Majalengka pada Triwulan I dan II Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Kabupaten Majalengka. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020. Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kebijakan keuangan daerah dalam hal potensi daerah dan penerimaan di Kabupaten Majalengka sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. *Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* adalah:

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan dan potensi daerah;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi yang didukung dengan akselerasi melalui inovasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- 3) Penegakan aturan dalam Pengelolaan PAD;
- 4) Reformasi birokrasi pengelola PAD.

2. *Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan* adalah:

- 1) Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
- 2) Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait di kabupaten.

3. *Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah* adalah:

- 1) Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak provinsi;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- 3) Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah adalah:

**1. Pendapatan Asli Daerah:**

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD;
- 3) Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD;
- 4) Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;
- 5) Pemberian *reward* bagi wajib pajak berprestasi;
- 6) Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD;
- 7) Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat;
- 8) Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi;
- 9) Penataan kelembagaan OPD pengelola PAD;
- 10) Peningkatan kompetensi personil OPD pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD;
- 11) Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
- 12) Penyusunan data base potensi PAD;
- 13) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- 14) Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 15) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

## **2. Dana Perimbangan:**

1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak pusat;
2. Penyusunan regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan;
3. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
5. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

## **3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah:**

- 1) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak provinsi;
- 2) Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
- 3) Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan OPD teknis terkait.

Mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasil, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan di atas sekitar 8%.

Asumsi dasar yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 tahun adalah:



### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun antara lain dilatarbelakangi oleh:

- 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 2) Perubahan kelas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek PBB serta perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) pada objek BHPHTB;
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- 4) Adanya sinergitas di dalam maupun antar OPD pengelola pendapatan;
- 5) Terlaksananya penataan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM personil, pemenuhan sarana dan prasarana serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- 6) Peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh OPD pengelola PAD;
- 7) Peningkatan pemanfaatan aset dan keuangan daerah;
- 8) Penggalian potensi pendapatan dari BUMD.

### **2. Dana Perimbangan**

- 1) Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
- 2) Meningkatnya akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.

### **3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Kenaikan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima tahun ke depan dilatarbelakangi oleh:

- 1) Adanya penambahan dari dana bagi hasil pajak provinsi yaitu pajak rokok yang mulai dibagikan ke daerah kabupaten/kota pada tahun 2014;
- 2) Adanya penambahan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru PNSD;
- 3) Adanya penambahan jumlah penerimaan guru baru dari penerimaan CPNSD.



Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, menuntut adanya kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program unggulan tahun 2018-2023 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Tetapi dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19 di Tahun 2020. Setidaknya ada empat sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju



pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi dengan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

1. Mendanai program prioritas dalam rangka pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2018-2023, terutama untuk pemenuhan urusan dasar setiap perangkat daerah, program pencapaian indikator kinerja Utama (IKU) kabupaten, program regular setiap perangkat daerah dan program prioritas setiap perangkat daerah.
2. Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025, SPM dan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008.
3. Mendukung percepatan pembangunan nasional (Inpres Nomor 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres Nomor 3/2010).
4. Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
5. Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan (program baru/terobosan).
6. Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Kabupaten Majalengka secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
7. Mendanai program janji Bupati dan Wakil Bupati.

Selain hal tersebut, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa belanja daerah selain dialokasikan untuk penuntasan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 juga harus dialokasikan pada program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi.

Untuk kepentingan perencanaan diperkirakan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut:



Tabel 3.9.  
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Tahun 2019-2020

| No. | URAIAN  | Pertumbuhan  | APBD                        |                             |
|-----|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |   |              | 2019                        | 2020                        |
| 1   | 2   |              |                             | 3                           |
|     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>0,09</b>  | <b>2.964.575.597.974,55</b> | <b>3.239.509.344.776,06</b> |
|     | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>0,12</b>  | <b>439.843.264.594,55</b>   | <b>490.880.764.107,06</b>   |
|     | Hasil Pajak Daerah                                | -0,04        | 123.654.331.397,00          | 119.119.943.663,00          |
|     | Hasil Retribusi Daerah                            | -0,07        | 18.875.051.518,00           | 17.631.278.296,00           |
|     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -0,16        | 7.825.254.542,00            | 6.551.818.643,00            |
|     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 0,20         | 289.488.627.137,55          | 347.577.723.505,06          |
|     | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>0,09</b>  | <b>2.391.660.973.380,00</b> | <b>2.609.883.566.369,00</b> |
|     | a. Tranfer Pemerintah Pusat                       | 0,02         | <b>2.087.137.876.918,00</b> | <b>2.120.662.439.541</b>    |
|     | b. Transfer Antar-Daerah                          | 0,61         | 304.523.096.462,00          | 489.221.126.828,00          |
|     | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>0,04</b>  | 133.071.360.000,00          | 138.745.014.300,00          |
|     | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>0,09</b>  | <b>2.964.575.597.974,55</b> | <b>3.239.509.344.776,06</b> |
|     | <b>BELANJA DAERAH</b>                             | <b>-0,11</b> | <b>3.013.041.916.154,95</b> | <b>3.225.169.974.376,00</b> |
|     | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | 0,01         | <b>1.853.346.176.044,95</b> | <b>1.871.399.832.597,00</b> |
|     | a. Belanja Pegawai                                | -0,04        | 1.254.285.715.876,00        | 1.202.589.347.980,00        |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa                        | 0,06         | 567.090.560.168,95          | 601.470.484.617,00          |
|     | c. Belanja Bunga                                  |              | -                           | -                           |
|     | d. Belanja Subsidi                                |              | -                           | -                           |
|     | e. Belanja Hibah                                  | 0,07         | 28.854.900.000,00           | 30.840.000.000,00           |
|     | f. Belanja Bantuan Sosial                         | 10,72        | 3.115.000.000,00            | 36.500.000.000,00           |
|     | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>0,23</b>  | <b>643.663.697.855,00</b>   | <b>792.443.784.762,00</b>   |
|     | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    | 23.297.126.717,00           |
|     | <b>BELANJA TRANSFER</b>                           | <b>0,04</b>  | <b>516.032.042.255,00</b>   | <b>538.029.230.300,00</b>   |
|     | a. Belanja Bagi Hasil                             | -0,11        | <b>13.371.277.500,00</b>    | 11.868.502.000,00           |
|     | b. Belanja Bantuan Keuangan                       | 0,05         | <b>502.660.764.755,00</b>   | <b>526.160.728.300,00</b>   |
|     | <b>JUMLAH BELANJA</b>                             | <b>0,07</b>  | <b>3.013.041.916.154,95</b> | <b>3.225.169.974.376,00</b> |
|     | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                          |              | <b>(48.466.318.180,40)</b>  | <b>14.339.370.400,06</b>    |

Sumber : \* Lampiran Perda Kab. Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 APBD-P TA 2020

\*\* Lampiran Perda APBD Nomor 7 Tahun 2020 APBD TA 2021

\*\*\* Hasil Proyeksi Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.



Tabel 3.10  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Tahun 2021-2023

| URAIAN   | Tahun dan Jumlah (Rp)       |                             | Proyeksi dan Jumlah (Rp)    |      |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
|  | 2021                        | 2022                        | 2022                        | 2023 |
| 1  | 2                           | 3                           | 4                           |      |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>   | <b>3.534.737.944.331,00</b> | <b>3.675.272.738.311,00</b> | <b>3.888.761.490.500</b>    |      |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>  | <b>559.839.866.928,00</b>   | <b>584.701.710.037,00</b>   | <b>596.505.187.275,00</b>   |      |
| a. Hasil Pajak Daerah  | 174.495.203.000,00          | 181.898.683.689,00          | 186.111.427.000,00          |      |
| b. Hasil Retribusi Daerah  | 23.796.166.891,00           | 20.404.224.924,00           | 24.231.189.000,00           |      |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 9.136.037.632,00            | 15.453.312.799,00           | 15.212.195.850,00           |      |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 352.412.459.405,00          | 366.945.488.625,00          | 370.950.375.425,00          |      |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>   | <b>2.836.999.937.403,00</b> | <b>2.886.639.398.578,00</b> | <b>3.122.034.981.550</b>    |      |
| a. Transfer Pemerintah Pusat   | 2.150.865.195.000,00        | 2.186.781.961.326,00        | 2.371.650.750.350,00        |      |
| b. Transfer Antar-Daerah   | 686.134.742.403,00          | 699.857.437.252,00          | 750.384.231.200,00          |      |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                  | <b>157.898.140.000,00</b>   | <b>203.931.629.696,00</b>   | <b>170.221.321.675,00</b>   |      |
| a. Hibah   | 157.898.140.000,00          | 166.033.489.696,00          | 170.221.321.675,00          |      |
| b. Dana Darurat  | -                           | -                           | -                           |      |
| c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | -                           | 37.898.140.000,00           | -                           |      |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>3.554.737.944.331,00</b> | <b>3.675.272.738.311,00</b> | <b>3.888.761.490.500</b>    |      |
| <b>BELANJA DAERAH</b>  | <b>3.555.270.205.280,00</b> | <b>3.678.810.933.699,00</b> | <b>3.890.497.245.950,00</b> |      |



| URAIAN                                 | Tahun dan Jumlah (Rp)       |                             | Proyeksi dan Jumlah (Rp)    |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2021                        | 2022                        | 2022                        | 2023                        |
| 1                                      | 2                           | 3                           | 3                           | 4                           |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                 | <b>2.129.605.510.232,00</b> | <b>2.165.092.115.804,00</b> | <b>2.165.092.115.804,00</b> | <b>2.202.044.988.400,00</b> |
| a. Belanja Pegawai                     | 1.276.602.409.551,00        | 1.332.603.535.964,00        | 1.332.603.535.964,00        | 1.350.500.450.900,00        |
| b. Belanja Barang dan Jasa             | 811.008.994.181,00          | 783.543.048.840,00          | 783.543.048.840,00          | 800.444.212.500,00          |
| c. Belanja Bunga                       | -                           | -                           | -                           | -                           |
| d. Belanja Subsidi                     | -                           | -                           | -                           | -                           |
| e. Belanja Hibah                       | 32.805.106.500,00           | 40.365.531.000,00           | 40.365.531.000,00           | 41.100.325.000,00           |
| f. Belanja Bantuan Sosial              | 9.189.000.000,00            | 8.580.000.000,00            | 8.580.000.000,00            | 10.000.000.000,00           |
| <b>BELANJA MODAL</b>                   | <b>882.946.833.259,00</b>   | <b>957.238.867.773,00</b>   | <b>957.238.867.773,00</b>   | <b>1.115.639.096.600,00</b> |
| a. Belanja Tanah                       | 5.300.000.000,00            | 6.261.199.500,00            | 6.261.199.500,00            | 7.350.200.500,00            |
| b. Belanja Peralatan dan Mesin         | 203.969.751.652,00          | 200.642.371.954,00          | 200.642.371.954,00          | 240.100.245.350,00          |
| c. Belanja Gedung dan Bangunan         | 342.304.282.208,00          | 307.248.790.639,00          | 307.248.790.639,00          | 350.114.250.200,00          |
| d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi | 305.926.274.574,00          | 424.207.922.555,00          | 424.207.922.555,00          | 500.323.900.450,00          |
| f. Belanja Aset Tetap Lainnya          | 25.446.524.825,00           | 18.878.583.125,00           | 18.878.583.125,00           | 17.750.500.100,00           |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>           | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                | <b>532.717.861.789,00</b>   | <b>546.479.950.092,00</b>   | <b>546.479.950.092,00</b>   | <b>562.813.160.950,00</b>   |
| a. Belanja Bagi Hasil                  | 19.829.136.989,00           | 21.766.833.369,00           | 21.766.833.369,00           | 22.212.910.450,00           |
| b. Belanja Bantuan Keuangan            | 512.888.724.800,00          | 524.713.116.723,00          | 524.713.116.723,00          | 540.600.250.500,00          |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                  | <b>3.555.270.205.280,00</b> | <b>3.678.810.933.699,00</b> | <b>3.678.810.933.699,00</b> | <b>3.890.497.245.950,00</b> |
| <b>Total Surplus /(Defisit)</b>        | <b>(532.260.949)</b>        | <b>(3.538.195.388)</b>      | <b>(3.538.195.388)</b>      | <b>(1.735.755.450)</b>      |

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

### **3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, pada bagian ini dibahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran cicilan utang dalam rangka pinjaman daerah dan provinsi. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman daerah.
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah).
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

#### **a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)**

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan fluktuatif antar tahun. Sebagai tahun dasar perencanaan perubahan RPJMD, SiLPA tahun 2020 memiliki angka tertinggi dibandingkan 3 (tiga) tahun setelahnya. Tahun 2021 diproyeksikan SiLPA akan menurun signifikan dan kembali meningkat pada tahun 2022. Selain hal tersebut dalam perencanaan pembiayaan daerah dilakukan melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan kemampuan fiskal daerah. Dimana analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

#### **b. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah**

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang antara lain berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan; dan memburuknya sistem keuangan, yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka perekonomian nasional.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi



COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020. Untuk melaksanakan Program PEN Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah dan Penjaminan. Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah. Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN). Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penurunan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bencana luar biasa nonalam ini yaitu melakukan pinjaman PEN Daerah untuk menutupi penurunan pendapatan.

Tabel 3.11  
Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020

|    | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                        | <b>TAHUN 2019</b>         | <b>TAHUN 2020</b>         |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
|    | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>             | <b>178.345.291.137,15</b> | <b>104.581.310.809,75</b> |
| a. | SilPA   | 159.040.827.837,15        | 104.578.310.809,75        |
| b. | Pencairan dana Cadangan                         | -                         | -                         |
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -                         | -                         |
| d. | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi         | -                         | -                         |
| e. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah    | 19.299.465.800,00         | -                         |
| f. | Penerimaan Kembali Piutang                      | 4.997.500,00              | 3.000.000,00              |
|    | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>             | <b>178.345.291.137,15</b> | <b>104.581.310.809,75</b> |
|    | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>            |                           |                           |
| a. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | -                         | -                         |
| b. | Penyertaan Modal Daerah                         | 9.157.285.100,00          | 3.000.000.000,00          |
| c. | Pembentukan dana Cadangan                       | -                         | -                         |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah                       | -                         | -                         |



|  | PEMBIAYAAN DAERAH  | TAHUN 2019                | TAHUN 2020                |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
|  | e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan | -                         | -                         |
|  | f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Lembaga Keuangan Bank                                  | 19.299.465.800,00         | -                         |
|  | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>28.456.750.900,00</b>  | <b>3.000.000.000,00</b>   |
|  | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  | <b>149.888.540.237,15</b> | <b>101.581.310.809,75</b> |
|  | <b>Sisa lebih Anggaran tahun berkenan (SiLPA)</b>                                      | <b>101.422.222.056,75</b> | <b>115.920.681.209,81</b> |

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

Tabel 3.12  
Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023

| 6          | PEMBIAYAAN                                   | TAHUN 2021               | TAHUN 2022               | TAHUN 2023               |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                 | <b>36.693.260.949,00</b> | <b>30.238.195.358,00</b> | <b>40.690.210.500,00</b> |
| 6.1.01     | SiLPA  | 36.424.268.949,00        | 30.238.195.358,00        | 40.690.210.500,00        |
| 6.1.05     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 268.992.000,00           | 0,00                     | 0,00                     |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>          | <b>36.693.260.949,00</b> | <b>30.238.195.358,00</b> | <b>40.690.210.500,00</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                | <b>16.000.000.000,00</b> | <b>26.000.000.000,00</b> | <b>26.000.000.000,00</b> |
| 6.2.01     | Penyertaan Modal Daerah                      | 6.000.000.000,00         | 16.000.000.000,00        | 16.000.000.000,00        |
| 6.2.02     | Pembentukan Dana Cadangan                    | 10.000.000.000,00        | 10.000.000.000,00        | 10.000.000.000,00        |
|            | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>         | <b>16.000.000.000,00</b> | <b>26.000.000.000,00</b> | <b>26.000.000.000,00</b> |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                      | <b>532.260.949,00</b>    | <b>3.538.195.388</b>     | <b>1.735.755.450</b>     |

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

### 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

#### a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.13  
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  
Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

| Tahun            | SILPA (Rp)         |
|------------------|--------------------|
| 2019 (Realisasi) | 159.040.827.837,15 |
| 2020 (Realisasi) | 104.578.310.809,75 |
| 2021             | 36.424.268.949,00  |
| 2022             | 30.238.195.358,00  |
| 2023             | 40.690.210.500,00  |

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

#### b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan data realisasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 serta pada tahun 2020 menggunakan data APBD Tahun 2020. Berdasarkan data tersebut nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Lebih rinci mengenai proyeksi tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai 2023 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rincian komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.14  
Rincian Komponen Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023

| NO | URAIAN                                   | 2021 (Rp)          | %            | 2022 (Rp)          | %            | 2023 (Rp)              | %            |
|----|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| A  | <b>Belanja Mengikat</b>                  |                    |              |                    |              |                        |              |
|    | Belanja Pegawai Tanpa Disdik dan Dinkes) | 300.602.409.551,00 | 8,46         | 310.603.535.964,00 | 8,45         | 315.500.450.900,00     | 8,11         |
|    | Belanja Bunga                            | -                  |              | -                  |              | -                      |              |
|    |  |                    |              |                    |              |                        |              |
| B  | <b>Belanja wajib</b>                     |                    |              |                    |              |                        |              |
|    | Pendidikan                               | 902.210.571.713    | 25,38        | 1.001.509.451.402  | 27,26        | 1.088.509.451.402      | 27,99        |
|    | Kesehatan                                | 356.886.037.335    | <b>10,04</b> | 455.121.628.043    | <b>12,39</b> | <b>501.121.628.043</b> | <b>12,89</b> |



| NO | URAIAN  | 2021 (Rp)         | %     | 2022 (Rp)         | %     | 2023 (Rp)         | %     |
|----|---|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|    | Infrastruktur   | 358.469.805.972   | 10,08 | 389.075.862.711   | 10,59 | 400.075.862.711   | 10,29 |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM   | 9.642.171.591     | 0,27  | 11.658.256.475    | 0,32  | 12.658.256.475    | 0,33  |
|    | Penguatan APIP  | 11.818.108.083    | 0,33  | 12.554.728.472    | 0,34  | 12.754.728.472    | 0,33  |
|    |   |                   |       |                   |       |                   |       |
| C  | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>   |                   |       |                   |       |                   |       |
|    | Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh Tempo                                    | -                 |       | -                 |       | -                 |       |
|    | Penyertaan Modal Daerah   | 6.000.000.000,00  | 0,17  | 6.000.000.000,00  | 0,16  | 6.000.000.000,00  | 0,15  |
|    | Pembentukan dana cadangan   | 10.000.000.000,00 | 0,28  | 10.000.000.000,00 | 0,27  | 10.000.000.000,00 | 0,26  |
|    | Pemberian Pinjaman daerah   | -                 |       | -                 |       | -                 |       |
|    | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | -                 |       | -                 |       | -                 |       |
|    | <b>Total Belanja Wajib Mengikat</b>   | 1.955.629.104.245 | 55,01 | 2.196.523.463.067 | 59,78 | 2.346.620.378.003 | 60,34 |

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

### c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2018-2020 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dari Rp 3.365.699.092.312,75 pada realisasi tahun 2019 menjadi Rp 3.419.154.922.191,45 pada tahun 2020. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15.

## Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2020

| NO. | URAIAN   | 2019 (Rp)                   | 2020 (Rp)                   |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Pendapatan   | <b>2.964.575.597.974,55</b> | <b>3.239.509.344.776,06</b> |
| 2   | Penerimaan kembali Pemberian pinjaman Daerah                             | 19.249.465.800,00           | -                           |
| 3   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  | 159.040.827.837,15          | 104.578.310.809,75          |
| 4   | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 4.997.500,00                | 3.000.000,00                |
|     | <b>Total Penerimaan</b>  | <b>3.365.699.092.312,75</b> | <b>3.419.154.922.191,45</b> |
|     | Dikurangi  |                             |                             |
| 4   | Belanja Tidak Langsung   | 1.819.857.336.440,18        | 1.850.358.049.769,91        |
| 5   | Pengeluaran Pembiayaan   | 4.000.000.000,00            | 9.177.808.084,60            |
|     | <b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>                                 | <b>1.541.841.755.872,57</b> | <b>1.559.619.064.336,94</b> |

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka, 2020.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan : a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep Kapasitas Riil Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah. Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.16.

## Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023

| KODE   | URAIAN                  | 2021 (Rp)                   | 2022 (Rp)                   | 2023 (Rp)            |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5      | <b>BELANJA</b>          | <b>3.555.270.205.280,00</b> | <b>3.678.810.933.699,00</b> | 3.890.497.245.950,00 |
| 5.1    | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>2.129.605.510.232,00</b> | <b>2.165.092.115.804,00</b> | 2.202.044.988.400,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai         | 1.276.602.409.551,00        | 1.332.603.535.964,00        | 1.350.500.450.900,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 811.008.994.181,00          | 783.543.048.840,00          | 800.444.212.500,00   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah           | 32.805.106.500,00           | 40.365.531.000,00           | 41.100.325.000,00    |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial  | 9.189.000.000,00            | 8.580.000.000,00            | 10.000.000.000,00    |
|        |                         |                             |                             |                      |



| KODE   | URAIAN                              | 2021 (Rp)                   | 2022 (Rp)                   | 2023 (Rp)                   |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.2    | <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>882.946.833.259,00</b>   | <b>957.238.867.773,00</b>   | <b>1.115.639.096.600,00</b> |
| 5.2.01 | Belanja Tanah                       | 5.300.000.000,00            | 6.261.199.500,00            | 7.350.200.500,00            |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin         | 203.969.751.652,00          | 200.642.371.954,00          | 240.100.245.350,00          |
| 5.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan         | 342.304.282.208,00          | 307.248.790.639,00          | 350.114.250.200,00          |
| 5.2.04 | Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi | 305.926.274.574,00          | 424.207.922.555,00          | 500.323.900.450,00          |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 25.446.524.825,00           | 18.878.583.125,00           | 17.750.500.100,00           |
| 5.3    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>        | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga               | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           |
| 5.4    | <b>BELANJA TRANSFER</b>             | <b>532.717.861.789,00</b>   | <b>546.479.950.092,00</b>   | <b>562.813.160.950,00</b>   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                  | 19.829.136.989,00           | 21.766.833.369,00           | 22.212.910.450,00           |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan            | 512.888.724.800,00          | 524.713.116.723,00          | 540.600.250.500,00          |
|        | <b>JUMLAH BELANJA</b>               | <b>3.555.270.205.280,00</b> | <b>3.678.810.933.699,00</b> | <b>3.890.497.245.950,00</b> |
| 6.2    | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>       | <b>16.000.000.000,00</b>    | <b>26.000.000.000,00</b>    | <b>26.000.000.000,00</b>    |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah             | 6.000.000.000,00            | 16.000.000.000,00           | 16.000.000.000,00           |
|        | <b>TOTAL</b>                        | <b>3.571.270.205.280,00</b> | <b>3.704.810.933.699,00</b> | <b>3.916.497.245.950,00</b> |

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2021.

Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Kabupaten Majalengka yang positif atau surplus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal atau dengan kata lain adanya potensi surplus penerimaan daerah dimana memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah.

Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### **d. Kebijakan Alokasi Anggaran**

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 sampai dengan 2020, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk hal tersebut.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Realisasi dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.17.  
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2019–2020

| Uraian                            | 2019                        | 2020                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Kapasitas Keuangan Daerah:</b> | <b>1.541.841.755.872,57</b> | <b>1.559.619.064.336,94</b> |
| Prioritas I                       | 944.233.680.824,57          | 953.905.473.136,94          |
| Prioritas II                      | 499.351.225.000             | 500.458.698.700             |
| Prioritas III                     | 98.256.850.048              | 105.254.892.500             |

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga pernyataan prioritas masih sama dengan tahun 2019 dan 2020, tetapi pengertian/lingkup belanja wajib dan mengikat pada prioritas I dan belanja pada prioritas II dan III berbeda untuk Tahun 2021 sampai dengan 2023.

Alokasi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Majalengka untuk mendanai pembangunan Tahun 2021 sampai 2023, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.18.  
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021–2023

| Uraian                            | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Kapasitas Keuangan Daerah:</b> | <b>3.571.270.205.280</b> | <b>3.704.810.933.699</b> | <b>3.916.497.245.950</b> |
| Prioritas I                       | 1.955.629.104.245        | 2.196.523.463.067        | 2.346.620.378.003        |
| Prioritas II                      | 894.485.576.698          | 905.198.096.879          | 962.617.494.194          |
| Prioritas III                     | 701.155.524.337          | 603.089.373.753          | 607.259.373.753          |

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD, Tahun 2020.

# **BAB IV**



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Majalengka pada sebagaimana disajikan pada Bab 2, permasalahan pokok pembangunan adalah: (1) Masih rendahnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (2) Masih tingginya tingkat kemiskinan; (3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (4) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (5) Masih kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka di atas, dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu *aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah* sebagai berikut:

##### **4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

###### **1. Ketimpangan Pendapatan atau Gini Ratio**

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah menunjukkan trend yang sangat positif, ditandai dengan semakin mengecilnya indeks gini ratio. Tetapi sejak tahun 2019 ketika muncul wabah pandemi covid 19, ketimpangan pendapatan melebar Kembali. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Majalengka tetapi melanda seluruh wilayah di Indonesia bahkan diseluruh dunia.

###### **2. Masih tingginya tingkat kemiskinan**

Pada periode Tahun 2015 sampai 2019, Kabupaten Majalengka berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 14,19 persen menjadi 10,06 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Majalengka belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-



daerah lain di Indonesia. Keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Majalengka cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Majalengka pada tahun 2020 mencapai 11,43 persen. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 17,1 ribu jiwa dibandingkan keadaan tahun 2019.

Secara umum Kondisi kemiskinan kabupaten majalengka selama periode Tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah maupun persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2016 hingga 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka turun sebanyak 14.290 ribu orang dan persentase penduduk miskin turun sebesar 1,42 persen

Dampak pandemi covid 19 juga menyebabkan adanya *kemiskinan ekstrim*. jenis kemiskinan ini merupakan keadaan kemiskinan yang paling serius. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan paling dasar mereka. Data awal kemiskinan ekstrim tahun 2020 sebanyak 48.927 kepala keluarga (kk) dan setelah diverifikasi dan divalidasi menjadi sebesar 45.141 kk. Pengurangannya terjadi karena meninggal dunia sebanyak 2.277 kk, pindah kabuapten sebanyak 482 kk, dan yang masih tergolong mampu sebanyak 1.027 kk.

### **3. Harapan Lama Sekolah masih rendah**

Kualitas pendidikan di Kabupaten Majalengka ditandai antara lain dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan lama sekolah di Kabupaten Majalengka Selama periode 2016 hingga 2020 telah meningkat sebesar 0,33 tahun tapi masih di bawah Propinsi Jawa barat yaitu baru mencapai 12,22 pada tahun 2020 sementara Jawa Barat pada tahun yang sama mencapai 12,48. Artinya peluang anak-anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas di Kabupaten Majalengka untuk menamatkan pendidikan masih lebih rendah dibandingkan peluang rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang belum optimal dan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum representatif. Secara rata-rata penduduk Kabupaten Majalengka usia 25 tahun ke atas



telah bersekolah selama 7,31 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (atau setara SMP kelas 1).

Persentase Sekolah Dasar (SD) dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 adalah 30,96 sedangkan persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 adalah 37,73, rendahnya persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik untuk SD dan SMP ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Majalengka masih belum optimal dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sekolah baik SD dan SMP dan masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan rehabilitasi sekolah dengan kondisi rusak.

#### **4. Derajat Kesehatan masih rendah**

Derajat Kesehatan masyarakat berkorelasi dengan **angka harapan hidup**. Derajat Kesehatan akan sangat dipengaruhi oleh akses dan mutu layanan Kesehatan termasuk, sarana prasarana Kesehatan, kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tidak kalah penting juga kecepatan dan ketepatan penanganan gangguan Kesehatan. Kabupaten Majalengka juga dihadapkan pada masalah kesehatan yang lain, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Beberapa penyakit menular yang diwaspadai meningkat yaitu, Tuberkolusis (TB) dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Masalah kesehatan penyakit menular semakin diperburuk dengan adanya kemunculan COVID-19. Salah satu bentuk baru virus sejenis SARS yang mematikan. Penyebaran Virus ini sangat cepat dengan melalui droplet dari orang yang terinfeksi. Banyaknya orang yang terinfeksi menyebabkan banyak korban jiwa meninggal di berbagai kalangan usia. Pandemi ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Majalengka sangat fokus dalam penanganannya.

#### **5. Stunting**

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting memberikan hambatan perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan rendahnya produktifitas serta bersifat permanen sehingga dapat memberikan permasalahan pada bonus demografi yang dimiliki Majalengka. Berdasarkan analisis situasi dan kondisi, Kegiatan



Percepatan dan Penurunan Stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka beserta pemangku kepentingan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) di Kabupaten Majalengka ditemukan balita sangat pendek dan pendek (Stunting) Pada Tahun 2015 sebanyak 6,33% (5.875 balita stunting), pada tahun 2016 sebanyak 3,41% (3.292 balita stunting), sedangkan Tahun 2017 sebanyak 2,48% (2.295 balita stunting), pada tahun 2018 sebanyak 2,19% (1.958 balita stunting), sehingga dalam kurun waktu lima tahun terjadi penurunan angka stunting di tahun 2019 menjadi 5,27% (4.642 balita stunting). Namun pada tahun 2020 prevalensi stunting naik sebanyak 5,29% (4.382 balita stunting).

#### **6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;**

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka tahun 2020 67,59 point. Nilai capaian IPM tersebut masih dalam kategori sedang dan tergolong rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata IPM kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

#### **7. Masih kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik**

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka, kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perijinan dan profesionalisme aparaturnya walaupun dari tahun ketahun senantiasa ada perbaikan tetapi masih perlu peningkatan

#### **4.1.2 Aspek Pelayanan Umum**

##### **A. Urusan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Bidang Pendidikan**

Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Majalengka antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;



- 2) Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan karena masih rendahnya jumlah penduduk yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah;
- 3) Masih rendahnya lulusan peserta didik menyelesaikan pendidikannya atau melanjutkan pendidikannya pada jenjang berikutnya.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;
- 6) Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- 7) Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan;
- 8) Anggaran pendidikan belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan minimal 20% diluar gaji;

## **2. Bidang Kesehatan**

Permasalahan utama bidang kesehatan di Kabupaten Majalengka adalah:

- 1) Masih rendahnya kualitas kesehatan



- 2) penurunan rasio puskesmas/puskesmas keliling per satuan penduduk
- 3) Masih belum merata serta kurangnya tenaga medis dan tenaga non medis khususnya dokter spesialis
- 4) Masih rendahnya manajemen kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan kesehatan dasar
- 5) Rendahnya penanganan tingkat pelayanan kesehatan dasar khusus untuk penduduk miskin
- 6) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan ibu hamil sehingga rasio kematian Ibu menjadi tinggi
- 7) Tingginya Rasio Kematian Ibu
- 8) Tingginya Penderita penyakit menular dan tidak menular
- 9) Masih tingginya angka prevalensi stunting

### **3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan utama Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- 1) Kurangnya cakupan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas.
- 2) Masih adanya kondisi jalan kabupaten yang rusak berat;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air;
- 4) Masih banyak saluran irigasi yang mengalami kerusakan;
- 5) Belum ditetapkannya sebagian wilayah kecamatan dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) dan peraturan zonasi;
- 6) Inkonsistensi antara perencanaan pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 7) Belum ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Dilindungi pada kebijakan tata ruang;
- 8) Rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah dan lingkungannya yang representative/ laik fungsi; dan
- 9) Rendahnya ketaatan pada Peraturan Pangunan Gedung.

### **4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan utama Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:



- 1) Rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan;
- 2) Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni;
- 3) Kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan;
- 4) Masih banyaknya rumah korban bencana yang belum tertangani.

## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan utama Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- 1) Masih tingginya angka kriminalitas dan jumlah demo yang terjadi di masyarakat;
- 2) Masih perlunya peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM aparat yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat;
- 3) Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.
- 4) Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran;
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran; dan
- 6) Masih belum adanya peraturan Daerah yang komprehensif yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP dalam upaya penegakan Perda dan atau Perkada.

## **6. Bidang Sosial**

Permasalahan utama Bidang Sosial adalah:

- 1) Masih tingginya penyandang PPKS;
- 2) Kurang validnya data kemiskinan di tingkat kabupaten.

## **B. Urusan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Bidang Ketenagakerjaan**

Permasalahan utama Bidang Ketenagakerjaan adalah:

- 1) Masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja;
- 2) Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja;
- 3) Belum terpetakannya ketenagakerjaan;



- 4) Masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- 1) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat;
- 2) Belum tuntasnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **3. Pangan**

Permasalahan utama bidang pangan adalah:

- 1) Kebutuhan Pangan akibat penambahan penduduk;
- 2) Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- 3) Rendahnya pola keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- 4) Masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan; dan
- 5) Masih besarnya fluktuasi harga pangan pokok.

## **4. Bidang Pertanahan**

Permasalahan utama bidang pertanahan adalah:

- 1) Tidak tersedianya lahan milik pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan infrastruktur

## **5. Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama bidang lingkungan hidup adalah:

- 1) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
- 2) Rusaknya perlindungan terhadap sumber air baku
- 3) Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan;
- 4) Masih rendahnya infrastruktur Pengelolaan sampah yang memadai;
- 5) Kurang optimalnya pengelolaan sampah perkotaan dan perdesaan

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:



- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan begitu peristiwa kependudukan terjadi;
- 2) Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 3) Masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian; dan
- 4) Pemanfaatan data kependudukan belum terimplementasikan denganmaksimal.

#### **7. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan utama urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah

- 1) Daya saing masyarakat desa yang masih rendah;
- 2) Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi di wilayah desa, baik di bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan lainnya;
- 3) Program pemberdayaan masyarakat desa yang belum tepat guna dan tepat sasaran; dan
- 4) Masih rendahnya nilai swadaya masyarakat.

#### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- 1) Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Tingginya TFR (*Total Fertility Rate*) atau angka rata-rata seorang ibu memiliki anak; dan
- 3) Tingginya pernikahan usia dini dan jumlah perempuan subur.

#### **9. Bidang Perhubungan**

Permasalahan utama urusan perhubungan adalah:

- 1) Kurang optimalnya pengembangan dan kualitas pelayanan jaringan trayek;
- 2) Kurang optimalnya fungsi terminal;
- 3) Masih kurangnya fasilitas keselamatan transportasi darat atau Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- 4) Masih rendahnya uji kelaikan kendaraan bermotor bagi masyarakat.

#### **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama urusan komunikasi dan informatika adalah:

- 1) Minimnya infrastruktur persandian



- 2) Masih rendahnya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK oleh masyarakat;
- 3) Belum meratanya kualitas layanan komunikasi dan informatika di pedesaan.

### **11. Bidang Koperasi dan UMKM**

Permasalahan utama urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

- 1) Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif;
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM dan manajemen keuangan koperasi;
- 3) Rendahnya sistem pengendalian internal koperasi dan kurang optimalnya pengawasan internal koperasi;
- 4) Minimnya diversifikasi usaha koperasi, sebagian besar usaha koperasi adalah simpan pinjam;
- 5) Rendahnya minat masyarakat untuk berkoperasi dan rendahnya keberlangsungan pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro;
- 6) Rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro menghadapi persaingan global;
- 7) Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara pengusaha mikro dan pengusaha besar.

### **12. Penanaman Modal**

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah:

- 1) Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang mudah, cepat dan transparan;
- 2) Kurang optimalnya pengembangan dan penanganan permasalahan di bidang penanaman modal dan perijinan;
- 3) Kurangnya kepastian hukum dalam pengembangan investasi;
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi dan pelayanan perijinan;
- 5) Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi.

### **13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

- 1) Kuantitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia belum memadai;
- 2) Sarana dan Prasarana operasional belum memenuhi kebutuhan;



- 3) Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan belum sinergis, olahraga belum mencapai prestasi dan kemandirian pemuda.

#### **14. Statistik**

Permasalahan utama urusan statistik adalah:

- 1) Masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbeda-beda pada masing-masing OPD dan BPS;
- 2) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

#### **15. Kebudayaan**

Permasalahan utama urusan kebudayaan adalah:

- 1) Masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- 2) Kurang terpromosikannya budaya lokal;
- 3) Belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif;
- 4) Kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
- 5) Kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah.
- 6) Belum adanya penetapan cagar budaya
- 7) Kurangnya pembinaan seni budaya lokal
- 8) Pelestarian sejarah dan warisan budaya belum optimal

#### **16. Perpustakaan**

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah:

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan, terutama perpustakaan desa;
- 2) Masih kurangnya sumber daya pengelola perpustakaan;
- 3) Masih rendahnya manajemen perpustakaan yang profesional;
- 4) Masih rendahnya minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
- 5) Kurang lengkapnya referensi sumber bacaan dan kepustakaan;
- 6) Belum dilibatkannya perpustakaan daerah dalam aktivitas pengembangan penelitian (*research*).



## **17. Kearsipan**

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah:

- 1) Masih rendahnya manajemen kearsipan daerah;
- 2) Masih minimnya sumber daya pengelola arsip pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 3) Masih kurangnya pembinaan penatakelolaan kearsipan pada setiap OPD dan Kecamatan;
- 4) Belum terwujudnya pelayanan kearsipan dan perpustakaan yang inovatif dan kreatif; dan
- 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

### **4.1.3 Urusan Pilihan**

#### **1. Bidang Pertanian**

Permasalahan utama pembangunan bidang pertanian pada umumnya adalah:

- 1) Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya pertanian (lahan dan sumberdaya manusia/tenaga kerja);
- 2) Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi usaha tani) dan teknologinya masih bersifat konvensional sehingga produksi belum optimal;
- 3) Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan;
- 4) Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan melemahkan daya saing;
- 5) Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;
- 6) Masih kurang sinerginya pembangunan pertanian dari sektor hulu ke hilir;
- 7) Fluktuasi iklim yang tidak bisa diprediksi; dan
- 8) Fluktuasi harga akibat produk pertanian yang *perishable*

#### **2. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan utama urusan perikanan adalah:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam budidaya perikanan;



- 2) Masih rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen perikanan;
- 3) Masih kurangnya akses petani terhadap permodalan;
- 4) Sistem budidaya ikan masih tradisional;
- 5) Kurang berfungsinya kelembagaan yang bergerak di sektor perikanan;
- 6) Belum adanya pengelolaan perikanan yang terintegrasi antara sektor hulu dan hilir.

### **3. Bidang Kehutanan**

Permasalahan pembangunan kehutanan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk urusan bidang Kehutanan telah terjadi pengalihan kewenangan dari kabupaten ke Provinsi dan Pusat. Untuk pengelolaan hutan raya masih diserahkan ke kabupaten/Kota namun untuk Kabupaten Majalengka saat ini tidak melakukan pengelolaan TAHURA.

### **4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalah utama dalam bidang energi dan sumber daya mineral adalah berkaitan dengan penerbitan izin pemanfaatan panas bumi. Untuk permasalahan lainnya telah dilakukan pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke provinsi dan pusat sebagaimana lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **5. Bidang Pariwisata**

Permasalahan utama di bidang pariwisata adalah:

- 1) Belum dimilikinya legalitas kebijakan pembangunan kepariwisataan;
- 2) Sarana dan fasilitas destinasi yang belum maksimal (lahan parkir, kebersihan, jalan menuju lokasi wisata)
- 3) Investasi pariwisata belum optimal
- 4) Standarisasi dan sertifikasi SDM dan usaha pariwisata yg belum maksimal
- 5) Kemitraan antara pengelola usaha pariwisata yang belum optimal;
- 6) Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi;
- 7) Belum adanya branding , citra pariwisata dan analisa pasar yang maksimal untuk pariwisata majalengka



- 8) Tata kelola daerah tujuan wisata yang belum optimal;
- 9) Kurangnya kerjasama pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian sejarah dan warisan budaya yang belum optimal.
- 10) Belum adanya forum-forum atau komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif pada beberapa daerah tujuan wisata dan daerah yg memiliki potensi ekonomi kreatif

## **6. Bidang Perdagangan**

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah:

- 1) Masih kurang memadainya sarana prasarana perdangan;
- 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait tera dan tera ulang sebagai perlindungan terhadap konsumen;
- 3) Belum optimalnya pengendalian pemenuhan kebutuhan barang pokok dan penting bagi masyarakat;
- 4) Promosi produk local masih kurang; dan
- 5) Masih rendahnya kualitas SDM baik pelaku maupun petugas pada sektor perdangan.

## **7. Bidang Perindustrian**

Permasalahan utama bidang perindustrian adalah:

- 1) Belum tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
- 2) Belum tersedianya kawasan industri;
- 3) Pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah;
- 4) Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan
- 5) Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

## **8. Transmigrasi**

Permasalahan utama urusan transmigrasi adalah:

- 1) Kurangnya motivasi dan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi;
- 2) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana yang menunjang keberhasilan program transmigrasi.



#### **4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **1. Bidang Perencanaan**

Permasalahan bidang perencanaan meliputi:

- 1) Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah belum optimal;
- 2) Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan; dan
- 4) Belum optimalnya koordinasi perencanaan antar perangkat daerah.

##### **2. Bidang Keuangan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Kapasitas fiskal Kabupaten Majalengka masih rendah dari APBD, sehingga besaran anggaran belanja publik masih kecil;
- 2) Metode penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 3) Belum adanya dokumen peta potensi pendapatan asli daerah sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.

##### **3. Bidang Kepegawaian**

Beberapa permasalahan terkait isu-isu kepegawaian di lingkungan Kabupaten Majalengka, sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat masih belum mampu mengisi kekurangan pegawai;
- 2) Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai;



- 3) Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang ASN. Selain itu, ditemui juga kondisi belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN; dan
- 4) Belum semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.

#### **4. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

- 1) Belum optimalnya jumlah rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan;
- 2) Belum optimalnya jumlah hasil kelitbangan yang diterapkan;
- 3) Belum optimalnya jumlah Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa); dan
- 4) Terbatasnya sumberdaya aparatur kelitbangan dalam mendukung penelitian dan pengembangan di daerah.

#### **5. Fungsi Lainnya**

Permasalahan dalam fungsi lain penunjang urusan pemerintahan daerah, antara lain:

- 1) Masuknya perilaku sosial dan budaya asing yang negatif yang mengaburkan nilai budaya lokal dan kearifan lokal;
- 2) Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat;
- 3) Tingkat kesadaran masyarakat dalam Pemanfaatan sarana keagamaan belum optimal. Serta masih terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama;
- 4) Rentang kendali dan pelayanan publik belum optimal;
- 5) Belum optimalnya pengendalian intern pemerintahan;
- 6) Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Majalengka;



- 7) Terdapat potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan;
- 8) Adanya potensi berkurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- 9) Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba; dan
- 10) Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan

#### **4.1.5. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah menggunakan parameter ekonomi, fasilitas wilayah dan infrastruktur, serta iklim investasi yang kondusif dan permasalahannya dikabupaten Majalengka antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi terjadi pelambatan karena munculnya wabah pandemi covid 19
2. Belum optimalnya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya : infrastruktur jalan, irigasi, dan kebijakan tata ruang;
3. Belum optimalnya Pertumbuhan investasi daerah
4. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perijinan dan profesionalisme aparaturnya walaupun dari tahun ketahun senantiasa ada perbaikan tetapi masih perlu peningkatan

#### **4.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena aktual atau hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara berkala. Karakteristik isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan



lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan di atas, maka dapat teridentifikasi sejumlah isu strategis terkait perencanaan pembangunan tahun 2018-2023. Isu-isu strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1. Isu Strategis Internasional**

##### **4.2.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Dalam isu-isu strategis internasional adalah berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;



2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



#### **4.2.1.2. Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA**

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020.

Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan di antara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif.

Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi.



Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kabupaten Majalengka khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kabupaten Majalengka hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

#### **4.2.2. Isu Strategis Nasional**

##### **4.2.2.1. Pandemi Covid-19**

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 11 November 2020, tercatat sebanyak 448.118 terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari data tersebut terdapat 54.300 kasus aktif. Jumlah yang sembuh adalah 378.982 orang dan meninggal sebanyak 14.836 orang yang tersebar di 34 provinsi (sumber:www.COVID19.go.id).

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

#### **4.2.2.2. Isu Strategis berdasarkan RPJMN 2020-2024**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:



- a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
  - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
  - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
  - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
- a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
  - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
  - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
  - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
  - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
- a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
  - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
  - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
  - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
  - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
- a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
  - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
  - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
  - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
  - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
  - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
  - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;



- b) Infrastruktur Ekonomi;
  - c) Infrastruktur Perkotaan;
  - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
  - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
  - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:
- a) Konsolidasi Demokrasi;
  - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
  - c) Penegakan Hukum Nasional;
  - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
  - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Gambar 4.1  
Misi dan Arahan Presiden



Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (*major project*). Adapun *major project* yang belokasi di Provinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut:



Tabel 4.1  
Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Jawa Barat dalam  
RPJMN Tahun 2020-2024

| No | Nama Proyek Prioritas Strategis  | Manfaat  | Lokasi  | Indikasi Pendanaan  | Pelaksana   |
|----|--|--|---|---|---|
| 1  | Pembangunan <i>Science Techno Park</i> (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi</li> <li>Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul triple-helix dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial</li> <li>Peningkatan produk inovasi nasional</li> </ol>   | 2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB; dan DIY: UGM) | Rp 0,8 Triliun (APBN)   | Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian, Swasta |
| 2  | Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri.</li> <li>Peningkatan kualitas air menjadi kelas II.</li> <li>Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha.</li> <li>Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara</li> </ol> |   | Rp 30,9 Triliun (APBN)  | KemenPUPR dan Pemerintah Daerah   |
| 3  | KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)  | <p>Berkurangnya waktu tempuh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam</li> <li>Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit</li> </ul>   |   | <p>Rp 63,6 Triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APBN: 21,6</li> <li>KPBU: 42,0</li> </ul> | a.1 Kemenhub, KemenPUPR, BPPT Badan Usaha (BUMN/ Swasta)  |
| 4  | Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar | Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan   |   | Rp 118,8 Triliun (APBN, APBD, Badan Usaha)  | a.1 Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)  |

Sumber: RPJMN 2020-2024

Tabel 4.2  
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024

| No                  | Kabupaten/Kota  | No                 | Kabupaten/Kota    |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Koridor Pertumbuhan |                 | Koridor Pemerataan |                   |
| 1                   | Kota Depok      | 1                  | Kabupaten Bandung |
| 2                   | Kabupaten Bogor | 2                  | Kabupaten Garut   |



| No | Kabupaten/Kota          | No | Kabupaten/Kota        |
|----|-------------------------|----|-----------------------|
| 3  | Kota Bogor              | 3  | Kabupaten Tasikmalaya |
| 4  | Kota Bekasi             | 4  | Kota Tasikmalaya      |
| 5  | Kabupaten Bekasi        | 5  | Kabupaten Ciamis      |
| 6  | Kabupaten Karawang      | 6  | Kota Banjar           |
| 7  | Kabupaten Purwakarta    | 7  | Kabupaten Kuningan    |
| 8  | Kabupaten Bandung Barat | 8  | Kabupaten Sukabumi    |
| 9  | Kota Cimahi             | 9  | Kota Sukabumi*        |
| 10 | Kota Bandung            | 10 | Kabupaten Pangandaran |
| 11 | Kabupaten Sumedang      |    |                       |
| 12 | Kabupaten Majalengka    |    |                       |
| 13 | Kabupaten Cirebon       |    |                       |
| 14 | Kota Cirebon*           |    |                       |

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024.

Agenda pembangunan atau yang di perencanaan tahunan (RKP) menjadi dengan prioritas nasional (PN) dilaksanakan dengan dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap PN. Di sisi lain, Pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Mepedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Berikut ini diuraikan hasil persandingan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodeisasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Kabupaten Majalengka sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:



1. Sasaran nasional 1: Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Meningkatnya kunjungan wisata dan Meningkatnya Investasi sektor Industri serta Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa;
2. Sasaran nasional 2: Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian, didukung oleh 3 (tiga) sasaran Kabupaten Majalengka yaitu Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Meningkatnya Investasi sektor Industri dan Meningkatnya kesejahteraan petani;
3. Sasaran nasional 3: Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
4. Sasaran nasional 4: Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan, memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Sasaran nasional 5: Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka: Pengurangan Tingkat Kemiskinan;
6. Sasaran nasional 6: Terpenuhinya layanan dasar, memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka: Meningkatnya Mutu pendidikan dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
7. Sasaran nasional 7: Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
8. Sasaran nasional 8: Terwujudnya pengentasan kemiskinan, memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran RPJMD Kabupaten



- Majalengka yaitu: Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya kesejahteraan petani;
9. Sasaran nasional 9: Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka: Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa;
  10. Sasaran nasional 10: Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka: Meningkatnya Mutu pendidikan;
  11. Sasaran nasional 11: Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka: Meningkatnya Mutu pendidikan;
  12. Sasaran nasional 12: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Jawa Barat yakni Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
  13. Sasaran nasional 13: Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yakni Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
  14. Sasaran nasional 14: Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
  15. Sasaran nasional 15: Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yakni Meningkatnya Mutu pendidikan;
  16. Sasaran nasional 16: Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yaitu: Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
  17. Sasaran nasional 17: Meningkatnya konektivitas wilayah, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka: Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;



18. Sasaran nasional 18: Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan, didukung oleh 2 (dua) sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka: Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
19. Sasaran nasional 19: Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien, didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka yakni Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
20. Sasaran nasional 20: Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi, memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka: Terwujudnya akuntabilitas kinerja, Terwujudnya akuntabilitas keuangan, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN;
21. Sasaran nasional 21: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
22. Sasaran nasional 22: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
23. Sasaran nasional 23: Pembangunan Rendah Karbon, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
24. Sasaran nasional 24: Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat.

Selain menelaah keterkaitan sasaran, pada bagian ini dilakukan penelaahan juga terhadap prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan.



#### **4.2.2.3. Isu Strategis Nasional Berkaitan Dengan Pengarusutamaan Gender**

Pembahasan mengenai pengarusutamaan gender, hal ini sebagaimana instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan didukung oleh Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Maka dalam penjelasan ini akan diuraikan secara runut mengenai pengarusutamaan gender dalam mendukung pola pembangunan dan rencana pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Dalam level nasional, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9, Tahun 2000 (Inpres No. 9/2000) telah mendefinisikan pengarusutamaan gender, yang diterjemahkan menjadi pengarusutamaan gender atau disingkat PUG, sebagai berikut: “Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional” (Inpres No. 29, Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional).

Berdasarkan Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang PUG, disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD, dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam hal ini menjadi sangat penting dalam mendukung pola pembangunan di daerah.

#### **4.2.2.4. Isu Strategis Nasional Berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)**

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi



kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Adapun mengenai ruang lingkup HAM meliputi:

1. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

#### **A. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia**

Kepres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Merupakan upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada 6 (enam) Program Utama RANHAM 2004–2009:

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM,
2. Persiapan ratifikasi instrumen HAM Internasional,
3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia,
5. Penerapan norma dan standar HAM, dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Aksi HAM tahun 2018-2019 sebagaimana perpres No. 33 tahun 2018 sebagaimana perubahan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang RANHAM tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan institusi pelaksana RANHAM,
2. Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrument internasional HAM,



3. Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM,
4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM,
5. Penerapan norma dan standar HAM,
6. Pelayanan dan komunikasi masyarakat.

#### **4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat**

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maka berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia,
2. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan,
3. Tata ruang,
4. Konektivitas wilayah dan penataan daerah,
5. Produktivitas dan daya saing ekonomi,
6. Tata kelola pemerintahan,
7. Inovasi dan kolaborasi.



#### **4.2.4. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar**

Dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Majalengka tentunya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari kabupaten/kota sekitar, terutama dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung Kabupaten Majalengka.

##### **4.2.4.1 Kabupaten Tasikmalaya**

Visi, misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Visi : “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah dan berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dibidang agribisnis dan pariwisata;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
3. Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar;
4. Ketahanan Pangan;
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;
7. Penataan destinasi wisata;
8. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak.



#### **4.2.4.2 Kabupaten Ciamis**

Visi misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Visi: “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam;
8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan;
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

#### **4.2.4.3 Kabupaten Sumedang**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali



dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2019-2023 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”**

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Isu Strategis pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
2. Peningkatan kualitas Pembangunan Pendidikan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik
4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja



#### **4.2.4.4 Kabupaten Cirebon**

Setiap Kepala Daerah memiliki orientasi untuk melakukan perubahan, dan itu tercermin dari visi dan misi yang pernah ditawarkan pada saat pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon tersebut merupakan janji politik Kepala Daerah terpilih yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Visi dan Misi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai visi daerah. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon adalah:

### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

#### **1. BERBUDAYA**

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

#### **2. SEJAHTERA**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

#### **3. AGAMIS**

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

#### **4. MAJU**

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.



## **5. AMAN**

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Isu Stategis pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2023 adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Pengangguran dan Kemiskinan
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
6. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

### **4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Majalengka**

#### **4.2.5.1 Penelaahan RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031.**

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan



6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka perlu dirubah menurut Hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 mengingat pengembangan Bandara BIJB yang terdapat di Kecamatan Kertajati sebagai pintu gerbang internasional. Selain itu beberapa hal penting yang terkait dengan fungsi, kedudukan dan peran Kabupaten Majalengka yang mempengaruhi tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Tujuan ini didasari pertimbangan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah, isu strategis, dan kondisi objektif yang diinginkan Kabupaten Majalengka 20 tahun ke depan.
2. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten: RPJP Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 memuat visi: “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa”.
3. Karakteristik wilayah: Kabupaten Majalengka memiliki potensi industri, pertanian dan pariwisata jika dikembangkan memiliki berdaya saing
4. Isu strategis dan kondisi objektif: pengembangan Bandara BIJB sebagai bandara internasional adalah sebuah kekuatan untuk menjadi pintu gerbang internasional bagi Jawa Barat. Pengembangan Jalan bebas hambatan Cisumdawu dan Cipali serta Jalur KA Cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon menjadikan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu pusat logistik.

Dengan demikian, penataan dalam Perda No. 11 Tahun 2012 yakni “mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan” dirubah menjadi:

**“Mewujudkan Kabupaten Majalengka sebagai Pintu Gerbang Internasional yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**

Pernyataan tersebut di atas memiliki makna:

1. Pintu Gerbang Internasional: dimaknai bahwa Kabupaten Majalengka berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;



2. Produktif: dimaknai bahwa dengan telah adanya rasa aman dan nyaman, diharapkan aktivitas ekonomi akan berjalan, sehingga produktivitas meningkat;
3. Berdaya Saing: dimaksudkan bahwa penataan ruang memberikan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah;
4. Berkelanjutan: hal tersebut dimaknai bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Perwujudan tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dalam rangka mencapai sasaran:

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri;
2. Tersedianya ruang investasi dan logistik melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
3. Kawasan Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
4. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang; dan
5. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 30% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Pada saat perubahan RPJMD ini disusun, sedang dilakukan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Penelaahan tata ruang yang dilakukan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini telah mengadaptasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Lebih rinci mengenai struktur dan pola ruang serta arah kebijakan pemanfaatan ruang disajikan pada Bab VI Perubahan RPJMD ini.



#### **4.2.5.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025**

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan komitmen yang berkembang di masyarakat, maka Kabupaten Majalengka menetapkan visi Pembangunan Daerah 2005-2025 yaitu:

**“KABUPATEN MAJALENGKA MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA“**

##### **MAJU**

Dalam visi ini, maju mengandung makna: Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang lebih baik dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mempunyai nilai kompetitif.

##### **SEJAHTERA**

Dalam visi ini, sejahtera mempunyai makna: Suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta diikuti peningkatan pendidikan, kesehatan, daya beli dan rasa aman masyarakat.

##### **IMAN DAN TAQWA**

Dalam Visi ini, iman dan taqwa mempunyai makna Sebagai nilai filosofi dan landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya dalam rangka pembangunan masyarakat yang berkualitas, yaitu bermoral, berbudaya, dan produktif serta mampu bekerjasama.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).**

Membangun manusia berkualitas, berproduktifitas, berdaya saing, melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat, cerdas, berkehidupan layak,



mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa dengan memiliki derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan daya beli yang tinggi disertai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.**

Perekonomian yang stabil adalah perekonomian yang dapat bertahan dari pengaruh perekonomian eksternal (global, nasional dan regional) dengan terciptanya keterkaitan dan saling mendukung antar sub sektor secara seimbang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang seimbang antara penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan investasi. Kekuatan utama perekonomian daerah berada pada sektor agribisnis didukung oleh sektor ekonomi lainnya berbasis ekonomi kerakyatan yang memiliki 2 (dua) dimensi yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta faktor produksi dan asset produktif dimiliki dan dikelola oleh sebagian besar Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah terutama sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, budi daya, pengolahan, pemasaran dan subsistem jasa penunjang dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, mempromosikan perdagangan dan investasi, mengembangkan pariwisata, kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

**3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.**

Terwujudnya suatu infrastruktur yang mantap di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka disertai adanya peningkatan dan pengembangan beberapa infrastruktur pada wilayah strategis untuk mendukung peningkatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.



Tujuan misi ini adalah untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

#### **4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**

Pencapaian kondisi pemerintahan dapat terselenggara secara seimbang berdasarkan prinsip-prinsip good governance dengan kerjasama semua komponen pelaku pembangunan, melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergis. Tujuan misi ini adalah untuk mewujudkan sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan budidaya. Tujuan misi ini adalah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan.

#### **4.2.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Majalengka, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.



Lebih lanjut, KLHS Perubahan RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD. Mengingat pentingnya KLHS Perubahan RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun 2018-2023 juga diperkaya dengan hasil KLHS RPJMD. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi KLHS menjadi bagian dalam bab-bab RPJMD. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah.

Dalam Uji Publik 2 (dua) rancangan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, disepakati bahwa KLHS RPJMD akan fokus pada 4 (empat) isu prioritas, yaitu 4 (empat) isu dengan peringkat hasil polling teratas:

1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan
2. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak;
3. TPB 2: Tanpa Kelaparan;
4. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan
5. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Berdasarkan ketercapaian target eksisting dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), terdapat beberapa skenario yang berkaitan dengan upaya tambahan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) isu strategis hasil KLHS.

1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Terdapat 1 (satu) *outcome* yang diharapkan berkaitan dengan masalah kemiskinan untuk TPB-1 dalam Isu Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menurunnya angka kemiskinan. Dalam mencapai *outcome* tersebut diperlukan peranan beberapa pihak yang bersangkutan seperti: Dinas KP3, Dinas PKPP, Dinas DP3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kecamatan. Beberapa arahan program yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3  
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 1  
Tentang Tanpa Kemiskinan

| Outcomes                       | Para Pihak  | Arahan Kebijakan                    | Arahan Program  |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| a. Menurunnya angka kemiskinan | a. Dinas KP3<br>b. Dinas K2UKM<br>c. Dinsos<br>d. Dinas Kesehatan<br>e. Disdik<br>f. DP3AKB<br>g. DPKPP<br>h. Kecamatan<br>i. LSM Bidang Sosial | Mengurangi Kesenjangan Antar Sektor | Program rehabilitasi sosial.  |
|                                |   |                                     | Program perlindungan dan jaminan sosial                                 |
|                                |   |                                     | Program pemberdayaan sosial fakir miskin                                |
|                                |   |                                     | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja                  |
|                                |   |                                     | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm) |
|                                |   |                                     | Program kawasan permukiman  |
|                                |   |                                     | Program peningkatan kualitas keluarga                                   |
|                                |   |                                     | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    |
|                                |   |                                     | Program pengelolaan pendidika   |
|                                |   |                                     | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                        |
|                                |   |                                     | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik               |

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

## 2. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Berkaitan dengan kondisi terkait air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Majalengka tersebut, serta merujuk pada hasil analisis GAP, terdapat 3 (tiga) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 6, yaitu: pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau, pemerataan akses terhadap sanitasi dan fasilitas kebersihan yang layak, serta peningkatan kuantitas dan kualitas air serta efisiensi dalam pemanfaatannya. Dalam upaya pencapaian ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan peran berbagai pihak serta arahan kebijakan dan arahan program.



Tabel 4.4  
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 6 Tentang  
Air Bersih dan Sanitasi Layak

| Outcomes   | Para Pihak   | Arahan Kebijakan   | Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)                 |
|--|--|--|--|
| 1. Pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau   | a. Dinas PKPP<br>b. Dinas Kesehatan<br>c. Dinas PUTR<br>d. Dinas Perdagin<br>e. Dinas PMD<br>f. PDAM<br>g. Kecamatan dan masyarakat<br>h. LSM  | Pengembangan infrastruktur untuk penyediaan air minum, terutama di kawasan permukiman.             | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|  |  | Perencanaan, koordinasi, dan evaluasi antar badan usaha dan institusi dalam pengelolaan air minum. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)   |
|  |  |  | Program Perekonomian dan Pembangunan                             |
|  |  |  | Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan                |
|  |  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat               |  |
| Penyediaan fasilitas dan SDM untuk uji laboratorium kualitas air minum sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen  |  |  |
| 2. Pemerataan akses terhadap sanitasi layak dan peningka-tan PHBS  | a. Dinas Kesehatan<br>b. Dinas Pendidikan<br>c. Dinas PKPP<br>d. Dinas PUTR<br>e. Dinas Sosial<br>f. Dinas Lingkungan Hidup<br>g. Dinas Kominfo<br>h. Dinas PMD<br>i. Kecamatan dan masyarakat<br>j. LSM<br>k. Industri penyedia sarana prasarana/ teknologi sanitasi & pengelolaan limbah<br>l. Mitra pembangunan | Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat.                               | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                 |
|  |  |  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)   |
|  |  |  | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                     |
|  |  | Pengembangan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga.           | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           |
|  |  |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|  |  |  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)   |
| Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi antar badan usaha dan   | Program Perekonomian dan Pembangunan   |  |  |



| Outcomes   | Para Pihak   | Arahan Kebijakan   | Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)   |
|--|--|--|--|
|  |  | institusi dalam pengelolaan air limbah dan sanitasi.   |  |
| 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas air serta efisiensi dalam pemanfaatannya | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas PUTR</li> <li>b. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>c. Dinas PKPP</li> <li>d. Dinas DKP3</li> <li>e. Dinas Perdagangan</li> <li>f. Dinas PMD</li> <li>g. Kecamatan, Desa dan masyarakat</li> <li>i. Pelaku usaha</li> <li>j. LSM</li> <li>k. Mitra pembangunan</li> </ul> | Peningkatan daya dukung penyediaan air dengan meningkatkan ketersediaan air dan mengefisiensikan pemanfaatannya. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  |
|  |  |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum   |
|  |  |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase   |
|  |  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  |
|  |  |  | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  |
|  |  |  | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH |
|  |  |  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   |
|  |  |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah   |
|  |  | Pengelolaan dan pengendalian pencemar air dari sumbernya.  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase   |
|  |  |  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  |
|  |  |  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)       |
|  |  |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  |
|  |  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   |



| Outcomes | Para Pihak | Arahan Kebijakan   | Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)  |
|----------|------------|--|---|
|          |            | Perencanaan dan pengembangan teknologi untuk upaya menjaga kualitas dan kuantitas air. | Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |

Sumber: Tim Penyusun KLHS Perubahan RPJMD

### 3. TPB 2: Tanpa Kelaparan

Terdapat 2 (dua) *outcome* yang diharapkan berkaitan dengan masalah pangan untuk TPB-2 dalam Isu Pembangunan Berkelanjutan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Dalam mencapai 2 (dua) *outcome* tersebut diperlukan peranan beberapa pihak yang bersangkutan. Pada *outcome* pertama diperlukan peranan dari para pihak: Dinas KP3, Dinas PUTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara itu, pada *outcome* kedua diperlukan peranan dari para pihak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Beberapa arahan program yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.5  
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 2  
tentang Tanpa Kelaparan

| Outcomes                             | Para Pihak  | Arahan Kebijakan   | Arahan Program   |
|--------------------------------------|---|--|--|
| a. Terwujudnya ketahanan pangan      | a. Dinas DKP3<br>b. Dinas PUTR<br>c. DinasPMD<br>d. Bappedalitbang<br>e. LSM Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan | Pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. |
|                                      |   |  | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.               |
|                                      |   |  | Program penanganan kerawanan pangan  |
|                                      |   |  | Program pengawasan keamanan pangan   |
| b. Meningkatnya kesehatan masyarakat | a. Dinas kesehatan<br>b. Disdukcapil<br>c. Bappedalitbang   | Pelayanan kesehatan masyarakat dalam   | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan                                 |



| Outcomes | Para Pihak              | Arahan Kebijakan          | Arahan Program  |
|----------|-------------------------|---------------------------|---|
|          | b. LSM Bidang Kesehatan | penanggulangan gizi buruk | upaya kesehatan masyarakat<br>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan<br>Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan |

Sumber: Tim Penyusun KLHS Perubahan RPJMD

#### 4. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan skenario pencapaian target dan isu-isu ekonomi lainnya, sasaran TPB 8 di Kabupaten Majalengka difokuskan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha; penghidupan kembali UMKM dan sektor pariwisata terdampak COVID-19; pembukaan bidang bisnis, investasi dan industri besar; dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) sasaran/*outcomes* utama dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8) di Kabupaten Majalengka, antara lain meningkatnya PDRB per kapita, terpenuhinya kebutuhan akses UMKM ke layanan keuangan, dan meningkatnya jumlah wisatawan. Untuk mencapai ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan peranan berbagai pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program

Tabel 4.6  
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 8  
Tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

| Outcomes   | Para Pihak   | Arahan Kebijakan  | Arahan Program  |
|--|--|---|---|
| 1. Meningkatnya PDRB per kapita Kabupaten Majalengka | a. Setda<br>b. Dinas PMD<br>c. Dinas Kominfo<br>d. Dinas KKUKM<br>e. Dinas Perdagin.<br>f. Dinas Parbud<br>g. Bappedalitbang<br>h. BKPSDM<br>i. BKAD<br>j. Bapenda<br>k. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab Majalengka | a. Perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah yang lebih strategis dan transparan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                           |
|  |  |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                         |
|  |  |   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                            |
|  |  |   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                    |
|  |  |   | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    |
|  |  | b. Peningkatan iklim investasi  | Program Promosi Penanaman Modal                               |
|  |  |   | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              |
|  |  |   | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
|  |  |   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                 |



| Outcomes   | Para Pihak   | Arahan Kebijakan  | Arahan Program   |
|--|--|---|--|
|  |  | c. Pengembangan industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri   |
|  |  |   | Program Pengendalian izin Usaha Industri   |
|  |  |   | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional                                   |
|  |  | d. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kewirausahaan, dan peningkatan kualitas, daya saing, dan jaminan sosial tenaga kerja | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                     |
|  |  |   | Program Pengelolaan Kota Administrasi  |
|  |  |   | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengembangan |
|  |  |   | Program Perencanaan Tenaga Kerja   |
|  |  |   | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                   |
|  |  |   | Program Penempatan Tenaga Kerja  |
|  |  |   | Program Hubungan Industrial  |
|  |  |   | Program Pengawasan Ketenagakerjaan   |
|  |  | e. Peningkatan ekonomi masyarakat desa  | Program Peningkatan Kerjasama Desa   |
|  |  |   | Program Penataan Desa  |
|  |  |   | Program Administrasi Pemerintahan Desa   |
|  |  |   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                       |
| 2. Terpenuhinya kebutuhan akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah) ke layanan keuangan di Kab Majalengka | a. DP3AKB<br>b. Dinas Kominfo<br>c. Dinas KKUM<br>d. DPMTSP<br>e. Dispora<br>f. Disparbud<br>g. Dinas Perdagin<br>h. BKPSDM<br>i. Bappedalitbang<br>j. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab majalengka | a. Peningkatan kualitas, pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses modal bagi UMKM   | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam   |
|  |  |   | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                 |
|  |  |   | Program Pengembangan UMKM  |
|  |  |   | Program Pelayanan Penghubung   |
| 3. Meningkatnya jumlah wisatawan di Kab Majalengka   | a. Disparbud<br>b. Dinas PMD<br>c. Dinas K2UKM<br>d. BKPSDM<br>e. Bappedalitbang   | a. Pengembangan destinasi pariwisata, produk wisata, dan ekonomi kreatif, serta infrastruktur pendukung                               | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                      |
|  |  |   | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                          |
|  |  | b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital ke   | Program Pemasaran Pariwisata   |
|  |  |   | Program Pelayanan Penghubung   |

Sumber: Tim Penyusun KLHS Perubahan RPJMD



## 5. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Selain proporsi perempuan melahirkan dan presentase merokok, juga terdapat beberapa indikator di target kehidupan sehat dan sejahtera yang masih memiliki gap/masalah. Diantaranya adalah indikator kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap, prevalensi tekanan darah tinggi, eliminasi malaria dan kusta, pemakaian kontrasepsi, angka kelahiran pada remaja, dan cakupan Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Terdapat 6 (enam) *outcomes* yang berkaitan dengan target kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3), yaitu mengurangi angka kematian ibu; menurunkan angka kematian bayi dan balita mengakhiri epidemi dan penyakit menular; mengurangi angka kematian dini dari penyakit tidak menular; akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi; dan akses kesehatan universal terhadap pelayanan kesehatan dasar. Keenam *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 3 diperlukan kersajama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.7  
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 3 Tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera

| Outcomes   | Para Pihak  | Arahan Kebijakan  | Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)   |
|--|---|---|--|
| 1. Mengurangi angka kematian ibu.<br><br>2. Menurunkan angka kematian bayi dan balita. | a. Dinas Kesehatan<br>b. DP3AKB<br>c. Dinas KP3<br>d. Dinas PMD<br>e. Dinas PKPP<br>f. BPJS Kesehatan<br>g. Rumah Sakit<br>h. Puskesmas<br>i. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK)<br>j. masyarakat<br>k. LSM Bidang Kesehatan<br>l. LSM Bidang Sosial | a. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.                                  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.<br><br>Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. |
|  |   | b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.  | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.   |
|  |   | c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi. | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.  |
|  |   | d. Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan   |



| Outcomes                                    | Para Pihak  | Arahan Kebijakan  | Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)   |
|---|---|---|--|
|   |   | pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.   | <p>upaya kesehatan masyarakat.</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</p> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>Program Pengawasan Keamanan Pangan</p>  |
| 3. Mengakhiri epidemi dan penyakit menular. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kesehatan</li> <li>b. Dinas PMD</li> <li>c. Dinas LH</li> <li>d. Disdik</li> <li>e. Dinas PKPP</li> <li>f. Bappedalitbang</li> <li>g. BPD</li> <li>h. BPJS Kesehatan</li> <li>i. Rumah Sakit</li> <li>j. Puskesmas</li> <li>k. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK)</li> <li>l. masyarakat</li> <li>m. LSM Bidang Kesehatan</li> <li>n. LSM Bidang Sosial</li> </ul> | <p>a. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan tidak menular, dan epidemi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.</p> <p>c. Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>d. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.</p> <p>e. Pembinaan dan pemantauan masyarakat terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular</p> | <p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.</p> <p>Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.</p> <p>Program penelitian dan pengembangan daerah.</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</p> <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</p> |



| Outcomes  | Para Pihak  | Arahan Kebijakan  | Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)                             |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.                         |
|   |   | f. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.   | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.                            |
| 5. Akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.<br><br>6. Akses kesehatan universal terhadap akses pelayanan kesehatan dasar. | a. Dinkes<br>b. Dinsos<br>c. Disdik<br>d. DP3AKB<br>e. Dinas PMD<br>f. Dinas PKPP<br>g. BPJS Kesehatan<br>h. Rumah Sakit<br>i. Puskesmas<br>j. LSM Bidang Kesehatan<br>k. LSM Bidang Sosial | a. Peningkatan pelayanan kesehatan.   | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. |
|   |   |   | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.                 |
|   |   | b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.  | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.                 |
|   |   |   | c. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi dan keluarga                   |
|   |   | d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan terkait kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. |  |
|   |   |   | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. |
| Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.   |   |   |  |

Sumber: Tim Penyusun KLHS Perubahan RPJMD

Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan integrasi kedalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasian/adaptasi dari hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, sebagai berikut:



1. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
2. Analisis Daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk ke Bab II Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
3. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB;
4. Penjabaran visi dan misi kedalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan Bab VI Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan di atas;
5. Program pembangunan daerah dan program perangkat daerah mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukungnya terdapat di Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tidak dimuat dalam dokumen RPJMD;
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
7. Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke RPJMD sebab akan direspon/diadaptasi ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait.

#### **4.2.7 Penetapan Isu-isu Strategis Kabupaten Majalengka**

Adapun isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

##### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat**

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan



yang berkarakter dan berdaya saing. Program penguatan pendidikan karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

## **2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya**

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2018 penduduk miskin Majalengka sebesar 10,79 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 10,08 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,61 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,35 menjadi 11,43 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan



oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Jumlah penduduk miskin diperkirakan akan meningkat karena berdasarkan data BPS Jawa Barat, indikator kemiskinan dan pengangguran telah menunjukkan peningkatan sampai dengan Kwartal II-2020.

### **3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah Terasering Panyaweuyan dan Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya seperti wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI), wisata air Cikadondong River Tubing (CRT) desa payung Kecamatan Rajagaluh dll.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan beberapa apresiasi di tingkat Nasional diantaranya Cikadondong River Tubing sebagai Juara 1 wisata air terpopuler, Curug cipeuteuy sebagai juara ke 3 kategori surga yang tersembunyi, Paralayang



Gunung Panten dengan kategori petualangan terpopuler dan ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif dengan sub sektor unggulan seni pertunjukan, kuliner dan kriya. Beberapa apresiasi tersebut memberikan dampak yang menimbulkan multifler efek terhadap pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Majalengka.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,3 miliar rupiah, yang berasal dari pajak hiburan sebesar Rp. 300.000.000, hotel sebesar Rp 750.000.000 serta retribusi pariwisata sebesar Rp 250.000.000. Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam beberapa tahun mendatang, akan berdampak lebih signifikan beriringan dengan beroperasionalnya Bandara International Jawa Barat (BIJB) dan Jalan Tol Cisumdawu, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

#### **4. Kemandirian Desa**

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

#### **5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi Pengembangan Wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan



(WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati.

Pada saat ini Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Masuk ke dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon). Tiga lokasi tersebut pertumbuhannya akan luar biasa dan menjadi pusat bisnis yang prospektif.

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.

Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

Terkait masalah lingkungan, Kepala Departemen Perencanaan Produk dan Kemitraan PT. BIJB memprediksikan bahwa sampah yang dihasilkan di tiga tahun pertama BIJB beroperasi yakni 1,5 ton perhari. Sementara untuk dampak dari pencemaran limbah dan sampah BIJB, diakui telah disiapkan oleh pihak BIJB sesuai aturan bahwa tidak boleh ada sampah ataupun limbah yang dibuang atau dibawa keluar dari kawasan bandara. Perlu dipersiapkan langkah antisipatif, terutama ketika kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati sudah mulai beroperasi.

## **6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat**

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai.



Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Selain itu Puskesmas di Majalengka juga belum ada yang statusnya PPK/BLUD (Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, 2017).

Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

## **7. Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19.



Tabel 4.8  
Isu Strategis Pembangunan

| ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN  |  |   |
|--|--|---|
| RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023                           | RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023                      | RPJMN Tahun 2020-2024   |
| 1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat | 1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia | 4.1. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa<br>4.2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia<br>4.3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti<br>4.4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama<br>4.5. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan<br>4.6. Belum Optimalnya Peran Keluarga<br>4.7. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas   |
| 2. Kemiskinan dan Permasalahan sosial                                | 2 Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial                  | 2.1. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)<br>2.2. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan<br>2.3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa<br>2.4. Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan<br>2.5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. |
|  |  | 3.2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk  |
| 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>4. Kemandirian Desa             | 4 Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan      | 1.1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam<br>1.2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi<br>1.3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat<br>1.4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital   |



| ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN   |   |   |
|---|---|---|
| RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023  | RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023   | RPJMN Tahun 2020-2024   |
| 5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan | 5.1. Infrastruktur Pelayanan Dasar<br>5.2. Infrastruktur Ekonomi<br>5.3. Infrastruktur Perkotaan<br>5.4. Energi dan Ketenagalistrikan<br>5.5. Transformasi Digital                              |
| 6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat                               | 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia                           | 3.3. Pemenuhan Layanan Dasar<br>3.5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing   |
|   |   | 3.1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan<br>3.4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda  |
| 7. Reformasi Birokrasi  | 5 Reformasi birokrasi   | 6.1. Konsolidasi Demokrasi<br>6.2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri<br>6.3. Penegakan Hukum Nasional<br>6.4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola<br>6.5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

# **BAB V**



## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1. Visi

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat yang partisipatif serta kompetitif dalam berbagai bidang, sebagaimana visi yang hendak dicapai pada rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah pada tahap ke-4 tentunya harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron dan konsisten. Perumusan visi untuk RPJMD 2018-2023 ini selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, perumusan visi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 pun hendaknya memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini penting untuk menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Perbandingan visi antara RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Majalengka dan disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kab. Majalengka

| <b>Visi Pembangunan</b>   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RPJMN Tahun 2020-2024</b>  | <b>RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023</b>  | <b>RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023</b>  |
| <b>Terwujudnya Indonesia</b> Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan <b>Gotong Royong</b> | <b>“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”</b>                   | <b>Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>                      |
|   | <b>Jabar Juara Lahir Batin:</b> pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan | <b>Religius:</b> Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, |



| Visi Pembangunan      |   |   |
|-----------------------|---|---|
| RPJMN Tahun 2020-2024 | RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023   | RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023  |
|                       | <p>dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.</p> <p><b>Inovasi:</b> pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.</p> <p><b>Kolaborasi:</b> perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.</p> | <p>mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai;</p> <p><b>Adil:</b> Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial;</p> <p><b>Harmonis:</b> Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan;</p> <p><b>Sejahtera:</b> Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup.</p> |

Sumber: RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

## 5.2 Misi

Perumusan misi yang tepat merupakan faktor penentu dari tercapainya visi yang akan dicapai dalam suatu periode pemerintahan. Misi yang baik adalah misi yang mampu menjabarkan langkah-langkah untuk mencapai visi secara jelas, ringkas dan mudah dipahami. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- **Misi Pertama:**

Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;



- **Misi Kedua:**  
Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- **Misi Ketiga:**  
Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;
- **Misi Keempat:**  
Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani;
- **Misi Kelima:**  
Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Penetapan lima misi pembangunan di atas selain sejalan untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka, juga sejalan dengan penetapan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penetapan misi pembangunan Kabupaten Majalengka selain sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Majalengka juga bertujuan mendukung pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sinergitas antara misi pembangunan Kabupaten Majalengka dengan misi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.2. di bawah ini:

Tabel 5.2.

Misi Pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Majalengka

| <b>Misi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah</b>      |  |  |
|--|--|--|
| <b>RPJMN 2020-2024</b>   | <b>RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023</b>   | <b>RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023</b>   |
| 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, | 1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat | 1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan |



| <b>Misi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RPJMN 2020-2024</b>  | <b>RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023</b>   | <b>RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023</b>   |
| <p>menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.</p> <p>3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.</p> <p>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.</p> <p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p>6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.</p> | <p>Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.</p> <p>2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.</p> <p>3. Mempercepat pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.</p> <p>4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.</p> <p>5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> | <p>prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</p> <p>2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</p> <p>3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</p> <p>4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</p> <p>5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</p> |

Sumber: RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, diuraikan berdasarkan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut ini.



Tabel 5.3.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Majalengka

**VISI: Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA**

| MISI  | TUJUAN   | SASARAN  |
|---|--|--|
| Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama  | Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama             |
| Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat  | Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sector                        |
|   |  | Pengurangan Tingkat Kemiskinan   |
|   | Penurunan Prevalensi Stunting                                    |  |
| Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya   | Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat      | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat |
|   | Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik                     | Terwujudnya akuntabilitas kinerja  |
| Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani | Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing       | Terwujudnya akuntabilitas keuangan   |
|   |  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       |
|   |  | Meningkatkannya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN               |
|   |  | Meningkatnya Mutu pendidikan   |
|   |  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                    |
|   |  | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman                                  |
|   |  | Meningkatnya kesejahteraan petani  |
|   |  | Meningkatnya kunjungan wisata  |
| Meningkatnya Investasi sektor Industri  |  |  |
| Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa  |  |  |
| Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa   | Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa  | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa                                |

Sumber: RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.



Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJPD Kab. Majalengka Tahun 2005-2025, RTRW Kab. Majalengka, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Adapun kerangka perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan komparasi antar dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.  
Komparasi Tujuan dan Sasaran antar Dokumen Perencanaan yang Terkait

| Dokumen Perencanaan   | Tujuan   | Sasaran |   |  |  |  |
|---|--|---------|---|--|--|--|
| <b>RPJMN<br/>2020-2024</b>  | 1. Sasaran Makro;<br>2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;<br>3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;<br>4. Sasaran Dimensi Pemerataan;<br>5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;<br>6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.   |         |   |  |  |  |
| <b>RPJMD<br/>Provinsi Jabar<br/>2018-2023</b>   | <p style="text-align: center;"><b>Misi Pertama:</b><br/><b>Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="444 1355 943 1497">Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, Berkebangsaan dan berkeadilan Sosial</td> <td data-bbox="943 1355 1482 1497">Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Misi Kedua:</b><br/><b>Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="444 1664 943 2245">1. Meningkatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Masyarakat</td> <td data-bbox="943 1664 1482 2245">           1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan Memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar<br/>           2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan<br/>           3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak<br/>           4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan<br/>           5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat Berolahraga dan         </td> </tr> </table> |         | Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, Berkebangsaan dan berkeadilan Sosial | Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi | 1. Meningkatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Masyarakat | 1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan Memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar<br>2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan<br>3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak<br>4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan<br>5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat Berolahraga dan |
| Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, Berkebangsaan dan berkeadilan Sosial | Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi   |         |   |  |  |  |
| 1. Meningkatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Masyarakat                                  | 1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan Memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar<br>2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan<br>3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak<br>4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan<br>5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat Berolahraga dan   |         |   |  |  |  |



| Dokumen Perencanaan  | Tujuan  | Sasaran   |
|--|---|---|
|  |   | Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional  |
|  | 2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan local dan seni budaya daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal</li> <li>2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial</li> </ol>  |
| <b>Misi Ketiga:</b><br><b>Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah</b>                          |   |   |
|  | 1. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang Mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok</li> <li>2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian</li> <li>3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa</li> <li>4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan</li> </ol> |
|  | 2. Meningkatkan daya dukung dan daya Tampung lingkungan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik</li> <li>3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana</li> </ol>   |
| <b>Misi Keempat:</b><br><b>Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan</b> |   |   |
|  | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan</li> <li>2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif</li> <li>3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat</li> <li>4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi</li> </ol>                                    |



| Dokumen Perencanaan                                     | Tujuan   | Sasaran   |
|---|--|---|
|   | <b>Misi Kelima:</b><br><b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>   |   |
|   | Mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan <i>smart</i>, bersih dan akuntabel</li> <li>2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif</li> </ol> |
| <b>RPJMD<br/>KABUPATEN<br/>MAJALENGKA<br/>2018-2023</b> | <b>VISI:</b><br><b>Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>  |   |
|   | <b>Misi pertama:</b><br><b>Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>  |   |
|   | Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat   | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama  |
|   | <b>Misi Kedua:</b><br><b>Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>  |   |
|   | Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sector   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sector</li> <li>2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan</li> </ol>   |
|   | Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat  | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat  |
|   | <b>Misi ketiga:</b><br><b>Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>  |   |
|   | Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja</li> <li>2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> <li>4. Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN</li> </ol>                              |
|   | <b>Misi keempat:</b><br><b>Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b> |   |



| Dokumen Perencanaan | Tujuan   | Sasaran   |
|---------------------|--|---|
|                     | Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Mutu pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman</li> <li>4. Meningkatnya kesejahteraan petani</li> <li>5. Meningkatnya kunjungan wisata</li> <li>6. Meningkatnya Investasi sektor Industri</li> <li>7. Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa</li> </ol> |
|                     | <p><b>Misi 5 :</b><br/> <b>Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b></p> |   |
|                     | Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa  | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa   |

Sumber: RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi



sampai dengan kuartal III 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia, juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi perekonomian Indonesia yang diindikasikan oleh beberapa indikator makro mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini menyebabkan Pemerintah melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021, yang berbeda angkanya dengan target indikator makro yang telah ditetapkan di RPJMN Tahun 2020-2024.

Ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2020 terhadap triwulan III tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan (minus) sebesar 3,49 persen (y-on-y). Walau demikian, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,05 persen (q-to-q). Indikator makro lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja di Indonesia yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (24,03 juta orang). Pandemi COVID-19 juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Sejalan dengan kondisi nasional, Kabupaten Majalengka juga mengalami penurunan beberapa indikator makro sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia. Ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,86 persen (y-on-y) menurun dibanding capaian tahun 2019 yang besarnya 7,01 persen.

Dalam setahun terakhir, TPT di Kabupaten Majalengka naik menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020 dari 8,04 pada tahun sebelumnya.



Indikator makro lain yang juga menunjukkan penurunan kinerja yaitu kemiskinan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Majalengka berdasarkan publikasi BPS.



Tabel 5.5  
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

| NO. | INDIKATOR                               | SATUAN      | KONDISI AWAL |        | 2019   |           | 2020   |           | TARGET RPJMD |        |        | TARGET PERUBAHAN RPJMD |        |        | KONDISI AKHIR |
|-----|---|-------------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|---------------|
|     |   |             | 2017         | 2018   | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | 2021         | 2022   | 2023   | 2021                   | 2022   | 2023   |               |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)        | poin        | 65.92        | 66.72  | 67.19  | 67.52     | 67.34  | 67.59     | 67.95        | 68.285 | 68.84  | 67.85                  | 68.33  | 68.85  | 68.85         |
|     | Usia Harapan Hidup                      | tahun       | 69.39        | 69.68  | 69.73  | 69.75     | 70.08  | 70.27     | 70.08        | 70.22  | 70.40  | 70.22                  | 70.40  | 70.60  | 70.60         |
|     | Harapan Lama Sekolah                    | tahun       | 12.18        | 12.19  | 12.48  | 12.49     | 12.20  | 12.22     | 12.81        | 12.97  | 13.17  | 12.81                  | 12.97  | 13.17  | 13.17         |
|     | Rata-Rata Lama Sekolah                  | tahun       | 6.90         | 6.91   | 7.00   | 7.01      | 7.11   | 7,27      | 7.19         | 7.27   | 7.39   | 7.19                   | 7.27   | 7.39   | 7.39          |
|     | Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan | Ribu Rupiah | 8,833        | 9,416  | 9,421  | 9,422     | 9,120  | 9.521     | 9,443        | 9,454  | 9,547  | 9,280                  | 9,410  | 9,475  | 9,475         |
| 2.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)      | persen      | 5.02         | 4.95   | 4.89   | 4.37      | 5.90   | 5.84      | 4.68         | 4.49   | 4.19   | 5.50                   | 5.13   | 4.88   | 4.88          |
| 3   | Persentase Penduduk Miskin              | persen      | 12.6         | 10.79  | 10.48  | 10.06     | 11.89  | 11.43     | 9.68         | 9.09   | 8.48   | 11.2                   | 10.8   | 10.37  | 10.37         |
| 4.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                | persen      | 6.81         | 6.23   | 6.035  | 7.14      | 0.25   | 0.86      | 6.035        | 6.035  | 6.035  | 3.1                    | 4.5    | 5.17   | 5.17          |
| 5.  | PDRB per kapita                         | Ribu Rupiah | 14.789       | 15.740 | 16.500 | 16.682    | 17.850 | 17.953    | 18.584       | 19.698 | 21.113 | 18.262                 | 18.989 | 19.877 | 19.877        |
| 6.  | Indeks Gini                             | poin        | 0.351        | 0.350  | 0.335  | 0.335     | 0.34   | 0.336     | 0.330        | 0.328  | 0.328  | 0.39                   | 0.37   | 0.33   | 0.33          |

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2020, diolah kembali oleh Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab Majalengka.



Tabel 5.6  
Perbandingan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Berdasarkan  
RPJMN Tahun 2020-2024, Prediksi Perubahan RPJMD  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Prediksi Perubahan RPJMD  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| NO. | INDIKATOR                             | SATUAN | TARGET PEMBANGUNAN RPJMN<br>2020-2024 |      |      |      | TARGET PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD<br>PROVINSI JAWA BARAT |              |             |           | TARGET PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD<br>KABUPATEN MAJALENGKA |      |      |       |
|-----|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|---|--------------|-------------|-----------|--|------|------|-------|
|     |                                       |        | 2020                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2020  | 2021         | 2022        | 2023      | 2020   | 2021 | 2022 | 2023  |
| 1.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi              | persen | 5.40                                  | 5.50 | 5.70 | 5.90 | -2.77 - -1.61   | 3.33 - 4.49  | 5.20 - 5.30 | 5.50-5.60 | 0.25   | 3.1  | 4.5  | 5.17  |
| 2.  | Persentase Penduduk Miskin            | persen | 6.31                                  | 6.07 | 5.70 | 5.24 | 7.25 - 7.09   | 9.96 - 6.63  | 6.39 - 6.06 | 5.77-5.42 | 11.89  | 11.2 | 10.8 | 10.37 |
| 3.  | Tingkat Pengangguran Terbuka<br>(TPT) | persen | 7.70                                  | 7,50 | 7,40 | 7.00 | 10.30 - 12.01   | 10.40 - 9.30 | 9.46 - 7.81 | 8.03-6.21 | 5.90   | 5.50 | 5.13 | 4.88  |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka



Perbandingan arahan indikator makro RPJMN 2020-2024, untuk Kabupaten Majalengka dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2019 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan target perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Adanya perbedaan ini bukan berarti program pembangunan Kabupaten Majalengka tidak mendukung target nasional dan Provinsi. Penyebab utama terjadinya perbedaan target adalah waktu penetapan target. Indikator makro secara nasional ditetapkan sebelum masa pandemi COVID-19, sementara perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dilakukan di masa-masa yang belum memperlihatkan pola berakhirnya pandemi COVID-19. Namun target Indikator Makro Kabupaten Majalengka beberapa memperlihatkan indikator yang lebih tinggi dari target nasional maupun Provinsi.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2018-2023 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.7.  
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| VISI/MISI/TUJUAN/<br>SASARAN   | INDIKATOR KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN                              | SATUAN | KONDISI AWAL   |        | 2019   |            | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |       |       |       | 2020   |            | TARGET SETELAH PERUBAHAN |       |       | KONDISI AKHIR |       |       |
|--|--|--------|--|--------|--------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|------------|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|  |  |        | 2017   | 2018   | TARGET | REALI SASI | 2020                     | 2021  | 2022  | 2023  | TARGET | REALI SASI | 2021                     | 2022  | 2023  |               |       |       |
| <b>VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>   |  |        |  |        |        |            |                          |       |       |       |        |            |                          |       |       |               |       |       |
| <b>Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b> |  |        |  |        |        |            |                          |       |       |       |        |            |                          |       |       |               |       |       |
| 1.1.   | Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat | 1      | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | persen | N/A    | N/A        | 5                        | 5     | 5     | 5     | 5      | 5          | 1                        | 1     | 2     | 5             | 5     | 5     |
| 1.1.1.   | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | 1      | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | persen | N/A    | N/A        | 5                        | 5     | 5     | 5     | 5      | 5          | 1                        | 1     | 2     | 5             | 5     | 5     |
| <b>Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>               |  |        |  |        |        |            |                          |       |       |       |        |            |                          |       |       |               |       |       |
| 2.1.   | Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor | 1      | Indeks Gini  | poin   | 0,351  | 0,35       | 0,335                    | 0,331 | 0,333 | 0,330 | 0,328  | 0,328      | 0,340                    | 0,336 | 0,339 | 0,337         | 0,330 | 0,330 |
|  |  | 2      | Angka Kemiskinan   | persen | 12,6   | 10,79      | 10,48                    | 10,06 | 10,08 | 9,68  | 9,09   | 8,48       | 11,89                    | 11,43 | 11,2  | 10,80         | 10,37 | 10,37 |
| 2.1.1.   | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor            | 1      | Indeks Gini  | poin   | 0,351  | 0,35       | 0,335                    | 0,331 | 0,333 | 0,330 | 0,328  | 0,328      | 0,340                    | 0,336 | 0,339 | 0,337         | 0,330 | 0,330 |
| 2.1.2.   | Pengurangan Tingkat Kemiskinan                                   | 2      | Angka Kemiskinan   | persen | 12,60  | 10,79      | 10,48                    | 10,06 | 10,08 | 9,68  | 9,09   | 8,48       | 11,89                    | 11,43 | 11,20 | 10,80         | 10,37 | 10,37 |
| 2.1.3.   | Penurunan Prevalensi Stunting                                    | 3      | Angka Stunting   | Persen | N/A    | N/A        | -                        | 5,50  | -     | -     | -      | -          | 5,00                     | 5,29  | 4,5,0 | 4,00          | 3,50  | 3,50  |
| 2.2.   | Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat      | 1      | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat                      | persen | N/A    | 20,00      | 10,00                    | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00  | 10,00      | 10,00                    | 10,00 | 10,00 | 10,00         | 10,00 | 10,00 |



| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN   | SATUAN | KONDISI AWAL   |           | 2019    |            | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |         |         |         | 2020    |            | TARGET SETELAH PERUBAHAN |         |         | KONDISI AKHIR |           |           |
|---|--|--------|--|-----------|---------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------|
|   |  |        | 2017   | 2018      | TARGET  | REALI SASI | 2020                     | 2021    | 2022    | 2023    | TARGET  | REALI SASI | 2021                     | 2022    | 2023    |               |           |           |
| 2.2.1.  | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 1      | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat                      | persen    | N/A     | 20,00      | 10,00                    | 20,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00      | 10,00                    | 10,00   | 10,00   | 10,00         | 10,00     | 10,00     |
| <b>Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>   |  |        |  |           |         |            |                          |         |         |         |         |            |                          |         |         |               |           |           |
| 3.1.  | Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik                                  | 1      | Indeks Reformasi Birokrasi   | Poin      | 88,25   | 88,25      | 88,50                    | 51,79   | 89,50   | 89,80   | 89,00   | 89,80      | 89,50                    | 53,88   | 56,80   | 58            | 61        | 61        |
| 3.1.1.  | Terwujudnya akuntabilitas kinerja  | 1      | Nlai SAKIP   | nilai     | CC      | B          | B                        | B       | BB      | A       | A       | A          | B                        | BB      | BB      | BB            | BB        | BB        |
| 3.1.2.  | Terwujudnya akuntabilitas keuangan   | 1      | Opini BPK RI   | opini     | WTP     | WTP        | WTP                      | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP        | WTP                      | WTP     | WTP     | WTP           | WTP       | WTP       |
| 3.1.3.  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       | 1      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                     | poin      | B       | B          | B                        | B       | B       | B       | B       | B          | B                        | B       | B       | B             | B         | B         |
| 3.1.4.  | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN                  | 1      | Indeks Profesionalitas ASN   | poin      | 88,25   | 88,25      | 88,50                    | 56,00   | 89,00   | 89,50   | 89,80   | 90         | 59                       | 58,8    | 60      | 60,5          | 61        | 61,00     |
|   |  | 2      | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | persen    | 0,00    | 0,00       | 30,00                    | 30,00   | 40,00   | 45,00   | 45,00   | 40,00      | 30,00                    | 30,00   | -       | -             | -         | -         |
| <b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b> |  |        |  |           |         |            |                          |         |         |         |         |            |                          |         |         |               |           |           |
| 4.1.  | Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing                   | 1      | Indeks Pembangunan Manusia   | poin      | 65,92   | 66,72      | 67,19                    | 67,5    | 67,34   | 67,95   | 68,285  | 68,84      | 67,34                    | 67,59   | 67,85   | 68,33         | 68,85     | 68,85     |
| 4.1.1.  | Meningkatnya Mutu pendidikan   | 1      | Indeks Pengetahuan   | poin      | 56,83   | 56,89      | 58,03                    | 57,55   | 58,84   | 59,55   | 60,23   | 61,19      | 57,9                     | 58,84   | 58,2    | 58,8          | 59,44     | 59,44     |
| 4.1.2.  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                    | 1      | Indeks Kesehatan   | poin      | 75,98   | 76,43      | 76,53                    | 76,88   | 76,75   | 77,04   | 77,26   | 77,54      | 76,75                    | 77,34   | 77,04   | 77,26         | 77,54     | 77,54     |
| 4.1.3.  | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman                                  | 1      | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak                | persen    | 5:16    | 80,37      | 80,52                    | 68,47   | 80,67   | 80,98   | 81,31   | 81,65      | 80,67                    | 69,02   | 69,38   | 69,75         | 70,12     | 70,12     |
| 4.1.4.  | Meningkatnya kesejahteraan petani  | 1      | Nilai Tukar Petani   | persen    | N/A     | 99,67      | 100,49                   | 100,80  | 101,00  | 102,00  | 103,00  | 104,00     | 101,00                   | N/A     | -       | -             | -         | -         |
|   |  |        | Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian                               | Persen    | N/A     | N/A        | N/A                      | N/A     | N/A     | N/A     | N/A     | N/A        | N/A                      | N/A     | N/A     | N/A           | 1,00      | 1,00      |
| 4.1.5.  | Meningkatnya kunjungan wisata  | 1      | Jumlah kunjungan wisatawan   | kunjungan | 200.000 | 589.843    | 619.335                  | 701.335 | 681.269 | 749.396 | 824.335 | 906.769    | 500.000                  | 375.000 | 525.000 | 850.000       | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.1.6.  | Meningkatnya Investasi sektor Industri                                       | 1      | Jumlah industri baru   | Unit      | 0       | 0          | 40                       | 56      | 40      | 40      | 40      | 40         | 40                       | 45      | -       | -             | -         | -         |
|   |  |        | Laju Pertumbuhan Sektor Industri                                     | Persen    | -       | -          | -                        | -       | -       | -       | -       | -          | -                        | -       | -       | 5,00          | 5,00      | 5,00      |



| VISI/MISI/TUJUAN/<br>SASARAN  | INDIKATOR KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN                             | SATUAN | KONDISI AWAL                                      |       | 2019   |            | TARGET SEBELUM PERUBAHAN |       |       |       | 2020   |            | TARGET SETELAH PERUBAHAN |       |       | KONDISI AKHIR |       |       |
|---|---|--------|---|-------|--------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|------------|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|   |   |        | 2017  | 2018  | TARGET | REALI SASI | 2020                     | 2021  | 2022  | 2023  | TARGET | REALI SASI | 2021                     | 2022  | 2023  |               |       |       |
| 4.1.7.  | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa      | 1      | Jumlah desa tematik                               | desa  | 0      | 0          | 26                       | 33    | 26    | 26    | 26     | 26         | 26                       | 6     | 17    | 18            | 18    | 59    |
| <b>Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b> |   |        |   |       |        |            |                          |       |       |       |        |            |                          |       |       |               |       |       |
| 5.1.  | Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa | 1      | Indeks Desa Membangun                             | point | N/A    | 0,647      | 0,567                    | 0,670 | 0,671 | 0,686 | 0,698  | 0,710      | 0,698                    | 0,709 | 0,686 | 0,698         | 0,710 | 0,710 |
| 5.1.1.  | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa                   | 1      | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | desa  | N/A    | 109        | 36                       | 52    | 51    | 52    | 41     | 41         | 51                       | 51    | 52    | 41            | 25    | 221   |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.



Tabel 5.8.

Penanggungjawab Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| No | INDIKATOR  | PROGRAM  |  | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|--|--|--|------------------------------------|
|    |  | LAMA   | BARU   |                                    |
| 1  | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | 1. Program Pemerintahan Dan kesejahteraan Rakyat                               | 1. Program Pemerintahan Dan kesejahteraan Rakyat                               | Sekretariat Daerah                 |
|    |  |  | 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya     | Kesbangpol                         |
| 2  | Indeks Gini  | 1. Program Penyelenggaraan Jalan   | 1. Program Penyelenggaraan Jalan   | Dinas PUTR                         |
|    |  | 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                    |
|    |  | 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                           | 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                           | Dinas Perdagin                     |
|    |  | 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)               | 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)               | Dinas Perhubungan                  |
|    |  | 5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional            | 5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional            | Dinas LH                           |
|    |  | 6. Program Informasi dan Komunikasi Publik                                     | 6. Program Informasi dan Komunikasi Publik                                     | Dinas Kominfo                      |
|    |  | 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | Dinas PKPP                         |
| 3  | Angka Kemiskinan   | 1. Program Rehabilitasi Sosial   | 1. Program Rehabilitasi Sosial   | Dinas Sosial                       |
|    |  | 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                     | 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                     |                                    |
|    |  | 3. Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin                                    | 3. Program Pemberdayaan Sosial   |                                    |



| No | INDIKATOR      | PROGRAM  |   | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|----------------|--|---|------------------------------------|
|    |                | LAMA   | BARU  |                                    |
|    |                | 4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                    | 4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                       | Dinas KKUKM                        |
|    |                | 5. Program Kawasan Permukiman  | 5. Program Kawasan Permukiman   | Dinas PKPP                         |
|    |                | 6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                     | 6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga  | DP3AKB                             |
|    |                | 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                      | 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera             |                                    |
|    |                | 8. Program Pengelolaan Pendidikan  | 8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                         | Dinas KP3                          |
|    |                | 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                          | 9. Program Pengelolaan Pendidikan   | Dinas Pendidikan                   |
|    |                | 10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                    |
|    |                | 11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                | 11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)    | Dinas KKUKM                        |
|    |                |  | 12. Program Penempatan Tenaga Kerja   |                                    |
| 4  | Angka Stunting |  | 1. Program Pengelolaan Pendidikan   | Dinas Pendidikan                   |
|    |                |  | 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat  | Dinas Kesehatan                    |
|    |                |  | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                             |                                    |
|    |                |  | 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum             | Dinas PKPP                         |



| No | INDIKATOR | PROGRAM |   | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|-----------|---------|---|------------------------------------|
|    |           | LAMA    | BARU  |                                    |
|    |           |         | 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                               |                                    |
|    |           |         | 6. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  | Dinas Sosial                       |
|    |           |         | 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                    | Dinas KP3                          |
|    |           |         | 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya   |                                    |
|    |           |         | 9. Program Penyuluhan Pertanian   |                                    |
|    |           |         | 10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                 | Dinas LH                           |
|    |           |         | 11. Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Dinas PMD                          |
|    |           |         | 12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat |                                    |
|    |           |         | 13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                        | Dinas P3AKB<br>Dinas P3AKB         |
|    |           |         | 14. Program Pengendalian Penduduk   |                                    |
|    |           |         | 15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)   |                                    |
|    |           |         | 16. Program Informasi Dan Komunikasi Publik   | Dinas Kominfo                      |
|    |           |         | 17. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Bappeda litbang                    |



| No | INDIKATOR                                       | PROGRAM   |   | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|---|---|---|------------------------------------|
|    |   | LAMA  | BARU  |                                    |
| 5  | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Satpol PP dan Damkar               |
|    |   | 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Bakesbangpol                       |
|    |   | 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Kecamatan                          |
| 6  | Nilai SAKIP                                     | 1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  | 1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  | Inspektorat Daerah                 |
|    |   | 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Bappeda litbang                    |
|    |   | 3. Program Aplikasi informatika   | 3. Program Aplikasi informatika   | Dinas Kominfo                      |
| 7  | Opini BPK RI                                    | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | BKAD                               |
|    |   | 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                       | 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                       |                                    |
|    |   | 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  | 3. Program Pembinaan dan Pengawasan   | Inspektorat                        |
|    |   |   | 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Bapenda                            |
| 8  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Semua PD                           |
|    |   |   | 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik  | Diskominfo                         |
|    |   | 2. Program Pendaftaran Penduduk   | 3. Program Pendaftaran Penduduk   | Dinas Dukcapil                     |
|    |   | 3. Program Pencatatan Sipil   | 4. Program Pencatatan Sipil   | Dinas Dukcapil                     |



| No | INDIKATOR  | PROGRAM  |   | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|--|--|---|------------------------------------|
|    |  | LAMA   | BARU  |                                    |
|    |  | 4. Program Pelayanan Penanaman Modal                                 | 5. Program Pelayanan Penanaman Modal  | Dinas PMTSP                        |
| 9  | Indeks Profesionalitas ASN   | 1. Program Kepegawaian Daerah  | 1. Program Kepegawaian Daerah   | BPKSDM                             |
|    |  | 2. Program Pengembangan sumber Daya Manusia                          | 2. Program Pengembangan sumber Daya Manusia   |                                    |
| 10 | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | 1. Program Kepegawaian Daerah  |   | BPKSDM                             |
| 11 | Indeks Pengetahuan   | 1. Program Pengelolaan Pendidikan                                    | 1. Program Pengelolaan Pendidikan   | Dinas Pendidikan                   |
|    |  | 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                          | 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan   |                                    |
| 12 | Indeks Kesehatan   | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan                                 | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat      | Dinas Kesehatan                    |
| 13 | Persentase Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak           | 1. Program Kawasan Permukiman  | 1. Program Kawasan Permukiman   | Dinas PKPP                         |
|    |  | 2. Program Pengelolaan Persampahan                                   | 2. Program Pengelolaan Persampahan  | Dinas LH                           |
| 14 | Nilai Tukar Petani<br><br>Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian     | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian           | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaualatan dan kemandirian pangan | Dinas KP3                          |
|    |  | 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                          |                                    |
|    |  |  | 3. Program Pengendalian dan Penanggugulangan Bencana Pertanian                      |                                    |
|    |  |  | 4. Program Penyuluhan Pertanian   |                                    |
|    |  |  | 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya   |                                    |



| No | INDIKATOR   | PROGRAM  |  | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|---|--|--|------------------------------------|
|    |   | LAMA   | BARU   |                                    |
|    |   |  | 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner<br>7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air   |                                    |
| 15 | Jumlah kunjungan wisatawan                        | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<br>3. Program Pemasaran Pariwisata<br>4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pariwisata                   |
| 16 | Jumlah industri baru                              | 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  | 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  | Dinas Perdagin                     |
|    | Laju pertumbuhan sektor industri                  | 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  | 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>3. Program Promosi Penanaman Modal  | Dinas PMPTSP                       |
| 17 | Jumlah desa tematik                               | 1. Program Penanganan Kerawanan Pangan   | 1. Program Penanganan Kerawanan Pangan   | Dinas KPP3                         |
|    |   | 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata   | 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata   | Dinas Parbud                       |
|    |   | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  | 3. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  |                                    |
|    |   |  | 4. Program Aplikasi Informatika  | Diskominfo                         |
| 18 | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,  | 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,  | Dinas PMD                          |



| No | INDIKATOR | PROGRAM   |   | PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET |
|----|-----------|---|---|------------------------------------|
|    |           | LAMA  | BARU  |                                    |
|    |           | Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat               | Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat               | 26 Kecamatan                       |
|    |           | 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa             | 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa             |                                    |
|    |           | 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3. Program Penataan Desa                              |                                    |
|    |           |   | 4. Program Peningkatan Kerjasama Desa                 |                                    |
|    |           |   | 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                    |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Kabupaten Majalengka sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9.

Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka

| No. | Sasaran RPJMN   | No. | Sasaran RPJMD Kab.Majalengka           |
|-----|---|-----|--|
| S1  | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | S15 | Meningkatnya kunjungan wisata          |
|     |   | S16 | Meningkatnya investasi sektor industri |



| No.  | Sasaran RPJMN  | No. | Sasaran RPJMD Kab.Majalengka   |
|------|--|-----|--|
| S2.  | Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian                             | S2  | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        |
|      |  | S15 | Meningkatnya kunjungan wisata  |
|      |  | S16 | Meningkatnya investasi sektor industri                                       |
| S3.  | Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)                 | S2  | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        |
|      |  | S18 | Meningkatnya status kemajuan Kemandirian desa                                |
| S4.  | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan   |     |  |
| S5.  | Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk   | S5  | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat |
| S6.  | Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan   | S11 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                    |
|      |  | S10 | Meningkatnya Mutu pendidikan   |
| S7.  | Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda  | S4  | Menurunkan prevalensi stunting   |
| S8   | Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan  | S3  | Pengurangan Tingkat Kemiskinan   |
| S9.  | Meningkatnya produktivitas dan daya saing  | S15 | Meningkatnya kunjungan wisata  |
|      |  | S16 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri                                       |
|      |  | S17 | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa                   |
| S10. | Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya                       | S10 | Meningkatnya Mutu pendidikan   |
| S11. | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan                               | S10 | Meningkatnya Mutu pendidikan   |
| S12. | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial   | S1  | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama             |
| S13. | Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | S1  | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama             |
| S14. | Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa   | S1  | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama             |
| S15. | Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif                       | S10 | Meningkatnya Mutu Pendidikan   |
| S16. | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar  | S2  | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        |
| S17. | Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar                          | S2  | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        |
| S18. | Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan   | S2  | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        |
| S19. | Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan  |     |  |
| S20. | Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  | S2  | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        |



| No.  | Sasaran RPJMN   | No. | Sasaran RPJMD Kab.Majalengka   |
|------|---|-----|--|
| S21  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | S12 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman                                  |
| S22. | Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim  | S5  | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat |
| S23. | Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline   |     |  |
| S24. | Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga, demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal | S6  | Terwujudnya akuntabilitas kinerja  |
|      |   | S7  | Terwujudnya akuntabilitas keuangan   |
|      |   | S9  | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN                  |
| S25. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik  | S8  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

#### 5.4. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan janji-janji kampanye bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018–2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023, meliputi:

1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi.
5. Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri.
6. Mewujudkan kemandirian desa.

Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diterjemahkan dalam arahan program-program prioritas sebagai berikut:



Tabel 5.10  
Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Program

| NO. | PRIORITAS   | ARAHAN PROGRAM   |
|-----|---|--|
| 1   | Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat                             | Melakukan peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat melalui :<br>1. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama  |
| 2   | Penanggulangan Kemiskinan   | Melakukan penanggulangan kemiskinan melalui :<br>1. Mengurangi beban Masyarakat<br>2. Peningkatan pendapatan<br>3. Memperluas kesempatan kerja   |
| 3   | Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor                            | Melakukan pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor dengan mengurangi disparitas/ kesenjangan antar Wilayah   |
| 4   | Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan , kesehatan dan Reformasi Birokrasi | Melakukan peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi melalui:<br>1. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar<br>2. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama<br>3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal<br>4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan<br>5. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer ( <i>Primary Health Care</i> )<br>6. Pemenuhan SPM bidang kesehatan<br>7. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh<br>8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah<br>9. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah<br>10. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik<br>11. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN<br>12. Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah<br>13. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur |
| 5   | Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri                               | Mewujudkan Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri melalui:<br>1. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian<br>2. Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata<br>3. Memberikan Kemudahan pelayanan perizinan investasi<br>4. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi<br>5. Mewujudkan Desa Wisata<br>6. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan   |
| 6   | Mewujudkan Kemandirian Desa   | Mewujudkan kemandirian desa melalui:<br>1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa<br>2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa<br>3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa  |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Kemudian Prioritas Pembangunan ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini.



Prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN) dan prioritas Provinsi Jawa Barat (PP), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.11

Persandingan Prioritas Nasional dan  
Prioritas Provinsi Jawa Barat Dengan Prioritas  
Kabupaten Majalengka

| PRIORITAS NASIONAL |   | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI JAWA BARAT |  | PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN<br>KABUPATEN<br>MAJALENGKA |  |
|--------------------|---|--|--|---|--|
| PN1                | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | PP3  | Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi                        | 5   | Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri                              |
|                    |   | PP4  | Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata              |   |  |
| PN2                | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan      | PP7  | Gerakan membangun desa (Gerbang desa)                            | 6   | Mewujudkan kemandirian desa  |
|                    |   | PP8  | Subsidi gratis golekmah  | 2   | Penanggulangan kemiskinan  |
|                    |   |  |  | 3   | Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor                           |
| PN3                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing             | PP1  | Akses pendidikan untuk semua                                     | 4   | Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi |
|                    |   | PP2  | Desentralisasi pelayanan kesehatan                               |   |  |
|                    |   | PP1  | Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 |   |  |



| PRIORITAS NASIONAL |  | PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT |  | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAJALENGKA |  |
|--------------------|--|---|--|--|--|
| PN4                | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan   | PP5                                       | Pendidikan agama dan tempat ibadah juara     | 1  | Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat                         |
| PN5                | Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pengembangan dasar | PP6                                       | Infrastruktur konektivitas wilayah           | 3  | Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor                           |
| PN6                | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim       | PP6                                       | Infrastruktur konektivitas wilayah           | 3  | Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor                           |
| PN7                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik                 | PP9                                       | Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah | 4  | Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

# **BAB VI**



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

#### **6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

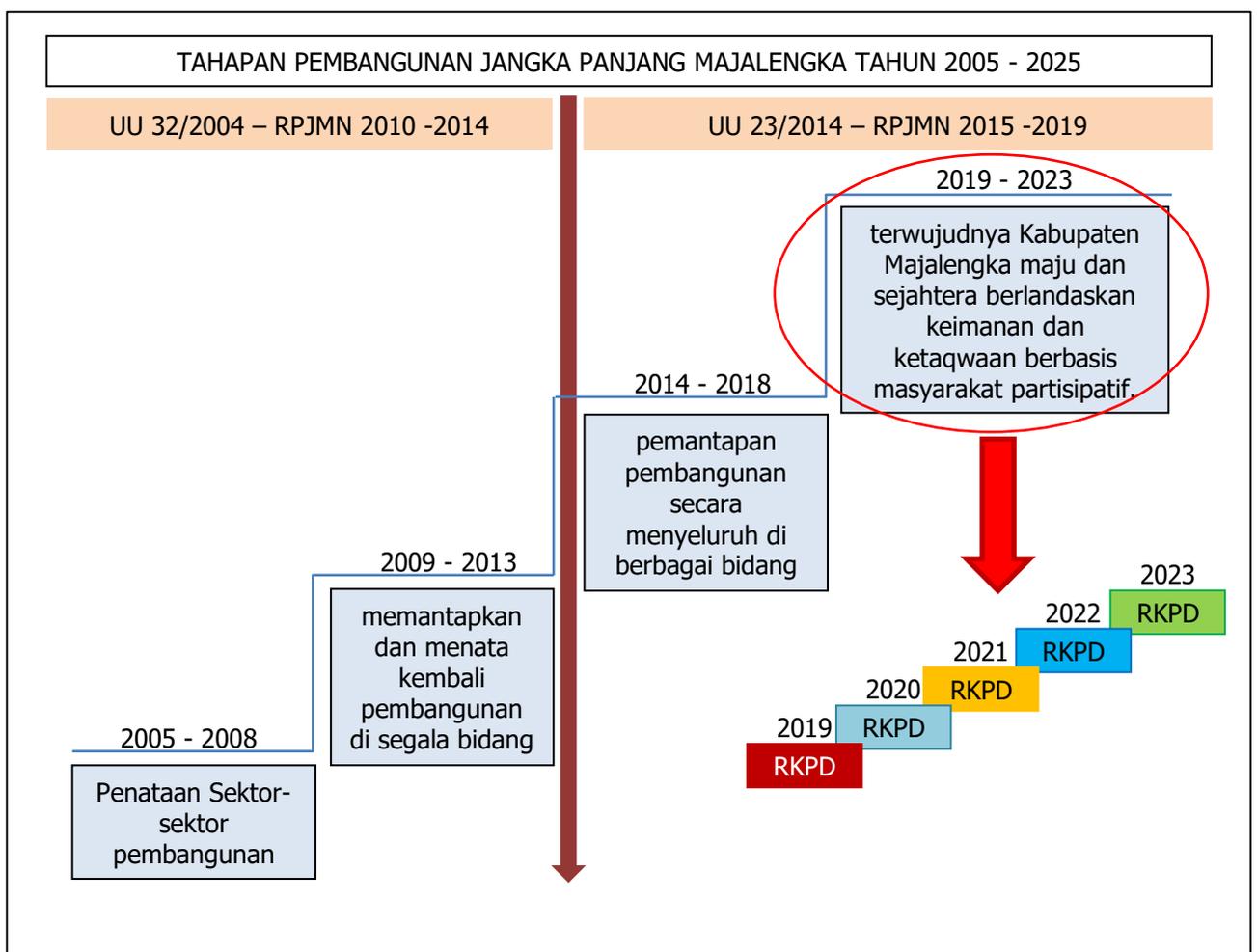
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, fokus pembangunan pada



periode 2018-2023 adalah “terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif.” Fokus ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Hal ini disajikan pada Gambar 6.1. di bawah ini.

**Gambar 6.1**  
**Posisi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD**



Apabila mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, terdapat beberapa hal yang ditekankan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1 berikut:



**Tabel 6.1.**  
**Kerangka Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025**

| <b>Misi RPJPD</b>   | <b>Bidang Pembangunan</b>  | <b>Penekanan pada Strategi &amp; Arah Kebijakan</b>   |
|---|--|---|
| 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). | Pendidikan, kesehatan, keagamaan, Kependudukan, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Sosial dan IPTEK. | Perlu adanya penekanan pada daya saing dan kemampuan/ <i>skill</i> SDM masyarakat Kabupaten Majalengka dalam berbagai aspek. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur Kabupaten Majalengka saat ini menuntut adaptasi masyarakat lokal sehingga mampu terserap di sektor industri dan berdaya secara sosial-ekonomi. |
| 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.   | Pertanian, Pangan, Industri, UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, dan Pariwisata.                                       | Dibutuhkan penekanan pada peningkatan kontribusi sektoral yang menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Majalengka di masa mendatang, seperti industri olahan dan jasa.  |
| 3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan..   | Transportasi, irigasi, Air Minum, Energi dan Telekomunikasi, Perumahan Rakyat, Persampahan, dan Tata Ruang.            | Perlu adanya penekanan pada aspek inklusifitas dan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan.   |
| 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik  | Aparatur Pemerintah, Hukum, dan Politik  | Perlu adanya penekanan pada peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.  |
| 5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup  | Lingkungan Hidup   | Perlu ditekankan bentuk peran aktif yang dapat dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.   |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat inherent dengan satu tema, sehingga satu strategi dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang



menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|---|---|--|---|
| <b>VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>  |   |  |   |
| <b>Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>  |   |  |   |
| 1.1. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat   | 1.1.1. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama             | 1.1.1.1. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama                     | 1. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama    |
| <b>Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>  |   |  |   |
| 2.1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor   | 2.1.1. Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor                        | 2.1.1.1. Akselerasi pembangunan berbasis sektor unggulan dan spasial                           | 1. Mengurangi disparitas/ kesenjangan antar Wilayah                         |
|   | 2.1.2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan   | 2.1.2.1. Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi keluarga miskin             | 1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin |
|   | 2.1.3. Penurunan Prevalensi Stunting  | 2.1.3.1. Aksi Konvergensi Penurunan stunting   | 1. Peningkatan gizi masyarakat  |
| 2.2. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat  | 2.2.1. Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | 2.2.1.1. Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat                        | 1. Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat                |
| <b>Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b> |   |  |   |
| 3.1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik   | 3.1.1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja  | 3.1.1.1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan | 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                     |



| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|---|--|--|---|
|   | 3.1.2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan                          | 3.1.2.1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah     | 1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah                       |
|   | 3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan public                      | 3.1.3.1. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | 1. Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik                  |
|   | 3.1.4. Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | 3.1.4.1. Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani     | 1. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN                       |
|   |  |  | 2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah                            |
| <b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b> |  |  |   |
| 4.1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing   | 4.1.1. Meningkatnya Mutu pendidikan                                | 4.1.1.1. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan HLS               | 1. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar                               |
|   |  |  | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama                    |
|   |  |  | 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal                                  |
|   |  |  | 4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan                       |
|   | 4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                   | 4.1.2.1. Menurunkan AKI dan AKB                                    | 1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)                   |
|   |  |  | 4.1.2.2. Peningkatan kualitas siklus kehidupan manusia                          |
|   | 4.1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman                 | 4.1.3.1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh          | 1. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh                                       |
|   |  |  | 2. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di permukiman kumuh |
|   | 4.1.4. Meningkatnya kesejahteraan petani                           | 4.1.4.1. Peningkatan pendapatan petani                             | 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian                      |



| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|---|---|--|--|
|   | 4.1.5. Meningkatkan kunjungan wisata                              | 4.1.6.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata | 1. Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata   |
|   | 4.1.7. Meningkatkan Investasi sektor Industri                     | 4.1.7.1. Penguatan Regulasi Investasi                        | 1. Memberikan Kemudahan pelayanan perizinan investasi  |
|   | 4.1.8. Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | 4.1.8.1. Mengembangkan potensi unggulan desa                 | 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi |
|   |   |  | 2. Mewujudkan Desa Wisata, desa digital, desa tematik kreatif, desa mandiri pangan                                       |
|   | 4.1.8.2. Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan           | 1. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan                    |  |
| <b>Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b> |   |  |  |
| 5.1. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa  | 5.1.1. Meningkatkan status kemajuan kemandirian desa              | 5.1.1.1. Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa     | 1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa  |
|   |   |  | 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa  |
|   |   |  | 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa  |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka.

Dalam mencapai Visi Misi Bupati terpilih periode 2018-2023 kan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Gerbang **TATA RAHARJA** (untuk satu tahun Pertama), yaitu gerakan membangun untuk mempersiapkan piranti-pirantu lunak dalam pembangunan, yang meliputi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, produk-produk hukum yang bersifat mengatur.
2. Gerbang **TANDANG RAHARJA** (untuk tahun ke dua), yaitu gerakan pembangunan untuk berbuat dengan mengaktualisasikan kerangka kebijakan ke dalam bentuk aktifitas program dan kegiatan dengan melibatkan seluruh sumber daya.
3. Gerbang **NYANDANG RAHARJA** (untuk tahun ke tiga), yaitu gerakan pembangunan yang didedikasikan untuk mewujudkan targetan-targetan awal pembangunan dengan disertai program evaluative terhadap kerangka kebijakan, metoda, dan piranti-piranti pembangunan lainnya dengan harapan tahapan berikutnya lebih sempurna.
4. Gerbang **MULIA RAHARJA** (untuk tahun ke empat dan ke lima), yaitu gerakan pembangunan yang diakselerasi dalam pencapaian targetan pembangunan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan fokus pembangunan yang akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pencapaian target sasaran pembangunan yang ditetapkan pada RPJMD untuk setiap tahunnya.

Penetapan tema RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif. Untuk mewujudkan fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Majalengka, maka tema pembangunan lima tahunan Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 adalah:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan pembangunan berkualitas;

2. Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah antar sektor melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi unggulan serta penanganan dampak Covid-19;
3. Pemantapan pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak Covid-19;
4. Pertumbuhan Perekonomian yang stabil dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dukungan Reformasi Struktural untuk memantapkan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial akibat Dampak Covid-19;
5. Pemantapan struktur ekonomi percepatan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

## **6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial**

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023. Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah:

1. Matra keruangan dari pembangunan daerah;
2. Adanya Rencana Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati;
3. Dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
5. Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
6. Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci;
7. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang.

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten Majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melalui sasaran:

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan;
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industri, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
3. Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
4. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang; dan
5. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Kebijakan penataan ruang disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi yang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

### **6.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang**

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas:

**1. Pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan logistik.** Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
- 2) Mengembangkan pusat industri, pertanian, pariwisata, dan logistik.

**2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan.**

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
- 2) Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
- 3) Mengembangkan sistem transportasi massal;
- 4) Meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
- 5) Meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.

**3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.**

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
- 2) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Mengembangkan prasarana energi/listrik;

- 4) Mengembangkan prasarana sumber daya air;
- 5) Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
- 6) Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
- 7) Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

### **6.2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan budidaya.

#### **1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung**

##### **1) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung**

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
- b. Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun;
- c. Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.

##### **2) Pelestarian kawasan cagar budaya**

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
- b. Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya.

##### **3) Penyediaan Kawasan yang berfungsi RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kabupaten dan Wilayah Perkotaan**

Dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
- b. Menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
- c. Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
- d. Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

#### **2. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budi Daya**

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi kebijakan: **pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya**

**dukung dan daya tampung lingkungan hidup**, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Pemantapan sistem agribisnis untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan;
- 2) Pengembangan kegiatan perikanan;
- 3) Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- 4) Pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
- 5) Pengembangan kegiatan logistik; dan
- 6) Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

### **6.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis**

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi kebijakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Majalengka dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

#### **A. Strategis pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**, meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan PKW Kadipaten;
2. Pengembangan Kawasan Potensial Cepat Tumbuh, meliputi: Sekitar Jalan Tembus Majalengka–Lemahsugih meliputi Majalengka, Maja, Bantarujeg Dan Leumahsugih; Dan Sekitar Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka Meliputi Kecamatan Panyingkiran, Cigasong, Majalengka;
3. Pengembangan Kawasan Sekitar BIJB;
4. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Leumahsugih;
5. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Sindangwangi (KAWITWANGI);
6. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Sindang, Argapura, Rajagaluh (WISAGAPURA);
7. Pengembangan Kawasan Terakota Jatiwangi; dan
8. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Perkotaan Majalengka.

**B. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:**

1. Pemantapan fungsi lindung Kawasan Sekitar Taman Nasional (TN) Gunung Ciremai;
2. Pengembangan Kawasan GIAHS NIAHS.

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Majalengka, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- Perhubungan : Pelabuhan udara, dan atau pelabuhan laut dan atau terminal tipe B
  - Ekonomi : Pasar induk regional
  - Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B
  - Pendidikan : Perguruan tinggi
- 2) Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung-Cirebon dan koridor Utara-Selatan, sehingga ruang kecamatan yang termasuk kedalam PKW Kadipaten, selain Kecamatan Kadipaten, adalah Kecamatan Dawuan.



- 3) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Namun demikian, dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen No. 16/PRT/M/2009 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Talaga.

- 4) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Banjaran, Leuwimunding, Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cingambul, Cikijing, dan Kecamatan Sindang.
- 5) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dengan kriteria sebagai berikut:
- Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
  - Melayani satu atau lebih desa;
  - Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan.



Untuk lebih jelasnya, rencana pengembangan pusat kegiatan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3  
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan  
di Kabupaten Majalengka

| PKW   | PKL  | PPK   | PPL  |
|---|--|---|--|
| 1. PKW Kadipaten (Perkotaan Kadipaten & Dawuan) | 1. PKL Majalengka<br>2. PKL Kertajati<br>3. PKL Talaga<br>4. PKL Rajagaluh<br>5. PKL Jatiwangi | 1. PPK Jatitujuh<br>2. PPK Kasokandel<br>3. PPK Ligung<br>4. PPK Sumberjaya<br>5. PPK Leuwimunding<br>6. PPK Palasah<br>7. PPK Argapura<br>8. PPK Sukahaji<br>9. PPK Sindangwangi<br>10. PPK Bantarujeg<br>11. PPK Lemahsugih<br>12. PPK Banjaran<br>13. PPK Maja<br>14. PPK Cigasong<br>15. PPK Panyingkiran<br>16. PPK Cikijing<br>17. PPK Sindang<br>18. PPK Cingambul<br>19. PPK Malausma | 1. PPL Pilangsari<br>2. PPL Kedungsari<br>3. PPL Gandawesi<br>4. PPL Cidenok<br>5. PPL Najasuka<br>6. PPL Sukaraja Wetan<br>7. PPL Panjiwetan<br>8. PPL Cijurey<br>9. PPL Tajur<br>10. PPL Karayunan<br>11. PPL Jayi<br>12. PPL Ciomas<br>13. PPL Pasirmulya<br>14. PPL Parakan<br>15. PPL Teja<br>16. PPL Padaherang<br>17. PPL Mekerwangi<br>18. PPL Sindangmulya<br>19. PPL Silihwangi<br>20. PPL Cipeundeuy<br>21. PPL Mekar wangi<br>22. PPL Sinargalih<br>23. PPL girimukti<br>24. PPL cimuncang<br>25. PPL Wangkelang<br>26. PPL sedaraja<br>27. PPL Cisoka<br>28. PPL Bayureja |

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2018.

Tabel 6.4  
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya  
di Kabupaten Majalengka

| STRUKTUR RUANG                | KECAMATAN  | FUNGSI   |
|-------------------------------|--|--|
| Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)  | Kadipaten (Kawasan Perkotaan Kadipaten & Dawuan) | Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industri   |
| Pusat Kegiatan Lokal (PKL)    | 1. Majalengka                                    | Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.     |
|                               | 2. Kertajati                                     | Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian.  |
|                               | 3. Talaga  | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional            |
|                               | 4. Rajagaluh                                     | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan. |
|                               | 5. Jatiwangi                                     | Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian.   |
| Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) | 1. Cigasong                                      | sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.                        |
|                               | 2. Panyingkiran                                  | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum serta pendukung kawasan komersial, perumahan, pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan.  |
|                               | 3. Cikijing                                      | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan                                       |



| STRUKTUR RUANG                   | KECAMATAN  | FUNGSI  |
|----------------------------------|--|---|
|                                  |  | perkotaan, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.  |
|                                  | 4. Jatitujuh   | Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri dan pendukung komersial, pertanian/peternakan dan perikanan.   |
|                                  | 5. Kasokandel  | Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan.   |
|                                  | 6. Ligung  | Sebagai kawasan pertahanan keamanan (Lanud S. Sukani), pengembangan industri dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.   |
|                                  | 7. Sumberjaya  | Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.   |
|                                  | 8. Leuwimunding  | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.  |
|                                  | 9. Palasah   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.   |
|                                  | 10. Argapura   | sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.                |
|                                  | 11. Sukahaji   | sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.                       |
|                                  | 12. Sindangwangi   | sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.                  |
|                                  | 13. Bantarujeg   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa   |
|                                  | 14. Lemahsugih   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.  |
|                                  | 15. Banjaran   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.                |
|                                  | 16. Maja   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.                 |
|                                  | 17. Sindang  | sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.             |
|                                  | 18. Cingambul  | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-desa.   |
|                                  | 19. Malausma   | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.  |
| Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | 1. Jatitujuh (Pilangsari)<br>2. Ligung (Kedungsari, Gandawesi)<br>3. Sumberjaya (Cidenok)<br>4. Palasah (Najasuka)<br>5. Jatiwangi (Sukaraja Wetan)<br>6. Kasokandel (Panjiwetan)<br>7. Panyingkiran (Cijurey)<br>8. Cigasong (Tajur, Karayunan) | Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan, pengembangan "home industri" yang melayani kegiatan skala antar desa. |



| STRUKTUR RUANG | KECAMATAN  | FUNGSI |
|----------------|--|--------|
|                | 9. Sukahaji (Jayi, Ciomas)<br>10. Banjaran (Parimulya)<br>11. Leuwimunding (Parakan)<br>12. Rajagaluh (Teja)<br>13. Sindangwangi (Padaherang)<br>14. Argapura (Mekarwangi)<br>15. Maja (Sindangmulya)<br>16. Bantarujeg (Siliwangi, Cepeundey)<br>17. Lemahsugih (Mekarwangi, Sinargalih)<br>18. Malausma (Girimukti, Cimuncang)<br>19. Cingambul (Wangkelang, Sedareja)<br>20. Cikijing (Cisoka)<br>21. Sindang (Banyureja) |        |

Sumber: Hasil Analisis

Catatan: Di setiap kecamatan diupayakan ada pusat-pusat komersial, pusat komersial ini didasarkan kepada kebutuhan standar pelayanan minimal.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan atas pertimbangan potensi pengembangan, batasan dan daya dukung lingkungan, serta kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan lainnya, yang meliputi:

**1. KAWASAN LINDUNG**

- 1) SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 87/IV-SET/2015 tentang Zonasi TN Gunung Ciremai;
- 3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 4) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 5) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 6) Peta Kawasan Rawan Bencana (PVMBG Tahun 2016);
- 7) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan.

**2. KAWASAN BUDIDAYA**

- 1) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 2) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;



- 3) Potensi Pengembangan (Pertanian, Wisata, Pertambangan, Industri, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dll);
- 4) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan;
- 5) Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka Tahun 2017;
- 6) Masterplan BIJB dan Kertajati Aerocity.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.5  
Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

| NO.       | POLA RUANG  | LUAS (HA)         | %             |
|-----------|---|-------------------|---------------|
| <b>A</b>  | <b>KAWASAN LINDUNG</b>                                  | <b>20.559,49</b>  | <b>15,30</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b> | <b>8.140,51</b>   | <b>6,06</b>   |
|           | Hutan Lindung   | 5.358,40          | 3,99          |
|           | Resapan Air   | 2.782,11          | 2,07          |
| <b>2</b>  | <b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>                    | <b>4.468,29</b>   | <b>3,33</b>   |
|           | Sempadan Sungai   | 4.444,09          | 3,31          |
|           | Sekitar Danau atau Waduk                                | 24,20             | 0,02          |
| <b>3</b>  | <b>Kawasan Konservasi</b>                               | <b>6.037,01</b>   | <b>4,49</b>   |
|           | Taman Nasional Gunung Ceremai                           | 6.037,01          | 4,49          |
| <b>4</b>  | <b>Kawasan Lindung Geologi</b>                          | <b>1.913,68</b>   | <b>1,42</b>   |
|           | Sempadan Mata Air                                       | 1.913,68          | 1,42          |
| <b>5</b>  | <b>Kawasan Rawan Bencana</b>                            | <b>44.301,26</b>  | <b>32,98</b>  |
|           | Rawan Bencana Gempa Bumi                                | 25.004,96         | 18,61         |
|           | Rawan Bencana Gerakan Tanah                             | 6.667,04          | 4,96          |
|           | Rawan Bencana Gunung Api I                              | 2.974,33          | 2,21          |
|           | Rawan Bencana Gunung Api II                             | 2.951,72          | 2,20          |
|           | Rawan Bencana Gunung Api III                            | 177,70            | 0,13          |
|           | Rawan Bencana Banjir                                    | 6.525,51          | 4,86          |
| <b>B</b>  | <b>KAWASAN BUDIDAYA</b>                                 | <b>113.781,33</b> | <b>84,70</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Kawasan Hutan Produksi</b>                           | <b>15.581,86</b>  | <b>11,60</b>  |
|           | Hutan Produksi Tetap                                    | 14.142,51         | 10,53         |
|           | Hutan Produksi Terbatas                                 | 1.439,35          | 1,07          |
| <b>2</b>  | <b>Kawasan Hutan Rakyat</b>                             | <b>6.513,48</b>   | <b>4,85</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Kawasan Pertanian</b>                                | <b>38.589,59</b>  | <b>28,73</b>  |
|           | Pertanian Tanaman Pangan                                | 30.239,55         | 22,51         |
|           | Pertanian Holtikultura                                  | 7.518,15          | 5,60          |
|           | Perikanan   | 831,83            | 0,62          |
| <b>4</b>  | <b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>                  | <b>880,10</b>     | <b>0,66</b>   |
|           | Pertambangan Mineral                                    | 880,10            | 0,66          |
| <b>5</b>  | <b>Kawasan Industri</b>                                 | <b>3.077,71</b>   | <b>2,29</b>   |
|           | Kawasan Industri  | 1.723,78          | 1,35          |
|           | Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)              | 8,24              | 0,01          |
|           | Industri  | 1.063,11          | 0,94          |
| <b>6</b>  | <b>Kawasan Permukiman</b>                               | <b>40.303,86</b>  | <b>30,00</b>  |
|           | Kawasan Permukiman Perkotaan                            | 14.704,62         | 10,43         |
|           | Kawasan Permukiman Perdesaan                            | 23.667,17         | 19,57         |
| <b>7</b>  | <b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>                  | <b>56,97</b>      | <b>0,56</b>   |
| <b>8</b>  | <b>Kawasan Aerocity</b>                                 | <b>3.480,00</b>   | <b>2,29</b>   |
| <b>9</b>  | <b>Kawasan Bandara BIJB</b>                             | <b>1.800,00</b>   | <b>1,34</b>   |
| <b>10</b> | <b>Kawasan Aerotropolis</b>                             | <b>5.693,52</b>   | <b>4,68</b>   |
| <b>11</b> | <b>Jalan</b>  | <b>325,27</b>     | <b>0,24</b>   |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>134.650,71</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031

Dari tabel di atas, bahwa arahan rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 20.559,49 Ha atau sekitar 15,30% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan luas arahan rencana pola ruang kawasan budi daya di

Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 113.781,33 Ha atau sekitar 84,70% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Majalengka, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 diarahkan untuk:

1. Pembangunan wilayah berorientasi pada kebijakan pengembangan wilayah, mengakomodasi sektor unggulan, dan menciptakan konektivitas wilayah. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Majalengka terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, kawasan hutan dan lahan pertanian pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.
2. Pembangunan sektoral selaras dengan pembangunan wilayah, memastikan sinkronisasi dengan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang tercantum dalam RTRW dan RPJMD, mewujudkan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pembangunan sektoral mewujudkan efektivitas pengelolaan pembangunan, efektivitas fungsi pusat-pusat kegiatan (sarana dan prasarana minimal pelayanan publik), serta menerapkan kaidah konservasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2029, yang berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* pembangunan di Majalengka.

### **C. Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RPJMN**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi pembangunan nasional. Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024), pembangunan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam RPJMN 2020-

2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa Barat Khususnya Kabupaten Majalengka dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan beberapa lokasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, maka dilakukan keselarasan antara proyek prioritas RPJMN di Jawa Barat dengan rencana program perangkat daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kebijakan kewilayahan yang diarahkan untuk Kabupaten Majalengka pada RPJMN didukung dengan program perangkat daerah pada Perubahan RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2023 sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Terdapat beberapa proyek prioritas di RPJMN pada tabel di bawah yang tidak didukung dengan program di Perubahan RPJMD sebab bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, namun kewenangan K/L.

Tabel 6.6  
Keselarasan Program Perangkat Daerah dalam Perubahan RPJMD  
dengan Program Prioritas dalam RPJMN

| No. | RPJMN  |  |  | Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat   | Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka  |
|-----|--|--|--|---|---|
|     | PP/KP/Proyek Prioritas Nasional  | Lokasi   | Program  | Program   | Program   |
| 1   | KP 2 : Pengembangan Sektor Unggulan  |  |  |   |   |
|     | Pengembangan komoditas unggulan Tebu   |  |  |   |   |
|     | Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)  | Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang  | Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan            | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| 2   | KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigras |  |  |   |   |
|     | Pembangunan Desa Terpadu   | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, | 1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa<br>2.Bina Pemerintahan Desa |   |   |



| No. | RPJMN  |   |  | Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat   | Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka  |
|-----|--|---|--|---|---|
|     | PP/KP/Proyek Prioritas Nasional                                      | Lokasi  | Program  | Program   | Program   |
|     |  | Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung Halimun Ciletuh  |  |   |   |
|     | Desa Digital (P3PD)  | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa   | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
|     | Penetapan Batas Desa   | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa                         | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |
|     | Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                    | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                    |
|     | BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa        | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis,  | Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |



| No. | RPJMN  |   |  | Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat   | Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka  |
|-----|--|---|--|---|---|
|     | PP/KP/Proyek Prioritas Nasional  | Lokasi  | Program                                      | Program   | Program   |
|     |  | Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya  |  |   |   |
|     | Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa                       | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |
|     |  |   |  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
|     | Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)   | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa                       | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
|     | Pendampingan pada 74.957 Desa  | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |



| No. | RPJMN  |   |  | Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat   | Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka  |
|-----|--|---|--|---|---|
|     | PP/KP/Proyek Prioritas Nasional                                      | Lokasi  | Program  | Program   | Program   |
|     | Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa        | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa                         | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |
|     | Pengendalian Penggunaan Dana Desa                                    | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |
|     | Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya | Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
|     | Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa                              | Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka  | Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

### **6.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023**

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018-2023.

Terdapat 6 (enam) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 meliputi

#### **1. Peningkatan Nilai-Nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat;**

Berdasarkan tingkat prioritas yang ada maka peningkatan Nilai-Nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat merupakan prioritas pertama dalam prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD ini. Hal ini sesuai dengan visi “Majalengka Raharja” yang dicetuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati Majalengka yaitu dalam aspek religius dimana seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai. Selain itu hal ini diwujudkan juga dalam program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Majalengka yaitu pemberian insentif guru ngaji , imam masjid, dan bantuan sarana keagamaan. Selain itu terdapat juga arah kebijakan mengaplikasikan pendidikan agama dalam sekolah formal sebagai muatan lokal dan penguatan kualitas dan kuantitas Majelis Taklim sebagai penjaga nilai-nilai kemasyarakatan.

#### **2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor**

Tujuan prioritas pembangunan ini sebagai prioritas kedua dalam RPJMD untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan antar sektor dari setiap wilayah dan setiap sektor yang ada di Kabupaten Majalengka. Dimana sesuai dengan tujuan dari misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Majalengka yaitu mewujudkan aktivitas pembangunan merata dalam linkage komprehensif berdasarkan potensi masing-masing wilayah (keadilan teritorial). Sebagai contoh

pembangunan RSUD Talaga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Majalengka bagian selatan dimana saat ini baru terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Majalengka yaitu RSUD Cideres untuk melayani kesehatan Masyarakat Kawasan Majalengka bagian Utara, RSUD Majalengka untuk Kawasan Majalengka bagian Tengah. Kondisi eksisting saat ini ditunjukkan oleh indeks gini Kabupaten Majalengka yang selalu menurun setiap tahunnya dimana tahun 2017 menyentuh angka 0.351, pada tahun 2018 0.337, lalu tahun 2019 0.331 dimana dengan adanya prioritas program ini dalam RPJMD turut berkontribusi dalam menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor Kabupaten Majalengka.

### **3. Penanggulangan Kemiskinan**

Secara eksisting kondisi kemiskinan di Kabupaten Majalengka selalu menunjukkan penurunan berdasarkan data persentase penduduk miskin pada tahun 2017 menunjukkan angka 12.6%, tahun 2018 menyentuh angka 10.79%, tahun 2019 sebesar 10.06% dimana tren tersebut selalu menunjukkan penurunan setiap tahunnya berkat dampak dari prioritas program ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi Kabupaten Majalengka. Untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan *refocusing* dan realokasi dengan *safety net* yaitu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan miskin serta mengantisipasi gejolak sosial. Selain itu terdapat inovasi “rantang kanyaah” yaitu sebuah program prioritas pengentasan kemiskinan yang menjadi komitmen Bapak Bupati sebagai upaya pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) tidak mampu, tidak berdaya dan sebatang kara di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya program tersebut diharapkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka terus menurun setiap tahunnya.

#### **4. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industri;**

Pariwisata, pertanian dan industri merupakan beberapa sektor unggulan yang ada di Kabupaten Majalengka yang harus dioptimalkan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sektor unggulan pariwisata diantaranya:

- 1) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- 2) Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan kemajuan kawasan-kawasan wisata alam maupun buatan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Selain pariwisata, dalam sektor unggulan pertanian dilakukan beberapa program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pertanian di Kabupaten Majalengka yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- 5) Program Penyuluhan Pertanian.
- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Terakhir sektor unggulan industri juga menjadi perhatian dikarenakan banyak pabrik-pabrik industri yang baru maupun baru masuk perizinannya yang diperkirakan di masa yang akan datang kawasan industri akan semakin menjamur di Kabupaten Majalengka salah satunya karena keberadaan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat). Program yang dilakukan di bidang industri ini yaitu Program perencanaan dan pembangunan industri.

Dengan adanya 3 sektor unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Majalengka.

#### **5. Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi;**

Kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

membutuhkan pelayanan publik untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa program yang dilakukan dari pelayanan publik di sektor pendidikan adalah:

- 1) Program pengelolaan pendidikan.
- 2) Program pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan adanya kedua program prioritas di bidang pendidikan ini diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Majalengka lebih baik lagi.

Di bidang kesehatan terdapat beberapa inovasi seperti “Puskesmas Nganjang Ka Imah” yaitu pelayanan kesehatan *door to door* dan pelayanan rumah sakit online Rumah sakit umum Majalengka guna memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat dan mengurangi kerumunan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Beberapa program yang dilakukan di bidang kesehatan ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pada bidang reformasi birokrasi juga terdapat beberapa inovasi seperti pelayanan pengaduan masyarakat secara online dan aplikasi e-raharja untuk ASN berupa penilaian kedisiplinan dan kinerja ASN. Berikut beberapa program terkait reformasi birokrasi:

- 1) Program kepegawaian daerah;
- 2) Program pengembangan sumber daya manusia.

## **6. Mewujudkan kemandirian desa**

Desa merupakan skala kawasan terkecil dalam kabupaten yang harus memiliki kemandirian desa tanpa tergantung dengan pemerintah. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung prioritas program ini adalah:

- 1) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- 2) Program administrasi pemerintahan desa
- 3) Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Dengan program tersebut maka diharapkan terjadi kemandirian desa dari 330 desa dan 13 kelurahan. Terdapat pula pengembangan wilayah unggulan melalui *one village one product* guna memicu banyak produk unggulan yang berbeda antar desa dan kelurahan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.



Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun penjelasan lebih rinci terkait indikasi program dan kegiatan prioritas di atas, dijelaskan pada tabel berikut ini:



Tabel 6.7

Indikasi Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2023

| PRIORITAS   | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                  |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN   |
|---|--|--|--|--|
|   | NOMENKLATUR PROGRAM                              | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
| 1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat | 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                  | 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | 1. Penanaman aktivitas yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.<br>2. Pemberian insentif guru ngaji, imam masjid, dan bantuan sarana keagamaan.<br>3. Penerapan pendidikan agama dalam sekolah formal sebagai muatan lokal dan penguatan kualitas dan kuantitas Majelis Taklim sebagai penjaga nilai-nilai kemasyarakatan. |
|   |  |  | 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     |  |
|   |  |  | 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |  |
| 2. Penanggulangan Kemiskinan  | 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial       | 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 1. Penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 dengan melakukan refocusing dan realokasi dengan <i>safety net</i> yaitu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan miskin serta mengantisipasi gejala sosial<br>2. Pembentukan inovasi “rantang kanyaah” yaitu sebuah program prioritas pengentasan kemiskinan yang menjadi komitmen Bapak  |
|   |  |  | 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           |  |
|   |  |  | 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                      |  |
|   |  |  | 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                    |  |



| PRIORITAS  | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020   |   |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  |
|--|-----------------------------------|---|--|---|
|  | NOMENKLATUR PROGRAM               | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |   |
|  | 2. Program Rehabilitasi Sosial    | 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Penyediaan Permakanan   | Bupati sebagai upaya pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) tidak mampu, tidak berdaya dan sebatang kara di Kabupaten Majalengka |
|  |                                   |   | 2. Penyediaan Alat Bantu   |   |
|  |                                   |   | 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |   |
|  |                                   |   | 4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |   |
|  | 3. Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | 1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  |   |
|  |                                   |   | 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD   |   |
|  |                                   |   | 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD  |   |
|  |                                   |   | 4. Pengelolaan Dana BOP PAUD   |   |
|  |                                   | 2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | 1. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan   |   |
|  |                                   |   | 2. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan   |   |
| 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                   |   |  |   |
| 4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                       |                                   |   |  |   |



| PRIORITAS  | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020  |   |   | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|--|--|---|---|--|
|  | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN  |  |
|  | 4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                  | 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi               |  |
|  | 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   |  |
|  |  |   | 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro   |  |
|  | 6. Program Kawasan Permukiman  | 1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman  | 1. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh |  |
|  | 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                   | 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                           |  |
|  | 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | 1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   |  |
| 2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak  |   |  |



| PRIORITAS  | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020  |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN   |
|--|--|--|--|--|
|  | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
| 3.Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor | 1.Program Penyelenggaraan Jalan  | 1.Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota  | 1.Rekonstruksi Jalan   | Perwujudan aktivitas pembangunan merata dalam linkage komprehensif berdasarkan potensi masing-masing wilayah<br>Penurunan poin indeks gini |
|  |  |  | 2.Rehabilitasi Jalan   |  |
|  |  |  | 3.Pemeliharaan Berkala Jalan   |  |
|  |  |  | 4.Pembangunan Jembatan   |  |
|  |  |  | 5.Rehabilitasi Jembatan  |  |
|  |  |  | 6.Pemeliharaan Rutin Jembatan  |  |
|  | 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya      |  |
|  |  |  | 2.Pembangunan Puskesmas  |  |
|  |  |  | 3.Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan        |  |
|  | 3.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                            | 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                   | 1.Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                               |  |
|  |  |  | 2.Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                   |  |
|  | 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)               | 1.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | 1.Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                    |  |
|  |  |  | 2.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  |  |
|  |  | 2.Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | 1.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) |  |
|  |  |  | 1. Pembangunan TPA/TPST/ SPA/ TPS3R/TPS                                  |  |
| 5. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional  | 1.Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota     | 2. Penyediaan Sarana Persampahan   |  |  |



| PRIORITAS   | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                        |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  |
|---|--|--|--|---|
|   | NOMENKLATUR PROGRAM                                    | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |   |
|   | 6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 1. Pelayanan Informasi Publik  |   |
|   | 7. Program Aplikasi Informatika                        | 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                     |   |
|   |  |  | 2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik<br>3. Layanan Hubungan Media                            |   |
| 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi | 1. Program Pengelolaan Pendidikan                      | 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 1. Penambahan Ruang Kelas Baru   | 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik untuk kehidupan sehari-hari.<br>2. Pembentukan inovasi “Puskesmas Nganjang Ka Imah” yaitu pelayanan kesehatan door to door dan pelayanan rumah sakit online Rumah sakit umum Majalengka guna memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat dan mengurangi kerumunan untuk menekan penyebaran virus Covid-19<br>3. Pembuatan inovasi seperti pelayanan pengaduan masyarakat secara online dan aplikasi e-raharja untuk ASN berupa penilaian kedisiplinan dan kinerja ASN. |
|   |  |  | 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  |   |
|   |  |  | 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            |   |
|   |  |  | 4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  |   |
|   |  | 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 1. Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah  |   |
|   |  |  | 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  |   |
|   |  |  | 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |   |
|   |  |  | 4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |   |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020  |   |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|--|---|--|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
|           | 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | 1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan     |  |
|           |  |   | 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |
|           | 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |  |
|           |  |   | 2. Pengadaan Obat, Vaksin  |  |
|           |  |   | 3. Pengadaan Bahan Habis Pakai   |  |
|           | 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan  | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal  | 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |  |
|           |  |   | 2. Reviu Laporan Kinerja   |  |
|           |  | 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | 1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   |  |
|           |  |   | 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  |  |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020   |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|--|--|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM   | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
|           | 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                  |  | 2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota             |  |
|           |   | 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|           |   |  | 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                 |  |
|           |   | 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota              |  |
|           | 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |
|           |   | 4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah        | 1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  |
|           | 6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika   | 1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|           |   |  | 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  |  |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020  |  |   | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|--|--|---|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN                                 | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN  |  |
|           |  |  | 3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   |  |
|           |  |  | 4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                                       |  |
|           |  |  | 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE   |  |
|           | 7.Program Penyelenggaraan Pengawasan   | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal               | 1. Reviu Laporan Keuangan   |  |
|           |  |  | 2. Pengawasan Desa  |  |
|           | 3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  |   |  |
|           |  | 2.Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah   |  |
|           | 8.Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   |  |
|           |  |  | 2. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah   |  |
|           |  | 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  |  |
|           |  |  | 2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait |  |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020             |   |   | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|---|---|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM                         | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN  |  |
|           |   | 3. Koordinasi dan Pelaksanaan kuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah            | 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |  |
|           |   |   | 2. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah      |  |
|           |   | 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                      | 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan   |  |
|           |   |   | 2. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota   |  |
|           | 9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  | 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah  | 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah   |  |
|           |   |   | 2. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |  |
|           | 10. Program Informasi dan Komunikasi Publik | 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  |  |
|           |   |   | 2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                   |  |
|           | 11. Program Pendaftaran Penduduk            | 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                 |  |
|           |   |   | 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                           |  |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020       |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM                   | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
|           |                                       | 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  | 1. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk  |  |
|           |                                       | 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   | 1. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk   |  |
|           | 12. Program Pencatatan Sipil          | 1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  | 1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil        |  |
|           |                                       |  | 2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                 |  |
|           |                                       | 2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | 1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil   |  |
|           | 13. Program Pelayanan Penanaman Modal | 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  |
|           |                                       |  | 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan           |  |



| PRIORITAS  | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020  |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  |
|--|--|--|--|---|
|  | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |   |
|  |  |  | 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah              |   |
|  | 14. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                      | 1. Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Majalengka)                              |   |
|  | 15. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                      | 1. Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1.Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Cideres)                                  |   |
| 5. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industry | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota | 1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan   | 1. Peningkatan kemajuan kawasan-kawasan wisata alam maupun buatan yang ada di Kabupaten Majalengka.<br>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan pertanian di Kabupaten Majalengka<br>3. Pengembangan Perencanaan dan Pembangunan Industri untuk mendukung adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) |
|  | 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  | 1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  | 1.Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           |   |
|  |  |  | 2.Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |
|  | 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | 2.Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten Kota       | 1.Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                 |   |
|  |  |  | 2.Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   |   |
|  |  |  | 3.Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  |   |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                            |  |   | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |
|-----------|--|--|---|--|---|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN  |  |   |
|           |  | 3.Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota             | 1.Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil |  |   |
|           |  | 4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                   |  | 2.Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak     |
|           |  |  | 1.Pengembangan Prasarana Pertanian  |  |   |
|           | 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 2.Pembangunan Prasarana Pertanian  | 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.        |  | 1.Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani |
|           |  |  | 1.Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani              |  |   |
|           |  |  | 3.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                      |  |   |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                              |  |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|--|--|--|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM  | NOMENKLATUR KEGIATAN   | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
|           |  |  | 4.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan                                    |  |
|           |  |  | 5.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya |  |
|           | 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 1.Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota   | 1.Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan    |  |
|           | 6. Program Penyuluhan Pertanian                              | 1.Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | 1.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                     |  |
|           |  |  | 2.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                  |  |
|           |  |  | 3.Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                             |  |
|           |  |  | 4.Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota              |  |
|           | 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air                       | 1.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 | 1.Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   |  |
|           |  |  | 2.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  |  |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                                     |   |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|---|--|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM   | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
|           |   | Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan<br>4. Operasional Unit Pengelola Irigasi<br>5. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi |  |
|           | 8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                | 1. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya          | 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  |  |
|           | 9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata              | 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | 1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   |  |
|           |   | 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |  |
|           | 10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif  |  |
|           |   | 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif  | 1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif   |  |
|           | 11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                    | 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                | 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri   |  |
|           |   |   | 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |  |
|           | 12. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                      | 1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang   |  |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                         |   |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|---|--|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM                                     | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN   |  |
|           |   |   | Usaha Kabupaten/Kota   |  |
|           | 13. Program Promosi Pelayanan Penanaman Modal           | 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabuapten /Kota   |  |
|           | 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan                 | 1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |
|           |   | 2. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                              | 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan  |  |
|           | 15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                | 1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   |  |
|           |   |   | 2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  |  |
|           |   | 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota                         | 1. Pengelolaan Investasi Pariwisata  |  |
|           | 16. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan        |  |
|           |   |   | 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan  |  |



| PRIORITAS  | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020           |   |  | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  |
|--|---|---|--|---|
|  | NOMENKLATUR PROGRAM                       | NOMENKLATUR KEGIATAN  | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN                                     |   |
|  |   |   | Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                 |   |
| 6. Mewujudkan Kemandirian Desa   | 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan     | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal  | 1. Pengawasan Desa   | 1. Perwujudan kemandirian desa tanpa tergantung dengan pemerintah<br>2. Pengembangan wilayah unggulan melalui <i>one village one product</i> guna memicu banyak produk unggulan yang berbeda antar desa dan kelurahan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa |
|  | 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |   |
|  |   |   | 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                      |   |
| 3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa              |   |   |  |   |
| 4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |   |   |  |   |
| 5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |   |   |  |   |
| 6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa              |   |   |  |   |
| 7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  |   |   |  |   |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                    | 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |  |   |



| PRIORITAS | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                      |   | INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---------------------------------|----------------------|---|--|
|           | NOMENKLATUR PROGRAM             | NOMENKLATUR KEGIATAN | NOMENKLATUR SUB KEGIATAN  |  |
|           |                                 |                      | 2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

# **BAB VII**



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### **7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Pengelolaan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:



- a. Prioritas Daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas bupati dan wakil bupati juga termasuk hal tersebut.
- b. Prioritas Perangkat Daerah, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
- c. Prioritas Reguler, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

Adapun kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka yang telah menerapkan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2023, disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Majalengka Tahun 2019-2020  
(Struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005)

| NO.       | URAIAN                       | TAHUN 2019                  | TAHUN 2020                  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>BELANJA DAERAH</b>        | <b>3.013.041.916.154,95</b> | <b>2.687.140.744.076,00</b> |
| <b>A.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>       | <b>1.853.346.176.044,95</b> | <b>1.871.399.832.597,00</b> |
|           | a. Belanja Pegawai           | 1.254.285.715.876,00        | 1.202.589.347.980,00        |
|           | b. Belanja Barang dan Jasa   | 567.090.560.168,95          | 601.470.484.617,00          |
|           | c. Belanja Bunga             | -                           | -                           |
|           | d. Belanja Subsidi           | -                           | -                           |
|           | e. Belanja Hibah             | 28.854.900.000,00           | 30.840.000.000,00           |
|           | f. Belanja Bantuan Sosial    | 3.115.000.000,00            | 36.500.000.000,00           |
| <b>B.</b> | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>643.663.697.855,00</b>   | <b>792.443.784.762,00</b>   |
| <b>C.</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | 0                           | 23.297.126.717,00           |
| <b>D.</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>516.032.042.255,00</b>   | <b>538.029.230.300,00</b>   |
|           | Belanja Bagi Hasil           | 13.371.277.500,00           | 11.868.502.000,00           |
|           | Belanja Bantuan Keuangan     | 502.660.764.755,00          | 526.160.728.300,00          |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>        | <b>3.013.041.916.154,95</b> | <b>3.225.169.974.376,00</b> |

Sumber: BKAD Kab Majalengka, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kab Majalengka Tahun 2018-2023



Tabel 7.2  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023  
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

| No.       | Uraian                       | Proyeksi                    |                             |                             |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |                              | 2021                        | 2022                        | 2023                        |
| <b>I.</b> | <b>BELANJA DAERAH</b>        | <b>3.555.270.205.280,00</b> | <b>3.678.810.933.669,00</b> | <b>3.890.497.245.950,00</b> |
| <b>A.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>       | <b>2.129.605.510.232,00</b> | <b>2.165.092.115.804,00</b> | <b>2.202.044.988.400,00</b> |
|           | a. Belanja Pegawai           | 1.276.602.409.551,00        | 1.332.603.535.964,00        | 1.350.500.450.900,00        |
|           | b. Belanja Barang dan Jasa   | 811.008.994.181,00          | 783.543.048.840,00          | 800.444.212.500,00          |
|           | c. Belanja Bunga             | -                           | -                           | -                           |
|           | d. Belanja Subsidi           | -                           | -                           | -                           |
|           | e. Belanja Hibah             | 32.805.106.500,00           | 40.365.531.000,00           | 41.100.325.000,00           |
|           | f. Belanja Bantuan Sosial    | 9.189.000.000,00            | 8.580.000.000,00            | 10.000.000.000,00           |
|           |                              |                             |                             |                             |
| <b>B.</b> | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>882.946.833.259,00</b>   | <b>957.238.867.773,00</b>   | <b>1.115.639.096.600,00</b> |
| <b>C.</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    | <b>10.000.000.000,00</b>    |
| <b>D.</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>532.717.861.789,00</b>   | <b>546.479.950.092,00</b>   | <b>562.613.160.950,00</b>   |
|           | a. Belanja Bagi Hasil        | 19.829.136.989,00           | 21.766.833.369,00           | 22.212.910.450,00           |
|           | b. Belanja Bantuan Keuangan  | 512.888.724.800,00          | 524.713.116.523,00          | 540.600.250.500,00          |
|           |                              |                             |                             |                             |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>        | <b>3.555.270.205.280,00</b> | <b>3.378.810.933.669,00</b> | <b>3.890.497.245.950,00</b> |

Sumber: BKAD Kab Majalengka, diolah Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kab Majalengka Tahun 2018-2023



## 7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi COVID-19.
3. Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Program perangkat daerah Kabupaten Majalengka merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu program perangkat daerah Tahun 2019, program perangkat daerah Tahun 2020, dan program perangkat daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019 pada Tahun 2018, sebelum RPJMD ditetapkan pada Maret 2019. Program-program Tahun 2019 selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah.



2. Program Tahun 2020 dan 2021 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Program-program Tahun 2020 dijabarkan kedalam berbagai kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah.
3. Program Tahun 2022 dan 2023 merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang baru maka indikator kinerja juga mengalami penyesuaian dengan *outcome* dan *output* yang akan dihasilkan atau dicapai. Namun tetap mengutamakan penggunaan indikator kinerja program (dan kegiatan pada Perubahan Renstra PD) yang telah digunakan pada tahun 2020. Kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam masing-masing Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai pendanaan indikatif Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 7.3  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019

| NO.  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH             | INDIKATOR KINERJA                                 | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT DAERAH |
|--|---|---|--------|-----------------|------------|------------------|
|  |   |   |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b> |   |   |        |                 |            |                  |
| <b>PENDIDIKAN</b>  |   |   |        |                 |            |                  |
| 1  | Program Peningkatan Prestasi Masyarakat                             | Peningkatan Jumlah Prestasi Masyarakat            | Persen | 10,00           | 1.346,04   | Disdik           |
| 2  | Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat                           | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                | Persen | 25,00           | 3.165,26   | Disdik           |
| 3  | Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan                            | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal            | Persen | 80,00           | 8.737,11   | Disdik           |
| 4  | Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal | Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah         | Persen | 40,00           | 1.821,11   | Disdik           |
| 5  | Program Pendidikan PAUD   | Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan PAUD       | Persen | 85,00           | 2.147,25   | Disdik           |
| 6  | Program Pendidikan Non Formal                                       | Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Kesetaraan | Persen | 90,00           | 1.763,91   | Disdik           |
| 7  | Program Pendidikan Dasar  | Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Dasar      | Persen | 75,00           | 134.604,44 | Disdik           |
| 8  | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran          | bulan  | 12              | 3.165,26   | Disdik           |



| NO.   | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH       | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---|--|---|--------|-----------------|------------|---------------------|
|   |  |   |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| <b>KESEHATAN</b>  |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga                         | Terpenuhinya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)                            | Persen | 100             | 3.793,47   | Dinkes              |
| 2   | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan                | Terpenuhinya Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan | Persen | 80,00           | 1.146,23   | Dinkes              |
| 3   | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan                                | Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan             | Persen | 60,00           | 21.776,70  | Dinkes              |
| 4   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                               | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur  | Persen | 25,00           | 119,00     | Dinkes              |
| 5   | Program Administrasi Perkantoran                                       | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                  | bulan  | 12              | 3.165,26   | Dinkes              |
| 6   | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan                | Adanya Gedung Rawat Jalan Yang Representatif                              | Unit   | 1               | 133.135,89 | Rsud Majalengka     |
| 7   | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka | Terlaksananya Pembinaan Lingkungan social                                 | Persen | 100             | 50.357,07  | Rsud Majalengka     |
| 8   | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan                | Terpenuhinya Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan | Persen | 100             | 122.357,07 | Rsud Cideres        |
| <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                        |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik                    | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                 | Persen | 25,00           | 1.840,00   | Dinas BMCK          |
| 2   | Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan                    | Kelancaran Mobilitas Orang, Barang Dan Jasa                               | Persen | 30,00           | 248.277,71 | Dinas BMCK          |
| 3   | Program Pengendalian Tata Ruang  | Indikator Kinerja Tata Ruang  | Persen | 25,00           | 2.600,00   | Dinas BMCK          |
| 4   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik                | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 12.309,61  | Dinas BMCK          |
| 5   | Program Perencanaan Tata Ruang   | Tersedianya Regulasi Tata Ruang   | Persen | 50,00           | 2.450,00   | Dinas BMCK          |
| 6   | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan                          | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat                               | Persen | 30,00           | 116.222,38 | Dinas PPSDA         |
| 7   | Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan                    | Kelancaran Mobilitas Orang, Barang Dan Jasa                               | Persen | 30,00           | 2.602,06   | Dinas PPSDA         |
| 8   | Program Administrasi Perkantoran                                       | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                  | bulan  | 12              | 2.839,85   | Dinas PPSDA         |
| 9   | Program Administrasi Perkantoran                                       | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                  | bulan  | 12              | 3.168,10   | Dinas BMCK          |
| <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                  |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat                                  | Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS  | Persen | 100             | 30.468,99  | Dinas PPSDA         |
| <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                               | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur  | Persen | 25,00           | 189,15     | Satpol PP           |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik                | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 2.167,14   | Satpol PP           |
| 3   | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur                             | Terpenuhinya Pendapatan Aparatur  | Persen | 25,00           | 287,00     | Satpol PP           |



| NO.  | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH    | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|--|---|---|--------|-----------------|------------|---------------------|
|  |   |   |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 4  | Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal | Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah   | Persen | 10,00           | 36,35      | Satpol PP           |
| 5  | Program Penguatan Adat  | Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)            | Persen | 20,00           | 6,80       | Satpol PP           |
| 6  | Program Pengendalian Tata Ruang                                     | Indikator Kinerja Tata Ruang  | Persen | 5,00            | 48,75      | Satpol PP           |
| 7  | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik                 | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 2.971,74   | Satpol PP           |
| 8  | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 885,09     | Satpol PP           |
| 9  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik             | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 70,00      | Kesbangpol          |
| 10   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik                 | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 244,15     | Kesbangpol          |
| 11   | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 455,50     | Kesbangpol          |
| 12   | Program Manajemen Kebencanaan                                       | Meminimalisir Resiko Dampak Bencana (100%)  | Persen | 28,46           | 2.772,15   | BPBD                |
| 13   | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 744,18     | BPBD                |
| <b>SOSIAL</b>  |   |   |        |                 |            |                     |
| 1  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik             | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 100             | 365,04     | Dinsos              |
| 2  | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat                        | Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari | Persen | 20,00           | 858,69     | Dinsos              |
| 3  | Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan             | Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan   | Persen | 30,00           | 14,64      | Dinsos              |
| 4  | Program Penguatan Adat  | Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)            | Persen | 30,00           | 40,59      | Dinsos              |
| 5  | Program Manajemen Kebencanaan                                       | Meminimalisir Resiko Dampak Bencana (100%)  | Persen | 12,93           | 1.125,38   | Dinsos              |
| 6  | Program Jaminan Sosial  | Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan           | RTS    | 410             | 2.459,43   | Dinsos              |
| 7  | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 791,40     | Dinsos              |
| 8  | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas Sosial                    | Terlaksananya Pembinaan Lingkungan social   | Persen | 100             | 30.357,07  | Dinsos              |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b> |   |   |        |                 |            |                     |
| <b>TENAGA KERJA</b>  |   |   |        |                 |            |                     |
| 1  | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 784,50     | Disnakerin          |
| 2  | Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat                           | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  | Persen | 30,00           | 461,15     | Disnakerin          |



| NO.   | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---|--|---|--------|-----------------|------------|---------------------|
|   |  |   |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 3   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 2.115,90   | Disnakerin          |
| <b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur  | Persen | 25,00           | 150,00     | DP3AKB              |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 112,00     | DP3AKB              |
| 3   | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat                     | Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari | RTS    | 7.616           | 1.332,54   | DP3AKB              |
| 4   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 82,50      | DP3AKB              |
| 5   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 919,48     | DP3AKB              |
| <b>PANGAN</b>   |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12,00           | 1.544,98   | Dinas Pangan        |
| 2   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur  | Persen | 25,00           | 1.187,60   | Dinas Pangan        |
| 3   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 1.414,76   | Dinas Pangan        |
| 4   | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat                     | Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari | RTS    | 860             | 260,70     | Dinas Pangan        |
| 5   | Program Optimalisasi Sumber Daya                                 | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                                  | Persen | 15,00           | 1.514,94   | Dinas Pangan        |
| 6   | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan                    | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat   | Persen | 25,00           | 841,81     | Dinas Pangan        |
| 7   | Program Pola Konsumsi  | Tercapainya Pola Pangan Harapan Ideal (PPH 100%)                                      | Persen | 100             | 806,64     | Dinas Pangan        |
| <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                               |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 582,57     | Dinas LH            |
| 2   | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat                            | Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS  | Persen | 63,31           | 16.556,87  | Dinas LH            |
| 3   | Program Pengendalian Tata Ruang                                  | Indikator Kinerja Tata Ruang  | Persen | 25,00           | 346,88     | Dinas LH            |
| 4   | Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup                    | Kualitas Air, Udara Dan Vegetasi Hutan (61.584)                                       | Persen | 100             | 782,50     | Dinas LH            |
| <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |  |   |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur  | Persen | 25,00           | 95,00      | Disdukcapil         |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 5.145,00   | Disdukcapil         |
| 3   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 4.165,26   | Disdukcapil         |



| NO.   | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---|--|--|--------|-----------------|------------|---------------------|
|   |  |  |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 4   | Program Administrasi<br>Perkantoran                              | Terpenuhinya Pelayanan<br>Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 1.582,00   | Disdukcapil         |
| <b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT<br/>DAN DESA</b>            |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Nilai<br>Tukar Petani                        | Nilai Tukar Petani (NTP)<br>Menjadi 130%   | Persen | 130,00          | 562,33     | Dinas PMD           |
| 2   | Program Penguatan Tata<br>Kelola Kesehatan                       | Terpenuhinya SPM Pelayanan<br>Publik   | Persen | 25,00           | 1.264,40   | Dinas PMD           |
| 3   | Program Penguatan Adat   | Tumbuhnya Perilaku<br>Masyarakat Yang Menghindari<br>Konflik (Tingkat Kamtibmas)               | Persen | 10,00           | 328,18     | Dinas PMD           |
| 4   | Program Pengembangan<br>Konektivitas Pusat<br>Pertumbuhan        | Pengembangan Konektivitas<br>Pusat Pertumbuhan   | Persen | 30,00           | 3.820,00   | Dinas PMD           |
| 5   | Program Pemenuhan Utilitas<br>Masyarakat                         | Terpenuhinya Sarana Indikator<br>Phbs  | Persen | 63,31           | 137,50     | Dinas PMD           |
| 6   | Program Pembangunan Sistem<br>Kinerja Pelayanan Publik           | Tersusunnya Standarisasi<br>Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 1.099,95   | Dinas PMD           |
| 7   | Program Optimalisasi Sumber<br>Daya                              | Peningkatan Indeks<br>Produktifitas Sumber Daya<br>Ekonomi                                     | Persen | 15,00           | 849,03     | Dinas PMD           |
| 8   | Program Norma Keluarga Kecil<br>Bahagia Sejahtera (NKKBS)        | Terwujudnya Keluarga<br>Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)  | KK     | 5.966           | 224,50     | Dinas PMD           |
| 9   | Program Administrasi<br>Perkantoran                              | Terpenuhinya Pelayanan<br>Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 1.297,88   | Dinas PMD           |
| <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br/>KELUARGA BERENCANA</b> |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Norma Keluarga Kecil<br>Bahagia Sejahtera (NKKBS)        | Terwujudnya Keluarga<br>Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)  | KK     | 5.966           | 18.074,85  | DP3AKB              |
| <b>PERHUBUNGAN</b>                                      |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Layanan Publik       | Terpenuhinya SPM Pelayanan<br>Publik   | Persen | 25,00           | 6.450,16   | Dishub              |
| 2   | Program Pembangunan Sistem<br>Kinerja Pelayanan Publik           | Tersusunnya Standarisasi<br>Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 1.219,54   | Dishub              |
| 3   | Program Administrasi<br>Perkantoran                              | Terpenuhinya Pelayanan<br>Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 2.485,90   | Dishub              |
| <b>KOMUNIKASI DAN<br/>INFORMATIKA</b>                   |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Administrasi<br>Perkantoran                              | Terpenuhinya Pelayanan<br>Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 320,65     | Diskominfo          |
| 2   | Program Pembangunan Sistem<br>Kinerja Pelayanan Publik           | Tersusunnya Standarisasi<br>Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 1.109,87   | Diskominfo          |
| 3   | Program Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Layanan Publik       | Terpenuhinya SPM Pelayanan<br>Publik   | Persen | 25,00           | 867,61     | Diskominfo          |
| 4   | Program Peningkatan Sumber<br>Daya Aparatur                      | Terwujudnya Kapabilitas<br>Aparatur  | Persen | 25,00           | 350,60     | Diskominfo          |
| <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN<br/>MENENGAH</b>           |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan<br>Produktivitas Masyarakat                  | Pendapatan Melampaui Batas<br>Garis Kemiskinan Sebesar<br>2400 Kilo Kalori Perorang<br>Perhari | RTS    | 315             | 98,40      | Dinas KUMKM         |
| 2   | Program Pengembangan<br>Pariwisata Daerah                        | Meningkatnya PDRB Sektor<br>Pariwisata   | Persen | 20,00           | 265,49     | Dinas KUMKM         |



| NO.                             | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---------------------------------|--|--|--------|-----------------|------------|---------------------|
|                                 |  |  |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 3                               | Program Optimalisasi Sumber Daya                                 | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                       | Persen | 35,00           | 2.212,93   | Dinas KUMKM         |
| 4                               | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                   | bulan  | 12,00           | 665,70     | Dinas KUMKM         |
| <b>PENANAMAN MODAL</b>          |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur   | Persen | 25,00           | 104,60     | Dinas PTMPTSP       |
| 2                               | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 298,51     | Dinas PTMPTSP       |
| 3                               | Program Optimalisasi Sumber Daya                                 | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                       | Persen | 15,00           | 98,95      | Dinas PTMPTSP       |
| 4                               | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                   | bulan  | 12              | 1.014,64   | Dinas PTMPTSP       |
| <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b> |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Peningkatan Prestasi Masyarakat                          | Peningkatan Prestasi Masyarakat  | Persen | 50,00           | 130.079,62 | Dispora             |
| 2                               | Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat                        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   | Persen | 10,00           | 2.395,11   | Dispora             |
| 3                               | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga                   | Terpenuhinya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)                             | Persen | 100             | 38,60      | Dispora             |
| 4                               | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                   | bulan  | 12              | 1.239,16   | Dispora             |
| <b>STATISTIK</b>                |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 1.109,87   | Diskominfo          |
| 2                               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik  | Persen | 25,00           | 867,61     | Diskominfo          |
| <b>KEBUDAYAAN</b>               |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Penguatan Adat   | Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas) | Persen | 30,00           | 401,10     | Disparbud           |
| <b>PERPUSTAKAAN</b>             |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 359,56     | Diskapus            |
| <b>KEARSIPAN</b>                |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran                                   | bulan  | 12              | 650,96     | Diskapus            |
| 2                               | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 359,56     | Diskapus            |
| 3                               | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur   | Persen | 25,00           | 51,12      | Diskapus            |
| <b>URUSAN PILIHAN</b>           |  |  |        |                 |            |                     |
| <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 19,25      | Distankan           |
| 2                               | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan                    | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat                                | Persen | 25,00           | 6.176,20   | Distankan           |
| <b>PARIWISATA</b>               |  |  |        |                 |            |                     |
| 1                               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik  | Persen | 25,00           | 50,00      | Disparbud           |



| NO.  | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|--|--|---|--------|-----------------|------------|---------------------|
|  |  |   |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 2  | Program Pengembangan Pariwisata Daerah                           | Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata   | Persen | 20,00           | 25.747,85  | Disparbud           |
| 3  | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 0,25       | Disparbud           |
| 4  | Program Optimalisasi Sumber Daya                                 | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                                  | Persen | 15,00           | 361,85     | Disparbud           |
| 5  | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 1.604,69   | Disparbud           |
| <b>PERTANIAN</b>   |  |   |        |                 |            |                     |
| 1  | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 1.469,49   | Distankan           |
| 2  | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 19,25      | Distankan           |
| 3  | Program Peningkatan Nilai Tukar Petani                           | Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%   | Persen | 30,00           | 656,00     | Distankan           |
| 4  | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan                    | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat   | Persen | 25,00           | 6.176,20   | Distankan           |
| 5  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 20,30      | Distankan           |
| <b>PERDAGANGAN</b>   |  |   |        |                 |            |                     |
| 1  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 1.973,84   | Dinas Perdagangan   |
| 2  | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat                     | Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari | RTS    | 100             | 450,00     | Dinas Perdagangan   |
| 3  | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan                    | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat   | Persen | 30,00           | 74,99      | Dinas Perdagangan   |
| 4  | Program Penguatan Distribusi                                     | Stabilitas Harga Bahan Pokok Strategis  | Persen | 35,00           | 860,17     | Dinas Perdagangan   |
| 5  | Program Pengembangan Sektor Perdagangan                          | Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan  | Persen | 10,00           | 3.543,00   | Dinas Perdagangan   |
| 6  | Program Optimalisasi Sumber Daya                                 | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                                  | Persen | 21,00           | 5.789,50   | Dinas Perdagangan   |
| 7  | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 1.257,07   | Dinas Perdagangan   |
| <b>PERINDUSTRIAN</b>   |  |   |        |                 |            |                     |
| 1  | Program Optimalisasi Sumber Daya                                 | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                                  | Persen | 29,00           | 26.348,78  | Disnakerin          |
| 2  | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 460,76     | Disnakerin          |
| 3  | Program Pengendalian Tata Ruang                                  | Indikator Kinerja Tata Ruang  | Persen | 25,00           | 181,48     | Disnakerin          |
| 4  | Program Penguatan Adat   | Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)            | Persen | 10,00           | 25,15      | Disnakerin          |
| <b>URUSAN PENUNJANG</b>  |  |   |        |                 |            |                     |
| <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |  |   |        |                 |            |                     |
| 1  | Program Perencanaan Tata Ruang                                   | Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang  | Persen | 100             | 1.118,85   | Bappelitbangda      |



| NO.   | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---|--|--|--------|-----------------|------------|---------------------|
|   |  |  |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 2   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 1.536,91   | Bappelitbangda      |
| 3   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhiya Pelayanan Dasar Perkantoran                                    | bulan  | 12              | 4.345,58   | Bappelitbangda      |
| <b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur   | Persen | 25,00           | 7.325,54   | BKPSDM              |
| 2   | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur                       | Terpenuhiya Pendapatan Aparatur  | Persen | 25,00           | 503,40     | BKPSDM              |
| 3   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 5,58       | BKPSDM              |
| 4   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhiya Pelayanan Dasar Perkantoran                                    | bulan  | 12              | 2.050,13   | BKPSDM              |
| <b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>                         |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 8.588,40   | BKAD                |
| 2   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhiya Pelayanan Dasar Perkantoran                                    | bulan  | 12              | 4.116,27   | BKAD                |
| <b>FUNGSI LAINNYA</b>                                   |  |  |        |                 |            |                     |
| <b>SETDA</b>  |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur   | Persen | 25,00           | 9150,55    | Setda               |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhiya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 36.115,90  | Setda               |
| 3   | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur                       | Terpenuhiya Pendapatan Aparatur  | Persen | 100             | 327,00     | Setda               |
| 4   | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan                          | Terpenuhiya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan                     | Persen | 20,00           | 1.086,50   | Setda               |
| 5   | Program Penguatan Adat   | Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas) | Persen | 10,00           | 3.038,35   | Setda               |
| 6   | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat                            | Terpenuhiya Sarana Indikator Phbs  | Persen | 10,00           | 130,00     | Setda               |
| 7   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 5.053,67   | Setda               |
| 8   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhiya Pelayanan Dasar Perkantoran                                    | bulan  | 12              | 17.182,95  | Setda               |
| <b>INSPEKTORAT</b>                                      |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhiya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 44,86      | Inspektorat         |
| 2   | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik              | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik                                  | Persen | 25,00           | 1.938,80   | Inspektorat         |
| 3   | Program Administrasi Perkantoran                                 | Terpenuhiya Pelayanan Dasar Perkantoran                                    | bulan  | 12              | 874,88     | Inspektorat         |
| <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                 |  |  |        |                 |            |                     |
| 1   | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                         | Terpenuhiya Kesejahteraan Aparatur   | Persen | 100             | 4.462,68   | Setwan              |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik          | Terpenuhiya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 2.848,89   | Setwan              |
| 3   | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur                       | Terpenuhiya Kesejahteraan Aparatur   | Persen | 100             | 1.685,50   | Setwan              |



| NO.              | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PERANGKAT<br>DAERAH    | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            | PERANGKAT<br>DAERAH |
|------------------|---|---|--------|-----------------|------------|---------------------|
|                  |   |   |        | TARGET          | Rp. (Juta) |                     |
| 4                | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik                 | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 35.209,33  | Setwan              |
| 5                | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 454,52     | Setwan              |
| <b>KECAMATAN</b> |   |   |        |                 |            |                     |
| 1                | Program Administrasi Perkantoran                                    | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran  | bulan  | 12              | 6.753,95   | Kecamatan           |
| 2                | Program Jaminan Sosial  | Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan           | Persen | 100             | 64,91      | Kecamatan           |
| 3                | Program Manajemen Kebencanaan                                       | Meminimalisir Resiko Dampak Bencana (100%)  | Persen | 100             | 41,19      | Kecamatan           |
| 4                | Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)              | Terwujudnya Keluarga Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)                                    | Persen | 100             | 297,25     | Kecamatan           |
| 5                | Program Optimalisasi Sumber Daya                                    | Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi                                  | Persen | 5,00            | 148,85     | Kecamatan           |
| 6                | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga                      | Terpenuhinya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)  | Persen | 100             | 164,14     | Kecamatan           |
| 7                | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik                 | Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 4.016,59   | Kecamatan           |
| 8                | Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat                               | Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS  | Persen | 100             | 110,00     | Kecamatan           |
| 9                | Program Pendidikan Dasar  | Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Dasar  | Persen | 5,00            | 107,70     | Kecamatan           |
| 10               | Program Pengembangan Pariwisata Daerah                              | Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata   | Persen | 20,00           | 23,99      | Kecamatan           |
| 11               | Program Pengendalian Tata Ruang                                     | Indikator Kinerja Tata Ruang  | Persen | 5,00            | 7,60       | Kecamatan           |
| 12               | Program Penguatan Adat  | Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)            | Persen | 10,00           | 302,50     | Kecamatan           |
| 13               | Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal | Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah   | Persen | 10,00           | 109,01     | Kecamatan           |
| 14               | Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan                             | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan                               | Persen | 5,00            | 44,57      | Kecamatan           |
| 15               | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur                          | Terpenuhinya Pendapatan Aparatur  | Persen | 25,00           | 5,30       | Kecamatan           |
| 16               | Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat                           | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  | Persen | 10,00           | 250,33     | Kecamatan           |
| 17               | Program Peningkatan Nilai Tukar Petani                              | Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%   | Persen | 5,00            | 17,00      | Kecamatan           |
| 18               | Program Peningkatan Prestasi Masyarakat                             | Peningkatan Jumlah Prestasi Masyarakat  | Persen | 5,00            | 119,10     | Kecamatan           |
| 19               | Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan                       | Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat   | Persen | 5,00            | 178,36     | Kecamatan           |
| 20               | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat                        | Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari | Persen | 5,00            | 121,68     | Kecamatan           |
| 21               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik             | Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik   | Persen | 25,00           | 1.057,51   | Kecamatan           |
| 22               | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur                            | Terwujudnya Kapabilitas Aparatur  | Persen | 25,00           | 1.329,99   | Kecamatan           |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.



**Tabel 7.4**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2020**

| NO.  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH     | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|--|---|---|---------|--------------|-------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|  |   |   |         | 2017         | 2018  | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|  |   |   |         |              |       | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b> |   |   |         |              |       |        |           |                 |           |                  |
| <b>PENDIDIKAN</b>  |   |   |         |              |       |        |           |                 |           |                  |
| 1.   | Program Keberlangsungan Pendidikan Keluarga Miskin          | 1. Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin | Persen  | n/a          | 45,46 | 41,73  | 17.272,35 | 41,73           | 17.272,35 | Disdik           |
| 2.   | Program Pendidikan Sekolah Dasar                            | 1. APK SD/MI  | persen  | 104          | 104   | 104,90 | 605,30    | 104             | 605,30    | Disdik           |
| 3.   | Program Pendidikan SMP                                      | 1. APK SMP/MTs  | persen  | 100          | 100   | 101,20 | 2.058,40  | 99,00           | 2.058,40  | Disdik           |
| 4.   | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal            |   |         |              |       |        | 969,87    |                 | 969,87    |                  |
|  |   | 1. APK PAUD   | persen  | 63,91        | 64,79 | 65,49  | 241,17    | 70,00           | 241,17    | Disdik           |
|  |   | 2. Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C         | persen  | 24,11        | 37,43 | 38,53  | 215,00    | 75,00           | 215,00    | Disdik           |
| 5.   | Penguatan Tata Kelola Pendidikan                            | 3. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi        | lembaga | 5            | 2     | 5      | 513,70    | 4               | 513,70    | Disdik           |
|  |   |   |         |              |       |        | 15.195,64 |                 | 15.195,64 | Disdik           |
|  |   | 1. Terpenuhinya Ruang Guru                                  | persen  | 97,00        | 93,00 | 93,88  | 5.065,21  | 95,00           | 5.065,21  | Disdik           |
|  |   | 2. Terpenuhinya Ruang Kelas                                 | persen  | 82,00        | 82,00 | 83,50  | 5.065,21  | 95,00           | 5.065,21  | Disdik           |
|  |   | 3. Terpenuhinya Ruang Laboratorium                          | persen  | 32,00        | 31,00 | 32,00  | 5.065,21  | 31,00           | 5.065,21  | Disdik           |
| 6.   | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan |   |         |              |       |        | 735,00    |                 | 735,00    | Disdik           |
|  |   | 1. Persentase Pendidik yang memenuhi Kualifikasi S1/D4      | persen  | 93,00        | 93,00 | 93,90  | 368,00    | 94,32           | 368,00    | Disdik           |
|  |   | 2. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih | persen  | n/a          | n/a   | 20,00  | 367,00    | 81,00           | 367,00    | Disdik           |
| 7.   | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                      |   |         |              |       |        | 2.121,75  |                 | 2.121,75  | Disdik           |
|  |   | 1. Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi               | persen  | n/a          | n/a   | 50,00  | 1.060,87  | 87,00           | 1.060,87  | Disdik           |
|  |   | 2. Persentase Satuan Pendidikan Berstandar Nasional         | persen  | 91,00        | 96,00 | 96,75  | 1.060,87  | 5,00            | 1.060,87  | Disdik           |



| NO.              | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |            | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |        |
|------------------|---|-------------------|---|--------------|-------|--------|------------|-----------------|------------|------------------|--------|
|                  |   |                   |   | 2017         | 2018  | 2020   |            | 2020            |            |                  |        |
|                  |   |                   |   |              |       | Target | Juta Rp.   | Target          | Juta Rp.   |                  |        |
| 8.               | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pendidikan  |                   |   |              |       |        | 1.259,00   |                 | 1.259,00   | Disdik           |        |
|                  |   | 1.                | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pendidikan | persen       | 100   | 100    | 100        | 646,00          | 95,00      | 646,00           | Disdik |
|                  |   | 2.                | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan  | Persen       | 100   | 100    | 100        | 613,00          | 93,57      | 613,00           | Disdik |
| 9.               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pendidikan                                     |                   |   |              |       |        | 9.020,00   |                 | 9.020,00   | Disdik           |        |
|                  |   | 1.                | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendidikan  | persen       | 100   | 100    | 100        | 7.020,00        | 65,00      | 7.020,00         | Disdik |
|                  |   | 2.                | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan       | persen       | 100   | 100    | 100        | 2.000,00        | 95,00      | 2.000,00         | Disdik |
| 10.              | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan |                   |   |              |       |        | 666,60     |                 | 666,60     | Disdik           |        |
|                  |   | 1.                | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pendidikan   | persen       | 95,00 | 93,00  | 97,00      | 222,20          | 95,00      | 222,20           | Disdik |
|                  |   | 2.                | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan                                | persen       | 100   | 100    | 100        | 222,20          | 95,00      | 222,20           | Disdik |
|                  |   | 3.                | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pendidikan                             | persen       | 100   | 100    | 100        | 222,20          | 95,00      | 222,20           | Disdik |
| <b>KESEHATAN</b> |   |                   |   |              |       |        |            |                 |            |                  |        |
| 1.               | Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kesehatan   |                   |   |              |       |        | 110.000,00 |                 | 110.000,00 | Dinkes           |        |
|                  |   | 1.                | Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun  | unit         | 0     | 0      | 1          | 100.000,00      | 1          | 100.000,00       | Dinkes |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH         | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |       | RPJMD     |            | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------------|------------|------------------|
|     |   |  |          | 2017         | 2018  | 2020      |            | 2020            |            |                  |
|     |   |  |          |              |       | Target    | Juta Rp.   | Target          | Juta Rp.   |                  |
|     |   | 2. Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun  | unit     | 1            | 0     | 2         | 10.000,00  | 1               | 10.000,00  | Dinkes           |
| 2.  | Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin                | 1. Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN   | keluarga | n/a          | n/a   | 75.140,00 | 20.738,64  | 75,140,00       | 20.738,64  | Dinkes           |
| 3.  | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan                         |  |          |              |       |           | 4.800,00   |                 | 4.800,00   | Dinkes           |
|     |   | 1. Terpenuhi cakupan Puskesmas memenuhi standar  | persen   | 75,51        | 78,65 | 82,00     | 2.300,00   | 85,6            | 2.300,00   | Dinkes           |
|     |   | 2. Terpenuhi Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda                                    | persen   | 27,00        | 30,00 | 63,64     | 2.500,00   | 95,00           | 2.500,00   | Dinkes           |
| 4.  | Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak                      | 1. Terpenuhi SPM Kesehatan poin 1-5, 7   | persen   | 0,00         | 0,00  | 100       | 2.827,10   | 100             | 8.450,00   | Dinkes           |
| 5.  | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Dinas Kesehatan          | 1. Pengendalian Penyakit akibat dampak asap rokok  | persen   | 80,00        | 85,00 | 90,00     | 2.000,00   | 90,00           | 2.000,00   | Dinkes           |
| 6.  | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Majalengka | 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka                         | nilai    | N/A          | 78    | 80        | 100.335,00 | 80              | 100.335,00 | RSUD Majalengka  |
| 8.  | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di RSUD Majalengka          | 1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Penderita Akibat dampak Asap Rokok                          | persen   | 75,00        | 80,00 | 85,00     | 1.900,00   | 85,00           | 1.900,00   | RSUD Majalengka  |
| 9.  | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Cideres    | 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres                            | nilai    | N/A          | 72    | 75        | 100.750,00 | 73,78           | 122,57     | RSUD Cideres     |
| 10. | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di RSUD Cideres             | 1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Penderita Akibat dampak Asap Rokok                          | persen   | 75,00        | 80,00 | 85,00     | 1.900,00   | 85,00           | 1.900,00S  | RSUD Cideres     |
| 11. | Program Tata Kelola Kesehatan                                   |  |          |              |       |           | 40,895.00  |                 | 40,895.00  |                  |
|     |   | 1. Terpenuhi standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar                                | persen   | 82,5         | 93,75 | 42,42     | 40,670.00  | 49,54           | 40,660.00  | Dinkes           |
|     |   | 2. Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi   | persen   | 87,5         | 88    | 100,00    | 75,00      | 92,07           | 70,00      | Dinkes           |
|     |   | 3. Tersedianya Regulasi Kesehatan  | persen   | 3,00         | 1,00  | 1,00      | 150,00     | 1,00            | 150,00     | Dinkes           |
| 12. | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                       |  |          |              |       |           | 6.050,17   |                 | 6.050,17   |                  |
|     |   | 1. Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin esensial Puskesmas                                 | persen   | 66,12        | 45,08 | 85,00     | 4.000,00   | 70,33           | 4.000,00   | Dinkes           |
|     |   | 2. Terpenuhi alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar | persen   | 25,1         | 23,3  | 42,42     | 1.900,00   | 37,42           | 1.850,00   | Dinkes           |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|--------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|     |   |  |        | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|     |   |  |        |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|     |   | 3. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan   | persen | 0,00         | 0,00  | 30,30  | 50,00    | 20,00           | 45,00    | Dinkes           |
|     |   | 4. Terselenggaranya SJSN dengan dengan peserta mencapai UHC  | persen | 40,00        | 41,00 | 80,00  | 100      | 66,38           | 100      | Dinkes           |
| 13. | Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat  |  |        |              |       |        | 867,00   |                 | 867,00   | Dinkes           |
|     |   | 1. Terselenggaranya peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan tingkat primer dan sekunder   | persen | 0,00         | 0,00  | 100    | 57,00    | 85,00           | 56,00    | Dinkes           |
|     |   | 2. menurunnya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dan persentase ibu hamil kurang energi kronik                   | persen | 0,00         | 1,97  | 2,5    | 750,00   | 3,5             | 750,00   | Dinkes           |
|     |   | 3. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja   | persen | 0,00         | 5,50  | 73,00  | 60,00    | 85,61           | 60,00    | Dinkes           |
| 14. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi |  |        |              |       |        | 408,00   |                 | 398,00   | Dinkes           |
|     |   | 1. Terpenuhiya SPM Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  | persen | 0,00         | 0,00  | 100    | 150,00   | 75,00           | 140,00   | Dinkes           |
|     |   | 2. Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) dan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit tidak menular | persen | 0,00         | 0,00  | 95,00  | 258,00   | 75,00           | 258,00   | Dinkes           |
| 15. | Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga  |  |        |              |       |        | 350,00   |                 | 350,00   |                  |
|     |   | 1. Terpenuhiya indeks Keluarga Sehat   | persen | 50,00        | 56,00 | 65,00  | 85,00    | 0,005           | 85,00    | Dinkes           |
|     |   | 2. Terpenuhiya PHBS di semua Tatanan   | persen | 54,58        | 55,00 | 65,00  | 85,00    | 75,1            | 85,00    | Dinkes           |
|     |   | 3. Terpenuhiya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  | persen | 0,00         | 0,00  | 15,00  | 180,00   | 64,68           | 175,00   | Dinkes           |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH            | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |                 |
|-----|--|--|--|--------------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|
|     |  |  |  | 2017         | 2018 | 2020   |           | 2020            |           |                  |                 |
|     |  |  |  |              |      | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |                 |
| 16. | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur RSUD Majalengka           |  |  |              |      |        | 857,00    |                 | 857,00    |                  |                 |
|     |  | 1.   | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar                | persen       | n/a  | n/a    | 86,00     | 400,00          | 95,00     | 400,00           | RSUD Majalengka |
|     |  | 2.   | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun  | Orang        | n/a  | n/a    | 174       | 457,00          | 829/100   | 457,00           | RSUD Majalengka |
| 17. | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur RSUD Cideres              |  |  |              |      |        | 2.228,00  |                 | 2.228,00  | RSUD Cideres     |                 |
|     |  | 1.   | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar                | Orang        | n/a  | n/a    | 62        | 1.000,00        | 731       | 1.000,00         | RSUD Cideres    |
|     |  | 2.   | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun  | Orang        | n/a  | n/a    | 482       | 1.228,00        | 251       | 1.228,00         | RSUD Cideres    |
| 18. | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kesehatan        |  |  |              |      |        | 5.571,00  |                 | 5.571,00  | Dinkes           |                 |
|     |  | 1.   | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kesehatan | persen       | 100  | 100    | 100       | 5.071,00        | 95,00     | 5.071,00         | Dinkes          |
|     |  | 2.   | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan  | Persen       | 100  | 100    | 100       | 500,00          | 95,00     | 500,00           | Dinkes          |
| 19. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kesehatan |  |  |              |      |        | 425,00    |                 | 425,00    | Dinkes           |                 |
|     |  | 1.   | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kesehatan  | persen       | 100  | 100    | 90,00     | 125,00          | 95        | 125,00           | Dinkes          |
|     |  | 2.   | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan       | persen       | 100  | 100    | 90,00     | 300,00          | 95        | 300,00           | Dinkes          |
| 20. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Majalengka           | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Majalengka | persen   |              | 65   | 9,00   | 83,00     | 9,00            | 83,00     | RSUD Majalengka  |                 |
| 21. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Cideres              | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres    | persen   |              | 65   | 15,00  | 36.500,00 | 95              | 43.815,00 | RSUD Cideres     |                 |



| NO.                                      | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |            | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|---|--------|--------------|------|--------|------------|-----------------|------------|------------------|
|  |  |   |        | 2017         | 2018 | 2020   |            | 2020            |            |                  |
|  |  |   |        |              |      | Target | Juta Rp.   | Target          | Juta Rp.   |                  |
| 22.                                      | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan                 |   |        |              |      |        | 210,00     |                 | 195,00     | Dinkes           |
|  |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan                 | persen | 90           | 90   | 100    | 50,00      | 95              | 45,00      | Dinkes           |
|  |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan    | persen | 80           | 80   | 100    | 75,00      | 95              | 70,00      | Dinkes           |
|  |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan | persen | 100          | 100  | 100    | 85,00      | 95              | 80,00      | Dinkes           |
| 23.                                      | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan RSUD Majalengka |   |        |              |      |        | 190,00     |                 | 190,00     | RSUD Majalengka  |
|  |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan                 | Niali  | CC           | CC   | B      | 95,00      | B               | 95,00      | RSUD Majalengka  |
|  |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan    | persen | 90           | 90   | 100    | 95,00      | 100             | 95,00      | RSUD Majalengka  |
| 24.                                      | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan RSUD Cideres    |   |        |              |      |        | 190,00     |                 | 190,00     | RSUD Cideres     |
|  |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan                 | Nilai  | CC           | CC   | B      | 95,00      | B               | 95,00      | RSUD Cideres     |
|  |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan    | persen | 90           | 90   | 100    | 95,00      | 100             | 95,00      | RSUD Cideres     |
| <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |   |        |              |      |        |            |                 |            |                  |
| 1.                                       | Program Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan   | 1. Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan   | persen | 0            | 5    | 7.04   | 227.4150,0 | 7.04            | 85.119,20  | Dinas PUTR       |
| 2.                                       | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   | 1. Tingkat Kelayakan Jalan  | persen | 0            | 83   | 83.52  | 175.560,00 | 8,352.00        | 155.411,23 | Dinas PUTR       |
| 3.                                       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan   | 1. Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kebinamargaan  | persen | 0            | 100  | 100    | 2.855,00   | 100             | 3.258,55   | Dinas PUTR       |
| 4.                                       | Program Database Jalan dan Jembatan  | 1. Tingkat Kelayakan Jalan  | persen | 0            | 83   | 83,52  | 5.770,00   | 83,52           | 100.000,00 | Dinas PUTR       |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD      |            | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|---|--------|--------------|-------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|
|     |  |   |        | 2017         | 2018  | 2020       |            | 2020            |            |                  |
|     |  |   |        |              |       | Target     | Juta Rp.   | Target          | Juta Rp.   |                  |
| 5.  | Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Penataan Bangunan                                    | 1. Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB   | persen | 0            | 6     | 6,66       | 1.300,00   | 6,2             | 1.300,00   | Dinas PUTR       |
| 6.  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya       | 1. Persentase Jaringan dalam kondisi baik   | persen | 67,87        | 68,80 | 69,40      | 135.822,55 | 69,40           | 164.743,90 | Dinas PUTR       |
| 7.  | Program Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya            |   |        |              |       |            | 25.280,60  |                 | 25.280,60  |                  |
|     |  | 1. Volume Air Tertampung  | m3     | 0            | 0     | 238.700,00 | 9.550,10   | 550.904,00      | 9.550,10   | Dinas PUTR       |
|     |  | 2. Debit Air Termanfaatkan  | ltr/d  | 0            | 0     | 8.676,80   | 5.635,00   | 33.000,18       | 5.635,00   | Dinas PUTR       |
|     |  | 3. Tertanganinya titik sungai kritis  | persen | 0            | 0     | 6,61       | 10.095,50  | 6,61            | 10.095,50  | Dinas PUTR       |
| 8.  | Program perencanaan tata ruang   | 1. Jumlah Pedoman Tata Ruang  | persen | 0            | 0     | 100        | 300,00     | 100             | 4.280,32   | Dinas PUTR       |
| 9.  | Program pengendalian Pemanfaatan tata ruang  | 1. Persentase Kesesuaian Peruntukan Fungsi Lahan  | persen | 0            | 0     | 100        | 125,00     | 100             | 1.308,72   | Dinas PUTR       |
| 10. | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Dinas PUTR  |   |        |              |       |            | 42.337,60  |                 | 2.128,61   | Dinas PUTR       |
|     |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas BMCK | persen | 100          | 100   | 100        | 21.000,00  | 95              | 21.000,00  | Dinas PUTR       |
|     |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK  | Persen | 100          | 100   | 100        | 21.337,60  | 95              | 21.337,60  | Dinas PUTR       |
| 11. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PUTR                                     |   |        |              |       |            | 1.915,00   |                 | 1.270,70   | Dinas PUTR       |
|     |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas BMCK  | persen | 100          | 100   | 100        | 1.000,00   | 95              | 800,00     | Dinas PUTR       |
|     |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK       | persen | 100          | 100   | 100        | 915,00     | 10              | 470,70     | Dinas PUTR       |
| 12. | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas PUTR |   |        |              |       |            | 120,00     |                 | 89,00      | Dinas PUTR       |
|     |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas BMCK   | persen | 100          | 100   | 100        | 40,00      | 95              | 30,00      | Dinas PUTR       |



| NO.  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|--|--------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|  |  |  |        | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|  |  |  |        |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|  |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas BMCK                                 | persen | 100          | 100   | 100    | 40,00    | 95              | 30,00    | Dinas PUTR       |
|  |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas BMCK                              | persen | 100          | 100   | 100    | 40,00    | 95              | 29,00    | Dinas PUTR       |
| 13.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Dinas PKPP  |  |        |              |       |        | 1.683,17 |                 | 1.683,17 | -                |
|  |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas PPSDA | persen | 100          | 100   | 100    | 757,34   | 95              | 757,34   | Dinas PKPP       |
|  |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA  | Persen | 100          | 100   | 100    | 925,83   | 95              | 925,83   | Dinas PKPP       |
| 14.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PKPP                                     |  |        |              |       |        | 1.361,78 |                 | 1.361,78 |                  |
|  |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas PPSDA  | persen | 100          | 100   | 100    | 1,226.78 | 95              | 1,226.78 | Dinas PKPP       |
|  |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA       | persen | 100          | 100   | 100    | 135.00   | 95              | 135.00   | Dinas PKPP       |
| 15.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas PKPP |  |        |              |       |        | 90,00    |                 | 90,00    | Dinas PKPP       |
|  |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas PPSDA   | persen | 100          | 100   | 100    | 50,00    | 95              | 50,00    | Dinas PKPP       |
|  |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas PPSDA                                | persen | 100          | 100   | 100    | 40,00    | 95              | 40,00    | Dinas PKPP       |
| <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |  |  |        |              |       |        |          |                 |          |                  |
| 1.   | Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Air Bersih                                     | 2. Cakupan pelayanan Air Bersih  | persen | 76,73        | 80,16 | 80,67  | 7.525,00 | 80,67           | 7.525,00 | Dinas PKPP       |
| 2.   | Program Peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin   | 1. Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                | Persen | -            | 600   | 5.20   | 1.750,00 | 5.20            | 1.750,00 | Dinas PKPP       |



| NO.   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH               | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |        | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|--|--------|--------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|   |   |  |        | 2017         | 2018   | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|   |   |  |        |              |        | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
| 3.  | Pemenuhan utilitas sanitasi   | 1. Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik  | persen | 61,25        | 68,36  | 69,02  | 11,750,00 | 69,02           | 11,750,00 | Dinas PKPP       |
| 4.  | Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan                           | 1. Panjang Desa dalam Kondisi Baik   | km     | 221,87       | 242,87 | 294,80 | 30.500,00 | 294,80          | 30.500,00 | Dinas PKPP       |
| 5.  | Program pengembangan Perumahan  | 1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni   | persen | 1,02         | 0      | 74,80  | 3.886,43  | 74,80           | 3.886,43  | Dinas PKPP       |
| <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |  |        |              |        |        |           |                 |           |                  |
| 1.  | Pembinaan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 1. Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum                                     | kali   | 12           | 12     | 12,00  | 6.363,05  | 48,00           | 6.616,89  | Satpol PP        |
| 2.  | Program Pencegahan Potensi Gangguan Kamtibmas                         | 1. Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum  | kali   | 12           | 12     | 12,00  | 1.187,97  | 5               | 1.387,97  | Kesbangpol       |
| 3.  | Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah                 | 1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada   | persen | 100          | 100    | 100    | 404,63    | 100             | 162,63    | Satpol PP        |
| 4.  | Program Pembinaan dan Pengembangan Satlinmas                          | 1. Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas  | persen | 100          | 100    | 100    | 2.553,90  | 100             | 62,55     | Satpol PP        |
| 5.  | Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pamong Praja    | 1. Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompeten  | orang  | 287          | 287    | 287,00 | 1.286,48  | 286,00          | 97,00     | Satpol PP        |
| 6.  | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran         | 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran   | persen | 100          | 100    | 100    | 15.818,66 | 100             | 763,06    | Satpol PP        |
| 7.  | Program Manajemen Kebencanaan   | 1. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana  | persen | 100          | 100    | 100    | 10.000,00 | 95              | 10.000,00 | BPBD             |
| 8.  | Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana                            | 1. Persentase tanggap bencana  | persen | 100          | -      | 100    | 4.484,25  | 95              | 929,09    | BPBD             |
| 9.  | Program Kedaruratan dan logistik                                      | 1. Tingkat Penanganan darurat bencana  | persen | 100          | -      | 100    | 3.082,50  | 95              | 1.059,49  | BPBD             |
| 10.   | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi                                 | 1. Tingkat Pemulihan pasca bencana   | persen | 10           | -      | 100    | 14.907,00 | 95              | 499,91    | BPBD             |
| 11.   | Program kemitraan wawasan kebangsaan                                  | 1. Jumlah isu/Konflik SARA   | Kasus  | 0            | 0      | 0      | 170,10    | 0               | 170,10    | Kesbangpol       |
| 12.   | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Satpol PP                  |  |        |              |        |        | 1.100,00  |                 | 1.000,00  | Satpol PP        |
|   |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP | persen | 100          | 100    | 100    | 500,00    | 95              | 450,00    | Satpol PP        |
|   |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP  | Persen | 100          | 100    | 100    | 600,00    | 95              | 550,00    | Satpol PP        |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|     |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|     |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
| 13. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP   |  |        |              |      |        | 664,62   |                 | 664,62   | Satpol PP        |
|     |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Satpol PP  | persen | 100          | 100  | 100    | 236,62   | 95              | 236,62   | Satpol PP        |
|     |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP                                 | persen | 100          | 100  | 100    | 428,00   | 95              | 428,00   | Satpol PP        |
| 14. | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satpol PP                           |  |        |              |      |        | 108,07   |                 | 63,59    | Satpol PP        |
|     |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Satpol PP   | persen | 100          | 100  | 100    | 52,01    | 19              | 30,00    | Satpol PP        |
|     |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Satpol PP  | persen | 100          | 100  | 100    | 36,32    | 95              | 20,00    | Satpol PP        |
|     |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Satpol PP   | persen | 100          | 100  | 100    | 19,74    | 95              | 13,59    | Satpol PP        |
| 15. | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |  |        |              |      |        | 2.227,80 |                 | 1.378,16 | BPBD             |
|     |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah | persen | 100          | 100  | 100    | 1.227,80 | 95              | 1.000,00 | BPBD             |
|     |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | Persen | 100          | 100  | 100    | 1.000,00 | 95              | 378,16   | BPBD             |
| 16. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                     |  |        |              |      | 100    | 2.700,00 |                 | 87,15    | BPBD             |
|     |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | persen | 100          | 100  | 100    | 1.700,00 | 55              | 47,15    | BPBD             |
|     |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah       | persen | 100          | 100  | 100    | 1.000,00 | 61              | 40,00    | BPBD             |
| 17. | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |        |              |      |        | 95,07    |                 | 33,91    | BPBD             |
|     |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup   | persen | 100          | 100  | 100    | 35,07    | 95              | 13,91    | BPBD             |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|     |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|     |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|     |   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |        |              |      |        |          |                 |          |                  |
|     |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | persen | 100          | 100  | 100    | 30,00    | 95              | 10,00    | BPBD             |
|     |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | persen | 100          | 100  | 100    | 30,00    | 75              | 10,00    | BPBD             |
| 18. | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Kesatuan Bangsa dan Politik  |  |        |              |      |        | 1.130,74 |                 | 1.130,74 | Kesbangpol       |
|     |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik | persen | 100          | 100  | 100    | 600,00   | 95              | 600,00   | Kesbangpol       |
|     |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik  | Persen | 100          | 100  | 100    | 530,74   | 80.7            | 530,74   | Kesbangpol       |
| 19. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik                                     |  |        |              |      |        | 737,16   |                 | 737,16   | Kesbangpol       |
|     |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik  | persen | 100          | 100  | 100    | 400,00   | 94.55           | 400,00   | Kesbangpol       |
|     |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik       | persen | 100          | 100  | 100    | 337,16   | 94.55           | 337,16   | Kesbangpol       |
| 20. | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik |  |        |              |      |        | 20,00    |                 | 20,00    | Kesbangpol       |
|     |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik   | persen | 100          | 100  | 100    | 10,00    | 94.44           | 10,00    | Kesbangpol       |
|     |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik                                | persen | 100          | 100  | 100    | 5,00     | 85.58           | 5,00     | Kesbangpol       |



| NO.           | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH         | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN       | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|---|--|--------------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|               |   |  |              | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|               |   |  |              |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|               |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik               | persen       | 100          | 100  | 100    | 5,00     | 91              | 5,00     | Kesbangpol       |
| <b>SOSIAL</b> |   |  |              |              |      |        |          |                 |          |                  |
| 1.            | Program monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan       | 1. Persentase masyarakat miskin yang dimonev   | persen       | 0            | 0    | 100    | 2.700,00 | 132,105         | 1.300,00 | Dinsos           |
| 2.            | Program Jaminan Sosial  |  |              |              |      |        | 4.174,40 |                 | 3.227,46 | Dinsos           |
|               |   | 1. Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial   | Rumah Tangga | 3563         | 4213 | 307    | 874,40   | 554,470         | 1.227,46 | Dinsos           |
|               |   | 2. Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"  | orang        | 0            | 0    | 500    | 3.300,00 | 825             | 2.000,00 | Dinsos           |
| 3.            | Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin                        | 1. Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri  | Kube         | 112          | 112  | 128    | 2.275,00 | 5               | 200,00   | Dinsos           |
| 4.            | Program peningkatan produktivitas masyarakat                    | 1. Jumlah PMKS yang dibantu  | orang        | 5145         | 5945 | 270    | 1.110,13 | 4,738           | 108,65   | Dinsos           |
| 5.            | Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial                         | 1 Jumlah Kelembagaan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan   | lembaga      | N/A          | N/A  | 157,00 | 1.226,00 | 10              | 398,89   | Dinsos           |
| 6.            | Program Penanganan Sosial Korban Bencana                        |  |              |              |      |        | 3.488,26 |                 | 605,42   | Dinsos           |
|               |   | 1. Persentase Korban Bencana Yang Ditangani  | orang        | 100          | 100  | 100    | 2.000,00 | 803             | 305,42   | Dinsos           |
|               |   | 2. Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana  | orang        | 60           | 60   | 361    | 1.488,26 | 738             | 300,00   | Dinsos           |
| 7.            | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Sosial        |  |              |              |      |        | 1.198,17 |                 | 857,00   | Dinsos           |
|               |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Sosial | persen       | 100          | 100  | 100    | 396,87   | 95              | 457,00   | Dinsos           |
|               |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100  | 100    | 801,30   | 78              | 400,00   | Dinsos           |
| 8.            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Sosial |  |              |              |      |        | 556,00   |                 | 82,50    | Dinsos           |



| NO.  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|--|---|---|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|  |   |   |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|  |   |   |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|  |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Sosial   | persen | 100          | 100  | 100    | 424,00   | 61              | 42,50    | Dinsos           |
|  |   | 2. Persentase Sasaran dan Prasaran Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial   | persen | 100          | 100  | 100    | 132,00   | 60              | 40,00    | Dinsos           |
| 9.   | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Sosial |   |        |              |      |        | 82,00    |                 | 135,56   | Dinsos           |
|  |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial  | persen | 100          | 100  | 100    | 52,00    | 95              | 65,56    | Dinsos           |
|  |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Sosial   | persen | 100          | 100  | 100    | 22,50    | 95              | 40,00    | Dinsos           |
|  |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Sosial  | persen | 100          | 100  | 100    | 7,50     | 95              | 30,00    | Dinsos           |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b> |   |   |        |              |      |        |          |                 |          |                  |
| <b>TENAGA KERJA</b>  |   |   |        |              |      |        |          |                 |          |                  |
| 1.   | Program peningkatan produktivitas masyarakat miskin   | 1. Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri  | RTS    | n/a          | 0    | 500    | 2.880,00 | 120             | 191,31   | Dinas KKUKM      |
| 2.   | Program Peningkatan Kesempatan Kerja  | 1. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | Persen | n/a          | 24   | 22,72  | 2.342,63 | 20,32           | 5.381,07 | Dinas KKUKM      |
| 3.   | Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja   | 1. Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan   | Persen | n/a          | 60   | 225,00 | 945,00   | 200,00          | 1.000,00 | Dinas KKUKM      |
| 4.   | Program Pembinaan Hubungan Industrial, Sayarat Kerja dan Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industrial   | 1. Persentase Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)   | Persen | n/a          | n/a  | 75,00  | 541,50   | 75,00           | 247,56   | Dinas KKUKM      |
| 5.   | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                 |   |        |              |      |        | 1.130,74 |                 | 1.130,74 | Dinas KKUKM      |
|  |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian | persen | 100          | 100  | 100    | 600,00   | 95              | 600,00   | Dinas KKUKM      |



| NO.   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD   |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|---|----------|--------------|------|---------|----------|-----------------|----------|------------------|
|   |  |   |          | 2017         | 2018 | 2020    |          | 2020            |          |                  |
|   |  |   |          |              |      | Target  | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|   |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian  | Persen   | 100          | 100  | 100     | 530,74   | 95              | 530,74   | Dinas KKUKM      |
| 6.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                     |   |          |              |      |         | 737,16   |                 | 737,16   | Dinas KKUKM      |
|   |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian  | persen   | 100          | 100  | 100     | 400      | 95              | 400      | Dinas KKUKM      |
|   |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian | persen   | 100          | 100  | 100     | 337,16   | 95              | 337,16   | Dinas KKUKM      |
| 7.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian |   |          |              |      |         | 20,00    |                 | 20,00    | Dinas KKUKM      |
|   |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                       | persen   | 100          | 100  | 100     | 7,00     | 95              | 7,00     | Dinas KKUKM      |
|   |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                          | persen   | 100          | 100  | 100     | 7,00     | 95              | 7,00     | Dinas KKUKM      |
|   |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                       | persen   | 100          | 100  | 100     | 6,00     | 95              | 6,00     | Dinas KKUKM      |
| <b>PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |  |   |          |              |      |         |          |                 |          |                  |
| 1.  | Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin   | 1. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri   | KK       | n/a          | n/a  | 600     | 1.708,19 | 195             | 1.708,19 | Dinas P3AKB      |
| 2.  | Program Pemberdayaan Perempuan   | 1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG   | Persen   | n/a          | n/a  | 40      | 816,75   | 32,4            | 816,75   | Dinas P3AKB      |
| 3.  | Program Penguatan Pemenuhan Hak Anak   | 1. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak   | Kategori | n/a          | n/a  | Pratama | 4.575,55 | Pratama         | 816,75   | Dinas P3AKB      |
| 4.  | Program Perlindungan Perempuan dan Anak  |   |          |              |      |         | 2.640,00 |                 | 2.640,00 | Dinas P3AKB      |
|   |  | 1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan  | Persen   | n/a          | n/a  | 10      | 1.140,00 | 3               | 1.140,00 | Dinas P3AKB      |
|   |  | 2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak   | Persen   | n/a          | n/a  | 10      | 750,00   | 3               | 750,00   | Dinas P3AKB      |
| 5.  |  |   |          |              |      |         | 1,675.23 |                 | 1,675.23 | Dinas P3AKB      |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA | SATUAN  | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |             |
|-----|---|-------------------|---|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------|
|     |   |                   |   | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |             |
|     |   |                   |   |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |             |
|     | Program Pendukung Administrasi Perkantoran<br>Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   | 1.                | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | persen       | 100  | 100    | 100      | 529,30          | 95       | 529,30           | Dinas P3AKB |
|     |   | 2.                | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  | Persen       | 100  | 100    | 100      | 1.145,93        | 95       | 1.145,93         | Dinas P3AKB |
| 6.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                     |                   |   |              |      |        | 2.497,81 |                 | 2.497,81 | Dinas P3AKB      |             |
|     |   | 1.                | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  | persen       | 100  | 100    | 100      | 2.108,11        | 95       | 2.108,11         | Dinas P3AKB |
|     |   | 2.                | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana           | Unit         | 128  | 128    | 205      | 389,70          | 120      | 389,70           | Dinas P3AKB |
| 7.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |                   |   |              |      |        | 362,50   |                 | 362,50   | Dinas P3AKB      |             |
|     |   | 1.                | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   | persen       | 100  | 100    | 100      | 72,50           | 95       | 72,50            | Dinas P3AKB |
|     |   | 2.                | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                | persen       | 100  | 100    | 100      | 260,00          | 95       | 260,00           | Dinas P3AKB |
|     |   | 3.                | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                             | persen       | 100  | 100    | 100      | 30,00           | 95       | 30,00            | Dinas P3AKB |



| NO.           | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|---|--|----------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|               |   |  |          | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|               |   |  |          |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
| <b>PANGAN</b> |   |  |          |              |      |        |          |                 |          |                  |
| 1.            | Program Pengembangan Desa Pangan  | 1. Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)  | desa     | -            | 18   | 4      | 484,00   | 4               | 484,00   | Dinas Pangan     |
| 2.            | Program pengembangan Panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan                           | 1. Persentase Peningkatan skor PPH   | persen   | -            | 87   | 1,00   | 1.155,00 | 1,00            | 1.155,00 | Dinas Pangan     |
| 3.            | Program Pengembangan Kelembagaan Petani, Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna             | 1. Jumlah Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna   | kelompok | -            |      | 50     | 1.800,00 | 50              | 1.800,00 | Dinas Pangan     |
| 4.            | Program Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian   | 1. Jumlah Pusat Pelayanan Penyuluhan Pertanian   | Unit     | -            | 80   | 25     | 3.221,00 | 25              | 3.221,00 | Dinas Pangan     |
| 5.            | Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan  | 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita   | persen   | -            | 63   | 63,94  | 1.145,00 | 63,94           | 1.145,00 | Dinas Pangan     |
| 6.            | Program Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan                                     | 1. Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10$ dan pasokan pangan   | Persen   | -            | 99   | 100    | 755,00   | 100             | 755,00   | Dinas Pangan     |
| 7.            | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pangan  |  |          |              |      |        | 2.584,00 |                 | 2.584,00 |                  |
|               |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pangan | persen   | 100          | 100  | 100    | 1.584,00 | 95              | 1.584,00 | Dinas Pangan     |
|               |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan  | Persen   | 100          | 100  | 100    | 1.000,00 | 95              | 1.000,00 | Dinas Pangan     |
| 8.            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pangan                                     |  |          |              |      |        | 3.730,00 |                 | 3.730,00 |                  |
|               |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pangan  | persen   | 100          | 100  | 100    | 2.000,00 | 95              | 2.000,00 | Dinas Pangan     |
|               |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan       | Persen   | 100          | 100  | 100    | 1.370,00 | 95              | 1.370,00 | Dinas Pangan     |
| 9.            | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pangan |  |          |              |      |        | 4.775,00 |                 | 4.775,00 |                  |
|               |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pangan   | persen   | 100          | 100  | 85,00  | 1.000,00 | 95              | 1.000,00 | Dinas Pangan     |
|               |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pangan                                | persen   | 100          | 100  | 85,00  | 1.775,00 | 95              | 1.775,00 | Dinas Pangan     |



| NO.               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |           | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------|---|--|--------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|                   |   |  |        | 2017         | 2018      | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|                   |   |  |        |              |           | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
|                   |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pangan                                       | persen | 100          | 100       | 85,00  | 2.000,00  | 95              | 2.000,00  | Dinas Pangan     |
| <b>PERTANAHAN</b> |   |  |        |              |           |        |           |                 |           |                  |
| 1                 | Program Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik                            | 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik  | Persen | 29           | 29 Lokasi | 31,03  | 30.220,00 | 95              | 30.220,00 | Setda            |
| 1.                | Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah                        |  |        |              |           |        | 35.103,00 |                 | 35.103,00 | Dinas LH         |
|                   |   | 1. Cakupan Pelayanan Persampahan   | persen | 1,83         | 1,83      | 1,91   | 20.000,00 | 1.4             | 20.000,00 | Dinas LH         |
|                   |   | 2. Cakupan Pelayanan penanganan limbah   | persen | 0            | 0         | 7,17   | 15.103,00 | 0.34            | 15.103,00 | Dinas LH         |
| 2.                | Program Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Permukiman Kumuh             | 1. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di permukiman kumuh   | unit   | 0            | 0         | 535    | 1.590,00  | 535             | 1.590,00  | Dinas LH         |
| 3.                | Program peningkatan kualitas lingkungan hidup                             | 1. Tingkat Kualitas Lingkungan   | poin   | 61           | 61        | 1,50   | 2.360,00  | 38.83           | 2.360,00  | Dinas LH         |
| 4.                | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau                                   | 1. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang tertata   | persen | 63           | 100       | 100    | 69.946,36 | 95              | 69.946,36 | Dinas LH         |
| 5.                | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                      | 1. Tingkat Pelayanan Persampahan   | persen | 10           | 10        | 3,50   | 10.294,19 | 8.46            | 10.294,19 | Dinas LH         |
| 6.                | Program Pelestarian, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam         | 1. Persentase Luas Tutupan Lahan   | persen | 31           | 31        | 0,01   | 1.205,00  | 29.06           | 1.205,00  | Dinas LH         |
| 7.                | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Lingkungan Hidup        |  |        |              |           |        | 2.337,28  |                 | 2.337,28  | Dinas LH         |
|                   |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Lingkungan Hidup | persen | 100          | 100       | 100    | 1.200,00  | 95              | 1.200,00  | Dinas LH         |
|                   |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup  | Persen | 100          | 100       | 100    | 1.137,28  | 95              | 1.137,28  | Dinas LH         |
| 8.                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Lingkungan Hidup |  |        |              |           |        | 772,46    |                 | 772,46    | Dinas LH         |
|                   |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Lingkungan Hidup  | persen | 100          | 100       | 100    | 400,00    | 95              | 400,00    | Dinas LH         |
|                   |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin   | persen | 100          | 100       | 100    | 372,46    | 95              | 372,46    | Dinas LH         |



| NO.   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |             |
|---|---|-------------------|---|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------|
|   |   |                   |   | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |             |
|   |   |                   |   |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |             |
|   |   |                   |   |              |       |        |          |                 |          |                  |             |
|   |   |                   |   |              |       |        |          |                 |          |                  |             |
| 9.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup |                   |   |              |       |        | 75,07    |                 | 75,07    | Dinas LH         |             |
|   |   | 1.                | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Lingkungan Hidup                 | persen       | 100   | 100    | 100      | 15,07           | 95       | 15,07            | Dinas LH    |
|   |   | 2.                | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup    | persen       | 100   | 100    | 100      | 20,00           | 95       | 20,00            | Dinas LH    |
|   |   | 3.                | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup | persen       | 100   | 100    | 100      | 40,00           | 95       | 40,00            | Dinas LH    |
| <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |   |                   |   |              |       |        |          |                 |          |                  |             |
| 1.  | Program Pelayanan Administrasi Kependudukan   |                   |   |              |       |        | 4.597,50 |                 | 4.597,50 | Disdukcapil      |             |
|   |   | 1                 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  | Poin         | 71    | 77     | 81,60    | 1.000,00        | 81,00    | 1.000,00         | Disdukcapil |
|   |   | 2                 | Prosentase distribusi dok kependudukan melalui PT. Pos Indonesia                                  | Persen       | 0     | 0      | 100      | 2.000,00        | 95       | 2.000,00         | Disdukcapil |
|   |   | 3                 | Prosentase sinergitas Sistem Administrasi kependudukan (SAK)                                      | Persen       | 100   | 100    | 100      | 1.597,50        | 95       | 1.597,00         | Disdukcapil |
| 2.  | Program Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan   |                   |   |              |       |        | 100      | 200,00          |          | 200,00           | Disdukcapil |
|   |   | 1.                | Persentase Pengelolaan SIAK tingkat Kecamatan/ Kabupaten  | persen       | 100   | 100    | 100      | 100,00          | 95       | 100,00           | Disdukcapil |
|   |   | 2                 | Prosentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan                                 | Persen       | 100   | 100    | 100      | 100,00          | 95       | 100,00           | Disdukcapil |
| 3.  | Program Administrasi Pendaftaran Penduduk   |                   |   |              |       |        | 1.125,00 |                 | 1.125,00 | Disdukcapil      |             |
|   |   | 1.                | Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak   | Persen       | 46,44 | 46,53  | 62,56    | 500,00          | 30,01    | 500,00           | Disdukcapil |
|   |   | 2.                | Prosentase Pelayanan Pindah/Datang penduduk   | Persen       | 100   | 100    | 100      | 625,00          | 95,00    | 625,00           | Disdukcapil |
| 4.  | Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil  |                   |   |              |       |        | 80,00    |                 | 80,00    | Disdukcapil      |             |
|   |   | 1.                | Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian                                    | Persen       | 100   | 100    | 100      | 80,00           | 95,00    | 80,00            | Disdukcapil |
| 5.  |   |                   |   |              |       |        | 175,00   |                 | 175,00   | Disdukcapil      |             |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|     |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|     |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|     | Program Peningkatan Pemanfaatan data kependudukan   | 1. Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Dok    | 0            | 9    | 57,00  | 75,00    | 18              | 75,00    | Disdukcapil      |
|     |   | 2. Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan  | Persen | 0            | 100  | 100    | 100      | 20,00           | 100      | Disdukcapil      |
| 6.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  |  |        |              |      |        | 904,00   |                 | 904,00   | Disdukcapil      |
|     |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | persen | 100          | 100  | 100    | 502,00   | 95,00           | 502,00   | Disdukcapil      |
|     |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | Persen | 100          | 100  | 100    | 402,00   | 95,00           | 402,00   | Disdukcapil      |
| 7.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                     |  |        |              |      |        | 9.871,00 |                 | 9.871,00 | Disdukcapil      |
|     |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | persen | 100          | 100  | 100    | 5.871,00 | 95,00           | 5.871,00 | Disdukcapil      |
|     |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil       | Persen | 100          | 100  | 100    | 4.000,00 | 95,00           | 4.000,00 | Disdukcapil      |
| 8.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |        |              |      |        | 150,00   |                 | 150,00   | Disdukcapil      |
|     |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | persen | 100          | 100  | 100    | 50,00    | 95,00           | 50,00    | Disdukcapil      |
|     |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                | persen | 100          | 100  | 100    | 50,00    | 95,00           | 50,00    | Disdukcapil      |



| NO.                                      | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH            | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN     | KONDISI AWAL |         | RPJMD   |          | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|--|------------|--------------|---------|---------|----------|-----------------|-----------|------------------|
|  |  |  |            | 2017         | 2018    | 2020    |          | 2020            |           |                  |
|  |  |  |            |              |         | Target  | Juta Rp. | Target          | Juta Rp.  |                  |
|  |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | persen     | 100          | 100     | 100     | 50,00    | 95,00           | 50,00     | Disdukcapil      |
| <b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> |  |  |            |              |         |         |          |                 |           |                  |
| 1.                                       | Program Pembinaan Peningkatan Kompetensi Lembaga dan Aparatur Desa |  |            |              |         |         | 2.986,00 |                 | 1.386,00  | Dinas PMD        |
|  |  | 1. Jumlah Pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat   | orang      | 0            | 0       | 180,00  | 1.000,00 | 0               | 600,00    | Dinas PMD        |
|  |  | 2. Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan  | persen (%) | 40           | 50      | 60,00   | 1.986,00 | 55              | 786,00    | Dinas PMD        |
| 2.                                       | Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa                        |  |            |              |         |         | 2.265,00 |                 | 2.265,00  | Dinas PMD        |
|  |  | 1. Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes  | persen     | 15           | 25      | 45,00   | 1.265,00 | 51,76           | 1.265,00  | Dinas PMD        |
|  |  | 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan desa  | Persen     | 45           | 50      | 55,00   | 1.000,00 | 55,80           | 1.000,00  | Dinas PMD        |
| 3.                                       | Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                     |  |            |              |         |         | 1.932,50 |                 | 2.710,00  | Dinas PMD        |
|  |  | 1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif   | Unit       | 0            | 43      | 60,00   | 932,50   | 55              | 1.300,00  | Dinas PMD        |
|  |  | 2. Prosentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa   | persen     | 0            | 0       | 100     | 1.000,00 | 95,00           | 1.410,00  | Dinas PMD        |
| 4.                                       | Program Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Desa                  | 1. Persentase PADes terhadap APBDes  | Persen     | 20           | 10      | 12,00   | 1.019,81 | 12,00           | 2.141,81  | Dinas PMD        |
| 5.                                       | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                |  |            |              |         |         | 8.427,03 |                 | 16.440,84 | Dinas PMD        |
|  |  | 1. Jumlah terpenuhinya partisipasi swadaya masyarakat  | Rp. (000)  | 266.000      | 300.000 | 725.600 | 4.427,03 | 480.100         | 8.440,84  | Dinas PMD        |
|  |  | 2. Jumlah infrastruktur posyandu yang di bangun  | unit       | 0            | 5       | 5,00    | 4.000,00 | 2               | 4.000,00  | Dinas PMD        |
| 6.                                       |  |  |            |              |         |         | 804,00   |                 | 790,00    | Dinas PMD        |



| NO.   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|--|--------|--------------|-------|--------|-----------|-----------------|------------|------------------|
|   |   |  |        | 2017         | 2018  | 2020   |           | 2020            |            |                  |
|   |   |  |        |              |       | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.   |                  |
|   | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | persen | 100          | 100   | 100    | 402,00    | 95,00           | 395,00     | Dinas PMD        |
|   |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | Persen | 100          | 100   | 100    | 402,00    | 95,00           | 395,00     | Dinas PMD        |
| 7.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                     |  |        |              |       |        | 290,00    |                 | 150.000,00 | Dinas PMD        |
|   |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | persen | 100          | 100   | 100    | 145,00    | 95,00           | 75.000,00  | Dinas PMD        |
|   |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa       | persen | 100          | 100   | 100    | 145,00    | 95,00           | 75.000,00  | Dinas PMD        |
| 8   | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |        |              |       |        | 79,00     |                 | 12,00      | Dinas PMD        |
|   |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | persen | 100          | 100   | 100    | 26,33     | 95,00           | 4,00       | Dinas PMD        |
|   |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                | persen | 100          | 100   | 100    | 26,33     | 95,00           | 4,00       | Dinas PMD        |
|   |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                             | persen | 100          | 100   | 100    | 26,34     | 95,00           | 4,00       | Dinas PMD        |
| <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |   |  |        |              |       |        |           |                 |            |                  |
| 1.  | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  | 1. Cakupan Angka Total Fertility Rate  | Point  | 2,00         | 2,00  | 2,14   | 13.528,82 | 2,27            | 13.528,82  | Dinas P3AKB      |
| 2.  | Program Keluarga Sejahtera  |  |        |              |       |        | 2.150,00  |                 | 2.550,00   | Dinas P3AKB      |
|   |   | 1. Rata-rata Usia Perkawinan   | Tahun  | 19           | 19    | 19,60  | 1.900,00  | 20              | 2.300,00   | Dinas P3AKB      |
|   |   | 2. Menurunnya Tingkat Perceraian   | Kasus  | 4.311        | 4.652 | 4.600  | 250,00    | 4.600           | 250,00     | Dinas P3AKB      |



| NO.                               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------------|--|---|--------|--------------|-------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|                                   |  |   |        | 2017         | 2018  | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|                                   |  |   |        |              |       | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
| <b>PERHUBUNGAN</b>                |  |   |        |              |       |        |           |                 |           |                  |
| 1.                                | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan   | 1. Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan   | persen | 65,0         | 65,00 | 70,00  | 48.250,00 | 65,00           | 48.250,00 | Dishub           |
|                                   |  | 2. Persentase Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | persen | 25,00        | 37,00 | 41,64  | 47.000,00 | 29,00           | 47.000,00 | Dishub           |
| 2.                                | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perhubungan  |   |        |              |       |        | 3.054,00  |                 | 3.054,00  | Dishub           |
|                                   |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perhubungan | persen | 100          | 100   | 100    | 1.554,00  | 90,00           | 1.554,00  | Dishub           |
|                                   |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan  | Persen | 100          | 100   | 100    | 1.500,00  | 70,00           | 1.500,00  | Dishub           |
| 3.                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perhubungan                                     |   |        |              |       |        | 2.600,00  |                 | 2.600,00  | Dishub           |
|                                   |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perhubungan  | persen | 100          | 100   | 100    | 1.300,00  | 90,00           | 1.300,00  | Dishub           |
|                                   |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan       | persen | 100          | 100   | 100    | 1.300,00  | 90,00           | 1.300,00  | Dishub           |
| 4.                                | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan |   |        |              |       |        | 200,00    |                 | 200,00    | Dishub           |
|                                   |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perhubungan   | persen | 100          | 100   | 100    | 60,00     | 90,00           | 60,00     | Dishub           |
|                                   |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan                                | persen | 100          | 100   | 100    | 70,00     | 90,00           | 70,00     | Dishub           |
|                                   |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan                             | persen | 100          | 100   | 100    | 70,00     | 70,00           | 70,00     | Dishub           |
| <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |  |   |        |              |       |        |           |                 |           |                  |
| 1.                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi                      |   |        |              |       |        | 38.148,00 |                 | 38.148,00 |                  |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|----------|--------------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|     |   |  |          | 2017         | 2018 | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|     |   |  |          |              |      | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
|     |   | 1. Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi  | aplikasi | 0            | 0    | 11     | 19.148,00 | 5               | 19.148,00 | Diskominfo       |
|     |   | 2. Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah   | buah     | n/a          | n/a  | 159    | 19.000,00 | 10              | 19.000,00 | Diskominfo       |
| 2.  | Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi  | 1. Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik  | unit     | n/a          | n/a  | 82     | 16,20     | 85              | 16,20     | Diskominfo       |
| 3.  | Program Pengembangan Desa Teknologi, informasi dan komunikasi   | 1. Jumlah Desa Teknologi, informasi dan komunikasi (Destika)   | desa     | 0            | 0    | 61     | 5.200,00  | 63              | 5.200,00  | Diskominfo       |
| 4.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika  |  |          |              |      |        | 1.245,00  |                 | 1.245,00  | Diskominfo       |
|     |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan                                     | Persen   | 100          | 100  | 100    | 645,00    | 95,00           | 645,00    | Diskominfo       |
|     |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika  | Persen   | 100          | 100  | 100    | 600,00    | 95,00           | 600,00    | Diskominfo       |
| 5.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika                                     |  |          |              |      |        | 915,00    |                 | 900,00    | Diskominfo       |
|     |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika  | persen   | 100          | 100  | 100    | 465,00    | 95,00           | 450,00    | Diskominfo       |
|     |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika | persen   | 100          | 100  | 100    | 450,00    | 95,00           | 450,00    | Diskominfo       |
| 6.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika |  |          |              |      |        | 41,00     |                 | 39,00     | Diskominfo       |
|     |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika                                       | persen   | 100          | 100  | 100    | 13,00     | 95,00           | 13,00     | Diskominfo       |



| NO.                                       | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                              | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|--|----------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|   |  |  |          | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|   |  |  |          |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|   |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika    | persen   | 100          | 100  | 100    | 13,00    | 95,00           | 13,00    | Diskominfo       |
|   |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika | persen   | 100          | 100  | 100    | 15,00    | 75,00           | 13,00    | Diskominfo       |
| <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b> |  |  |          |              |      |        |          |                 |          |                  |
| 1.  | Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Keluarga Miskin                                   | 1. Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin   | persen   | N/A          | N/A  | 3,00   | 640,00   | 3,00            | 53,25    | Dinas KKUKM      |
| 2.  | Program Pengembangan Usaha Mikro   | 1. Peningkatan Volume pelaku Usaha Mikro   | persen   | N/A          | N/A  | 5,00   | 3.694,40 | 5,00            | 6.000,00 | Dinas KKUKM      |
| 3.  | Program Pengembangan Produk Lokal berbasis Usaha Mikro                               |  |          |              |      |        | 980,00   |                 | 950,00   | Dinas KKUKM      |
|   |  | 1. Jumlah Produk berbahan baku lokal yang dikembangkan   | produk   | 10           | 10   | 10     | 490,00   | 4               | 475,00   | Dinas KKUKM      |
|   |  | 2. Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemasaran produk lokal usaha mikro                                  | unit     | N/A          | N/A  | 3      | 490,00   | 1               | 475,00   | Dinas KKUKM      |
| 4.  | Program Optimalisasi Koperasi  |  |          |              |      |        | 2.610,50 |                 | 32,00    | Dinas KKUKM      |
|   |  | 1. Persentase Koperasi Aktif   | persen   | n/a          | 133  | 7,00   | 310,50   | 32,40           | 6,00     | Dinas KKUKM      |
|   |  | 2. Jumlah koperasi yang dapat menyusun laporan keuangan  | koperasi | n/a          | 133  | 10     | 1.000,00 | 122             | 10,00    | Dinas KKUKM      |
|   |  | 3. Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti pelatihan pengawasan  | orang    | 0            | 0    | 100    | 300,00   | 0               | 6,00     | Dinas KKUKM      |
|   |  | 4. Koperasi yang melaksanakan RAT  | koperasi | 164          | 164  | 164    | 1.000,00 | 122             | 10,00    | Dinas KKUKM      |
| 5.  | Program Penguatan Kelembagaan Koperasi   |  |          |              |      |        | 1.470,00 |                 | 196,56   | Dinas KKUKM      |
|   |  | 1. Jumlah Koperasi baru  | Koperasi | 1            | 12   | 10     | 770,00   | 40              | 100      | Dinas KKUKM      |
|   |  | 2. Jumlah Bidang Usaha Koperasi  | Koperasi | 2            | 2    | 5      | 700,00   | 2               | 96,56    | Dinas KKUKM      |
| 6.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |          |              |      |        | 827,00   |                 | 946,85   | Dinas KKUKM      |



| NO.                    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                        |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|                        |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                        |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | persen | 100          | 100  | 100    | 427,00   | 95,00           | 500,00   | Dinas KKUKM      |
|                        |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Persen | 100          | 100  | 100    | 400,00   | 95,00           | 446,85   | Dinas KKUKM      |
| 7.                     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                     |  |        |              |      |        | 436,20   |                 | 164,547  | Dinas KKUKM      |
|                        |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | persen | 100          | 100  | 100    | 236,20   | 95,00           | 84,547   | Dinas KKUKM      |
|                        |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah       | persen | 100          | 100  | 100    | 200,00   | 90,00           | 80,00    | Dinas KKUKM      |
| 8.                     | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |  |        |              |      |        | 280,00   |                 | 59,55    | Dinas KKUKM      |
|                        |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | persen | 100          | 100  | 100    | 80,00    | 95,00           | 19,55    | Dinas KKUKM      |
|                        |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                | persen | 100          | 100  | 100    | 100,00   | 95,00           | 20,00    | Dinas KKUKM      |
|                        |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | persen | 100          | 100  | 100    | 100,00   | 95,00           | 20,00    | Dinas KKUKM      |
| <b>PENANAMAN MODAL</b> |   |  |        |              |      |        |          |                 |          |                  |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA | SATUAN   | KONDISI AWAL |         | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |         |
|-----|--|-------------------|--|--------------|---------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|---------|
|     |  |                   |  | 2017         | 2018    | 2020   |          | 2020            |          |                  |         |
|     |  |                   |  |              |         | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |         |
| 1.  | Program Reformasi Birokrasi Perizinan  |                   |  |              |         |        | 864,50   |                 | 587,00   | Dinas PMPTSP     |         |
|     |  | 1.                | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan  | nilai        | 80,00   | 80,00  | 82,92    | 300,00          | 78,15    | 200,00           | DPMPTSP |
|     |  | 2.                | Regulasi Pelayanan Perizinan   | Regulasi     | 6       | 6      | 2        | 264,50          | 1        | 187,00           | DPMPTSP |
|     |  | 3.                | Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu   | persen       | 100     | 100    | 100      | 300,00          | 95       | 200,00           | DPMPTSP |
| 2.  | Program Percepatan Investasi Daerah  | 1.                | Nilai Realisasi Investasi  | milyar       | 629.364 | 1.288  | 380,00   | 762,50          | 380,00   | 153,60           | DPMPTSP |
| 3.  | Program Pengendalian Investasi   | 1.                | Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan ruang   | persen       | 100     | 100    | 100      | 485,00          | 100      | 100,18           | DPMPTSP |
| 4.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Penanaman Modal  |                   |  |              |         |        | 983,06   | 100             | 760,43   | DPMPTSP          |         |
|     |  | 1.                | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Penanaman Modal | persen       | 100     | 100    | 100      | 500,00          | 95,00    | 400,00           | DPMPTSP |
|     |  | 2.                | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal  | persen       | 100     | 100    | 100      | 483,06          | 95,00    | 360,43           | DPMPTSP |
| 5.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Penanaman Modal                                     |                   |  |              |         |        | 74,35    | 100             | 244,59   | DPMPTSP          |         |
|     |  | 1.                | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal  | persen       | 100     | 100    | 100      | 40,00           | 95,00    | 124,59           | DPMPTSP |
|     |  | 2.                | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal       | persen       | 100     | 100    | 100      | 34,35           | 95,00    | 120,00           | DPMPTSP |
| 6.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal |                   |  |              |         |        | 42,79    | 100             | 16,14    | DPMPTSP          |         |
|     |  | 1.                | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Penanaman Modal   | persen       | 100     | 100    | 100      | 10,00           | 95,00    | 5,00             | DPMPTSP |
|     |  | 2.                | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal                                | persen       | 100     | 100    | 100      | 10,00           | 95,00    | 5,00             | DPMPTSP |
|     |  | 3.                | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal                             | persen       | 100     | 100    | 100      | 22,79           | 95,00    | 6,14             | DPMPTSP |



| NO.                             | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                       | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN     | KONDISI AWAL       |                    | RPJMD              |           | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------------------|---|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|------------------|
|                                 |   |   |            | 2017               | 2018               | 2020               |           | 2020            |          |                  |
|                                 |   |   |            |                    |                    | Target             | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp. |                  |
| <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b> |   |   |            |                    |                    |                    |           |                 |          |                  |
| 1.                              | Program Peningkatan Prestasi Olahraga   | 1. Jumlah prestasi masyarakat di bidang Olahraga  | prestasi   | 54                 | 38                 | 55                 | 2.500,00  | 55              | 1.708,70 | Dispora          |
| 2.                              | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                                 |   |            |                    |                    |                    | 5.155,50  |                 | 3.258,60 | Dispora          |
|                                 |   | 1. Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga  | Jiwa       | 650                | 700                | 1.200              | 1.155,50  | 450             | 1.000,00 | Dispora          |
|                                 |   | 2. Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlit yang dibina   | Jiwa       | 13                 | 13                 | 58                 | 2.000,00  | 70              | 1.258,60 | Dispora          |
|                                 |   | 3. Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yang dibina  | Kompetisi  | 12 jenis 25 cabang | 12 jenis 26 cabang | 17 jenis 30 cabang | 2.000,00  | 10              | 1.000,00 | Dispora          |
| 3.                              | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                          |   |            |                    |                    |                    | 1.068,00  |                 | 970,52   | Dispora          |
|                                 |   | 1. Jumlah Pemuda Pelopor Terpilih dan yang mengikuti even di tingkat provinsi   | Jiwa       | 1                  | 1                  | 3                  | 310,00    | 2               | 175,00   | Dispora          |
|                                 |   | 2. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina   | Organisasi | 45                 | 45                 | 48                 | 178,00    | 0               | 175,00   | Dispora          |
| 4.                              | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                    | 1. Peningkatan Pemahaman Baris-Berbaris dan Cakupan Penjaringan Calon Paskibra  | Jiwa       | 34                 | 34                 | 68                 | 580,00    | 68              | 620,52   | Dispora          |
| 5.                              | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda |   |            |                    |                    |                    | 935,00    | 50              | 636,21   | Dispora          |
|                                 |   | 1. Jumlah Pemuda Berwirausaha   | Jiwa       | 20                 | 20                 | 50                 | 655,00    | 5               | 336,21   | Dispora          |
|                                 |   | 2. Peningkatan Pemahaman Pemuda Berwirausaha  | Jiwa       | 20                 | 20                 | 200                | 280,00    | 0               | 300,00   | Dispora          |
| 6.                              | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                             |   |            |                    |                    |                    | 54.241,00 | 3               | 6.215,11 | Dispora          |
|                                 |   | 1. Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga  | Unit       | 3                  | 6                  | 3                  | 52.750,00 | 1               | 2.000,00 | Dispora          |
|                                 |   | 2. Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi  | Unit       | 1                  | 2                  | 2                  | 856,00    | 2               | 2.000,00 | Dispora          |
|                                 |   | 3. Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga   | Unit       | 7                  | 7                  | 5                  | 635,00    | 2               | 2.215,11 | Dispora          |
| 7.                              | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepemudaan dan Olahraga     |   |            |                    |                    |                    | 783,00    | 100             | 455,00   | Dispora          |
|                                 |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga | persen     | 100                | 100                | 100                | 400,00    | 75,00           | 255,00   | Dispora          |



| NO.               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------|--|---|---------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                   |  |   |         | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|                   |  |   |         |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                   |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga  | Persen  | 100          | 100   | 100    | 383,00   | 95,00           | 200,00   | Dispora          |
| 8.                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                     |   |         |              |       |        | 650,00   | 100             | 350,00   | Dispora          |
|                   |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga  | persen  | 100          | 100   | 100    | 350,00   | 85,00           | 200,00   | Dispora          |
|                   |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga | Persen  | 100          | 100   | 100    | 300,00   | 95,00           | 150,00   | Dispora          |
| 9.                | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga |   |         |              |       |        | 101,50   | 100             | 116,00   | Dispora          |
|                   |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                       | persen  | 100          | 100   | 100    | 30,00    | 95,00           | 35,00    | Dispora          |
|                   |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga                          | persen  | 100          | 100   | 100    | 30,00    | 95,00           | 35,00    | Dispora          |
|                   |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga                       | persen  | 100          | 100   | 100    | 41,50    | 75,00           | 46,00    | Dispora          |
| <b>STATISTIK</b>  |  |   |         |              |       |        |          |                 |          |                  |
| 1                 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral   |   |         |              |       |        | 2.400,00 |                 | 2.400,00 | Diskominfo       |
|                   |  | 1. Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik   | unit    | 5,00         | 5,00  | 5,00   | 1.200,00 | 2               | 1.200,00 | Diskominfo       |
|                   |  | 2. Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah  | dokumen | 10           | 10    | 10     | 1.200,00 | 10              | 1.200,00 | Diskominfo       |
| <b>KEBUDAYAAN</b> |  |   |         |              |       |        |          |                 |          |                  |
| 1.                | Program Peningkatan Prestasi Seni Budaya   | 1. Presentase prestasi masyarakat di bidang Seni Budaya   | persen  | 20,00        | 20,00 | 20,00  | 100      | 95,00           | 100      | Disparbud        |
| 2.                | Program Pengembangan Pelestarian Nilai Budaya  |   |         |              |       |        | 1.200,00 |                 | 676,18   |                  |
|                   |  | 1. Jumlah event seni dan budaya   | kali    | 2            | 2     | 37,00  | 600,00   | 1               | 376,18   | Disparbud        |
|                   |  | 2. Jumlah Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan  | buah    | 100          | 100   | 125,00 | 600,00   | 1               | 300,00   | Disparbud        |



| NO.                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | KONDISI AWAL |      | RPJMD     |           | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |          |
|---------------------|---|---|---|--------------|------|-----------|-----------|-----------------|----------|------------------|----------|
|                     |   |   |   | 2017         | 2018 | 2020      |           | 2020            |          |                  |          |
|                     |   |   |   |              |      | Target    | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp. |                  |          |
| <b>PERPUSTAKAAN</b> |   |   |   |              |      |           |           |                 |          |                  |          |
| 1.                  | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan   | 1. Rasio Kunjungan perpustakaan per tahun                             | poin  | 100          | 100  | 30.000,00 | 5.857,23  | 100             | 125,04   | Diskapus         |          |
| <b>KEARSIPAN</b>    |   |   |   |              |      |           |           |                 |          |                  |          |
| 1.                  | Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan  | 1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan | persen  | 100          | 100  | 100       | 691,00    | 100             | 72,235   | Diskapus         |          |
| 2.                  | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip   | 1. Persentase arsip statis yang diselamatkan                          | persen  | 100          | 100  | 100       | 1.541,100 | 100             | 69,938   | Diskapus         |          |
| 3.                  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  |   |   |              |      |           | 1.248,000 |                 | 485,630  | Diskapus         |          |
|                     |   | 1.  | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan | persen       | 100  | 100       | 100       | 648,000         | 95,00    | 285,630          | Diskapus |
|                     |   | 2.  | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  | Persen       | 100  | 100       | 100       | 600,000         | 95,00    | 200,000          | Diskapus |
| 4.                  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kearsipan dan Perpustakaan                                     |   |   |              |      |           | 500,000   |                 | 79,164   | Diskapus         |          |
|                     |   | 1.  | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  | Persen       | 100  | 100       | 100       | 250,000         | 95,00    | 40,000           | Diskapus |
|                     |   | 2.  | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan       | persen       | 100  | 100       | 100       | 250,000         | 95,00    | 39,164           | Diskapus |
| 5.                  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan dan Perpustakaan |   |   |              |      |           | 324,500   |                 | 32,845   | Diskapus         |          |
|                     |   | 1.  | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan   | persen       | 100  | 100       | 100       | 1000            | 95,00    | 10,000           | Diskapus |
|                     |   | 2.  | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan                                | persen       | 100  | 100       | 100       | 1000            | 95,00    | 10,000           | Diskapus |



| NO.                           | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH             | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |            | RPJMD     |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|---|--|----------|--------------|------------|-----------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                               |   |  |          | 2017         | 2018       | 2020      |          | 2020            |          |                  |
|                               |   |  |          |              |            | Target    | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                               |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan | persen   | 100          | 100        | 100       | 124,500  | 95,00           | 12,845   | Diskapus         |
| <b>URUSAN PILIHAN</b>         |   |  |          |              |            |           |          |                 |          |                  |
| <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |   |  |          |              |            |           |          |                 |          |                  |
| 1.                            | Program Peningkatan Produksi Perikanan                              |  |          |              |            |           | 3.695,00 |                 | 3.695,00 |                  |
|                               |   | 1. Jumlah Produksi Ikan Mas  | Ton      | 1.412        | 1.243      | 24,86     | 995,00   | 1.333,39        | 995,00   | Distankan        |
|                               |   | 2. Jumlah Produksi Ikan Nila   | Ton      | 4.157        | 3.868      | 77,36     | 900,00   | 3.920,00        | 900,00   | Distankan        |
|                               |   | 3. Jumlah Produksi Ikan Lele   | Ton      | 1.662        | 1.427      | 28,55     | 900,00   | 1.450,00        | 900,00   | Distankan        |
|                               |   | 4. Jumlah Produksi Ikan Gurame   | Ton      | 890          | 853        | 17,07     | 900,00   | 890,00          | 900,00   | Distankan        |
| 2.                            | Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Perikanan                      |  |          |              |            |           | 920,00   |                 | 920,00   |                  |
|                               |   | 1. Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat  | kelompok | 21           | 23         | 3         | 460,00   | 4               | 460,00   | Distankan        |
|                               |   | 2. Jumlah omzet pemasaran produk perikanan   | Rupiah   | n/a          | 23.312.000 | 466,24    | 460,00   | 24.300.000      | 460,00   | Distankan        |
| <b>PARIWISATA</b>             |   |  |          |              |            |           |          |                 |          |                  |
| 1.                            | Program pembangunan dan Pengembangan destinasi wisata layak kunjung | 1. Jumlah destinasi wisata layak kunjung   | unit     | 2            | 2          | 2         | 4.338,00 | 1               | 288,00   | Disparbud        |
| 2.                            | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif                                |  |          |              |            |           | 3.600,00 |                 | 354,04   |                  |
|                               |   | 1. Jumlah Kunjungan Event  | orang    | N/A          | N/A        | 30.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00        | 154,04   | Disparbud        |
|                               |   | 2. Jumlah Industri Kreatif sub sektor kriya  | unit     | N/A          | N/A        | 11        | 1.000,00 | 64              | 100,00   | Disparbud        |
|                               |   | 3. Jumlah Industri Kreatif sub sektor kuliner  | unit     | N/A          | N/A        | 50        | 1.000,00 | 14              | 100,00   | Disparbud        |
| 3.                            | Program Pengembangan Desa Wisata                                    | 1. Jumlah Desa Wisata  | desa     | 1            | 1          | 1         | 334,88   | 1               | 260,00   | Disparbud        |
| 4.                            | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                           |  |          |              |            |           | 1.850,00 |                 | 330,00   |                  |
|                               |   | 1. Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan   | persen   | n/a          | n/a        | 5,00      | 950,00   | 2,00            | 330,00   | Disparbud        |
|                               |   | 2. Peningkatan PAD   | persen   | 285,00       | 46,00      | 15,00     | 900,00   | 17,00           | 100,00   | Disparbud        |
| 5.                            | Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata                           |  |          |              |            |           | 500,00   |                 | 500,00   | Disparbud        |
|                               |   | 1. Jumlah Pokdarwis  | kelompok | 4            | 5          | 15        | 200,00   | 15              | 200,00   | Disparbud        |
|                               |   | 2. Jumlah Kerjasama Pariwisata yang dilakukan  | MOU      | 1            | 2          | 2         | 200,00   | 3               | 200,00   | Disparbud        |
|                               |   | 3. Sertifikasi/standarisasi Pariwisata   | buah     | 0            | 8          | 50        | 100,00   | 2               | 100,00   | Disparbud        |



| NO.              | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA | SATUAN   | KONDISI AWAL               |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |           |
|------------------|--|-------------------|--|----------------------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------|
|                  |  |                   |  | 2017                       | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |           |
|                  |  |                   |  |                            |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |           |
| 6.               | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  |                   |  |                            |      |        | 1.671,10 |                 | 752,18   |                  |           |
|                  |  | 1.                | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan | persen                     | 100  | 100    | 100      | 871,10          | 95,00    | 377,18           | Disparbud |
|                  |  | 2.                | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  | Persen                     | 100  | 100    | 100      | 800,00          | 95,00    | 375,00           | Disparbud |
| 7.               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                                     |                   |  |                            |      |        | 73,20    |                 | 169,50   |                  |           |
|                  |  | 1.                | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  | persen                     | 100  | 100    | 100      | 40,00           | 95,00    | 89,50            | Disparbud |
|                  |  | 2.                | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan       | persen                     | 100  | 100    | 100      | 33,20           | 90,00    | 80,00            | Disparbud |
| 8.               | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata dan Kebudayaan |                   |  |                            |      |        | 96,70    |                 | 96,70    |                  |           |
|                  |  | 1.                | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan   | persen                     | 100  | 100    | 100      | 30,70           | 95,00    | 30,70            | Disparbud |
|                  |  | 2.                | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                                | persen                     | 100  | 100    | 100      | 33,00           | 95,00    | 33,00            | Disparbud |
|                  |  | 3.                | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                             | persen                     | 100  | 100    | 100      | 33,00           | 95,00    | 33,00            | Disparbud |
| <b>PERTANIAN</b> |  |                   |  |                            |      |        |          |                 |          |                  |           |
| 1.               | Program Pemberdayaan Petani Miskin   | 1.                | Jumlah keluarga Petani miskin yang menjadi mandiri   | Rumah Tangga Sasaran (RTS) | N/A  | N/A    | 275      | 1.094.375,00    | 275      | 1.094.375,00     | Distankan |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN  | KONDISI AWAL |         | RPJMD   |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |           |
|-----|---|-------------------|---|--------------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
|     |   |                   |   | 2017         | 2018    | 2020    |           | 2020            |           |                  |           |
|     |   |                   |   |              |         | Target  | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |           |
| 2.  | Program Peningkatan Produksi Hortikultura               |                   |   |              |         |         | 8.102,40  |                 | 8.102,40  | Distankan        |           |
|     |   | 1.                | Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (Ton)  | persen       | 37.705  | 31.981  | 1,50      | 902,40          | 30.167    | 902,40           | Distankan |
|     |   | 2.                | Persentase peningkatan produksi Cabai Besar (Ton)   | persen       | 12.452  | 13.053  | 1,50      | 900,00          | 6.000     | 900,00           | Distankan |
|     |   | 3.                | Persentase peningkatan produksi Kentang (Ton)   | persen       | 2607    | 3601    | 1,00      | 900,00          | 6.000     | 900,00           | Distankan |
|     |   | 4.                | Persentase peningkatan produksi Mangga (Ton)  | persen       | 60.008  | 44.755  | 1,50      | 900,00          | 50.000    | 900,00           | Distankan |
|     |   | 5.                | Persentase peningkatan produksi Jambu Biji (Ton)  | persen       | 5.369   | 3.618   | 1,00      | 900,00          | 2.000     | 900,00           | Distankan |
|     |   | 6.                | Persentase peningkatan produksi Durian (Ton)  | persen       | 5.151   | 11.263  | 1,00      | 900,00          | 8.000     | 900,00           | Distankan |
|     |   | 7.                | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Hortikultura                           | Unit         | 211     | 371     | 15,00     | 900,00          | 1         | 900,00           | Distankan |
|     |   | 8.                | Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura   | Meter        | N/A     | N/A     | 1.500,00  | 900,00          | 0         | 900,00           | Distankan |
| 3.  | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan             |                   |   |              |         |         | 20.754,47 |                 | 20.754,47 | Distankan        |           |
|     |   | 1.                | Persentase peningkatan produksi Jagung (Ton)  | persen       | 151.646 | 117.598 | 3,00      | 3.459,20        | 145.000   | 3.459,20         | Distankan |
|     |   | 2.                | Persentase peningkatan produksi Padi (Ton)  | persen       | 672.294 | 667.110 | 3,00      | 3.459,20        | 700.000   | 3.459,20         | Distankan |
|     |   | 3.                | Persentase peningkatan produksi Kedelai (Ton)   | persen       | 916     | 2264    | 3,00      | 3.459,20        | 4.500     | 3.459,20         | Distankan |
|     |   | 4.                | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan                         | Unit         | 120     | 195     | 25,00     | 3.459,20        | 220       | 3.459,20         | Distankan |
|     |   | 5.                | Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan | meter        | 8.750   | 9.500   | 1.500,00  | 3.459,20        | 4.300     | 3.459,20         | Distankan |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | KONDISI AWAL |        | RPJMD    |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|----------|--------------|--------|----------|----------|-----------------|----------|------------------|
|     |   |  |          | 2017         | 2018   | 2020     |          | 2020            |          |                  |
|     |   |  |          |              |        | Target   | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|     |   | 6. Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan | meter    | N/A          | 3000   | 1.000,00 | 3.459,20 | 900             | 3.459,20 | Distankan        |
| 4.  | Program Peningkatan Produksi Perkebunan                 |  |          |              |        |          | 1.665,75 |                 | 1.665,75 | Distankan        |
|     |   | 1. Persentase peningkatan produksi Kopi (Ton)  | persen   | 831          | 218    | 2,00     | 237,96   | 1.200           | 237,96   | Distankan        |
|     |   | 2. Persentase peningkatan produksi Cengkeh (Ton)   | persen   | 662          | 453    | 2,00     | 237,96   | 3.000           | 237,96   | Distankan        |
|     |   | 3. Persentase peningkatan produksi Teh (Ton)   | persen   | 1.261        | 341    | 1,50     | 237,96   | 440             | 237,96   | Distankan        |
|     |   | 4. Persentase peningkatan produksi Tembakau (Ton)  | persen   | 1.107        | 839    | 2,00     | 237,96   | 8.500           | 237,96   | Distankan        |
|     |   | 5. Persentase peningkatan produksi Tebu (Ton)  | persen   | 39.334       | 149    | 1,50     | 237,96   | 24.000          | 237,96   | Distankan        |
|     |   | 6. Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Perkebunan                                     | Unit     | 1            | 2      | 10,00    | 237,96   | 1               | 237,96   | Distankan        |
|     |   | 7. Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi perkebunan     | meter    | N/A          | N/A    | 500,00   | 237,96   | 0               | 237,96   | Distankan        |
| 5.  | Program Peningkatan Produksi Peternakan                 |  |          |              |        |          | 1.882,50 |                 | 1.882,50 | Distankan        |
|     |   | 1. Persentase peningkatan produksi daging sapi (Ton)   | persen   | 2.159        | 2.210  | 2,50     | 376,50   | 2,100           | 376,50   | Distankan        |
|     |   | 2. Persentase peningkatan produksi daging domba (Ton)  | persen   | 1.535        | 1.535  | 2,50     | 376,50   | 1,600           | 376,50   | Distankan        |
|     |   | 3. Persentase peningkatan produksi daging ayam pedaging (Ton)  | persen   | 24.352       | 24.358 | 2,50     | 376,50   | 22,000          | 376,50   | Distankan        |
|     |   | 4. Persentase peningkatan produksi telur (Ton)   | persen   | 3.367        | 3.370  | 2,50     | 376,50   | 7,000           | 376,50   | Distankan        |
|     |   | 5. Persentase peningkatan produksi susu sapi (Ribuan Liter)  | persen   | 1.388        | 1.392  | 2,50     | 376,50   | 1,500           | 376,50   | Distankan        |
| 6.  | Program Peningkatan Mutu Hasil Pertanian                |  |          |              |        |          | 1.878,00 |                 | 1.878,00 | Distankan        |
|     |   | 1. Jumlah Pelaku Usaha Tanaman Pangan penerima manfaat   | Kelompok | 198          | 198    | 50,00    | 678,00   | 120             | 678,00   | Distankan        |
|     |   | 2. Jumlah Pelaku Usaha Hortikultura dan Perkebunan penerima manfaat  | Kelompok | 201          | 221    | 4,00     | 600,00   | 2               | 600,00   | Distankan        |



| NO.                | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |            | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------|--|---|----------|--------------|------|--------|------------|-----------------|------------|------------------|
|                    |  |   |          | 2017         | 2018 | 2020   |            | 2020            |            |                  |
|                    |  |   |          |              |      | Target | Juta Rp.   | Target          | Juta Rp.   |                  |
|                    |  | 3. Jumlah Pelaku Usaha Perternakan penerima manfaat   | Kelompok | 43           | 43   | 13,00  | 600,00     | 3               | 600,00     | Distankan        |
| 7.                 | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pertanian  |   |          |              |      |        | 5.000,00   | 10,00           | 5.000,00   | Distankan        |
|                    |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pertanian | persen   | 100          | 100  | 100    | 2.500,00   | 95,00           | 2.500,00   | Distankan        |
|                    |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian  | Persen   | 100          | 100  | 100    | 2.500,00   | 95,00           | 2.500,00   | Distankan        |
| 8.                 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pertanian                                     |   |          |              |      |        | 520.363    |                 | 520.363    | Distankan        |
|                    |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pertanian  | persen   | 100          | 100  | 100    | 260.363    | 95,00           | 260.363    | Distankan        |
|                    |  | 2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian           | Persen   | 100          | 100  | 100    | 260,00     | 95,00           | 260,00     | Distankan        |
| 9.                 | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pertanian |   |          |              |      |        | 161.000,00 |                 | 161.000,00 | Distankan        |
|                    |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pertanian   | persen   | 100          | 100  | 100    | 50.000,00  | 95,00           | 50.000,00  | Distankan        |
|                    |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pertanian                                | persen   | 100          | 100  | 100    | 50.000,00  | 95,00           | 50.000,00  | Distankan        |
|                    |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pertanian                             | persen   | 100          | 100  | 100    | 61.000,00  | 95,00           | 61.000,00  | Distankan        |
| <b>PERDAGANGAN</b> |  |   |          |              |      |        |            |                 |            |                  |
| 1.                 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdagangan  | 1. Infrastruktur Perdagangan yang dibangun  | unit     | 44           | 44   | 4      | 31.400,00  | 4               | 31.400,00  | Dinas Perdagin   |
| 2.                 | Program Peningkatan Kualitas sarana Perdagangan  | 1. Terpenuhinya nilai ekspor  | persen   | 20           | 30   | 20,00  | 2.970,00   | 20,00           | 2.970,00   | Dinas Perdagin   |
| 3.                 | Program Pengembangan Kemitraan pengelolaan pasar   | 1. Persentase pertumbuhan pasar modern dan desa   | persen   | 3            | 12   | 5,00   | 1.675,00   | 5,00            | 1.675,00   | Dinas Perdagin   |
| 4.                 | Program pengendalian dan Pengawasan Perdagangan  | 1. Pengendalian dan pengawasan perdagangan  | kali     | 96           | 96   | 96     | 4.481,42   | 96              | 4.481,42   | Dinas Perdagin   |



| NO.                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |                |
|----------------------|--|-------------------|--|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|----------------|
|                      |  |                   |  | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |                |
|                      |  |                   |  |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |                |
| 5.                   | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perdagangan  |                   |  |              |      |        | 1.286,00 |                 | 1.286,00 | Dinas Perdagin   |                |
|                      |  | 1.                | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perdagangan | persen       | 100  | 100    | 100      | 686,00          | 95,00    | 686,00           | Dinas Perdagin |
|                      |  | 2.                | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan  | Persen       | 100  | 100    | 100      | 600,00          | 95,00    | 600,00           | Dinas Perdagin |
| 6.                   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perdagangan                                     |                   |  |              |      |        | 800,00   |                 | 800,00   | Dinas Perdagin   |                |
|                      |  | 1.                | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perdagangan  | persen       | 100  | 100    | 100      | 400,00          | 95,00    | 400,00           | Dinas Perdagin |
|                      |  | 2.                | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan       | unit         | 100  | 100    | 100      | 400,00          | 95       | 400,00           | Dinas Perdagin |
| 7.                   | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan |                   |  |              |      |        | 135,00   |                 | 135,00   | Dinas Perdagin   |                |
|                      |  | 1.                | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perdagangan   | persen       | 100  | 100    | 100      | 40,00           | 95,00    | 40,00            | Dinas Perdagin |
|                      |  | 2.                | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perdagangan                                | persen       | 100  | 100    | 100      | 40,00           | 90,00    | 40,00            | Dinas Perdagin |
|                      |  | 3.                | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan                             | persen       | 100  | 100    | 100      | 55,00           | 95,00    | 55,00            | Dinas Perdagin |
| <b>PERINDUSTRIAN</b> |  |                   |  |              |      |        |          |                 |          | Dinas Perdagin   |                |
| 1.                   | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah   |                   |  |              |      |        | 934,60   |                 | 934,60   | Dinas Perdagin   |                |
|                      |  | 1.                | Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah   | Persen       | 9,34 | 2,64   | 2,50     | 300,00          | 2,00     | 300,00           | Dinas Perdagin |
|                      |  | 2.                | Jumlah Industri Pengolahan yang berdaya saing  | Unit IKM     | N/A  | N/A    | 320      | 334,60          | 35       | 334,60           | Dinas Perdagin |
|                      |  | 3.                | Terpenuhinya kompetensi Pelaku UKM   | orang        | N/A  | N/A    | 30       | 300,00          | 20       | 300,00           | Dinas Perdagin |



| NO.  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH      | INDIKATOR KINERJA | SATUAN  | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH  |                   |
|--|--|-------------------|---|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
|  |  |                   |   | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                   |                   |
|  |  |                   |   |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                   |                   |
| 2.   | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial        |                   |   |              |      |        | 824,87   |                 | 824,87   | Dinas Perdagangan |                   |
|  |  | 1.                | Jumlah Sentra IKM   | unit         | 1    | 1      | -1       | 400,00          | 1        | 400,00            | Dinas Perdagangan |
|  |  | 2.                | Dokumen Rencana Pengembangan  | dokumen      | 1    | 1      | 2,00     | 424,87          | 1        | 424,87            | Dinas Perdagangan |
| <b>URUSAN PENUNJANG</b>  |  |                   |   |              |      |        |          |                 |          |                   |                   |
| <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |  |                   |   |              |      |        |          |                 |          |                   |                   |
| 1.   | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan   |                   |   |              |      |        | 1.101,60 |                 | 1.101,60 |                   |                   |
|  |  | 1.                | Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | persen       | 100  | 100    | 100      | 401,60          | 95,00    | 401,60            | Bappelitbangda    |
|  |  | 2.                | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                  | persen       | 100  | 100    | 100      | 300,00          | 95,00    | 300,00            | Bappelitbangda    |
|  |  | 3.                | Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan   | persen       | 100  | 100    | 100      | 300,00          | 95,00    | 300,00            | Bappelitbangda    |
| 2.   | Program Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat |                   |   |              |      |        | 324,00   |                 | 324,00   | Bappelitbangda    |                   |
|  |  | 1.                | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan   | persen       | 100  | 100    | 100      | 162,00          | 100      | 162,00            | -                 |
|  |  | 2.                | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | persen       | 100  | 100    | 100      | 162,00          | 100      | 162,00            | -                 |
| 3.   | Program Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur         | 1.                | Persentase dokumen perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur   | persen       | 100  | 100    | 100      | 1.440,00        | 95,00    | 1.440,00          | Bappelitbangda    |
| 4.   | Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah           | 1.                | Persentase dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan                                       | persen       | 100  | 100    | 100      | 2.460,00        | 73,00    | 2.460,00          | Bappelitbangda    |
| 5.   | Program perencanaan Penataan ruang                           | 1.                | Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti  | persen       | 0    | 0      | 100      | 300,00          | 93,50    | 290,00            | Bappelitbangda    |
| 6.   | Program pengendalian Pemanfaatan penataan ruang              | 1.                | Persentase Kesesuaian Peruntukan Pola ruang   | persen       | 0    | 0      | 100      | 125,00          | 93,50    | 120,00            | Bappelitbangda    |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |            | PERUBAHAN RPJMD |            | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|---|--------|--------------|------|--------|------------|-----------------|------------|------------------|
|     |  |   |        | 2017         | 2018 | 2020   |            | 2020            |            |                  |
|     |  |   |        |              |      | Target | Juta Rp.   | Target          | Juta Rp.   |                  |
| 7.  | Program Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan   | 1. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | persen | 100          | 100  | 100    | 264,00     | 93,50           | 250,00     | Bappelitbangda   |
| 8.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |   |        |              |      |        | 2.396,10   |                 | 2.200,00   | Bappelitbangda   |
|     |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | persen | 100          | 100  | 100    | 1.200,00   | 95,00           | 1.200,00   | Bappelitbangda   |
|     |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | Persen | 100          | 100  | 100    | 1.196,00   | 95,00           | 1.000,00   | Bappelitbangda   |
| 9.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                     |   |        |              |      |        | 218,40     |                 | 218,40     | Bappelitbangda   |
|     |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | persen | 100          | 100  | 100    | 118,40     | 90,00           | 118,40     | Bappelitbangda   |
|     |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah       | persen | 100          | 100  | 100    | 100        | 95,00           | 100        | Bappelitbangda   |
| 10. | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |   |        |              |      |        | 152.000,00 |                 | 152.000,00 | Bappelitbangda   |
|     |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah   | persen | 100          | 100  | 100    | 50,000,00  | 100             | 50,000,00  | Bappelitbangda   |
|     |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                | persen | 100          | 100  | 100    | 51,000,00  | 91,00           | 51,000,00  | Bappelitbangda   |
|     |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan   | persen | 100          | 100  | 100    | 51,000,00  | 95,00           | 51,000,00  | Bappelitbangda   |



| NO.   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|--|--------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|   |  |  |        | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|   |  |  |        |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|   |  | Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |        |              |       |        |          |                 |          |                  |
| <b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |  |  |        |              |       |        |          |                 |          |                  |
| 1.  | Program pembinaan dan penegakan disiplin ASN   |  |        |              |       |        | 1,352.18 |                 | 1,352.18 | BKPSDM           |
|   |  | 1. Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani   | persen | 100          | 100   | 100    | 1.042,18 | 95,00           | 1.042,18 | BKPSDM           |
|   |  | 2. Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76%   | persen | 93,00        | 93,00 | 96,00  | 185,00   | 94,00           | 185,00   | BKPSDM           |
|   |  | 3. Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80%   | persen | 90,00        | 90,00 | 96,00  | 125,00   | 95,00           | 125,00   | BKPSDM           |
| 2.  | Program peningkatan kompetensi Manajerial ASN  | 1. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial   | persen | 62,24        | 71,10 | 71,66  | 1.585,00 | 65,77           | 1.585,00 | BKPSDM           |
| 3.  | Programe pengembangan karier ASN   | 1. Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu   | persen | 100          | 100   | 100    | 2.549,39 | 94,49           | 2.549,39 | BKPSDM           |
| 4.  | Program pengelolaan gaji dan kesejahteraan aparatur  | 1. Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB  | persen | 0            | 0     | 40,00  | 1.401,59 | 25,00           | 1.401,59 | BKPSDM           |
| 5.  | Program peningkatan kompetensi ASN   | 1. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi  | orang  | 63           | 70    | 73,    | 9.750,00 | 68              | 9.750,00 | BKPSDM           |
| 6.  | Program Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian ASN   | 1 Tingkat Pemenuhan Data Informasi Kepegawaian ASN   | persen | 90,00        | 90,00 | 94,00  | 3.221,93 | 95,00           | 3.221,93 | BKPSDM           |
| 7.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |        |              |       |        | 2.430,00 |                 | 2.430,00 | BKPSDM           |
|   |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | persen | 100          | 100   | 100    | 850,00   | 95,00           | 850,00   | BKPSDM           |
|   |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | Persen | 100          | 100   | 100    | 1.400,00 | 95,00           | 1.400,00 | BKPSDM           |



| NO.                             | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------------------|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                                 |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|                                 |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                                 |   | 3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Unit   | 138          | 138  | 140,00 | 180,00   | 131             | 180,00   | BKPSDM           |
| 8.                              | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | persen | 100          | 100  | 100    | 300,00   | 95,00           | 300,00   | BKPSDM           |
| 9.                              | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |        |              |      |        | 25,00    |                 | 25,00    | BKPSDM           |
|                                 |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                   | persen | 100          | 100  | 100    | 6,50     | 95,00           | 6,50     | BKPSDM           |
|                                 |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                      | persen | 100          | 100  | 100    | 16,00    | 95,00           | 16,00    | BKPSDM           |
|                                 |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                   | persen | 100          | 100  | 100    | 2,50     | 95,00           | 2,50     | BKPSDM           |
| <b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |   |  |        |              |      |        |          |                 |          |                  |
| 1.                              | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  | 1. Opini BPK terhadap LKPD   | opini  | WTP          | WTP  | WTP    | 1.107,89 | WTP             | 1.256,00 | BKAD             |
| 2.                              | Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah  | 1. Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal   | persen | 2            | 2    | 2,00   | 844,00   | 2,00            | 911,07   | BKAD             |
| 3.                              | Program Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah   | 1. Persentase Kenaikan total pendapatan daerah   | persen | 2685         | 2816 | 6,75   | 3.548,00 | 17,00           | 50,41    | BKAD             |
| 4.                              | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Keuangan dan Aset Daerah  |  |        |              |      |        | 2.587,80 |                 | 2.587,80 | BKAD             |



| NO.            | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|                |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah | persen | 100          | 100  | 100    | 1.300,00 | 95,00           | 1.300,00 | BKAD             |
|                |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | Persen | 100          | 100  | 100    | 1.287,80 | 87,85           | 1.287,80 | BKAD             |
| 5.             | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Keuangan dan Aset Daerah                                     |  |        |              |      |        | 1.502,60 |                 | 1.502,60 | BKAD             |
|                |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | persen | 100          | 100  | 100    | 752,60   | 91,53           | 752,60   | BKAD             |
|                |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah       | persen | 100          | 100  | 100    | 750,00   | 90,00           | 750,00   | BKAD             |
| 6.             | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Keuangan dan Aset Daerah |  |        |              |      |        | 81,80    |                 | 81,80    | BKAD             |
|                |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah   | persen | 100          | 100  | 100    | 21,80    | 93,15           | 21,80    | BKAD             |
|                |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah                                | persen | 100          | 100  | 100    | 30,00    | 93,33           | 30,00    | BKAD             |
|                |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah                             | persen | 100          | 100  | 100    | 30,00    | 95,00           | 30,00    | BKAD             |
| <b>BAPENDA</b> |   |  |        |              |      |        |          |                 |          |                  |
| 1.             | <b>Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pendapatan Daerah</b>  |  |        |              |      |        |          |                 |          | BAPENDA          |
|                |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pendapatan Daerah        | persen | N/A          | N/A  | 100    | 1.567,70 | 100             | 1.567,70 | BAPENDA          |



| NO.                   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------|--|---|--------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                       |  |   |        | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|                       |  |   |        |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                       |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendapatan Daerah  | persen | N/A          | N/A   | 100    | 1.567,70 | 100             | 1.567,70 | BAPENDA          |
| 2.                    | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  |   |        |              |       |        | 484,88   |                 | 484,88   | BAPENDA          |
|                       |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendapatan Daerah  | Persen | N/A          | N/A   | 100    | 284,88   | 100             | 284,88   | BAPENDA          |
|                       |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendapatan Daerah | Persen | N/A          | N/A   | 100    | 200,00   | 100             | 200,00   | BAPENDA          |
| 3.                    | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pendapatan Daerah |   |        |              |       |        |          |                 |          | BAPENDA          |
|                       |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah                                | persen | N/A          | N/A   | 100    | 63,84    | 100             | 63,84    | BAPENDA          |
|                       |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah                   | persen | N/A          | N/A   | 100    | 63,84    | 100             | 63,84    | BAPENDA          |
|                       |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah                | Persen | N/A          | N/A   | 100    | 63,84    | 100             | 63,84    | BAPENDA          |
| 4.                    | Program Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah  | Persentase Kenaikan Total Pendapatan Daerah   | persen | N/A          | N/A   | 100    | 3.581,13 | 100             | 3.581,13 | BAPENDA          |
| <b>FUNGSI LAINNYA</b> |  |   |        |              |       |        |          |                 |          |                  |
| <b>SETDA</b>          |  |   |        |              |       |        |          |                 |          |                  |
| 1.                    | Program Peningkatan Nilai Nilai Keagamaan  |   |        |              |       |        | 4.211    |                 | 4.211    |                  |
|                       |  | 1. Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif  | Persen | 16,00        | 16,00 | 30,00  | 1.000    | 28,33           | 1.000    | Sosmas           |
|                       |  | 2. Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi  | Persen | 31,00        | 31,00 | 45,00  | 1.211    | 40,00           | 1.211    | Sosmas           |
|                       |  | 3. Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi  | Persen | 62,00        | 65,00 | 71,00  | 1.000    | 70,00           | 1.000    | Sosmas           |
|                       |  | 4. Persentase tokoh agama yang terfasilitasi  | Persen | 32,00        | 32,00 | 71,00  | 1.000    | 65,83           | 1.000    | Sosmas           |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN   | KONDISI AWAL       |                    | RPJMD                      |          | PERUBAHAN RPJMD    |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|
|     |  |   |          | 2017               | 2018               | 2020                       |          | 2020               |          |                  |
|     |  |   |          | Target             | Juta Rp.           | Target                     | Juta Rp. |                    |          |                  |
| 2.  | Program Peningkatan Kualitas Kabupaten Sehat                             | 1. Tingkat Capaian Kabupaten Sehat                              | Predikat | Swasti Saba Padapa | Swasti Saba Padapa | Swasti Saba Padapa         | 2.233,00 | Swasti Saba Padapa | 2.233,00 | Sosmas           |
| 3.  | Program Peningkatan Nilai Nilai Sosial Budaya                            |   |          |                    |                    |                            | 3.567,75 |                    | 3.567,75 |                  |
|     |  | 1. Hari Jadi Pemerintah Daerah dan Nasional yang diperingati    | Event    | 3                  | 3                  | 3                          | 1.000,00 | 1                  | 1.000,00 | Sosmas           |
|     |  | 2. Kebijakan Lingkup PMKS                                       | jumlah   | 4                  | 4                  | 1 Regulasi 4 Stimulan PMKS | 767,75   | 4                  | 767,75   | Sosmas           |
| 4.  | Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                    | 1. Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)          | ST       | ST                 | ST                 | ST                         | 1.753,20 | ST                 | 1.753,20 | Tapem            |
| 5.  | Program Pembinaan Kewilayahan  |   |          |                    |                    |                            | 2.061,30 |                    | 2.061,30 |                  |
|     |  | 1. Terpenuhinya Kinerja Kecamatan                               | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 1.061,30 | 93,11              | 1.061,30 | Tapem            |
|     |  | 2. Terpenuhinya Kinerja Desa                                    | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 1.000,00 | 70,00              | 1.000,00 | Tapem            |
| 6.  | Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik                      | 1. Tingkat Kepuasan Publik                                      | Persen   | n/a                | 51 OPD Nilai B     | 92,98                      | 803,50   | 95,00              | 803,50   | Organisasi       |
| 7.  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                         |   |          |                    |                    |                            | 739,56   |                    | 739,56   |                  |
|     |  | 1. Tingkat Kesesuaian Penataan Organisasi dengan Peraturan      | Persen   | n/a                | 81,00              | 7,60                       | 389,56   | 95,00              | 389,56   | Organisasi       |
|     |  | 2. Persentase Kelembagaan Menunjang Visi dan Misi               | Persen   | n/a                | 90,70              | 3,73                       | 350,00   | 95,00              | 350,00   | Organisasi       |
| 8.  | Program Penataan dan Regulasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Persentase Peraturan Daerah yang di Undangkan                | Persen   | 100                | 60,00              | 24,00                      | 1.808,85 | 53,33              | 1.808,85 | Hukum            |
| 9.  | Program Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa                                | 1. Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan            | Persen   | 70,00              | 80,00              | 100                        | 2.373,00 | 95,00              | 2.373,00 | LPBJ             |
| 10. | Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan                        |   |          |                    |                    |                            | 2.639,51 |                    | 2.639,51 |                  |
|     |  | 1. Terpenuhinya PAD yang bersumber dari BUMD                    | Persen   | n/a                | 4.03 Milyar        | 10,00                      | 1.339,51 | 53,68              | 1.339,51 | Ekbang           |
|     |  | 2. Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil                | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 1.300,00 | 95,00              | 1.300,00 | Ekbang           |
| 11. | Program Fasilitasi Pimpinan Daerah                                       | 1. Tingkat Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi                    | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 6.002,56 | 95,00              | 6.002,56 | Setda            |
| 12. | Program Keprotokolan   | 1. Tingkat Kesuksesan Acara Pimpinan                            | persen   | 100                | 100                | 100                        | 650,25   | 95,00              | 650,25   | Protokoler       |
| 13. | Program Pengelolaan Informasi Daerah                                     | 1. Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasikan dan Terpublikasikan | persen   | 100                | 100                | 100                        | 2.111,30 | 95,00              | 2.111,30 | Protokoler       |
| 14. |  |   |          |                    |                    |                            | 7.139,13 |                    | 7.139,13 |                  |



| NO.                | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------|---|---|--------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|                    |   |   |        | 2017         | 2018  | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|                    |   |   |        |              |       | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|                    | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah                                   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah | persen | 100          | 100   | 100    | 3.639,13 | 95,00           | 3.639,13 | Umum             |
|                    |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah  | Persen | 50,00        | 50,00 | 70,00  | 3.500,00 | 95,00           | 3.500,00 | Umum             |
| 15.                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah                            |   |        |              |       |        | 3.584,10 |                 | 3.584,10 |                  |
|                    |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah  | persen | 50,00        | 50,00 | 70,00  | 1.834,10 | 95,00           | 1.834,10 | Keuangan         |
|                    |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah       | persen | 100          | 100   | 100    | 1.750,00 | 95,00           | 1.750,00 | Umum             |
| 16.                | Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Lingkup Sekretariat Daerah |   |        |              |       |        | 212,50   |                 | 212,50   |                  |
|                    |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah   | persen | 100          | 100   | 100    | 70,00    | 95,00           | 70,00    | Keuangan         |
|                    |   | 3. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah                        | persen | 100          | 100   | 100    | 70,00    | 95,00           | 70,00    | Keuangan         |
|                    |   | 4. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah                     | persen | 100          | 100   | 100    | 72,50    | 95,00           | 72,50    | Keuangan         |
| <b>INSPEKTORAT</b> |   |   |        |              |       |        |          |                 |          |                  |
| 1                  | Program Pembinaan dan Pengawasan  |   |        |              |       |        | 1.070,00 |                 | 1.070,00 |                  |
|                    |   | 1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A  | persen | 0            | 0     | 25     | 65,00    | -               | 65,00    | Inspektorat      |
|                    |   | 2. Prosentase temuan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti   | persen | 0            | 60,00 | 80,00  | 1.005,00 | 43,27           | 1.005,00 | Inspektorat      |
|                    |   | 3. Level maturitas SPIP   | Level  | 0            | 1,8   | 3,00   | 600,00   | 1.830           | 600,00   | Inspektorat      |
| 2                  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Inspektorat Kabupaten  |   |        |              |       |        | 2.078,05 |                 | 2.078,05 |                  |
|                    |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan   | persen | 100          | 100   | 100,00 | 888,85   | 95,00           | 888,85   | Inspektorat      |



| NO.                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------|---|---|---------|--------------|-------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|                         |   |   |         | 2017         | 2018  | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|                         |   |   |         |              |       | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
|                         |   | perundang-undangan lingkup Inspektorat Kabupaten  |         |              |       |        |           |                 |           |                  |
|                         |   | 2 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen  | 100          | 100   | 100,00 | 1.189,20  | 95,00           | 1.189,20  | Inspektorat      |
| 3                       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Kabupaten                                     |   |         |              |       |        | 6.136,04  |                 | 6.136,04  |                  |
|                         |   | 1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen  | 100          | 100   | 100,00 | 6.106,04  | 95,00           | 6.106,04  | Inspektorat      |
|                         |   | 2 Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten | Persen  | 100          | 100   | 100,00 | 30,00     | 95,00           | 30,00     | Inspektorat      |
| 4                       | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten |   |         |              |       |        | 180,00    |                 | 180,00    |                  |
|                         |   | 1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Inspektorat Kabupaten                                       | Persen  | 100          | 100   | 100,00 | 60,00     | 95,00           | 60,00     | Inspektorat      |
|                         |   | 2 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten                          | Persen  | 100          | 100   | 100,00 | 90,00     | 95,00           | 90,00     | Inspektorat      |
|                         |   | 3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten                       | Persen  | 100          | 100   | 100,00 | 30,00     | 95,00           | 30,00     | Inspektorat      |
| <b>SEKRETARIAT DPRD</b> |   |   |         |              |       |        |           |                 |           |                  |
| 1.                      | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan   |   |         |              |       |        | 15.638,69 |                 | 15.638,69 | Sekretariat DPRD |
|                         |   | 1. Persentase Perda yang disyahkan  | persen  | 45,00        | 64,00 | 75,00  | 4.000,00  | 31,61           | 4.000,00  | Sekretariat DPRD |
|                         |   | 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian  | dokumen | 1            | 1     | 4,00   | 4.000,00  | 3               | 4.000,00  | Sekretariat DPRD |
|                         |   | 3. Jumlah Cetakan dokumentasi hukum   | buku    | 39           | 39    | 39     | 4.000,00  | 170             | 4.000,00  | Sekretariat DPRD |
|                         |   | 4. Frekuensi Fasilitasi Sosialisasi Perda   | lokasi  | 5            | 5     | 5      | 3.638,69  | 0               | 3.638,69  | Sekretariat DPRD |
| 2.                      | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  |   |         |              |       |        | 18.920,95 |                 | 18.920,95 | Sekretariat DPRD |
|                         |   | 1. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Anggaran  | kali    | 5            | 5     | 5      | 5.000,00  | 1               | 5.000,00  | Sekretariat DPRD |



| NO.              | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|------------------|--|---|--------|--------------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|                  |  |   |        | 2017         | 2018 | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|                  |  |   |        |              |      | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
|                  |  | 2. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pembentukan Perda   | bulan  | 12           | 12   | 12     | 5.000,00  | 10              | 5.000,00  | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 3. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pengawasan  | bulan  | 12           | 12   | 12     | 5.000,00  | 10              | 5.000,00  | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 4. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat  | kali   | 3            | 3    | 3      | 3.920,95  | 2               | 3.920,95  | Sekretariat DPRD |
| 3.               | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Lingkup Sekretariat DPRD  |   |        |              |      |        | 13.216,70 |                 | 13.216,70 | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD | persen | 100          | 100  | 100    | 6.716,70  | 95,00           | 6.716,70  | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD  | Persen | 100          | 100  | 100    | 6.500,00  | 95,00           | 6.500,00  | Sekretariat DPRD |
| 4.               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lingkup Sekretariat DPRD                                     |   |        |              |      |        | 2.843,11  |                 | 2.843,11  |                  |
|                  |  | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat DPRD  | persen | 100          | 100  | 100    | 1.443,11  | 95,00           | 1.443,11  | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD       | persen | 100          | 100  | 100    | 1.400,00  | 95,00           | 1.400,00  | Sekretariat DPRD |
| 5.               | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Lingkup Sekretariat DPRD |   |        |              |      |        | 555,74    |                 | 555,74    | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat DPRD   | persen | 100          | 100  | 100    | 200,00    | 95,00           | 200,00    | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD                        | persen | 100          | 100  | 100    | 200,00    | 95,00           | 200,00    | Sekretariat DPRD |
|                  |  | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD                     | persen | 100          | 100  | 100    | 155,74    | 95,00           | 155,74    | Sekretariat DPRD |
| <b>KECAMATAN</b> |  |   |        |              |      |        |           |                 |           |                  |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |           | PERUBAHAN RPJMD |           | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|--------|--------------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
|     |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |           | 2020            |           |                  |
|     |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp.  | Target          | Juta Rp.  |                  |
| 1.  | Program Penanggulangan Kemiskinan   | 1. Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan  | persen | 0            | 0    | 1,00   | 195,00    | 1,00            | 195,00    | Kecamatan        |
| 2.  | Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum |  |        |              |      |        | 4.355,00  |                 | 4.355,00  | Kecamatan        |
|     |   | 1. Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan                     | kali   | n/a          | n/a  | 26     | 2.000,00  | 21              | 2.000,00  | Kecamatan        |
|     |   | 2. Jumlah Edukasi kebencanaan skala kecamatan  | kali   | n/a          | n/a  | 26     | 1.355,00  | 21              | 1.355,00  | Kecamatan        |
|     |   | 3. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak   | persen | n/a          | n/a  | 100    | 1.000,00  | 76,90           | 1.000,00  | Kecamatan        |
| 3.  | Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan   | 1. Jumlah potensi unggulan kecamatan   | jenis  | n/a          | n/a  | 52     | 325,00    | 30              | 325,00    | Kecamatan        |
| 4.  | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa   | 1. Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya   | desa   | n/a          | n/a  | 26     | 260,00    | 21              | 260,00    | Kecamatan        |
| 5.  | Program Peningkatan Peran Kecamatan   | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat  | nilai  | n/a          | n/a  | 85     | 650,00    | 80              | 650,00    | Kecamatan        |
| 6.  | Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan  | 1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan   | persen | n/a          | n/a  | 100    | 390,00    | 93,00           | 390,00    | Kecamatan        |
| 7.  | Program Pendukung Administrasi Perkantoran Kecamatan  |  |        |              |      |        | 11.960,00 |                 | 11.960,00 | Kecamatan        |
|     |   | 1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan | persen | 100          | 100  | 100    | 6.000,00  | 95,00           | 6.000,00  | Kecamatan        |
|     |   | 2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan  | Persen | 100          | 100  | 100    | 5.960,00  | 94,00           | 5.960,00  | Kecamatan        |
| 8.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan                                       |  |        |              |      |        | 1.800,00  |                 | 1.800,00  | Kecamatan        |
|     |   | 1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kecamatan  | persen | 100          | 100  | 100    | 900,00    | 95,00           | 900,00    | Kecamatan        |
|     |   | 2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan       | persen | 100          | 100  | 100    | 900,00    | 95,00           | 900,00    | Kecamatan        |
| 9.  | Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan   |  |        |              |      |        | 1.300,00  |                 | 1.300,00  | Kecamatan        |



| NO. | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | KONDISI AWAL |      | RPJMD  |          | PERUBAHAN RPJMD |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----|---|--|--------|--------------|------|--------|----------|-----------------|----------|------------------|
|     |   |  |        | 2017         | 2018 | 2020   |          | 2020            |          |                  |
|     |   |  |        |              |      | Target | Juta Rp. | Target          | Juta Rp. |                  |
|     |   | 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kecamatan                 | persen | 100          | 100  | 100    | 400,00   | 95,00           | 400,00   | Kecamatan        |
|     |   | 2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan    | persen | 100          | 100  | 100    | 500,00   | 95,00           | 500,00   | Kecamatan        |
|     |   | 3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kecamatan | persen | 100          | 100  | 100    | 400,00   | 95,00           | 400,00   | Kecamatan        |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka.

**Tabel 7.5**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023**

| NO  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR                      | DEFINISI OPERASIONAL         | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|   |   |                                |                              |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|   |   |                                |                              |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                |                              |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| PENDIDIKAN  |   |                                |                              |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                |                              |        |                 | 500.818,00      |            | 550.900,00      |            | 605.990,00      |               | 1.657.709 | DISDIK           |
|   |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Nilai  | BB              | 200.818,00      | BB         | 162.000,00      | BB         | 178.000,00      | BB            | 487       | DISDIK           |
|   |   | Capaian IKM Perangkat Daerah   | Nilai IKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 200.000,00      | B          | 110.000,00      | B          | 121.000,00      | B             | 331       | DISDIK           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|    |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|    |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran     | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%  | Persen | 100             | 100.000,00      | 100        | 278.900,00      | 100        | 360.990,00      | 100           | 839.709,00 | DISDIK           |
| 2  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                          |  |   |        |                 | 558.305,00      |            | 614.135,03      |            | 678.100,88      |               | 1.847.988  | DISDIK           |
|    |   | APM PAUD   | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x 100%   | Persen | 99,2            | 100.000,00      | 99,4       | 32.032,71       | 99,45      | 35.235,98       | 99,45         | 96.389,33  | DISDIK           |
|    |   | APM SD/MI  | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (MI)/Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x100%   | Persen | 97,1            | 100.000,00      | 97,3       | 348.117,00      | 97,35      | 382.928,70      | 97,35         | 1.047.516  | DISDIK           |
|    |   | APM SMP/MTs  | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%   | Persen | 98,1            | 258.305,00      | 98,35      | 208.836,98      | 98,55      | 229.720,68      | 98,55         | 628.409,46 | DISDIK           |
|    |   | APK Non Formal   | Jumlah warga negara usia 7 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x100% | Persen | 86,1            | 100.000,00      | 86,4       | 25.148,34       | 86,55      | 27.663,18       | 86,55         | 75.673,65  | DISDIK           |
| 3  | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih | (jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih/jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di kab/kota) x 100%   | Persen | 15              | 185.000,00      | 16,18      | 192.500,00      | 17         | 211.750,00      | 17            | 404.250    | DISDIK           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                     | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|---|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|           |   |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|           |   |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
| KESEHATAN |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                  |
| 1         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |   |   |        |                 | 185.029,00      |            | 192.294,00      |            | 201.681,00      |               | 201.681,00 | DINKES           |
|           |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 65.029,00       | BB         | 72.294,00       | BB         | 101.681,00      | BB            | 101.681,00 | DINKES           |
|           |   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 60.000,00       | B          | 60.000,00       | B          | 100.000,00      | B             | 100.000,00 | DINKES           |
|           |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                      | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                      | Persen | 100             | 60.000,00       | 100        | 60.000,00       | 100        | 100.000,00      | 100           | 100.000,00 | DINKES           |
| 2         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |   |        |                 | 275.666,00      |            | 368.050,00      |            | 388.922,00      |               | 388.922,00 | DINKES           |
|           |   | Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk  | (jumlah Daya Tampung RS/jumlah penduduk di kab/kota) x 100%   | Persen | 0,001           | 15.315,00       | 0,001      | 20.447,00       | 0,001      | 21.607,00       | 0,001         | 21.607,00  | DINKES           |
|           |   | Persentase RS Rujukan yang terakreditasi  | (jumlah RS Rujukan yang terakreditasi/jumlah RS di kab/kota) x 100%                                     | Persen | 1,00            | 15.315,00       | 1,00       | 20.447,00       | 1,00       | 21.607,00       | 1,00          | 21.607,00  | DINKES           |
|           |   | Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil                                    | (jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil/jumlah seluruh ibu hamil di kab/kota) x 100%        | Persen | 90,00           | 15.315,00       | 90,00      | 20.447,00       | 90,00      | 21.607,00       | 90,00         | 21.607,00  | DINKES           |
|           |   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                  | (jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan/jumlah ibu bersalin di kab/kota) x 100%           | Persen | 90,00           | 15.315,00       | 90,00      | 20.447,00       | 90,00      | 21.607,00       | 90,00         | 21.607,00  | DINKES           |
|           |   | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                | (bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/bayi baru lahira di kab/kota) x 100%   | Persen | 100             | 15.315,00       | 100        | 20.447,00       | 100        | 21.607,00       | 100           | 21.607,00  | DINKES           |
|           |   | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | (jumlah balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah balita di kab/kota) x 100%      | Persen | 100             | 15.315,00       | 100        | 20.447,00       | 100        | 21.607,00       | 100           | 21.607,00  | DINKES           |
|           |   | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | (jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah anak usia | Persen | 100             | 15.315,00       | 100        | 20.447,00       | 100        | 21.607,00       | 100           | 21.607,00  | DINKES           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|    |   |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|    |   |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|    |   |   | pendidikan dasar di kab/kota) x 100%   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
|    |   | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                     | (jumlah orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/ jumlah orang usia 15-29 tahun di kab/kota) x 100%                        | Persen | 50,00           | 15.315,00       | 50,00      | 20.447,00       | 50,00      | 21.607,00       | 50,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar         | (jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kab/kota) x 100% | Persen | 60,00           | 15.315,00       | 60,00      | 20.447,00       | 60,00      | 21.607,00       | 60,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | (jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah penderita hipertensi di kab/kota) x 100%                       | Persen | 25,00           | 15.315,00       | 25,00      | 20.447,00       | 25,00      | 21.607,00       | 25,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | (jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah penderita DM di kab/kota) x 100%                                       | Persen | 60,00           | 15.315,00       | 60,00      | 20.447,00       | 60,00      | 21.607,00       | 60,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | (jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar/jumlah ODGJ di kab/kota) x 100%  | Persen | 50,00           | 15.315,00       | 50,00      | 20.447,00       | 50,00      | 21.607,00       | 50,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | (jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar/jumlah orang terduga TBC di kab/kota) x 100%  | Persen | 50,00           | 15.315,00       | 50,00      | 20.447,00       | 50,00      | 21.607,00       | 50,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | (jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar/jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV) x 100%     | Persen | 90,00           | 15.315,00       | 90,00      | 20.447,00       | 90,00      | 21.607,00       | 90,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas   | Jumlah Jenis Obat yang tersedia dibagi dengan jumlah Jenis obat yang sesuai standar  | Persen | 85,00           | 15.315,00       | 85,00      | 20.447,00       | 85,00      | 21.607,00       | 85,00         | 21.607,00 | DINKES           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH     | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|--|---|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|    |   |  |   |          | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|    |   |  |   |          | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|    |   | Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar   | (Jumlah Alkes di Faskes sesuai Standar)/(Total Jumlah Alkes Seluruhnya)x 100%   | Persen   | 42,00           | 15.315,00       | 42,00      | 20.447,00       | 43,00      | 21.607,00       | 85,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan   | Jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS/ jumlah penduduk kabupaten/kota x 100%  | Persen   | 85,00           | 15.315,00       | 85,00      | 20.447,00       | 90,00      | 21.607,00       | 90,00         | 21.607,00 | DINKES           |
|    |   | Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN  | Keluarga miskin peserta PBI JK yang terdaftar dalam DTKS ditambah keluarga miskin peserta PBI PD Pemda                    | Keluarga | 192.402         | 15.315          | 192402     | 20.447,00       | 195302     | 21.607,00       | 195302        | 21.607,00 | DINKES           |
| 3  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun  | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun   | Pegawai  | 81              | 3.135,00        | 85         | 3.377,00        | 90         | 21.607,00       | 90            | 21.607,00 | DINKES           |
| 4  | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |  |   |          |                 | 133,00          |            | 400,00          |            | 410,00          |               | 410,00    | DINKES           |
|    |   | Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar  | Indikator Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar dibagi jumlah manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin x 100% | Persen   | 0,70            | 66.50,00        | 0,70       | 200,00          | 0,72       | 205,00          | 75%           | 205,00    | DINKES           |
|    |   | Terlaksanannya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal | Jumlah pengawasan di sarana dibagi jumlah seluruh sarana  | Persen   | 0,10            | 66.50,00        | 0,10       | 200,00          | 0,15       | 205,00          | 0,2           | 205,00    | DINKES           |
| 5  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |  |   |          |                 | 3.561,00        |            | 3.917,00        |            | 4.308,00        |               | 4.308,00  | DINKES           |
|    |   | Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100%   | Jumlah UKBM yang menyelenggarakan upaya kesehatan dibagi jumlah UKBM yang ada   | persen   | 100             | 3.561,00        | 100        | 3.917,00        | 100        | 4.308,00        | 100           | 4.308,00  | DINKES           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                                | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                     | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |                     | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------------|---|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
|                                   |   |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU                |                  |
|                                   |   |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |                     |                  |
| RSUD MAJALENGKA                   |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |                     |                  |
| 1                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Persentasi ketercapaian Standar Pelayanan Minimal                     | jumlah persentasi ketercapaian SPM                                    | persen | 75,00           | 147.753,00      | 80,00      | 162.528,00      | 85,00      | 178.781,00      | 85,00         | 178.780.94<br>4.870 | RSUD MAJALENGKA  |
|                                   |   | Hasil penilaian Akreditasi  | hasil penilaian akreditasi : Paripurna                                |        | Pari purna      | 70.000,00       | Pari purna | 80.000,00       | Pari purna | 89.390,00       | Pari purna    | 89.390,00           | RSUD MAJALENGKA  |
|                                   |   | Presentasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                           | nilai presentasi ketercapaian nilai indeks kepuasan masyarakat        | persen | 81,00           | 77.753,00       | 85,00      | 82.528,00       | 90,00      | 89.390,00       | 90,00         | 89.390,00           | RSUD MAJALENGKA  |
| 2                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) | Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) | persen | 85,00           | 39.548,00       | 90,00      | 43.503,00       | 95,00      | 47.853,00       | 95,00         | 47.853,16           | RSUD MAJALENGKA  |
| RSUD CIDERES                      |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |                     |                  |
| 1                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | Nilai  | 77              | 146.323,326     | 77,5       | 100             | 100        | 161.287,162     | 100           | 466.235,18          | RSUD CIDERES     |
|                                   |   | Standar Pelayanan Minimal   | Persentase pencapaian SPM   | persen | 73,00           |                 | 82,00      | 95,00           | 95,00      |                 |               |                     |                  |
|                                   |   | Akreditasi Rumah Sakit  | Hasil Penilaian akreditasi  | Nilai  | Pari purna      |                 | Pari purna | Pari purna      | Pari purna |                 |               |                     |                  |
| 2                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) | Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) | persen | 80,00           | 11.548,387      | 82,20      | 8.500,00        | 90,00      | 18.568,00       | 90,00         | 38.616,98           | RSUD CIDERES     |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |                     |                  |
| 1                                 | PROGRAM PENUNJANG   |   |   |        |                 | 23.992,00       |            | 26.000          |            | 29.000,00       |               | 29.000,00           | DPUTR            |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH          | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|----|--|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|    |  |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|    |  |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
|    | URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 8.000,00        | BB         | 9.000,00        | BB         | 10.000,00       | BB            | 10.000,00  | DPUTR            |
|    |  | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 8.000,00        | B          | 9.000,00        | B          | 10.000,00       | B             | 10.000,00  | DPUTR            |
|    |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%  | Persen | 100             | 7.992,00        | 100        | 8.000,00        | 100        | 10.000,00       | 100           | 10.000,00  | DPUTR            |
| 2  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi   | (Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi/luas daerah irigasi di kab/kota)x100%  | Persen | 73,20           | 145.466,00      | 75,10      | 158.900,00      | 77,30      | 300.100,00      | 77,30         | 300.100,00 | DPUTR            |
| 3  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota) x 100% | Persen | 80              | 35.540,00       | 80,41      | 3.000,00        | 80,50      | 3.500,00        | 80,50         | 3.500,00   | DPKPP            |
| 4  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | (jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik/jumlah rumah tangga di kab/kota)x 100%  | Persen | 68,52           | 1.604,00        | 68,58      | 1.800,00        | 68,66      | 2.000,00        | 68,66         | 2.000,00   | DPKPP            |
| 5  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | persentase drainase permukiman dalam kondisi baik /tidak tersumbat ( Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh drainase di Kewenangan kab/Kota)                            | Luas kawasan permukiman yang tertangani drainasenya / luas kawasan permukiman keseluruhan x 100%  | Persen | 30,00           | 1.486,00        | 30,10      | 1.800,00        | 30,20      | 2.000,00        | 30,20         | 2.000,00   | DPKPP            |
| 6  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                  |   |   |        |                 | 934,00          |            | 3.500,00        |            | 4.500,00        |               | 4.500,00   | DPKPP            |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                                      | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|--|---|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|   |   |  |   |         | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|   |   |  |   |         | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
|   |   | Persentase infrastruktur permukiman dalam kondisi baik                             | Luas kawasan permukiman tang tertangani infrastrukturnya / luas kawasan permukiman keseluruhan x 100%                               | Persen  | 79,13           | 434,00          | 82,24      | 1.500,00        | 85,49      | 1.800,00        | 85,49         | 1.800,00   | DPKPP            |
|   |   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani | (kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani/kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota) x 100% | Persen  | 79,13           | 500,00          | 17,93      | 2.000,00        | 37,84      | 2.700,00        | 37,84         | 2.700,00   | DPKPP            |
| 7                                       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                          |  |   |         |                 | 23.461,00       |            | 14.030,00       |            | 18.590,00       |               | 32.620,00  | DPUTR            |
|   |   | Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani                                   | Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi  | Unit    | 18              | 23.461,00       | 15         | 14.030,00       | 15         | 18.590,00       | 11            | 32.620,00  | DPUTR            |
| 8                                       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA               | Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang ditangani                               | Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dibangun dan direhabilitasi  | Unit    | 11              | 16.942,00       | 4          | 5.545,00        | 4          | 6.060,00        | 12            | 11.605,00  | DPUTR            |
| 9                                       | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                             | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                 | (Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik/jumlah total panjang jalan kab/kota) x 100%  | Persen  | 65,00           | 145.468,00      | 66,15      | 257.500,00      | 67,87      | 272.700,00      | 67,87         | 530.200,00 | DPUTR            |
| 10                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                      | Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi  | Jumlah Tenaga Kontruksi yang mengikuti Pelatihan  | Orang   | 50              | 189,00          | 100        | 275,00          | 100        | 275,00          | 250           | 550,00     | DPUTR            |
| 11                                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                    | Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan           | Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang Wilayah dan Rinci yang ditetapkan dan disosialisasikan  | Dokumen | 2               | 2.880,00        | 1          | 2.650,00        | 1          | 2.200,00        | 14            | 4.850,00   | DPUTR            |
| PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |   |  |   |         |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                  |
| 1                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |         |                 | 5.534,00        |            | 5.800,00        |            | 6.100,00        |               | 6.100,00   | DPKPP            |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|--|---|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|    |   |  |   |            | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|    |   |  |   |            | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai      | BB              | 1.800,00        | BB         | 1.900,00        | BB         | 2.000,00        | BB            | 2.000,00  | DPKPP            |
|    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai      | B               | 1.800,00        | B          | 1.900,00        | B          | 2.000,00        | B             | 2.000,00  | DPKPP            |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%  | Persen     | 100             | 1.934,00        | 100        | 2.000,00        | 100        | 2.100,00        | 100           | 2.100,00  | DPKPP            |
| 2  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                          |  |   |            |                 | 75,00           |            | 3.175,00        |            | 3.175,00        |               | 6.350,00  | DPKPP            |
|    |   | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                            | (jumlah unit rumah korban bencana yg ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yg akan ditangani pada tahun n) x 100%   | unit rumah | 25              | 75,00           | 25         | 675,00,00       | 25         | 675,00          | 50            | 1.350,00  | DPKPP            |
|    |   | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampakrelokasi program pemerintah kabupaten/kota | (rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasa tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah totsl rumah tangga terkena relokasi program Pemeintah Daerah yg memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100% | unit rumah | 25              | 75,00           | 25         | 2.500,00        | 25         | 2.500,00        | 50            | 5.000,00  | DPKPP            |
|    |   | Persentase Rumah Tidak Layak Huni  | (jumlah rumah tidak layak huni/jumlah rumah di kab/kota) x 100%   | persen     | 60,00           | 75,00           | 80,00      | 2.500,00        | 100        | 2.500,00        | 100           | 5.000,00  | DPKPP            |
| 3  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                              | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak  | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik  | Persen     | 58,92           | 6.255,00        | 69,19      | 30.000,00       | 79,46      | 30.000,00       | 79,46         | 66.255,00 | DPKPP            |
| 4  | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH          | Persentase kawasanpermukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani                          | (kawasanpermukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani/kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota) x 100%  | Persen     | 17,93           | 2.000,00        | 27,84      | 2700,00         | 37,84      | 2700,00         | 37,84         | 7.400,00  | DPKPP            |
| 5  | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,                          | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU   | jumlah perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU   | Persen     | 0,00            | 203,00          | 3,00       | 1.000,00        | 5,00       | 1.000,00        | 8,00          | 2.203,00  | DPKPP            |



| NO  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                  | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|   |  |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|   |  |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|   | SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)   | (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                     |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                     |  |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1   | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum            | jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum  | Lokasi | 10              | 6.460,00        | 5          | 10.000,00       | 5          | 10.000 ,00      | 14            | 26.460,00 | DPKPP            |
| KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                |   |   |        |                 | 4.799,00        |            | 16.354,00       |            | 17.589,00       |               | 18.098,00 | SATPOL PP DAMKAR |
|   |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah                            | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 1.600,00        | BB         | 5.451,00        | BB         | 5.863,00        | BB            | 6.032,00  | SATPOL PP DAMKAR |
|   |  | Capaian SKM Perangkat Daerah                              | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 1.600,00        | B          | 5.451,00        | B          | 5.863,00        | B             | 6.032,00  | SATPOL PP DAMKAR |
|   |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran      | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%                                | Persen | 100             | 1.599,00        | 100        | 5.451,00        | 100        | 5.863,00        | 100           | 6.032,00  | SATPOL PP DAMKAR |
| 2   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                     |   |   |        |                 | 6.034,00        |            | 9.530,00        |            | 10.483,00       |               | 10.992,00 | SATPOL PP DAMKAR |
|   |  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan     | (jumlah pengaduan yg ditangani/jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk) x 100%  | Persen | 100             | 3.017,00        | 100        | 4.765,00        | 100        | 5.241,50        | 100           | 5.496,00  | SATPOL PP DAMKAR |
|   |  | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada | (Jumlah Perda/Perkada yg memuat sanksi yg ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi) X 100 % | Persen | 100             | 3.017,00        | 100        | 4.765,00        | 100        | 5.241,50        | 100           | 5.496,00  | SATPOL PP DAMKAR |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                                   | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|    |   |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|    |   |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| 3  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 |   |   |        |                 | 3.122,00        |            | 3.122,00        |            | 3.122,00        |               | 3.122,00 | BPBD             |
|    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 1.040,66        | BB         | 1.040,66        | BB         | 1.040,66        | BB            | 1.040,66 | BPBD             |
|    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 1.040,66        | B          | 1.040,66        | B          | 1.040,66        | B             | 1.040,66 | BPBD             |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                      | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%      | Persen | 100             | 1.040,67        | 100        | 1.040,67        | 100        | 1.040,67        | 100           | 1.040,67 | BPBD             |
| 4  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  |   |   |        |                 | 106.000,00      |            | 106.000,00      |            | 3.153,00        |               | 0        | BPBD             |
|    |   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana                       | Jiwa   | 36.250          | 35.333,33       | 866        | 35.333,33       | 1.772      | 0               | 38.888        | 0        | BPBD             |
|    |   | Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jiwa   | 36.250          | 35.333,33       | 866        | 35.333,33       | 1.772      | 953,00          | 38.888        | 0        | BPBD             |
|    |   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jiwa   | 11.000          | 35.333,34       | 2.000      | 35.333,34       | 2.000      | 2.200,00        | 15.000        | 0        | BPBD             |
| 5  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |   |   |        |                 | 8.378,00        |            | 892,00          |            | 981,00          |               | 981,00   | SATPOL PP DAMKAR |
|    |   | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                           | (pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban   | persen | 100             | 4.189,00        | 100        | 446,00          | 100        | 490,50          | 100           | 490,50   | SATPOL PP DAMKAR |



| NO     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|--------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|        |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|        |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|        |   |  | kebakaran/jumlah kejadian kebakaran di kab/kota) x 100%  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
|        |   | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran   | rata-rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran | Menit  | 24              | 4.189,00        | 22         | 446,00          | 20         | 490,50          | 20            | 490,50    | SATPOL PP DAMKAR |
| SOSIAL |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 4.265,00        |            | 4.314,00        |            | 4.368,00        |               | 4.610,00  | DINSOS           |
|        |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 1.421,66        | BB         | 1.438,00        | BB         | 1.456,00        | BB            | 1.536,66  | DINSOS           |
|        |   | Capaian SKM Perangkat Daerah                         | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 1.421,66        | B          | 1.438           | B          | 1.456           | B             | 1.536,66  | DINSOS           |
|        |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | persen | 100             | 1.421,67        | 100        | 1.438           | 100        | 1.456           | 100           | 1.536,67  | DINSOS           |
| 2      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                               | Persentase KUBE yang Mandiri                         | Jumlah KUBE mandiri/jumlah total Kube X 100%   | persen | 20,00           | 1.301,00        | 20,00      | 1.885,00        | 20,00      | 2.074,00        | 20,00         | 3.959,00  | DINSOS           |
| 3      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                               |  |  |        |                 | 3.924,00        |            | 7.969,00        |            | 8.766,00        |               | 16.735,00 | DINSOS           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|   |   |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|   |   |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|   |   | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | (jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti/populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis) x 100% | persen | 5,00            | 3.924 ,00       | 6,00       | 7.969,00        | 6,00       | 8.766,00        | 6,00          | 16.735,00 | DINSOS           |
|   |   | Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"  | Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"   | Orang  | 830             | 3.237,00        | 1.000      | 2.420,00        | 1.000      | 1.420,00        | 1.000         | 1.420,00  | DINSOS           |
| 4   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                 | Persentase Orang Miskin yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial   | Jumlah Orang Miskin yang mendapat Limjamsos/jumlah Total Orang Miskin X 100%   | persen | 100             | 230,00          | 100        | 255,00          | 100        | 281,00          | 100           | 536,00    | DINSOS           |
| 5   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                              | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | (jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran/populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota) x 100%   | Persen | 100             | 892,00          | 100        | 1.750,00        | 100        | 1.925,00        | 100           | 3.675,00  | DINSOS           |
| 6   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Pelihara/Jumlah Taman Pahlawan X 100%  | Persen | 100             | 100             | 100        | 500             | 100        | 550             | 100           | 1.050,00  | DINSOS           |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR |   |   |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| TENAGA KERJA  |   |   |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH                     |   |  |        |                 | 4.253,00        |            | 9.915,00        |            | 6.461,00        |               | 6.470,00  | DK2UKM           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|   |   |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|   |   |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
|   | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
|   |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 1417,67         | BB         | 3.345,00        | BB         | 3.758,00        | BB            | 7.103,00 | DK2UKM           |
|   |   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 1417,67         | B          | 22,20           | B          | 24,40           | B             | 46,50    | DK2UKM           |
|   |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                    | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100%  | Persen | 100             | 1417,68         | 100        | 6.549,00        | 100        | 2.678,00        | 100           | 9.227,00 | DK2UKM           |
| 2   | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                        | Capaian kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                 | (jumlah kegiatan keseluruhan yg dilaksanakan yg mengacu ke RTKD/jumlah keg. keseluruhan yg dilaksanakan di kab/kota) x 100%                                 | Persen | -               | -               | 5,00       | 600,00          | 20,00      | 600,00          | 25,00         | 1.200,00 | DK2UKM           |
| 3   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  |   |   |        |                 | 1.970,00        |            | 1.750,00        |            | 1.925,00        |               | 3.675,00 | DK2UKM           |
|   |   | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  | jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  | Orang  | -               | 985 ,00         | 40         | 875,00          | 40         | 962,50          | 80            | 1.837,50 | DK2UKM           |
|   |   | Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri                       | Jumlah peserta bimbingan rumah tangga miskin yg menjadi mandiri   | Orang  | 250             | 985,00          | 120        | 875,00          | 120        | 962,50          | 490           | 1.837,50 | DK2UKM           |
| 4   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                         | Tingkat Tenaga kerja yang ditempatkan   | (jumlah pencaker yg ditempatkan/jumlah pencaker yg terdaftar) x 100%  | Persen | 20,00           | 1850,00         | 20,00      | 2.775,00        | 20,00      | 3.053 ,00       | 60,00         | 6.628,00 | DK2UKM           |
| 5   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                             | Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | (jumlah Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)/jumlah perselisihan hubungan industrial di kab/kota) x 100% | Persen | 75,00           | 407,50          | 75,00      | 451,00          | 75,00      | 521,00          | 75,00         | 972,00   | DK2UKM           |
| PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH    | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|----|--|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|    |  |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|    |  |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |   |        |                 | 5.077,00        |            | 5.166,00        |            | 5.264,00        |               | 6.933,00 | DP3AKB           |
|    |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 1.692,30        | BB         | 2.318,00        | BB         | 2.328,00        | BB            | 4.646,00 | DP3AKB           |
|    |  | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 1.692,30        | B          | 1.809,00        | B          | 1.773,00        | B             | 85,00    | DP3AKB           |
|    |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                              | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%          | Persen | 100             | 1.692,40        | 100        | 1.039,00        | 100        | 1.163,00        | 100           | 2.202,00 | DP3AKB           |
| 2  | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |   |   |        |                 | 99,00           |            | 350,00          |            | 550,00          |               | 900,00   | DP3AKB           |
|    |  | Persentase ARG pada belanja langsung APBD   | (Jumlah ARG pada belanja langsung APBD/jumlah seluruh belanja langsung APBD) x 100%         | Persen | 0,09            | 33,00           | 0,1        | 175,00          | 0,13       | 275,00          | 0,13          | 450,00   | DP3AKB           |
|    |  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG                                | (jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG/jumlah perangkat daerah di kab/kota) x 100% | Persen | 20,00           | 33,00           | 20,00      | 75,00           | 20,00      | 125,00          | 60,00         | 200,00   | DP3AKB           |
|    |  | Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan                       | (Jumlah Anggota Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan)/(Jumlah Penduduk Perempuan)x 100% | persen | 1,45            | 33,00           | 1,45       | 100,00          | 1,45       | 150,00          | 1,45          | 250,00   | DP3AKB           |
| 3  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                             | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan) | (jumlah perempuan yg mengalami kekerasan/jumlah penduduk perempuan) x 100%                  | Persen | 0,00018         | 70,00           | 0,00015    | 100,00          | 0,00013    | 125,00          | 0,00013       | 225,00   | DP3AKB           |
| 4  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                      | Persentase Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri                  | (Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri/jumlah perempuan kepala       | Persen | 0,50            | 330,00          | 0,70       | 330 ,00         | 0,90       | 375,00          | 0,90          | 705,00   | DP3AKB           |



| NO   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH      | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN          | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|  |  |   |   |                 | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|  |  |   |   |                 | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|  |  |   | keluarga miskin di kab/kota) x 100%   |                 |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 5  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK              | Capaian Data Gender dan Anak  | Data gender dan anak yang tersedia /data gender dan anak yang dibutuhkan x 100%   | Persen          | 35,00           | 35 ,00          | 40,00      | 200,00          | 60,00      | 175,00          | 60,00         | 375,00    | DP3AKB           |
| 6  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                             | Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak  | level kabupaten layak anak  | Nilai (Minimal) | 550             | 5.741,00        | 600        | 440 ,00         | 700        | 475,00          | 700           | 915,00    | DP3AKB           |
| 7  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                             | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten          | (jumlah anak (penduduk usia <18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tk. kab/kota yg didampingi/jumlah anak (penduduk usia < 18 th)) x 100% | Persen          | 0,0038          | 214,00          | 0,0041     | 325,00          | 0,0043     | 400,00          | 0,0043        | 725,00    | DP3AKB           |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |   |   |                 |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                | TFR (Total Fertility Rate)  | Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)   | Point           | 2,27            | 490,00          | 2,26       | 619,00          | 2,25       | 692,00          | 2,25          | 1.311,00  | DP3AKB           |
| 2  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | (Jumlah Pasangan usia subur yang memakai kotrasepsi moderen)/(Jumlah Pasangan usia subur seluruhnya)x 100%  | Persen          | 79,96           | 12.961,00       | 79,97      | 14.230,00       | 79,98      | 14.285,00       | 79,98         | 28.515,00 | DP3AKB           |
| 3  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase Keluarga Pra Sejahtera   | (Jumlah Keluarga Pra Sejahtera)/(Jumlah Keluarga seluruhnya)x 100%  | Persen          | 31,13           | 674,00          | 31,11      | 1.158,00        | 31,08      | 1.434,00        | 31,08         | 2.592,00  | DP3AKB           |
| PANGAN                                       |  |   |   |                 |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA    |   |   |                 |                 | 21.946,00       |            | 26.335,00       |            | 28.969,00       |               | 31.866,00 | DKP3             |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                         | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|                  |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|                  |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|                  |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 7.135,33        | BB         | 8.778,33        | BB         | 9.656,33        | BB            | 10.622,00 | DKP3             |
|                  |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 7.135,33        | B          | 8.778,33        | B          | 9.656,33        | B             | 10.622,00 | DKP3             |
|                  |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                               | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian            | Persen | 100             | 7.135,34        | 100        | 8.778,34        | 100        | 9.656,34        | 100           | 10.622,00 | DKP3             |
| 2                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaluatan dan Kemandirian pangan | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaluatan dan Kemandirian pangan | Persen | 90,00           | 20.000,00       | 95,00      | 21.000,00       | 100        | 22.000,00       | 100           | 22.000,00 | DKP3             |
| 3                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |  |  |        |                 | 1.688,00        |            | 4.000,00        |            | 4.000,00        |               | 8.000,00  | DKP3             |
|                  |   | Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna             | (jumlah laporan ketersediaan, harga dan pasokan pangan / 12 bulan) x 100 %         | Persen | 100             | 50 ,00          | 100        | 100,00          | 100        | 100,00          | 100           | 200,00    | DKP3             |
|                  |   | Peningkatan skor PPH   | (skor PPH tahun berjalan - skor PPH tahun sebelumnya per 100) x 100 %              | Persen | 0,50            | 638,00          | 0,50       | 2.200,00        | 0,50       | 2.200,00        | 0,50          | 4.400,00  | DKP3             |
|                  |   | Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis                   | (jumlah ketersediaan pangan/kebutuhan pangan) x 100%                               | Persen | 100             | 1.000,00        | 100        | 1.700,00        | 100        | 1.700,00        | 100           | 3.400,00  | DKP3             |
| 4                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)   | Desa yang tercukupi kebutuhan pangannya  | Desa   | 4               | 235,00          | 4          | 900,00          | 4          | 900,00          | 20            | 1.800,00  | DKP3             |
| 5                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Capaian Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                                   | (jumlah sampel yang diawasi dalam satu tahun/ jumlah sampel)x 100%                 | Persen | 100             | 113,00          | 100        | 950,00          | 100        | 450,00          | 100           | 1.400,00  | DKP3             |
| LINGKUNGAN HIDUP |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|----|--|--|---|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|    |  |  |   |         | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|    |  |  |   |         | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |         |                 | 5.158,00        |            | 6.141,00        |            | 6.578,00        |               | 17.877,00 | DLH              |
|    |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai   | BB              | 1.719,33        | BB         | 2.047,00        | BB         | 2.192,66        | BB            | 5.959,00  | DLH              |
|    |  | Capaian SKM Perangkat Daerah                         | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai   | B               | 1.719,33        | B          | 2.047,00        | B          | 2.192,66        | B             | 5.959,00  | DLH              |
|    |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                                | Persen  | 100             | 1.719,34        | 100        | 2.047,00        | 100        | 2.192,67        | 100           | 5.959,00  | DLH              |
| 2  | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup        | (Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang terpenuhi)/(Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Seharunnya tersedia)x 100% | Dokumen | 3               | 300,00          | 100        | 1.525,00        | 4          | 1.390,00        | 3             | 2.965,00  | DLH              |
| 3  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota     | Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Pencemaran udara  | Poin    | 58,16           | 100,00          | 59,36      | 870,00          | 60,55      | 835,00          | 60,55         | 11.097,00 | DLH              |
| 4  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | Indeks Tutupan Lahan                                 | Indeks Tutupan Lahan  | Poin    | 50,98           | 3.499,00        | 50,99      | 3.400,00        | 51,00      | 3.400,00        | 51,00         | 9.549,00  | DLH              |
| 5  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3             | Jumlah Perusahaan yang dibina izin Penyimpanan Sementara Limbah B3/Jumlah Perusahaan di Kabupaten Majalengka      | Persen  | 100             | 100 ,00         | 100        | 150,00          | 100        | 250,00          | 100           | 400,00    | DLH              |



| NO   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|--|---|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|  |   |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|  |   |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
| 6  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | (jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yg melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yg diterbitkan Pemerintah kab/kota) / (usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) | Persen | 100             | 53.158,00       | 100        | 100,00          | 100        | 150,00          | 300           | 303,00    | DLH              |
| 7  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  | (jumlah masyarakat yg mendapat pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup) / (jumlah penduduk di kab/kota) x 100%   | Persen | 100             | 90,00           | 100        | 95,00           | 100        | 100,00          | 100           | 100,00    | DLH              |
| 8  | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan   | jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup   | Buah   | 9               | 90,00           | 9          | 100,00          | 9          | 110,00          | 27            | 210,00    | DLH              |
| 9  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti   | (jumlah aduan Lingkungan Hidup yg sudah ditangani/jumlah aduan Lingkungan Hidup di kab/kota) x 100%  | Persen | 100             | 50,00           | 100        | 100,00          | 100        | 150,00          | 300           | 300,00    | DLH              |
| 10   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Persentase penanganan sampah yang tertangani  | (jumlah masalah sampah yg sudah ditangani/jumlah masalah sampah di kab/kota) x 100%  | Persen | 98,00           | 5.770,00        | 99,00      | 8.361,00        | 99,00      | 10.087,00       | 99,00         | 24.218,00 | DLH              |
| 11   | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL  | Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka   | (jumlah sarana persampahan/jumlah kebutuhan sarana persampahan) x 100%   | Persen | 12,37           | 18023,00        | 45,91      | 40.645,00       | 100        | 15.662,00       | 100           | 74.330,00 | DLH              |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |   |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|    |   |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|    |   |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |  |        |                 | 3.347,00        |            | 4.333,00        |            | 4.766,00        |               | 4.766,00 | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 1.115,66        | BB         | 2.995,00        | BB         | 3.294,00        | BB            | 3.294,00 | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 1.115,66        | B          | 21,00           | B          | 23,00           | B             | 23,00    | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                          | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                               | Persen | 100             | 1.115,67        | 100        | 1.317,00        | 100        | 1.449,00        | 100           | 1.449,00 | DISDUKCAPIL      |
| 2  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                              |   |  |        |                 | 2.237,00        |            | 2.614,00        |            | 2.831,00        |               | 2.831,00 | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Persentase Kepemilikan KTP  | (jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP/jumlah penduduk 17 th keatas) x 100%                       | Persen | 85,00           | 1.100,00        | 90,00      | 2.34,00 7       | 95,00      | 2.537,00        | 95,00         | 2.537,00 | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                   | (jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA/jumlah anak usia 0-17 tahun) x 100%          | Persen | 15,00           | 137,00          | 20,00      | 267,00          | 25,00      | 294,00          | 25,00         | 294,00   | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga  | Jumlah KK yang dimutakhirkan /jumlah Kartu Keluarga X 100%   | Persen | 75,00           | 0,00            | 85,00      | 0               | 95,00      | 0               | 95,00         | 0        | DISDUKCAPIL      |
| 3  | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                  |   |  |        |                 | 801,00          |            | 935,00          |            | 949,00          |               | 949,00   | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Persentasi Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian                            | (jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir/jumlah anak usia 0-18th) x 100%                           | Persen | 94,00           | 751 ,00         | 95,00      | 870,00          | 97,00      | 877,00          | 97,00         | 877,00   | DISDUKCAPIL      |
|    |   | Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian                | (jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian/jumlah perkawinan dan perceraian di kab/kota) x 100% | Persen | 100             | 50,00           | 100        | 65,00           | 100        | 72,00           | 100           | 72,00    | DISDUKCAPIL      |
| 4  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN   | Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik | (Jumlah TPDK yang berfungsi dengan baik/Jumlah seluruh TPDK yang ada) x 100%                                     | Persen | 100             | 674,00          | 100        | 295,00          | 100        | 350,00          | 100           | 350,00   | DISDUKCAPIL      |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                                | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------------|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|                                   |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|                                   |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|                                   |   | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | (Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama/jumlah OPD) x 100%  | Persen | 23,00           | 500,00          | 24,07      | 105,00          | 27,78      | 140,00          | 27,78         | 140,00    | DISDUKCAPIL      |
| 5                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                   | Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan                          | (Jumlah jenis data kependudukan yang tersedia / jumlah jenis data kependudukan ) x 100%   | Persen | 100             | 21,00           | 100        | 41,00           | 100        | 48,00           | 100           | 48,00     | DISDUKCAPIL      |
| PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |        |                 | 3.252,00        |            | 3.315,00        |            | 3.891,00        |               | 7.205,00  | DPMD             |
|                                   |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | N/A             | 2.500,00        | BB         | 2.312,00        | BB         | 2.788 ,00       | BB            | 5.101     | DPMD             |
|                                   |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | N/A             | 52,00           | B          | 26,00           | B          | 28 ,00          | B             | 54,00     | DPMD             |
|                                   |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                       | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%  | Persen | N/A             | 70,00 0         | 100        | 976,00          | 100        | 1.074,00        | 100           | 2.050,00  | DPMD             |
| 2                                 | PROGRAM PENATAAN DESA                                     | Persentase peningkatan status desa mandiri   | (jumlah desa berkembang yg memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun/jumlah desa berkembang (per awal tahun n)) x 100% | Persen | 5,4             | 49,00           | 7,88       | 150,00          | 10,3       | 165,00          | 18,18         | 315,00    | DPMD             |
| 3                                 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                        | Jumlah Pelaksana Mou yang dilaksanakan dengan pihak ke tiga                                | Jumlah Pelaksanaan Mou yang dilaksanakan dengan pihak ketiga  | MoU    | 8               | 5.050,00        | 8          | 5.850,00        | 8          | 6.435,00        | 15            | 12.285,00 | DPMD             |
| 4                                 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                    | Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan               | (jumlah desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan/jumlah desa di kab/kota) x 100%   | Persen | 100             | 2.403,00        | 100        | 3.110,00        | 100        | 3.421,00        | 100           | 6.531,00  | DPMD             |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO          | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                              | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|--|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|             |  |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|             |  |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
| 5           | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan lembaga masyarakat desa | (jumlah pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/jumlah pembinaan di kab/kota) x 100%  | Persen | 100             | 1.686 ,00       | 100        | 2.680 ,00       | 100        | 2.948,00        | 100           | 5.628,00  | DPMD             |
| PERHUBUNGAN |  |   |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |   |  |        |                 | 9.278,00        |            | 12.296,00       |            | 11.576v         |               | 16.565,00 | DISHUB           |
|             |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 6.000,00        | BB         | 8.031,00        | BB         | 8.534,00        | BB            | 16.565,00 | DISHUB           |
|             |  | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 278,00          | B          | 150,00          | B          | 165,00          | B             | 315,00    | DISHUB           |
|             |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                  | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 3.000,00        | 100        | 4.115,00        | 100        | 2.877,00        | 100           | 6.992,00  | DISHUB           |
| 2           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                        |   |  |        |                 | 8.009,00        |            | 14.300,00       |            | 16.900,00       |               | 16.900,00 | DISHUB           |
|             |  | Persentase Capaian Desa Yang Terlayani Angkutan Umum                  | (Jumlah Desa yang terlayani Angkutan Umum)/(Jumlah Seluruh Desa)x 100%   | persen | 60              | 4.009,00        | 75         | 2.800,00        | 80         | 3.100,00        | 80            | 3.100,00  | DISHUB           |
|             |  | Persentase Pemasangan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibagi Jumlah Kebutuhan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : perlengkapan Jalan (rambu lalu lintas, Alat Penerangan Jalan/PJU, Alat Pengendali Pengaman | persen | 46,00           | 4.000,00        | 50,00      | 11.500,00       | 54,00      | 13.800,00       | 54 ,00        | 3.100,00  | DISHUB           |



| NO                         | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|----------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|                            |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|                            |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|                            |   |  | Pengguna Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) x 100%   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
|                            |   | Persentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor   | (jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor/jumlah kendaraan bermotor di kab/kota) 100%                                | persen | 90,00           |                 | 90,00      | 3.49,005        | 90,00      | 3.170,00        | 90 ,00        | 3.170,00  | DISHUB           |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 3.514,00        |            | 3.600,00        |            | 3.700,00        |               | 3.700,00  | DISKOMINFO       |
|                            |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 1.171,30        | BB         | 1.200,00        | BB         | 1.233,30        | BB            | 1.233,30  | DISKOMINFO       |
|                            |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 1.171,30        | B          | 1.200,00        | B          | 1.233,30        | B             | 1.233,30  | DISKOMINFO       |
|                            |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 1.171,40        | 100        | 1.200,00        | 100        | 1.233,40        | 100           | 1.233,40  | DISKOMINFO       |
| 2                          | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | (jumlah masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda/jumlah penduduk sasaran) x 100% | Persen | 60,00           | 780,00          | 80,00      | 4.500,00        | 100        | 5.000,00        | 100           | 9.500,00  | DISKOMINFO       |
| 3                          | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                              |  |  |        |                 | 30.851          |            | 7.000           |            | 7.500,00        |               | 14.500,00 | DISKOMINFO       |



| NO                                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH       | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------------|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                                    |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                                    |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
|                                    |   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  | (jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi/jumlah layanan publik) x 100%                            | Persen | 60,00           | 10.283,66       | 80,00      | 2.333,33        | 100        | 2.500,00        | 100           | 4.833,33 | DISKOMINFO       |
|                                    |   | Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik   | Jumlah penambahan lokasi yang terfasilitasi Sarana Infrastruktur informatika  | Lokasi | 6               | 10.283,66       | 6          | 2.333,33        | 6          | 2.500 ,00       | 6             | 4.833,33 | DISKOMINFO       |
|                                    |   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses yang disediakan oleh Dinas Kominfo   | Persen | 80,00           | 10.283,67       | 100        | 2.333,34        | 100        | 2.500,00        | 100           | 4.833,34 | DISKOMINFO       |
| PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN     |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik  | Jumlah data dan informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah Daerah/ jumlah layanan informasi elektronik | Persen | 50,00           | 330,00          | 75,00      | 1.000,00        | 100        | 1.500,00        | 175           | 2.500,00 | DISKOMINFO       |
| KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                                  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                   | Tingkat koperasi yang diawasi dan diperiksa  | (jumlah koperasi aktif yg diawasi dan diperiksa/jumlah koperasi aktif di kab/kota) x 100%   | Persen | 10,00           | 262,50          | 16,22      | 330,00          | 16,22      | 330,00          | 32,44         | 660,00   | DK2UKM           |
| 2                                  | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                  | Tingkat koperasi sehat   | (jumlah koperasi sehat/jumlah koperasi di kab/kota) x 100%  | Persen | -               | -               | 10,00      | 135,00          | 10,00      | 135,00          | 20,00         | 270,00   | DK2UKM           |
| 3                                  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                  | Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan  | Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan   | Orang  | N/A             | -               | 125        | 125,00          | 125        | 125 ,00         | 250           | 250,00   | DK2UKM           |
| 4                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                | Tingkat Koperasi yang berkualitas  | (jumlah koperasi yg meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/jumlah seluruh koperasi) x 100%              | Persen | 10,00           | 162,00          | 20,00      | 250,00          | 20,00      | 250,00          | 50,00         | 500,00   | DK2UKM           |



| NO                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                  | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN         | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|--|---|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                        |  |   |  |                | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                        |  |   |  |                | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| 5                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin | (rata2 omzet usaha mikro tahun n-rata omzet usaha mikro tahun n-1/rata2 omzet usaha mikro tahun n-1)x100%        | Persen         | 3,00            | 1.301,00        | 3,00       | 1.275 ,00       | 3,00       | 1.350 ,00       | 9,00          | 3.276,00 | DK2UKM           |
| 6                      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Tingkat Usaha Mikro yang menjadi wirausaha              | (jumlah usaha mikro yg menjadi wirausaha/jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%                                  | Persen         | 100             | 80 ,00          | 100        | 90 ,00          | 100        | 100,00          | 100           | 100,00   | DK2UKM           |
| <b>TRANSMIGRASI</b>    |  |   |  |                |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                      | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                 | Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin | (rata2 omzet usaha mikro tahun n-rata omzet usaha mikro tahun n-1/rata2 omzet usaha mikro tahun n-1)x100%        | persen         | 2,00            | 200,00          | 2,00       | 200,00          | 2,00       | 200,00          | 2,00          | 200,00   | DK2UKM           |
|                        |  | Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi           | Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi  | kawasan        | -               | -               | 1          | 100,00          | 1          | 100,00          | 2             | 200,00   | DK2UKM           |
| <b>PENANAMAN MODAL</b> |  |   |  |                |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                |   |  |                |                 | 3.342,00        |            | 3.843,00        |            | 4.013,00        |               | 7.855,00 | DPMTSP           |
|                        |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah                          | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai          | BB              | 2.200 ,00       | BB         | 2.189,00        | BB         | 2.193,00        | BB            | 4.382,00 | DPMTSP           |
|                        |  | Capaian SKM Perangkat Daerah                            | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai          | B               | 42,00           | B          | 30,00           | B          | 33,00           | B             | 62,00    | DPMTSP           |
|                        |  | Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran               | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                               | Persen         | 100             | 1.100,00        | 100        | 1.624,00        | 100        | 1.787,00        | 100           | 3.411,00 | DPMTSP           |
| 2                      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | Peningkatan investasi di kabupaten/kota                 | (jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 di kab/kota/jumlah investasi tahun n-1 di kab/kota) x 100% | Persen         | 100             | 661,00          | 100        | 990,00          | 100        | 1.089 ,00       | 100           | 2.079,00 | DPMTSP           |
| 3                      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL  | Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi               | Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi  | Sarana/Prasara | N/A             | N/A             | 5          | 552,00          | 5          | 607,00          | 5             | 1.947,00 | DPMTSP           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                       | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH       | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------------|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                          |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                          |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| 4                        | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Tingkat Perizinan Yang diterbitkan   | (jumlah perijinan yang diterbitkan /jumlah usulan keseluruhan perijinan yg terdaftar )x100%                         | jumlah | 100             | 469,00          | 100        | 927,00          | 100        | 1.020,00        | 100           | 1.020,00 | DPMTSP           |
| 5                        | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban                            | (Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang Mengumpulkan LKPM/Jumlah PMA /PMDN yang Mempunyai Kewajiban mengumpulkan LKPM)x100 | Persen | 100             | 171 ,00         | 100        | 235,00          | 100        | 258,5 0         | 100           | 663,60   | DPMTSP           |
| 6                        | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten  | (Jumlah data perijinan dan investasi yang terdokumen/jumlah keseluruhan data perijinan dan investasi )x100%         | Persen | N/A             | 160,00          | 100        | 165,00          | 100        | 182 ,00         | 100           | 347,00   | DPMTSP           |
| KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA     |  |   |        |                 | 2.966,00        |            | 2.966           |            | 3.263           |               | 6.228,00 | DISPORA          |
|                          |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 988,66          | BB         | 988,66          | BB         | 1.087,66        | BB            | 2.076,00 | DISPORA          |
|                          |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 988,66          | B          | 988,66          | B          | 1.087,66        | B             | 2.076,00 | DISPORA          |
|                          |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                             | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                                  | Persen | 100             | 988,67          | 100        | 988,67          | 100        | 1.087,67        | 100           | 2.076,00 | DISPORA          |
| 2                        | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          |  |   |        |                 | 1.107,00        |            | 2.176,00        |            | 2.393,00        |               | 4.569,00 | DISPORA          |
|                          |   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda | (jumlah pemuda (16-30 th) yg berwirausaha di prov/jumlah pemuda umur 16-30 di kab/kota) x 100%                      | Persen | 2               | 907,00          | 2          | 1.201,00        | 3          | 1.321,00        | 7             | 2.521,00 | DISPORA          |



| NO        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|---|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|           |   |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|           |   |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|           |   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | (jumlah pemuda (16-30 th) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota/jumlah pemuda umur 16-30 th di kab/kota) x 100% | Persen | 44,00           | 200,00          | 48,00      | 975,00          | 52,00      | 1.073,00        | 100           | 2.048,00  | DISPORA          |
| 2         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN  |   |  |        |                 | 80.036,00       |            | 87.558,00       |            | 96.314,00       |               | 14.222,00 | DISPORA          |
|           |   | Peningkatan prestasi olahraga   | jumlah atlet berprestasi/Jumlah atlet yang diikutsertakan dalam even olahraga  | Persen | 40,00           | 5.000,00        | 43,00      | 4.759,00        | 45,00      | 5.235,00        | 80,00         | 9.994,00  | DISPORA          |
|           |   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga  | Jumlah even olahraga yang melibatkan masyarakat/jumlah even olahraga yang direncanakan   | Persen | 70,00           | 36 ,00          | 80,00      | 299,00          | 80,00      | 329,00          | 80,00         | 627,00    | DISPORA          |
|           |   | Peningkatan Infrastruktur keolahragaan  | Jumlah Infrastruktur yang dibangun/Jumlah Infrastruktur yang ada   | Persen | 0,50            | 75.000 ,00      | 0,80       | 82.500,00       | 0,80       | 90.750,00       | 2,10          | 3.600,00  | DISPORA          |
| 3         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN              | Tingkat Partisipasi Kepramukaan   | Jumlah aktifitas kepramukaan tingkat kabupaten   | Persen | 100             | 75 ,00          | 100        | 83 ,00          | 100        | 91,00           | 100           | 173,00    | DISPORA          |
| STATISTIK |   |   |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1         | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL              |   |  |        |                 | 290,00          |            | 2.000,00        |            | 2.500,00        |               | 4.500,00  | DISKOMINFO       |



| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                     |   |  |  |                  | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                     |   |  |  |                  | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
|                     |   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/jumlah OPD) x 100% | Persen           | 80,00           | 145,00          | 100        | 1.000,00        | 100        | 1.250,00        | 100           | 2.250,00 | DISKOMINFO       |
|                     |   | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | (jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/jumlah OPD) x 100%   | Persen           | 80,00           | 145,00          | 100        | 1.000,00        | 100        | 1.250,00        | 100           | 2.250,00 | DISKOMINFO       |
| <b>KEBUDAYAAN</b>   |   |  |  |                  |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                         | Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan   | Event/pagelaran  | Event            | 35              | 1.600,00        | 35         | 1.450,00        | 35         | 1.350,00        | 105           | 2.800,00 | DISPARBUD        |
| 2                   | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional               | jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi  | kesenian tradisional yang direvitalisasi   | Seni Tradisional | 1               | 200,00          | 1          | 200,00          | 1          | 200,00          | 2             | 400,00   | DISPARBUD        |
| 3                   | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                               | jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola  | Pengembangan Sejarah Desa/kelurahan di Kabupaten   | Jumlah           | N/A             | 0,00            | 1          | 130,00          | 1          | 135,00          | 3             | 265,00   | DISPARBUD        |
| 4                   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA        | Persentase cagar budaya yang dilestarikan  | (jumlah cagar budaya yg dilestarikan/jumlah cagar budaya yg terdata) x 100%                                  | Persen           | 1,00            | 930,00          | 5,00       | 450,00          | 5,00       | 450,00          | 11,00         | 900,00   | DISPARBUD        |
| 5                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                         | jumlah Museum yang direvitalisasi  | Jumlah Museum yang direvitalisasi  | Museum           | N/A             | 0,00            | 1          | 965,00          | 1          | 1.800,00        | 2             | 2.765,00 | DISPARBUD        |
| <b>PERPUSTAKAAN</b> |   |  |  |                  |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                          |  |  |                  |                 | 12.083,00       |            | 550,00          |            | 605,00          |               | 1.155,00 | ARPUKDA          |



| NO        | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|---|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|           |   |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|           |   |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
|           |   | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  | Poin   | 47              | 6.042,00        | 49         | 225,00          | 51         | 303,00          | 51            | 655,00   | ARPUSDA          |
|           |   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  | Poin   | 1,79            | 6.041,00        | 1,80       | 225,00          | 1,81       | 302,00          | 1,81          | 500,00   | ARPUSDA          |
| KEARSIPAN |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |   |        |                 | 3.066,00        |            | 4.278,00        |            | 4.278,00        |               | 4.278,00 | ARPUSDA          |
|           |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 2.600 ,00       | BB         | 3.015,00        | BB         | 3.015,00        | BB            | 3.015,00 | ARPUSDA          |
|           |   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 233,00          | B          | 333 ,00         | B          | 333,00          | B             | 333,00   | ARPUSDA          |
|           |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%  | Persen | 100             | 233,00          | 100        | 330 ,00         | 100        | 330,00          | 100           | 330,00   | ARPUSDA          |
| 2         | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban | $T = (a + i + s + j)/4$ 50% T= tingkat ketersediaan arsip = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balikj = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Persen | 45,00           | 162,00          | 50,00      | 890,00          | 52,00      | 1.100,00        | 52 ,00        | 1.100,00 | ARPUSDA          |
| 3         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP               | Rasio pengelola arsip   | jumlah OPD yang mempunyai pengelola arsip/jumlah OPDx100%   | Persen | 100             | 52,00           | 100        | 116,00          | 100        | 117,00          | 100           | 117,00   | ARPUSDA          |



| NO                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                        |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                        |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
|                        |   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | $T = (m + b + g + a + c + i)/6$<br>T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban<br>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK<br>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK<br>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran 50% Daerah kabupaten/kota dengan NSPK<br>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK<br>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK<br>I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | Persen | 45,00           | 52 ,00          | 50,00      | 106,00          | 52,00      | 116,00          | 52,00         | 117,00   | ARPUEDA          |
| URUSAN PILIHAN         |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                   | Terpenuhinya produksi perikanan tangkap                                | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap  | Ton    | 10              | 35,00           | 10         | 250,00          | 10         | 250 ,00         | 20            | 500,00   | DKP3             |
| 2                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                  | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten                     | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota  | Persen | 10,00           | 1.200,00        | 10,00      | 1.770,00        | 2,00       | 1.790,00        | 10,00         | 3.560,00 | DKP3             |



| NO                | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|                   |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|                   |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
| 3                 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN      | Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan            | Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                              | Persen | 10 ,00          | 1.000 ,00       | 15,00      | 1.100,00        | 20,00      | 1.200,00        | 20,00         | 1.200,00  | DKP3             |
| 4                 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN          |  |  |        |                 | 125,00          |            | 450,00          |            | 450,00          |               | 900,00    | DKP3             |
|                   |   | Jumlah omzet pemasaran produk perikanan                            | Peningkatan Omzet Pemasaran Produk Hasil Perikanan (Surimi, Pemindangan, Ikan Segar) | Persen | 5,00            | 25,00           | 5,00       | 200,00          | 10,00      | 200,00          | 10,00         | 400,00    | DKP3             |
|                   |   | Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat | Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat                   | Jumlah | 30              | 100,00          | 30         | 250,00          | 30         | 250,00          | 30            | 500,00    | DKP3             |
| <b>PARIWISATA</b> |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 3.119,00        |            | 6.024,00        |            | 4.797,00        |               | 10.821,00 | DISPARBUD        |
|                   |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah                                     | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 1.000,00        | BB         | 2.389,00        | BB         | 2.628,00        | BB            | 5.017,00  | DISPARBUD        |
|                   |   | Capaian SKM Perangkat Daerah                                       | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 119,00          | B          | 250,00          | B          | 150,00          | B             | 400,00    | DISPARBUD        |
|                   |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran               | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 2.000,00        | 100        | 3.385,00        | 100        | 2.019,00        | 100           | 5.405,00  | DISPARBUD        |
| 2                 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA       |  |  |        |                 | 25.517,00       |            | 13.200,00       |            | 45.600,00       |               | 58.800,00 | DISPARBUD        |
|                   |   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku           | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                             | persen | 1,10            | 12.500,00       | 1,10       | 6.200,00        | 1,10       | 34.600,00       | 1,10          | 40.800,00 | DISPARBUD        |



| NO               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR                                      | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|------------------|--|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|                  |  |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|                  |  |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|                  |  | Persentase Desa Wisata Berkembang              | (jumlah desa wisata Berkembang/Jumlah desa wisata yang ditetapkan)x 100  | persen | 15,00           | 12.500,00       | 24,00      | 6.100,00        | 24,00      | 9.400,00        | 63,00         | 15.500,00 | DISPARBUD        |
|                  |  | Jumlah usaha pariwisata yang distandarisasi    | Usaha Pelaku Pariwisata yang distandarisasi  | persen | N/A             | 517,00          | 30,00      | 100             | 30,00      | 125,00          | 60,00         | 225,00    | DISPARBUD        |
| 3                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase Jumlah daya tarik yang dipromosikan | jumlah daya tarik yang dipromosikan/jumlah seluruh daya tarik )x100%   | persen | 10,00           | 1.050 ,00       | 10,00      | 3.550,00        | 10,00      | 3.451,00        | 30,00         | 7.001,00  | DISPARBUD        |
| 4                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif  | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif pada tahun n-jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun n-1)/jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 x100% | persen | N/A             | 5.500,00        | 20,00      | 5.900,00        | 20,00      | 6.200,00        | 40,00         | 12,100,00 | DISPARBUD        |
| 5                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |  |  |        |                 | 1.680,00        |            | 1.150,00        |            | 1.250,00        |               | 2.400,00  | DISPARBUD        |
|                  |  | Jumlah Desa Tematik Kreatif                    | Jumlah Desa Tematik Kreatif  | Desa   | N/A             | 840,00          | 6          | 675,00          | 6          | 625,00          | 12            | 1.200,00  | DISPARBUD        |
|                  |  | sertifikasi pelaku ekonomi kreatif             | jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi/jumlah total pelaku yang terdata )x 100 persen  | persen | 5,00            | 840,00          | 5,00       | 675,00          | 5,00       | 625,00          | 15,00         | 1.200,00  | DISPARBUD        |
| <b>PERTANIAN</b> |  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun   | (jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/luas panen) x 100%  | Persen | 80,00           | 1.759,00        | 80,00      | 4.180,00        | 85,00      | 6.235,00        | 85,00         | 11.890,00 | DKP3             |
| 2                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | Persentase ketersediaan prasarana Pertanian    | Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian per hektar per tahun  | Persen | 60,00           | 4.605,00        | 60,00      | 8.760,00        | 65,00      | 8.970,00        | 3,50          | 17.730,00 | DKP3             |



| NO          | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH                 | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|             |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|             |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
| 3           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular    | (jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) x 100% | persen | 30,00           | 148,00          | 30,00      | 350,00          | 50,00      | 400,00          | 80,00         | 900,00    | DKP3             |
| 4           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian | Luas lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian, sarana penanggulangan hama dan penyakit tanaman  | Hektar | 5.000           | 90,00           | 5.000      | 354,00          | 5.000      | 354,00          | 500           | 708,00    | DKP3             |
| 6           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian                                     | Jumlah kelompok yang terfasilitasi oleh penyuluh/ jumlah kelompok se Kabupaten Majalengka dikali 100 %   | Persen | 100             | 2.527,00        | 100        | 14.805,00       | 100        | 4.804,00        | 100           | 4.804,00  | DKP3             |
| PERDAGANGAN |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA               |  |  |        |                 | 4.936,00        |            | 5.270,00        |            | 5.797,00        |               | 16.003,00 | DISPERDAGIN      |
|             |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Persen | BB              | 1.645,33        | BB         | 1.756,66        | BB         | 1.932,33        | BB            | 5.334,33  | DISPERDAGIN      |
|             |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 1.645,33        | B          | 1.756,66        | B          | 1.932,33        | B             | 5.334,33  | DISPERDAGIN      |
|             |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                     | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 1.645,34        | 100        | 1.756,67        | 100        | 1.932,34        | 100           | 5.334,34  | DISPERDAGIN      |
| 2           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       |  |  |        |                 | 16.991,00       |            | 19.871,00       |            | 21.858,00       |               | 58.720,00 | DISPERDAGIN      |
|             |   | Infrastruktur Perdagangan yang dibangun                                  | Jumlah Pasar yang direvitalisasi Tahun ini.  | unit   | 1               | 8.495,50        | 1          | 9.935,50        | 1          | 10.929,00       | 3             | 29.360,00 | DISPERDAGIN      |



| NO            | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH             | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|               |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|               |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|               |   | Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif  | Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang diRevitalisasi Tahun ini   | Unit   | 3               | 8.495,50        | 3          | 9.935,50        | 3          | 10.929,00       | 9             | 29.360,00 | DISPERDAGIN      |
| 3             | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  |   |        |                 | 49,00           |            | 209,00          |            | 229,00          |               | 487,00    | DISPERDAGIN      |
|               |   | Tingkat kinerja realisasi pupuk  | (realisasi/RDKK) x 100%   | Persen | N/A             | 25,00           | 100        | 105,00          | 100        | 115 ,00         | 100           | 294,00    |                  |
|               |   | Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat                              | Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Pokok Penting Bagi Masyarakat yang di Laksanakan Tahun ini.  | Kali   | 96              | 24,00           | 96         | 104,00          | 96         | 114 ,00         | 96            | 293,00    | DISPERDAGIN      |
| 4             | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Terpenuhinya nilai ekspor  | (Nilai Ekspor Tahun Ini / Nilai Ekspor Tahun Lalu) x 100%   | Persen | 10,00           | 478 ,00         | 10,00      | 853 ,00         | 10,00      | 938,00          | 10,00         | 2269,00   | DISPERDAGIN      |
| 5             | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | (jumlah UTTP bertanda Tera Sah yg berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yg wajib ditera dan tera ulang di wil. kab/kota) x 100%         | Persen | 20,00           | 268,00          | 20,00      | 640,00          | 20,00      | 704,00          | 20,00         | 1.612,00  | DISPERDAGIN      |
| 6             | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri   | Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi Masyarakat  | Kali   | 12              | 74,00           | 12         | 83 ,00          | 10         | 91,00           | 12            | 248,00    | DISPERDAGIN      |
| PERINDUSTRIAN |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1             | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten  | (jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)/(jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) x 100% | IKM    | 40              | 5.323 ,00       | 40         | 563,00          | 40         | 619,00          | 40            | 6.505,00  | DISPERDAGIN      |



| NO  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH           | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|   |   |   |   |         | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|   |   |   |   |         | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| 2   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL            | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini   | tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan; tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan; informasi produksi dan kapasitas produksi; informasi bahan baku dan bahan penolong; informasi bahan bakar/energy; informasi tenaga kerja | Dokumen | 1               | 118 ,00         | 1          | 228,00          | 1          | 251 ,00         | 3             | 597,00   | DISPERDAGIN      |
| URUSAN PENUNJANG  |   |   |   |         |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |   |   |   |         |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                      |   |   |         |                 | 4.733,00        |            | 5.371,00        |            | 5.851,00        |               | 6.000,00 | BAPPEDALITBANG   |
|   |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai   | BB              | 1.577,66        | BB         | 1.790,33        | BB         | 1.950,33        | BB            | 2.000,00 | BAPPEDALITBANG   |
|   |   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai   | B               | 1.577,66        | B          | 1.790,33        | B          | 1.950,33        | B             | 2.000,00 | BAPPEDALITBANG   |
|   |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%  | Persen  | 100             | 1.577,67        | 100        | 1.790,34        | 100        | 1.950,33        | 100           | 2.000,00 | BAPPEDALITBANG   |
| 2   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |   |   |         |                 | 1.576,00        |            | 1.734,00        |            | 1.991,00        |               | 2.100,00 | BAPPEDALITBANG   |
|   |   | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | (Jumlah Program Kegiatan di RKPD Tahun-n)/(Jumlah Program Kegiatan di RPJMD Pada Tahun-n)x 100%   | Persen  | 96,00           | 788,00          | 98,00      | 867 ,00         | 99,00      | 995,50          | 99,00         | 1.050,00 | BAPPEDALITBANG   |



| NO   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH            | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|  |  |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|  |  |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|  |  | Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD | (Jumlah Program Kegiatan Pada RENSTRA)/(Jumlah Program Kegiatan Pada RPJMD)x 100%                                      | Persen | 96,00           | 788,00          | 98,00      | 867,00          | 99,00      | 995,50          | 99,00         | 1.050,00  | BAPPEDALITBANG   |
| 3  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD                                      | Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD | Persen | 96,00           | 3.096,00        | 98,00      | 3.444,00        | 99,00      | 4.181,00        | 99,00         | 4.300,00  | BAPPEDALITBANG   |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                      |  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |  |  |        |                 | 975,00          |            | 1.025,00        |            | 936,00          |               | 950,00    | BAPPEDALITBANG   |
|  |  | Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan  |  | persen | 100             | 550,00          | 100        | 525 ,00         | 100        | 468 ,00         | 100           | 475,00    | BAPPEDALITBANG   |
|  |  | Persentase Inovasi Daerah yang diimplmentasikan  |  | persen | 80,00           | 425,00          | 85,00      | 500,00          | 95,00      | 468,00          | 95,00         | 475,00    | BAPPEDALITBANG   |
| KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA          |  |  |        |                 | 24.126,00       |            | 26.524          |            | 29.180,00       |               | 30.000,00 | BKPSDM           |
|  |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 10.000 ,00      | BB         | 24.587,00       | BB         | 27.050,00       | BB            | 10.000,00 | BKPSDM           |
|  |  | Capaian SKM Perangkat Daerah (B)   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 126,00          | B          | 30,00           | B          | 33,00           | B             | 50,00     | BKPSDM           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                       | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------------|---|---|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|                          |   |   |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|                          |   |   |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
|                          |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran ( C )                      | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                                | Persen | 100             | 14.000,00       | 100        | 1.907,00        | 100        | 2.098,00        | 100           | 19.950,00  | BKPSDM           |
| 2                        | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                |   |   |        |                 | 172.341,00      |            | 228.339,00      |            | 250.430,00      |               | 270.000,00 | BKPSDM           |
|                          |   | Rasio pegawai Fungsional  | (Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional)/(Jumlah Seluruh ASN)x 100%   | Persen | 68,00           | 7.000,00        | 70,00      | 3.233,00        | 71,00      | 3.556,00        | 71 ,00        | 15.000,00  | BKPSDM           |
|                          |   | Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani                             | (Jumlah Pelanggaran disiplin PNS yang tertangani)/(Jumlah Pelanggaran disiplin seluruhnya)x 100%                  | Persen | 100             | 150.000,00      | 100        | 223.335,00      | 100        | 245.448,00      | 100           | 250.000,00 | BKPSDM           |
|                          |   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)                          | (Jumlah Pegawai dengan Pendidikan Perguruan Tinggi Keatas)/( Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah)x 100% | Rasio  | 6,00            | 5.341,00        | 6,51       | 1.772,00        | 7,07       | 1.426,00        | 7,07          | 5.000,00   | BKPSDM           |
| 3                        | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  |   |   |        |                 | 2.594,00        |            | 3.864,00        |            | 4.240,00        |               | 4.400,00   | BKPSDM           |
|                          |   | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | (Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural)/(Jumlah jabatan Struktural)x 100%                           | Persen | 58,00           | 1.800,00        | 59,00      | 2.874,00        | 60,00      | 3.162,00        | 60,00         | 3.300,00   | BKPSDM           |
|                          |   | Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi               | (Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi)/(Jumlah Seluruh Pegawai Fungsional)x 100%         | Persen | 50,00           | 794,00          | 60,00      | 989,00          | 60,00      | 1.078,00        | 60,00         | 1.100,00   | BKPSDM           |
| KEUANGAN DAN ASET DAERAH |   |   |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                  |
| 1                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |   |        |                 | 4.990,00        |            | 5.489,00        |            | 6.038,00        |               | 16.517,00  | BKAD             |
|                          |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 4.000,00        | BB         | 5.000,00        | BB         | 5.538,00        | BB            | 11.526,00  | BKAD             |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO             | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |              | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
|                |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU         |                  |
|                |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |              |                  |
|                |   | Capaian SKM Perangkat Daerah                         | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 590,00          | B          | 289,00          | B          | 300,00          | B             | 4.991,00     | BKAD             |
|                |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100% | Persen | 100             | 400,00          | 100        | 200,00          | 100        | 200,00          | 100           | 4.991,00     | BKAD             |
| 2              | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                       | Penyampaian LKPD Tepat Waktu                         | Kepatuhan Penyampaian LKPD Tepat Waktu   | Persen | 100             | 573.900,00      | 100        | 642.503,00      | WTP        | 706.754,00      | 100           | 1.923.157,00 | BKAD             |
| 3              | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                   | Aset yang diamankan secara fisik dan Legal           | Jumlah Aset yang diamankan secara fisik /total aset x 100%                         | Persen | 100             | 1.050,00        | 100        | 1.155,00        | 100        | 1.271,00        | 100           | 3.476,00     | BKAD             |
| 4              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 9.895,00        |            | 10.768,00       |            | 11.844,00       |               | 32.507,00    | BAPENDA          |
|                |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 5.895,00        | BB         | 6.768,00        | BB         | 7.000,00        | BB            | 22.612,00    | BAPENDA          |
|                |   | Capaian SKM Perangkat Daerah                         | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 4.000 ,00       | B          | 4.000,00        | B          | 4.844,00        | B             | 9.895,00     | BAPENDA          |
|                |   | Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran            | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100% | persen | 100             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100           |              | BAPENDA          |
| 2              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                     | Capaian realisasi Penerimaan PAD                     | jumlah realisasai PAD / Target PAD x 100%  | persen | 100             | 3.137,00        | 100        | 3.450 ,00       | 100        | 3.796,00        | 100           | 10.383,00    | BAPENDA          |
| FUNGSI LAINNYA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |              |                  |
| SETDA          |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |              |                  |
| 1              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                |  |  |        |                 | 37.869,9        |            | 42.077,7        |            | 46.285,4        |               | 88.576,00    |                  |
|                |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 12.079,1        | BB         | 13.421,3        | BB         | 14.763,4        | BB            | 40.263,80    |                  |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|--|---|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|    |   |  |   |            | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|    |   |  |   |            | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah (B)  | Nilai      | B               | 5.626,60        | B          | 6.251,80        | B          | 6.876,90        | B             | 18.755,30 | Umum             |
|    |   | Capaian IKM Kabupaten  | Nilai IKM Kabupaten   | Indek      | 100             | 1.221,20        | 100        | 1.356,80        | 100        | 1.492,60        | 100           | 4.070,60  | Organisasi       |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                                  | Persentase | N/A             | 18.525,20       | 100        | 20.583,60       | 100        | 22.641,90       | 100           | 61.750,70 | Umum             |
|    |   | Capaian Lakip Kabupaten  | Nilai Lakip Kabupaten Yang dikeluarkan Kemenpan RB  | Nilai      | BB              | 417,80          | BB         | 464,20          | BB         | 510,60          | BB            | 1.392,60  | Organisasi       |
| 2  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT           |  |   |            |                 | 16.904,65       |            | 18.782,95       |            | 20.661,24       |               | 39.444,00 | Kesra            |
|    |   | Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif                                      |   | Persen     | 35,00           |                 | 40,00      |                 | 45,00      |                 | 45,00         |           | Kesra            |
|    |   | Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi                          |   | Persen     | 50,00           | 9.666,59        | 55,00      | 10.740,66       | 60,00      | 11.814,73       | 60,00         | 32.221,98 | Kesra            |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi                                |   | Persen     | 74,00           |                 | 77,00      |                 | 80,00      |                 | 80,00         |           | Kesra            |
|    |   | Persentase tokoh agama yang terfasilitasi                                      |   | Persen     | 56,00           |                 | 62,00      |                 | 68,00      |                 | 68,00         |           | Kesra            |
|    |   | Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)                            | Capaian Predikat LPPD tahun berjalan  | Predikat   | Tinggi          | 2.595,77        | Tinggi     | 2.884,18        | Tinggi     | 3.172,61        | Tinggi        | 8.652,56  | Tapem            |
|    |   | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Regulasi dan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM | Persentase Produk Hukum Daerah yang dibentuk dan permasalahan hukum dan HAM yang dirangani                          | Persen     | 100             | 921,38          | 100        | 1.023,76        | 100        | 1.126,14        | 100           | 3.071,28  | Hukum            |
|    |   | Tingkat Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat               | Jumlah Pelaksanakan Kebijakan sosial dan masyarakat yang difasilitasi/jumlah kebijakan sosial dan masyarakat x 100% | Persen     | 100             | 3.720,90        | 100        | 4.134,34        | 100        | 4.547,77        | 100           | 12.403,01 | Hukum            |
| 3  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                    |  |   |            |                 | 4.877           |            | 5.364           |            | 5.901           |               | 11.265,00 | Ekbang           |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO          | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
|             |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                  |
|             |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                  |
|             |   | Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil dilaksanakan         | (Jumlah Kegiatan Pembangunan yang Berhasil dilaksanakan)/(Jumlah Seluruh Kegiatan Pembangunan Kegiatan)x 100%   | Persen | 100             | 1.297,90        | 100        | 1.442,10        | 100        | 1.586,40        | 100           | 4.326,40  | Ekbang           |
|             |   | Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan                  | (Jumlah Paket Yang Berhasil dilelang)/(Jumlah seluruh paket Pengadaan yang dilelang)x 100%  | Persen | 100             | 1.917,70        | 100        | 2.130,80        | 100        | 2.343,90        | 100           | 6.392,40  | PBJ              |
|             |   | Terpenuhinya PAD yang bersumber dari BUMD                          | (Jumlah PAD yang bersumber dari BUMD pada Tahun n dikurangi Jumlah PAD yang bersumber dari BUMD pad Tahun n-1)/(Jumlah PAD yang bersumber dari BUMD pad Tahun n-1) x 100% | Persen | 5,00            | 1.612,30        | 5,00       | 1.791,40        | 5,00       | 1.970,60        | 5,00          | 5.374,30  | Ekbang           |
| INSPEKTORAT |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                  |
| 1           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |        |                 | 4.018,00        |            | 10.760,00       |            | 11.845,00       |               | 18.707,00 |                  |
|             |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah                                     | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 3.900 ,00       | BB         | 4.489,00        | BB         | 4.947,00        | BB            | 9.437,00  | Fkearsipan       |
|             |   | Capaian SKM Perangkat Daerah                                       | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 118,00          | B          | 79              | B          | 87,00           | B             | 165,00    |                  |
|             |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran               | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%  | Persen | 100             | 1.339,33        | 100        | 1.785,00        | 100        | 1.964,00        | 100           | 3.749,00  | Fkearsipan       |
| 2           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                        | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan Hasil Quality assurance (QA) yg dikeluarkan BPKP                                    | Persen | 80,00           | 2.763,00        | 90,00      | 1.859 ,00       | 100        | 2.045 ,00       | 100           | 3.904,00  | INSPEKTORAT      |
| 3           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   |  |   |        |                 | 746,00          |            | 770,00          |            | 847,00          |               | 1.617,00  | INSPEKTORAT      |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|------------------|---|--|---|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|                  |   |  |   |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|                  |   |  |   |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
|                  |   | Tingkat Maturitis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                | (tingkat maturitas SPIP(belum dinilai(0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil quality assurance (QA) yg dikeluarkan oleh BPKP | Level  | 3               | 346,00          | 3          | 330,00          | 3          | 400,00          | 3             | 800,00     | INSPEKTORAT      |
|                  |   | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                         | Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan Hasil Quality assurance (QA) yg dikeluarkan BPKP      | Level  | 3               | 400,00          | 3          | 440,00          | 3          | 447,00          | 3             | 817,00     | INSPEKTORAT      |
| SEKRETARIAT DPRD |   |  |   |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                  |
| 1                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |        |                 | 85.129,00       |            | 106.991,00      |            | 117.690,00      |               | 140.714,00 | Setwan           |
|                  |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai  | BB              | 28.376,33       | BB         | 35.663,66       | BB         | 39.230,00       | BB            | 46.904,66  | Setwan           |
|                  |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah  | Nilai  | B               | 28.376,33       | B          | 35.663,66       | B          | 39.230,00       | B             | 46.904,66  | Setwan           |
|                  |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                       | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%  | Persen | 100             | 28.376,34       | 100        | 35.663,67       | 100        | 39.230,00       | 100           | 46.904,67  | Setwan           |
| 2                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        |  |   |        |                 | 16.776,00       |            | 18.454,00       |            | 20.299,00       |               | 38.753,00  | Setwan           |
|                  |   | Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD              | jumlah fasilitasi dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD/fungsi legislasi dewan X 100 %   | persen | 100             | 8.388,00        | 100        | 9.227 ,00       | 100        | 10.149,50       | 100           | 19.376,50  | Setwan           |
|                  |   | Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan | Jumlah fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan/Fungsi penganggaran dan pengawasan x 100 %           | Persen | 100             | 8.388,00        | 100        | 9.227,00        | 100        | 10.149,50       | 100           | 19.376,50  | Setwan           |



| NO                          | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------------------|--|--|--|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|                             |  |  |  |          | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                  |
|                             |  |  |  |          | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                  |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM     |  |  |  |          |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                  |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |          |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                  |
| 1                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH   |  |  |          |                 | 2.283,00        |            | 2.500,00        |            | 2.800,00        |               | 3.100,00   | KESBANGPOL       |
|                             |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai    | BB              | 700,00          | BB         | 800,00          | BB         | 900,00          | BB            | 1.000,00   | KESBANGPOL       |
|                             |  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai    | B               | 700,00          | B          | 800,00          | B          | 900,00          | B             | 1.000,00   | KESBANGPOL       |
|                             |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                               | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100% | Persen   | 100             | 883,00          | 100        | 900,00          | 100        | 1.000,00        | 100           | 1.100,00   | KESBANGPOL       |
| 2                           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan                      | Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan                      | Kegiatan | 5               | 103,00          | 5          | 75v             | 8          | 110             | 8             | 110,00     | KESBANGPOL       |
| 3                           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri                                  | Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri                                  | Persen   | 100.00          | 2.198 ,00       | 100.00     | 1.196,00        | 100.00     | 2.20,00 6       | 100.00        | 2.206,00   | KESBANGPOL       |
| 4                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persen   | 100.00          | 153,000         | 100.00     | 150,000         | 100.00     | 152,960         | 100.00        | 152.960,00 | KESBANGPOL       |



| NO                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |            | PERANGKAT DAERAH   |
|--------------------|--|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|
|                    |  |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU       |                    |
|                    |  |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |            |                    |
| 5                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                    | Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                    | Persen | 100.00          | 45.000          | 100.00     | 45.000          | 100        | 106.500         | 100           | 106.500,00 | KESBANGPOL         |
| 6                  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Persen | 100             | 107.000         | 100        | 45.000          | 100        | 106.500         | 100           | 106.500,00 | KESBANGPOL         |
| KECAMATAN          |  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                    |
| KECAMATAN ARGAPURA |  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |            |                    |
| 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |  |        |                 | 1.434,00        |            | 1.505 ,00       |            | 1.655 ,00       |               | 3.160,00   | KECAMATAN ARGAPURA |
|                    |  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 834,00          | BB         | 1.128,00        | BB         | 1.241 ,00       | BB            | 2.368,00   | KECAMATAN ARGAPURA |
|                    |  | Capaian IKM Perangkat Daerah   | Nilai IKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14,00           | B          | 15 ,00          | B          | 17 ,00          | B             | 32,00      | KECAMATAN ARGAPURA |
|                    |  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                     | Persen | 100             | 600,00          | 100        | 362,00          | 100        | 398 ,00         | 100           | 760,00     | KECAMATAN ARGAPURA |
| 2                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan                             | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan               | Persen | 100             | 28,00           | 100        | 96,00           | 100        | 106,00          | 100           | 202,00     | KECAMATAN ARGAPURA |
| 3                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN   | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan   | Persen | 100             | 29,00           | 100        | 71,00           | 100        | 100,00          | 100           | 145,00     | KECAMATAN ARGAPURA |



| NO                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH   |
|--------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|
|                    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                    |
|                    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                    |
|                    | MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                             |  | ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                    |
| 4                  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 8,00            | 100        | 39,00           | 100        | 43,00           | 100           | 82,00    | KECAMATAN ARGAPURA |
| 5                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Peningkatan Wawasan kebangsaan   | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 20,00           | 100        | 55,00           | 100        | 61 ,00          | 100           | 116,00   | KECAMATAN ARGAPURA |
| 6                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 10,00           | 192,00          | 10,00      | 75 ,00          | 10,00      | 83,00           | 10,00         | 158,00   | KECAMATAN ARGAPURA |
| KECAMATAN BANJARAN |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                    |
| 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.478,00        |            | ,00<br>1.616    |            | 1.779 ,00       |               | 3.395,00 | KECAMATAN BANJARAN |
|                    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 868 ,00         | BB         | 1.208 ,00       | BB         | 1.330 ,00       | BB            | 2.538,00 | KECAMATAN BANJARAN |
|                    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 10,00           | B          | 10 ,00          | B          | 11,00           | B             | 21,00    | KECAMATAN BANJARAN |
|                    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 600,00          | 100        | 398 ,00         | 100        | 438,00          | 100           | 836,00   | KECAMATAN BANJARAN |
| 2                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 53,00           | 100        | 58,00           | 100        | 64,00           | 100           | 122,00   | KECAMATAN BANJARAN |



| NO                   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|----------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|                      |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|                      |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
| 3                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 53,00           | 100        | 55,00           | 100        | 61,00           | 100           | 116,00   | KECAMATAN BANJARAN   |
| 4                    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 12,00           | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN BANJARAN   |
| 5                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 70,00           | 100        | 80,00           | 100        | 88,00           | 100           | 168 ,00  | KECAMATAN BANJARAN   |
| 6                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 291,00          | 10         | 85,00           | 10         | 94,00           | 20            | 179,00   | KECAMATAN BANJARAN   |
| KECAMATAN BANTARUJEG |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 1                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.382,00        |            | 1.590 ,00       |            | 1.750 ,00       |               | 3.340,00 | KECAMATAN BANTARUJEG |
|                      |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 970,00          | BB         | 1.132,00        | BB         | 1.245,00        | BB            | 2.377,00 | KECAMATAN BANTARUJEG |
|                      |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 12,00           | B          | 15,00           | B          | 17,00           | B             | 32,00    | KECAMATAN BANTARUJEG |
|                      |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 600,00          | 100        | 443,00          | 100        | 488,00          | 100           | 931,00   | KECAMATAN BANTARUJEG |
| 2                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 61,00           | 100        | 66,00           | 100        | 73,00           | 100           | 139,00   | KECAMATAN BANTARUJEG |



| NO                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|--------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|                    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|                    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
|                    | DAN PELAYANAN PUBLIK                                      |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 3                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 86,00           | 100        | 85,00           | 100        | 94,00           | 100           | 179,00   | KECAMATAN BANTARUJEG |
| 4                  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 19,00           | 100        | 31,00           | 100        | 34,00           | 100           | 65,00    | KECAMATAN BANTARUJEG |
| 5                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 24,00           | 100        | 70,00           | 100        | 77,00           | 100           | 147,00   | KECAMATAN BANTARUJEG |
| 6                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 238,00          | 10         | 83,00           | 10         | 182,00          | 20            | 265,00   | KECAMATAN BANTARUJEG |
| KECAMATAN CIGASONG |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 3.044,00        |            | 2.606 ,00       |            | 2.868 ,00       |               | 5.474,00 | KECAMATAN CIGASONG   |
|                    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 2.344,00        | BB         | 2.233,00        | BB         | 2.458,00        | BB            | 4.690,00 | KECAMATAN CIGASONG   |
|                    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14,00           | B          | 15,00           | B          | 17,00           | B             | 32,00    | KECAMATAN CIGASONG   |
|                    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 700,00          | 100        | 358,00          | 100        | 394,00          | 100           | 752,00   | KECAMATAN CIGASONG   |



| NO                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH   |
|--------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|
|                    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                    |
|                    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                    |
| 2                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 28,00           | 100        | 56,00           | 100        | 62,00           | 100           | 118,00   | KECAMATAN CIGASONG |
| 3                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 2.058,00        | 100        | 3.985,00        | 100        | 4.383,00        | 100           | 8.368,00 | KECAMATAN CIGASONG |
| 4                  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 11,00           | 100        | 18,00           | 100        | 20,00           | 100           | 38,00    | KECAMATAN CIGASONG |
| 5                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 53,00           | 100        | 60 ,00          | 100        | 66,00           | 100           | 126,00   | KECAMATAN CIGASONG |
| 6                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 49,00           | 100        | 41,00           | 100        | 96,00           | 100           | 137,00   | KECAMATAN CIGASONG |
| KECAMATAN CIKIJING |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                    |
| 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.577,00        |            | 1.631 ,00       |            | 1.794,00        |               | 1.973,00 | KECAMATAN CIKIJING |
|                    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 867,00          | BB         | 1.322,00        | BB         | 1.454,00        | BB            | 1.600,00 | KECAMATAN CIKIJING |
|                    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 17,00           | B          | 12,00           | B          | 13,00           | B             | 15,00    | KECAMATAN CIKIJING |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH    |
|---------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
|                     |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                     |
|                     |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                     |
|                     |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 700,00          | 100        | 297,00          | 100        | 326,00          | 100           | 359,00   | KECAMATAN CIKIJING  |
| 2                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 45,00           | 100        | 90,00           | 100        | 99,00           | 100           | 189,00   | KECAMATAN CIKIJING  |
| 3                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 11,00           | 100        | 90,00           | 100        | 99,00           | 100           | 63,00    | KECAMATAN CIKIJING  |
| 4                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 8,00            | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN CIKIJING  |
| 5                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 100,00          | 100        | 160,00          | 100        | 176,00          | 100           | 336,00   | KECAMATAN CIKIJING  |
| 6                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 241,00          | 100        | 130,00          | 100        | 143,00          | 100           | 273,00   | KECAMATAN CIKIJING  |
| KECAMATAN CINGAMBUL |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                     |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.542,00        |            | 1.353,00        |            | 1.488,00        |               | 3.081,00 | KECAMATAN CINGAMBUL |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH    |
|------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                     |
|                  |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                     |
|                  |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 830,00          | BB         | 1.010,00        | BB         | 1.111,00        | BB            | 2.377,00 | KECAMATAN CINGAMBUL |
|                  |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 12,00           | B          | 20,00           | B          | 22,00           | B             | 21,00    | KECAMATAN CINGAMBUL |
|                  |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 700,00          | 100        | 323,00          | 100        | 355,00          | 100           | 682,00   | KECAMATAN CINGAMBUL |
| 2                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 35,00           | 100        | 70,00           | 100        | 77,00           | 100           | 147,00   | KECAMATAN CINGAMBUL |
| 3                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 44,00           | 100        | 100,00          | 100        | 110,00          | 100           | 210,00   | KECAMATAN CINGAMBUL |
| 4                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 8,00            | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN CINGAMBUL |
| 5                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 17,00           | 100        | 160,00          | 100        | 176,00          | 100           | 336,00   | KECAMATAN CINGAMBUL |
| 6                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 122,00          | 10         | 105,00          | 10         | 206,00          | 20            | 311,00   | KECAMATAN CINGAMBUL |
| KECAMATAN DAWUAN |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                     |
| 1                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH                       |  |  |        |                 | 1.357,00        |            | 1.197 ,00       |            | 1.132 ,00       |               | 2.329,00 | KECAMATAN DAWUAN    |



| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH    |
|---------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
|                     |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                     |
|                     |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                     |
|                     | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                     |
|                     |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 800,00          | BB         | 1.197,00        | BB         | 1.132,00        | BB            | 2.329,00 | KECAMATAN DAWUAN    |
|                     |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 17,00           | B          | 20 ,00          | B          | 22 ,00          | B             | 42,00    | KECAMATAN DAWUAN    |
|                     |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                       | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                               | persen | 100             | 540,00          | 100        | 301,00          | 100        | 33,00 1         | 100           | 632,00   | KECAMATAN DAWUAN    |
| 2                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan                         | Persen | 100             | 65,00           | 100        | 68 ,00          | 100        | 75,00           | 100           | 143,00   | KECAMATAN DAWUAN    |
| 3                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                      | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan                         | Persen | 100             | 15,00           | 100        | 70 ,00          | 100        | 77 ,00          | 100           | 147,00   | KECAMATAN DAWUAN    |
| 4                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                  | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan | Persen | 100             | 10,00           | 100        | 120 ,00         | 100        | 132,00          | 100           | 252 ,00  | KECAMATAN DAWUAN    |
| 5                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                      | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan                                | Persen | 100             | 110,00          | 10         | 105 ,00         | 10         | 291 ,00         | 20            | 396,00   | KECAMATAN DAWUAN    |
| KECAMATAN JATITUJUH |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                     |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.664,00        |            | 1.912 ,00       |            | 2.103,00        |               | 4.016,00 | KECAMATAN JATITUJUH |
|                     |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 850             | BB         | 1.532           | BB         | 1.685           | BB            | 3.217,00 | KECAMATAN JATITUJUH |



| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH    |
|---------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
|                     |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                     |
|                     |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                     |
|                     |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14,00           | B          | 13,00           | B          | 15,00           | B             | 28,00    | KECAMATAN JATITUJUH |
|                     |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 800,00          | 100        | 367,00          | 100        | 404,00          | 100           | 771,00   | KECAMATAN JATITUJUH |
| 2                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 85,00           | 100        | 87,00           | 100        | 96,00           | 100           | 183,00   | KECAMATAN JATITUJUH |
| 3                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Jumlah potensi unggulan kecamatan  | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 20,00           | 100        | 81,00           | 100        | 89,00           | 100           | 171,00   | KECAMATAN JATITUJUH |
| 4                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 11,00           | 100        | 44,00           | 100        | 48,00           | 100           | 92,00    | KECAMATAN JATITUJUH |
| 5                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 2,00            | 100        | 70,00           | 100        | 77,00           | 100           | 147,00   | KECAMATAN JATITUJUH |
| 6                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 102,00          | 10         | 158,00          | 12         | 174,00          | 22            | 332,00   | KECAMATAN JATITUJUH |
| KECAMATAN JATIWANGI |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                     |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.774,00        |            | 1.980,00        |            | 2.178,00        |               | 4.158,00 | KECAMATAN JATIWANGI |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH    |
|---------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------|
|                     |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                     |
|                     |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                     |
|                     |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 960,00          | BB         | 1.532,00        | BB         | 1.685,00        | BB            | 3.217,00  | KECAMATAN JATIWANGI |
|                     |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14,00           | B          | 20,00           | B          | 22,00           | B             | 42,00     | KECAMATAN JATIWANGI |
|                     |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 800,00          | 100        | 428,00          | 100        | 471,00          | 100           | 900,00    | KECAMATAN JATIWANGI |
| 2                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 15,00           | 100        | 78,00           | 100        | 86,00           | 100           | 139,00    | KECAMATAN JATIWANGI |
| 3                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 20,00           | 100        | 83,00           | 100        | 91,00           | 100           | 174,00    | KECAMATAN JATIWANGI |
| 4                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 12,00           | 100        | 54,00           | 100        | 59,00           | 100           | 113,00    | KECAMATAN JATIWANGI |
| 5                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 70,00           | 100        | 80,00           | 100        | 88,00           | 100           | 168,00    | KECAMATAN JATIWANGI |
| 6                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 95,00           | 10         | 104,00          | 10         | 289,00          | 20            | 393,00    | KECAMATAN JATIWANGI |
| KECAMATAN KADIPATEN |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                     |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH                       |  |  |        |                 | 1.467,00        |            | 1.709 ,00       |            | 1.887,00        |               | 3.602 ,00 | KECAMATAN KADIPATEN |



| NO                   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|----------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|                      |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|                      |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
|                      | DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
|                      |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 850,00          | BB         | 1.220,00        | BB         | 1.349,00        | BB            | 2.575,00 | KECAMATAN KADIPATEN  |
|                      |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 17,00           | B          | 15,00           | B          | 17,00           | B             | 32,00    | KECAMATAN KADIPATEN  |
|                      |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian  | Persen | 100             | 600,00          | 100        | 474,00          | 100        | 521,00          | 100           | 995,00   | KECAMATAN KADIPATEN  |
| 2                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 14,00           | 100        | 40,00           | 100        | 58,00           | 100           | 111,00   | KECAMATAN KADIPATEN  |
| 3                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 12,00           | 100        | 15,00           | 100        | 17,00           | 100           | 32,00    | KECAMATAN KADIPATEN  |
| 4                    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 5,00            | 100        | 11,00           | 100        | 12,00           | 100           | 23,00    | KECAMATAN KADIPATEN  |
| 5                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 7,00            | 100        | 55,00           | 100        | 61,00           | 100           | 116,00   | KECAMATAN KADIPATEN  |
| 6                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 36,00           | 10,00      | 55,00           | 10,00      | 181,00          | 20,00         | 236,00   | KECAMATAN KADIPATEN  |
| KECAMATAN KASOKANDEL |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 1                    | PROGRAM PENUNJANG   |  |  |        |                 | 1.355           |            | 1.635           |            | 1.798,50        |               | 3.434,00 | KECAMATAN KASOKANDEL |



| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|---------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|                     |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|                     |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
|                     | URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
|                     |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 740,00          | BB         | 1.232,00        | BB         | 1.355,00        | BB            | 2.587,00 | KECAMATAN KASOKANDEL |
|                     |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 15,00           | B          | 15,00           | B          | 17,00           | B             | 32,00    | KECAMATAN KASOKANDEL |
|                     |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 600,00          | 100        | 388,00          | 100        | 427,00          | 100           | 815,00   | KECAMATAN KASOKANDEL |
| 2                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 53,00           | 100        | 65,00           | 100        | 72,00           | 100           | 137,00   | KECAMATAN KASOKANDEL |
| 3                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 31,00           | 100        | 50,00           | 100        | 55,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN KASOKANDEL |
| 4                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 17,00           | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN KASOKANDEL |
| 5                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 24,00           | 100        | 100,00          | 100        | 110,00          | 100           | 210,00   | KECAMATAN KASOKANDEL |
| 6                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 202,00          | 10,00      | 85,00           | 10,00      | 94,00           | 20,00         | 179,00   | KECAMATAN KASOKANDEL |
| KECAMATAN KERTAJATI |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH    |
|----|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
|    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                     |
|    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                     |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.721,00        |            | 2.006,00        |            | 2.208,00        |               | 4.214,00 | KECAMATAN KERTAJATI |
|    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 900,00          | BB         | 1.453,00        | BB         | 1.600,00        | BB            | 3.053,00 | KECAMATAN KERTAJATI |
|    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 21,00           | B          | 75,00           | B          | 83,00           | B             | 158,00   | KECAMATAN KERTAJATI |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 800,00          | 100        | 478,00          | 100        | 526,00          | 100           | 1.003,00 | KECAMATAN KERTAJATI |
| 2  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 71,00           | 100        | 135,00          | 100        | 149,00          | 100           | 284,00   | KECAMATAN KERTAJATI |
| 3  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 71,00           | 100        | 70,00           | 100        | 77,00           | 100           | 147,00   | KECAMATAN KERTAJATI |
| 4  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 17,00           | 100        | 50,00           | 100        | 55,00           | 100           | 105,00   | KECAMATAN KERTAJATI |
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 39,00           | 100        | 100,00          | 100        | 110,00          | 100           | 210,00   | KECAMATAN KERTAJATI |
| 6  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 140,00          | 10,00      | 135,00          | 10,00      | 219,00          | 10,00         | 354,00   | KECAMATAN KERTAJATI |



| NO                   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|----------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|                      |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|                      |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
| KECAMATAN LEMAHSUGIH |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 1                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.041,00        |            | 1.300,00        |            | 1.430,00        |               | 2.730,00 | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
|                      |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 620,00          | BB         | 882,00          | BB         | 970,00          | BB            | 1.852,00 | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
|                      |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 21,00           | B          | 20,00           | B          | 22,00           | B             | 42,00    | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
|                      |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 400,00          | 100        | 398,00          | 100        | 438,00          | 100           | 836,00   | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
| 2                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 179,00          | 100        | 114,00          | 100        | 125,00          | 100           | 239,00   | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
| 3                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 68,00           | 100        | 80,00           | 100        | 88,00           | 100           | 168,00   | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
| 4                    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 28,00           | 100        | 44,00           | 100        | 48,00           | 100           | 92,00    | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
| 5                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 50,00           | 100        | 140,00          | 100        | 154,00          | 100           | 294,00   | KECAMATAN LEMAHSUGIH |
| 6                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN                          | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 235,00          | 10,00      | 110,00          | 10,00      | 156,00          | 20,00         | 266,00   | KECAMATAN LEMAHSUGIH |



| NO                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH       |
|------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|
|                        |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                        |
|                        |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                        |
|                        | PEMERINTAHAN DESA   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                        |
| KECAMATAN LEUWIMUNDING |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                        |
| 1                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.657,00        |            | 1.634,00        |            | 1.797,18        |               | 3.430,98 | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
|                        |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 940,00          | BB         | 1.228,00        | BB         | 1.351,00        | BB            | 2.579,00 | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
|                        |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 17,00           | B          | 20,00           | B          | 22,00           | B             | 42,00    | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
|                        |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 700,00          | 100        | 386,00          | 100        | 424,00          | 100           | 810,00   | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
| 2                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 21,00           | 100        | 68,00           | 100        | 75,00           | 100           | 143,00   | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
| 3                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 27,00           | 100        | 40,00           | 100        | 44,00           | 100           | 84,00    | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
| 4                      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 3,00            | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
| 5                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 8,00            | 100        | 115,00          | 100        | 127,00          | 100           | 242,00   | KECAMATAN LEUWIMUNDING |



| NO               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH       |
|------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|
|                  |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                        |
|                  |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                        |
| 6                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 200,00          | 10,00      | 75,00           | 10,00      | 143,00          | 20,00         | 218,00   | KECAMATAN LEUWIMUNDING |
| KECAMATAN LIGUNG |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                        |
| 1                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.699,00        |            | 2.131,00        |            | 2.344,00        |               | 4.475,00 | KECAMATAN LIGUNG       |
|                  |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 980,00          | BB         | 1.563,00        | BB         | 1.719,00        | BB            | 3.282,00 | KECAMATAN LIGUNG       |
|                  |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 19,00           | B          | 20,00           | B          | 22,00           | B             | 42,00    | KECAMATAN LIGUNG       |
|                  |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 700,00          | 100        | 548,00          | 100        | 603,00          | 100           | 1.151,00 | KECAMATAN LIGUNG       |
| 2                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 97,00           | 100        | 140,00          | 100        | 154,00          | 100           | 294,00   | KECAMATAN LIGUNG       |
| 3                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 29,00           | 100        | 35,00           | 100        | 39,00           | 100           | 74,00    | KECAMATAN LIGUNG       |
| 4                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 27,00           | 100        | 34,00           | 100        | 37,00           | 100           | 71,00    | KECAMATAN LIGUNG       |
| 5                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN               | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 21,00           | 100        | 50,00           | 100        | 55,00           | 100           | 105,00   | KECAMATAN LIGUNG       |



| NO             | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
|                | UMUM  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 6              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 21,00           | 10,00      | 78,00           | 10,00      | 206,00          | 20,00         | 284,00   | KECAMATAN LIGUNG |
| KECAMATAN MAJA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.494,00        |            | 1.467 ,00       |            | 1.613,60        |               | 3.081,00 | KECAMATAN MAJA   |
|                |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 900,00          | BB         | 1.132 ,00       | BB         | 1.245,00        | BB            | 2.377,00 | KECAMATAN MAJA   |
|                |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14,00           | B          | 10 ,00          | B          | 11 ,00          | B             | 21,00    | KECAMATAN MAJA   |
|                |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 500,00          | 100        | 325 ,00         | 100        | 357,00          | 100           | 682,00   | KECAMATAN MAJA   |
| 2              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 15,00           | 100        | 72 ,00          | 100        | 79,00           | 100           | 151,00   | KECAMATAN MAJA   |
| 3              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 8,00            | 100        | 55 ,00          | 100        | 61,00           | 100           | 63,00    | KECAMATAN MAJA   |
| 4              | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 3,00            | 100        | 25 ,00          | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN MAJA   |



| NO                   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |           | PERANGKAT DAERAH     |
|----------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------|----------------------|
|                      |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU      |                      |
|                      |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |           |                      |
| 5                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan | Persen | 100             | 5,00            | 100        | 58,00           | 100        | 64,00           | 100           | 122,00    | KECAMATAN MAJA       |
| 6                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan                                | Persen | 100             | 192,00          | 100        | 85 ,00          | 100        | 129 ,00         | 100           | 214 ,00   | KECAMATAN MAJA       |
| KECAMATAN MAJALENGKA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |           |                      |
| 1                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 7.374,00        |            | 7.334 ,00       |            | 8.070 ,00       |               | 15.404,00 | KECAMATAN MAJALENGKA |
|                      |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 5.360 ,00       | BB         | 5.807 ,00       | BB         | 6.390 ,00       | BB            | 12.198,00 | KECAMATAN MAJALENGKA |
|                      |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14 ,00          | B          | 15 ,00          | B          | 17,00           | B             | 32,00     | KECAMATAN MAJALENGKA |
|                      |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                               | Persen | 100             | 2.000,00        | 100        | 1.512 ,00       | 100        | 1.663,00        | 100           | 3.174,00  | KECAMATAN MAJALENGKA |
| 2                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan                         | Persen | 100             | 169,00          | 100        | 220,00          | 100        | 242 ,00         | 100           | 462,00    | KECAMATAN MAJALENGKA |
| 3                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan                         | Persen | 100             | 8.513,00        | 100        | 13.686 ,00      | 100        | 15.055 ,00      | 100           | 28.741,00 | KECAMATAN MAJALENGKA |
| 4                    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan           | Persen | 100             | 31,00           | 100        | 35,00           | 100        | 39 ,00          | 100           | 74,00     | KECAMATAN MAJALENGKA |



| NO                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|--------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|                    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|                    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
|                    |   |  | pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 5                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                  | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan | Persen | 100             | 99,00           | 100        | 210,00          | 100        | 231 ,00         | 100           | 441,00   | KECAMATAN MAJALENGKA |
| 6                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                      | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan                                | Persen | 100             | 118,00          | 10,00      | 125,00          | 10,00      | 198 ,00         | 20,00         | 323,00   | KECAMATAN MAJALENGKA |
| KECAMATAN MALAUSMA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                      |
| 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.195,00        |            | 1.377 ,00       |            | 1.516,00        |               | 2.893,00 | KECAMATAN MALAUSMA   |
|                    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              |                 | BB         | 896 ,00         | BB         | 987,00          | BB            | 1.883,00 | KECAMATAN MALAUSMA   |
|                    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               |                 | B          | 20 ,00          | B          | 22 ,00          | B             | 42,00    | KECAMATAN MALAUSMA   |
|                    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                       | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%                               | Persen | 100             |                 | 100        | 461 ,00         | 100        | 507,00          | 100           | 967,00   | KECAMATAN MALAUSMA   |
| 2                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan                         | Persen | 100             | 55,00           | 100        | 68 ,00          | 100        | 95,00           | 100           | 163,00   | KECAMATAN MALAUSMA   |
| 3                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                      | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan                         | Persen | 100             | 4,00            | 100        | 40 ,00          | 100        | 44,00           | 100           | 84,00    | KECAMATAN MALAUSMA   |



| NO                       | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH   |
|--------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|
|                          |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                    |
|                          |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                    |
| 4                        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 5,00            | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN MALAUSMA |
| 5                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 39,00           | 100        | 100 ,00         | 100        | 110 ,00         | 100           | 210,00   | KECAMATAN MALAUSMA |
| 6                        | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 204,00          | 100        | 85,00           | 52,00      | 164 ,00         | 100           | 249,00   | KECAMATAN MALAUSMA |
| <b>KECAMATAN PALASAH</b> |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                    |
| 1                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.444,00        |            | 1.592,00        |            | 1.751,00        |               |          | KECAMATAN PALASAH  |
|                          |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 930,00          | BB         | 1.147,00        | BB         | 1.262,00        | BB            | 2.409,00 | KECAMATAN PALASAH  |
|                          |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 14,00           | B          | 18,00           | B          | 20,00           | B             | 38,00    | KECAMATAN PALASAH  |
|                          |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 500,00          | 100        | 427,00          | 100        | 470,00          | 100           | 897,00   | KECAMATAN PALASAH  |
| 2                        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 36,00           | 100        | 54,00           | 100        | 59,00           | 100           | 113,00   | KECAMATAN PALASAH  |



| NO                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH       |
|------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|
|                        |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                        |
|                        |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                        |
| 3                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 18,00           | 100        | 55,00           | 100        | 61,00           | 100           | 116,00   | KECAMATAN PALASAH      |
| 4                      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 25,00           | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN PALASAH      |
| 5                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 4,00            | 100        | 70,00           | 100        | 77,00           | 100           | 147,00   | KECAMATAN PALASAH      |
| 6                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 135,00          | 100        | 95,00           | 100        | 140,00          | 100           | 235,00   | KECAMATAN PALASAH      |
| KECAMATAN PANYINGKIRAN |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                        |
| 1                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.222,00        |            | 1.419 ,00       |            | 1.561,00        |               |          | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
|                        |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 710,00          | BB         | 1.032,00        | BB         | 1.135,00        | BB            | 2.167,00 | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
|                        |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 12,00           | B          | 10,00           | B          | 11,00           | B             | 21,00    | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
|                        |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 500,00          | 100        | 377,00          | 100        | 415,00          | 100           | 792,00   | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
| 2                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                      | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 31,00           | 100        | 54,00           | 100        | 59,00           | 100           | 113,00   | KECAMATAN PANYINGKIRAN |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH     | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH       |
|---------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|
|                     |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                        |
|                     |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                        |
|                     | DAN PELAYANAN PUBLIK  |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                        |
| 3                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 13,00           | 100        | 40,00           | 100        | 44,00           | 100           | 84,00    | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
| 4                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 7,00            | 100        | 20,00           | 100        | 22,00           | 100           | 42,00    | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
| 5                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 9,00            | 100        | 58,00           | 100        | 64,00           | 100           | 122,00   | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
| 6                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 202,00          | 10,00      | 50,00           | 10,00      | 145,00          | 20,00         | 195,00   | KECAMATAN PANYINGKIRAN |
| KECAMATAN RAJAGALUH |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                        |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.689,00        |            | 1.824,00        |            | 2.007,00        |               | 3.831,00 | KECAMATAN RAJAGALUH    |
|                     |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 970,00          | BB         | 1.430,00        | BB,        | 1.430,00        | BB            | 3.003,00 | KECAMATAN RAJAGALUH    |
|                     |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 19,00           | B          | 75,00           | B          | 75,00           | B             | 1.575,00 | KECAMATAN RAJAGALUH    |



| NO                | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH    |
|-------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                     |
|                   |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                     |
|                   |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 700,00          | 100        | 386,00          | 100        | 386,00          | 100           | 811,86   | KECAMATAN RAJAGALUH |
| 2                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 34,00           | 100        | 65,00           | 100        | 72,00           | 100           | 137,00   | KECAMATAN RAJAGALUH |
| 3                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 23,00           | 100        | 40,00           | 100        | 44,00           | 100           | 84,00    | KECAMATAN RAJAGALUH |
| 4                 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 5,00            | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN RAJAGALUH |
| 5                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 23,00           | 100        | 90,00           | 100        | 99,00           | 100           | 189,00   | KECAMATAN RAJAGALUH |
| 6                 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 150,00          | 10,00      | 110,00          | 10,00      | 211,00          | 20,00         | 321,00   | KECAMATAN RAJAGALUH |
| KECAMATAN SINDANG |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                     |
| 1                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.337,00        |            | 1.467,00        |            | 1.614,00        |               | 3.081,00 | KECAMATAN SINDANG   |
|                   |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 820,00          | BB         | 1.132,00        | BB         | 1.245,00        | BB            | 2.377,00 | KECAMATAN SINDANG   |
|                   |   | Capaian SKM Perangkat Daerah (B)   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 17,00           | B          | 10,00           | B          | 11,00           | B             | 21,00    | KECAMATAN SINDANG   |



| NO                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH         |
|------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|
|                        |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                          |
|                        |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                          |
|                        |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 500,00          | 100        | 325,00          | 100        | 357,00          | 100           | 682,00   | KECAMATAN SINDANG        |
| 2                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 11,00           | 100        | 54,00           | 100        | 59,00           | 100           | 113,00   | KECAMATAN SINDANG        |
| 3                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 13,00           | 100        | 55,00           | 100        | 61,00           | 100           | 63,00    | KECAMATAN SINDANG        |
| 4                      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 3,00            | 100        | 25,00           | 100        | 28,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN SINDANG        |
| 5                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 11,00           | 100        | 58,00           | 100        | 64,00           | 100           | 122,00   | KECAMATAN SINDANG        |
| 6                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 85,00           | 100        | 85,00           | 100        | 129,00          | 100           | 214,00   | KECAMATAN SINDANG        |
| KECAMATAN SINDANGWANGI |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                          |
| 1                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.197,00        |            | 1.453,00        |            | 1.453,00        |               | 2.906,00 | KECAMATAN SINDANGWANGI I |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO                 | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH        |
|--------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|-------------------------|
|                    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                         |
|                    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                         |
|                    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 680,00          | BB         | 1.132,00        | BB         | 1.132v          | BB            | 2.264,00 | KECAMATAN SINDANGWANG I |
|                    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 17,00           | B          | 8,00            | B          | 9,00            | B             | 17,00    | KECAMATAN SINDANGWANG I |
|                    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 500,00          | 100        | 312,00          | 100        | 312,00          | 100           | 625,00   | KECAMATAN SINDANGWANG I |
| 2                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 36,00           | 100        | 68,00           | 100        | 68,00           | 100           | 136,00   | KECAMATAN SINDANGWANG I |
| 3                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 41,00           | 100        | 55,00           | 100        | 55v             | 100           | 110,00   | KECAMATAN SINDANGWANG I |
| 4                  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 13,00           | 100        | 35,00           | 100        | 35v             | 100           | 70,00    | KECAMATAN SINDANGWANG I |
| 5                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 33,00           | 100        | 100,00          | 100        | 100v            | 100           | 200,00   | KECAMATAN SINDANGWANG I |
| 6                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 194,00          | 10,00      | 85,00           | 10,00      | 155,00          | 20,00         | 240,00   | KECAMATAN SINDANGWANG I |
| KECAMATAN SUKAHAJI |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                         |



| NO                   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH   |
|----------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|
|                      |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                    |
|                      |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                    |
| 1                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.219,00        |            | 1.627,00        |            | 1.806,00        |               | 3.433,00 | KECAMATAN SUKAHAJI |
|                      |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 710,00          | BB         | 1.234,00        | BB         | 1.360,00        | BB            | 2.594,00 | KECAMATAN SUKAHAJI |
|                      |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 9,00            | B          | 10,00           | B          | 11,00           | B             | 21,00    | KECAMATAN SUKAHAJI |
|                      |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 500,00          | 100        | 383,00          | 100        | 434,00          | 100           | 817,00   | KECAMATAN SUKAHAJI |
| 2                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 32,00           | 100        | 16,00           | 100        | 18,00           | 100           | 34,00    | KECAMATAN SUKAHAJI |
| 3                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 27,00           | 100        | 40,00           | 100        | 44,00           | 100           | 84,00    | KECAMATAN SUKAHAJI |
| 4                    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 4,00            | 100        | 26,00           | 100        | 29,00           | 100           | 55,00    | KECAMATAN SUKAHAJI |
| 5                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 2,00            | 100        | 90,00           | 100        | 99,00           | 100           | 189,00   | KECAMATAN SUKAHAJI |
| 6                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 48,00           | 10,00      | 57,00           | 10,00      | 263,00          | 20,00         | 320,00   | KECAMATAN SUKAHAJI |
| KECAMATAN SUMBERJAYA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                    |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH     |
|----|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|
|    |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                      |
|    |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                      |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.422,00        |            | 1.484,00        |            | 1.632,00        |               | 3.116,00 | KECAMATAN SUMBERJAYA |
|    |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Persen | BB              | 810,00          | BB         | 1.032,00        | BB         | 1.135,00        | BB            | 2.167,00 | KECAMATAN SUMBERJAYA |
|    |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 12,00           | B          | 20              | B          | 22,00           | B             | 42,00    | KECAMATAN SUMBERJAYA |
|    |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 600,00          | 100        | 432,00          | 100        | 475,00          | 100           | 907,00   | KECAMATAN SUMBERJAYA |
| 2  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 26,00           | 100        | 71,00           | 100        | 78,00           | 100           | 149,00   | KECAMATAN SUMBERJAYA |
| 3  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 13,00           | 100        | 70,00           | 100        | 77,00           | 100           | 147,00   | KECAMATAN SUMBERJAYA |
| 4  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 4,00            | 100        | 22,00           | 100        | 24,00           | 100           | 46,00    | KECAMATAN SUMBERJAYA |
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan                                      | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan   | Persen | 100             | 15,00           | 100        | 130,00          | 100        | 143,00          | 100           | 273,00   | KECAMATAN SUMBERJAYA |
| 6  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya                          | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan  | Persen | 100             | 147,00          | 100        | 66,00           | 100        | 133,00          | 100           | 199,00   | KECAMATAN SUMBERJAYA |



Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO               | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH   | INDIKATOR  | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |          | PERANGKAT DAERAH |
|------------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
|                  |   |  |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU     |                  |
|                  |   |  |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |          |                  |
| KECAMATAN TALAGA |   |  |  |        |                 |                 |            |                 |            |                 |               |          |                  |
| 1                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |        |                 | 1.708,00        |            | 1.897,00        |            | 2.087,00        |               | 3.081,00 | KECAMATAN TALAGA |
|                  |   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | 900,00          | BB         | 1.452,00        | BB         | 1.597,00        | BB            | 2.377,00 | KECAMATAN TALAGA |
|                  |   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | 8               | B          | 15,00           | B          | 17,00           | B             | 21,00    | KECAMATAN TALAGA |
|                  |   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                           | Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%   | Persen | 100             | 800,00          | 100        | 430,00          | 100        | 473v            | 100           | 682,00   | KECAMATAN TALAGA |
| 2                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |        |                 | 23,00           |            | 100,00          |            | 110,00          |               | 113,00   | KECAMATAN TALAGA |
|                  |   | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan     | Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan   | Persen | 100             | 23,00           | 100        | 100,00          | 100        | 110,00          | 100           | 113,00   | KECAMATAN TALAGA |
| 3                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |  |  |        |                 | 45,00           |            | 50,00           |            | 55,00           |               | 116,00   | KECAMATAN TALAGA |
|                  |   | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                          | Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan   | Persen | 100             | 45,00           | 100        | 50,00           | 100        | 55,00           | 100           | 116,00   | KECAMATAN TALAGA |
| 4                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |  |  |        |                 | 22,00           |            | 30,00           |            | 33,00           |               | 53,00    | KECAMATAN TALAGA |
|                  |   | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persen | 100             | 22,00           | 100        | 30,00           | 100        | 33,00           | 100           | 53,00    | KECAMATAN TALAGA |



## Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR   | DEFINISI OPERASIONAL   | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |                 |            |                 |            |                 | KONDISI AKHIR |        | PERANGKAT DAERAH |
|----|---|---|--|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------|------------------|
|    |   |   |  |        | TAHUN 2021      |                 | TAHUN 2022 |                 | TAHUN 2023 |                 | TARGET        | PAGU   |                  |
|    |   |   |  |        | TARGET          | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) | TARGET     | PAGU (Juta Rp.) |               |        |                  |
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM        | Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan             | Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan | Persen | 100             | 45,00           | 100        | 50,00           | 100        | 55,00           | 100           | 122,00 | KECAMATAN TALAGA |
| 6  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA      | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan                                | Persen | 100             | 251,00          | 100        | 90,00           | 100        | 134,00          | 100           | 214,00 | KECAMATAN TALAGA |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

# **BAB VIII**



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

#### **PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2018–2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 8.1

## Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| NO. | INDIKATOR                               | SATUAN      | KONDISI AWAL |        | 2019   |            | 2020   |            | TARGET RPJMD |        |        | TARGET PERUBAHAN RPJMD |        |        | KONDISI AKHIR |
|-----|---|-------------|--------------|--------|--------|------------|--------|------------|--------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|---------------|
|     |   |             | 2017         | 2018   | TARGET | REAL ISASI | TARGET | REAL ISASI | 2021         | 2022   | 2023   | 2021                   | 2022   | 2023   |               |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)        | poin        | 65,92        | 66,72  | 67,19  | 67,52      | 67,34  | 67,59      | 67,95        | 68,85  | 68,84  | 67,85                  | 68,33  | 68,85  | 68,85         |
|     | Usia Harapan Hidup                      | tahun       | 69,39        | 69,68  | 69,73  | 69,97      | 70,08  | 70,27      | 70,08        | 70,22  | 70,40  | 70,22                  | 70,40  | 70,60  | 70,60         |
|     | Harapan Lama Sekolah                    | tahun       | 12,18        | 12,19  | 12,20  | 12,21      | 12,20  | 12,22      | 12,81        | 12,97  | 13,17  | 12,81                  | 12,97  | 13,17  | 13,17         |
|     | Rata-Rata Lama Sekolah                  | tahun       | 6,90         | 6,91   | 7,00   | 7,09       | 7,11   | 7,27       | 7,19         | 7,27   | 7,39   | 7,19                   | 7,27   | 7,39   | 7,39          |
|     | Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan | Ribu Rupiah | 8.833        | 9.416  | 9.421  | 9.822      | 9.120  | 9.521      | 9.443        | 9.454  | 9.547  | 9.280                  | 9.410  | 9.475  | 9.475         |
| 2.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)      | persen      | 5,02         | 4,95   | 4,89   | 4,37       | 5,90   | 5,84       | 4,68         | 4,49   | 4,19   | 5,50                   | 5,13   | 4,88   | 4,88          |
| 3   | Persentase Penduduk Miskin              | persen      | 12,60        | 10,79  | 10,48  | 10,06      | 11,89  | 11,43      | 9,68         | 9,09   | 8,48   | 11,2                   | 10,8   | 10,37  | 10,37         |
| 4.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                | persen      | 6,81         | 6,23   | 6,035  | 7,71       | 0,25   | 0,86       | 6,035        | 6,035  | 6,035  | 3,10                   | 4,50   | 5,17   | 5,17          |
| 5.  | PDRB per kapita                         | Ribu Rupiah | 14.789       | 15.740 | 16.500 | 17.883     | 17.850 | 17.953     | 18.584       | 19.698 | 21.113 | 18.262                 | 18.989 | 19.877 | 19.877        |
| 6.  | Indeks Gini                             | poin        | 0,351        | 0,350  | 0,335  | 0,335      | 0,340  | 0,336      | 0,330        | 0,328  | 0,328  | 0,339                  | 0,337  | 0,330  | 0,330         |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023



Tabel 8.2

## Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

| NO. | INDIKATOR  | SATUAN    | KONDISI AWAL |         | KONDISI 2019 |           | TAGET RPJMD |         |         |         | TARGET PERUBAHAN RPJMD |         |         |           | KONDISI AKHIR |           |
|-----|--|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|
|     |  |           | 2017         | 2018    | TARGET       | REALISASI | 2020        | 2021    | 2022    | 2023    | 2020                   | 2021    | 2022    | 2023      |               |           |
| 1   | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | persen    | N/A          | N/A     | 5,00         | 5,00      | 5,00        | 5,00    | 5,00    | 5,00    | 5,00                   | 1,00    | 2,00    | 5,00      | 5,00          | 5,00      |
| 2   | Indeks Gini  | poin      | 0,351        | 0,337   | 0,335        | 0,331     | 0,333       | 0,330   | 0,328   | 0,328   | 0,340                  | 0,339   | 0,337   | 0,330     | 0,330         | 0,330     |
| 3   | Angka Kemiskinan   | Persen    | 12,6         | 10,79   | 10,48        | 10,06     | 9,92        | 9,675   | 9,09    | 8,48    | 11,89                  | 11,20   | 10,80   | 10,37     | 10,37         | 10,37     |
| 4   | Angka Stunting   | Persen    | N/A          | N/A     | -            | 5,5       | -           | -       | -       | -       | 5,0                    | 4,5     | 4,0     | 3,5       | 3,5           | 3,5       |
| 5   | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat                      | Persen    | N/A          | 20,00   | 10,00        | 20,00     | 10,00       | 10,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00                  | 10,00   | 10,00   | 10,00     | 10,00         | 10,00     |
| 6   | Nilai SAKIP  | Nilai     | CC           | B       | BB           | BB        | BB          | A       | A       | A       | BB                     | BB      | BB      | BB        | BB            | BB        |
| 7   | Opini BPK RI   | Opini     | WTP          | WTP     | WTP          | WTP       | WTP         | WTP     | WTP     | WTP     | WTP                    | WTP     | WTP     | WTP       | WTP           | WTP       |
| 8   | IKM  | Poin      | B            | B       | B            | B         | B           | B       | B       | B       | B                      | B       | B       | B         | B             | B         |
| 9   | Indeks Profesionalitas ASN   | Poin      | 88           | 88      | 88,50        | 78        | 89          | 90      | 90      | 90      | 80                     | 60      | 84      | 85        | 85            | 85        |
| 10  | Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB  | Persen    | 0,00         | 0,00    | 30,00        | 30,00     | 40,00       | 45,00   | 45,00   | 50,00   | 30,00                  | 30,00   | -       | -         | -             | -         |
| 11  | Indeks Pengetahuan   | Poin      | 56,83        | 56,89   | 58,03        | 57,55     | 58,84       | 59,55   | 60,23   | 61,19   | 58,84                  | 59,55   | 60,23   | 61,19     | 61,19         | 61,19     |
| 12  | Indeks Kesehatan   | Poin      | 75,98        | 76,43   | 76,53        | 76,88     | 76,75       | 77,04   | 77,26   | 77,54   | 76,75                  | 77,04   | 77,26   | 77,54     | 77,54         | 77,54     |
| 13  | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak                | Persen    | 80,22        | 80,37   | 80,52        | 68,47     | 80,67       | 80,98   | 81,31   | 81,65   | 80,67                  | 69,38   | 69,75   | 70,12     | 70,12         | 70,12     |
| 14  | Nilai Tukar Petani   | Persen    | N/A          | 99,67   | 100,49       | 100,80    | 101,31      | 102,12  | 102,94  | 103,76  | 101,31                 | 102,12  | -       | -         | -             | -         |
|     | Penimngkatan Laju PDRB Sektor Pertanian                              | Persen    | N/A          | N/A     | N/A          | N/A       | N/A         | -       | -       | -       | 1,0                    | 1,0     | 1,0     | 1,0       | 1,0           | 1,0       |
| 15  | Jumlah kunjunguan wisatawan  | kunjungan | 200.000      | 589.843 | 619.335      | 701.335   | 681.269     | 749.396 | 824.335 | 906.769 | 500.000                | 525.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000     | 1.000.000 |
| 16  | Jumlah industri baru   | Unit      | N/A          | N/A     | 40           | 56        | 40          | 40      | 40      | 40      | 40                     | 40      | 40      | 40        | 40            | 200       |
|     | Laju pertumbuhan sektor industri                                     | Persen    | 13,40        | 22,42   | -            | 25,48     | -           | -       | -       | -       | -                      | -       | 5,00    | 5,00      | 5,00          | 5,00      |
| 17  | Jumlah desa tematik  | Desa      | 0            | 0       | 26           | 33        | 26          | 26      | 26      | 26      | 26                     | 17      | 18      | 18        | 18            | 59        |
| 18  | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya                    | Desa      | N/A          | 109     | 36           | 52        | 51          | 52      | 41      | 41      | 51                     | 52      | 41      | 25        | 221           | 221       |



Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  
Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

| No.       | Aspek/Fokus/<br>Bidang Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal Periode RPJMD |            | Capaian Kinerja |            | Target Kinerja |            |            |
|-----------|---|----------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|------------|
|           |   | 2017                       | 2018       | 2019            | 2020       | 2021           | 2022       | 2023       |
| <b>1)</b> | <b>Aspek kesejahteraan masyarakat</b>                                 |                            |            |                 |            |                |            |            |
| <b>A.</b> | <b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>                     |                            |            |                 |            |                |            |            |
| 1.1       | Pertumbuhan PDRB / Laju<br>Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]              | 6,81                       | 6,23       | 7,71            | 0,86       | 3,1            | 4,5        | 5,17       |
| 1.2       | PDRB per kapita ADHB  | 21.282.636                 | 23.428.964 | 25.893.210      | 26.476.394 | 26.994.210     | 27.015.580 | 28.985.310 |
| 1.3       | PDRB per kapita ADHK Tahun<br>Dasar 2010                              | 15.740.215                 | 16.682.130 | 17.883.520      | 17.953.616 | 18.262.220     | 18.989.900 | 19.877.700 |
| 1.4       | Indeks Gini   | 0,351                      | 0,350      | 0,335           | 0,336      | 0,339          | 0,337      | 0,330      |
| <b>B.</b> | <b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>                                     |                            |            |                 |            |                |            |            |
| 1.5       | Tingkat kemiskinan  | 12,60                      | 10,79      | 10,06           | 11,43      | 11,20          | 10,80      | 10,37      |
| 1.6       | Indeks Pembangunan Manusia<br>(IPM)                                   | 65,92                      | 66,72      | 67,52           | 67,59      | 67,85          | 68,33      | 68,85      |



| No        | Aspek/Fokus/<br>Bidang Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Kondisi Awal Periode RPJMD |           | Capaian Kinerja |           | Target Kinerja |           |           |
|-----------|--|----------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|           |  | 2017                       | 2018      | 2019            | 2020      | 2021           | 2022      | 2023      |
| 1.7       | Harapan Lama Sekolah   | 12,18                      | 12,19     | 12,21           | 12,22     | 12,81          | 12,97     | 13,17     |
| 1.8       | Rata lama sekolah  | 6,90                       | 6,91      | 7,09            | 7,27      | 7,19           | 7,27      | 7,39      |
| 1.9       | Usia harapan hidup   | 69,39                      | 69,68     | 69,97           | 70,27     | 70,22          | 70,40     | 70,60     |
| 1.10      | Persentase balita gizi buruk   | 0,01                       | 0,01      | 0,25            | 0,15      | 0,04           | 0,03      | 0,02      |
| 1.11      | Tingkat partisipasi angkatan kerja                                       | N/A                        | 65,76%    | 67,97%          | 69,66%    | 69,99%         | 70,17%    | 71,55%    |
| 1.12      | Tingkat pengangguran terbuka   | 5,02                       | 4,95      | 4,37            | 5,84      | 5,50           | 5,13      | 4,88      |
| 1.14      | Indeks Kepuasan Masyarakat   | B                          | B         | B               | B         | B              | B         | B         |
| 1.15      | Opini BPK  | WTP                        | WTP       | WTP             | WTP       | WTP            | WTP       | WTP       |
| 1.16      | Indeks Pembangunan Gender  | 85,43                      | 85,93     | 85,76           | 85,91     | 85,95          | 86,10     | 86,50     |
| 1.17      | Indeks Pemberdayaan Gender   | 59,15                      | 61,67     | 58,90           | 60,06     | 61             | 61.5      | 62        |
| <b>2)</b> | <b>Aspek daya saing daerah</b>   |                            |           |                 |           |                |           |           |
| <b>A.</b> | <b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>                                    |                            |           |                 |           |                |           |           |
| 2.1       | PDRB ADHB [Milliar Rp]   | 25.405,61                  | 28.098,36 | 31.202,20       | 31.905,65 | 32.898,40      | 33.879,40 | 34.779,40 |
| 2.2       | PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [Milliar Rp]                                  | 18.789,49                  | 20.006,88 | 21.550,25       | 21.789,49 | 22.006,40      | 23.700,30 | 24.990,50 |
| 2.3       | Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]                                     | 8.833,00                   | 9.416,00  | 9.822,00        | 9.521,00  | 9.280,00       | 9.410,00  | 9.475,00  |



| No        | Aspek/Fokus/<br>Bidang Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Kondisi Awal Periode RPJMD |            | Capaian Kinerja |           | Target Kinerja |           |           |
|-----------|--|----------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|           |  | 2017                       | 2018       | 2019            | 2020      | 2021           | 2022      | 2023      |
| <b>B.</b> | <b>Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur</b>                           |                            |            |                 |           |                |           |           |
| 2.4       | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                                 | 1 : 6,63                   | 1 : 6,63   | 1 : 6,35        | 1 : 6,35  | 1 : 6,35       | 1 : 6,30  | 1 : 6,30  |
| 2.5       | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum [jiwa]                 | 11.048.612                 | 10.496.181 | 9.167.040       | 2.619.360 | 4.257.200      | 6.930.460 | 8.111.350 |
| 2.6       | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun [jiwa]   | 2.227.619                  | 2.599.446  | 2.291.760       | 654.840   | 1.199.446      | 1.991.760 | 2.654.840 |
| 2.7       | Ketaatan terhadap RTRW (%)   | 83,67                      | 99,29      | 90,07           | 90        | 90             | 91        | 94        |
| 2.8       | Luas wilayah produktif (%)   | 59,5                       | 60         | 60,5            | 60        | 60             | 60        | 60,5      |
| 2.9       | Luas wilayah industri (%)  | 1,35                       | 1,4        | 1,45            | 1,37      | 1,37           | 1,4       | 1,45      |
| 2.10      | Luas wilayah banjir (Ha)   | 300                        | 300        | 300             | 600       | 400            | 400       | 350       |
| 2.11      | Luas wilayah kekeringan (%)  | -                          | -          | -               | -         | -              | -         | -         |
| 2.12      | Luas wilayah perkotaan (%)   | 40                         | 41         | 42              | 41        | 41             | 41        | 41        |
| 2.13      | Jumlah Bank [buah]   | 99                         | 101        | 102             | 105       | 105            | 106       | 106       |
| 2.14      | Jumlah restoran [Sumber : BPS]   | N/A                        | N/A        | 135             | N/A       | N/A            | N/A       | N/A       |



| No        | Aspek/Fokus/<br>Bidang Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan Daerah              | Kondisi Awal Periode RPJMD |         | Capaian Kinerja |         | Target Kinerja |         |         |
|-----------|--|----------------------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|---------|
|           |  | 2017                       | 2018    | 2019            | 2020    | 2021           | 2022    | 2023    |
| 2.15      | Jumlah penginapan/hotel<br>[Sumber : BPS]  | N/A                        | N/A     | 15              | 18      | 18             | 19      | 19      |
| 2.16      | Jumlah rumah tangga (RT)<br>yang menggunakan air bersih<br>[Rumah Tangga]          | 338.481                    | 339.851 | 367.774         | 368.626 | 368.626        | 368.774 | 368.926 |
| <b>C.</b> | <b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>  |                            |         |                 |         |                |         |         |
| 2.17      | Jumlah Kasus kriminalitas<br>yang tertangani                                       | 257                        | 223     | 234             | 180     | 190            | 200     | 200     |
| 2.18      | Jumlah Demonstrasi<br>[Kejadian]   | 12                         | 5       | 8               | 11      | 8              | 7       | 7       |
| 2.19      | Rata-Rata Lama proses<br>perijinan [hari]  | 7                          | 7       | 7               | 7       | 7              | 7       | 6       |
| 2.20      | Jumlah/jenis pajak daerah<br>[jenis]   | 11                         | 9       | 9               | 9       | 9              | 8       | 8       |
| 2.21      | Jumlah/jenis retribusi daerah<br>[jenis]   | 26                         | 23      | 20              | 18      | 20             | 21      | 21      |
| 2.22      | Jumlah Peraturan yang<br>mendukung iklim usaha<br>(Perda/Perbup terkait perijinan) | 1                          | 2       | 2               | 3       | 3              | 4       | 4       |



| No        | Aspek/Fokus/<br>Bidang Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan Daerah              | Kondisi Awal Periode RPJMD |       | Capaian Kinerja |       | Target Kinerja |       |       |
|-----------|--|----------------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------|
|           |  | 2017                       | 2018  | 2019            | 2020  | 2021           | 2022  | 2023  |
| 2.23      | Jumlah Peraturan yang mendukung iklim usaha (Perda/Perbup terkait ketenagakerjaan) | 1                          | 2     | 2               | 3     | 3              | 4     | 4     |
| <b>D.</b> | <b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>   |                            |       |                 |       |                |       |       |
| 2.24      | Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)   | 2,19                       | 2,68  | 2,54            | 2,47  | 2,58           | 2,62  | 2,80  |
| 2.25      | Rasio ketergantungan   | 41,62                      | 43,19 | 45,66           | 39,45 | 41,44          | 42,19 | 46,44 |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka



**Tabel 8.4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian**  
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat**  
**Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka Tahun 2019**

| NO.                            | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN   | KONDISI AWAL |        | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------------------|---|----------|--------------|--------|--------|-----------|------------------|
|                                |   |          | 2017         | 2018   | 2019   | 2019      |                  |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |   |          |              |        |        |           |                  |
| 1                              | Nilai Tukar Petani  | Persen   | n/a          | 99,67  | 100,49 | 101,31    | Distankan        |
| 2                              | Angka Kriminalitas yang tertangani  | Poin     | 2,15         | 1,86   | 1,93   | 1,9       | Satpol PPPK      |
| 3                              | Rasio Ketergantungan  | Persen   | n/a          | 43,19  | 45,81  | 46,72     | Disdukcapil      |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>    |   |          |              |        |        |           |                  |
| <b>1</b>                       | <b>PELAYANAN URSAN WAJIB</b>  |          |              |        |        |           |                  |
| <b>1.1.</b>                    | <b>PENDIDIKAN</b>   |          |              |        |        |           |                  |
| 1.1.1.                         | Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin  | Persen   | n/a          | 45,46  | 44,22  | 44,22     | Disdik           |
| 1.1.2.                         | APK SD/MI   | persen   | 103,9        | 104,3  | 104,6  | 104,6     | Disdik           |
| 1.1.3.                         | APK SMP/MTs   | persen   | 99,92        | 99,92  | 99,92  | 99,92     | Disdik           |
| 1.1.4.                         | APK PAUD  | persen   | 63,91        | 64,79  | 65,02  | 65,02     | Disdik           |
| 1.1.5.                         | Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C  | persen   | 24,11        | 37,43  | 37,98  | 37,98     | Disdik           |
| 1.1.6.                         | Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi   | lembaga  | 5            | 2      | 3      | 20        | Disdik           |
| 1.1.7.                         | Terpenuhinya Ruang Guru   | persen   | 97.025       | 93,49  | 93,75  | 99,75     | Disdik           |
| 1.1.8.                         | Terpenuhinya Ruang Kelas  | persen   | 82.325       | 81.715 | 83,5   | 85        | Disdik           |
| 1.1.9.                         | Terpenuhinya Ruang Laboratorium   | persen   | 31,73        | 30,84  | 32,00  | 32,00     | Disdik           |
| 1.1.10.                        | Persentase Pendidik yang memenuhi Kualifikasi S1/D4   | persen   | 92,70        | 92,86  | 93,70  | 100       | Disdik           |
| 1.1.14.                        | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pendidikan | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |
| 1.1.15.                        | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan  | Persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |
| 1.1.16.                        | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendidikan  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |
| 1.1.17.                        | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan       | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |
| 1.1.18.                        | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pendidikan   | persen   | 94,70        | 92,95  | 96,00  | 100       | Disdik           |
| 1.1.19.                        | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan                                | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |
| 1.1.20.                        | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pendidikan                             | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |
| <b>1.2.</b>                    | <b>KESEHATAN</b>  |          |              |        |        |           |                  |
| 1.2.1.                         | Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun  | unit     | 0            | 0      | 0      | 0         | Dinkes           |
| 1.2.2.                         | Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun  | unit     | 1            | 0      | 2      | 0         | Dinkes           |
| 1.2.3.                         | Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN   | keluarga | n/a          | n/a    | 74.140 | 61.760    | Dinkes           |
| 1.2.4.                         | Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar   | persen   | 75,51        | 78,65  | 80,00  | 84,38     | Dinkes           |
| 1.2.5.                         | Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda   | persen   | 27,27        | 30,30  | 39,39  | 39,39     | Dinkes           |
| 1.2.6.                         | Terpenuhinya SPM Kesehatan poin 1-5, 7  | persen   | 0,00         | 0,00   | 100    | 78,00     | Dinkes           |
| 1.2.6.                         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka   | nilai    | n/a          | 78     | 79     | 74,54     | RSUD Majalengka  |



| NO.     | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|         |   |        | 2017         | 2018  | 2019   | 2019      |                  |
| 1.2.7.  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres  | nilai  | n/a          | 72    | 74     | 78,7      | RSUD Cideres     |
| 1.2.9.  | Terpenuhinya standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar   | persen | 82,50        | 93,75 | 21,21  | 57,49     | Dinkes           |
| 1.2.9.  | Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi   | persen | 87,50        | 87,50 | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.10. | Tersedianya Regulasi Kesehatan  | persen | 3,00         | 1,00  | 2,00   | 0,00      | Dinkes           |
| 1.2.11. | Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin esensial Puskesmas   | persen | 66,12        | 45,08 | 82,50  | 82,50     | Dinkes           |
| 1.2.12. | Terpenuhinya alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar  | persen | 25,10        | 23,30 | 30,30  | 30,60     | Dinkes           |
| 1.2.13. | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan   | persen | 0,00         | -     | 15,15  | 28,12     | Dinkes           |
| 1.2.13. | Terselenggaranya SJSN dengan dengan peserta mencapai UHC  | persen | 0,00         | 41,41 | 75,04  | 71,08     | Dinkes           |
| 1.2.15. | Terselenggaranya peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan tingkat primer dan sekunder   | persen | 0,00         | -     | 100    | 78,00     | Dinkes           |
| 1.2.15. | menurunnya Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dan persentase ibu hamil kurang energi kronik          | persen | 0,00         | 1,97  | 2,70   | 2,67      | Dinkes           |
| 1.2.16. | Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja   | persen | 0,00         | 5,50  | 70,00  | 35,00     | Dinkes           |
| 1.2.17. | Terpenuhinya SPM Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit   | persen | 0,00         | -     | 100    | 62,00     | Dinkes           |
| 1.2.18. | Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) dan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit tidak menular | persen | 0,00         | -     | 95,00  | 57,30     | Dinkes           |
| 1.2.20. | Meningkatnya indeks Keluarga Sehat  | persen | 50,00        | 56,00 | 62,00  | 63,79     | Dinkes           |
| 1.2.21. | Meningkatnya PHBS di semua Tatanan  | persen | 54,58        | 55,00 | 60,00  | 60,00     | Dinkes           |
| 1.2.21. | Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat   | persen | 0,00         | -     | 12,00  | 8,33      | Dinkes           |
| 1.2.23. | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar   | persen | n/a          | n/a   | 87,00  | 87,00     | RSUD Majalengka  |
| 1.2.24. | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun   | Orang  | n/a          | n/a   | 166    | 43        | RSUD Majalengka  |
| 1.2.25. | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar   | Orang  | n/a          | n/a   | 93     | 113       | RSUD Cideres     |
| 1.2.26. | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun   | Orang  | n/a          | N/A   | 377    | 378       | RSUD Cideres     |
| 1.2.28. | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kesehatan  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.29. | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan   | Persen | 100          | 100   | 100    | 90,00     | Dinkes           |
| 1.2.30. | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kesehatan   | persen | 100          | 100   | 100    | 80,00     | Dinkes           |
| 1.2.31. | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan  | persen | 100          | 100   | 100    | 80,00     | Dinkes           |
| 1.2.32. | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Majalengka  | persen | 0,00         | 65,00 | 10,00  | 6,00      | RSUD Majalengka  |
| 1.2.32. | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres   | persen | 0,00         | 65,00 | 59,00  | 77,78     | RSUD Cideres     |
| 1.2.34. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan  | persen | 90,00        | 90,00 | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.35. | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan   | persen | 80,00        | 80,00 | 100    | 100       | Dinkes           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN         | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |   |                | 2017         | 2018  | 2019   | 2019      |                  |
| 1.2.36.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan                        | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.37.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan  | Niali          | CC           | CC    | C      | C         | RSUD Majalengka  |
| 1.2.38.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan                           | persen         | 90,00        | 90,00 | 100    | 100       | RSUD Majalengka  |
| 1.2.39.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan  | Nilai          | CC           | CC    | C      | CC        | RSUD Cideres     |
| 1.2.40.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan                           | persen         | 90,00        | 90,00 | 100    | 100       | RSUD Cideres     |
| <b>1.3.</b> | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  |                |              |       |        |           |                  |
| 1.3.1.      | Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan  | persen         | 0,00         | 5,00  | 6,24   | 4,50      | Dinas PUTR       |
| 1.3.2.      | Tingkat Kelayakan Jalan   | persen         | 0,00         | 83,00 | 82,94  | 83,90     | Dinas PUTR       |
| 1.3.3.      | Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kebinamargaan   | persen         | 0,00         | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.3.      | Tingkat Kelayakan Jalan   | persen         | 0,00         | 83,00 | 82,94  | 83,90     | Dinas PUTR       |
| 1.3.4.      | Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB  | persen         | 0,00         | 6,26  | 6,46   | 6,48      | Dinas PUTR       |
| 1.3.5.      | Jumlah Taman Kota yang terbangun  | unit           | 0            | 1     | -      | 2         | Dinas PUTR       |
| 1.3.6.      | Persentase Jaringan dalam kondisi baik  | persen         | 67,87        | 68,80 | 0,00   | 69,30     | Dinas PUTR       |
| 1.3.7.      | Volume Air Tertampung   | m <sup>3</sup> | 0            | 0     | -      | -         | Dinas PUTR       |
| 1.3.8.      | Debit Air Termanfaatkan   | ltr/d          | 0            | 0     | -      | -         | Dinas PUTR       |
| 1.3.9.      | Tertanganinya titik sungai kritis   | persen         | 0,00         | 0,00  | -      | -         | Dinas PUTR       |
| 1.3.9.      | Jumlah Pedoman Tata Ruang   | persen         | 0,00         | 0,00  | 100    | -         | Dinas PUTR       |
| 1.3.10.     | Persentase Kesesuaian Peruntukan Fungsi Lahan   | persen         | 0,00         | 0,00  | 100    | 38,00     | Dinas PUTR       |
| 1.3.11.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas BMCK  | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.12.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK   | Persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.13.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas BMCK   | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK        | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.15.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas BMCK  | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.16.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas BMCK                                 | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.17.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas BMCK                              | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PUTR       |
| 1.3.18.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas PPSDA | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.19.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA  | Persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.21.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas PPSDA  | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.21.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA       | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.23.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas PPSDA   | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.24.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas PPSDA                                | persen         | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PKPP       |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN | KONDISI AWAL |        | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------|--------------|--------|--------|-----------|------------------|
|             |   |        | 2017         | 2018   | 2019   | 2019      |                  |
| <b>1.4.</b> | <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>  |        |              |        |        |           |                  |
| 1.4.1.      | Cakupan pelayanan Air Bersih  | persen | 76,73        | 80,16  | -      | 80,27     | Dinas PUTR       |
| 1.4.2.      | Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin   | Persen | -            | -      | -      | 106,2     | Dinas PKPP       |
| 1.4.3.      | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik  | persen | 61,25        | 68,36  | -      | 68,47     | Dinas PKPP       |
| 1.4.3.      | Persentase Kawasan Kumuh  | km     | 221,87       | 242,87 | -      | 295,60    | Dinas PUTR       |
| 1.4.4.      | Persentase Rumah Tidak Layak Huni   | persen | 1,02         | -      | -      | 21,24     | Dinas PKPP       |
| <b>1.5.</b> | <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>   |        |              |        |        |           |                  |
| 1.5.1.      | Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum   | kali   | 12           | 12     | 12     | 12        | Satpol PPPK      |
| 1.5.2.      | Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum  | kali   | 12           | 12     | 12     | 12        | Bakesbangpol     |
| 1.5.3.      | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada   | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.4.      | Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas  | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.5.      | Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompoten  | orang  | 287          | 287    | 287    | 287       | Satpol PPPK      |
| 1.5.6.      | Cakupan pelayanan bencana kebakaran   | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.7.      | Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana  | persen | 100          | 100    | 100    | 97,22     | BPBD             |
| 1.5.8.      | Persentase tanggap bencana  | persen | 100          | -      | 100    | 99,72     | BPBD             |
| 1.5.9.      | Tingkat Penanganan darurat bencana  | persen | 100          | -      | 100    | 97,53     | BPBD             |
| 1.5.10.     | Tingkat Pemulihan pasca bencana   | persen | 10,00        | -      | 100    | 97,59     | BPBD             |
| 1.5.11.     | Jumlah isu/Konflik SARA   | Kasus  | -            | -      | -      | -         | Bakesbangpol     |
| 1.5.12.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP                           | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.13.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP  | Persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.14.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Satpol PP  | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.15.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP                                 | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.16.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Satpol PP   | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.17.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Satpol PP  | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.18.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Satpol PP   | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.19.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah | persen | 100          | 100    | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.20.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | Persen | 100          | 100    | 100    | 99,96     | BPBD             |
| 1.5.21.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | persen | 100          | 100    | 100    | 92,04     | BPBD             |
| 1.5.22.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah       | persen | 100          | 100    | 100    | 91,97     | BPBD             |
| 1.5.23.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | persen | 100          | 100    | 100    | 99,02     | BPBD             |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN       | KONDISI AWAL |          | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------------|--------------|----------|--------|-----------|------------------|
|             |   |              | 2017         | 2018     | 2019   | 2019      |                  |
| 1.5.24.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | persen       | 100          | 100      | 100    | 96,49     | BPBD             |
| 1.5.25.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | persen       | 100          | 100      | 100    | 96,15     | BPBD             |
| 1.5.26.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Bakesbangpol     |
| 1.5.27.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik  | Persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Bakesbangpol     |
| 1.5.28.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik  | persen       | 100          | 100      | 100    | 95        | Bakesbangpol     |
| 1.5.29.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik       | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Bakesbangpol     |
| 1.5.30.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik   | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Bakesbangpol     |
| 1.5.31.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik                                | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Bakesbangpol     |
| 1.5.32.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik                             | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Bakesbangpol     |
| <b>1.6.</b> | <b>SOSIAL</b>   |              |              |          |        |           |                  |
| 1.6.1.      | Persentase masyarakat miskin yang dimonev   | persen       | -            | -        | 100    | 63.779    | Dinsos           |
| 1.6.2.      | Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial   | Rumah Tangga | 3.563,0      | 4.213,00 | 301,00 | 6517      | Dinsos           |
| 1.6.3.      | Jumlah Lansia yang mendapatkan “Rantang Kanyaah”  | orang        | -            | -        | 200    | 878       | Dinsos           |
| 1.6.4.      | Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri  | Kube         | 112          | 112      | 8      | 8         | Dinsos           |
| 1.6.5.      | Jumlah PMKS yang dibantu  | orang        | 5.145        | 5.945    | 70     | 70        | Dinsos           |
| 1.6.6.      | Jumlah Kelembagaan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan  | lembaga      | -            | -        | -      | 30        | Dinsos           |
| 1.6.7.      | Persentase Korban Bencana Yang Ditangani  | orang        | 100          | 100      | 100    | 120       | Dinsos           |
| 1.6.8.      | Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana  | orang        | 60           | 60       | 60     | 60        | Dinsos           |
| 1.6.9.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Sosial               | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.10.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.12.     | Persentase Sasaran dan Prasaran Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial                              | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.13.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial   | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.14.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.15.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Sosial   | persen       | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinsos           |
| <b>1.7.</b> | <b>TENAGA KERJA</b>   |              |              |          |        |           |                  |
| 1.7.1.      | Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri   | RTS          | n/a          | -        | -      | -         | Dinas K3UKM      |
| 1.7.2.      | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan   | Persen       | n/a          | 23,65    | 24,00  | 70,90     | Dinas K3UKM      |
| 1.7.3.      | Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan  | Persen       | n/a          | 60,00    | 60,00  | 120       | Dinas K3UKM      |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN   | KONDISI AWAL |        | TARGET  | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------|--------------|--------|---------|-----------|------------------|
|             |   |          | 2017         | 2018   | 2019    | 2019      |                  |
| 1.7.4.      | Persentase Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)  | Persen   | n/a          | n/a    | 75,00   | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian   | Persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian   | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                      | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian  | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian   | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian  | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| <b>1.8.</b> | <b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |          |              |        |         |           |                  |
| 1.8.1.      | Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri  | KK       | n/a          | n/a    | 550     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.2.      | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG  | Persen   | n/a          | n/a    | 20,00   | 59,00     | Dinas P3AKB      |
| 1.8.3.      | Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak  | Kategori | n/a          | n/a    | Pratama | Pratama   | Dinas P3AKB      |
| 1.8.4.      | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan   | Persen   | n/a          | n/a    | 5,00    | 4,05      | Dinas P3AKB      |
| 1.8.5.      | Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak  | Persen   | n/a          | n/a    | 5,00    | 4,80      | Dinas P3AKB      |
| 1.8.6.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.7.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  | Persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.8.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.9.      | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana           | Unit     | 128,00       | 128,00 | 128,00  | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.10.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.11.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.12.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                             | persen   | 100          | 100    | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| <b>1.9.</b> | <b>PANGAN</b>   |          |              |        |         |           |                  |
| 1.9.1.      | Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)  | desa     | -            | 18,00  | 4,00    | -         | Dinas Pangan     |
| 1.9.2.      | Persentase Peningkatan skor PPH   | persen   | -            | 87,33  | 1,00    | 6,67      | Dinas Pangan     |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN   | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|----------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|              |   |          | 2017         | 2018  | 2019   | 2019      |                  |
| 1.9.3.       | Jumlah Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna   | kelompok | -            | -     | 50     | 20        | Dinas Pangan     |
| 1.9.4.       | Jumlah Pusat Pelayanan Penyuluhan Pertanian   | Unit     | -            | 80    | 25     | 26        | Dinas Pangan     |
| 1.9.5.       | Ketersediaan energi dan protein perkapita   | persen   | -            | 62,58 | 63,26  | 63,00     | Dinas Pangan     |
| 1.9.6.       | Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq$ 10 dan pasokan pangan   | Persen   | -            | 99,00 | 100    | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.7.       | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pangan           | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.8.       | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan  | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.9.       | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pangan  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.10.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan                 | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.11.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pangan   | persen   | 100          | 100   | 85,00  | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.12.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pangan  | persen   | 100          | 100   | 85,00  | 100       | Dinas Pangan     |
| 1.9.13.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pangan                                       | persen   | 100          | 100   | 85,00  | 100       | Dinas Pangan     |
| <b>1.10.</b> | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>   |          |              |       |        |           |                  |
| 1.10.1.      | Cakupan Pelayanan Persampahan   | persen   | 1,83         | 1,83  | 1,91   | 1,91      | Dinas LH         |
| 1.10.2.      | Cakupan Pelayanan penanganan limbah   | persen   | 0,17         | 0,17  | 3,67   | 0,36      | Dinas LH         |
| 1.10.3.      | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di permukiman kumuh   | unit     | -            | -     | -      | -         | Dinas LH         |
| 1.10.4.      | Tingkat Kualitas Lingkungan   | point    | 60,97        | 60,97 | 37,48  | 40,35     | Dinas LH         |
| 1.10.5.      | Persentase Ruang Terbuka Hijau yang tertata   | persen   | 63,48        | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.6.      | Tingkat Pelayanan Persampahan   | persen   | 10,40        | 10,40 | 13,90  | 10,10     | Dinas LH         |
| 1.10.7.      | Persentase Luas Tutupan Lahan   | persen   | 31,04        | 31,04 | 0,01   | 0,01      | Dinas LH         |
| 1.10.8.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Lingkungan Hidup | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.9.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup  | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.10.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Lingkungan Hidup  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.11.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup       | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.12.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Lingkungan Hidup   | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.13.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup                                | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.14.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup                             | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| <b>1.11.</b> | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>   |          |              |       |        |           |                  |
| 1.11.1.      | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  | Nilai    | 70,70        | 77,22 | 79,40  | 79,53     | Disdukcapil      |
| 1.11.2.      | Prosentase distribusi dok kependudukan melalui PT. Pos Indonesia  | Persen   | -            | -     | 100    | 100       | Disdukcapil      |
| 1.11.3.      | Prosentase sinergitas Sistem Administrasi kependudukan (SAK)  | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapil      |
| 1.11.4.      | Persentase Pengelolaan SIAK tingkat Kecamatan/ Kabupaten  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapil      |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN          | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|              |   |                 | 2017         | 2018  | 2019   | 2019      |                  |
| 1.11.5.      | Prosentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan   | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.6.      | Prosentase Kepemilikan KK dan KTP   | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.7.      | Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak   | Persen          | 46,44        | 46,53 | 54,54  | 10,69     | Disdukcapi       |
| 1.11.8.      | Prosentase Pelayanan Pindah/Datang penduduk   | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.9.      | Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian  | Persen          | 32,13        | 34,32 | 46,69  | 97,28     | Disdukcapi       |
| 1.11.10.     | Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian  | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.11.     | Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan  | Dok             | -            | 9,00  | 11,00  | 11        | Disdukcapi       |
| 1.11.12.     | Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Dok             | -            | 9,00  | 11,00  | 11        | Disdukcapi       |
| 1.11.13.     | Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan  | Persen          | -            | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.14.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.15.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.16.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.17.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil       | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.18.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.19.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| 1.11.20.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                             | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdukcapi       |
| <b>1.12.</b> | <b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>  |                 |              |       |        |           |                  |
| 1.12.1.      | Jumlah Pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat   | orang           | -            | -     | -      | 159       | Dinas PMD        |
| 1.12.2.      | Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan   | persen (Persen) | 40,00        | 50,00 | 50,00  | 50,00     | Dinas PMD        |
| 1.12.3.      | Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes  | persen          | 15,00        | 25,00 | 35,00  | 35,00     | Dinas PMD        |
| 1.12.4.      | Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan desa  | Persen          | 45,00        | 50,00 | 50,00  | 50,00     | Dinas PMD        |
| 1.12.5.      | Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif   | Unit            | -            | 43    | 57     | 57        | Dinas PMD        |
| 1.12.6.      | Prosentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa   | persen          | -            | -     | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.7.      | Persentase PADes terhadap APBDes  | Persen          | 20,00        | 10,00 | 11,00  | 12,00     | Dinas PMD        |
| 1.12.8.      | Jumlah meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat  | Rp. (000)       | 266.000      | 300   | 488,1  | 524       | Dinas PMD        |
| 1.12.9.      | Jumlah infrastruktur posyandu yang di bangun  | unit            | -            | 5     | 5      | 5         | Dinas PMD        |
| 1.12.10.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.11.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | Persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.12.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | persen          | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PMD        |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN   | KONDISI AWAL |          | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|----------|--------------|----------|--------|-----------|------------------|
|              |   |          | 2017         | 2018     | 2019   | 2019      |                  |
| 1.12.13.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.14.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                       | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.15.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                          | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.16.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                       | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| <b>1.13.</b> | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |          |              |          |        |           |                  |
| 1.13.1.      | Cakupan Angka Total Fertility Rate  | Point    | 2,16         | 2,16     | 2,15   | 2,27      | Dinas P3AKB      |
| 1.13.2.      | Rata-rata Usia Perkawinan   | Tahun    | 18,50        | 18,70    | 19,50  | 21,00     | Dinas P3AKB      |
| 1.13.3.      | Menurunnya Tingkat Perceraian   | Kasus    | 4.311,0      | 4.652,00 | 2,50   | 12,70     | Dinas P3AKB      |
| <b>1.14.</b> | <b>PERHUBUNGAN</b>  |          |              |          |        |           |                  |
| 1.14.1.      | Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan  | persen   | 65,00        | 65,00    | 68,00  | 70,00     | Dishub           |
| 1.14.2.      | Persentase Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  | persen   | 25,00        | 37,20    | 39,51  | 74,36     | Dishub           |
| 1.14.3.      | Prosentasi Capaian Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum   | persen   | 50,4         | 50,4     | 60,00  | 50,40     | Dishub           |
| 1.14.4.      | Prosentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor  | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perhubungan                | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan   | Persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perhubungan   | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan                      | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perhubungan  | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan   | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan  | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| <b>1.15.</b> | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |          |              |          |        |           |                  |
| 1.15.1.      | Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi  | aplikasi | -            | -        | 2      | 2         | Diskominfo       |
| 1.15.2.      | Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah   | buah     | n/a          | n/a      | 154    | 105       | Diskominfo       |
| 1.15.3.      | Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik  | unit     | n/a          | n/a      | 82     | 26        | Diskominfo       |
| 1.15.4.      | Jumlah Desa Teknologi, informasi dan komunikasi (Destika)   | desa     | -            | -        | 61     | 0         | Diskominfo       |
| 1.15.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan   | Persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika  | Persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika  | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika       | persen   | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskominfo       |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN   | KONDISI AWAL |        | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|----------|--------------|--------|--------|-----------|------------------|
|              |   |          | 2017         | 2018   | 2019   | 2019      |                  |
| 1.15.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika   | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika                                     | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| <b>1.16.</b> | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>   |          |              |        |        |           |                  |
| 1.16.1.      | Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin   | persen   | N/A          | N/A    | -      | 3,00      | Dinas K3UKM      |
| 1.16.2.      | Peningkatan Volume pelaku Usaha Mikro   | persen   | N/A          | N/A    | -      | 5,00      | Dinas K3UKM      |
| 1.16.3.      | Jumlah Produk berbahan baku lokal yang dikembangkan   | produk   | 10           | 10     | -      | 10        | Dinas K3UKM      |
| 1.16.4.      | Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemasaran produk lokal usaha mikro  | unit     | N/A          | N/A    | -      | 0         | Dinas K3UKM      |
| 1.16.5.      | Persentase Koperasi Aktif   | persen   | n/a          | 133,00 | 7,00   | 61,00     | Dinas K3UKM      |
| 1.16.6.      | Jumlah koperasi yang dapat menyusun laporan keuangan  | koperasi | n/a          | 133    | n/a    | 118       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.7.      | Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti pelatihan pengawasan  | orang    | -            | -      | -      | 150       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.8.      | Koperasi yang melaksanakan RAT  | koperasi | 164          | 164    | 164    | 118       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.9.      | Jumlah Koperasi baru  | Koperasi | 1            | 12     | -      | 10        | Dinas K3UKM      |
| 1.16.10.     | Jumlah Bidang Usaha Koperasi  | Koperasi | 2            | 2      | -      | 2         | Dinas K3UKM      |
| 1.16.11.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.12.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.13.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah       | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.15.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.16.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.17.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| <b>1.17.</b> | <b>PENANAMAN MODAL</b>  |          |              |        |        |           |                  |
| 1.17.1.      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan   | nilai    | 79,74        | 80,05  | 80,50  | 81,02     | DPMPTSP          |
| 1.17.2.      | Regulasi Pelayanan Perizinan  | Regulasi | 6            | 6      | -      | 0         | DPMPTSP          |
| 1.17.3.      | Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.4.      | Nilai Realisasi Investasi   | milyar   | 629,364      | 1,288  | 362,00 | 2.093     | DPMPTSP          |
| 1.17.5.      | Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan ruang  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.6.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Penanaman Modal                    | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.7.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal   | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | DPMPTSP          |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )   | SATUAN     | KONDISI AWAL       |                    | TARGET             | REALISASI          | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|              |  |            | 2017               | 2018               | 2019               | 2019               |                  |
| 1.17.8.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal  | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | DPMPTSP          |
| 1.17.9.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal               | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | DPMPTSP          |
| 1.17.10.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Penanaman Modal   | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | DPMPTSP          |
| 1.17.11.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal  | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | DPMPTSP          |
| 1.17.12.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal                                     | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | DPMPTSP          |
| <b>1.18.</b> | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>  |            |                    |                    |                    |                    |                  |
| 1.18.1.      | Jumlah prestasi masyarakat di bidang Olahraga  | prestasi   | 54,00              | 38,00              | 55,00              | 41,00              | Dispora          |
| 1.18.2.      | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga  | Jiwa       | 650,00             | 700,00             | 1.000,00           | 850,00             | Dispora          |
| 1.18.3.      | Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlit yang dibina   | Jiwa       | 13                 | 13                 | 45                 | 45                 | Dispora          |
| 1.18.4.      | Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yang dibina  | Kompetisi  | 12 jenis 25 cabang | 12 jenis 26 cabang | 15 jenis 29 cabang | 15 jenis 29 cabang | Dispora          |
| 1.18.5.      | Jumlah Pemuda Pelopor Terpilih dan yang mengikuti even di tingkat provinsi   | Jiwa       | 1                  | 1                  | 2                  | 2                  | Dispora          |
| 1.18.6.      | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina   | Organisasi | 45                 | 45                 | 47                 | 47                 | Dispora          |
| 1.18.7.      | Peningkatan Pemahaman Baris-Berbaris dan Cakupan Penjaringan Calon Paskibra  | Jiwa       | 34                 | 34                 | 34                 | 34                 | Dispora          |
| 1.18.8.      | Jumlah Pemuda Berwirausaha   | Jiwa       | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | Dispora          |
| 1.18.9.      | Peningkatan Pemahaman Pemuda Berwirausaha  | Jiwa       | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | Dispora          |
| 1.18.10.     | Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga  | Unit       | 3                  | 6                  | 1                  | 1                  | Dispora          |
| 1.18.11.     | Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi  | Unit       | 1                  | 2                  | 3                  | 3                  | Dispora          |
| 1.18.12.     | Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga   | Unit       | 7                  | 7                  | 10                 | 10                 | Dispora          |
| 1.18.13.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| 1.18.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga       | Persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| 1.18.15.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga  | Persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| 1.18.16.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga  | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| 1.18.17.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga   | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| 1.18.18.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| 1.18.19.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga                             | persen     | 100                | 100                | 100                | 100                | Dispora          |
| <b>1.19.</b> | <b>STATISTIK</b>   |            |                    |                    |                    |                    |                  |
| 1.19.1.      | Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik   | unit       | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  | Diskominfo       |
| 1.19.2.      | Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah  | dokumen    | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | Diskominfo       |
| <b>1.20.</b> | <b>KEBUDAYAAN</b>  |            |                    |                    |                    |                    |                  |
| 1.20.1.      | Presentase prestasi masyarakat di bidang Seni Budaya   | persen     | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 7,00               | Disparbud        |
| 1.20.2.      | Jumlah event seni dan budaya   | kali       | 2                  | 2                  | 16                 | 21                 | Disparbud        |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN        | KONDISI AWAL |          | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|---------------|--------------|----------|--------|-----------|------------------|
|              |   |               | 2017         | 2018     | 2019   | 2019      |                  |
| 1.20.3.      | Jumlah Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan   | buah          | 100          | 100      | 100    | 180       | Disparbud        |
| <b>1.21.</b> | <b>PERPUSTAKAAN</b>   |               |              |          |        |           |                  |
| 1.21.1.      | Rasio Kunjungan perpustakaan per tahun  | point         | 100          | 100      | 15     | 100       | Diskapus         |
| <b>1.22.</b> | <b>KEARSIPAN</b>  |               |              |          |        |           |                  |
| 1.22.1.      | Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan  | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.2.      | Persentase arsip statis yang diselamatkan   | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.3.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.4.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  | Persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.5.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  | Persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.6.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan       | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.7.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan   | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.8.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan                                | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| 1.22.9.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan                             | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Diskapus         |
| <b>2</b>     | <b>URUSAN PILIHAN</b>   |               |              |          |        |           |                  |
| <b>2.1.</b>  | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   |               |              |          |        |           |                  |
| 2.1.1.       | Jumlah Produksi Ikan Mas  | Ton           | 1.412,22     | 1.242,79 | 24,86  | 68,68     | Distankan        |
| 2.1.2.       | Jumlah Produksi Ikan Nila   | Ton           | 4.157,09     | 3.868,15 | 77,36  | 30,83     | Distankan        |
| 2.1.3.       | Jumlah Produksi Ikan Lele   | Ton           | 1.662,23     | 1.427,38 | 28,55  | 31        | Distankan        |
| 2.1.4.       | Jumlah Produksi Ikan Gurame   | Ton           | 890,47       | 853,44   | 17,07  | 20        | Distankan        |
| 2.1.5.       | Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat  | kelompok      | 21           | 23       | 3      | -         | Distankan        |
| 2.1.6.       | Jumlah omzet pemasaran produk perikanan   | Rupiah (Juta) | n/a          | 23.312   | 466,24 | 237.200   | Distankan        |
| <b>2.2.</b>  | <b>PARIWISATA</b>   |               |              |          |        |           |                  |
| 2.2.1.       | Jumlah destinasi wisata layak kunjung   | Unit          | 2            | 2        | 1      | 2         | Disparbud        |
| 2.2.2.       | Jumlah Kunjungan Event  | Orang         | N/A          | N/A      | 5.000  | 750.000   | Disparbud        |
| 2.2.3.       | Jumlah Industri Kreatif sub sektor kriya  | Unit          | N/A          | N/A      | 12     | 17        | Disparbud        |
| 2.2.4.       | Jumlah Industri Kreatif sub sektor kuliner  | Unit          | N/A          | N/A      | 5.000  | 7.500     | Disparbud        |
| 2.2.5.       | Jumlah Desa Wisata  | Desa          | 1,00         | 1        | 1      | 1         | Disparbud        |
| 2.2.6.       | Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan   | persen        | n/a          | n/a      | 5,00   | 18,70     | Disparbud        |
| 2.2.7.       | Peningkatan PAD   | persen        | 285,00       | 46,00    | 15,00  | 50,00     | Disparbud        |
| 2.2.8.       | Jumlah Pokdarwis  | kelompok      | 4            | 5        | 10     | 2         | Disparbud        |
| 2.2.9.       | Jumlah Kerjasama Pariwisata yang dilakukan  | MOU           | 1            | 2        | -      | -         | Disparbud        |
| 2.2.10.      | Sertifikasi/standarisasi Pariwisata   | buah          | -            | 8        | 15     | -         | Disparbud        |
| 2.2.11.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  | persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Disparbud        |
| 2.2.12.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan   | Persen        | 100          | 100      | 100    | 100       | Disparbud        |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )   | SATUAN                     | KONDISI AWAL |           | TARGET   | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|--|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|
|             |  |                            | 2017         | 2018      | 2019     | 2019      |                  |
| 2.2.13.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  | persen                     | 100          | 100       | 100      | 100       | Disparbud        |
| 2.2.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan | persen                     | 100          | 100       | 100      | 100       | Disparbud        |
| 2.2.15.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                                       | persen                     | 100          | 100       | 100      | 100       | Disparbud        |
| 2.2.16.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                          | persen                     | 100          | 100       | 100      | 100       | Disparbud        |
| 2.2.17.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                       | persen                     | 100          | 100       | 100      | 100       | Disparbud        |
| <b>2.3.</b> | <b>PERTANIAN</b>   |                            |              |           |          |           |                  |
| 2.3.1.      | Jumlah keluarga Petani miskin yang menjadi mandiri   | Rumah Tangga Sasaran (RTS) | N/A          | N/A       | 150      | -         | Distankan        |
| 2.3.2.      | Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (Ton)   | Persen                     | 37.705       | 31.981    | 1,50     | 18,73     | Distankan        |
| 2.3.3.      | Persentase peningkatan produksi Cabai Besar (Ton)  | Persen                     | 12.452       | 13.053    | 1,50     | (-4,49)   | Distankan        |
| 2.3.4.      | Persentase peningkatan produksi Kentang (Ton)  | Persen                     | 2.607        | 3.601     | 1,00     | 16,44     | Distankan        |
| 2.3.5.      | Persentase peningkatan produksi Mangga (Ton)   | Persen                     | 60.007,50    | 44.754,69 | 1,50     | 22,64     | Distankan        |
| 2.3.6.      | Persentase peningkatan produksi Jambu Biji (Ton)   | Persen                     | 5.369,30     | 3.618,46  | 1,00     | (-18,64)  | Distankan        |
| 2.3.7.      | Persentase peningkatan produksi Durian (Ton)   | Persen                     | 5.150,60     | 11.263,47 | 1,00     | (-34,58)  | Distankan        |
| 2.3.8.      | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Hortikultura  | Unit                       | 211          | 371       | 15       | 25        | Distankan        |
| 2.3.9.      | Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura                      | meter                      | N/A          | N/A       | 1.500,00 | -         | Distankan        |
| 2.3.10.     | Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura              | meter                      | N/A          | N/A       | 1.000,00 | -         | Distankan        |
| 2.3.11.     | Persentase peningkatan produksi Jagung (Ton)   | Persen                     | 151.646      | 117.598   | 3,00     | 24,26     | Distankan        |
| 2.3.12.     | Persentase peningkatan produksi Padi (Ton)   | Persen                     | 672.294      | 667.110   | 3,00     | 8,29      | Distankan        |
| 2.3.13.     | Persentase peningkatan produksi Kedelai (Ton)  | Persen                     | 916,00       | 2.264,00  | 3,00     | (-4,95)   | Distankan        |
| 2.3.14.     | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan  | Unit                       | 120          | 195       | 25       | 276       | Distankan        |
| 2.3.15.     | Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan                    | meter                      | 8.750,00     | 9.500,00  | 1.500,00 | 2.500,00  | Distankan        |
| 2.3.16.     | Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan            | meter                      | N/A          | 3.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00  | Distankan        |
| 2.3.17.     | Persentase peningkatan produksi Kopi (Ton)   | Persen                     | 830,87       | 217,74    | 2,00     | 5,78      | Distankan        |
| 2.3.18.     | Persentase peningkatan produksi Cengkeh (Ton)  | Persen                     | 662,45       | 452,53    | 2,00     | 27,37     | Distankan        |
| 2.3.19.     | Persentase peningkatan produksi Teh (Ton)  | Persen                     | 1.261,11     | 340,72    | 1,50     | (-72,33)  | Distankan        |
| 2.3.20.     | Persentase peningkatan produksi Tembakau (Ton)   | Persen                     | 1.106,85     | 839,19    | 2,00     | 7,53      | Distankan        |
| 2.3.21.     | Persentase peningkatan produksi Tebu (Ton)   | Persen                     | 39.333,63    | 148,58    | 1,50     | 0,00      | Distankan        |
| 2.3.22.     | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Perkebunan  | Unit                       | 1            | 2         | 10       | 15        | Distankan        |
| 2.3.23.     | Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi perkebunan                | meter                      | N/A          | N/A       | 500,00   | 3.880     | Distankan        |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )   | SATUAN   | KONDISI AWAL |           | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|--|----------|--------------|-----------|--------|-----------|------------------|
|             |  |          | 2017         | 2018      | 2019   | 2019      |                  |
| 2.3.24.     | Persentase peningkatan produksi daging sapi (Ton)  | Persen   | 2.158,90     | 2.210,00  | 2,50   | 2,49      | Distankan        |
| 2.3.25.     | Persentase peningkatan produksi daging domba (Ton)   | Persen   | 1.534,94     | 1.535,00  | 2,50   | 3,21      | Distankan        |
| 2.3.26.     | Persentase peningkatan produksi daging ayam pedaging (Ton)   | Persen   | 24.352,44    | 24.358,49 | 2,50   | 0,05      | Distankan        |
| 2.3.27.     | Persentase peningkatan produksi telur (Ton)  | Persen   | 3.367,28     | 3.369,74  | 2,50   | 24,78     | Distankan        |
| 2.3.28.     | Persentase peningkatan produksi susu sapi (Ribu Liter)   | Persen   | 1.388,44     | 1.392,42  | 2,50   | 21,75     | Distankan        |
| 2.3.29.     | Jumlah Pelaku Usaha Tanaman Pangan penerima manfaat  | Kelompok | 198          | 198       | 50     | 276       | Distankan        |
| 2.3.30.     | Jumlah Pelaku Usaha Hortikultura dan Perkebunan penerima manfaat   | Kelompok | 201          | 221       | 4      | 0         | Distankan        |
| 2.3.31.     | Jumlah Pelaku Usaha Perternakan penerima manfaat   | Kelompok | 43           | 43        | 13     | 14        | Distankan        |
| 2.3.32.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pertanian   | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| 2.3.33.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian  | Persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| 2.3.34.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pertanian  | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| 2.3.35.     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian             | Persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| 2.3.36.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pertanian   | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| 2.3.37.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pertanian                                  | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| 2.3.38.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pertanian                               | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Distankan        |
| <b>2.4.</b> | <b>PERDAGANGAN</b>   |          |              |           |        |           |                  |
| 2.4.1.      | Infrastruktur Perdagangan yang dibangun  | unit     | 44           | 44        | 2      | 2         | Disdagin         |
| 2.4.2.      | Meningkatnya nilai ekspor  | persen   | 20,00        | 30,00     | 20,00  | 20,00     | Disdagin         |
| 2.4.3.      | Persentase pertumbuhan pasar modern dan desa   | persen   | 3,00         | 12,00     | 5,00   | 5,00      | Disdagin         |
| 2.4.4.      | Pengendalian dan pengawasan perdagangan  | kali     | 96           | 96        | 96     | 96        | Disdagin         |
| 2.4.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perdagangan | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Disdagin         |
| 2.4.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan  | Persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Disdagin         |
| 2.4.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perdagangan  | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Disdagin         |
| 2.4.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan       | unit     | 100          | 100       | 101    | 100       | Disdagin         |
| 2.4.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perdagangan   | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Disdagin         |
| 2.4.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perdagangan                                | persen   | 100          | 100       | 100    | 90,9      | Disdagin         |
| 2.4.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan                             | persen   | 100          | 100       | 100    | 100       | Disdagin         |
| <b>2.5.</b> | <b>PERINDUSTRIAN</b>   |          |              |           |        |           |                  |
| 2.5.1.      | Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah   | Persen   | 9,34         | 2,64      | 2,29   | 3,21      | Disdagin         |
| 2.5.2.      | Jumlah Industri Pengolahan yang berdaya saing  | Unit IKM | N/A          | N/A       | 378    | 414       | Disdagin         |
| 2.5.3.      | Meningkatnya kompetensi Pelaku IKM   | orang    | N/A          | N/A       | 20     | 30        | Disdagin         |
| 2.5.4.      | Jumlah Sentra IKM  | unit     | 1            | 1         | 1      | 1         | Disdagin         |
| 2.5.5.      | Dokumen Rencana Pengembangan   | dokumen  | 1            | 1         | 0      | 0         | Disdagin         |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )   | SATUAN | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|--|--------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|              |  |        | 2017         | 2018  | 2019   | 2019      |                  |
| <b>3</b>     | <b>URUSAN PENUNJANG</b>  |        |              |       |        |           |                  |
| <b>3.1.</b>  | <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   |        |              |       |        |           |                  |
| 3.1.1.       | Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.2.       | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)   | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.3.       | Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.4.       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.5.       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.6.       | Persentase dokumen perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur  | Persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.7.       | Persentase dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.8.       | Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti   | persen | -            | -     | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.9.       | Persentase Kesesuaian Peruntukan Pola ruang  | persen | -            | -     | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.10.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.11.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.12.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | Persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.13.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.14.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah       | persen | 100          | 100   | 101,00 | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.15.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah   | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.16.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| 3.1.17.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                             | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappedalitbang   |
| <b>3.2..</b> | <b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>  |        |              |       |        |           |                  |
| 3.2.1.       | Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.2.       | Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76%  | persen | 93,00        | 93,00 | 95,00  | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.3.       | Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80%  | persen | 90,00        | 90,00 | 95,00  | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.4.       | Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial  | persen | 62,24        | 71,10 | 71,10  | 69        | BKPSDM           |
| 3.2.5.       | Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | BKPSDM           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN   | KONDISI AWAL       |                    | TARGET             | REALISASI              | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|             |   |          | 2017               | 2018               | 2019               | 2019                   |                  |
| 3.2.6.      | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB  | persen   | -                  | -                  | 30,00              | 30,00                  | BKPSDM           |
| 3.2.7.      | Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi  | orang    | 63                 | 70                 | 72                 | 72                     | BKPSDM           |
| 3.2.8.      | Tingkat Pemenuhan Data Informasi Kepegawaian ASN  | persen   | 90,00              | 90,00              | 92,00              | 92,00                  | BKPSDM           |
| 3.2.9.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKPSDM           |
| 3.2.10.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | Persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKPSDM           |
| 3.2.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKPSDM           |
| 3.2.12.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKPSDM           |
| 3.2.13.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKPSDM           |
| 3.2.14.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                             | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKPSDM           |
| <b>3.3.</b> | <b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>   |          |                    |                    |                    |                        |                  |
| 3.3.1.      | Opini BPK terhadap LKPD   | opini    | WTP                | WTP                | WTP                | WTP                    | BKAD             |
| 3.3.2.      | Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal   | persen   | 2,00               | 2,00               | 2,00               | 2,00                   | BKAD             |
| 3.3.3.      | Persentase Kenaikan total pendapatan daerah   | persen   | 2.685,00           | 2.816,00           | 17,00              | 2.964,00               | BPD              |
| 3.3.4.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah                         | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKAD             |
| 3.3.5.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | Persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKAD             |
| 3.3.6.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKAD             |
| 3.3.7.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah                               | persen   | 100                | 100                | 101                | 100                    | BKAD             |
| 3.3.8.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah   | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKAD             |
| 3.3.9.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKAD             |
| 3.3.10.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah   | persen   | 100                | 100                | 100                | 100                    | BKAD             |
| <b>4</b>    | <b>FUNGSI LAINNYA</b>   |          |                    |                    |                    |                        |                  |
| <b>4.1.</b> | <b>SETDA</b>  |          |                    |                    |                    |                        |                  |
| 4.1.1.      | Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif   | persen   | 16,00              | 16,00              | 25,00              | 100                    | Sosmas           |
| 4.1.2.      | Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi   | Persen   | 31,00              | 31,00              | 40,00              | 100                    | Sosmas           |
| 4.1.3.      | Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi   | persen   | 62,00              | 65,00              | 68,00              | 100                    | Sosmas           |
| 4.1.4.      | Persentase tokoh agama yang terfasilitasi   | persen   | 32,00              | 32,00              | 42,00              | 100                    | Sosmas           |
| 4.1.5.      | Tingkat Capaian Kabupaten Sehat   | Predikat | Swasti Saba Padapa | Swasti Saba Padapa | Swasti Saba Padapa | Belum masuk verifikasi | Sosmas           |
| 4.1.6.      | Hari Jadi Pemerintah Daerah dan Nasional yang diperingati   | Event    | 3                  | 3                  | 3                  | 3                      | Sosmas           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )  | SATUAN | KONDISI AWAL |                | TARGET          | REALISASI       | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             |   |        | 2017         | 2018           | 2019            | 2019            |                  |
| 4.1.7.      | Kebijakan Lingkup PMKS  | jumlah | 4            | 4              | 4 Stimulan PMKS | 4 stimulan PMKS | Sosmas           |
| 4.1.8.      | Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)   | ST     | ST           | ST             | ST              | ST              | Tapem            |
| 4.1.9.      | Meningkatnya Kinerja Kecamatan  | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Tapem            |
| 4.1.10.     | Meningkatnya Kinerja Desa   | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Tapem            |
| 4.1.11.     | Tingkat Kepuasan Publik   | Persen | n/a          | 51 OPD Nilai B | 91,23           | 100             | Organisasi       |
| 4.1.12.     | Tingkat Kesesuaian Penataan Organisasi dengan Peraturan   | Persen | n/a          | 81,00          | 3,80            | 100             | Organisasi       |
| 4.1.13.     | Persentase Kelembagaan Menunjang Visi dan Misi  | Persen | n/a          | 90,7           | 1,86            | 100             | Organisasi       |
| 4.1.14.     | Persentase Peraturan Daerah yang di Undangkan   | Persen | 100          | 60,00          | 12,00           | 14,00           | Hukum            |
| 4.1.15.     | Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan   | Persen | 70,00        | 80,00          | 90,00           | 100             | LPBJ             |
| 4.1.16.     | Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD   | Persen | n/a          | 4,03 Milyar    | 10,00           | 100             | Ekbang           |
| 4.1.17.     | Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil   | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Ekbang           |
| 4.1.18.     | Tingkat Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi   | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Setda            |
| 4.1.19.     | Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik  | Persen | 29,00        | 29 Lokasi      | 31,03           | 100             | Setda            |
| 4.1.20.     | Tingkat Kesuksesan Acara Pimpinan   | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Protokoler       |
| 4.1.21.     | Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasikan dan Terpublikasikan  | persen | 100          | 100            | 100             | 94              | Protokoler       |
| 4.1.22.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah    | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Umum             |
| 4.1.23.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah   | Persen | 50,00        | 50,00          | 60,00           | 100             | Umum             |
| 4.1.24.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah   | persen | 50,00        | 50,00          | 60,00           | 100             | Keuangan         |
| 4.1.25.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah          | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Umum             |
| 4.1.26.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah  | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Keuangan         |
| 4.1.27.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah                           | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Keuangan         |
| 4.1.28.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah                        | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Keuangan         |
| <b>4.2.</b> | <b>INSPEKTORAT</b>  |        |              |                |                 |                 |                  |
| 4.2.1.      | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A   | persen | -            | -              | 5,00            | 0,00            | Inspektorat      |
| 4.2.2.      | Prosentase temuan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti  | persen | -            | 60,00          | 75,00           | 62,00           | Inspektorat      |
| 4.2.3.      | Level maturitas SPIP  | Level  | -            | 1,80           | 3,00            | 1.869           | Inspektorat      |
| 4.2.4.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Kabupaten | persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Inspektorat      |
| 4.2.5.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Inspektorat      |
| 4.2.6.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Inspektorat      |
| 4.2.7.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten       | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Inspektorat      |
| 4.2.8.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Inspektorat Kabupaten   | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Inspektorat      |
| 4.2.9.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten                                | Persen | 100          | 100            | 100             | 100             | Inspektorat      |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA ( <i>OUTCOME</i> )   | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|--|---------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |  |         | 2017         | 2018  | 2019   | 2019      |                  |
| 4.2.10.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten                        | Persen  | 100          | 100   | -      | 0,00      | Inspektorat      |
| <b>4.3.</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>  |         |              |       |        |           |                  |
| 4.3.1.      | Persentase Perda yang disyahkan  | persen  | 45,45        | 63,64 | 70,00  | 112,90    | Sekretariat DPRD |
| 4.3.2.      | Jumlah Dokumen Hasil Kajian  | dokumen | 1            | 1     | 4      | 4         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.3.      | Jumlah Cetakan dokumentasi hukum   | buku    | 39           | 39    | 39     | 39        | Sekretariat DPRD |
| 4.3.4.      | Frekuensi Fasilitasi Sosialisasi Perda   | lokasi  | 5            | 5     | 5      | 0         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.5.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Anggaran  | kali    | 5            | 5     | 5      | 5         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.6.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pembentukan Perda   | bulan   | 12           | 12    | 12     | 12        | Sekretariat DPRD |
| 4.3.7.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pengawasan  | bulan   | 12           | 12    | 12     | 12        | Sekretariat DPRD |
| 4.3.8.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat  | kali    | 3            | 3     | 3      | 2         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.9.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.10.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD  | Persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat DPRD  | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.12.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD       | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.13.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat DPRD   | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.14.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD                        | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.15.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD                     | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| <b>4.4.</b> | <b>KECAMATAN</b>   |         |              |       |        |           |                  |
| 4.4.1.      | Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan   | persen  | 0,00         | 0,00  | 1,00   | 0,75      | Kecamatan        |
| 4.4.2.      | Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan                            | kali    | n/a          | n/a   | n/a    | 1         | Kecamatan        |
| 4.4.3.      | Jumlah Edukasi kebencanaan skala Kecamatan   | kali    | n/a          | n/a   | n/a    | 1         | Kecamatan        |
| 4.4.4.      | Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak  | persen  | n/a          | n/a   | n/a    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.5.      | Jumlah potensi unggulan kecamatan  | jenis   | n/a          | n/a   | n/a    | 49        | Kecamatan        |
| 4.4.6.      | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya  | desa    | n/a          | n/a   | n/a    | 76        | Kecamatan        |
| 4.4.7.      | Indeks Kepuasan Masyarakat   | nilai   | n/a          | n/a   | n/a    | 80,57     | Kecamatan        |
| 4.4.8.      | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | persen  | n/a          | n/a   | n/a    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.9.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan        | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.10.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan   | Persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kecamatan   | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.12.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan              | persen  | 100          | 100   | 101,00 | 100       | Kecamatan        |



| NO.     | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--------|--------------|------|--------|-----------|------------------|
|         |   |        | 2017         | 2018 | 2019   | 2019      |                  |
| 4.4.13. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kecamatan                 | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.14. | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan    | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.15. | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kecamatan | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Tabel 8.5  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2021

| NO.                            | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN  | KONDISI AWAL |        | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------------------------|---|---------|--------------|--------|--------|-----------|------------------|
|                                |   |         | 2017         | 2018   | 2020   | 2020      |                  |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |   |         |              |        |        |           |                  |
| <b>1</b>                       | Nilai Tukar Petani  | Persen  | n/a          | 99,67  | 101,31 | 101,31    | Distankan        |
| <b>2</b>                       | Angka Kriminalitas yang tertangani  | Poin    | 2,15         | 1,86   | 1,90   | 1,90      | Satpol PP        |
| <b>3</b>                       | Rasio Ketergantungan  | Persen  | n/a          | 43,19  | 46,72  | 46,72     | Disdukcapil      |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>    |   |         |              |        |        |           |                  |
| <b>1.</b>                      | <b>PELAYANAN URSAN WAJIB</b>  |         |              |        |        |           |                  |
| <b>1.1.</b>                    | <b>PENDIDIKAN</b>   |         |              |        |        |           |                  |
| 1.1.1.                         | Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin  | Persen  | n/a          | 45,46  | 41,73  | 100       | Disdik           |
| 1.1.2.                         | APK SD/MI   | persen  | 103,90       | 104,30 | 104,90 | 104,00    | Disdik           |
| 1.1.3.                         | APK SMP/MTs   | persen  | 99,92        | 99,92  | 101,2  | 99,89     | Disdik           |
| 1.1.4.                         | APK PAUD  | persen  | 63,91        | 64,79  | 65,49  | 86,4      | Disdik           |
| 1.1.5.                         | Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C  | persen  | 24,11        | 37,43  | 38,53  | 87,00     | Disdik           |
| 1.1.6.                         | Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi   | lembaga | 5            | 2      | 5      | 36        | Disdik           |
| 1.1.7.                         | Terpenuhinya Ruang Guru   | persen  | 97,03        | 93,49  | 93,88  | 100       | Disdik           |
| 1.1.8.                         | Terpenuhinya Ruang Kelas  | persen  | 82,33        | 81,72  | 83,50  | 100       | Disdik           |
| 1.1.9.                         | Terpenuhinya Ruang Laboratorium   | persen  | 31,73        | 30,84  | 32,00  | 30,00     | Disdik           |
| 1.1.10.                        | Persentase Pendidik yang memenuhi Kualifikasi S1/D4   | persen  | 92,70        | 92,86  | 93,90  | 99,32     | Disdik           |
| 1.1.11.                        | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih  | persen  | n/a          | n/a    | 20,00  | 86,00     | Disdik           |
| 1.1.12.                        | Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi  | persen  | n/a          | n/a    | 50,00  | 92,00     | Disdik           |
| 1.1.13.                        | Persentase Satuan Pendidikan Berstandar Nasional  | persen  | 91,47        | 96,36  | 96,75  | 0,00      | Disdik           |
| 1.1.14.                        | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pendidikan | persen  | 100          | 100    | 100    | 100       | Disdik           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |   |          | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 1.1.15.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan  | Persen   | 100          | 100   | 100    | 98,57     | Disdik           |
| 1.1.16.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendidikan  | persen   | 100          | 100   | 100    | 70,00     | Disdik           |
| 1.1.17.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan   | persen   | 100          | 100   | 100    | 207       | Disdik           |
| 1.1.18.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pendidikan   | persen   | 94,70        | 92,95 | 97,00  | 100       | Disdik           |
| 1.1.19.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdik           |
| 1.1.20.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pendidikan   | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Disdik           |
| <b>1.2.</b> | <b>KESEHATAN</b>  |          |              |       |        |           |                  |
| 1.2.1.      | Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun  | unit     | 0            | 0     | 0      | 1         | Dinkes           |
| 1.2.2.      | Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun  | unit     | 1            | 0     | 2      | 2         | Dinkes           |
| 1.2.3.      | Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN   | keluarga | n/a          | n/a   | 75.140 | 494.453   | Dinkes           |
| 1.2.4.      | Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar   | persen   | 75,51        | 78,65 | 82,00  | 90,60     | Dinkes           |
| 1.2.5.      | Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda   | persen   | 27,27        | 30,30 | 63,64  | 100       | Dinkes           |
| 1.2.6.      | Terpenuhinya SPM Kesehatan poin 1-5, 7  | persen   | 0,00         | 0,00  | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.6.      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka   | nilai    | n/a          | 78,00 | 80,00  | 65,26     | RSUD Majalengka  |
| 1.2.7.      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres  | nilai    | n/a          | 72,00 | 75,00  | 78,78     | RSUD Cideres     |
| 1.2.9.      | Terpenuhinya standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar   | persen   | 82,5         | 93,75 | 42,42  | 54,54     | Dinkes           |
| 1.2.9.      | Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi   | persen   | 87,50        | 87,50 | 100    | 97,07     | Dinkes           |
| 1.2.10.     | Tersedianya Regulasi Kesehatan  | persen   | 3,00         | 1,00  | 1,00   | 1,00      | Dinkes           |
| 1.2.11.     | Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin esensial Puskesmas   | persen   | 66,12        | 45,08 | 85,00  | 75,33     | Dinkes           |
| 1.2.12.     | Terpenuhinya alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar  | persen   | 25,10        | 23,30 | 42,42  | 42,42     | Dinkes           |
| 1.2.13.     | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan   | persen   | 0,00         | -     | 30,30  | 25,00     | Dinkes           |
| 1.2.13.     | Terselenggaranya SJSN dengan peserta mencapai UHC   | persen   | 0,00         | 41,41 | 80,00  | 71,38     | Dinkes           |
| 1.2.15.     | Terselenggaranya peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan tingkat primer dan sekunder   | persen   | 0,00         | -     | 100    | 90,00     | Dinkes           |
| 1.2.15.     | menurunnya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dan persentase ibu hamil kurang energi kronik | persen   | 0,00         | 1,97  | 2,50   | 3,06-4,41 | Dinkes           |
| 1.2.16.     | Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja   | persen   | 0,00         | 5,50  | 73,00  | 90,61     | Dinkes           |
| 1.2.17.     | Terpenuhinya SPM Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit   | persen   | 0,00         | -     | 100    | 80,00     | Dinkes           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |   |        | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 1.2.18.     | Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) dan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit tidak menular | persen | 0,00         | -     | 95,00  | 80,00     | Dinkes           |
| 1.2.20.     | Meningkatnya indeks Keluarga Sehat  | persen | 50,00        | 56,00 | 65,00  | 0,101     | Dinkes           |
| 1.2.21.     | Meningkatnya PHBS di semua Tatanan  | persen | 54,58        | 55,00 | 65,00  | 80,1      | Dinkes           |
| 1.2.21.     | Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat   | persen | 0            | -     | 15,00  | 69,68     | Dinkes           |
| 1.2.23.     | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar   | persen | n/a          | n/a   | 86,00  | 100       | RSUD Majalengka  |
| 1.2.24.     | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun   | Orang  | n/a          | n/a   | 174    | 834/100   | RSUD Majalengka  |
| 1.2.25.     | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar   | Orang  | n/a          | n/a   | 62     | 736       | RSUD Cideres     |
| 1.2.26.     | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun   | Orang  | n/a          | N/A   | 482    | 256       | RSUD Cideres     |
| 1.2.28.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kesehatan  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.29.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan   | Persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.30.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kesehatan   | persen | 100          | 100   | 90,00  | 63,00     | Dinkes           |
| 1.2.31.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan  | persen | 100          | 100   | 90,00  | 129       | Dinkes           |
| 1.2.32.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Majalengka  | persen | 0,00         | 65,00 | 9,00   | 86,30     | RSUD Majalengka  |
| 1.2.32.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres   | persen | 0,009        | 65,00 | 15,00  | 100       | RSUD Cideres     |
| 1.2.34.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan  | persen | 90,00        | 90,00 | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.35.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan   | persen | 80,00        | 80,00 | 100    | 100       | Dinkes           |
| 1.2.36.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan  | persen | 100          | 100   | 100    | 0,00      | Dinkes           |
| 1.2.37.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan  | Niali  | CC           | CC    | B      | B         | RSUD Majalengka  |
| 1.2.38.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan   | persen | 90,00        | 90,00 | 100    | 100       | RSUD Majalengka  |
| 1.2.39.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan  | Nilai  | CC           | CC    | B      | 0,97      | RSUD Cideres     |
| 1.2.40.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan   | persen | 90,00        | 90,00 | 100    | 100       | RSUD Cideres     |
| <b>1.3.</b> | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  |        |              |       |        |           |                  |
| 1.3.1.      | Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan  | persen | 0,00         | 5,00  | 7,04   | 7,04      | Dinas PUPR       |
| 1.3.2.      | Tingkat Kelayakan Jalan   | persen | 0,00         | 83,00 | 83,52  | 83,90     | Dinas PUPR       |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |        | TARGET     | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------|--------------|--------|------------|-----------|------------------|
|             |   |        | 2017         | 2018   | 2020       | 2020      |                  |
| 1.3.3.      | Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kebinamargaan   | persen | 0,00         | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.3.      | Tingkat Kelayakan Jalan   | persen | 0,00         | 83,00  | 83,52      | 83,90     | Dinas PUPR       |
| 1.3.4.      | Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB  | persen | 0,00         | 6,26   | 6,66       | 76,77     | Dinas PUPR       |
| 1.3.5.      | Jumlah Taman Kota yang terbangun  | unit   | 0            | 1      | 3          | 3         | Dinas PUPR       |
| 1.3.6.      | Persentase Jaringan dalam kondisi baik  | persen | 67,87        | 68,80  | 69,40      | 554.904   | Dinas PUPR       |
| 1.3.7.      | Volume Air Tertampung   | m3     | 0,00         | 0,00   | 238.700,00 | 33.770,18 | Dinas PUPR       |
| 1.3.8.      | Debit Air Termanfaatkan   | ltr/d  | 0,00         | 0,00   | 8.676,80   | 6,61      | Dinas PUPR       |
| 1.3.9.      | Tertanganinya titik sungai kritis   | persen | 0,00         | 0,00   | 6,61       | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.9.      | Jumlah Pedoman Tata Ruang   | persen | 0,00         | 0,00   | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.10.     | Persentase Kesesuaian Peruntukan Fungsi Lahan   | persen | 0,00         | 0,00   | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.11.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas BMCK  | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.12.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK   | Persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.13.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas BMCK   | persen | 100          | 100    | 100        | 1,00      | Dinas PUPR       |
| 1.3.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK        | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.15.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas BMCK  | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.16.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas BMCK                                 | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.17.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas BMCK                              | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PUPR       |
| 1.3.18.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas PPSDA | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.19.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA  | Persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.21.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas PPSDA  | persen | 100          | 100    | 100        | 1,00      | Dinas PKPP       |
| 1.3.21.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA       | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.23.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas PPSDA   | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PKPP       |
| 1.3.24.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas PPSDA                                | persen | 100          | 100    | 100        | 100       | Dinas PKPP       |
| <b>1.4.</b> | <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>  |        |              |        |            |           |                  |
| 1.4.1.      | Cakupan pelayanan Air Bersih  | persen | 76,73        | 80,16  | 80,67      | 80,05     | Dinas PUPR       |
| 1.4.2.      | Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin   | Persen | -            | -      | 5,20       | 1224      | Dinas PKPP       |
| 1.4.3.      | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik  | persen | 61,25        | 68,36  | 69,02      | 69,61     | Dinas PKPP       |
| 1.4.3.      | Persentase Kawasan Kumuh  | km     | 221,87       | 242,87 | 294,80     | 0         | Dinas PUPR       |
| 1.4.4.      | Persentase Rumah Tidak Layak Huni   | persen | 1,02         | -      | 74,80      | 16,32     | Dinas PKPP       |
| <b>1.5.</b> | <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>   |        |              |        |            |           |                  |



| NO.     | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--------|--------------|------|--------|-----------|------------------|
|         |   |        | 2017         | 2018 | 2020   | 2020      |                  |
| 1.5.1.  | Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum   | kali   | 12           | 12   | 12     | 48        | Satpol PPPK      |
| 1.5.2.  | Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum  | kali   | 12           | 12   | 12     | 7         | Bakesbangpol     |
| 1.5.3.  | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada   | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.4.  | Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas  | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.5.  | Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompoten  | orang  | 287          | 287  | 287    | 287       | Satpol PPPK      |
| 1.5.6.  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran   | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.7.  | Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana  | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.8.  | Persentase tanggap bencana  | persen | 100          | -    | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.9.  | Tingkat Penanganan darurat bencana  | persen | 100          | -    | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.10. | Tingkat Pemulihan pasca bencana   | persen | 10,00        | -    | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.11. | Jumlah isu/Konflik SARA   | Kasus  | -            | -    | -      | -         | Bakesbangpol     |
| 1.5.12. | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP                           | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.13. | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP  | Persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.14. | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Satpol PP  | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.15. | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP                                 | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.16. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Satpol PP   | persen | 100          | 100  | 100    | 24,00     | Satpol PPPK      |
| 1.5.17. | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Satpol PP  | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.18. | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Satpol PP   | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Satpol PPPK      |
| 1.5.19. | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.20. | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | Persen | 100          | 100  | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.21. | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | persen | 100          | 100  | 100    | 60        | BPBD             |
| 1.5.22. | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah       | persen | 100          | 100  | 100    | 66        | BPBD             |
| 1.5.23. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.24. | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | BPBD             |
| 1.5.25. | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah                             | persen | 100          | 100  | 100    | 80        | BPBD             |
| 1.5.26. | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik         | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Bakesbangpol     |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN       | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |   |              | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 1.5.27.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik  | Persen       | 100          | 100   | 100    | 85,70     | Bakesbangpol     |
| 1.5.28.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik  | persen       | 100          | 100   | 100    | 99,55     | Bakesbangpol     |
| 1.5.29.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik | persen       | 100          | 100   | 100    | 99,55     | Bakesbangpol     |
| 1.5.30.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik                                       | persen       | 100          | 100   | 100    | 99,44     | Bakesbangpol     |
| 1.5.31.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik                          | persen       | 100          | 100   | 100    | 90,58     | Bakesbangpol     |
| 1.5.32.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik                       | persen       | 100          | 100   | 100    | 96,00     | Bakesbangpol     |
| <b>1.6.</b> | <b>SOSIAL</b>   |              |              |       |        |           |                  |
| 1.6.1.      | Persentase masyarakat miskin yang dimonev   | persen       | -            | -     | 100    | 137.105   | Dinsos           |
| 1.6.2.      | Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial   | Rumah Tangga | 3.563        | 4.213 | 307    | 559.470   | Dinsos           |
| 1.6.3.      | Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"  | orang        | -            | -     | 500    | 830       | Dinsos           |
| 1.6.4.      | Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri  | Kube         | 112          | 112   | 128    | 10        | Dinsos           |
| 1.6.5.      | Jumlah PMKS yang dibantu  | orang        | 5.145        | 5.945 | 270    | 4.788     | Dinsos           |
| 1.6.6.      | Jumlah Kelembagaan Sosial (PSKS) Yang Diperdayakan  | lembaga      | -            | -     | 157    | 15        | Dinsos           |
| 1.6.7.      | Persentase Korban Bencana Yang Ditangani  | orang        | 100          | 100   | 100    | 808       | Dinsos           |
| 1.6.8.      | Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana  | orang        | 60           | 60    | 361    | 743       | Dinsos           |
| 1.6.9.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Sosial         | persen       | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.10.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100   | 100    | 83,00     | Dinsos           |
| 1.6.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100   | 100    | 66,00     | Dinsos           |
| 1.6.12.     | Persentase Sasaran dan Prasaran Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial                        | persen       | 100          | 100   | 100    | 53,00     | Dinsos           |
| 1.6.13.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial   | persen       | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinsos           |
| 1.6.14.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Sosial  | persen       | 100          | 100   | 100    | 83,00     | Dinsos           |
| 1.6.15.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Sosial                                     | persen       | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinsos           |
| <b>1.7.</b> | <b>TENAGA KERJA</b>   |              |              |       |        |           |                  |
| 1.7.1.      | Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri   | RTS          | n/a          | -     | 500    | 40        | Dinas K3UKM      |
| 1.7.2.      | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan   | Persen       | n/a          | 23,65 | 22,72  | 49,41     | Dinas K3UKM      |
| 1.7.3.      | Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan  | Persen       | n/a          | 60,00 | 225,00 | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.4.      | Persentase Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)                          | Persen       | n/a          | n/a   | 75,00  | 80,00     | Dinas K3UKM      |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL |      | TARGET  | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------|--------------|------|---------|-----------|------------------|
|             |   |          | 2017         | 2018 | 2020    | 2020      |                  |
| 1.7.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian   | Persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian   | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                      | persen   | 100          | 100  | 100     | 1,00      | Dinas K3UKM      |
| 1.7.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian  | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian   | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.7.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian  | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas K3UKM      |
| <b>1.8.</b> | <b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |          |              |      |         |           |                  |
| 1.8.1.      | Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri  | KK       | n/a          | n/a  | 600     | 200       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.2.      | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG  | Persen   | n/a          | n/a  | 40,00   | 37,40     | Dinas P3AKB      |
| 1.8.3.      | Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak  | Kategori | n/a          | n/a  | Pratama | Pratama   | Dinas P3AKB      |
| 1.8.4.      | Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan   | Persen   | n/a          | n/a  | 10,00   | 0,0049    | Dinas P3AKB      |
| 1.8.5.      | Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak  | Persen   | n/a          | n/a  | 10,00   | 0,01      | Dinas P3AKB      |
| 1.8.6.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.7.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  | Persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.8.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.9.      | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana           | Unit     | 128          | 128  | 205     | 125       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.10.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana   | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |
| 1.8.11.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                | persen   | 100          | 100  | 100     | 100       | Dinas P3AKB      |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|----------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|              |   |          | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 1.8.12.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas P3AKB      |
| <b>1.9.</b>  | <b>PANGAN</b>   |          |              |       |        |           |                  |
| 1.9.1.       | Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)  | desa     | -            | 18    | 4      | 4         | DKPPP            |
| 1.9.2.       | Persentase Peningkatan skor PPH   | persen   | -            | 87,33 | 1,00   | 93,80     | DKPPP            |
| 1.9.3.       | Jumlah Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna   | kelompok | -            | -     | 50     | 31        | DKPPP            |
| 1.9.4.       | Jumlah Pusat Pelayanan Penyuluhan Pertanian   | Unit     | -            | 80    | 25     | 26        | DKPPP            |
| 1.9.5.       | Ketersediaan energi dan protein perkapita   | persen   | -            | 62,58 | 63,94  | 88,40     | DKPPP            |
| 1.9.6.       | Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10$ dan pasokan pangan   | Persen   | -            | 99,00 | 100    | 100       | DKPPP            |
| 1.9.7.       | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pangan                               | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | DKPPP            |
| 1.9.8.       | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan  | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | DKPPP            |
| 1.9.9.       | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pangan  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | DKPPP            |
| 1.9.10.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan                                     | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | DKPPP            |
| 1.9.11.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pangan   | persen   | 100          | 100   | 85,00  | 100       | DKPPP            |
| 1.9.12.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pangan  | persen   | 100          | 100   | 85,00  | 100       | DKPPP            |
| 1.9.13.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pangan   | persen   | 100          | 100   | 85,00  | 100       | DKPPP            |
| <b>1.10.</b> | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>   |          |              |       |        |           |                  |
| 1.10.1.      | Cakupan Pelayanan Persampahan   | persen   | 1,83         | 1,83  | 1,91   | 1,90      | Dinas LH         |
| 1.10.2.      | Cakupan Pelayanan penanganan limbah   | persen   | 0,17         | 0,17  | 7,17   | 0,39      | Dinas LH         |
| 1.10.3.      | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di permukiman kumuh   | unit     | -            | -     | 535    | 0         | Dinas LH         |
| 1.10.4.      | Tingkat Kualitas Lingkungan   | poin     | 60,97        | 60,97 | 1,50   | 43,83     | Dinas LH         |
| 1.10.5.      | Persentase Ruang Terbuka Hijau yang tertata   | persen   | 63,48        | 100   | 100    | 30,97     | Dinas LH         |
| 1.10.6.      | Tingkat Pelayanan Persampahan   | persen   | 10,40        | 10,40 | 3,50   | 10,46     | Dinas LH         |
| 1.10.7.      | Persentase Luas Tutupan Lahan   | persen   | 31,04        | 31,04 | 0,01   | 31,06     | Dinas LH         |
| 1.10.8.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Lingkungan Hidup                     | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.9.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup  | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.10.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Lingkungan Hidup  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas LH         |
| 1.10.11.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup                           | persen   | 100          | 100   | 100    | 6,00      | Dinas LH         |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN    | KONDISI AWAL |         | TARGET  | REALISASI                    | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|-----------|--------------|---------|---------|------------------------------|------------------|
|              |   |           | 2017         | 2018    | 2020    | 2020                         |                  |
| 1.10.12.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Lingkungan Hidup   | persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Dinas LH         |
| 1.10.13.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup  | persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Dinas LH         |
| 1.10.14.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup   | persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Dinas LH         |
| <b>1.11.</b> | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>   |           |              |         |         |                              |                  |
| 1.11.1.      | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  | Nilai     | 70,70        | 77,22   | 81,60   | 81,75                        | Disdukcapil      |
| 1.11.2.      | Prosentase distribusi dok kependudukan melalui PT. Pos Indonesia  | Persen    | -            | -       | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.3.      | Prosentase sinergitas Sistem Administrasi kependudukan (SAK)  | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.4.      | Persentase Pengelolaan SIAK tingkat Kecamatan/ Kabupaten  | persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.5.      | Prosentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan   | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.6.      | Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak   | Persen    | 46,44        | 46,53   | 62,56   | 35,01                        | Disdukcapil      |
| 1.11.7.      | Prosentase Pelayanan Pindah/Datang penduduk   | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.8.      | Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian  | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.9.      | Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Dokumen   | -            | 9       | 57      | 25                           | Disdukcapil      |
| 1.11.10.     | Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan  | Persen    | -            | 100     | 100     | 25                           | Disdukcapil      |
| 1.11.11.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.12.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.13.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                          | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| 1.11.14.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       | Persen    | 100          | 100     | 100     | 100                          | Disdukcapil      |
| <b>1.12.</b> | <b>PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |           |              |         |         |                              |                  |
| 1.12.1.      | Jumlah Pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat   | Orang     | -            | -       | 180     | 0                            | Dinas PMD        |
| 1.12.2.      | Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan   | Persen    | 40,00        | 50,00   | 60,00   | 58,30                        | Dinas PMD        |
| 1.12.3.      | Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes  | persen    | 15,00        | 25,00   | 45,00   | 56,76                        | Dinas PMD        |
| 1.12.4.      | Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan desa  | Persen    | 45,00        | 50,00   | 55,00   | 59,8                         | Dinas PMD        |
| 1.12.5.      | Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif   | Unit      | -            | 43      | 60      | 60                           | Dinas PMD        |
| 1.12.6.      | Prosentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa   | persen    | -            | -       | 100     | 100                          | Dinas PMD        |
| 1.12.7.      | Persentase PADes terhadap APBDes  | Persen    | 20,00        | 10,00   | 12,00   | 12,25                        | Dinas PMD        |
| 1.12.8.      | Jumlah meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat  | Rp. (000) | n/a          | 300.000 | 725.600 | (688.400-524.640)<br>163.760 | Dinas PMD        |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |          | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|--------|--------------|----------|--------|-----------|------------------|
|              |   |        | 2017         | 2018     | 2020   | 2020      |                  |
| 1.12.9.      | Jumlah infrastruktur posyandu yang di bangun  | unit   | -            | 5        | 5      | 3         | Dinas PMD        |
| 1.12.10.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.11.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | Persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.12.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.13.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa       | persen | 100          | 100      | 100    | 6,00      | Dinas PMD        |
| 1.12.14.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.15.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                | persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| 1.12.16.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                             | persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dinas PMD        |
| <b>1.13.</b> | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |        |              |          |        |           |                  |
| 1.13.1.      | Cakupan Angka Total Fertility Rate  | Point  | 2,16         | 2,16     | 2,14   | 2,32      | Dinas P3AKB      |
| 1.13.2.      | Rata-rata Usia Perkawinan   | Tahun  | 18,50        | 18,70    | 19,60  | 20,00     | Dinas P3AKB      |
| 1.13.3.      | Menurunnya Tingkat Perceraian   | Kasus  | 4.311,00     | 4.652,00 | 2,50   | 4701      | Dinas P3AKB      |
| <b>1.14.</b> | <b>PERHUBUNGAN</b>  |        |              |          |        |           |                  |
| 1.14.1.      | Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan  | persen | 65,00        | 65,00    | 70,00  | 70,00     | Dishub           |
| 1.14.2.      | Persentase Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  | persen | 25,00        | 37,20    | 41,64  | 41,64     | Dishub           |
| 1.14.3.      | Prosentasi Capaian Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum   | persen | 50,40        | 50,40    | 70,00  | 70,00     | Dishub           |
| 1.14.4.      | Prosentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor  | persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perhubungan                      | persen | 100          | 100      | 100    | 93,43     | Dishub           |
| 1.14.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan   | Persen | 100          | 100      | 100    | 100       | Dishub           |
| 1.14.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perhubungan   | persen | 100          | 100      | 100    | 76,20     | Dishub           |
| 1.14.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan                            | persen | 100          | 100      | 100    | 92,39     | Dishub           |
| 1.14.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perhubungan  | persen | 100          | 100      | 100    | 1.451     | Dishub           |
| 1.14.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan   | persen | 100          | 100      | 100    | 95,83     | Dishub           |
| 1.14.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan  | persen | 100          | 100      | 100    | 94,63     | Dishub           |
| <b>1.15.</b> | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |        |              |          |        |           |                  |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL |        | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|----------|--------------|--------|--------|-----------|------------------|
|              |   |          | 2017         | 2018   | 2020   | 2020      |                  |
| 1.15.1.      | Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi  | aplikasi | -            | -      | 11     | 11        | Diskominfo       |
| 1.15.2.      | Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah   | buah     | n/a          | n/a    | 159    | 14        | Diskominfo       |
| 1.15.3.      | Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik  | unit     | n/a          | n/a    | 82     | 82        | Diskominfo       |
| 1.15.4.      | Jumlah Desa Teknologi, informasi dan komunikasi (Destika)   | desa     | -            | -      | 61     | 61        | Diskominfo       |
| 1.15.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan   | Persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika  | Persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika               | persen   | 100          | 100    | 100    | 2,00      | Diskominfo       |
| 1.15.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika   | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Diskominfo       |
| 1.15.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika                                     | persen   | 100          | 100    | 100    | 80,00     | Diskominfo       |
| <b>1.16.</b> | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>   |          |              |        |        |           |                  |
| 1.16.1.      | Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin   | persen   | N/A          | N/A    | 3,00   | 1,03      | Dinas K3UKM      |
| 1.16.2.      | Peningkatan Volume pelaku Usaha Mikro   | persen   | N/A          | N/A    | 5,00   | 1,03      | Dinas K3UKM      |
| 1.16.3.      | Jumlah Produk berbahan baku lokal yang dikembangkan   | produk   | 10           | 10     | 10     | 5         | Dinas K3UKM      |
| 1.16.4.      | Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemasaran produk lokal usaha mikro  | unit     | N/A          | N/A    | 3      | 1         | Dinas K3UKM      |
| 1.16.5.      | Persentase Koperasi Aktif   | persen   | n/a          | 133,00 | 7,00   | 37,40     | Dinas K3UKM      |
| 1.16.6.      | Jumlah koperasi yang dapat menyusun laporan keuangan  | koperasi | n/a          | 133    | 10     | 127       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.7.      | Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti pelatihan pengawasan  | orang    | -            | -      | 100    | 0         | Dinas K3UKM      |
| 1.16.8.      | Koperasi yang melaksanakan RAT  | Koperasi | 164          | 164    | 164    | 127       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.9.      | Jumlah Koperasi baru  | Koperasi | 1            | 12     | 10     | 44        | Dinas K3UKM      |
| 1.16.10.     | Jumlah Bidang Usaha Koperasi  | Koperasi | 2            | 2      | 5      | 4         | Dinas K3UKM      |
| 1.16.11.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.12.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.13.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah       | persen   | 100          | 100    | 100    | 1,00      | Dinas K3UKM      |
| 1.16.15.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | persen   | 100          | 100    | 100    | 100       | Dinas K3UKM      |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN     | KONDISI AWAL       |                    | TARGET             | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|
|              |  |            | 2017               | 2018               | 2020               | 2020      |                  |
| 1.16.16.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | Dinas K3UKM      |
| 1.16.17.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | Dinas K3UKM      |
| <b>1.17.</b> | <b>PENANAMAN MODAL</b>   |            |                    |                    |                    |           |                  |
| 1.17.1.      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan  | nilai      | 79,74              | 80,05              | 82,92              | 83,18     | DPMPTSP          |
| 1.17.2.      | Regulasi Pelayanan Perizinan   | Regulasi   | 6,00               | 6,00               | 2,00               | 2,00      | DPMPTSP          |
| 1.17.3.      | Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu   | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.4.      | Nilai Realisasi Investasi  | milyar     | 629,364 M          | 1,288 T            | 380,00             | 2,4T      | DPMPTSP          |
| 1.17.5.      | Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan ruang   | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.6.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Penanaman Modal | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.7.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal  | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.8.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal  | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.9.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal       | persen     | 100                | 100                | 100                | 41,00     | DPMPTSP          |
| 1.17.10.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Penanaman Modal   | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.11.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal                                | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| 1.17.12.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal                             | persen     | 100                | 100                | 100                | 100       | DPMPTSP          |
| <b>1.18.</b> | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>  |            |                    |                    |                    |           |                  |
| 1.18.1.      | Jumlah prestasi masyarakat di bidang Olahraga  | prestasi   | 54                 | 38                 | 55                 | 2         | Dispora          |
| 1.18.2.      | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga  | Jiwa       | 650                | 700                | 1.200              | 500       | Dispora          |
| 1.18.3.      | Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlit yang dibina   | Jiwa       | 13                 | 13                 | 58                 | 75        | Dispora          |
| 1.18.4.      | Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yang dibina  | Kompetisi  | 12 jenis 25 cabang | 12 jenis 26 cabang | 17 jenis 30 cabang | 12        | Dispora          |
| 1.18.5.      | Jumlah Pemuda Pelopor Terpilih dan yang mengikuti even di tingkat provinsi   | Jiwa       | 1                  | 1                  | 3                  | 3         | Dispora          |
| 1.18.6.      | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina   | Organisasi | 45                 | 45                 | 48                 | 0         | Dispora          |
| 1.18.7.      | Peningkatan Pemahaman Baris-Berbaris dan Cakupan Penjaringan Calon Paskibra  | Jiwa       | 34                 | 34                 | 68                 | 34        | Dispora          |
| 1.18.8.      | Jumlah Pemuda Berwirausaha   | Jiwa       | 20                 | 20                 | 50                 | 6         | Dispora          |
| 1.18.9.      | Peningkatan Pemahaman Pemuda Berwirausaha  | Jiwa       | 20                 | 20                 | 200                | 0         | Dispora          |
| 1.18.10.     | Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga  | Unit       | 3                  | 6                  | 3                  | 2         | Dispora          |
| 1.18.11.     | Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi  | Unit       | 1                  | 2                  | 2                  | 3         | Dispora          |
| 1.18.12.     | Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga   | Unit       | 7                  | 7                  | 5                  | 3         | Dispora          |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | TARGET    | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|---|---------|--------------|-------|-----------|-----------|------------------|
|              |   |         | 2017         | 2018  | 2020      | 2020      |                  |
| 1.18.13.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga    | persen  | 100          | 100   | 100       | 80        | Dispora          |
| 1.18.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga          | Persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Dispora          |
| 1.18.15.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga   | Persen  | 100          | 100   | 100       | 90,00     | Dispora          |
| 1.18.16.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga   | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Dispora          |
| 1.18.17.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga  | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Dispora          |
| 1.18.18.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                   | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Dispora          |
| 1.18.19.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                | persen  | 100          | 100   | 100       | 80,00     | Dispora          |
| <b>1.19.</b> | <b>STATISTIK</b>  |         |              |       |           |           |                  |
| 1.19.1.      | Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik  | unit    | 5            | 5     | 5         | 5         | Diskominfo       |
| 1.19.2.      | Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah   | dokumen | 10           | 10    | 10        | 10        | Diskominfo       |
| <b>1.20.</b> | <b>KEBUDAYAAN</b>   |         |              |       |           |           |                  |
| 1.20.1.      | Presentase prestasi masyarakat di bidang Seni Budaya  | persen  | 20,00        | 20,00 | 20,00     | 100       | Disparbud        |
| 1.20.2.      | Jumlah event seni dan budaya  | kali    | 2            | 2     | 37        | 2         | Disparbud        |
| 1.20.3.      | Jumlah Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan   | buah    | 100          | 100   | 125       | 2         | Disparbud        |
| <b>1.21.</b> | <b>PERPUSTAKAAN</b>   |         |              |       |           |           |                  |
| 1.21.1.      | Rasio Kunjungan perpustakaan per tahun  | poin    | 100          | 100   | 30.000,00 | 27,63     | Diskapus         |
| <b>1.22.</b> | <b>KEARSIPAN</b>  |         |              |       |           |           |                  |
| 1.22.1.      | Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan  | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Diskapus         |
| 1.22.2.      | Persentase arsip statis yang diselamatkan   | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Diskapus         |
| 1.22.3.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Diskapus         |
| 1.22.4.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  | Persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Diskapus         |
| 1.22.5.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan  | Persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Diskapus         |
| 1.22.6.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan       | persen  | 100          | 100   | 100       | 9,00      | Diskapus         |
| 1.22.7.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan   | persen  | 100          | 100   | 100       | 22,00     | Diskapus         |
| 1.22.8.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan                                | persen  | 100          | 100   | 100       | 100       | Diskapus         |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN                     | KONDISI AWAL |            | TARGET    | REALISASI  | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|--|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|
|             |  |                            | 2017         | 2018       | 2020      | 2020       |                  |
| 1.22.9.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan                            | persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Diskapus         |
| <b>2.</b>   | <b>URUSAN PILIHAN</b>  |                            |              |            |           |            |                  |
| <b>2.1.</b> | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |                            |              |            |           |            |                  |
| 2.1.1.      | Jumlah Produksi Ikan Mas   | Ton                        | 1.412,22     | 1.242,79   | 24,86     | 1.338,39   | DKPPP            |
| 2.1.2.      | Jumlah Produksi Ikan Nila  | Ton                        | 4.157,09     | 3.868,15   | 77,36     | 3.939,94   | DKPPP            |
| 2.1.3.      | Jumlah Produksi Ikan Lele  | Ton                        | 1.662,23     | 1.427,38   | 28,55     | 1.486,00   | DKPPP            |
| 2.1.4.      | Jumlah Produksi Ikan Gurame  | Ton                        | 890,47       | 853,44     | 17,07     | 893,65     | DKPPP            |
| 2.1.5.      | Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat   | kelompok                   | 21           | 23         | 3         | 5          | DKPPP            |
| 2.1.6.      | Jumlah omzet pemasaran produk perikanan  | Rupiah                     | n/a          | 23.312.000 | 466.240   | 24.320.000 | DKPPP            |
| <b>2.2.</b> | <b>PARIWISATA</b>  |                            |              |            |           |            |                  |
| 2.2.1.      | Jumlah destinasi wisata layak kunjung  | unit                       | 2            | 2          | 2         | 186        | Disparbud        |
| 2.2.2.      | Jumlah Kunjungan Event   | orang                      | N/A          | N/A        | 30.000,00 | 12.500     | Disparbud        |
| 2.2.3.      | Jumlah Industri Kreatif sub sektor kriya   | unit                       | N/A          | N/A        | 11        | 69         | Disparbud        |
| 2.2.4.      | Jumlah Industri Kreatif sub sektor kuliner   | unit                       | N/A          | N/A        | 5.000     | 19         | Disparbud        |
| 2.2.5.      | Jumlah Desa Wisata   | desa                       | 1            | 1          | 1         | 1          | Disparbud        |
| 2.2.6.      | Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan  | persen                     | n/a          | n/a        | 5,00      | 8,20       | Disparbud        |
| 2.2.7.      | Peningkatan PAD  | persen                     | 285,00       | 46,00      | 15,00     | 18,55      | Disparbud        |
| 2.2.8.      | Jumlah Pokdarwis   | kelompok                   | 4            | 5          | 15        | 20         | Disparbud        |
| 2.2.9.      | Jumlah Kerjasama Pariwisata yang dilakukan   | MOU                        | 1            | 2          | 2         | 5          | Disparbud        |
| 2.2.10.     | Sertifikasi/standarisasi Pariwisata  | buah                       | -            | 8          | 50        | 3          | Disparbud        |
| 2.2.11.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan | persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Disparbud        |
| 2.2.12.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  | Persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Disparbud        |
| 2.2.13.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan  | persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Disparbud        |
| 2.2.14.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan       | persen                     | 100          | 100        | 100       | 4,00       | Disparbud        |
| 2.2.15.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan   | persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Disparbud        |
| 2.2.16.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                                | persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Disparbud        |
| 2.2.17.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan                             | persen                     | 100          | 100        | 100       | 100        | Disparbud        |
| <b>2.3.</b> | <b>PERTANIAN</b>   |                            |              |            |           |            |                  |
| 2.3.1.      | Jumlah keluarga Petani miskin yang menjadi mandiri   | Rumah Tangga Sasaran (RTS) | N/A          | N/A        | 275       | 150        | DKPPP            |
| 2.3.2.      | Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (Ton)   | Persen                     | 37.705,00    | 31.981,00  | 1,50      | 35.167     | DKPPP            |
| 2.3.3.      | Persentase peningkatan produksi Cabai Besar (Ton)  | Persen                     | 12.452,00    | 13.053,00  | 1,50      | 7.283      | DKPPP            |
| 2.3.4.      | Persentase peningkatan produksi Kentang (Ton)  | Persen                     | 2.607,00     | 3.601,00   | 1,00      | 7.256      | DKPPP            |
| 2.3.5.      | Persentase peningkatan produksi Mangga (Ton)   | Persen                     | 60.007,50    | 44.754,69  | 1,50      | 52.210,60  | DKPPP            |



| NO.     | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL |            | TARGET   | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|----------|--------------|------------|----------|-----------|------------------|
|         |   |          | 2017         | 2018       | 2020     | 2020      |                  |
| 2.3.6.  | Persentase peningkatan produksi Jambu Biji (Ton)  | Persen   | 5.369,30     | 3.618,46   | 1,00     | 2.803,60  | DKPPP            |
| 2.3.7.  | Persentase peningkatan produksi Durian (Ton)  | Persen   | 5.150,60     | 11.263,47  | 1,00     | 8.889,90  | DKPPP            |
| 2.3.8.  | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Hortikultura                                   | Unit     | 211          | 371        | 15       | 2         | DKPPP            |
| 2.3.9.  | Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura           | meter    | N/A          | N/A        | 1.500,00 | 1.500,00  | DKPPP            |
| 2.3.10. | Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura   | meter    | N/A          | N/A        | 1.000,00 | 600,00    | DKPPP            |
| 2.3.11. | Persentase peningkatan produksi Jagung (Ton)  | Persen   | N/A          | 117.598,00 | 3,00     | 150.647   | DKPPP            |
| 2.3.12. | Persentase peningkatan produksi Padi (Ton)  | Persen   | N/A          | 667.110,00 | 3,00     | 724.834   | DKPPP            |
| 2.3.13. | Persentase peningkatan produksi Kedelai (Ton)   | Persen   | 916,00       | 2.264,00   | 3,00     | 4.977     | DKPPP            |
| 2.3.14. | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan                                 | Unit     | 120,00       | 195,00     | 25,00    | 232       | DKPPP            |
| 2.3.15. | Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan         | meter    | 8.750,00     | 9.500,00   | 1.500,00 | 4.442,90  | DKPPP            |
| 2.3.16. | Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan | meter    | N/A          | 3.000,00   | 1.000,00 | 1000,00   | DKPPP            |
| 2.3.17. | Persentase peningkatan produksi Kopi (Ton)  | Persen   | 830,87       | 217,74     | 2,00     | 1.317,90  | DKPPP            |
| 2.3.18. | Persentase peningkatan produksi Cengkeh (Ton)   | Persen   | 662,45       | 452,53     | 2,00     | 3.048,20  | DKPPP            |
| 2.3.19. | Persentase peningkatan produksi Teh (Ton)   | Persen   | 1.261,11     | 340,72     | 1,50     | 458,2     | DKPPP            |
| 2.3.20. | Persentase peningkatan produksi Tembakau (Ton)  | Persen   | 1.106,85     | 839,19     | 2,00     | 8.535,90  | DKPPP            |
| 2.3.21. | Persentase peningkatan produksi Tebu (Ton)  | Persen   | 39.333,63    | 148,58     | 1,50     | 25.115,80 | DKPPP            |
| 2.3.22. | Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Perkebunan                                     | Unit     | 1            | 2          | 10       | 1         | DKPPP            |
| 2.3.23. | Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi perkebunan     | meter    | N/A          | N/A        | 500,00   | 500,00    | DKPPP            |
| 2.3.24. | Persentase peningkatan produksi daging domba (Ton)  | Persen   | 1.534,94     | 1.535,00   | 2,50     | 1.745,09  | DKPPP            |
| 2.3.25. | Persentase peningkatan produksi daging ayam pedaging (Ton)  | Persen   | 24.352,44    | 24.358,49  | 2,50     | 23.391,75 | DKPPP            |
| 2.3.26. | Persentase peningkatan produksi telur (Ton)   | Persen   | 3.367,28     | 3.369,74   | 2,50     | 7.719,77  | DKPPP            |
| 2.3.27. | Persentase peningkatan produksi susu sapi (Ribuan Liter)  | Persen   | 1.388,44     | 1.392,42   | 2,50     | 1.700,15  | DKPPP            |
| 2.3.28. | Jumlah Pelaku Usaha Hortikultura dan Perkebunan penerima manfaat  | Kelompok | 201          | 221        | 4        | 3         | DKPPP            |
| 2.3.29. | Jumlah Pelaku Usaha Perternakan penerima manfaat  | Kelompok | 43           | 43         | 13       | 5         | DKPPP            |
| 2.3.30. | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian   | Persen   | 100          | 100        | 100      | 100       | DKPPP            |
| 2.3.31. | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian          | Persen   | 100          | 100        | 100      | 100       | DKPPP            |
| 2.3.32. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pertanian  | persen   | 100          | 100        | 100      | 100       | DKPPP            |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |   |          | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 2.3.33.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pertanian                                     | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | DKPPP            |
| 2.3.34.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pertanian                                  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | DKPPP            |
| <b>2.4.</b> | <b>PERDAGANGAN</b>  |          |              |       |        |           |                  |
| 2.4.1.      | Infrastruktur Perdagangan yang dibangun   | unit     | 44           | 44    | 4      | 1         | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.2.      | Meningkatnya nilai ekspor   | persen   | 20,00        | 30,00 | 20,00  | 20,00     | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.3.      | Persentase pertumbuhan pasar modern dan desa  | persen   | 3,00         | 12,00 | 5,00   | 10,40     | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.4.      | Pengendalian dan pengawasan perdagangan   | kali     | 96           | 96    | 96     | 96        | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.5.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perdagangan    | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.6.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan   | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.7.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perdagangan   | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.8.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan          | unit     | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.9.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perdagangan  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.10.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perdagangan                                   | persen   | 100          | 100   | 100    | 92,10     | Dinas PERDAGIN   |
| 2.4.11.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan                                | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Dinas PERDAGIN   |
| <b>2.5.</b> | <b>PERINDUSTRIAN</b>  |          |              |       |        |           |                  |
| 2.5.1.      | Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah  | Persen   | 9,34         | 2,64  | 2,50   | 2,50      | Dinas PERDAGIN   |
| 2.5.2.      | Jumlah Industri Pengolahan yang berdaya saing   | Unit IKM | N/A          | N/A   | 320    | 40        | Dinas PERDAGIN   |
| 2.5.3.      | Meningkatnya kompetensi Pelaku IKM  | orang    | N/A          | N/A   | 30     | 25        | Dinas PERDAGIN   |
| 2.5.4.      | Jumlah Sentra IKM   | unit     | 1,00         | 1,00  | -      | -         | Dinas PERDAGIN   |
| 2.5.5.      | Dokumen Rencana Pengembangan  | dokumen  | 1            | 1     | 2      | 2         | Dinas PERDAGIN   |
| <b>3.</b>   | <b>URUSAN PENUNJANG</b>   |          |              |       |        |           |                  |
| <b>3.1.</b> | <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  |          |              |       |        |           |                  |
| 3.1.1.      | Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | persen   | 100          | 100   | -      | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.2.      | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                  | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.3.      | Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan   | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.4.      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan   | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.5.      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | persen   | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |



| NO.          | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|--------------|--|--------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|              |  |        | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 3.1.6.       | Persentase dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan  | persen | 100          | 100   | 100    | 78,00     | Bappelitbangda   |
| 3.1.7.       | Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti   | persen | -            | -     | 100    | 98,50     | Bappelitbangda   |
| 3.1.8.       | Persentase Kesesuaian Peruntukan Pola ruang  | persen | -            | -     | 100    | 98,50     | Bappelitbangda   |
| 3.1.9.       | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | persen | 100          | 100   | 100    | 98,27     | Bappelitbangda   |
| 3.1.10.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.11.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | Persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.12.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | persen | 100          | 100   | 100    | 94,17     | Bappelitbangda   |
| 3.1.13.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah       | persen | 100          | 100   | 100    | 99,43     | Bappelitbangda   |
| 3.1.14.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah   | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | Bappelitbangda   |
| 3.1.15.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                | persen | 100          | 100   | 100    | 94,17     | Bappelitbangda   |
| 3.1.16.      | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                             | persen | 100          | 100   | 100    | 98,27     | Bappelitbangda   |
| <b>3.2..</b> | <b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>  |        |              |       |        |           |                  |
| 3.2.1.       | Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani  | persen | 100          | 100   | 100    | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.2.       | Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76Persen   | persen | 93,00        | 93,00 | 96,00  | 99,00     | BKPSDM           |
| 3.2.3.       | Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80Persen   | persen | 90,00        | 90,00 | 96,00  | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.4.       | Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial  | persen | 62,24        | 71,10 | 71,66  | 70,77     | BKPSDM           |
| 3.2.5.       | Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu  | persen | 100          | 100   | 100    | 99,49     | BKPSDM           |
| 3.2.6.       | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB   | persen | -            | -     | 40,00  | 30,00     | BKPSDM           |
| 3.2.7.       | Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi   | Persen | 63,00        | 70,00 | 73,00  | 72,82     | BKPSDM           |
| 3.2.8.       | Tingkat Pemenuhan Data Informasi Kepegawaian ASN   | Persen | 90,00        | 90,00 | 94,00  | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.9.       | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | Persen | 100          | 100   | 100    | 100       | BKPSDM           |
| 3.2.10.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan  | Persen | 100          | 100   | 100    | 100       | BKPSDM           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN   | KONDISI AWAL       |                    | TARGET                     | REALISASI          | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
|             |   |          | 2017               | 2018               | 2020                       | 2020               |                  |
|             | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |          |                    |                    |                            |                    |                  |
| 3.2.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                              | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 100                | BKPSDM           |
| 3.2.12.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                     | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 100                | BKPSDM           |
| 3.2.13.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia        | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 100                | BKPSDM           |
| 3.2.14.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 100                | BKPSDM           |
| <b>3.3.</b> | <b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>   |          |                    |                    |                            |                    |                  |
| 3.3.1.      | Opini BPK terhadap LKPD   | Opini    | WTP                | WTP                | WTP                        | WTP                | BKAD             |
| 3.3.2.      | Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal   | Persen   | 2,00               | 2,00               | 2,00                       | 87,93              | BKAD             |
| 3.3.3.      | Persentase Kenaikan total pendapatan daerah   | Persen   | 2.685,00           | 2.816,00           | 6,75                       | 9,27               | BPD              |
| 3.3.4.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 100                | BKAD             |
| 3.3.5.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | Persen   | 100                | 100                | 100                        | 92,85              | BKAD             |
| 3.3.6.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah  | persen   | 100                | 100                | 100                        | 96,53              | BKAD             |
| 3.3.7.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah       | persen   | 100                | 100                | 100                        | 10,00              | BKAD             |
| 3.3.8.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah   | persen   | 100                | 100                | 100                        | 98,15              | BKAD             |
| 3.3.9.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah                                | persen   | 100                | 100                | 100                        | 98,33              | BKAD             |
| 3.3.10.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah                             | persen   | 100                | 100                | 100                        | 100                | BKAD             |
| <b>4.</b>   | <b>FUNGSI LAINNYA</b>   |          |                    |                    |                            |                    |                  |
| <b>4.1.</b> | <b>SETDA</b>  |          |                    |                    |                            |                    |                  |
| 4.1.1.      | Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif   | persen   | 16,00              | 16,00              | 30,00                      | 33,33              | Sosmas           |
| 4.1.2.      | Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi   | Persen   | 31,00              | 31,00              | 45,00                      | 45,00              | Sosmas           |
| 4.1.3.      | Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi   | persen   | 62,00              | 65,00              | 71,00                      | 75,00              | Sosmas           |
| 4.1.4.      | Persentase tokoh agama yang terfasilitasi   | persen   | 32,00              | 32,00              | 71,00                      | 70,83              | Sosmas           |
| 4.1.5.      | Tingkat Capaian Kabupaten Sehat   | Predikat | Swasti Saba Padapa | Swasti Saba Padapa | Swasti Saba Padapa         | Swasti Saba Padapa | Sosmas           |
| 4.1.6.      | Hari Jadi Pemerintah Daerah dan Nasional yang diperingati   | Event    | 3                  | 3                  | 3                          | 1                  | Sosmas           |
| 4.1.7.      | Kebijakan Lingkup PMKS  | jumlah   | 4                  | 4                  | 1 Regulasi 4 Stimulan PMKS | 5                  | Sosmas           |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |                | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|---|--------|--------------|----------------|--------|-----------|------------------|
|             |   |        | 2017         | 2018           | 2020   | 2020      |                  |
| 4.1.8.      | Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)   | ST     | ST           | ST             | ST     | 100       | Tapem            |
| 4.1.9.      | Meningkatnya Kinerja Kecamatan  | Persen | 100          | 100            | 100    | 98,11     | Tapem            |
| 4.1.10.     | Meningkatnya Kinerja Desa   | Persen | 100          | 100            | 100    | 75,00     | Tapem            |
| 4.1.11.     | Tingkat Kepuasan Publik   | Persen | n/a          | 51 OPD Nilai B | 92,98  | 100       | Organisasi       |
| 4.1.12.     | Tingkat Kesesuaian Penataan Organisasi dengan Peraturan   | Persen | n/a          | 81,00          | 7.60   | 100       | Organisasi       |
| 4.1.13.     | Persentase Kelembagaan Menunjang Visi dan Misi  | Persen | n/a          | 90.70          | 3.73   | 100       | Organisasi       |
| 4.1.14.     | Persentase Peraturan Daerah yang di Undangkan   | Persen | 100          | 60,00          | 24,00  | 58,33     | Hukum            |
| 4.1.15.     | Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan   | Persen | 70,00        | 80,00          | 100    | 100       | LPBJ             |
| 4.1.16.     | Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD   | Persen | n/a          | 4,03 Milyar    | 10,00  | 58,68     | Ekbang           |
| 4.1.17.     | Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil   | Persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Ekbang           |
| 4.1.18.     | Tingkat Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi   | Persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Setda            |
| 4.1.19.     | Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik  | Persen | 29,00        | 29 Lokasi      | 31.03  | 100       | Setda            |
| 4.1.20.     | Tingkat Kesuksesan Acara Pimpinan   | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Protokol         |
| 4.1.21.     | Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasikan dan Terpublikasikan  | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Protokol         |
| 4.1.22.     | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah    | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Umum             |
| 4.1.23.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah   | Persen | 50,00        | 50,00          | 70,00  | 100       | Umum             |
| 4.1.24.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah   | persen | 50,00        | 50,00          | 70,00  | 100       | Keuangan         |
| 4.1.25.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah  | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Keuangan         |
| 4.1.26.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah                           | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Keuangan         |
| 4.1.27.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah                        | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Keuangan         |
| <b>4.2.</b> | <b>INSPEKTORAT</b>  |        |              |                |        |           |                  |
| 4.2.1.      | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A   | persen | -            | -              | 25,00  | -         | Inspektorat      |
| 4.2.2.      | Prosentase temuan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti  | persen | -            | 60,00          | 80,00  | 48,27     | Inspektorat      |
| 4.2.3.      | Level maturitas SPIP  | Level  | -            | 1,8            | 3,00   | 1,869     | Inspektorat      |
| 4.2.4.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Kabupaten | persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Inspektorat      |
| 4.2.5.      | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Inspektorat      |
| 4.2.6.      | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Inspektorat      |
| 4.2.7.      | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten       | Persen | 100          | 100            | 100    | 100       | Inspektorat      |



| NO.         | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)  | SATUAN  | KONDISI AWAL |       | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|--|---------|--------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |  |         | 2017         | 2018  | 2020   | 2020      |                  |
| 4.2.8.      | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Inspektorat Kabupaten  | Persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Inspektorat      |
| 4.2.9.      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten                           | Persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Inspektorat      |
| 4.2.10.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten                        | Persen  | 100          | 100   | 100    | 0,00      | Inspektorat      |
| <b>4.3.</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>  |         |              |       |        |           |                  |
| 4.3.1.      | Persentase Perda yang disyahkan  | persen  | 45,45        | 63,64 | 75,00  | 34,61     | Sekretariat DPRD |
| 4.3.2.      | Jumlah Dokumen Hasil Kajian  | dokumen | 1            | 1     | 4      | 4         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.3.      | Jumlah Cetakan dokumentasi hukum   | buku    | 39           | 39    | 39     | 175       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.4.      | Frekuensi Fasilitasi Sosialisasi Perda   | lokasi  | 5            | 5     | 5      | 0         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.5.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Anggaran  | kali    | 5            | 5     | 5      | 2         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.6.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pembentukan Perda   | bulan   | 12           | 12    | 12     | 12        | Sekretariat DPRD |
| 4.3.7.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pengawasan  | bulan   | 12           | 12    | 12     | 12        | Sekretariat DPRD |
| 4.3.8.      | Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat  | kali    | 3            | 3     | 3      | 3         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.9.      | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.10.     | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD  | Persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.11.     | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat DPRD  | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.12.     | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD       | persen  | 100          | 100   | 100    | 2         | Sekretariat DPRD |
| 4.3.13.     | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat DPRD   | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.14.     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD                        | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| 4.3.15.     | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD                     | persen  | 100          | 100   | 100    | 100       | Sekretariat DPRD |
| <b>4.4.</b> | <b>KECAMATAN</b>   |         |              |       |        |           |                  |
| 4.4.1.      | Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan   | persen  | 0,00         | 0,00  | 1,00   | 1,00      | Kecamatan        |
| 4.4.2.      | Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan                            | kali    | n/a          | n/a   | 26     | 26        | Kecamatan        |
| 4.4.3.      | Jumlah Edukasi kebencanaan skala kecamatan   | kali    | n/a          | n/a   | 26     | 26        | Kecamatan        |
| 4.4.4.      | Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak  | persen  | n/a          | n/a   | 100    | 81,90     | Kecamatan        |
| 4.4.5.      | Jumlah potensi unggulan kecamatan  | jenis   | n/a          | n/a   | 52     | 35        | Kecamatan        |
| 4.4.6.      | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya  | desa    | n/a          | n/a   | 26     | 26        | Kecamatan        |
| 4.4.7.      | Indeks Kepuasan Masyarakat   | nilai   | n/a          | n/a   | 85,00  | 84,50     | Kecamatan        |
| 4.4.8.      | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | persen  | n/a          | n/a   | 100    | 98        | Kecamatan        |



| NO.     | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | SATUAN | KONDISI AWAL |      | TARGET | REALISASI | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--------|--------------|------|--------|-----------|------------------|
|         |   |        | 2017         | 2018 | 2020   | 2020      |                  |
| 4.4.10. | Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.11. | Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan  | Persen | 100          | 100  | 100    | 99,00     | Kecamatan        |
| 4.4.12. | Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kecamatan  | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.13. | Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan       | persen | 100          | 100  | 100    | 269       | Kecamatan        |
| 4.4.14. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kecamatan   | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.15. | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan                                | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |
| 4.4.16. | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kecamatan                             | persen | 100          | 100  | 100    | 100       | Kecamatan        |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Tabel 8.6  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Majalengka  
Tahun 2021-2023

| NO   | Indikator  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|--------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|  |  |        | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|  |  |        | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |        |                 |            |            |               |                  |
| <b>PENDIDIKAN</b>  |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah                           | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | DISDIK           |
| 2  | Capaian IKM Perangkat Daerah                             | Nilai  | B               | B          | B          | B             | DISDIK           |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran     | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DISDIK           |
| 4  | APM PAUD   | Persen | 99,2            | 99,40      | 99,45      | 99,45         | DISDIK           |
| 5  | APM SD/MI  | Persen | 97,10           | 97,30      | 97,35      | 97,35         | DISDIK           |
| 6  | APM SMP/MTs  | Persen | 98,10           | 98,35      | 98,55      | 98,55         | DISDIK           |
| 7  | APK Non Formal   | Persen | 86,10           | 86,40      | 86,55      | 86,55         | DISDIK           |
| 9  | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih | Persen | 15,00           | 16,18      | 17,00      | 17,00         | DISDIK           |
| <b>KESEHATAN</b>   |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah                           | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | DINKES           |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah                             | Nilai  | B               | B          | B          | B             | DINKES           |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran     | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DINKES           |
| 4  | Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk           | Persen | 0,001           | 0,001      | 0,001      | 0,001         | DINKES           |
| 5  | Persentase RS Rujukan yang terakreditasi                 | Persen | 1,00            | 1,00       | 1,00       | 1,00          | DINKES           |
| 6  | Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil   | Persen | 90,00           | 90,00      | 90,00      | 90,00         | DINKES           |



| NO                     | Indikator   | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|----------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|                        |   |          | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|                        |   |          | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 7                      | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  | Persen   | 90,00           | 90,00      | 90,00      | 90,00         | DINKES           |
| 8                      | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir  | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | DINKES           |
| 9                      | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | DINKES           |
| 10                     | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | DINKES           |
| 11                     | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   | Persen   | 50,00           | 50,00      | 50,00      | 50,00         | DINKES           |
| 12                     | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   | Persen   | 60,00           | 60,00      | 60,00      | 60,00         | DINKES           |
| 13                     | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persen   | 25,00           | 25,00      | 25,00      | 25,00         | DINKES           |
| 14                     | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | Persen   | 60,00           | 60,00      | 60,00      | 60,00         | DINKES           |
| 15                     | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  | Persen   | 50,00           | 50,00      | 50,00      | 50,00         | DINKES           |
| 16                     | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar   | Persen   | 50,00           | 50,00      | 50,00      | 50,00         | DINKES           |
| 17                     | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar   | Persen   | 90,00           | 90,00      | 90,00      | 90,00         | DINKES           |
| 18                     | Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas   | Persen   | 85,00           | 85,00      | 85,00      | 85,00         | DINKES           |
| 19                     | Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar  | Persen   | 42,00           | 42,00      | 43,00      | 85,00         | DINKES           |
| 20                     | Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan  | Persen   | 85,00           | 85,00      | 90,00      | 90,00         | DINKES           |
| 21                     | Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN   | Keluarga | 192.402         | 192.402    | 195.302    | 195.302       | DINKES           |
| 22                     | Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun   | Pegawai  | 81              | 85         | 90         | 90            | DINKES           |
| 23                     | Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farmasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar   | Persen   | 0,70            | 0,70       | 0,72       | 75,00         | DINKES           |
| 24                     | Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal | Persen   | 0,10            | 0,10       | 0,15       | 0,20          | DINKES           |
| 25                     | Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100Persen   | persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | DINKES           |
| <b>RSUD MAJALENGKA</b> |   |          |                 |            |            |               |                  |
| 1                      | Persentasi ketercapaian Standar Pelayanan Minimal   | persen   | 75,00           | 80,00      | 85,00      | 85,00         | RSUD MAJALENGKA  |
| 2                      | Hasil penilaian Akreditasi  |          | Pari purna      | Pari purna | Pari purna | Pari purna    | RSUD MAJALENGKA  |



| NO   | Indikator  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|---------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|  |  |         | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|  |  |         | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 3  | Presentasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  | persen  | 81,00           | 85,00      | 90,00      | 90,00         | RSUD MAJALENGKA  |
| 4  | Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)  | persen  | 85,00           | 90,00      | 95,00      | 95,00         | RSUD MAJALENGKA  |
| <b>RSUD CIDERES</b>                            |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Nilai   | 77,00           | 77,50      | 100        | 100           | RSUD CIDERES     |
|  | Standar Pelayanan Minimal  | persen  | 73,00           | 82,00      | 95,00      | 95,00         |                  |
|  | Akreditasi Rumas Sakit   | Nilai   | Paripurna       | Paripurna  | Paripurna  | Paripurna     |                  |
| 2  | Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)  | persen  | 80,00           | 82,20      | 100        | 100           |                  |
| <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>       |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai   | BB              | BB         | BB         | BB            | DPUTR            |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai   | B               | B          | B          | B             | DPUTR            |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DPUTR            |
| 4  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi  | Persen  | 73,2            | 75,10      | 77,30      | 77,30         | DPUTR            |
| 5  | persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah angga di seluruh kabupaten/kota | Persen  | 80,00           | 80,41      | 80,50      | 80,50         | DPKPP            |
| 6  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik  | Persen  | 68,52           | 68,58      | 68,66      | 68,66         | DPKPP            |
| 7  | persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik /tidak tersumbat ( Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh drainase di Kewenangan kab/Kota)                            | Persen  | 30,00           | 30,10      | 30,20      | 30,20         | DPKPP            |
| 8  | Persentase infrastruktur permukiman dalam kondisi baik   | Persen  | 79,13           | 82,24      | 85,49      | 85,49         | DPKPP            |
| 9  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani   | Persen  | 79,13           | 17,93      | 37,84      | 37,84         | DPKPP            |
| 10   | Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani   | Unit    | 18              | 15         | 15         | 11            | DPUTR            |
| 11   | Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang ditangani   | Unit    | 11              | 4          | 4          | 12            | DPUTR            |
| 12   | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik   | Persen  | 65,00           | 66,15      | 67,87      | 67,87         | DPUTR            |
| 13   | Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi  | Orang   | 50              | 100        | 100        | 250           | DPUTR            |
| 14   | Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan   | Dokumen | 2               | 1          | 1          | 14            | DPUTR            |
| <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai   | BB              | BB         | BB         | BB            | DPKPP            |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai   | B               | B          | B          | B             | DPKPP            |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DPKPP            |



| NO  | Indikator  | SATUAN     | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|   |  |            | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|   |  |            | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 4   | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                            | unit rumah | 25              | 25         | 25         | 50            | DPKPP            |
| 5   | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampakrelokasi program pemerintah kabupaten/kota | unit rumah | 25              | 25         | 25         | 50            | DPKPP            |
| 6   | Persentase Rumah Tidak Layak Huni  | persen     | 60              | 80         | 100        | 100           | DPKPP            |
| 7   | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak  | Persen     | 58,92           | 69,19      | 79,46      | 79,46         | DPKPP            |
| 8   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani                         | Persen     | 17,93           | 27,84      | 37,84      | 37,84         | DPKPP            |
| 9   | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                           | Persen     | 0,00            | 3,00       | 5,00       | 8,00          | DPKPP            |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                    |  |            |                 |            |            |               |                  |
| 1   | jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum   | Lokasi     | 10              | 5          | 5          | 14            | DPKPP            |
| <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |            |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai      | BB              | BB         | BB         | BB            | SATPOL PP DAMKAR |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai      | B               | B          | B          | B             | SATPOL PP DAMKAR |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen     | 100             | 100        | 100        | 100           | SATPOL PP DAMKAR |
| 4   | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan  | Persen     | 100             | 100        | 100        | 100           | SATPOL PP DAMKAR |
| 5   | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada  | Persen     | 100             | 100        | 100        | 100           | SATPOL PP DAMKAR |
| 6   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai      | BB              | BB         | BB         | BB            | BPBD             |
| 7   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai      | B               | B          | B          | B             | BPBD             |
| 8   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen     | 100             | 100        | 100        | 100           | BPBD             |
| 9   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                  | Jiwa       | 36.250          | 866        | 1.772      | 38.888        | BPBD             |
| 10  | Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana  | Jiwa       | 36.250          | 866        | 1.772      | 38.888        | BPBD             |
| 11  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                       | Jiwa       | 11.000          | 2.000      | 2.000      | 15.000        | BPBD             |
| 12  | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  | persen     | 100             | 100        | 100        | 100           | SATPOL PP DAMKAR |
| 13  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran   | Menit      | 24              | 22         | 20         | 20            | SATPOL PP DAMKAR |
| <b>SOSIAL</b>   |  |            |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai      | BB              | BB         | BB         | BB            | DINSOS           |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai      | B               | B          | B          | B             | DINSOS           |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | persen     | 100             | 100        | 100        | 100           | DINSOS           |
| 4   | Persentase KUBE yang Mandiri   | persen     | 20,00           | 20,00      | 20,00      | 20,00         | DINSOS           |



| NO   | Indikator  | SATUAN          | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|  |  |                 | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|  |  |                 | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 5  | Persentase (Persen) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | persen          | 5,00            | 6,00       | 6,00       | 6,00          | DINSOS           |
| 6  | Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"   | Orang           | 830             | 1.000      | 1.000      | 1.000         | DINSOS           |
| 7  | Persentase Orang miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial  | Pesentase       | 100             | 100        | 100        | 100           | DINSOS           |
| 8  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                       | Persen          | 100             | 100        | 100        | 100           | DINSOS           |
| 9  | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan   | Persen          | 100             | 100        | 100        | 100           | DINSOS           |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b> |  |                 |                 |            |            |               |                  |
| <b>TENAGA KERJA</b>  |  |                 |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai           | BB              | BB         | BB         | BB            | DK2UKM           |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai           | B               | B          | B          | B             | DK2UKM           |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen          | 100             | 100        | 100        | 100           | DK2UKM           |
| 4  | Capaian kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja  | Persen          | -               | 5,00       | 20,00      | 25,00         | DK2UKM           |
| 5  | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi   | Orang           | -               | 40         | 40         | 80            | DK2UKM           |
| 6  | Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri  | Orang           | 250             | 120        | 120        | 490           | DK2UKM           |
| 7  | Tingkat Tenaga kerja yang ditempatkan  | Persen          | 20,00           | 20,00      | 20,00      | 60,00         | DK2UKM           |
| 8  | Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)  | Persen          | 75,00           | 75,00      | 75,00      | 75,00         | DK2UKM           |
| <b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>           |  |                 |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai           | BB              | BB         | BB         | BB            | DP3AKB           |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai           | B               | B          | B          | B             | DP3AKB           |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen          | 100             | 100        | 100        | 100           | DP3AKB           |
| 4  | Persentase ARG pada belanja langsung APBD  | Persen          | 0,09            | 0,1        | 0,13       | 0,13          | DP3AKB           |
| 5  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG   | Persen          | 20,00           | 20,00      | 20,00      | 60,00         | DP3AKB           |
| 6  | Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan  | persen          | 1,45            | 1,45       | 1,45       | 1,45          | DP3AKB           |
| 7  | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)  | Persen          | 0,00018         | 0,00015    | 0,00013    | 0,00013       | DP3AKB           |
| 8  | Persentase Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri   | Persen          | 0,50            | 0,70       | 0,90       | 0,90          | DP3AKB           |
| 9  | Capaian Data Gender dan Anak   | Persen          | 35,00           | 40,00      | 60,00      | 60,00         | DP3AKB           |
| 10   | Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak   | Nilai (Minimal) | 550             | 600        | 700        | 700           | DP3AKB           |
| 11   | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten   | Persen          | 0,0038          | 0,0041     | 0,0043     | 0,0043        | DP3AKB           |



| NO  | Indikator   | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|   |   |         | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|   |   |         | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |   |         |                 |            |            |               |                  |
| 1   | TFR (Total Fertility Rate)  | Point   | 2,27            | 2,26       | 2,25       | 2,25          | DP3AKB           |
| 2   | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)   | Persen  | 79,96           | 79,97      | 79,98      | 79,98         | DP3AKB           |
| 3   | Persentase Keluarga Pra Sejahtera   | Persen  | 31,13           | 31,11      | 31,08      | 31,08         | DP3AKB           |
| <b>PANGAN</b>   |   |         |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai   | BB              | BB         | BB         | BB            | DKP0             |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai   | B               | B          | B          | B             | DKP1             |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DKP2             |
| 4   | Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DKP4             |
| 5   | Peningkatan skor PPH  | Persen  | 0,50            | 0,50       | 0,50       | 0,50          | DKP5             |
| 6   | Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DKP6             |
| 7   | Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)  | Desa    | 4               | 4          | 4          | 20            | DKP8             |
| 8   | Capaian Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DKP10            |
| <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                               |   |         |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai   | BB              | BB         | BB         | BB            | DLH              |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai   | B               | B          | B          | B             | DLH              |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DLH              |
| 4   | Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup   | Dokumen | 3               | 100        | 4          | 3             | DLH              |
| 5   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota  | Poin    | 58,16           | 59,36      | 60,55      | 60,55         | DLH              |
| 6   | Indeks Tutupan Lahan  | Poin    | 50,98           | 50,99      | 51,00      | 51,00         | DLH              |
| 7   | Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DLH              |
| 8   | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen  | 100             | 100        | 100        | 300           | DLH              |
| 9   | Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DLH              |
| 10  | jumlah masyarakat dan lembaga yang memperoleh Penghargaan   | Buah    | 9               | 9          | 9          | 27            | DLH              |
| 11  | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti   | Persen  | 100             | 100        | 100        | 300           | DLH              |
| 12  | Persentase penanganan sampah yang tertangani  | Persen  | 98,00           | 99,00      | 99,00      | 99,00         | DLH              |
| 13  | Persentase Pengembangan dan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka   | Persen  | 12,37           | 45,91      | 100        | 100           | DLH              |
| <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |   |         |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah  | Nilai   | BB              | BB         | BB         | BB            | DISDUKCAPIL      |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah  | Nilai   | B               | B          | B          | B             | DISDUKCAPIL      |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DISDUKCAPIL      |



| NO                                       | Indikator  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|--------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|  |  |        | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|  |  |        | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 4  | Persentase Kepemilikan KTP   | Persen | 85,00           | 90,00      | 95,00      | 95,00         | DISDUKCAPIL      |
| 5  | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak  | Persen | 15,00           | 20,00      | 25,00      | 25,00         | DISDUKCAPIL      |
| 6  | Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga   | Persen | 75              | 85         | 95         | 95            | DISDUKCAPIL      |
| 7  | Persentasi Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian   | Persen | 94,00           | 95,00      | 97,00      | 97,00         | DISDUKCAPIL      |
| 8  | Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DISDUKCAPIL      |
| 9  | Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik  | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DISDUKCAPIL      |
| 10                                       | Persentase OPD yang telah memanfaatkan datakependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama  | Persen | 23,00           | 24,07      | 27,78      | 27,78         | DISDUKCAPIL      |
| 11                                       | Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan  | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DISDUKCAPIL      |
| <b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | N/A             | BB         | BB         | BB            | DPMD             |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | N/A             | B          | B          | B             | DPMD             |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen | N/A             | 100        | 100        | 100           | DPMD             |
| 4  | Persentase peningkatan status desa mandiri   | Persen | 5,40            | 7,88       | 10,30      | 18,18         | DPMD             |
| 5  | Jumlah Pelaksana Mou yang dilaksanakan dengan pihak ke tiga  | MoU    | 8               | 8          | 8          | 24            | DPMD             |
| 6  | Persentase desa yang menyusun adminstrasi pemerintahan desa sesuai peraturan   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DPMD             |
| 7  | Persentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan lembaga masyarakat desa  | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DPMD             |
| <b>PERHUBUNGAN</b>                       |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | DISHUB           |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | DISHUB           |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DISHUB           |
| 4  | Persentase Capaian Desa Yang Terlayani Angkutan Umum   | persen | 60,00           | 75,00      | 80,00      | 80,00         | DISHUB           |
| 5  | Persentase Pemasangan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  | persen | 46,00           | 50,00      | 54,00      | 54,00         | DISHUB           |
| 6  | Persentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor   | persen | 90,00           | 90,00      | 90,00      | 90,00         | DISHUB           |
| <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>        |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | DISKOMINFO       |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | DISKOMINFO       |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | DISKOMINFO       |
| 4  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 60,00           | 80,00      | 100        | 100           | DISKOMINFO       |



| NO  | Indikator  | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|------------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|   |  |                  | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|   |  |                  | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 5   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  | Persen           | 60,00           | 80,00      | 100        | 100           | DISKOMINFO       |
| 6   | Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik   | Lokasi           | 6               | 6          | 6          | 6             | DISKOMINFO       |
| 7   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen           | 80,00           | 100        | 100        | 100           | DISKOMINFO       |
| <b>PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>     |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik  | Persen           | 50,00           | 75,00      | 100        | 175           | DISKOMINFO       |
| <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b> |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Tingkat koperasi yang diawasi dan diperiksa  | Persen           | 10,00           | 16,22      | 16,22      | 32,44         | DK2UKM           |
| 2   | Tingkat koperasi sehat   | Persen           | -               | 10,00      | 10,00      | 20,00         | DK2UKM           |
| 3   | Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan  | Orang            | N/A             | 125        | 125        | 250           | DK2UKM           |
| 4   | Tingkat Koperasi yang berkualitas  | Persen           | 10,00           | 20,00      | 20,00      | 50,00         | DK2UKM           |
| 5   | Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin  | Persen           | 3,00            | 3,00       | 3,00       | 9,00          | DK2UKM           |
| 6   | Tingkat Usaha Mikro yang menjadi wirausaha   | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DK2UKM           |
| <b>TRANSMIGRASI</b>                       |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi  | persen           | 0,00            | 1,00       | 1,00       | 2,00          | DK2UKM           |
| <b>PENANAMAN MODAL</b>                    |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai            | BB              | BB         | BB         | BB            | DPMTSP           |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai            | B               | B          | B          | B             | DPMTSP           |
| 3   | Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DPMTSP           |
| 4   | Peningkatan investasi di kabupaten/kota  | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DPMTSP           |
| 5   | Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi  | Sarana/Prasarana | N/A             | 5          | 5          | 5             | DPMTSP           |
| 6   | Tingkat Perizinan Yang diterbitkan   |                  | 100             | 100        | 100        | 100           | DPMTSP           |
| 7   | Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban  | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DPMTSP           |
| 8   | Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten  | Persen           | N/A             | 100        | 100        | 100           | DPMTSP           |
| <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>           |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai            | BB              | BB         | BB         | BB            | DISPORA          |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai            | B               | B          | B          | B             | DISPORA          |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DISPORA          |
| 4   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda                                     | Persen           | 2,00            | 2,00       | 3,00       | 7,00          | DISPORA          |
| 5   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                          | Persen           | 44,00           | 48,00      | 52,00      | 100           | DISPORA          |
| 6   | Peningkatan prestasi olahraga  | Persen           | 40,00           | 43,00      | 45,00      | 80,00         | DISPORA          |
| 7   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga   | Persen           | 70,00           | 80,00      | 80,00      | 80,00         | DISPORA          |
| 8   | Peningkatan Infrastruktur keolahragaan   | Persen           | 0,50            | 0,80       | 0,80       | 2,10          | DISPORA          |
| 9   | Tingkat Partisipasi Kepramukaan  | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DISPORA          |



| NO                            | Indikator  | SATUAN           | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|                               |  |                  | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|                               |  |                  | TARGET          | TARGET     | TARGET     | TARGET        |                  |
| <b>STATISTIK</b>              |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1                             | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen           | 80,00           | 100        | 100        | 100           | DISKOMINFO       |
| 2                             | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | Persen           | 80,00           | 100        | 100        | 100           | DISKOMINFO       |
| <b>KEBUDAYAAN</b>             |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1                             | Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan   | Event            | 35              | 35         | 35         | 105           | DISPARBUD        |
| 2                             | jumlah seni Tradisional yang direvitalisasi  | Seni Tradisional | 1               | 1          | 1          | 2             | DISPARBUD        |
| 3                             | jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola  | Jumlah           | N/A             | 1          | 1          | 3             | DISPARBUD        |
| 4                             | Persentase cagar budaya yang dilestarikan  | Persen           | 1,00            | 5,00       | 5,00       | 11,00         | DISPARBUD        |
| 5                             | jumlah Museum yang direvitalisasi  | Museum           | N/A             | 1          | 1          | 2             | DISPARBUD        |
| <b>PERPUSTAKAAN</b>           |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1                             | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat   | Poin             | 47,00           | 49,00      | 51,00      | 51,00         | ARPUSDA          |
| 2                             | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | POIN             | 1,79            | 1,80       | 1,81       | 1,81          | ARPUSDA          |
| <b>KEARSIPAN</b>              |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1                             | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai            | BB              | BB         | BB         | BB            | ARPUSDA          |
| 2                             | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai            | B               | B          | B          | B             | ARPUSDA          |
| 3                             | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | ARPUSDA          |
| 4                             | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban                  | persen           | 45,00           | 50,00      | 52,00      | 52,00         | ARPUSDA          |
| 5                             | Rasio pengelola arsip  | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | ARPUSDA          |
| 6                             | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban   | Persen           | 45,00           | 50,00      | 52,00      | 52,00         | ARPUSDA          |
| <b>URUSAN PILIHAN</b>         |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1                             | Meningkatnya produksi perikanan tangkap  | Ton              | 10              | 10         | 10         | 20            | DKP3             |
| 2                             | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten   | Persen           | 10,00           | 10,00      | 2,00       | 10,00         | DKP3             |
| 3                             | Jumlah omzet pemasaran produk perikanan  | Persen           | 5,00            | 5,00       | 10,00      | 10,00         | DKP3             |
| 4                             | Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat   | Jumlah           | 30              | 30         | 30         | 30            | DKP4             |
| <b>PARIWISATA</b>             |  |                  |                 |            |            |               |                  |
| 1                             | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai            | BB              | BB         | BB         | BB            | DISPARBUD        |
| 2                             | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai            | B               | B          | B          | B             | DISPARBUD        |
| 3                             | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen           | 100             | 100        | 100        | 100           | DISPARBUD        |
| 4                             | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku   | persen           | 1,10            | 1,10       | 1,10       | 1,10          | DISPARBUD        |
| 5                             | Persentase Desa Wisata Berkembang  | persen           | 15,00           | 24,00      | 24,00      | 63,00         | DISPARBUD        |



| NO   | Indikator  | SATUAN  | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|--|--|---------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|  |  |         | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|  |  |         | TARGET          | TARGET     | TARGET     | TARGET        |                  |
| 6  | Jumlah usaha pariwisata yang distandarisasi  | persen  | N/A             | 30,00      | 30,00      | 60,00         | DISPARBUD        |
| 7  | Persentase Jumlah daya tarik yang dipromosikan   | persen  | 10,00           | 10,00      | 10,00      | 30,00         | DISPARBUD        |
| 8  | Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif  | persen  | N/A             | 20,00      | 20,00      | 40,00         | DISPARBUD        |
| 9  | Jumlah Desa Tematik Kreatif  | Desa    | N/A             | 6          | 6          | 12            | DISPARBUD        |
| 10   | sertifikasi pelaku ekonomi kreatif   | persen  | 5               | 5          | 5          | 15            | DISPARBUD        |
| <b>PERTANIAN</b>   |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Produktivitas pertanian per hektar per tahun   | Persen  | 80,00           | 80,00      | 85,00      | 85,00         | DKP3             |
| 2  | Persentase ketersediaan prasarana Pertanian  | Persen  | 60,00           | 60,00      | 65,00      | 3,50          | DKP3             |
| 3  | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                              | Persen  | 30,00           | 30,00      | 50,00      | 80,00         | DKP3             |
| 4  | Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian                           | Hektar  | 5.000           | 5.000      | 5.000      | 500           | DKP3             |
| 5  | Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian   | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DKP3             |
| <b>PERDAGANGAN</b>   |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Persen  | BB              | BB         | BB         | BB            | DISPERDAGIN      |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai   | B               | B          | B          | B             | DISPERDAGIN      |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | DISPERDAGIN      |
| 4  | Infrastruktur Perdagangan yang dibangun  | unit    | 1               | 1          | 1          | 3             | DISPERDAGIN      |
| 5  | Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif  | Unit    | 3               | 3          | 3          | 9             | DISPERDAGIN      |
| 6  | Tingkat kinerja realisasi pupuk  | Persen  | N/A             | 100        | 100        | 100           | DISPERDAGIN      |
| 7  | Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat                              | Kali    | 96              | 96         | 96         | 96            | DISPERDAGIN      |
| 8  | Meningkatnya nilai ekspor  | Persen  | 10,00           | 10,00      | 10,00      | 10,00         | DISPERDAGIN      |
| 9  | Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen  | 20,00           | 20,00      | 20,00      | 20,00         | DISPERDAGIN      |
| 10   | Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri   | Kali    | 12              | 12         | 10         | 12            | DISPERDAGIN      |
| <b>PERINDUSTRIAN</b>   |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten  | IKM     | 40              | 40         | 40         | 40            | DISPERDAGIN      |
| 2  | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini  | Dokumen | 1               | 1          | 1          | 3             | DISPERDAGIN      |
| <b>URUSAN PENUNJANG</b>  |  |         |                 |            |            |               |                  |
| <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |  |         |                 |            |            |               |                  |
| 1  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai   | BB              | BB         | BB         | BB            | BAPPEDALITB ANG  |
| 2  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai   | B               | B          | B          | B             | BAPPEDALITB ANG  |
| 3  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen  | 100             | 100        | 100        | 100           | BAPPEDALITB ANG  |



| NO  | Indikator  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|--------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|   |  |        | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|   |  |        | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 4   | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  | Persen | 96,00           | 98,00      | 99,00      | 99,00         | BAPPEDALITB ANG  |
| 5   | Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD | Persen | 96,00           | 98,00      | 99,00      | 99,00         | BAPPEDALITB ANG  |
| 6   | Tingkat Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD                                      | Persen | 96,00           | 98,00      | 99,00      | 99,00         | BAPPEDALITB ANG  |
| <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                      |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan  | persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BAPPEDALITB ANG  |
| 2   | Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan   | persen | 80,00           | 85,00      | 95,00      | 95,00         | BAPPEDALITB ANG  |
| <b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | BKPSDM           |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah (B)   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | BKPSDM           |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran ( C )   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BKPSDM           |
| 4   | Rasio pegawai Fungsional   | Persen | 68,00           | 70,00      | 71,00      | 71,00         | BKPSDM           |
| 5   | Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani  | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BKPSDM           |
| 6   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Persen)  | Rasio  | 6,00            | 6,51       | 7,07       | 7,07          | BKPSDM           |
| 7   | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural  | Persen | 58,00           | 59,00      | 60,00      | 60,00         | BKPSDM           |
| 8   | Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi  | Persen | 50,00           | 60,00      | 60,00      | 60,00         | BKPSDM           |
| <b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>                         |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | BKAD             |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | BKAD             |
| 3   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BKAD             |
| 4   | Penyampaian LKPD Tepat Waktu   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BKAD             |
| 5   | Aset yang diamankan secara fisik dan Legal   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BKAD             |
| 6   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | BAPENDA          |
| 7   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | BAPENDA          |
| 8   | Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran  | persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BAPENDA          |
| 9   | Capaian realisasi Penerimaan PAD   | persen | 100             | 100        | 100        | 100           | BAPENDA          |
| <b>FUNGSI LAINNYA</b>                                   |  |        |                 |            |            |               |                  |
| <b>SETDA</b>  |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1   | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | SETDA            |
| 2   | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | SETDA            |
| 3   | Capaian IKM Kabupaten  | Indek  | 100             | 100        | 100        | 100           | SETDA            |
| 4   | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen | N/A             | 100        | 100        | 100           | SETDA            |
| 5   | Capaian Lakip Kabupaten  | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | SETDA            |
| 6   | Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif  | Persen | 35,00           | 40,00      | 45,00      | 45,00         | SETDA            |
| 7   | Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi  | Persen | 50,00           | 55,00      | 60,00      | 60,00         | SETDA            |



| NO                                 | Indikator  | SATUAN   | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------------|--|----------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|                                    |  |          | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|                                    |  |          | TARGET          | TARGET     | TARGET     | TARGET        |                  |
| 8                                  | Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi  | Persen   | 74,00           | 77,00      | 80,00      | 80,00         | SETDA            |
| 9                                  | Persentase tokoh agama yang terfasilitasi  | Persen   | 56,00           | 62,00      | 68,00      | 68,00         | SETDA            |
| 10                                 | Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  | Predikat | Tinggi          | Tinggi     | Tinggi     | Tinggi        | SETDA            |
| 11                                 | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Regulasi dan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM             | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | SETDA            |
| 12                                 | Tingkat Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan                       | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | SETDA            |
| 13                                 | Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil dilaksanakan                                 | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | SETDA            |
| 14                                 | Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan  | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | SETDA            |
| 15                                 | Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD  | Persen   | 5,00            | 5,00       | 5,00       | 5,00          | SETDA            |
| <b>INSPEKTORAT</b>                 |  |          |                 |            |            |               |                  |
| 1                                  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai    | BB              | BB         | BB         | BB            | INSPEKTORAT      |
| 2                                  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai    | B               | B          | B          | B             | INSPEKTORAT      |
| 3                                  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                       | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | INSPEKTORAT      |
| 4                                  | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                         | Persen   | 80,00           | 90,00      | 100        | 100           | INSPEKTORAT      |
| 5                                  | Tingkat Maturitis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                | Level    | 3               | 3          | 4          | 4             | INSPEKTORAT      |
| 6                                  | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                         | Level    | 3               | 3          | 4          | 4             | INSPEKTORAT      |
| <b>SEKRETARIAT DPRD</b>            |  |          |                 |            |            |               |                  |
| 1                                  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai    | BB              | BB         | BB         | BB            | Setwan           |
| 2                                  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai    | B               | B          | B          | B             | Setwan           |
| 3                                  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                       | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | Setwan           |
| 4                                  | Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD              | persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | Setwan           |
| 5                                  | Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | Setwan           |
| <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>     |  |          |                 |            |            |               |                  |
| <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |  |          |                 |            |            |               |                  |
| 1                                  | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai    | BB              | BB         | BB         | BB            | KESBANGPOL       |
| 2                                  | Capaian SKM Perangkat Daerah   | Nilai    | B               | B          | B          | B             | KESBANGPOL       |
| 3                                  | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran                                       | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | KESBANGPOL       |
| 4                                  | Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan                              | Kegiatan | 5               | 5          | 8          | 8             | KESBANGPOL       |
| 5                                  | Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri  | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | KESBANGPOL       |
| 6                                  | Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan         | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | KESBANGPOL       |
| 7                                  | Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya        | Persen   | 100             | 100        | 100        | 100           | KESBANGPOL       |



| NO               | Indikator  | SATUAN | CAPAIAN KINERJA |            |            | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH |
|------------------|--|--------|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|                  |  |        | TAHUN 2021      | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TARGET        |                  |
|                  |  |        | TARGET          | TARGET     | TARGET     |               |                  |
| 8                | Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | KESBANGPOL       |
| <b>KECAMATAN</b> |  |        |                 |            |            |               |                  |
| 1                | Capaian Sakip Perangkat Daerah   | Nilai  | BB              | BB         | BB         | BB            | KECAMATAN        |
| 2                | Capaian IKM Perangkat Daerah   | Nilai  | B               | B          | B          | B             | KECAMATAN        |
| 3                | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | KECAMATAN        |
| 4                | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan                             | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | KECAMATAN        |
| 5                | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | KECAMATAN        |
| 6                | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan                         | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | KECAMATAN        |
| 7                | Peningkatan Wawasan kebangsaan   | Persen | 100             | 100        | 100        | 100           | KECAMATAN        |
| 8                | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya  | Persen | 10,00           | 10,00      | 10,00      | 10,00         | KECAMATAN        |

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

# **BAB IX**



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan hasil penyesuaian terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta hasil evaluasi atas pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi misi dan janji Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan berbagai kondisi, permasalahan, isu strategis baik skala lokal, regional maupun global, mengacu kepada RPJPD dan RTRW Kabupaten Majalengka, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi



- perangkat daerah dengan mempedomani Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kabupaten. Perangkat Daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kabupaten sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing;
  3. Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, RKPD Tahun 2022 dan 2023, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan juga berpedoman kepada RKPD.
  4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Tahun 2023 adalah periode terakhir RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi, penyelarasan dengan program strategis nasional yang tertuang dalam RKP,



mempedomani peraturan lainnya yang mengatur penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta mempedomani tata cara penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2018–2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Majalengka RAHARJA.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198503 1 003